



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

LPPD

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT
TAHUN 2023**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, barokah, karunia, dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan kewajiban kami dalam mengemban amanah untuk melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023 dengan baik dan lancar sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 ini dapat terselesaikan dengan baik. LPPD merupakan sebuah kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Wakil Pemerintahan Pusat merupakan pelaksanaan amanat dari Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan sebuah kewajiban bagi setiap Pemerintah Daerah untuk melaporkan capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah pada pelaksanaan 32 urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangannya.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian pemerintah daerah harus dapat menjalankan seluruh urusan pemerintahan secara baik dan bijaksana untuk mewujudkan *good government* dan *clean governance* dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di samping itu, laporan ini disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Penyusunan LPPD merupakan wujud pertanggungjawaban pelaporan pelaksanaan dari urusan Pemerintahan daerah dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat setiap tahunnya. LPPD bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah didalam penyajian capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang nantinya akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat. LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Capaian Kinerja Makro, Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah. Selain substansi tersebut di atas, LPPD juga memuat laporan penerapan Standar Pelayanan Minimal yang memuat hasil capaian penerapan standar pelayanan minimal, kendala penerapan standar pelayanan minimal dan ketersediaan anggaran dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Diharapkan melalui LPPD Kabupaten Bangka Barat ini dapat dijadikan bahan bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi capaian kinerja penyelenggaraan setiap tahunnya dan dapat menjadi parameter bagi kepala daerah untuk menyusun arah kebijakan pembangunan daerah yang akan berdampak kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Tentunya dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah tidak terlepas dari adanya kendala, tantangan maupun hambatan namun dalam hal ini merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Daerah di dalam menyusun sebuah strategi dan arah kebijakan untuk menyelesaikan seluruh kendala yang dihadapi tersebut yang nantinya berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setiap tahunnya.

Dalam kesempatan yang baik ini, Kami haturkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 dengan seluruh tenaga dan kemampuan yang dimiliki. Semoga melalui LPPD ini dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Pusat dalam memberikan pembinaan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah di tahun selanjutnya untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pemerintahan, dan dapat menjadi telaah pertimbangan yang strategis dalam menentukan kebijakan daerah di masa depan serta dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Barat. Kami menyadari bahwa pelaksanaan proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Barat pada Tahun Anggaran 2023 tidak luput dari kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun senantiasa kami harapkan untuk perbaikan atau penyempurnaan laporan di masa yang akan datang dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

Akhirnya, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Bangka Barat serta pihak-pihak lain yang telah bersama-sama dengan pemerintah daerah dalam membangun sinergitas di Kabupaten Bangka Barat untuk mewujudkan Bangka Barat Yang Maju, Mandiri, dan Bermartabat". Semoga Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa mendatang akan lebih baik lagi dan membawa dampak pada kemajuan pembangunan daerah yang nantinya akan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Bangka Barat.

Mentok, Maret 2024

BUPATI BANGKA BARAT,



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR DIAGRAM	xvii
DAFTAR GRAFIK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	I.1
1.1. Latar Belakang.....	I.1
1.1.1. Penjelasan Umum.....	I.1
a. Dasar Hukum.....	I.1
b. Data Geografis Wilayah.....	I.2
c. Jumlah Penduduk (Data Demografi).....	I.5
d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan.....	I.6
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Dan Pegawai Pemerintah.....	I.7
f. Realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.....	I.9
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah.....	I.14
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah.....	I.14
b. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	I.16
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.....	I.17
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.....	I. 19
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	I.251
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	II.1
2.1. Capaian Kinerja Makro.....	II.1
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	II.7
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran.....	II.8
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	II.33
2.2.3. Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II.43
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	II.45
2.3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	II.45
2.3.2. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	II.47
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	III.1
3.1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.....	III.1

3.2.	Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten	III.1
3.3.	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan.....	III.1
3.3.1.	Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten	III.1
3.1.1.	Target Kinerja	III.1
3.1.2.	Target Kinerja	III.3
3.3.2.	Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten	III.4
3.3.3.	Permasalahan dan Kendala.....	III.4
3.3.4.	Saran dan Tindak Lanjut.....	III.4

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR

PELAYANAN MINIMAL	IV.1
4.1. Urusan Pendidikan	IV.4
4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar	IV.4
4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah	IV.4
4.1.3. Realisasi.....	IV.4
4.1.4. Alokasi Anggaran	IV.11
4.1.5. Dukungan Personil	IV.13
4.1.6. Permasalahan dan Solusi	IV.14
4.2. Urusan Kesehatan.....	IV.15
4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar	IV.15
4.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah	IV.15
4.2.3. Realisasi.....	IV.16
4.2.4. Alokasi Anggaran	IV.42
4.2.5. Dukungan Personil	IV.43
4.2.6. Permasalahan dan Solusi	IV.46
4.3. Urusan Pekerjaan Umum.....	IV.46
4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar	IV.46
4.3.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah	IV.46
4.3.3. Realisasi.....	IV.47
4.3.4. Alokasi Anggaran	IV.52
4.3.5. Dukungan Personil	IV.53
4.3.6. Permasalahan dan Solusi	IV.53
4.4. Urusan Perumahan Rakyat	IV.54
4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar	IV.54
4.4.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah	IV.54
4.4.3. Realisasi.....	IV.55
4.4.4. Alokasi Anggaran	IV.61
4.4.5. Dukungan Personil	IV.62
4.4.6. Permasalahan dan Solusi	IV.62
4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV.62

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar	IV.62
4.5.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah	IV.63
4.5.3. Realisasi.....	IV.63
4.5.4. Alokasi Anggaran	IV.74
4.5.5. Dukungan Personil	IV.77
4.5.6. Permasalahan dan Solusi	IV.77
4.6. Urusan Sosial.....	IV.78
4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar	IV.78
4.6.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah	IV.78
4.6.3. Realisasi.....	IV.79
4.6.4. Alokasi Anggaran	IV.84
4.6.5. Dukungan Personil	IV.85
4.6.6. Permasalahan dan Solusi	IV.85
4.7. Program dan Kegiatan	IV.86
BAB V PENUTUP	V.1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Penjelasan Umum

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288).

b. Data Geografis Wilayah

Wilayah Kabupaten Bangka Barat berada di ujung barat Pulau Bangka. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bangka Barat berbatasan dengan laut, hal tersebut menjadikan setiap kecamatan di Kabupaten Bangka Barat memiliki garis pantai dan laut (gambar 1).

Gambar I.1
Letak Geografis Kabupaten Bangka Barat



Sumber: www.wikipedia.org

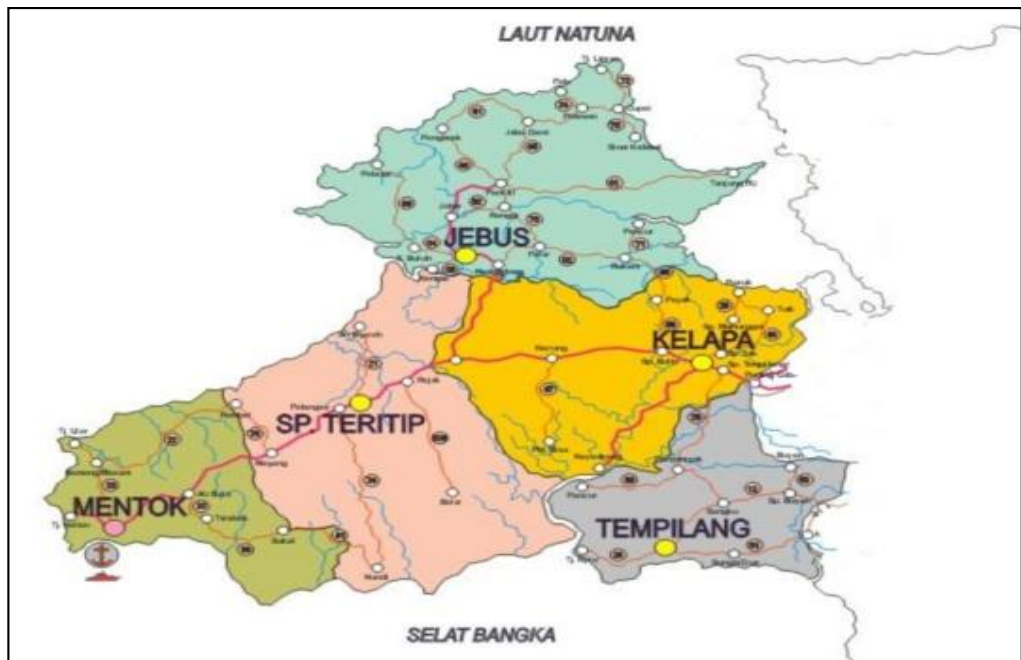
Kabupaten yang dikenal juga dengan “Negeri Sejiran Setason” ini memiliki posisi yang strategis sebagai jembatan menuju pusat-pusat ekonomi regional Asia Tenggara seperti Singapura, Johor dan Kuala Lumpur (Malaysia), serta Bangkok (Thailand). Dengan memanfaatkan posisi yang strategis ini dan telah ditetapkan Kota Muntok sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) maka peluang kerjasama jasa dan perdagangan (intra-regional) dengan Palembang, Batam, Jakarta, dan Pontianak terbuka lebar. Hal tersebut menjadikan Kabupaten Bangka Barat memiliki peran yang sangat strategis dalam penciptaan pusat pertumbuhan wilayah, baik pada skala regional maupun nasional.

Secara geografis posisi Kabupaten Bangka Barat berada pada posisi antara 105° 00’-106° 00’ Bujur Timur dan 01° 00’-02° 10’ Lintang Selatan dan terletak di ujung barat Pulau Bangka yang membentuk semenanjung dengan batas-batas sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Natuna;
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Bangka;
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Kelabat, Kecamatan Bakam, Kecamatan Puding Besar dan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Bangka.

Sesuai dengan RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 - 2034, luas wilayah Kabupaten Bangka Barat sekitar 284.886,05 ha. Kabupaten Bangka Barat juga memiliki 36 pulau-pulau kecil dengan luasan ±214,85 ha dan sebagian dari pulau-pulau tersebut belum berpenghuni. Kabupaten Bangka Barat juga memiliki kawasan pesisir yang cukup luas dengan panjang pantai yang dimiliki adalah 297,38 km.

Gambar I.2
Peta Geografis Kabupaten Bangka Barat



Wilayah daratan Kabupaten Bangka Barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Bangka. Berdasarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Bangka Barat dengan Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Desa-desanya di Kabupaten Bangka Barat yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut:

- 1) Desa Tuik Kecamatan Kelapa yang berbatasan dengan Desa Pangkal Niur Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka;
- 2) Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa yang berbatasan dengan Desa Banyuasin Kecamatan Riau Silip dan Desa Maras Senang Kabupaten Bangka;
- 3) Desa Simpang Yul Kecamatan Tempilang yang berbatasan dengan Desa Kapuk Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka;
- 4) Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang yang berbatasan dengan Desa Neknang Kecamatan Bakam dan Desa Saing Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka;
- 5) Desa Sangku Kecamatan Tempilang yang berbatasan dengan Desa Kota Waringin Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka;
- 6) Desa Sinar Surya Kecamatan Tempilang yang berbatasan dengan Dusun Sungai Dua Desa Kota Waringin Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka.

Iklm di Kabupaten Bangka Barat termasuk dalam iklim tropis dan basah, yaitu daerah dengan bulan basah selama 7–9 bulan dan bulan kering selama 3 bulan per tahun pada keadaan normal. Curah hujan tahunan di wilayah Kabupaten Bangka Barat berkisar > 2.000 mm/tahun dengan jumlah hari hujan tahunan rata-rata > 200 hari/tahun. Variasi curah hujan berkisar antara 84,5 mm–406,1 mm setiap bulannya dengan curah hujan terendah pada bulan Februari. Intensitas penyinaran matahari rata-rata bervariasi antara 19,0%–57,3% dengan tekanan udara antara 1008,9–1011,1 mbs. Intensitas penyinaran matahari rata-rata 1,8 sampai 3,7 jam per hari pada musim hujan dan 3,8 sampai 6,7 jam per hari pada musim kemarau dengan kecepatan angin

rata-rata antara 1,6 sampai 4,4 knots tiap bulannya. Arah angin terbanyak terjadi di bulan Desember dan Januari dari arah Utara, pada bulan April dari arah Barat kemudian pada bulan berikutnya bergeser ke arah Selatan, Tenggara dan Timur dan pada bulan Nopember kembali ke arah Barat. Suhu udara per bulannya rata-rata antara 26,20°C sampai 27,80°C dengan suhu minimum rata-rata 23,50°C dan suhu maksimum rata-rata 31,10°C serta tingkat kelembaban rata-rata berkisar 80% - 87%.

Topografi Kabupaten Bangka Barat relatif bervariasi yaitu dengan kemiringan lereng antara 0–40%. Secara umum topografi Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 4% berbukit, 51% berombak dan bergelombang, 20% datar dan 25% nya adalah rawa-rawa.

Sungai–sungai di Kabupaten Bangka Barat berjumlah 470 sungai dan tersebar di seluruh kecamatan. Sungai Kampak, Sungai Antan, Sungai Penyampak, Sungai Kayu Arang, Sungai Muntok, Sungai Menduyung, Sungai Sukal dan Sungai Pelanggar adalah sungai-sungai besar yang ada di Bangka Barat. Namun sungai–sungai tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal untuk sektor lain, terutama karena sungai-sungai tersebut sudah mulai berkurang debit airnya dan kualitas air yang menurun disebabkan masalah lingkungan dan dampak dari penambangan timah rakyat. Kabupaten Bangka Barat memiliki 87 Daerah Aliran Sungai (DAS) dan luas keseluruhan DAS mencapai 96.513 ha, dengan DAS terluas adalah DAS Mancung (59.844 ha)

Di kawasan hutan wilayah Bangka Barat masih banyak terdapat jenis binatang liar, seperti rusa, lutung, beruk, monyet, babi, trenggiling, napuh, musang. Di kawasan hutan wilayah Bangka Barat juga masih dapat ditemukan jenis burung dan unggas liar seperti beberapa jenis murai, tekukur, pipit, kalong, elang, ayam hutan dan lain-lain. Selain itu, seperti lazimnya daerah beriklim tropis, hutan di wilayah ini juga dihuni oleh berbagai jenis ular-ular besar, salah satunya adalah beberapa jenis ular phyton, jenis ular-ular berbisa seperti ular sendok/kobra, ular tepung ari dan beberapa jenis buaya. Walaupun berada dalam tataran Kepulauan Sumatera, kawasan hutan Bangka Barat tidak dihuni oleh jenis binatang-binatang seperti gajah, harimau dan lainnya.

Jenis tumbuh-tumbuhan yang terdapat di kawasan hutan wilayah Bangka Barat terdiri dari berbagai macam kayu dan bunga seperti ramin, meranti, kapak, jelutung, pulai, gelam, bilangor, meranti rawa, cempedak air, mahang, bakau, anggrek hutan, ketakung (kantong semar) dan lain sebagainya. Jenis kayu khas yang hanya terdapat di Pulau Bangka adalah Pohon Pelawan (ipoa mangarawan).

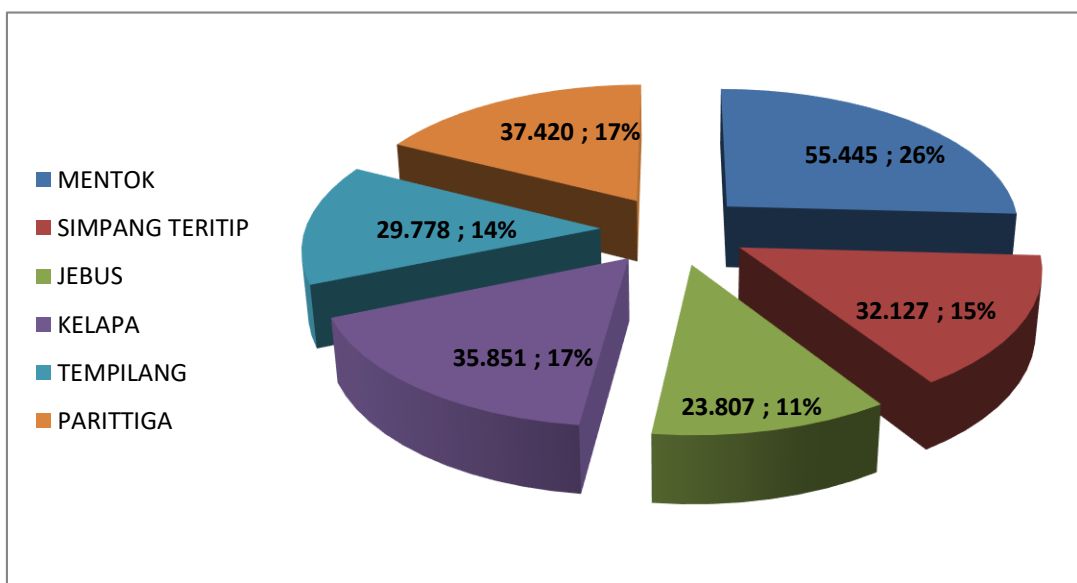
c. Jumlah Penduduk (Data Demografi)

Masyarakat Kabupaten Bangka Barat merupakan masyarakat yang heterogen yang terdiri dari berbagai etnis seperti Melayu, Tionghoa, Arab, Jawa, Madura, Bugis, Buton, serta beberapa suku lainnya dari daratan Pulau Sumatera. Mayoritas penduduk Kabupaten Bangka Barat adalah pemeluk agama Islam.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat per Semester II tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat adalah 214.428 jiwa yang terdiri dari 110.543 jiwa laki-laki (51,55%) dan

103.885 jiwa perempuan (48,451%). Jumlah tersebut meningkat 7.491 jiwa atau 3,49% dari jumlah penduduk tahun 2022 yang sebesar 206.937 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk tersebut dikarenakan berbagai faktor seperti adanya kenaikan angka kelahiran, rendahnya angka kematian serta dampak dari migrasi masuk di Kabupaten Bangka Barat.

Diagram I.1
Jumlah dan Sebaran Penduduk per Kecamatan
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

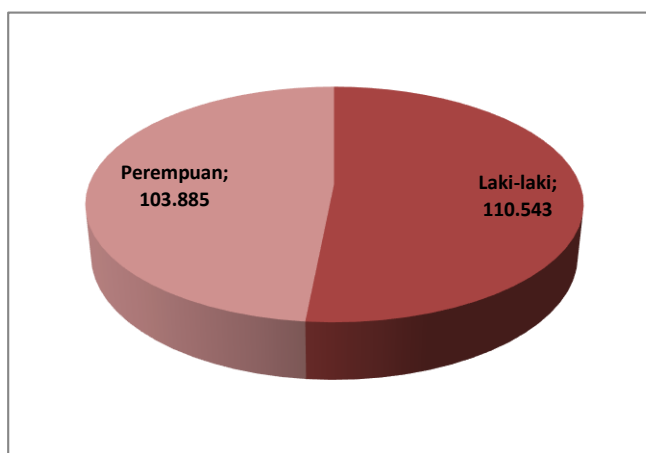


Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

Dalam diagram 1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk dan sebaran penduduk terbanyak masih didominasi oleh Kecamatan Muntok. Hal tersebut disebabkan karena Kecamatan Mentok adalah kecamatan yang menjadi ibukota Kabupaten yang merupakan pusat perekonomian dan pemerintahan.

Komposisi jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023, berdasarkan jenis kelamin masih didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki- laki, namun dengan persentase yang tidak terlalu besar (perbandingan persentase dimaksud dapat dilihat pada diagram 2).

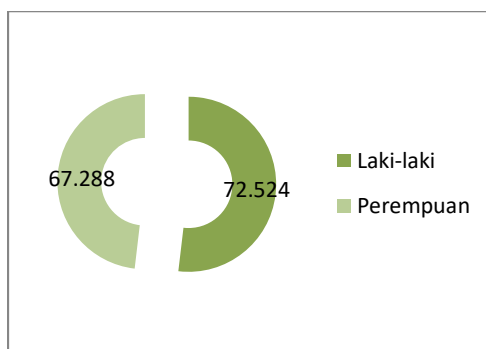
Diagram I.2
Persentase Penduduk Kabupaten Bangka Barat
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

Sedangkan untuk komposisi penduduk berdasarkan kelompok usia, jumlah kelompok usia produktif yaitu usia 15 - 59 tahun masih mendominasi dengan jumlah 139.812 jiwa atau 65,20% dari total jumlah penduduk. Hal tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :

Diagram I.3
Persentase Penduduk Kabupaten Bangka Barat
Usia Produktif (15-59 tahun) Tahun 2023



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

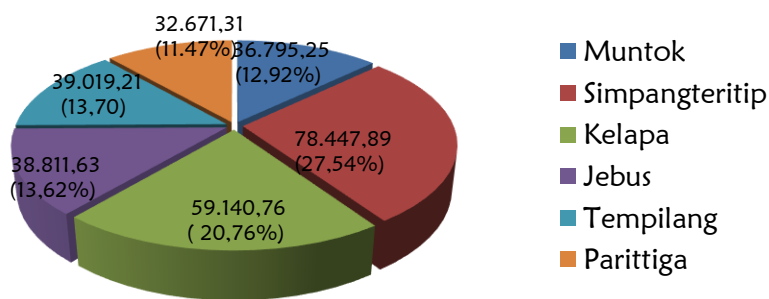
d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Secara administratif, wilayah di Kabupaten Bangka Barat dibagi menjadi 6 (enam) kecamatan, yaitu :

- 1) Kecamatan Muntok memiliki 5 kelurahan dan 4 desa;
- 2) Kecamatan Simpang Teritip memiliki 13 desa;
- 3) Kecamatan Jebus memiliki 11 desa;
- 4) Kecamatan Kelapa memiliki 1 kelurahan dan 13 desa;
- 5) Kecamatan Tempilang memiliki 9 desa; dan
- 6) Kecamatan Parittiga memiliki 10 desa.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 – 2034, Kecamatan Simpangteritip dan Kecamatan Kelapa merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah paling besar dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya.

Diagram I.4
Luas dan Sebaran Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat (ha)



Sumber data : RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 - 2034

Jarak Kota Muntok (ibukota Kabupaten Bangka Barat) ke Kota Pangkalpinang (ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) adalah 138 km. Kecamatan yang memiliki jarak terjauh dengan Kota Muntok adalah Kecamatan Tempilang (108 km) dan kecamatan terdekat adalah Kecamatan Simpang Teritip (54 km).

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 nomor 23 menyebutkan bahwa perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Pasal 208 ayat (1) bahwa kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibantu oleh perangkat daerah. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas (1) sekretariat daerah; (2) sekretariat DPRD; (3) inspektorat; (4) dinas; (5) badan; dan (6) kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Barat memiliki perangkat daerah yang terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. 16 dinas;
- e. 4 (empat) badan; dan
- f. 6 (enam) kecamatan.

Dalam tabel di bawah ini, disajikan rincian perangkat daerah, tipe perangkat daerah dan jumlah pegawai (Pegawai Negeri Sipil) per perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat :

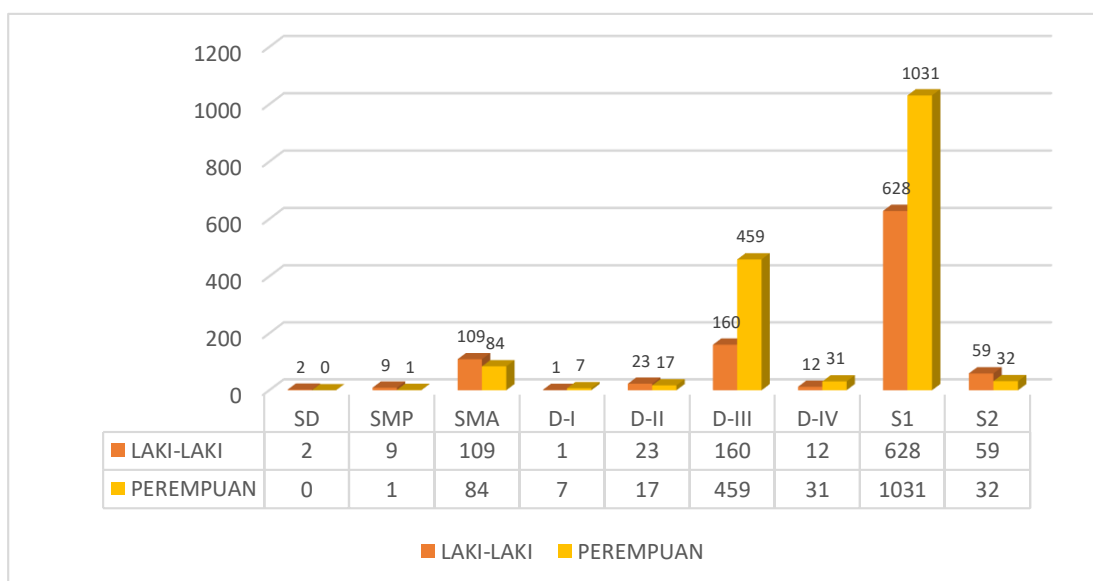
Tabel I.1
Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat, Tipe dan Jumlah Pegawai per Perangkat Daerah Tahun 2022

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	TIPE PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PEGAWAI (PNS)
1	Sekretariat Daerah	A	64
2	Sekretariat DPRD	C	18
3	Inspektorat	B	30
A	Dinas		
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	A	1.199
2	Dinas Kesehatan	A	514
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	A	36
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	B	30
5	Dinas Pertanian dan Pangan	A	93
6	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	A	23
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	B	17
8	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	A	31
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	A	21
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	B	20
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	B	19
12	Dinas Lingkungan Hidup	A	21
13	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	B	22
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A	18
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	B	20

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	TIPE PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PEGAWAI (PNS)
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	C	13
B Badan			
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	B	28
2	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	B	29
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	B	27
4	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	A	22
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		16
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		15
C Kecamatan			
1	Kecamatan Muntok	A	35
	a. Kecamatan		12
	b. Kelurahan Sungaibaru		4
	c. Kelurahan Sungaidaeng		5
	d. Kelurahan Tanjung		5
	e. Kelurahan Menjelang		4
	f. Kelurahan Keranggan		5
2	Kecamatan Simpang Teritip	A	16
3	Kecamatan Jebus	A	24
4	Kecamatan Kelapa	A	24
	▪ Kecamatan		17
	▪ Kelurahan Kelapa		7
5	Kecamatan Tempilang	A	17
6	Kecamatan Parittiga	A	16
Unit Organisasi Bersifat Khusus			
1	Rumah Sakit Umum Daerah	C	185

Pada tahun 2023, pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Bangka Barat berjumlah 2.665 orang. Jumlah PNS dengan lulusan strata 1 (S1) merupakan jumlah PNS terbanyak di Kabupaten Bangka Barat tahun 2023, yaitu 1.698 orang atau 62,25%. Berikut adalah diagram PNS Kabupaten Bangka Barat berdasarkan pendidikan :

Diagram I.5
PNS Kabupaten Bangka Barat
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023



Sumber : BKPSDM Kabupaten Bangka Barat

PNS berjenis kelamin perempuan di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2023 lebih banyak dibandingkan PNS yang berjenis kelamin laki-laki, yaitu berjumlah 1.662 orang dibandingkan 1.003 orang. Sedangkan rasio pegawai negeri sipil (PNS) dibandingkan dengan jumlah penduduk adalah 1,24 persen, dimana setiap 100 orang penduduk dilayani oleh 1 atau 2 orang PNS.

f. Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023. Sedangkan penjabarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023.

Untuk mengantisipasi dinamika kondisi yang terjadi pada tahun berjalan, maka dilakukan mekanisme perubahan terhadap APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 97 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 78 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023.

Perubahan tersebut meliputi semua komponen APBD baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

1) Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

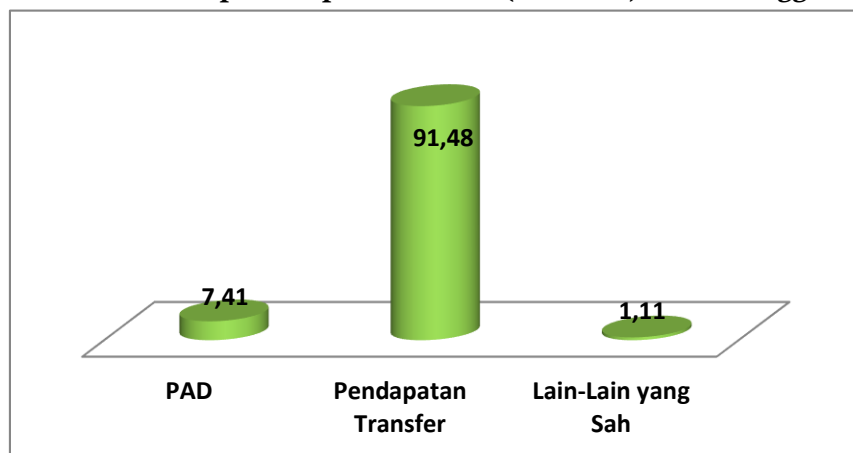
Pendapatan dalam APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Bangka Barat terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Total target Pendapatan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar

Rp 999.267.921.919,00 dengan realisasi sebesar Rp 969.076.700.336,41 atau 96,98 yang meliputi

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD); target PAD pada tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp 73.406.243.464,00 dengan realisasi sebesar Rp 71.795.673.410,41 atau sebesar 97,81%.
- b) Pendapatan Transfer; target yang ditetapkan untuk Pendapatan Transfer tahun anggaran 2023 sebesar Rp 914.736.678.454,00 dan terealisasi sebesar Rp 886.513.895.807,00 atau 96,91%.
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp 11.125.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 10.767.131.119,00 atau sebesar 96,78%.

Berikut adalah diagram kontribusi (target) masing-masing jenis pendapatan terhadap Pendapatan Daerah :

Diagram I.6
Persentase Kontribusi Jenis-jenis Pendapatan Terhadap Pendapatan Daerah (Realisasi) Tahun Anggaran 2023



Sumber : BPKAD Kabupaten Bangka Barat

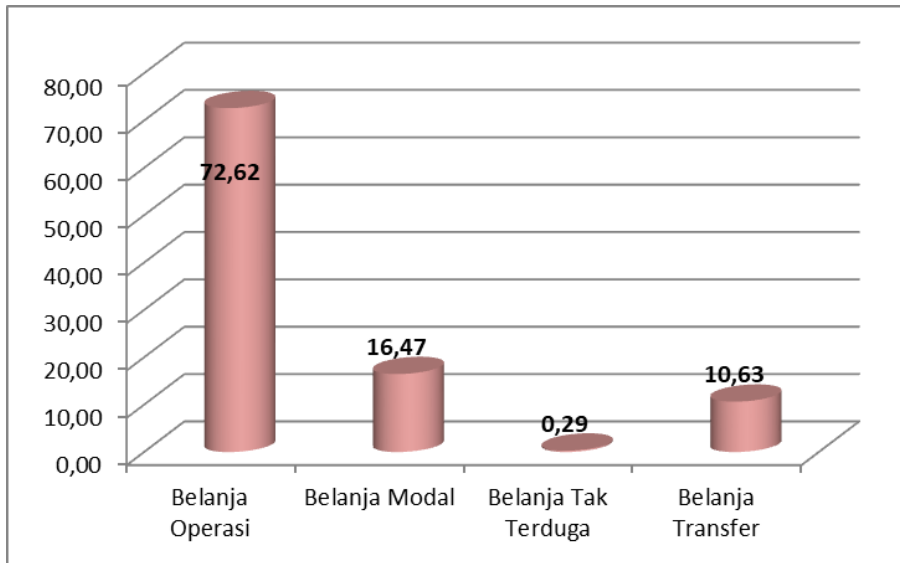
Dari diagram di atas, dapat dilihat bahwa Dana Pendapatan Transfer dalam struktur APBD Kabupaten Bangka Barat masih menjadi penyangga utama terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023, yaitu sebesar 91,54%.

2) Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja Daerah menurut jenis belanja terdiri dari 4 jenis belanja, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer. Dalam APBD Perubahan Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023, jumlah total Belanja Daerah adalah sebesar Rp 1.106.559.723.690 dengan realisasi sebesar Rp 1.019.509.455.553,42,82 (92,13 %), yang meliputi :

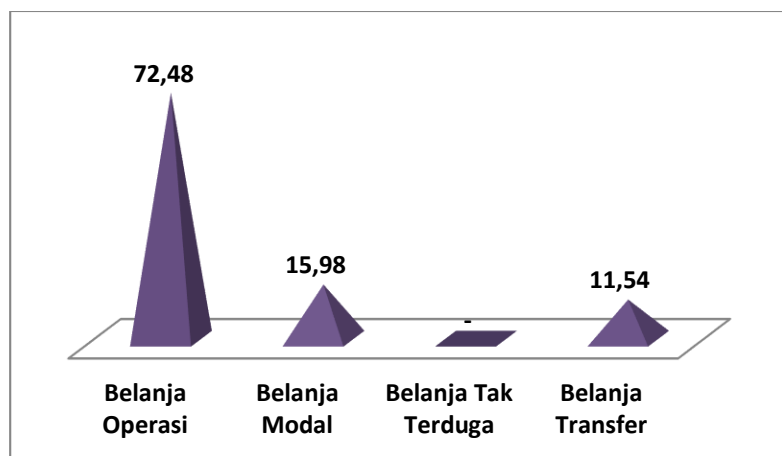
- Belanja Operasi; anggaran Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 803.547.706.878,00 dengan realisasi anggaran sebesar 738.928.383.848,49 atau sebesar 91,96%.
- Belanja Modal; anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 182.196.135.162,00 dengan realisasi Rp 162.934.017.467,93 atau sebesar 89,43%.
- Belanja Tak Terduga; anggaran Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 3.168.739.500 dengan realisasi Rp 0,00 atau sebesar 0%.
- Belanja Transfer; anggaran Transfer Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 117.647.142.150,00 dengan realisasi Rp Rp 117.647.142.150,00 atau sebesar 100%

Diagram I.7
Persentase Anggaran Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer terhadap Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023



Sumber : BPKAD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

Diagram I.8
Persentase Kontribusi Realisasi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023



Sumber : BPKAD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

3) Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan dalam APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023 terdiri atas Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2023 ditargetkan Rp 107.291.801.770 dan terealisasi Rp 107.198.601.770,71 atau 99,91%. Penerimaan Pembiayaan Daerah merupakan *Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya*, yaitu sebesar Rp 107.191.801.770 dengan realisasi sebesar Rp 107.191.801.770,71 (100,00%) dan *Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah* yang ditargetkan sebesar Rp 100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 6.800.000,00 atau 6,80%.

- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang merupakan *Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah*, pada tahun 2023 tidak dianggarkan *Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah*.

Rincian anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.2
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
per 31 Desember 2023

	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	KETERANGAN
4	PENDAPATAN	999.267.921.919	969.076.700.336,41	96,98	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	73.406.243.464	71.795.673.410,41	97,81	
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	29.156.787.500	26.506.009.473,00	90,91	
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	8.127.500.000	7.882.366.408,00	96,25	
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.850.000.000	6.844.661.601,09	69,49	
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	26.271.955.964	30.622.635.928,32	116,56	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	914.736.678.454	886.513.895.807,00	96,91	
4.2.01.01	Dana Perimbangan	728.380.615.000	706.546.362.625,00	97,00	
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi hasil (DBH)	139.653.883.000	128.046.164.913,00	91,69	
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	435.286.031.000,00	434.631.148.780,00	99,85	
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	53.585.059.000,00	47.331.879.395,00	88,33	
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik	99.855.642.000,00	96.537.169.537,00	96,68	
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	728.380.615.000,00	706.546.362.625,00	97,00	
4.3.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	26.956.967.000,00	26.956.967.000,00	100	
4.2.01.05	Dana Desa	54.434.722.000,00	54.434.722.000,00	100	
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	81.391.689.000,00	81.391.689.000,00	100	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	104.964.374.454,00	98.575.844.182,00	93,91	
4.02.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	69.052.810.804,00	63.044.686.182,00	91,30	
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	35.911.563.650,00	35.531.158.000,00	98,94	
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	104.964.374.454,00	98.575.844.182,00	93,91	
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	914.736.678.454,00	886.513.895.807,00	96,91	

	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	KETERANGAN
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	11.125.000.000,00	10.767.131.119,00	96,78	
4.3.01	Pendapatan Hibah	500.000.000,00	452.000.000,00	90,40	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.625.000.000	10.315.131.119,00	97,08	
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.125.000,00	10.767.131.119,00	97,78	
	JUMLAH PENDAPATAN	999.267.921.919,00	969.076.700.336,41	96,98	
5	BELANJA DAERAH	1.106.559.723.690,00	1.019.509.455.555,42	92,13	
5.1	BELANJA OPERASI	803.547.706.878,00	738.928.383.848,49	91,96	
5.1.01	Belanja Pegawai	369.302.167.723,00	349.617.465.848,00	94,67	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	384.712.061.158,00	340.820.574.164,49	88,59	
5.1.05	Belanja Hibah	45.556.047.997,00	44.841.163.570,00	98,43	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.977.430.000,00	3.649.180.236,00	91,75	
	JUMLAH BELANJA OPERASI	803.547.706.878,00	738.928.383.848,49	91,96	
5.2	BELANJA MODAL	182.196.135.162,00	162.934.017.467,93	89,43	
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.700.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.357.947.316,00	31.054.707.102,86	93,10	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	68.590.771.000,00	61.751.185.849,07	90,03	
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	73.018.630.372,00	65.901.977.241,00	90,25	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.528.786.474,00	4.226.147.275,00	93,32	
	JUMLAH BELANJA MODAL	182.196.135.162,00	162.934.017.467,93	89,43	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.168.739.500,00	0,00	0,00	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.168.739.500,00	0,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	3.168.739.500,00	0,00	0,00	
5.4	BELANJA TRANSFER	117.647.142.150,00	117.647.142.150,00	100	

	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	KETERANGAN
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.915.678.750,00	2.915.678.750,00	100	
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	812.750.000,00	812.749.999,00	100	
5.4.02.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	0	0,00	0,00	
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	113.918.713.400,00	113.918.625.788,00	100	
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	117.647.142.150,00	117.647.142.150,00	100	
	JUMLAH BELANJA	1.106.559.723.690,00	1.019.509.455.553,42	92,13	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(107.291.801.770,00)	(50.423.755.217,01)	47,01	
6	PEMBIAYAAN DAERAH	107.291.801.770,00	107.198.601.770,71	99,91	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	107.291.801.770,00	107.198.601.770,71	99,91	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Sebelumnya	107.191.801.770,00	107.191.801.770,00	100	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1000.000.000,00	6.800.000,00	6,80	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	107.291.801.770,00	107.198.601.770,71	99,91	
	PEMBIAYAAN NETTO	107.291.801.770,00	107.198.601.770,71	99,91	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(0)	56.765.846.553,70	0,00	

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan adalah proses awal untuk merancang suatu perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Perencanaan pembangunan juga merupakan blueprint pelaksanaan kegiatan pembangunan yang mempertimbangkan dan mendayagunakan segala potensi atau sumberdaya yang tersedia. Melalui perencanaan pembangunan yang baik, daerah diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan pembangunan dan mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan daya saing daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Bangka Barat telah disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan. Dokumen tersebut kemudian dituangkan dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 – 2026.

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat disusun dengan melakukan analisis terhadap perkembangan maupun tren pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, baik target yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga internasional seperti MDGs yang diperbaharui menjadi SDGs, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat seperti RPJMN dan SPM maupun target-target yang telah ditetapkan oleh dokumen perencanaan pembangunan periode sebelumnya yang belum tercapai. Analisis standar dimaksud tentunya adalah standar pencapaian pembangunan pada saat dokumen perencanaan pembangunan tersebut disusun.

Sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 – 2026, permasalahan-permasalahan strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat adalah sebagai berikut :

- 1) Pertumbuhan Ekonomi, hal – hal yang mempengaruhi kondisi perekonomian Kabupaten Bangka Barat meliputi :
 - a) Industri pengolahan yang didominasi pengolahan timah mengalami kontraksi di tahun 2020;
 - b) Belum optimalnya sektor pertanian;
 - c) Belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata;
 - d) Koperasi dan UMKM yang belum berdaya saing; dan
 - e) Iklim usaha dan peningkatan investasi yang belum optimal.
- 2) Tingkat Pengangguran Terbuka, meliputi :
 - a) Keterbatasan lapangan kerja; dan
 - b) Kualitas tenaga kerja yang masih rendah.
- 3) Angka Kemiskinan, meliputi :
 - a) Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat miskin; dan
 - b) Keterbatasan akses dan minimnya ketersediaan pangan.

- 4) Indeks Pembangunan Manusia, yang meliputi :
 - a) Masih rendahnya capaian RLS dan HLS
 - b) Belum optimalnya capaian AHH; dan
 - c) Pengeluaran perkapita masih relatif rendah.
- 5) Infrastruktur, yang meliputi
 - a) Jaringan irigasi, jalan, dan penanganan banjir belum optimal;
 - b) keselamatan, keamanan dan kenyamanan transportasi belum optimal;
 - c) Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak masih rendah; dan
 - d) Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi belum optimal.
- 6) Lingkungan Hidup, permasalahan utama lingkungan hidup di Kabupaten Bangka Barat meliputi :
 - a) Belum optimalnya capaian kualitas lingkungan hidup; dan
 - b) Pengelolaan persampahan yang belum ditangani secara optimal.
- 7) Kemandirian Keuangan Daerah, meliputi
 - a) Kemandirian daerah masih sangat rendah;
 - b) Kapasitas fiskal masih sangat rendah; dan
 - c) Minimnya transfer pusat di luar Dana Alokasi Umum.
- 8) Reformasi Birokrasi, meliputi
 - a) Kualitas penerapan reformasi birokrasi baik pada tingkat Pemerintah Kabupaten dan pada tingkat Perangkat Daerah belum cukup baik dan merata;
 - b) Agen perubahan yang dibentuk baik di tingkat pemerintah kabupaten maupun perangkat daerah belum memiliki rencana aksi perubahan yang konkret dan inovatif;
 - c) Monitoring dan evaluasi belum dilakukan secara berkala untuk menilai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi baik di tingkat pemerintah kabupaten maupun tingkat perangkat daerah;
 - d) Deregulasi kebijakan yang dilaksanakan belum mampu memetakan kebutuhan peraturan yang mendorong kinerja dan pelayanan, sehingga upaya yang dilakukan cenderung administratif, belum serius melakukan revisi-revisi atas regulasi yang menghambat kinerja birokrasi;
 - e) Peta proses bisnis yang disusun belum sepenuhnya mengacu pada kinerja utama baik di tingkat pemerintah daerah maupun di tingkat perangkat daerah, sehingga struktur organisasi yang terbentuk belum sepenuhnya ideal dan belum menunjukkan bentuk penyederhanaan organisasi yang berbasis kinerja;
 - f) Penerapan *e-government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat belum sepenuhnya terintegrasi mengingat belum adanya rancangan induk pengembangan aplikasi antarperangkat daerah, sehingga belum optimal pemanfaatannya. Salah satu di antaranya adalah penggunaan aplikasi manajemen kinerja yang belum sepenuhnya terintegrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaporan maupun sebagai sarana penilaian capaian kinerja individu;

- g) Tindaklanjut atas Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 382—393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional belum dilaksanakan secara menyeluruh
- h) Belum optimalnya penguatan sistem manajemen SOP antara lain mengenai tindak lanjut hasil *assessment* sebagai dasar pengembangan karier individu berbasis kompetensi, penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau *Human Capital Development Plan* (HCDP) belum dilakukan menyeluruh dan belum dilakukannya pemetaan talenta sebagai dasar penempatan pegawai dalam suatu jabatan;
- i) Implementasi sistem akuntabilitas kinerja di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat juga sudah berjalan, namun mengingat bahwa proses bisnis yang ada masih belum berdasarkan kinerja utama maka masih terdapat beberapa tujuan/sasaran serta indikator kinerja belum sepenuhnya berorientasi pada hasil. Hal tersebut juga akan berpengaruh pada penjabaran kinerja ke level dibawahnya, dan akan berdampak pada ketidaksesuaian pemberian *rewards and punishment*;
- j) Implementasi kebijakan pengawasan internal juga masih perlu ditingkatkan, tidak hanya sebatas terdapatnya kebijakan akan pengawasan serta sosialisasinya, namun lebih harus ditingkatkan pemanfaatannya dan harus dilakukan monitoring serta evaluasi atas kebijakan tersebut;
- k) Upaya-upaya peningkatan pada pelayanan publik sudah mulai dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, mulai dari perbaikan sarana prasarana maupun fasilitas lainnya, termasuk juga menerapkan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh sebagian besar perangkat daerah. Namun, yang menjadi catatan adalah hasil dari survei tersebut belum sepenuhnya ditindaklanjuti dan dijadikan dasar perbaikan untuk menjawab permasalahan yang ada yang diharapkan oleh pengguna layanan.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Dalam rangka pembangunan daerah yang memiliki tujuan dan sasaran yang jelas untuk 5 (lima) tahun ke depan, Kabupaten Bangka Barat telah menetapkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bangka Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 19 Oktober 2021

Berdasarkan RPJMD tersebut, visi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 - 2026 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARKAT BANGKA BARAT YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT”**. Pernyataan visi di atas bermakna “Peningkatan kualitas individu-individu yang menjadi anggota masyarakat di wilayah Bangka Barat, sehingga akan memberikan dampak pada kemajuan dalam hal pembangunan manusia, infrastruktur dan layanan publik. Pada akhirnya akan

menimbulkan kepercayaan diri pada setiap warga masyarakat Bangka Barat, menjadikan warga sebagai masyarakat yang bermartabat, tercermin dalam kehidupan keseharian, lebih mengedepankan moralitas, etika, dan hukum yang berlaku dengan landasan nilai-nilai spiritualitas”.

RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 - 2026 adalah perencanaan pembangunan tahapan ke 4 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2025 dengan visi **“Bangka Barat Bersih, Mandiri, dan Makmur 2025”**.

Untuk mencapai visi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 - 2026, telah disusun 3 (tiga) misi pembangunan yang merupakan komitmen dan rumusan umum dalam pelaksanaan agenda-agenda utama pembangunan di Kabupaten Bangka Barat. 3 (tiga) misi pembangunan Kabupaten Bangka Barat tersebut adalah sebagai berikut:

1) Misi 1 : Memajukan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.

Kabupaten Bangka Barat merupakan daerah yang didominasi oleh industri pengolahan sebagai *leading sector* dan mampu menggerakkan sektor lainnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan.

2) Misi 2 : Memajukan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing dan Berahlak Mulia.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu yang berdaya saing dalam bidang pendidikan, kesehatan yang memiliki tubuh dan jiwa yang sehat, dan berahlak mulia.

3) Misi 3 : Memajukan Tata Kelola Pemerintah yang Baik.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat bertujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk memaksimal kepuasan masyarakat atas pelayanan pemerintah dan meningkatkan kemampuan keuangan Daerah. Pencapaian kualitas perencanaan yang berkelanjutan pada pembangunan di Kabupaten Bangka Barat merupakan suatu hal yang penting. Oleh karena itu, pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras terutama dengan RPJPD Kabupaten Bangka Barat 2005— 2025.

c. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Tabel di bawah ini akan memberikan gambaran program prioritas kepala daerah dalam pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat yang merupakan penjabaran dari Kebijakan Umum Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 – 2026 :

Tabel I.3
Program Prioritas Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat

Bidang	Program Unggulan
Petani	Mewujudkan masyarakat petani sejahtera yang kuat dari sisi ekonomi dengan sistem tata kelola perkebunan, pertanian, dan peternakan yang unggul dan terintegrasi.
UMKM	Mendorong kekuatan ekonomi masyarakat melalui kekuatan UMKM yang modern dan maju dengan fasilitas sistem pemasaran terpadu.
<i>Entrepreneurship</i>	Memperkuat Entrepreneur yang sudah ada dan mendorong calon pengusaha baru dengan sistem regulasi pemerintahan yang berpihak pada masyarakat Bangka Barat
Kesejahteraan Pelayanan Publik	Meningkatkan kesejahteraan seluruh pelayan publik agar dapat lebih maksimal memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat
BUMD	Mewujudkan BUMD yang handal, terintegrasi dengan BUMDes dan koperasi sebagai basis kekuatan ekonomi kemasyarakatan
Nelayan	Mewujudkan nelayan yang handal, tangguh, dan sejahtera dengan ditopang oleh teknologi yang tepat guna
Pendidikan	Mewujudkan pendidikan yang religius, bermutu, berkualitas, dan gratis
Kesehatan	Mewujudkan pelayanan kesehatan gratis yang berkualitas, ramah, dan melayani serta berbasis teknologi
ASN	Membentuk ASN yang kuat, cerdas, berkualitas dan kompak dalam melakukan tugas pelayanan masyarakat
Seni dan Budaya	Memberi ruang dan tempat bagi pelaku seni dan budaya serta kaum milenial untuk berkreasi dan melakukan inovasi demi kemajuan Bangka Barat
Program Keummatan	Memperkuat landasan keagamaan ditengah-tengah masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang religius dan harmoni dengan pemahaman agama yang Benar
Olahraga dan Pemuda	Memberikan perhatian khusus buat dunia oleh raga untuk masyarakat umum khusus penghargaan bagi atlet-atlit yang berprestasi
<i>Good Governance</i>	Mewujudkan Kabupaten Bangka Barat yang religius, humanis dan berbasis Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, baik dan benar
Pelayanan Publik	Mewujudkan sistem pelayanan publik yang tertata, cepat, mudah melayani yang berbasis teknologi sampai ketinggian pedesaan
Muntok	Mengembalikan kejayaan Muntok sebagai kota pelabuhan dan perdagangan
Pariwisata	Mewujudkan Bangka Barat sebagai tujuan wisata dengan berbasis sejarah, kebudayaan, religius, kuliner dan keindahan alam serta masyarakat
Infrastruktur	Membangun infrastruktur yang berkualitas dan tempat sasaran
Penataan Kota dan Desa	Penataan kota dan desa yang indah, nyaman dan ramah lingkungan

d. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja daerah dan pendanaannya dengan mengacu kepada RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, RKPD memiliki kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Diantaranya adalah karena RKPD merupakan salah satu elemen penting dalam instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD tersebut dapat diketahui sejauh mana target-target capaian kinerja dalam RPJMD telah tercapai karena RKPD merupakan bentuk dari penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Barat tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan bupati Bangka Barat Nomor 72 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023.

Dikarenakan adanya ketidaksesuaian perkembangan pembangunan dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, maka dilakukan mekanisme perubahan terhadap RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 72 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023.

Tabel I.4
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2023 Kabupaten Bangka Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan									Prioritas Pembangunan Nasional			
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							634.763.221.751,00	485.329.221.740,00						
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							272.207.335.000,00	250.291.854.000,00						
	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							272.207.335.000,00	250.291.854.000,00						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	175.700.365.000,00	177.881.185.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik					
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.500.000,00	28.000.000,00						
1	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	300.000,00	10.000.000,00		APBD
1	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD
1	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rancangan RPKD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan						Prioritas Pembangunan Nasional		
							Tolok Ukur	Target RPKD	Target Usulan OPD	Target PRKPD					Target PRKPD
1	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	300.000,00	8.000.000,00		APBD
1	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD
1	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	171.740.900.000,00	175.010.000.000,00		
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.346 Orang/bulan	1.346 Orang/bulan	1.346 Orang/bulan	1.346 Orang/bulan	171.740.000.000,00	175.000.000.000,00		APBD
1	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	300.000,00	2.000.000,00		APBD
1	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	4.000.000,00		APBD
1	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD
1	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	300.000,00	55.000.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan												
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD			Prioritas Pembangunan Nasional					
						Perangkat Daerah									
1	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	55.000.000,00		APBD
1	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	900.000,00	88.500.000,00		
1	1	1	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Paket	Paket	Paket		12.500.000,00		APBD
1	1	1	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD
1	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	72 orang	72 orang	72 orang	72 orang	300.000,00	18.000.000,00		APBD
1	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	72 orang	72 orang	72 orang	72 orang	300.000,00	54.000.000,00		APBD
1	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2.045.895.000,00	900.015.000,00		
1	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	23.000.000,00	23.000.000,00		APBD
1	1	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 paket	4 paket	4 paket	1.407.430.000,00			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
1	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	8.000.000,00	11.550.000,00		APBD
1	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	99.165.000,00	79.165.000,00		APBD
1	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	30.000.000,00	40.000.000,00		APBD
1	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	3.000.000,00	13.800.000,00		APBD
1	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100.000.000,00	80.000.000,00		APBD
1	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	375.000.000,00	650.000.000,00		APBD
1	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	300.000,00	2.500.000,00		APBD
1	1	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	50.000.000,00	-		APBD
1	1	1	2,07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			4 unit	4 unit				
1	1	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		7 unit	4 unit	4 unit				APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rancangan RPKD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
							Program/Kegiatan/Subkegiatan						Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran	
							Tolok Ukur	Target RPKD	Target Usulan OPD	Target PRKPD					Target PRKPD
1	1	1	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 unit	1 unit	1 unit	50.000.000,00		APBD	
1	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.687.870.000,00	1.763.690.000,00		
1	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00		APBD
1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	158.250.000,00	158.250.000,00		APBD
1	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	50.000.000,00		APBD
1	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.522.620.000,00	1.553.440.000,00		APBD
1	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	173.000.000,00	35.980.000,00		
1	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	8.000.000,00	8.000.000,00		APBD
4	0	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit	1 unit	1 unit			2.000.000,00		APBD
1	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	160.000.000,00	15.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan						Prioritas Pembangunan Nasional		
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD					Target PRKPD
1	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	5.000.000,00	10.980.000,00		APBD
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	95,85%	95,85%	95,85%	95,85%	96.474.820.000,00	72.365.669.000,00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	
					Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	95,12%	95,12%	95,12%	95,12%						
					Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	95,14%	95,14%	95,14%	95,14%						
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Tingkat Partisipasi Warganegara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar	94,75%	94,75%	94,75%	94,75%	52.016.696.000,00	41.263.721.000,00		
1	1	2	2.01	2	Penambahan Ruang kelas baru	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 ruang	3 ruang	3 ruang	3 ruang	594.940.000,00	200.000.000,00		APBD+Reses
1	1	2	2.01	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		3 ruang	3 ruang	3 ruang	835.838.000,00	-		APBD
1	1	2	2.01	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		2 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	188.686.000,00			
1	1	2	2.01	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		2 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	487.786.000,00			
1	1	2	2.01	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	41 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	5.479.176.000,00	-		APBD+Reses

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan						Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD				
1	1	2	2.01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	77 Ruang	58 Ruang	58 Ruang	58 Ruang	1.466.300.000,00	-	Reses
1	1	2	2.01	9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah Direhabilitasi Sedang/Berat		1 ruang	1 ruang	1 ruang		-	Reses
1	1	2	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	390.300.000,00	-	APBD+Reses
1	1	2	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	28 Paket	28 Paket	28 Paket	28 Paket	33.900.000,00	-	APBD
1	1	2	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	11.415 Unit	11.415 Unit	11.415 Unit	11.415 Unit	399.770.000,00	406.050.000,00	APBD
1	1	2	2.01	21	Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	400 Peserta Didik	400 Peserta Didik	400 Peserta Didik	400 Peserta Didik	97.850.000,00	100.000.000,00	APBD
1	1	2	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		8 paket	8 paket	8 paket	1.031.890.000,00	-	APBD
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	136 Satuan Pendidikan	136 Satuan Pendidikan	136 Satuan Pendidikan	136 Satuan Pendidikan	1.800.000,00	50.000.000,00	APBD
1	1	2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	255 Peserta Didik	255 Peserta Didik	255 Peserta Didik	255 Peserta Didik	253.500.000,00	265.000.000,00	APBD
1	1	2	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	710 Orang	740 Orang	740 Orang	740 Orang	16.797.250.000,00	15.125.740.000,00	APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rancangan RPKD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan						Prioritas Pembangunan Nasional		
							Tolok Ukur	Target RPKD	Target Usulan OPD	Target PRKPD					Target PRKPD
1	1	2	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	60 orang	37 orang	37 orang	37 orang	81.550.000,00	292.500.000,00		APBD
1	1	2	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	30 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	136 Satuan Pendidikan	136 Satuan Pendidikan	7.220.000,00	65.000.000,00		APBD
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	136 Satuan Pendidikan	136 Satuan Pendidikan	136 Satuan Pendidikan	136 Satuan Pendidikan	23.852.940.000,00	24.684.431.000,00		APBD
1	1	2	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	136 Orang	136 Orang	136 Orang	136 Orang	16.000.000,00	75.000.000,00		APBD
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Tingkat Partisipasi Warganegara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Sekolah Menengah Pertama	80,85%	80,85%	80,85%	80,85%	24.954.806.000,00	16.386.242.000,00		
1	1	2	2.02	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		4 Ruang	4 Ruang	4 Ruang	1.258.038.000,00	-		APBD
1	1	2	2.02	6	Pembangunan Laboratorium	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun		6 Ruang	6 Ruang	6 Ruang	4.100.980.000,00			
1	1	2	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 unit	19 unit	19 unit	24 unit	1.905.681.000,00	-		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RPKD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
							Tolok Ukur	Target RPKD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
1	1	2	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		100 Ruang	100 Ruang	100 Ruang	840.000.000,00			
1	1	2	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	2.800 Paket	2.800 Paket	2.800 Paket	2.800 Paket	135.410.000,00	137.000.000,00		APBD
1	1	2	2.02	30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan utilitas sekolah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	51.287.000,00	37.110.000,00		APBD
1	1	2	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	400 Peserta Didik	400 Peserta Didik	400 Peserta Didik	400 Peserta Didik	174.650.000,00	180.000.000,00		APBD
1	1	2	2.02	34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1.257 Paket	1.257 Paket	1.257 Paket	1.257 Paket	60.020.000,00	62.850.000,00		APBD
1	1	2	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang tersedia		1 Paket	1 Paket	1 Paket	132.090.000,00			
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	1.640 Peserta Didik	1.640 Peserta Didik	1.640 Peserta Didik	1.640 Peserta Didik	1.800.000,00	15.000.000,00		APBD
1	1	2	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	193 Peserta Didik	193 Peserta Didik	193 Peserta Didik	193 Peserta Didik	253.500.000,00	265.000.000,00		APBD
1	1	2	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	251 Orang	251 Orang	251 Orang	251 Orang	5.888.650.000,00	5.395.080.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
							Program/Kegiatan/Subkegiatan						Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD					Target PRKPD
1	1	2	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 orang	4 orang	4 orang	4 orang	39.300.000,00	127.500.000,00		APBD
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	36 Satuan Pendidikan	36 Satuan Pendidikan	9.750.000,00	35.000.000,00		APBD
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	34 Satuan Pendidikan	34 Satuan Pendidikan	34 Satuan Pendidikan	34 Satuan Pendidikan	10.094.000.000,00	10.081.702.000,00		APBD
1	1	2	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	34 Orang	34 Orang	34 Orang	34 Orang	9.650.000,00	50.000.000,00		APBD
1	1	2	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Tingkat Partisipasi Warganegara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	90,25%	90,25%	90,25%	90,25%	11.053.568.000,00	8.140.626.000,00		
1	1	2	2.03	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun		3 Unit	3 Unit	3 Unit	477.091.000,00			
1	1	2	2.03	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang telah direhabilitasi Sedang/Berat		1 unit	1 unit	1 unit				
1	1	2	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1.000 Paket	1.000 Paket	1.000 Paket	1.000 Paket	42.842.000,00	45.000.000,00		APBD
1	1	2	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	1.000 Peserta Didik	1.000 Peserta Didik	Peserta Didik		142.586.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
							Program/Kegiatan/Subkegiatan						Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD					Target PRKPD
1	1	2	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	619 Orang	619 Orang	619 Orang	619 Orang	6.213.150.000,00	3.532.280.000,00		APBD
1	1	2	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	60 orang	30 orang	30 orang	30 orang	102.750.000,00	178.500.000,00		APBD
1	1	2	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan dan Manajemen	167 Satuan Pendidikan	167 Satuan Pendidikan	167 Satuan Pendidikan	167 Satuan Pendidikan	140.000.000,00	140.000.000,00		APBD
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	167 Satuan Pendidikan	167 Satuan Pendidikan	167 Satuan Pendidikan	167 Satuan Pendidikan	4.077.735.000,00	4.102.260.000,00		APBD
1	1	2	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Tingkat Partisipasi Warganegara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	8.449.750.000,00	6.575.080.000,00		
1	1	2	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	439 Peserta Didik	439 Peserta Didik	439 Peserta Didik	439 Peserta Didik	300.000,00	5.000.000,00		APBD
1	1	2	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	975 orang	975 orang	975 orang	975 orang	7.421.750.000,00	5.850.000.000,00		APBD
1	1	2	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	1.027.700.000,00	720.080.000,00		APBD
1	1	4			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Persentase lembaga pendidikan yang memiliki jumlah	70,85%	70,85%	70,85%	70,85%	17.150.000,00	30.000.000,00	Meningkatkan sumber daya manusia	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	1.500.000,00	28.000.000,00		
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	300.000,00	10.000.000,00		APBD
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD
1	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	300.000,00	8.000.000,00		APBD
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	77.819.103.350,00	70.010.000.000,00		
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	719 Orang/bulan	719 Orang/bulan	719 Orang/bulan	719 Orang/bulan	77.818.203.350,00	70.000.000.000,00		APBD
1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	2.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RPKD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan												
			Tolok Ukur	Target RPKD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD			Prioritas Pembangunan Nasional					
						Tahun SKPD									
1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	4.000.000,00		APBD
1	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	300.000,00	6.000.000,00		
1	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	300.000,00	6.000.000,00		APBD
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	900.000,00	74.000.000,00		
1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0 Paket	0 Paket	Paket		12.500.000,00		APBD
1	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD
1	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 orang	70 orang	70 orang	70 orang	300.000,00	17.500.000,00		APBD
1	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70 orang	70 orang	70 orang	70 orang	300.000,00	52.500.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RPKD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RPKD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	726.936.000,00	656.500.000,00		
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00		APBD
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		50 Paket	53 Paket	49 Paket	309.636.000,00			APBD
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00		APBD
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00		APBD
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	30.000.000,00	40.000.000,00		APBD
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	5.000.000,00		APBD
1	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	45.000.000,00		APBD
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	270.000.000,00	500.000.000,00		APBD
1	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	2.500.000,00		APBD
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 persen	100 persen	100 persen	3.407.310.000,00	-		APBD
1	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 unit	1 unit	1 unit	3.407.310.000,00			APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RPKD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran		
			Tolok Ukur	Target RPKD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD						
1	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		5 unit	5 unit	5 unit			
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	3.511.820.000,00	3.665.700.000,00	
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	APBD
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	139.800.000,00	139.800.000,00	APBD
1	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	50.000.000,00	APBD
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.365.020.000,00	3.473.900.000,00	APBD
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	31.250.000,00	59.980.000,00	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	11.250.000,00	11.250.000,00	APBD
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	15.000.000,00	22.500.000,00	APBD
1	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	43 unit	43 unit	43 unit	43 unit	5.000.000,00	26.230.000,00	APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran					
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional						
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD									
1	02	02	2,01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	35 Unit	35 Unit	35 Unit	35 Unit	920.295.000,00	500.000.000,00		APBD	
1	02	02	2,01	16	Pengadaan Obat, Vaksin		Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.015.426.000,00	533.330.000,00		APBD	
1	02	02	2,01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai		Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan		Paket	1 Paket	1 Paket	2.141.442.000,00			APBD	
1	02	02	2,01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	216 unit	216 unit	216 unit	216 unit	119.641.300,00	150.000.000,00		APBD	
1	02	02	2,01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Paket	81.032.000,00				
1	02	02	2,01	22	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga		Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	12.752 keluarga	12.752 keluarga	12.752 keluarga						APBD
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	40.252.189.500,00	52.973.232.300,00			
							Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
							Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen				
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen				
			Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen				
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen				
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen				
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen				
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen				
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen				
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen				
			Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan promosi kesehatan dan kesehatan lingkungan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran			
			Program/Kegiatan/Subkegiatan											
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD			Prioritas Pembangunan Nasional				
					Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
					Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
					Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98340 Jiwa	98340 Jiwa	98340 Jiwa	98340 Jiwa					
					Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
					Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
1	02	02	2,02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.730 Orang	3.730 Orang	3.730 Orang	3.730 Orang	5.830.000,00	11.925.000,00		APBD
1	02	02	2,02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.540 Orang	3.540 Orang	3.540 Orang	3.540 Orang	23.455.000,00	11.925.000,00		APBD
1	02	02	2,02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10.309 Orang	10.309 Orang	10.309 Orang	10.309 Orang	9.410.000,00	20.000.000,00		APBD
1	02	02	2,02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	41.350 Orang	41.350 Orang	41.350 Orang	41.350 Orang	88.010.000,00	67.140.000,00		APBD
1	02	02	2,02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	141.294 Orang	141.294 Orang	141.294 Orang	141.294 Orang	29.000.000,00	18.725.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21.338 Orang	21.338 Orang	21.338 Orang	21.338 Orang	22.015.000,00	64.330.000,00		APBD
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	51.034 Orang	51.034 Orang	51.034 Orang	51.034 Orang	550.000,00	12.950.000,00		APBD
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	4.174 Orang	4.174 Orang	4.174 Orang	4.174 Orang	195.326.000,00	12.400.000,00		APBD
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	492 Orang	492 Orang	492 Orang	492 Orang	16.374.900,00			APBD
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.956 Orang	1.956 Orang	1.956 Orang	1.956 Orang	498.359.200,00	35.440.000,00		APBD
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.155 Orang	5.155 Orang	5.155 Orang	5.155 Orang	82.300.000,00	60.000.000,00		APBD
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/ atau Berpotensi Bencana		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/ atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.115.000,00	50.000.000,00		APBD
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	256.325.000,00	379.686.500,00		APBD
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	44.640.000,00	30.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	86.400.000,00	100.000.000,00		APBD
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	64.640.000,00	45.860.000,00		APBD
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12.030.000,00	24.000.000,00		APBD
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	41.950.000,00	20.000.000,00		APBD
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		Orang	Orang	492 Orang	12.615.000,00			
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	Orang	Orang	Orang		19.770.000,00		APBD
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	488.830.000,00	63.330.000,00		APBD
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	441.157.600,00	403.330.000,00		APBD
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	37.521.596.000,00	51.432.420.800,00		APBD
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	34.200.000,00	70.000.000,00		APBD
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	9 unit	9 unit	3 unit	3 unit	12.260.000,00	20.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RPKD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RPKD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
1	02	02	2,02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Unit	Unit	1 Unit	34.000.000,00			
1	02	02	2,02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		Keluarga	Keluarga	12.752 Keluarga	3.700.000,00		APBD	
1	02	02	2,02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		109 Orang	50 Orang	50 Orang	222.100.800,00			
1	02	02	2,03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Persentase Puskesmas yang mampu menyediakan laporan melalui Sistem Informasi Puskesmas	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	600.000,00	17.847.000,00		
1	02	02	2,03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	8.000.000,00		APBD
1	02	02	2,03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	9.847.000,00		APBD
1	02	02	2,04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan melakukan pengukuran mutu pelayanan kesehatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	82.019.000,00	177.000.000,00		
1	02	02	2,04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya		Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	4.190.000,00	37.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran			
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD							
1	02	02	2,04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	3.651.000,00	20.000.000,00		APBD
1	02	02	2,04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	74.178.000,00	120.000.000,00		APBD
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	7.833.382.600,00	7.079.295.600,00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	
				Persentase pemenuhan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar	65%	65%	65%	65%						
1	02	03	2,02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	6.958.677.600,00	6.839.295.600,00		
1	02	03	2,02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	194 Orang	194 Orang	194 Orang	194 Orang	6.844.395.600,00	6.839.295.600,00		APBD
1	02	03	2,02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	114.282.000,00			
1	02	03	2,03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan teknis kesehatan, fungsional kesehatan, manajemen kesehatan dan manajemen non kesehatan terakreditasi	91 Persen	91 Persen	91 Persen	91 Persen	874.705.000,00	240.000.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
1	02	03	2,03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	874.705.000,00	240.000.000,00		APBD
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan usaha makanan dan minuman yang memiliki izin	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	235.410.000,00	12.600.000,00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	
1	02	04	2,01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, UMOT berizin	70 Persen	70 Persen	70 Persen	70 Persen	2.300.000,00	3.800.000,00		
1	02	04	2,01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	2.300.000,00	3.800.000,00		APBD
1	02	04	2,03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Persentase industri rumah tangga yang memiliki sertifikat produksi pangan dan izin produksi	70 Persen	70 Persen	70 Persen	70 Persen	118.650.000,00	3.800.000,00		
1	02	04	2,03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	118.650.000,00	3.800.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Persentase hasil permintaan post market pada produksi dan produk makanan minuman IRT yang diperiksa dan ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	5.000.000,00	5.000.000,00		APBD
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00		APBD
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		Persentase hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang diperiksa dan ditindaklanjuti		100 Persen	100 Persen	100 Persen	109.460.000,00	-		APBD
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	109.460.000,00			APBD
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase desa/keurahan yang ber-PHBS	45%	45%	45%	45%	527.279.000,00	76.200.000,00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan												
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD			Prioritas Pembangunan Nasional					
1	02	01	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	28.000.000.000,00	22.500.000.000,00		APBD
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Indeks kepuasan layanan Puskesmas	80,5 Angka	80,5 Angka	80,5 Angka	80,5 Angka	21.261.327.911,00	16.098.100.000,00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	
				Indeks kepuasan layanan rumah sakit		78 Angka	78 Angka	78 Angka	78 Angka						
				Persentase capaian SPM bidang kesehatan		93 Persen	93 Persen	93 Persen	93 Persen						
1	02	02	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							11.163.227.910,00	-		
1	02	02	2,01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	Unit	59 unit		11.163.227.910,00			
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							10.098.100.001,00	16.098.100.000,00		
1	02	02	2,02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.098.100.001,00	16.098.100.000,00		APBD
					Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Muntok							3.667.639.932,00	2.238.000.000,00		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase capaian SPM bidang kesehatan	93%	93%	93%	93%	3.631.559.932,00	2.238.000.000,00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	
				Tingkat Kepuasan layanan puskesmas		80,5	80,5	80,5	80,5						
				Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit		78	78	78	78						
				Persentase baduta <i>stunting</i>		9%	9%	9%	9%						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran			
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD							
1	02	02	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						30.560.000,00	-		
1	02	02	2,01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	unit	unit	59 unit		30.560.000,00			
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						3.600.999.932,00	2.238.000.000,00		
1	02	02	2,02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	954 Orang		62.940.000,00			
1	02	02	2,02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	2.594 Orang		146.220.000,00			
1	02	02	2,02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	9.940 Orang		50.040.000,00			
1	02	02	2,02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	35.635 Orang		17.820.000,00			
1	02	02	2,02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	5.295 Orang		8.520.000,00			
1	02	02	2,02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	Orang	110 Orang		7.200.000,00			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
1.02.02.2,02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Orang	Orang	1.174 Orang	49.260.000,00			
1.02.02.2,02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Orang	Orang	1.604 Orang	2.700.000,00			
1.02.02.2,02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	289.648.125,00			
1.02.02.2,02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.880.000,00			
1.02.02.2,02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	23.640.000,00			
1.02.02.2,02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	37.800.000,00			
1.02.02.2,02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	219.360.000,00			
1.02.02.2,02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		Paket	Paket	1 Paket	5.500.000,00			
1.02.02.2,02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.631.854.807,00	2.238.000.000,00		
1.02.02.2,02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Laporan	Laporan	1 Laporan	6.017.000,00		APBD	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran			
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD							
1	02	02	2,02	40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	Orang	94 Orang	39.600.000,00			
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS					36.080.000,00			
1	02	05	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif					36.080.000,00			
1	02	05	2,03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	36.080.000,00			
					Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Jebus						2.727.145.490,00	1.662.000.000,00		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian SPM bidang kesehatan	93%	93%	93%	93%	2.686.865.490,00	1.662.000.000,00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	
					Tingkat Kepuasan layanan puskesmas	80,5	80,5	80,5	80,5					
					Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	78	78	78	78					
					Persentase baduta <i>stunting</i>	9%	9%	9%	9%					
1	02	02	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						23.360.000,00	-		
1	02	02	2,01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		unit	unit	40 unit	23.360.000,00			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RPKD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan								
			Tolok Ukur	Target RPKD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD			Prioritas Pembangunan Nasional	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						2.663.505.490,00	1.662.000.000,00			
1.02.02.2.02.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang	Orang	386 Orang	61.600.000,00			
1.02.02.2.02.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang	Orang	1.245 Orang	100.850.000,00			
1.02.02.2.02.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang	Orang	4.203 Orang	21.960.000,00			
1.02.02.2.02.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang	Orang	15.554 Orang	6.660.000,00			
1.02.02.2.02.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang	Orang	1.856 Orang	2.640.000,00			
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Orang	Orang	75 Orang	7.920.000,00			
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Orang	Orang	499 Orang	13.200.000,00			
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Orang	Orang	496 Orang	1.320.000,00			
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	273.623.125,00			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RPKD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran		
			Tolok Ukur	Target RPKD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD						
1	02	02	2,02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8.400.000,00		
1	02	02	2,02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	14.040.000,00		
1	02	02	2,02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12.100.000,00		
1	02	02	2,02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	19.800.000,00		
1	02	02	2,02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	145.020.000,00		
1	02	02	2,02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		Paket	Paket	1 Paket	4.400.000,00		
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.961.452.365,00	1.662.000.000,00	
1	02	02	2,02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Laporan	Laporan	1 Laporan	1.320.000,00		APBD
1	02	02	2,02	40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	Orang	92 Orang	5.400.000,00		
1	02	02	2,02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		Orang	Orang	10 Orang	1.800.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran					
			Program/Kegiatan/Subkegiatan													
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD									
1	02	05						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS			40.280.000,00			
1	02	05	2,03					Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Posyandu Aktif			40.280.000,00			
1	02	05	2,03	01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		40.280.000,00			
								Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Puput					1.430.597.362,00	663.000.000,00		
1	02	02						PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase capaian SPM bidang kesehatan	93%	93%	93%	93%	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	
									Tingkat Kepuasan layanan puskesmas	80,5	80,5	80,5	80,5			
									Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	78	78	78	78			
									Persentase baduta stunting	9%	9%	9%	9%			
1	02	02	2,01					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					13.490.000,00	-		
1	02	02	2,01	20				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	unit	unit	23 unit	13.490.000,00		
1	02	02	2,02					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1.397.817.362,00	663.000.000,00		
1	02	02	2,02	1				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	395 Orang	35.740.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran		
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD						
1	02	02	2,02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	1.285 Orang	54.420.000,00		
1	02	02	2,02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	4.506 Orang	17.640.000,00		
1	02	02	2,02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	15.164 Orang	4.860.000,00		
1	02	02	2,02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	2.190 Orang	1.200.000,00		
1	02	02	2,02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	Orang	55 Orang	3.600.000,00		
1	02	02	2,02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	Orang	505 Orang	23.280.000,00		
1	02	02	2,02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	Orang	423 Orang	1.800.000,00		
1	02	02	2,02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	191.008.125,00		
1	02	02	2,02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.160.000,00		
1	02	02	2,02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.960.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran		
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD						
1	02	02	2,02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-		
1	02	02	2,02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12.720.000,00		
1	02	02	2,02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	140.760.000,00		
1	02	02	2,02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		Paket	Paket	1 Paket	3.300.000,00		
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	866.569.237,00	663.000.000,00	
1	02	02	2,02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Laporan	Laporan	1 Laporan	600.000,00		APBD
1	02	02	2,02	40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	Orang	53 Orang	14.400.000,00		
1	02	02	2,02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		Orang	Orang	1217 Orang	7.800.000,00		
													APBD
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS					19.290.000,00		
1	02	05	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif					19.290.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RPKD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran			
			Program/Kegiatan/Subkegiatan									Prioritas Pembangunan Nasional		
			Tolok Ukur	Target RPKD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD							
1	02	05	2,03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					1 Dokumen	19.290.000,00			
					Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Kelapa						3.640.114.918,00	2.122.000.000,00		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian SPM bidang kesehatan	93%	93%	93%	93%	3.560.574.918,00	2.122.000.000,00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	
					Tingkat Kepuasan layanan puskesmas	80,5	80,5	80,5	80,5					
					Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	78	78	78	78					
					Persentase baduta <i>stunting</i>	9%	9%	9%	9%					
1	02	02	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						22.060.000,00	-		
1	02	02	2,01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		unit	unit	38 unit	22.060.000,00			
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						3.538.514.918,00	2.122.000.000,00		
1	02	02	2,02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang	Orang	620 Orang	107.200.000,00			
1	02	02	2,02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang	Orang	2.209 Orang	181.710.000,00			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
1.02.02.2.02.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang	Orang	5.922 Orang	30.240.000,00			
1.02.02.2.02.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang	Orang	24.106 Orang	13.140.000,00			
1.02.02.2.02.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang	Orang	2.657 Orang	10.800.000,00			
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Orang	Orang	65 Orang	11.520.000,00			
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Orang	Orang	770 Orang	8.160.000,00			
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Orang	Orang	804 Orang	6.000.000,00			
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	420.588.125,00			
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.040.000,00			
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	16.320.000,00			
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.580.000,00			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran			
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD							
1	02	02	2,02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	13.200.000,00			
1	02	02	2,02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	176.400.000,00			
1	02	02	2,02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	Paket	1 Paket	4.400.000,00			
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.528.536.793,00	2.122.000.000,00		
1	02	02	2,02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	Laporan	1 Laporan	1.680.000,00		APBD	
													APBD	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS				79.540.000,00			
1	02	05	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Posyandu Aktif				79.540.000,00			
1	02	05	2,03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			1 Dokumen	79.540.000,00			
													APBD	
					Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Tempilang						3.336.897.951,00	2.050.000.000,00		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA		Persentase capaian SPM bidang kesehatan	93%	93%	93%	93%	3.300.357.951,00	2.050.000.000,00	Meningkatkan sumber daya manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RPKD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
			Tolok Ukur	Target RPKD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
	KESEHATAN MASYARAKAT		Tingkat Kepuasan layanan puskesmas	80,5	80,5	80,5	80,5			berkualitas dan berdaya saing	
			Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	78	78	78	78				
			Persentase baduta <i>stunting</i>	9%	9%	9%	9%				
1	⁰² 02	2,01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					19.790.000,00	-		
1	⁰² 02	2,01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			unit	unit	31 unit	19.790.000,00	
1	⁰² 02	2,02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.280.567.951,00	2.050.000.000,00		
1	⁰² 02	2,02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Orang	Orang	490 Orang	69.300.000,00	
1	⁰² 02	2,02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			Orang	Orang	1.764 Orang	114.060.000,00	
1	⁰² 02	2,02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Orang	Orang	4.992 Orang	25.560.000,00	
1	⁰² 02	2,02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			Orang	Orang	19.462 Orang	9.180.000,00	
1	⁰² 02	2,02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			Orang	Orang	2.410 Orang	2.160.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran		
			Program/Kegiatan/Subkegiatan									Prioritas Pembangunan Nasional	
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD						
1	02	02	2,02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	Orang	79 Orang	6.480.000,00		
1	02	02	2,02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	Orang	628 Orang	29.220.000,00		
1	02	02	2,02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	Orang	802 Orang	2.160.000,00		
1	02	02	2,02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	412.858.125,00		
1	02	02	2,02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.680.000,00		
1	02	02	2,02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.760.000,00		
1	02	02	2,02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.480.000,00		
1	02	02	2,02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	14.640.000,00		
1	02	02	2,02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	150.140.000,00		
1	02	02	2,02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	Paket	1 Paket	3.300.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran				
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.404.069.826,00	2.050.000.000,00		
1	02	02	2,02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Laporan	Laporan	1 Laporan	1.080.000,00			APBD
1	02	02	2,02	40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	Orang	10 Orang	7.200.000,00			
1	02	02	2,02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		Orang	Orang	2 Orang	240.000,00			
															APBD
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS					36.540.000,00			
1	02	05	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Posyandu Aktif					36.540.000,00			
1	02	05	2,03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	36.540.000,00			
					Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Simpangteritip							2.918.593.479,00	1.646.000.000,00		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase capaian SPM bidang kesehatan	93%	93%	93%	93%	2.882.593.479,00	1.646.000.000,00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	
					Tingkat Kepuasan layanan puskesmas	80,5	80,5	80,5	80,5						
					Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	78	78	78	78						
					Persentase baduta stunting	9%	9%	9%	9%						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						20.560.000,00	-			
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		unit	unit	34 unit	20.560.000,00			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						2.862.033.479,00	1.646.000.000,00			
1.02.02.2.02.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang	Orang	429 Orang	83.160.000,00			
1.02.02.2.02.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang	Orang	1.319 Orang	93.000.000,00			
1.02.02.2.02.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang	Orang	4.128 Orang	22.680.000,00			
1.02.02.2.02.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang	Orang	15.315 Orang	7.740.000,00			
1.02.02.2.02.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang	Orang	1.689 Orang	3.120.000,00			
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Orang	Orang	60 Orang	7.200.000,00			
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Orang	Orang	489 Orang	24.840.000,00			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RPKD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran		
			Tolok Ukur	Target RPKD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD						
1	02	02	2,02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Orang	Orang	745 Orang	1.560.000,00		
1	02	02	2,02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	440.748.125,00		
1	02	02	2,02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.560.000,00		
1	02	02	2,02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	11.880.000,00		
1	02	02	2,02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.340.000,00		
1	02	02	2,02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	14.640.000,00		
1	02	02	2,02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	133.500.000,00		
1	02	02	2,02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		Paket	Paket	1 Paket	2.200.000,00		
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.983.425.354,00	1.646.000.000,00	
1	02	02	2,02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Laporan	Laporan	1 Laporan	1.560.000,00		APBD
1	02	02	2,02	40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	Orang	25 Orang	17.280.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran			
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD							
1	02	02	2,02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	Orang	115 Orang	3.600.000,00			
														APBD
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS				36.000.000,00			
1	02	05	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Posyandu Aktif				36.000.000,00			
1	02	05	2,03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			1 Dokumen	36.000.000,00			
					Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Sekarbiru						1.848.297.895,00	1.258.000.000,00		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase capaian SPM bidang kesehatan	93%	93%	93%	93%	1.832.277.895,00	1.258.000.000,00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
							Tingkat Kepuasan layanan puskesmas	80,5	80,5	80,5	80,5			
							Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	78	78	78	78			
							Persentase baduta <i>stunting</i>	9%	9%	9%	9%			
1	02	02	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						21.360.000,00	-		
1	02	02	2,01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	unit	unit	36 unit	21.360.000,00			
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1.810.917.895,00	1.258.000.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan								
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
1.02.02.2.02.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang	Orang	259 Orang	34.540.000,00			
1.02.02.2.02.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang	Orang	752 Orang	42.480.000,00			
1.02.02.2.02.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang	Orang	2.399 Orang	8.280.000,00			
1.02.02.2.02.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang	Orang	8.362 Orang	5.760.000,00			
1.02.02.2.02.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang	Orang	1.061 Orang	1.200.000,00			
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Orang	Orang	25 Orang	3.600.000,00			
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Orang	Orang	274 Orang	20.160.000,00			
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Orang	Orang	349 Orang	1.800.000,00			
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	125.543.125,00			
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.760.000,00			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran			
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional				
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD							
1	02	02	2,02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12.240.000,00			
1	02	02	2,02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.600.000,00			
1	02	02	2,02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12.720.000,00			
1	02	02	2,02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	67.980.000,00			
1	02	02	2,02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	Paket	1 Paket	3.300.000,00			
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.441.554.770,00	1.258.000.000,00		
1	02	02	2,02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	Laporan	1 Laporan	600.000,00			APBD
1	02	02	2,02	40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	Orang	51 Orang	10.800.000,00			
1	02	02	2,02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	Orang	4 Orang	9.000.000,00			
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS				16.020.000,00			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran			
			Program/Kegiatan/Subkegiatan									Prioritas Pembangunan Nasional		
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD							
1	02	05	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						16.020.000,00			
1	02	05	2,03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	16.020.000,00			
					Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Kundi						1.325.678.973,00	641.000.000,00		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian SPM bidang kesehatan	93%	93%	93%	93%	1.311.918.973,00	641.000.000,00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	
					Tingkat Kepuasan layanan puskesmas	80,5	80,5	80,5	80,5					
					Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	78	78	78	78					
					Persentase baduta <i>stunting</i>	9%	9%	9%	9%					
1	02	02	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						23.820.000,00	-		
1	02	02	2,01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		unit	unit	43 unit	23.820.000,00			
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1.288.098.973,00	641.000.000,00		
1	02	02	2,02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang	Orang	143 Orang	25.760.000,00			
1	02	02	2,02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang	Orang	518 Orang	43.680.000,00			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan								
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
1.02.02.2.02.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang	Orang	1.539 Orang	8.640.000,00			
1.02.02.2.02.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang	Orang	5.862 Orang	5.040.000,00			
1.02.02.2.02.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang	Orang	740 Orang	1.960.000,00			
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Orang	Orang	29 Orang	2.880.000,00			
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Orang	Orang	191 Orang	6.000.000,00			
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Orang	Orang	208 Orang	480.000,00			
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	302.858.125,00			
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.560.000,00			
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.520.000,00			
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.280.000,00			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran			
			Program/Kegiatan/Subkegiatan									Prioritas Pembangunan Nasional		
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD							
1	02	02	2,02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.240.000,00			
1	02	02	2,02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	71.940.000,00			
1	02	02	2,02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	Paket	1 Paket	3.300.000,00			
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	797.880.848,00	641.000.000,00		
1	02	02	2,02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	Laporan	1 Laporan	480.000,00			APBD
1	02	02	2,02	40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	Orang	35 Orang	3.600.000,00			
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS				13.760.000,00			
1	02	05	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Posyandu Aktif				13.760.000,00			
1	02	05	2,03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			1 Dokumen	13.760.000,00			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan												
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD			Prioritas Pembangunan Nasional					
1	03					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					113.981.470.430,00	12.973.314.840,00			
						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					113.981.470.430,00	12.973.314.840,00			
1	03	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	6.923.280.000,00	7.353.480.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
1	03	01	2,01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.500.000,00	28.000.000,00		
1	03	01	2,01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	300.000,00	10.000.000,00	APBD
1	03	01	2,01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	2.000.000,00	APBD
1	03	01	2,01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	2.000.000,00	APBD
1	03	01	2,01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	300.000,00	8.000.000,00	APBD
1	03	01	2,01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	6.000.000,00	APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RPKD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RPKD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
1	03	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	4.290.900.000,00	4.510.000.000,00		
1	03	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	40 Orang/Bulan	40 Orang/Bulan	40 Orang/Bulan	4.290.000.000,00	4.500.000.000,00		APBD
1	03	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	2.000.000,00		APBD
1	03	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	4.000.000,00		APBD
1	03	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD
1	03	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	300.000,00	6.000.000,00		
1	03	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD
1	03	01	2,04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	300.000,00	2.500.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
1.03.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	2.500.000,00		APBD
1.03.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	900.000,00	96.500.000,00		
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0 Paket	0 Paket	Paket		12.500.000,00		APBD
1.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD
1.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	300.000,00	20.000.000,00		APBD
1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	300.000,00	60.000.000,00		APBD
1.03.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	550.300.000,00	614.500.000,00		
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	8.000.000,00	10.000.000,00		APBD
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 paket	3 paket	3 paket				
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	9.000.000,00	7.000.000,00		APBD
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	45.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RPKD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RPKD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
1	03	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	30.000.000,00	35.000.000,00		APBD
1	03	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	3.000.000,00	5.000.000,00		APBD
1	03	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	130.000.000,00	110.000.000,00		APBD
1	03	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	320.000.000,00	400.000.000,00		APBD
1	03	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	300.000,00	2.500.000,00		APBD
1	03	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	2.043.080.000,00	1.824.980.000,00		
1	03	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00		APBD
1	03	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	120.000.000,00		APBD
1	03	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	40.000.000,00		APBD
1	03	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.811.080.000,00	1.662.980.000,00		APBD
1	03	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	36.000.000,00	271.000.000,00		
1	03	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	21.000.000,00	21.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran			
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional				
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD							
						Perizinannya								
2	11 01 2,09 03					Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya			1 unit	1 unit				
1	03 01 2,09 09	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	15.000.000,00	250.000.000,00	APBD	
1	03 01 2,09 10					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		unit	3 unit	3 unit				
1	03 02					PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					1.958.558.428,00	175.000.000,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	
						Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi teknis primer dan sekunder	42%	42%	42%	42%			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	
						Persentase titik banjir yang dimitigasi	54%	54%	54%	54%				
1	03 02 2,01					Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah titik banjir akibat sedimentasi dan gelombang air laut yang di mitigasi	8 Titik	8 Titik	8 Titik	8 Titik	1.858.558.428,00	-	
1	03 02 2,01 01					Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang disusun		1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran			
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD							
1	03	02	2.01	33	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	0,075 KM	0,075 KM	0,075 KM	241.807.628,00		
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1,3 KM	1,3 KM	1,3 KM	1,3 KM	1.591.850.800,00		Reses
					Normalisasi Sungai Kawasan Jembatan Jalan Penghubung RT 11-RT 03 Desa Kelapa									
					Normalisasi Sungai Kawasan Pasar Desa Puput									
					Normalisasi Sungai Kawasan Jembatan Desa Sinar Manik									
					Normalisasi Sungai Kawasan Jembatan Desa Sungai Buluh									
					Normalisasi Sungai Kawasan Jembatan Desa Tumbak Petar - Desa Limbung Jebus									
1	03	02	2.01	58	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam		Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	24.900.000,00		Renja
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik	48,43%	%	%	48,43%	100.000.000,00	175.000.000,00	
1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	2 Dokumen	1Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	Renja
1	03	02	2.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	desa tebing, kecamatan kelapa	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun		KM	0,010 KM	0,010 KM			Renja
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	desa tebing, kecamatan kelapa	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi		KM	0,010 KM	0,010 KM		75.000.000,00	Renja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran				
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
1	03	02	2,02	22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi		Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 Bendung	3 Bendung	3 Bendung				APBD	
					Pemeliharaan Bendung D.I Tebing Bulin			1 Bendung	1 Bendung	1 Bendung				Renja	
					Pemeliharaan Bendung D.I Pebuar			1 Bendung	1 Bendung	1 Bendung				Renja	
					Pemeliharaan Embung D.I Simpang Yul			1 Bendung	1 Bendung	1 Bendung				Renja	
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum jaringan perpipaan (SPAM)	17,78%	17,78%	17,78%	17,78%	1.850.190.000,00	695.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	
1	03	03	2,01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota		Persentase SPAM dalam Kondisi Baik dan Berfungsi	100%	100%	100%	100%	1.850.190.000,00	695.000.000,00		
1	03	03	2,01	14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM		Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya	31 Penyelenggara SPAM	31 Penyelenggara SPAM	31 Penyelenggara SPAM	31 Penyelenggara SPAM	5.540.000,00	25.000.000,00		APBD
1	03	03	2,01	16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	114.450.000,00	120.000.000,00		APBD
1	03	03	2,01	19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Jumlah SR yang terpasang di Kawasan Perdesaan	250 SR	250 SR	250 SR	250 SR	1.730.200.000,00	550.000.000,00		APBD
1	03	03	2,01	7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		Perluasan Jangkauan SPAM IKK/Perkotaan			195 SR	195 SR		550.000.000,00		APBD
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan (TPA & TPST)	28,57%	28,57%	28,57%	28,57%	405.000.000,00	300.000.000,00	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	
1	03	04	2,01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota yang	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	405.000.000,00	300.000.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran				
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
						beroperasi									
1	03	04	2.01	01	Penyusunan Rencana, kebijakan, strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS -3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen		200.000.000,00		APBD	
1	03	04	2.01	04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS -3R/TPS yang Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	405.000.000,00	100.000.000,00		APBD	
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Sarana Prasarana Sistem Air Limbah Domestik Berkondisi Layak	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	493.992.202,00	939.834.840,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing		
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Sarana Air Limbah Domestik Layak dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	100%	493.992.202,00	939.834.840,00			
1	03	05	2.01	05	Rehabilitasi / Peningkatan / Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	100 Rumah tangga	100 Rumah tangga	100 Rumah tangga	100 Rumah tangga	69.775.000,00	70.000.000,00		APBD	
1	03	05	2.01	06	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	20 Rumah tangga	20 Rumah tangga	16 Rumah tangga	29 Rumah tangga	210.000.000,00	500.000.000,00		Renja + Reses	
1	03	05	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	23 unit	23 unit	23 unit	23 unit	67.509.800,00	43.759.800,00		APBD	
1	03	05	2.01	14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	500 Rumah tangga	500 Rumah tangga	500 Rumah tangga	500 Rumah tangga	146.707.402,00	196.075.040,00		APBD
1	03	05	2.01	15	Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	M ³ /Hari	M ³ /Hari	M ³ /Hari	M ³ /Hari		30.000.000,00			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan												
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD			Prioritas Pembangunan Nasional					
1	03	05	2,01	16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT		Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	0 M ³ /Hari	0 M ³ /Hari	0 M ³ /Hari	0 M ³ /Hari		100.000.000,00		
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Persentase sistem drainase dalam kondisi baik	82,47%	82,47%	82,47%	82,47%	70.920.000,00	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	
1	03	06	02		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		panjang drainase kondisi baik	0,9528	0,9528	0,9528	0,9528	70.920.000,00	-		
1	03	06	02	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	47.030.000,00			Renja
1	03	06	02	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase		Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	200 m	200 m	200 m	200 m	23.890.000,00			Renja
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Persentase Bangunan Gedung Negara dan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang tertangani	87%	87%	87%	87%	40.901.484.000,00	775.000.000,00	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	APBD
1	03	08	2,01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Jumlah Sarana dan Prasarana bangunan Gedung yang tertangani;Jumlah Bangunan yang memiliki IMB dan SLF	100%	100%	100%	100%	40.901.484.000,00	775.000.000,00		APBD
1	03	08	2,01	1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG		Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli	200 Dokumen	200 Dokumen	200 Dokumen	200 Dokumen	85.500.000,00	200.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
					(TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG										
1	03	08	2,01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	40.346.834.000,00			APBD
1	03	08	2,01	4	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	3.150.000,00	15.000.000,00		APBD
1	03	08	2,01	6	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan	unit	4 unit	4 unit	unit		60.000.000,00		
1	03	08	2,01	13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	2 unit	2 unit	2 unit	4 unit	466.000.000,00	500.000.000,00		APBD
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan yang tertangani	35,71%	35,71%	35,71%	35,71%	4.600.000.000,00	-	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	
1	03	09	2,01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungannya di daerah Kabupaten/Kota yang tertangani tahun n	100%	100%	100%	100%	4.600.000.000,00	-		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan								
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
1.03.09.2.01.03	Penataan bangunan dan lingkungan		Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	4.600.000.000,00	-		APBD
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	82,17%	82,17%	82,17%	82,17%	55.928.933.800,00	100.000.000,00	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	
			Persentase jembatan dalam kondisi baik	95,28%	95,28%	95,28%	95,28%				
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	79,52%	79,52%	79,52%	79,52%	55.928.933.800,00	100.000.000,00		
			Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik	95,28%	95,28%	95,28%	95,28%		-		
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00		APBD
	Jasa Penyelidikan Tanah untuk Pembangunan Jembatan Air Pelawan Kecamatan Kelapa										
	Review DED Jembatan Air Pelawan										
	Review DED Jalan Air Limau - Tanjung Ular										
	Kegiatan Penghitungan dan Penggantian Biaya Tegakan										
1.03.10.2.01.04	Survei Kondisi Jalan/Jembatan		Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	135.000.000,00	-		APBD
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan		Panjang Jalan yang Dibangun	7,1550 KM	7,1550 KM	7,1550 KM	7,1550 KM	2.750.000.000,00			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran				
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
1	03	10	2,01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar		Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	15 KM	15 KM	15 KM	15 KM	33.630.727.000,00			APBD
1	03	10	2,01	08	Rekonstruksi Jalan		Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	9.145 KM	9.145 KM	9.145 KM	9.145 KM	10.101.091.000,00			Reses+musren +renja
1	03	10	2,01	09	Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1,320 KM	1,320 KM	1,320 KM	1,320 KM	700.000.000,00			Reses
1	03	10	2,01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan		Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	13,323 KM	13,323 KM	13,323 KM	13,323 KM	4.950.150.800,00			Reses
1	03	10	2,01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan		Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	5 Km	5 Km	5 Km	5 Km	3.151.460.000,00			Renja
1	03	10	2,01	18	Rehabilitasi Jembatan		Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	10 M	10 M	10 M	10 M	60.505.000,00			APBD
1	03	10	2,01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan		Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	30 M	30 M	30 M	30 M	150.000.000,00			APBD
1	03	10	2,01	24	Pembangunan Jalan Strategis Desa		Panjang Jalan Strategis Desa yang Dibangun	1.050 M	1.050 M	1.050 M	1.050 M	200.000.000,00			Reses
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi bersertifikasi	22,12%	22,12%	22,12%	22,12%	74.754.000,00	210.000.000,00	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	
1	03	11	2,01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Jumlah tenaga terampil konstruksi yang disertifikasi pada tahun n	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	63.054.000,00	110.000.000,00		
1	03	11	2,01	03	Penyiapan SOP penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi		Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.050.000,00	10.000.000,00		APBD
1	03	11	2,01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	61.004.000,00	100.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RPKD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RPKD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
					Mengikuti Pelatihan										
1	03	11	2,02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten	Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang diselenggarakan	1 sistem informasi	1 sistem informasi	1 sistem informasi	1 sistem informasi	11.700.000,00	50.000.000,00			
1	03	11	2,01	06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	11.700.000,00	50.000.000,00		APBD	
1	03	11	2,04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase jasa konstruksi yang dilakukan pengawasan	100%	100%	100%		-	50.000.000,00			
1	03	11	2,01	01	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		-	50.000.000,00		APBD	
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	persentase kebijakan penataan ruang	28,57%	28,57%	28,57%	28,57%	774.358.000,00	2.425.000.000,00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan		
1	03	12	2,01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah RTRW dan RRTR yang sudah ditetapkan	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	200.000.000,00	550.000.000,00			
1	03	12	2,01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	400.000.000,00		APBD
1	03	12	2,01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	Dokumen		150.000.000,00		
1	03	12	2,02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Kebijakan Perencanaan Tata Ruang yang disusun	2 Rancangan kebijakan	2 Rancangan kebijakan	2 Rancangan kebijakan	2 Rancangan kebijakan	500.000.000,00	1.000.000.000,00			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
1	03	12	2,02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kab	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	500.000.000,00	1.000.000.000,00		APBD
1	03	12	2,03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Jenis data base pemanfaatan ruang	Jenis	0 Jenis	0 Jenis	Jenis		600.000.000,00		
1	03	12	2,03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	dokumen	0 dokumen	0 dokumen	dokumen		100.000.000,00		
1	03	12	2,03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	sistem informasi	0 sistem informasi	0 sistem informasi	sistem informasi		500.000.000,00		
1	03	12	2,04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Persentase objek ruang yang dilakukan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	100%	100%	100%	100%	74.358.000,00	275.000.000,00		
1	03	12	2,04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	dokumen	0 dokumen	0 dokumen	dokumen		75.000.000,00		
1	03	12	2,04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	74.358.000,00	200.000.000,00		APBD
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							11.828.135.570,00	9.374.800.000,00		
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN							11.828.135.570,00	9.374.800.000,00		
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	5.816.805.000,00	6.453.800.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran		
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional			
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD						
									dan transformasi pelayanan publik				
1	⁰⁴ 01 2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.500.000,00	28.000.000,00		
1	⁰⁴ 01 2,01 01	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	300.000,00	10.000.000,00		APBD	
1	⁰⁴ 01 2,01 02	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD	
1	⁰⁴ 01 2,01 03	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD	
1	⁰⁴ 01 2,01 06	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	300.000,00	8.000.000,00		APBD	
1	⁰⁴ 01 2,01 07	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD	
1	⁰⁴ 01 2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	3.430.900.000,00	3.510.000.000,00			
1	⁰⁴ 01 2,02 01	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	3.430.000.000,00	3.500.000.000,00		APBD	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rancangan RKP	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan						Prioritas Pembangunan Nasional		
							Tolok Ukur	Target RKP	Target Usulan OPD	Target PRKP					Target PRKP
1	04	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	2.000.000,00		APBD
1	04	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/S emesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	4.000.000,00		APBD
1	04	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD
1	04	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	300.000,00	6.000.000,00		
1	04	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD
1	04	01	2,04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	237.615.000,00	2.500.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
1.04.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	237.615.000,00	2.500.000,00		APBD
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	900.000,00	44.500.000,00		
1.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0 Paket	0 Paket	Paket		12.500.000,00		APBD
1.04.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD
1.04.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	28 orang	28 orang	28 orang	28 orang	300.000,00	7.000.000,00		APBD
1.04.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28 orang	28 orang	28 orang	28 orang	300.000,00	21.000.000,00		APBD
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	349.300.000,00	887.500.000,00		
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	2.000.000,00		APBD
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RPKD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RPKD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
1	04	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	8.000.000,00		APBD
1	04	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	45.000.000,00	50.000.000,00		APBD
1	04	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	275.000.000,00		APBD
1	04	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3.000.000,00	5.000.000,00		APBD
1	04	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	45.000.000,00	45.000.000,00		APBD
1	04	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	220.000.000,00	500.000.000,00		APBD
1	04	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	2.500.000,00		APBD
1	04	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.751.290.000,00	1.917.170.000,00		
1	04	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00		APBD
1	04	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	117.000.000,00	117.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran			
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional				
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD							
1	⁰⁴ 01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	50.000.000,00		APBD
1	⁰⁴ 01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.627.290.000,00	1.748.170.000,00		APBD
1	⁰⁴ 01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	45.000.000,00	58.130.000,00		
1	⁰⁴ 01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	30.000.000,00	8.200.000,00		APBD
1	⁰⁴ 01	2,09	9	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	7.000.000,00		APBD
1	⁰⁴ 01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 unit	13 unit	13 unit	13 unit	5.000.000,00	7.930.000,00		APBD
1	⁰⁴ 01	2,09	11	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5.000.000,00	35.000.000,00		APBD
1	⁰⁴ 02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase rumah akibat bencana alam/ sosial yang tertangani	100%	100%	100%	100%	735.065.000,00	832.500.000,00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
1	04	02	2,01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang terdata	100%	100%	4 dokumen	4 dokumen	67.050.000,00	200.000.000,00		
1	04	02	2,01	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	29.050.000,00	90.000.000,00		APBD
1	04	02	2,01	2	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	34.450.000,00	90.000.000,00		APBD
1	04	02	2,01	03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.775.000,00	10.000.000,00		APBD
1	04	02	2,01	05	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.775.000,00	10.000.000,00		APBD
1	04	02	2,03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Rumah yang dibangun dan direhabilitasi bagi Korban bencana atau relokasi Program Kabupaten/Kota	15 Unit	15 Unit	10 Unit	10 Unit	602.960.000,00	632.500.000,00		
1	04	02	2,03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	5 Unit Rumah	5 Unit Rumah	5 Unit Rumah	5 Unit Rumah	144.735.000,00	137.500.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	10 Unit Rumah	5 Unit Rumah	5 Unit Rumah	5 Unit Rumah	458.225.000,00	495.000.000,00		APBD
1.04.02.2.06	Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan		Persentase izin pembangunan dan pengembangan perumahan yang diterbitkan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	65.055.000,00	-		
1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan		Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	65.055.000,00			APBD
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang tertangani	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	1.155.310.000,00	1.163.500.000,00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		Persentase Izin pembangunan dan pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%	129.860.000,00	113.500.000,00		
1.04.03.2.01.2	Penyusunan dan/atau Review serta legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	65.910.000,00	-		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
1.04.03.2.01.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	63.950.000,00	113.500.000,00		APBD
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha		Jumlah dokumen perencanaan, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibaaawah 10 ha	1 Kali	1 Kali	1 dokumen	1 dokumen	245.550.000,00	-		
1.04.03.2.02.2	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh		Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	245.550.000,00	-		APBD
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang tertangani	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	779.900.000,00	1.050.000.000,00		
1.04.03.2.03.1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Perumahan Permukiman KUmuh		Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Perumahan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	245.800.000,00	250.000.000,00		APBD
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kawasan Kumuh Kabupaten	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	2 Unit rumah	2 Unit rumah	2 Unit rumah	2 Unit rumah	58.800.000,00	300.000.000,00		APBD
1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Kawasan Kumuh Kabupaten	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/ Dipugar	0,5 ha	0,5 ha	0,5 ha	0,5 ha	475.300.000,00	500.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran									
			Program/Kegiatan/Subkegiatan									Prioritas Pembangunan Nasional								
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD													
1	04	04				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH						Persentase rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh yang tertangani	13,30%	13,30%	13,30%	13,30%	1.188.075.000,00	1.150.000.000,00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	
1	04	04	2,01			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang dibangun/direhabilitasi pada Kabupaten/Kota	40 Unit	40 Unit	38 Unit	43 Unit	1.188.075.000,00	1.150.000.000,00		
1	04	04	2,01	01		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	40 Unit rumah	38 Unit rumah	38 Unit rumah	43 Unit rumah	1.170.675.000,00	1.050.000.000,00			APBD & Musren Kec			
1	04	04	2,01	02		Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	17.400.000,00	100.000.000,00			APBD			
1	04	05				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU sesuai kewenangan	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	2.932.880.570,00	270.000.000,00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan					
1	04	05	2,01			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Persentase PSU Perumahan dalam Kondisi baik	100%	100%	100%	100%	2.932.880.570,00	270.000.000,00						
1	04	05	2,01	1		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.300.000,00	-			APBD			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Tanjung, Kec Muntok	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	17 Lokasi	17 Lokasi	17 Lokasi	17 Lokasi	2.818.980.570,00	220.000.000,00		Reses
1.04.05.2.01.05	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang		Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/ Pengelolaa n PSU Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	13.600.000,00	50.000.000,00		APBD
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							15.460.572.000,00	15.023.293.000,00		
	KESATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN							10.808.587.000,00	11.188.423.000,00		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	4.858.640.000,00	5.329.510.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.500.000,00	28.000.000,00		
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	300.000,00	10.000.000,00		APBD
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan						Prioritas Pembangunan Nasional	
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD				
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	2.000.000,00	APBD
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	300.000,00	8.000.000,00	APBD
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	300.000,00	6.000.000,00	APBD
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	3.870.900.000,00	4.010.000.000,00	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	3.870.000.000,00	4.000.000.000,00	APBD
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	2.000.000,00	APBD
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	4.000.000,00	APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RPKD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RPKD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
1	05	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	300.000,00	6.000.000,00		
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD
1	05	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	900.000,00	54.500.000,00		
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	paket	paket	paket		12.500.000,00		APBD
1	05	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD
1	05	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	38 orang	38 orang	38 orang	38 orang	300.000,00	9.500.000,00		APBD
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	38 orang	38 orang	38 orang	38 orang	300.000,00	28.500.000,00		APBD
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	424.800.000,00	656.500.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00		APBD
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00		APBD
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	57.500.000,00	50.000.000,00		APBD
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	30.000.000,00	40.000.000,00		APBD
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	3.000.000,00	5.000.000,00		APBD
1	05	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	45.000.000,00		APBD
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	270.000.000,00	500.000.000,00		APBD
1	05	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	300.000,00	2.500.000,00		APBD
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran				
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
1	05	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00		APBD
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	42.000.000,00	42.000.000,00		APBD
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	10.000.000,00		APBD
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	483.220.000,00	483.220.000,00		APBD
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	13.750.000,00	13.750.000,00		APBD
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	10.000.000,00	15.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit					4.270.000,00		APBD
1.05.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		7 unit	7 unit	7 unit	4.270.000,00	4.270.000,00		APBD
1.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Perda dan Perkada Terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Ditegakkan	100%	100%	100%	100%	5.053.470.000,00	4.703.633.000,00	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
1.05.02.2.01.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	4.979.255.000,00	4.479.133.000,00		
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	24 Kasus	24 Kasus	24 Kasus	24 Kasus	909.810.000,00	190.390.000,00		APBD
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	62 Kasus	62 Kasus	62 Kasus	62 Kasus	218.065.000,00	277.998.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	1.600.000,00	58.980.000,00		APBD
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	134 Orang	134 Orang	134 Orang	134 Orang	3.834.680.000,00	3.914.765.000,00		APBD
1	05	02	2.01	06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.100.000,00	37.000.000,00		APBD
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%	100%	74.215.000,00	224.500.000,00		
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Laporan	6 Laporan	6 Laporan	Laporan		52.500.000,00		APBD
1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	60 Laporan	60 Laporan	60 Laporan	60 Laporan	2.900.000,00	22.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RPKD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RPKD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
1	05	02	2.,02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	71.315.000,00	150.000.000,00		APBD
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Instansi terkait	32%	32%	32%	32%	896.477.000,00	1.155.280.000,00	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	
						Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh kelompok relawan	25%	25%	25%	25%					
						Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi non Kebakaran)	100%	100%	100%	100%					
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	100%	100%	100%	100%	849.062.000,00	1.071.380.000,00		
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	26.230.000,00	50.000.000,00		APBD
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	188.700.000,00	208.680.000,00		APBD
1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	525.740.000,00	704.300.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RPKD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran			
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional				
			Tolok Ukur	Target RPKD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD							
						Kebakaran dan Non Kebakaran								
1	05	04	2.01	05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	99.992.000,00	100.000.000,00		APBD
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	8.400.000,00	8.400.000,00		APBD
1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Terlaksananya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	300.000,00	10.000.000,00		
1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	10.000.000,00		APBD
1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	1.600.000,00	18.900.000,00		
1	05	04	2.03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.600.000,00	18.900.000,00		APBD
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan	100%	100%	100%	100%	45.515.000,00	55.000.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
							Kebakaran								
1	05	04	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran		Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	6 Desa / Kelurahan	6 Desa / Kelurahan	6 Desa / Kelurahan	6 Desa / Kelurahan	45.515.000,00	55.000.000,00		APBD
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							4.651.985.000,00	3.834.870.000,00		
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	3.150.260.000,00	2.951.690.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.500.000,00	28.000.000,00		
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	300.000,00	10.000.000,00		APBD
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan						Prioritas Pembangunan Nasional		
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD					Target PRKPD
1	0	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	300.000,00	8.000.000,00		APBD
1	0	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD
1	0	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	2.256.900.000,00	1.510.000.000,00		
1	0	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	2.256.000.000,00	1.500.000.000,00		APBD
1	0	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	2.000.000,00		APBD
1	0	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	4.000.000,00		APBD
1	0	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD
1	0	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	300.000,00	6.000.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
							Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
1	0	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD
1	0	2.0			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	900.000,00	36.500.000,00		
1	0	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	25 Paket	25 Paket	Paket		12.500.000,00		APBD
1	0	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD
5	0	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	300.000,00	5.000.000,00		APBD
5	0	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	300.000,00	15.000.000,00		APBD
1	0	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	402.300.000,00	641.500.000,00		
1	0	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran		
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional			
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD						
1 0 5	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	7 Paket					
1 0 5	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	APBD
1 0 5	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	45.000.000,00	45.000.000,00	APBD
1 0 5	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	25.000.000,00	35.000.000,00	APBD
1 0 5	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	5.000.000,00	APBD
1 0 5	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	45.000.000,00	40.000.000,00	APBD
1 0 5	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	270.000.000,00	500.000.000,00	APBD
1 0 5	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	2.500.000,00	APBD
1 0 5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	469.700.000,00	706.030.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
1	0	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00		APBD
1	0	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	33.600.000,00	48.000.000,00		APBD
1	0	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	5.000.000,00	10.000.000,00		APBD
1	0	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	429.100.000,00	646.030.000,00		APBD
1	0	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	18.660.000,00	23.660.000,00		
1	0	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5.000.000,00	5.000.000,00		APBD
1	0	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	10.000.000,00	15.000.000,00		APBD
1	0	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	3.660.000,00	3.660.000,00		APBD
1	0	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	1.501.725.000,00	883.180.000,00	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran		
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional			
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD						
					Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%		bencana, dan perubahan iklim		
					Persentase Penduduk Di Daerah Rawan bencana Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100%	100%	100%	100%				
05	03	2.01			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Ketersediaan data/informasi rawan bencana	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	36.050.000,00	50.000.000,00	
05	03	2.01	02		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	2.769 Orang	2.769 Orang	2.769 Orang	2.769 Orang	36.050.000,00	50.000.000,00	APBD
105	03	2.02			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	100%	100%	100%	1.310.675.000,00	632.880.000,00	
						Terlaksananya Pelayanan pasca bencana	100%	100%	100%	100%			
05	03	2.02	01		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	-	APBD
105	03	2.02	02		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	4.275.000,00	19.500.000,00	APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
	05	03	2.03	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	207.050.000,00	10.000.000,00		APBD
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		Jumlah laporan pelaksanaan penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	10.000.000,00	20.000.000,00		APBD
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	923.600.000,00	558.380.000,00		APBD
	05	03	2.02	09	Penyusunan rencana kontinjensi		Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00			APBD
	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	15.750.000,00	25.000.000,00		APBD
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%	100%	146.750.000,00	155.300.000,00		
	05	03	2.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas		Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	1 Laporan			9.650.000,00	10.000.000,00		APBD
	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana kab/ kota		SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.650.000,00	10.000.000,00		APBD
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	85.050.000,00	110.300.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
050320304	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	130 orang	130 orang	130 orang	130 orang	42.400.000,00	25.000.000,00		APBD
0503204	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	8.250.000,00	45.000.000,00		
050320403	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.350.000,00	35.000.000,00		APBD
050320405	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	3.900.000,00	10.000.000,00		APBD
106	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							9.130.104.000,00	10.218.175.000,00		
	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							9.130.104.000,00	10.218.175.000,00		
10601	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	5.749.709.000,00	6.608.775.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
10601201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.500.000,00	28.000.000,00		
1060120101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	300.000,00	10.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
1 0 6 01 2,01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD
1 0 6 01 2,01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD
1 0 6 01 2,01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	300.000,00	8.000.000,00		APBD
1 0 6 01 2,01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD
1 0 6 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	4.100.900.000,00	4.810.000.000,00		
1 0 6 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/Bulan	22 Orang/Bulan	23 Orang/Bulan	23 Orang/Bulan	4.100.000.000,00	4.800.000.000,00		APBD
1 0 6 01 2,02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	300.000,00	2.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
							Program/Kegiatan/Subkegiatan						Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD					Target PRKPD
1	0	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	300.000,00	4.000.000,00		APBD
1	0	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD
1	0	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	300.000,00	6.000.000,00		
1	0	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD
1	0	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	900.000,00	38.500.000,00		
1	0	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD
1	0	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	22 orang	22 orang	22 orang	22 orang	300.000,00	5.500.000,00		APBD
1	0	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22 orang	22 orang	22 orang	22 orang	300.000,00	16.500.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
1 0 6 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	481.874.000,00	656.500.000,00		
1 0 6 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00		APBD
1 0 6 01 2,06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 paket	3 paket	3 paket				APBD
1 0 6 01 2,06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00		APBD
1 0 6 01 2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00		APBD
1 0 6 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	30.000.000,00	40.000.000,00		APBD
1 0 6 01 2,06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	5.000.000,00		APBD
1 0 6 01 2,06 07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	45.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
1	0	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	334.574.000,00	500.000.000,00		APBD
1	0	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	2.500.000,00		APBD
1	0	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	939.235.000,00	1.038.675.000,00		
1	0	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00		APBD
1	0	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	45.675.000,00	45.675.000,00		APBD
1	0	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	50.000.000,00		APBD
1	0	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	886.560.000,00	941.000.000,00		APBD
1	0	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	-	-		
1	0	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		6 unit	1 unit	1 unit				APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
1	0	01	2,09		Pereliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	225.000.000,00	31.100.000,00		
1	0	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Perawatan, Biaya Perawatan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	10.000.000,00	10.000.000,00		APBD
1	0	01	2,09	09	Perawatan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	210.000.000,00	15.000.000,00		APBD
1	0	01	2,09	10	Perawatan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	5.000.000,00	6.100.000,00		APBD
1	0	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase PSKS yang aktif	100%	100%	100%	100%	487.800.000,00	511.000.000,00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	
1	0	02	2,03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pendamping yang menerima bimbingan sosial dan peningkatan kemampuan potensi	100%	100%	100%	100%	487.800.000,00	511.000.000,00		
1	0	02	2,03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	450.000.000,00	450.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran	
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional		
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD					
1 0 6	02 2,03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	36.000.000,00	36.000.000,00		APBD
1 0 6	02 2,03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Lembaga	15 Lembaga	15 Lembaga	15 Lembaga	300.000,00	20.000.000,00		APBD
1 0 6	02 2,03 05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Sertifikat	10 Sertifikat	10 Sertifikat	10 Sertifikat	1.500.000,00	5.000.000,00		APBD
1 0 6	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitas	100%	100%	100%	100%	2.321.600.000,00	2.509.000.000,00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	
1 0 6	04 2,01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Terselenggaranya layanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti	100%	100%	100%	100%	2.291.200.000,00	2.439.000.000,00		
1 0 6	04 2,01 01	Penyediaan Permakanan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1.090 Orang	1.090 Orang	822 Orang	822 Orang	1.969.900.000,00	1.962.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKP	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKP	Target Usulan OPD	Target PRKP	Target PRKP				
1	0	04	2,01	02	Penyediaan Sandang	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	68 Orang	68 Orang	68 Orang	68 Orang	19.680.000,00	22.000.000,00		APBD
1	0	04	2,01	03	Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	71.050.000,00	100.000.000,00		APBD
1	0	04	2,01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	5 orang	4 orang	4 orang	300.000,00	25.000.000,00		APBD
1	0	04	2,01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	57.050.000,00	40.000.000,00		APBD
1	0	04	2,01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0 Orang	0 Orang	Orang		40.000.000,00		APBD
1	0	04	2,01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	39.050.000,00	50.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
1	0	04	2,01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	134.170.000,00	200.000.000,00		APBD
1	0	04	2,02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100%	100%	100%	100%	30.400.000,00	70.000.000,00		
1	0	04	2,02	1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0 Orang	0 Orang	Orang		20.000.000,00		APBD
1	0	04	2,02	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	11.900.000,00	10.000.000,00		APBD
1	0	04	2,02	8	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0 Orang	0 Orang	Orang		20.000.000,00		APBD
1	0	04	2,02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota		jumlah dokumen hasil koordinasi dan kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	18.500.000,00	20.000.000,00		APBD
1	0	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%	100%	229.325.000,00	342.200.000,00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
1	0	05	2.01		Pemeliharaan Anak - Anak Terlantar		Terlaksananya Pemeliharaan Anak - Anak Terlantar	100%	100%	100%	100%	300.000,00	30.000.000,00		
1	0	05	2.01	1	Penjangkauan Anak - Anak Terlantar		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0 Orang	0 Orang	Orang		10.000.000,00		APBD
1	0	05	2.01	2	Rujukan Anak - Anak Terlantar		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	300.000,00	10.000.000,00		APBD
1	0	05	2.01	3	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar		Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang		10.000.000,00		APBD
1	0	05	2,02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya updating verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan PPKS	100%	100%	100%	100%	229.025.000,00	312.200.000,00		
1	0	05	2,02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	66.506 Orang	66.506 Orang	66.506 Orang	66.506 Orang	10.825.000,00	15.000.000,00		APBD
1	0	05	2,02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	23.122 Keluarga	23.122 Keluarga	23.122 Keluarga	23.122 Keluarga	7.700.000,00	84.400.000,00		APBD
1	0	05	2,02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	286 Keluarga	286 Keluarga	286 Keluarga	286 Keluarga	210.500.000,00	212.800.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
1	06				PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	100%	100%	100%	100%	341.670.000,00	247.200.000,00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	
1	06	2,01			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial	100%	100%	100%	100%	33.750.000,00	37.500.000,00		
1	06	2,01	01		Penyediaan Makanan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	33.750.000,00	37.500.000,00		APBD
1	06	2,02			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase jumlah taruna siaga bencana dalam penanganan korban bencana, koordinasi dan sosialisasi kesiapsiagaan bencana	100%	100%	100%	100%	307.920.000,00	209.700.000,00		
1	06	2,02	01		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	1 Kampung	1 Kampung	1 Kampung	10.000.000,00	10.000.000,00		APBD
1	06	2,02	02		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	104 orang	104 orang	104 orang	104 orang	297.920.000,00	199.700.000,00		APBD
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							122.794.092.922,00	88.280.001.643,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
2	07					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					5.194.225.560,00	6.297.397.560,00			
						DINAS PENANAMAN MODAL, PPTSP, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					5.194.225.560,00	6.297.397.560,00			
2	07	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	4.811.710.000,00	5.681.570.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
2	07	01	2,01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.500.000,00	28.000.000,00		
2	07	01	2,01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	300.000,00	10.000.000,00	APBD
2	07	01	2,01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	2.000.000,00	APBD
2	07	01	2,01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	2.000.000,00	APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan						Prioritas Pembangunan Nasional		
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD					Target PRKPD
2	07	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	300.000,00	8.000.000,00		APBD
2	07	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD
2	07	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	3.600.900.000,00	4.010.000.000,00		
2	07	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/Bulan	26 Orang/Bulan	26 Orang/Bulan	26 Orang/Bulan	3.600.000.000,00	4.000.000.000,00		APBD
2	07	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	300.000,00	2.000.000,00		APBD
2	07	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	300.000,00	4.000.000,00		APBD
2	07	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
2	07	01	2,04		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	300.000,00	6.000.000,00		
2	07	01	2,04	04	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD
2	09	01	2,03		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	300.000,00	2.500.000,00		
2	09	01	2,03	06	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	2.500.000,00		APBD
2	07	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	900.000,00	76.500.000,00		
2	07	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0 Paket	0 Paket	Paket		12.500.000,00		APBD
2	07	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD
2	07	01	2,05	03	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	300.000,00	15.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
2	07	01	2,05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	300.000,00	45.000.000,00		APBD
2	07	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	417.300.000,00	656.500.000,00		
2	07	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00		APBD
2	07	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 paket	2 paket	2 paket				
2	07	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00		APBD
2	07	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00		APBD
2	07	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	30.000.000,00	40.000.000,00		APBD
2	07	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	5.000.000,00		APBD
2	07	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	45.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
2	07	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	270.000.000,00	500.000.000,00		APBD
2	07	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	2.500.000,00		APBD
2	07	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	-	-		
2	07	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		12 unit	2 unit	2 unit				
2	07	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	771.510.000,00	878.750.000,00		
2	07	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00		APBD
2	07	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	78.600.000,00	86.400.000,00		APBD
2	07	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	50.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
2	07	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	685.910.000,00	740.350.000,00		APBD
2	07	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	19.000.000,00	23.320.000,00		
2	07	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	4.000.000,00	2.000.000,00		APBD
2	07	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	10.000.000,00	14.000.000,00		APBD
7	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	5.000.000,00	7.320.000,00		APBD
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Cakupan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	40%	40%	40%	40%	354.615.560,00	465.360.560,00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	
2	07	03	2,01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Terlaksananya Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	5 jenis pelatihan	5 jenis pelatihan	5 jenis pelatihan	5 jenis pelatihan	354.615.560,00	465.360.560,00		
2	07	03	2,01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	354.615.560,00	465.360.560,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran						
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional							
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD										
2	07	04				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			Cakupan tenaga kerja terdaftar di bursa kerja yang ditempatkan	35%	35%	35%	35%	19.790.000,00	64.727.000,00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	
2	07	04	2,03			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			Tersedianya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	5 jenis/ 20 perusahaan	5 jenis/ 20 perusahaan	5 jenis/ 20 perusahaan	5 jenis/ 20 perusahaan	2.300.000,00	14.727.000,00		
2	07	04	2,03	02		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	2.300.000,00	14.727.000,00		APBD
2	07	04	2,05			Kegiatan Penerbitan perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota			Persentase tenaga kerja asing yang memiliki IMTA	0,0375	4%	4%	4%	17.490.000,00	50.000.000,00		
2	07	04	2,05	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota			Jumlah TKA yang melakukan perpanjangan IMTA	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	17.490.000,00	50.000.000,00		APBD
2	07	05				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			Cakupan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	100%	100%	100%	100%	8.110.000,00	85.740.000,00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	
2	07	05	2.01			Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota			persentase jumlah perusahaan yang mengikuti jaminan sosial tenaga kerja	100%	100%	100%	100%	300.000,00	10.000.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
2	07	05	2.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	10.000.000,00		APBD
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		persentase kasus perselisihan hubungan industrial mogok kerja dan penutupan perusahaan yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	7.810.000,00	75.740.000,00		
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	5 Perkara	5 Perkara	5 Perkara	5 Perkara	300.000,00	9.910.000,00		APBD
2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	3 Asosiasi dan Serikat Pekerja	3 Asosiasi dan Serikat Pekerja	3 Asosiasi dan Serikat Pekerja	3 Asosiasi dan Serikat Pekerja	300.000,00	5.000.000,00		APBD
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	6.910.000,00	50.000.000,00		APBD
2	07	05	2.02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2.682 Orang	2.682 Orang	2.682 Orang	2.682 Orang	300.000,00	10.830.000,00		APBD
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							5.099.330.000,00	5.463.170.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						5.099.330.000,00	5.463.170.000,00			
2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	4.036.260.000,00	4.708.340.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
2	14	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.500.000,00	28.000.000,00		
2	14	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	JumlahmDokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	300.000,00	10.000.000,00		APBD
2	14	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD
2	14	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD
2	14	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	300.000,00	8.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
2	14	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD
2	14	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2.720.900.000,00	3.010.000.000,00		
2	23	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.720.000.000,00	3.000.000.000,00		APBD
2	14	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	2.000.000,00		APBD
2	14	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	300.000,00	4.000.000,00		APBD
2	14	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD
2	14	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	300.000,00	6.000.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
2	14	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD
2	14	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	900.000,00	37.500.000,00		
5	03	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0 Paket	0 Paket	Paket		12.500.000,00		APBD
2	14	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD
5	03	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	21 orang	21 orang	21 orang	21 orang	300.000,00	5.250.000,00		APBD
5	03	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21 orang	21 orang	21 orang	21 orang	300.000,00	15.750.000,00		APBD
2	14	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	349.300.000,00	544.500.000,00		
2	14	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	4.000.000,00	5.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
2	14	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2 Paket	2 Paket				
2	14	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00		APBD
2	14	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	45.000.000,00	45.000.000,00		APBD
2	14	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	25.000.000,00	40.000.000,00		APBD
2	14	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	5.000.000,00		APBD
2	14	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	45.000.000,00	40.000.000,00		APBD
2	14	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	220.000.000,00	400.000.000,00		APBD
2	14	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	2.500.000,00		APBD
2	14	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	923.960.000,00	1.040.620.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
2	14	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00		APBD
2	14	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00		APBD
2	14	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	40.000.000,00		APBD
2	14	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	841.960.000,00	923.620.000,00		APBD
2	14	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	39.400.000,00	41.720.000,00		
2	14	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 unit	32 unit	32 unit	32 unit	15.400.000,00	15.400.000,00		APBD
		01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	4.000.000,00	4.000.000,00		APBD
2	14	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	15.000.000,00	15.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan						Prioritas Pembangunan Nasional		
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD					Target PRKPD
2	14	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	5.000.000,00	7.320.000,00		APBD
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase OPD yang responsif gender dalam mendukung pemberdayaan perempuan	40%	40%	40%	40%	135.000.000,00	166.500.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	
2	08	02	2,01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Penerapan PUG di lembaga pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	10.000.000,00	26.500.000,00		
2	08	02	2,01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Perangkat Daerah	31 Perangkat Daerah	31 Perangkat Daerah	31 Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00		APBD
2	08	02	2,01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	Perangkat Daerah		16.500.000,00		APBD
2	08	02	2,02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Penerapan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi di Lembaga Perempuan	Lembaga Perempuan	0 Lembaga Perempuan	0 Lembaga Perempuan	Lembaga Perempuan		12.500.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	Dokumen		12.500.000,00		APBD
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan	30 Persen	30 Persen	30 Persen	30 Persen	125.000.000,00	140.000.000,00		
2	08	02	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	0 Orang	0 Orang	Orang		15.000.000,00		APBD
2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	125.000.000,00	125.000.000,00		APBD
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase Korban Kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	160.818.700,00	60.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	
2	8	3	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dari total kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang terjadi	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	10.000.000,00	10.000.000,00		
2	8	3	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
			Kabupaten/Kota												
2	8	3	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Pesentase Jumlah laporan pengaduan yang dilayani/ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	136.818.700,00	25.000.000,00		
2	8	3	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	5 Orang	0 Orang	5 Orang		20.000.000,00	20.000.000,00		APBD
2	8	3	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	116.818.700,00	5.000.000,00		APBD
2	8	3	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Darah		Persentase Keikutsertaan lembaga Penyedia Layanan perlindungan perempuan dalam penanganan kasus	60 Persen	60 Persen	60 Persen		14.000.000,00	25.000.000,00		
2	8	3	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan			21.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
2	8	3	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	48 Orang				12.000.000,00	2.000.000,00		APBD
2	8	3	2.03	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen				2.000.000,00	2.000.000,00		APBD
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Persentase peningkatan keluarga yang dilakukan KIE Kesetaraan Gender dan perlindungan anak	75%	75%	75%	75%	258.330.000,00	278.330.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	
2	08	04	2,01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase layanan Kualitas Keluarga yang aktif	75 Persen	75 Persen	75 Persen	75 Persen	183.330.000,00	203.330.000,00		
2	08	04	2,01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	183.330.000,00	183.330.000,00		APBD
2	08	04	2,01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	0 Laporan	0 Laporan	Laporan		20.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran				
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
2	08	04	2,02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penguatan Lembaga Penyedia Layanan	75 Persen	75 Persen	75 Persen	75 Persen	10.000.000,00	10.000.000,00		
2	08	04	2,02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang		40 orang	40 orang	10.000.000,00	10.000.000,00		APBD
2	08	04	2,03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah unit layanan bagi Keluarga	2 unit				65.000.000,00	65.000.000,00		
2	08	04	2,03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Layanan				65.000.000,00	65.000.000,00		APBD
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase ketersediaan informasi gender dan anak	60%	60%	60%	60%	2.000.000,00	10.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	
2	08	05	2,01		Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota		Cakupan proses pelaksanaan data gender dan anak	100%	100%	100%	100%	2.000.000,00	10.000.000,00		
2	08	05	2,01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	10.000.000,00		APBD
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase peningkatan kelembagaan	75%	75%	75%	75%	128.000.000,00	193.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RPKD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RPKD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
							pemenuhan hak anak						Berkualitas dan Berdaya Saing		
2	08	06	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga PHA	2 Lembaga PHA	2 Lembaga PHA	2 Lembaga PHA	2 Lembaga PHA	15.000.000,00	15.000.000,00		
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	10 organisasi	10 organisasi	10 organisasi	10 organisasi	15.000.000,00	15.000.000,00		APBD
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase penguatan kualitas hidup anak	75 Persen	75 Persen	75 Persen	75 Persen	113.000.000,00	178.000.000,00		
2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	80.000.000,00	80.000.000,00		APBD
2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	33.000.000,00	33.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	Dokumen		65.000.000,00		APBD
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase Korban Kekerasan terhadap anak yang mendapat layanan komprehensif	100%	100%	100%	100%	378.921.300,00	47.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase keterlibatan pihak lingkup daerah dalam pencegahan kekerasan terhadap anak		Persen	Persen	100 persen	115.185.000,00	10.000.000,00		
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	115.185.000,00	10.000.000,00		APBD
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase jumlah layanan perlindungan khusus bagi anak	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	185.410.500,00	35.000.000,00		
2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang				30.000.000,00	30.000.000,00		APBD
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan		0 Layanan	0 Layanan	1 Layanan	155.410.500,00	5.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran	
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional		
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD					
					Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota							
2	08 07 2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak	0 persen	0 persen	100 persen	78.325.800,00	2.000.000,00		
2	08 07 2.03 02		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	78.325.800,00	2.000.000,00	APBD	
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						14.880.084.930,00	15.482.391.300,00		
			DINAS PERTANIAN DAN PANGAN						14.880.084.930,00	15.482.391.300,00		
2	09 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	14.647.093.800,00	15.085.391.300,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
2	09 01 2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.500.000,00	28.000.000,00	
2	09 01 2,01 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	300.000,00	10.000.000,00	APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran				
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
2	09	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD
2	09	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD
2	09	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	300.000,00	8.000.000,00		APBD
2	09	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD
2	09	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	11.825.900.000,00	12.010.000.000,00		
2	09	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	106 Orang/bulan	106 Orang/bulan	106 Orang/bulan	106 Orang/bulan	11.825.000.000,00	12.000.000.000,00		APBD
2	09	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	300.000,00	2.000.000,00		APBD
2	09	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	4.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran			
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional				
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD							
			Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD											
2	09	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD
2	09	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	300.000,00	6.000.000,00		
2	09	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD
2	09	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	900.000,00	16.500.000,00		
2	09	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0 Paket	0 Paket	Paket		12.500.000,00		APBD
2	09	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD
2	09	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	106 Orang	106 Orang	106 Orang	106 Orang	300.000,00	-		APBD
2	09	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	106 Orang	106 Orang	106 Orang	106 Orang	300.000,00	-		APBD
2	09	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	482.300.000,00	656.500.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
2	09	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	6.000.000,00		APBD
2	09	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	9.000.000,00	8.000.000,00		APBD
2	09	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1Paket	1Paket	1Paket	1Paket	70.000.000,00	50.000.000,00		APBD
2	09	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	40.000.000,00		APBD
2	09	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3.000.000,00	5.000.000,00		APBD
2	09	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	70.000.000,00	45.000.000,00		APBD
2	09	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	270.000.000,00	500.000.000,00		APBD
2	09	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	2.500.000,00		APBD
2	09	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	2.267.693.800,00	2.319.893.800,00		
2	09	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00		APBD
2	09	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	98.523.800,00	98.523.800,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
2	09	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	50.000.000,00		APBD
2	09	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.162.170.000,00	2.169.370.000,00		APBD
2	09	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	68.500.000,00	48.497.500,00		
2	09	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	83 Unit	83 Unit	83 Unit	83 Unit	23.500.000,00	23.500.000,00		APBD
2	09	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	40.000.000,00	14.017.500,00		APBD
2	09	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	18 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	5.000.000,00	10.980.000,00		APBD
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		persentase penyediaan infrastruktur kemandirian pangan	40%	40%	40%	40%	300.000,00	-	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		persentase penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	40%	40%	40%	40%	300.000,00	-		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RPKD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RPKD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
2	09	02	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	300.000,00			APBD
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		tingkat konsumsi pangan AKE	2100 kkal/kap/hr	2100 kkal/kap/hr	2100 kkal/kap/hr	2100 kkal/kap/hr	20.432.800,00	90.000.000,00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	
				tingkat konsumsi pangan AKP		57 gr/kap/hr	57 gr/kap/hr	57 gr/kap/hr	57 gr/kap/hr						
				Tingkat ketersediaan pangan AKE		1307 kkal/kap/hr	1307 kkal/kap/hr	1307 kkal/kap/hr	1307 kkal/kap/hr						
				Tingkat ketersediaan pangan AKP		60 gr/kap/hr	60 gr/kap/hr	60 gr/kap/hr	60 gr/kap/hr						
2	09	03	2,01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Terlaksananya penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah	90%	90%	90%	90%	18.632.800,00	40.000.000,00		
2	09	03	2,01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan		Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	5.752.700,00	15.000.000,00		APBD
2	09	03	2,01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan		Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12.880.100,00	25.000.000,00		APBD
2	09	03	2,04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		Tercapainya target konsumsi pangan perkapita pertahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG)	90%	90%	90%	90%	1.800.000,00	50.000.000,00		
2	09	03	2,04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun		Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000,00	15.000.000,00		APBD
2	09	03	2,04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	Laporan	-	35.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran						
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional							
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD										
2	09	04				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			Persentase penanganan daerah rawan pangan	50%	50%	50%	50%	163.900.000,00	225.000.000,00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	
2	09	04	2,01			Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			dokumen informasi kerentanan dan ketahanan pangan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	19.600.000,00	55.000.000,00		APBD
2	09	04	2,01	01		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	19.600.000,00	55.000.000,00		APBD
2	09	04	2,02			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			dokumen informasi situasi pangan dan gizi kabupaten	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	144.300.000,00	170.000.000,00		APBD
2	09	04	2,02	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	11.750.000,00	30.000.000,00		APBD
2	09	04	2,02	02		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	132.550.000,00	140.000.000,00		APBD
2	09	05				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman	90%	90%	90%	90%	48.358.330,00	82.000.000,00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	
2	09	05	2,01			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			Persentase jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman	90%	90%	90%	90%	48.358.330,00	82.000.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional								
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD				Target PRKPD					
2	09	05	2,01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.490.000,00	27.000.000,00		APBD
2	09	05	2,01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	43.868.330,00	55.000.000,00		APBD
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							3.286.117.500,00	1.775.000.000,00		
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							3.286.117.500,00	1.775.000.000,00		
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	48.180.000,00	85.000.000,00	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	
2	10	04	2,04		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten		Persentase konflik lahan tanah garapan yang di selesaikan	100%	100%	100%	100%	48.180.000,00	85.000.000,00		
2	10	04	2,04	01	Inventarisasi Sengketa ,Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 daerah Kabupaten		Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	29.015.000,00	50.000.000,00		APBD
2	10	04	2,04	02	Mediasi Penyelesaian SengketaTanah Garapan dalam 1 Daerah Kabupaten		Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten	4 Berita Acara	4 Berita Acara	4 Berita Acara	4 Berita Acara	19.165.000,00	35.000.000,00		APBD
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK		Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan	100%	100%	100%	100%	3.118.132.500,00	1.350.000.000,00	Memperkuat infrastruktur untuk	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
					PEMBANGUNAN		Santunan Tanah untuk Pembangunan						mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar		
2	10	05	2,01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	100%	100%	100%	100%	3.118.132.500,00	1.350.000.000,00		
2	10	05	2,01	01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	137.740.000,00	50.000.000,00		APBD
2	10	05	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.980.392.500,00	1.300.000.000,00		APBD
2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG		Persentase tanah kosong hasil inventarisasi yang telah dimanfaatkan	50%	50%	50%		-	160.000.000,00	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	
2	10	08	2,02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong		Persentase kecamatan yang tersedia data pemanfaatan tanah kosong	50 persil	50 persil	50 persil		-	160.000.000,00		
2	10	08	2,02	01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			160.000.000,00		APBD
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		Persentase ketersediaan data penatagunaan tanah	24%	24%	24%	24%	119.805.000,00	180.000.000,00	Memperkuat infrastruktur untuk	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran		
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional			
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD						
									mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar				
2	10 10 2,01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		Ketersediaan Data Penggunaan Tanah dalam satu Daerah Kabupaten	50 persil	50 persil	50 persil	50 persil	119.805.000,00	180.000.000,00		
2	10 10 2,01 01		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	15.955.000,00	150.000.000,00		APBD
2	10 10 2,01 03	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	103.850.000,00	30.000.000,00		APBD
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							15.414.623.940,00	12.431.325.710,00		
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP							15.414.623.940,00	12.431.325.710,00		
2	11 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	4.972.701.280,00	5.127.379.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
2	11 01 2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.500.000,00	28.000.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
2	11	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	300.000,00	10.000.000,00		APBD
2	11	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	300.000,00	2.000.000,00		APBD
2	11	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD
2	11	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	300.000,00	8.000.000,00		APBD
2	11	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD
2	11	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	3.135.900.000,00	2.810.000.000,00		
2	11	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 orang/ bulan	21 orang/ bulan	21 orang/ bulan	21 orang/ bulan	3.135.000.000,00	2.800.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
2	11	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	300.000,00	2.000.000,00		APBD
2	11	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	300.000,00	4.000.000,00		APBD
2	11	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD
2	11	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	300.000,00	6.000.000,00		
2	11	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD
2	11	01	2,04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	14.141.280,00	2.500.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
2	11	01	2,04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	14.141.280,00	2.500.000,00	#REF!	APBD
2	11	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	900.000,00	96.500.000,00		
2	11	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	0 paket	0 paket	paket		12.500.000,00		APBD
2	11	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD
2	11	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	21 Orang	21 Orang	21 Orang	21 Orang	300.000,00	20.000.000,00		APBD
2	11	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21 Orang	21 Orang	21 Orang	21 Orang	300.000,00	60.000.000,00		APBD
2	11	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	417.300.000,00	658.315.000,00		
2	11	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	6.000.000,00	7.815.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
2	11	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00		APBD
2	11	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00		APBD
2	11	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	30.000.000,00	40.000.000,00		APBD
2	11	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	3.000.000,00	5.000.000,00		APBD
2	11	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	45.000.000,00		APBD
2	11	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	270.000.000,00	500.000.000,00		APBD
2	11	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	300.000,00	2.500.000,00		APBD
2	11	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.349.660.000,00	1.458.814.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
2	11	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	2.000.000,00	6.182.000,00		APBD
2	11	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	177.960.000,00	201.960.000,00		APBD
2	11	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	5.000.000,00	50.000.000,00		APBD
2	11	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	1.164.700.000,00	1.200.672.000,00		APBD
2	11	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	53.000.000,00	67.250.000,00		
2	11	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43 Unit	43 Unit	43 Unit	43 Unit	33.000.000,00	35.600.000,00		APBD
2	11	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	15.000.000,00	22.500.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan						Prioritas Pembangunan Nasional		
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD					Target PRKPD
2	11	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 unit	15 unit	15 unit	15 unit	5.000.000,00	9.150.000,00		APBD
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	55 persen	55 persen	55 persen	55 persen	167.934.250,00	266.000.000,00	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	
2	11	02	2,01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		Persentase Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang disusun	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	25.665.750,00	-		
2	11	02	2,01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	2 dokumen	0 dokumen	0 dokumen		25.665.750,00	-		APBD
2	11	02	2,02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		Persentase Dokumen Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota yang disusun	17 persen	17 persen	17 persen	17 persen	142.268.500,00	266.000.000,00		
2	11	02	2,02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	142.268.500,00	266.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPDP	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKPDP	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
2	11	02	2,02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD		Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD kab/kota yang disusun		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	110.020.000,00	318.033.650,00	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	
2	11	03	2,01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Persentase terlaksananya pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat	100%	100%	100%	100%	90.300.000,00	268.048.700,00		
2	11	03	2,01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	87.100.000,00	103.683.500,00		APBD
2	11	03	2,01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.200.000,00	20.000.000,00		APBD
2	11	03	2,01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen			144.365.200,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
2	11	03	2,02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Persentase terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	19.720.000,00	49.984.950,00		
2	11	03	2,02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat		Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	19.720.000,00	49.984.950,00		APBD
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase lokasi keanekaragaman hayati yang terkelola	41,67 persen	41,67 persen	41,67 persen	41,67 persen	21.200.000,00	75.199.950,00	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	
2	11	04	2,01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Persentase Pembinaan Kelembagaan dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	21.200.000,00	75.199.950,00		
2	11	04	2,01	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	orang	0 orang	0 orang	orang		25.199.950,00		APBD
2	11	04	2,01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	9,92 Ha	9,92 Ha	9,92 Ha	9,92 Ha	21.200.000,00	50.000.000,00		APBD
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH		Persentase Pelaku Usaha yang dibina terkait Pengendalian	33%	33%	33%	33%	3.200.000,00	-	Membangun lingkungan hidup,	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
	BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Penyimpanan Sementara Limbah B3						meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim		
2	11 05 2,01		Penyimpanan Sementara Limbah B3	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	3.200.000,00	-		
2	11 05 2,01 02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.200.000,00	-	APBD	
2	11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin berusaha (yang memiliki AMDAL/UKL-UPL)	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	29.324.000,00	186.384.000,00	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	
2	11 06 2,01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	29.324.000,00	186.384.000,00		
2	11 06 2,01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	17.324.000,00	65.724.000,00	APBD	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rancangan RKP	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan						Prioritas Pembangunan Nasional		
							Tolok Ukur	Target RKP	Target Usulan OPD	Target PRKP					Target PRKP
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	12.000.000,00	120.660.000,00		APBD
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Jumlah komunitas pencinta lingkungan	1 komunitas	1 komunitas	1 komunitas	1 komunitas	6.050.000,00	10.000.000,00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	6.050.000,00	10.000.000,00		
2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.050.000,00	10.000.000,00		APBD
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase masyarakat/Lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi yang memperoleh penghargaan lingkungan	16 persen	16 persen	16 persen	16 persen	222.400.000,00	50.000.000,00	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
2	11	09	2,01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pelaksanaan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	222.400.000,00	50.000.000,00		
2	11	09	2,01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	19 Entitas	19 Entitas	19 Entitas	19 Entitas	222.400.000,00	50.000.000,00		APBD
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	5.200.000,00	15.000.000,00	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	
2	11	10	2,01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		Persentase terselesaikannya Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	5.200.000,00	15.000.000,00		
2	11	10	2,01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota		Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.200.000,00	15.000.000,00		APBD
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Jumlah sampah yang dikelola	5.208,86 Ton/Thn	5.208,86 Ton/Thn	5.208,86 Ton/Thn	5.208,86 Ton/Thn	8.609.126.310,00	5.434.547.810,00	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
2	11	11	2,01		Pengelolaan Sampah		Persentase sampah yang dikelola	63,54%	63,54%	63,54%	63,54%	8.609.126.310,00	5.434.547.810,00		
2	11	11	2,01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	16.600.000,00	25.000.000,00		APBD
2	11	11	2,01	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	8.592.526.310,00	5.409.547.810,00		APBD
2	11	11	2,01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5.195,86 ton							APBD
					Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0001 UPT Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Air Bero							1.177.806.100,00	804.416.100,00		
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Jumlah sampah yang dikelola	5.208,86 Ton/Thn	5.208,86 Ton/Thn	5.208,86 Ton/Thn	5.208,86 Ton/Thn	1.177.806.100,00	804.416.100,00	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	
2	11	11	2,01		Pengelolaan Sampah		Persentase sampah yang dikelola	63,54%	63,54%	63,54%	63,54%	1.177.806.100,00	804.416.100,00		
2	11	11	2,01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5.195,86 ton	5.195,86 ton	5.195,86 ton	5.195,86 ton	1.177.806.100,00	804.416.100,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan												
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD			Prioritas Pembangunan Nasional					
	Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0002 UPT Laboratorium Lingkungan							89.662.000,00	144.365.200,00						
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	89.662.000,00	144.365.200,00	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim		
2	11	03	2,01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat	100%	100%	100%	100%	89.662.000,00	144.365.200,00			
2	11	03	2,01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	89.662.000,00	144.365.200,00		APBD
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						5.130.101.382,00	5.153.050.000,00			
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						5.130.101.382,00	5.153.050.000,00			
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	4.783.428.582,00	4.730.550.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik		
2	12	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.500.000,00	28.000.000,00			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran			
			Program/Kegiatan/Subkegiatan											
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD			Prioritas Pembangunan Nasional				
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	300.000,00	10.000.000,00		APBD
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD
2	12	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	300.000,00	8.000.000,00		APBD
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2.605.900.000,00	2.310.000.000,00		
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.605.000.000,00	2.300.000.000,00		APBD
2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	300.000,00	2.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPDP	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKPDP	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
2	12	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	4.000.000,00		APBD
2	12	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD
2	12	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	300.000,00	6.000.000,00		
2	12	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	900.000,00	36.500.000,00		
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0 Paket	0 Paket	Paket		12.500.000,00		APBD
2	12	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD
2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	300.000,00	5.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
2	12	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	300.000,00	15.000.000,00		APBD
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	531.279.032,00	538.500.000,00		
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00		APBD
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	1 Paket				
2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	6.999.032,00	7.000.000,00		APBD
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	45.000.000,00	45.000.000,00		APBD
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	25.000.000,00	35.000.000,00		APBD
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	3.000.000,00	5.000.000,00		APBD
2	12	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	45.000.000,00	40.000.000,00		APBD
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	399.780.000,00	400.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
2	12	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00		APBD
2	12	01	2.08		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	-	-		
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		55 unit	26 unit	26 unit				
2	12	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		37 unit	3 unit	3 unit				
2	12	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		5 unit	5 unit	5 unit				
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.606.549.550,00	1.661.010.000,00		
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00		APBD
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00		APBD
2	12	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	39.979.550,00	40.000.000,00		APBD
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.464.570.000,00	1.519.010.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	37.000.000,00	150.540.000,00		
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit	Unit	Unit		35.000.000,00		APBD
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		10 Unit	10 Unit	10 Unit		70.000.000,00		APBD
2	12	01	2.11	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7.000.000,00	7.000.000,00		APBD
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	25.000.000,00	30.000.000,00		APBD
2	12	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 unit	14 unit	14 unit	14 unit	5.000.000,00	8.540.000,00		APBD
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan	83,30 persen	83,30 persen	83,30 persen	83,30 persen	296.253.000,00	300.000.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Persentase Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%	100%	46.875.000,00	59.932.800,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	500 Dokumen	500 Dokumen	500 Dokumen	500 Dokumen	1.875.000,00	20.000.000,00		APBD
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00	39.932.800,00		APBD
2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk		Persentase Pelaksanaan Penataan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%	100%	248.066.600,00	233.067.200,00		
2	12	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan		Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	25.000 Dokumen	25.000 Dokumen	25.000 Dokumen	25.000 Dokumen	248.066.600,00	233.067.200,00		APBD
2	12	02	2.04		Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk		Persentase pembinaan pendaftaran penduduk yang terselenggara	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	1.311.400,00	7.000.000,00		
2	12	02	2.04	02	Pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	1.311.400,00	7.000.000,00		APBD
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	67,51%	67,51%	67,51%	67,51%	31.359.800,00	50.000.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil		Persentase pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil	100%	100%	100%	100%	17.000.000,00	24.000.000,00		
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	2.000.000,00	9.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan						Prioritas Pembangunan Nasional		
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD					Target PRKPD
2	12	03	2.01	05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan		Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00		APBD
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil sesuai dengan aturan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	14.359.800,00	26.000.000,00		
2	12	03	2.02	01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	14.359.800,00	26.000.000,00		APBD
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Persentase ketersediaan data kependudukan	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	3.800.000,00	50.000.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Persentase Data yang terkumpul dan tersaji dengan akurat	100%	100%	100%	100%	1.900.000,00	9.830.000,00		
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.600.000,00	7.330.000,00		APBD
2	12	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan		Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	300.000,00	2.500.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran				
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang terselenggara dengan baik	100%	100%	100%	100%	1.600.000,00	29.000.000,00		
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	0 Laporan	0 Laporan	Laporan		18.000.000,00		APBD
2	12	04	2.03	08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat dipertanggungjawabkan		Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.600.000,00	11.000.000,00		APBD
2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terlaksana	100%	100%	100%	100%	300.000,00	11.170.000,00		
2	12	04	2.04	01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	11.170.000,00		APBD
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Persentase ketersediaan profil kependudukan	100%	100%	100%	100%	15.260.000,00	22.500.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan		Persentase Penyusunan profil kependudukan	100%	100%	100%	100%	15.260.000,00	22.500.000,00		
2	12	05	2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota		Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	Dokumen		2.500.000,00		APBD
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain		Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.260.000,00	20.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						1.573.577.500,00	1.719.842.500,00			
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						1.573.577.500,00	1.719.842.500,00			
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA		Persentase kebijakan penataan desa yang diterapkan di desa	100%	100%	100%	100%	30.467.500,00	20.000.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
2	13	02	2,01		Penyelenggaraan Penataan Desa		Terlaksananya penyelenggaraan penataan desa	60 Desa	60 Desa	60 Desa	60 Desa	30.467.500,00	20.000.000,00		
2	13	02	2,01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa		Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	11.640.000,00	-		APBD
2	13	02	2,01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	60 Desa	60 Desa	60 Desa	60 Desa	12.925.000,00	-		APBD
2	13	02	2,01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	60 Desa	60 Desa	60 Desa	60 Desa	5.902.500,00	20.000.000,00		APBD
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		Persentase kerja sama yang diimplementasi	31,67%	31,67%	31,67%	31,67%	18.340.000,00	100.000.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
2	13	03	2,01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa		Jumlah kerjasama yang terbentuk antar desa	15 kerjasama	15 kerjasama	15 kerjasama	15 kerjasama	18.340.000,00	100.000.000,00		
2	13	03	2,01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	7.720.000,00	25.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
2	13	03	2,01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	Dokumen		35.000.000,00		APBD
2	13	03	2,01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	10.620.000,00	40.000.000,00		APBD
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Persentase pemerintahan desa yang berkinerja baik	100%	100%	100%	100%	719.650.000,00	549.842.500,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
2	13	04	2,01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	60 desa	60 desa	60 desa	60 desa	719.650.000,00	549.842.500,00		
2	13	04	2,01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.915.000,00	12.780.000,00		APBD
2	13	04	2,01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8.775.000,00	24.515.000,00		APBD
2	13	04	2,01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	47.690.000,00	50.000.000,00		APBD
2	13	04	2,01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.687.500,00	74.297.500,00		APBD
2	13	04	2,01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	238.315.000,00	87.750.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
2	13	04	2,01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.795.000,00	20.000.000,00		APBD
2	13	04	2,01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	32.230.000,00	50.000.000,00		APBD
2	13	04	2,01	9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	224.377.500,00			
2	13	04	2,01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	7.795.000,00	-		APBD
2	13	04	2,01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Profil Desa	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	5.925.000,00	10.000.000,00		APBD
2	13	04	2,01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	13.165.000,00	70.000.000,00		APBD
2	13	04	2,01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	71 Orang	71 Orang	71 Orang	71 Orang	50.500.000,00	50.500.000,00		APBD
2	13	04	2,01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	69.480.000,00	100.000.000,00		APBD
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang Aktif	75%	75%	75%	75%	805.120.000,00	1.050.000.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
2	13	05	2,01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	50%	50%	50%	50%	805.120.000,00	1.050.000.000,00		
							Lembaga adat desa yang aktif	13 lembaga adat	13 lembaga adat	13 lembaga adat	13 lembaga adat				
							Alat Teknologi Tepat Guna yang dimanfaatkan	2 alat	2 alat	2 alat	2 alat				
2	13	05	2,01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	16.040.000,00	25.000.000,00		APBD
2	13	05	2,01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		Lembaga	Lembaga	Lembaga		150.000.000,00		APBD
2	13	05	2,01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	229.595.000,00	245.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan						Prioritas Pembangunan Nasional		
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD					Target PRKPD
2	13	05	2,01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	59.485.000,00	80.000.000,00		APBD
2	13	05	2,01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	0 Laporan	0 Laporan	Laporan		50.000.000,00		APBD
2	13	05	2,01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00		APBD
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							3.611.119.500,00	1.104.649.115,00		
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							3.611.119.500,00	1.104.649.115,00		
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Tingkat pemenuhan kebijakan pengendalian penduduk	1	1	1	1	172.855.000,00	57.000.000,00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	
2	14	02	2,01		Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantatis Penduduk		Persentase jumlah kebijakan terkait kuantitas penduduk di Pemerintah daerah dengan jumlah kebijakan yang disusun Pemerintah Provinsi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2.775.000,00	5.000.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
2	14	02	2,01	01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga		Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.775.000,00	5.000.000,00		APBD
2	14	02	2,02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen pengendalian penduduk yang dimanfaatkan terhadap total dokumen pengendalian penduduk yang disusun	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	170.080.000,00	52.000.000,00		
2	14	02	2,02	9	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	67.410.000,00			
2	14	02	2,02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga		Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	Dokumen		4.000.000,00		APBD
2	14	02	2,02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	64.870.000,00	46.000.000,00		APBD
2	14	02	2,02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	37.800.000,00	2.000.000,00		APBD
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (MCPR)	80,08	80,08	80,08	80,08	1.965.704.500,00	642.740.000,00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
2	14	03	2,01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		Persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	781.670.000,00	75.330.000,00		
2	14	03	2,01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	5 Organisasi	5 Organisasi	5 Organisasi	5 Organisasi	55.025.000,00	2.000.000,00		APBD
2	14	03	2,01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2 Dokumen		2 Dokumen		2.000.000,00	2.000.000,00		APBD
2	14	03	2,01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK		Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	2 Unit		2 Unit		2.000.000,00	2.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan						Prioritas Pembangunan Nasional		
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD					Target PRKPD
2	14	03	2,01	04	Promosi dan KIE Program KKBPk Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	218.450.000,00	63.330.000,00		APBD
2	14	03	2,01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPk melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	81.875.000,00	2.000.000,00		APBD
2	14	03	2,01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPk		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	305.345.000,00	2.000.000,00		APBD
2	14	03	2,01	08	Pengendalian Program KKBPk		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPk	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	116.975.000,00	2.000.000,00		APBD
2	14	03	2,02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Jumlah PLKB yang aktif terhadap PLKB yang ada	100%	100%	100%	100%	593.496.000,00	421.296.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan						Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD				
2	14	03	2,02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		6 Organisasi	6 Organisasi	6 Organisasi	12.810.000,00		
2	14	03	2,02	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	419.296.000,00	419.296.000,00	APBD
2	14	03	2,02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	264 Orang	264 Orang	264 Orang	264 Orang	161.390.000,00	2.000.000,00	APBD
2	14	03	2,03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	336.413.500,00	145.114.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rancangan RPKD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan						Prioritas Pembangunan Nasional		
							Tolok Ukur	Target RPKD	Target Usulan OPD	Target PRKPD					Target PRKPD
2	14	03	2,03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	172.502.500,00	139.990.000,00		APBD
2	14	03	2,03	02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB		Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	2.500.000,00	2.500.000,00		APBD
2	14	03	2,03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	150.587.000,00	500.000,00		APBD
2	14	03	2,03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB		Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00		APBD
2	14	03	2,03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	8.824.000,00	124.000,00		APBD
2	14	03	2,04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	254.125.000,00	1.000.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00			
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB		Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	15 Kampung	15 Kampung	48 Kampung	48 Kampung	245.125.000,00	1.000.000,00		APBD
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang aktif	79%	79%	79%	79%	1.472.560.000,00	404.909.115,00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	
				Persentase keluarga stunting yang mengikuti KIE 1000 HPK		80%	80%	80%	80%						
2	14	04	2,01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pendampingan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	1.433.960.000,00	289.000.000,00		
2	14	04	2,01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	380.000.000,00	2.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan						Prioritas Pembangunan Nasional		
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD					Target PRKPD
2	14	04	2,01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	108 Orang		68 Orang	68 Orang	23.395.000,00	40.000.000,00		APBD
2	14	04	2,01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	465 Orang	465 Orang	465 Orang	465 Orang	1.004.075.000,00	2.000.000,00		APBD
2	14	04	2,01	06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	113 Kelompok				7.090.000,00	170.000.000,00		APBD
2	14	04	2,01	08	Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (menjadi orang tua hebat, generasi berencana, kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan keluarga)		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	19.400.000,00	75.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga	12 kelompok kegiatan	12 kelompok kegiatan	12 kelompok kegiatan	38.600.000,00	55.909.115,00		APBD	
2	14	04	2.02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	2 laporan	2 laporan	2 laporan	38.600.000,00	55.909.115,00		APBD	
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 Persen	100 Persen	100 Persen	-	60.000.000,00			
2	14	04	2.02	02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	0 Laporan	0 Laporan	-	15.000.000,00		APBD	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
2	14	04	2.02	03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK - R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	Organisasi	Organisasi	Organisasi	-	-		APBD
2	14	04	2.02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		-	45.000.000,00		APBD
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							8.988.595.000,00	5.775.000.000,00		
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN							8.988.595.000,00	5.775.000.000,00		
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase pemenuhana sarana dan prasarana LLAJ	25,77%	25,77%	25,77%	25,77%	8.433.895.000,00	5.355.000.000,00	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	
2	15	02	2,02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dalam Kondisi Baik	20%	20%	100%	100%	2.336.900.000,00	1.740.000.000,00		
2	15	02	2,02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Air Belo, Kec Muntok serta Mislak dan Sinar Manik Kec Jebus, Kab. Babar	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	103 unit	112 unit	112 unit	112 unit	1.116.750.000,00	500.000.000,00		Reses

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan						Prioritas Pembangunan Nasional		
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD					Target PRKPD
2	15	02	2,02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	725 Unit	725 Unit	725 Unit	725 Unit	1.220.150.000,00	1.240.000.000,00		APBD
2	15	02	2,03		Pengelolaan Terminal Tipe C		Persentase Terminal Tipe C dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	100%	3.697.480.000,00	3.000.000.000,00		
2	15	02	2,03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas utama dan pendukung)		Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3.697.480.000,00	3.000.000.000,00		APBD
2	15	02	2,05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Persentase Jumlah Kendaraan yang telah Melakukan Uji Kir	20%	20%	100%	100%	238.900.000,00	150.000.000,00		
2	15	02	2,05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	49.017.500,00	-		APBD
2	15	02	2,05	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 org	2 org	2 org	2 org	50.000.000,00	-		APBD
2	15	02	2,05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	45.300.000,00	50.000.000,00		APBD
2	15	02	2,05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	23.282.500,00	25.000.000,00		APBD
2	15	02	2,05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	71.300.000,00	75.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rancangan RPKD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
							Program/Kegiatan/Subkegiatan						Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran	
							Tolok Ukur	Target RPKD	Target Usulan OPD	Target PRKPD					Target PRKPD
2	15	02	2,06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Pelaksanaan Manajemen dan rekeyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan tahun n	100%	100%	100%	100%	1.797.875.000,00	120.000.000,00		
2	15	02	2,06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	Peserta	30 Peserta	30 Peserta	Peserta		60.000.000,00		APBD
2	15	02	2,06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	1.794.025.000,00	50.000.000,00		APBD
2	15	02	2,06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.850.000,00	10.000.000,00		APBD
2	15	02	2,08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Persentase Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	100%	100%	100%	100%	362.740.000,00	345.000.000,00		
2	15	02	2,08	01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ		Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	45.000.000,00	45.000.000,00		APBD
2	15	02	2,08	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	317.740.000,00	250.000.000,00		APBD
2	15	02	2,08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor	Peserta	- Peserta	- Peserta	Peserta		50.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran					
			Program/Kegiatan/Subkegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional									
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD				Target PRKPD						
2	15					PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Persentase pelabuhan pengumpan lokal yang memenuhi persyaratan teknis pengelolaan pelabuhan	100%	100%	100%	100%	554.700.000,00	420.000.000,00	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	
2	15	03	2,12			Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		Persentase Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	100%	554.700.000,00	420.000.000,00		
2	15	03	2,12	01		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	254.300.000,00	35.000.000,00		APBD
2	15	03	2,12	03		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal		Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	Unit	Unit	Unit		50.000.000,00		APBD
2	15	03	2,12	04		Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	6.100.000,00	35.000.000,00		APBD
	15	03	2,12	05		Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal		Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang tersedia	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	294.300.000,00	300.000.000,00		APBD
2	16					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							7.599.499.000,00	8.059.090.000,00		
						DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							7.599.499.000,00	8.059.090.000,00		
2	16	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	3.999.200.000,00	4.368.400.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran				
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
2	16	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.500.000,00	28.000.000,00		
2	16	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	300.000,00	10.000.000,00		APBD
2	16	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD
2	16	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD
2	16	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	300.000,00	8.000.000,00		APBD
2	16	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD
2	16	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2.725.900.000,00	2.810.000.000,00		
2	16	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.725.000.000,00	2.800.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan						Prioritas Pembangunan Nasional		
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD					Target PRKPD
2	16	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	2.000.000,00		APBD
2	16	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	4.000.000,00		APBD
2	16	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD
2	16	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	300.000,00	6.000.000,00		
2	16	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD
2	16	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	900.000,00	76.500.000,00		
2	16	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0 Paket	0 Paket	Paket		12.500.000,00		APBD
2	16	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
2	16	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	300.000,00	15.000.000,00		APBD
2	16	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	300.000,00	45.000.000,00		APBD
2	16	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	399.300.000,00	538.500.000,00		
2	16	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00		APBD
2	16	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00		APBD
2	16	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	45.000.000,00	45.000.000,00		APBD
2	16	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	25.000.000,00	35.000.000,00		APBD
2	16	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	3.000.000,00	5.000.000,00		APBD
2	16	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	45.000.000,00	40.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran				
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
2	16	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	270.000.000,00	400.000.000,00		APBD
2	16	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	300.000,00	2.500.000,00		APBD
2	16	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	852.300.000,00	837.700.000,00		
2	16	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00		APBD
2	16	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	90.000.000,00	94.500.000,00		APBD
2	16	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	40.000.000,00		APBD
2	16	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	755.300.000,00	701.200.000,00		APBD
2	16	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	19.000.000,00	71.700.000,00		
2	07	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	4.000.000,00	2.000.000,00		APBD
2	16	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	57.500.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran			
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD							
2	16	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	5.000.000,00	12.200.000,00		APBD
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah konten informasi publik yang disebarluaskan	840	840	840	840	1.258.554.000,00	1.143.790.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
2	16	02	2,01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	600 Informasi	600 Informasi	600 Informasi	600 Informasi	1.258.554.000,00	1.143.790.000,00		
2	16	02	2,01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	3.900.000,00	20.000.000,00		APBD
2	16	02	2,01	04	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	20.196.000,00	38.755.000,00		APBD
2	16	02	2,01	05	Pengelolaan media komunikasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	70.458.000,00	30.000.000,00		APBD
2	16	02	2,01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	381.000.000,00	204.932.000,00		APBD
2	16	02	2,01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	0 Orang	0 Orang	Orang		127.975.000,00		APBD
2	16	02	2,01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	783.000.000,00	722.128.000,00		APBD
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase OPD yang	40%	40%	40%	40%	2.341.745.000,00	2.546.900.000,00	Memperkuat	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
	APLIKASI INFORMATIKA		menyelenggarakan SPBE						stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik						
2	16	03	2,01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Jumlah OPD dan Desa/Kelurahan yang memiliki domain dan sub domain yang telah ditetapkan	64%	64%	64%	64%	293.570.000,00	305.000.000,00		
2	16	03	2,01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	27.670.000,00	30.000.000,00		APBD
2	16	03	2,01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	265.900.000,00	275.000.000,00		APBD
2	16	03	2,02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah layanan e-government yang dikelola	45 Layanan e-government	45 Layanan e-government	45 Layanan e-government	45 Layanan e-government	2.048.175.000,00	2.241.900.000,00		
2	16	03	2,02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	92.000.000,00	109.000.000,00		APBD
2	16	03	2,02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.775.200.000,00	2.000.000.000,00		APBD
2	16	03	2,02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8.100.000,00	25.000.000,00		APBD
2	16	03	2,02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	168.200.000,00	42.900.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RPKD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran				
			Tolok Ukur	Target RPKD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
2	16	03	2,02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.900.000,00	35.000.000,00		APBD
2	16	03	2,02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.775.000,00	30.000.000,00		APBD
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							5.644.066.960,00	5.266.665.000,00		
					DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN							5.644.066.960,00	5.266.665.000,00		
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	4.921.760.960,00	4.533.976.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
2	17	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.500.000,00	28.000.000,00		
2	17	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	300.000,00	10.000.000,00		APBD
2	09	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran					
			Program/Kegiatan/Subkegiatan						Prioritas Pembangunan Nasional						
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD					Target PRKPD				
2	09	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD
2	17	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	300.000,00	8.000.000,00		APBD
2	17	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD
2	17	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2.940.900.000,00	2.910.000.000,00		
2	17	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2.940.000.000,00	2.900.000.000,00		APBD
2	17	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	300.000,00	2.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
							Program/Kegiatan/Subkegiatan						Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD					Target PRKPD
2	17	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	4.000.000,00		APBD
2	17	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD
2	09	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	300.000,00	6.000.000,00		
2	09	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD
2	09	01	2,03		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	38.200.000,00	2.500.000,00		
2	09	01	2,03	06	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	38.200.000,00	2.500.000,00		APBD
2	09	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	900.000,00	16.500.000,00		
2	09	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 paket	0 paket	0 paket	0 paket		12.500.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan						Prioritas Pembangunan Nasional		
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD					Target PRKPD
2	09	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD
2	09	01	2,05	03	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	21 orang	21 orang	21 orang	21 orang	300.000,00	-		APBD
2	09	01	2,05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21 orang	21 orang	21 orang	21 orang	300.000,00	-		APBD
2	17	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	349.645.000,00	538.360.000,00		
2	17	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00		APBD
2	17	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00		APBD
2	17	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	45.000.000,00	45.000.000,00		APBD
2	17	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	25.000.000,00	35.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan						Prioritas Pembangunan Nasional		
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD					Target PRKPD
2	17	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	3.000.000,00	4.860.000,00		APBD
2	17	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	45.000.000,00	40.000.000,00		APBD
2	17	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	220.000.000,00	400.000.000,00		APBD
2	17	01	2,06	09	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	645.000,00	2.500.000,00		APBD
2	17	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.555.315.960,00	975.616.000,00		
2	17	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00		APBD
2	17	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	99.675.960,00	119.776.000,00		APBD
2	17	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	40.000.000,00		APBD
2	17	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.448.640.000,00	813.840.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
							Program/Kegiatan/Subkegiatan						Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD					Target PRKPD
2	17	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	35.000.000,00	57.000.000,00		
2	17	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	10 unit	10 unit	10 unit	2.000.000,00	2.000.000,00		APBD
2	17	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	3 unit	3 unit	3 unit	28.000.000,00	50.000.000,00		APBD
7	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 unit	1 unit	17 unit	17 unit	5.000.000,00	5.000.000,00		APBD
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		Persentase rekomendasi izin usaha simpan pinjam	5,45%	0,00%	5,45%	5,45%	1.310.000,00	10.000.000,00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
2	17	02	2,01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,81%	0,00%	0,81%	0,81%	660.000,00	5.000.000,00		
2	17	02	2,01	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit Usaha	0 Unit Usaha	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	660.000,00	5.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
2	17	02	2,02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,81%	0,00%	0,00%		650.000,00	5.000.000,00		
2	17	02	2,02	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha		650.000,00	5.000.000,00		APBD
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase koperasi yang taat pada peraturan perundang-undangan	59,62%	59,62%	59,62%	59,62%	4.757.000,00	43.400.000,00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
2	17	03	2,01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	4.757.000,00	43.400.000,00		
2	17	03	2,01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/kota , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	5 unit usaha	5 unit usaha	5 unit usaha	5 unit usaha	4.757.000,00	43.400.000,00		APBD
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase KSP/USP yang berkategori sehat	30%	30%	30%	30%	300.000,00	20.000.000,00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
2	17	04	2,01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang dinilai kesehatannya	55 unit	55 unit	55 unit	55 unit	300.000,00	20.000.000,00		
2	17	04	2,01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	20 unit usaha	20 unit usaha	20 unit usaha	20 unit usaha	300.000,00	5.000.000,00		APBD
2	17	04	2,01		Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	unit usaha	unit usaha	unit usaha	unit usaha		15.000.000,00		APBD
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase koperasi aktif yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	19,23%	19,23%	19,23%	19,23%	243.520.000,00	83.000.000,00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
2	17	05	2,01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Latihan yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	19,23%	19,23%	19,23%	19,23%	243.520.000,00	83.000.000,00		
2	17	05	2,01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	50 Orang	50 Orang	90 Orang	90 Orang	243.520.000,00	83.000.000,00		APBD
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	50,82%	0,00%	50,82%	50,82%	35.610.000,00	130.000.000,00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
							Program/Kegiatan/Subkegiatan						Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD					Target PRKPD
2	17	06	2,01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Koperasi yang di berdayakan dan memperoleh Perlindungan yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	50,82%	0,00%	50,82%	50,82%	35.610.000,00	130.000.000,00		
2	17	06	2,01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	60 orang	0 orang	25 orang	25 orang	35.610.000,00	130.000.000,00		APBD
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi kredit	4%	4%	4%	4%	57.370.000,00	191.200.000,00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
2	17	07	2,01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang dinilai kesehatannya	100%	100%	100%	100%	57.370.000,00	191.200.000,00		
2	17	07	2,01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	40 unit usaha	40 unit usaha	40 unit usaha	40 unit usaha	34.300.000,00	8.200.000,00		APBD
2	17	07	2,01	02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	unit usaha	unit usaha	unit usaha	unit usaha		100.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
2	17	07	2,01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	50 unit usaha	0 unit usaha	0 unit usaha		23.070.000,00	83.000.000,00		APBD
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		persentase usaha mikro yang mendapatkan pembinaan	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	379.439.000,00	255.089.000,00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
2	17	08	2,01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Peningkatan Unit Skala Usaha UMI	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	379.439.000,00	255.089.000,00		
2	17	08	2,01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	100 unit usaha	100 unit usaha	186 unit usaha	186 unit usaha	379.439.000,00	255.089.000,00		APBD dan DAK
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							947.439.000,00	635.895.000,00		
					DINAS PENANAMAN MODAL, PPTSP, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI							947.439.000,00	635.895.000,00		
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase peningkatan layanan penanaman modal	8,21%	8,21%	8,21%	8,21%	83.300.000,00	90.000.000,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	
2	18	02	2,02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Pemetaan potensi dan Peluang Investasi	1 Peta Potensi Daerah	1 Peta Potensi Daerah	1 Peta Potensi Daerah	1 Peta Potensi Daerah	83.300.000,00	90.000.000,00		
					Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	83.300.000,00	90.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
2	18 03				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase Investor yang mengikuti promosi penanaman modal	70%	70%	70%	70%	366.679.000,00	305.000.000,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	
2	18 03	2,01			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	366.679.000,00	305.000.000,00		
	18 03	2,01	01		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal		Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	5.000.000,00		APBD
2	18 03	2,01	02		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	366.379.000,00	300.000.000,00		APBD
2	18 04				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Indeks Kepuasan masyarakat bidang penanaman modal	81	81	81	81	91.460.000,00	220.895.000,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	
2	18 04	2,01			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		jumlah perizinan berusaha beresiko yang dikeluarkan	1000 izin	1000 izin	1000 izin	1000 izin	91.460.000,00	220.895.000,00		
2	18 04	2,01	01		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	900 Pelaku Usaha	900 Pelaku Usaha	900 Pelaku Usaha	900 Pelaku Usaha	67.745.000,00	117.565.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
2	18	04	2,01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	50 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	23.715.000,00	103.330.000,00		APBD
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	21%	21%	21%	21%	406.000.000,00	20.000.000,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	
2	18	05	2,01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perusahaan yang dilakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	406.000.000,00	20.000.000,00		
2	18	05	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	100 Kegiatan Usaha	100 Kegiatan Usaha	100 Kegiatan Usaha	100 Kegiatan Usaha	77.360.000,00	5.000.000,00		APBD
2	18	05	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	220 Pelaku Usaha	220 Pelaku Usaha	220 Pelaku Usaha	220 Pelaku Usaha	212.730.000,00	10.000.000,00		APBD
2	18	05	2,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	100 Kegiatan Usaha	100 Kegiatan Usaha	100 Kegiatan Usaha	100 Kegiatan Usaha	115.910.000,00	5.000.000,00		APBD
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							32.775.035.000,00	6.000.000.000,00		
					DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							32.775.035.000,00	6.000.000.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
2	19	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Pencab Aktif	28	28	28	28	32.625.035.000,00	5.700.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	
2	19	3	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	2 event	2 event	2 event	2 event	20.827.910.000,00	900.000.000,00		
2	19	3	2.02	1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.342.203.000,00	900.000.000,00		APBD
2	19	3	2.02	2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	485.707.000,00			APBD
2	19	03	2,03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	2 Cabor	2 Cabor	2 Cabor	2 Cabor	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00		
2	19	03	2,03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota		Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	122 orang	122 orang	122 orang	122 orang	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00		APBD
2	19	3	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olah Raga		Persentase cabang olahraga yang mengikuti event olahraga tingkat provinsi	50%	50%	50%	50%	9.000.000.000,00	2.000.000.000,00		
2	19	3	2.04	2	Pengembangan organisasi keolahragaan		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	9.000.000.000,00	2.000.000.000,00		APBD
2	19	3	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	3 cabang	3 cabang	3 cabang	3 cabang	47.125.000,00	50.000.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
2	19	3	2.05	1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	47.125.000,00	50.000.000,00		APBD
2	19	4			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		Fasilitasi Kegiatan Kwartir Cabang Pramuka	5	5	5	5	150.000.000,00	300.000.000,00		
2	19	4	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Jumlah Gugus Depan yang Berpartisipasi dalam Organisasi Kepramukaan	80 gugus depan	80 gugus depan	80 gugus depan	80 gugus depan	150.000.000,00	300.000.000,00		
2	19	4	2.01	8	Partisipasi dan keikutsertaan Dalam Kegiatan Kepramukaan		Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	1 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	150.000.000,00	300.000.000,00		APBD
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							83.570.000,00	188.090.000,00		
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							83.570.000,00	188.090.000,00		
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Cakupan data statistik sektoral yang terpenuhi	70%	70%	70%	70%	83.570.000,00	188.090.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
2	20	02	2,01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia	70%	70%	70%	70%	83.570.000,00	188.090.000,00		
2	20	02	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25.050.000,00	47.050.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
2	20	02	2,01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral		Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	34.220.000,00	82.940.000,00		APBD
2	20	02	2,01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	31 Orang	31 Orang	31 Orang	31 Orang	24.000.000,00	44.800.000,00		APBD
2	20	02	2,01	05	Pengembangan Infrastruktur		Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	300.000,00	13.300.000,00		APBD
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							12.800.000,00	91.135.000,00		
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							12.800.000,00	91.135.000,00		
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Persentase Perangkat daerah yang terhubung dalam jaringan komunikasi sandi yang aman	40%	40%	40%	40%	12.800.000,00	91.135.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
2	21	02	2,01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah OPD yang mempunyai keamanan informasi	10,34%	10,34%	10,34%	10,34%	9.600.000,00	60.000.000,00		
2	21	02	2,01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.200.000,00	20.000.000,00		APBD
2	21	02	2,01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.200.000,00	15.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
2	21	02	2,01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	3.200.000,00	25.000.000,00		APBD
2	21	02	2,02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah OPD yang mempunyai akun Government Secured Intramail	2 OPD	2 OPD	2 OPD	2 OPD	3.200.000,00	31.135.000,00		
2	21	02	2,02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	3.200.000,00	31.135.000,00		APBD
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							6.812.563.150,00	6.501.620.000,00		
					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN							6.812.563.150,00	6.501.620.000,00		
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	4.771.440.000,00	4.998.420.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
2	22	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.500.000,00	28.000.000,00		
2	22	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	300.000,00	10.000.000,00		APBD
2	22	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan				Target RKP			Target Usulan OPD		Target PRKPD	Target PRKPD	Prioritas Pembangunan Nasional	
			Tolok Ukur	Target RKP	Target Usulan OPD	Target PRKPD									
2	22	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD
2	22	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	300.000,00	8.000.000,00		APBD
2	22	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD
2	22	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	3.440.900.000,00	3.410.000.000,00		
2	22	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	3.440.000.000,00	3.400.000.000,00		APBD
2	22	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	2.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran				
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
2	22	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	4.000.000,00		APBD
2	22	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD
2	22	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	300.000,00	6.000.000,00		
2	22	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD
2	22	01	2,04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	25.120.000,00	2.500.000,00		
2	22	01	2,04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	25.120.000,00	2.500.000,00		APBD
2	22	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	900.000,00	43.500.000,00		
2	22	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket		12.500.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
2	22	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD
2	22	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	27 orang	0 orang	27 orang	27 orang	300.000,00	6.750.000,00		APBD
2	22	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	27 orang	0 orang	27 orang	27 orang	300.000,00	20.250.000,00		APBD
2	22	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	401.300.000,00	572.000.000,00		
2	22	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	7.500.000,00	4.000.000,00		APBD
2	22	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	2 Paket	2 Paket				APBD
2	22	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00		APBD
2	22	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	93.500.000,00	78.500.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
2	22	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	25.000.000,00	35.000.000,00		APBD
2	22	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	3.000.000,00	5.000.000,00		APBD
2	22	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	45.000.000,00	40.000.000,00		APBD
2	22	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	220.000.000,00	400.000.000,00		APBD
2	22	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	300.000,00	2.500.000,00		APBD
2	22	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	871.420.000,00	906.420.000,00		
2	22	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00		APBD
2	22	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	250.800.000,00	250.800.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan												
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD			Prioritas Pembangunan Nasional					
2	22	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	40.000.000,00		APBD
2	22	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	613.620.000,00	613.620.000,00		APBD
2	22	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	30.000.000,00	30.000.000,00		
2	22	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	6.000.000,00	6.000.000,00		APBD
2	22	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00		APBD
2	22	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 unit	15 unit	15 unit	15 unit	5.000.000,00	5.000.000,00		APBD
2	22	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan								
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Cakupan objek kebudayaan yang dikembangkan	10,46%	10,46%	10,46%	10,46%	953.433.600,00	480.000.000,00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
2	22	02	2,01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitasi acara Adat dan Kesenian	10 Fasilitasi	10 Fasilitasi	10 Fasilitasi	10 Fasilitasi	372.436.000,00	300.000.000,00		
2	22	02	2,01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	16 Objek	16 Objek	16 Objek	16 Objek	372.436.000,00	300.000.000,00		Renja
					Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan		Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1 Orang					20.000.000,00		APBD
2	22	02	2,02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Fasilitasi atas pelaku seni berprestasi	20 ceremoni	20 ceremoni	20 ceremoni	20 ceremoni	86.101.000,00	80.000.000,00		
2	22	02	2,02	03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	1 Sertifikat	1 Sertifikat	1 Sertifikat	1 Sertifikat	86.101.000,00	80.000.000,00		APBD
2	22	02	2,03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga adat yang dibina	1 Lembaga Adat	1 Lembaga Adat	1 Lembaga Adat	1 Lembaga Adat	494.896.600,00	100.000.000,00		
					Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat		Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	34 Orang	34 Orang	34 Orang	34 Orang	494.896.600,00	100.000.000,00		APBD
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan sebagai ajang promosi Daerah	1	1	1	1	155.691.000,00	280.000.000,00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
2	22	03	2,01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah fasilitas kesenian kepada masyarakat pada tahun n	1	1	1	1	155.691.000,00	280.000.000,00		
					Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	155.691.000,00			APBD
					Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	Sertifikat	Sertifikat	Sertifikat	Sertifikat		230.000.000,00		APBD
2	22	03	2,01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	Lembaga	Lembaga	Lembaga		50.000.000,00		APBD
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		Jumlah kekayaan Sejarah Lokal yang dikelola dan atau dipublikasi	2	2	2	2	137.075.550,00	150.000.000,00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
2	22	04	2,01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pembinaan Sejarah Lokal yang dilakukan	2	2	2	2	137.075.550,00	150.000.000,00		
2	22	04	2,01	01	Pemberdayaan sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal kabupaten/kota		Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	85.861.600,00	87.325.000,00		APBD
2	22	04	2,01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	51.213.950,00	62.675.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran					
			Program/Kegiatan/Subkegiatan													
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD			Prioritas Pembangunan Nasional						
2	22	05				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		Persentase cagar budaya yang dilestarikan	61%	61%	61%	61%	484.833.000,00	454.980.000,00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
2	22	05	2,01			Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	4%	4%	4%	4%	90.938.000,00	100.000.000,00		
2	22	05	2,01			Pendaftaran objek diduga cagar budaya		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Didaftarkan	4 Objek	4 Objek	4 Objek	4 Objek	300.000,00	100.000.000,00		APBD
						Penetapan Cagar Budaya		Objek diduga cagar budaya yang dikaji dan ditetapkan sebagai CB dengan SK Kepala Daerah	4 Objek	4 Objek	4 Objek	4 Objek	90.638.000,00			APBD
2	22	05	2,02			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Jumlah Cagar Budaya yang Dilindungi	17 CB	17 CB	17 CB	17 CB	393.895.000,00	354.980.000,00		
2	22	05	2,02	01		Pelindungan Cagar Budaya	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	17 Objek	17 Objek	17 Objek	17 Objek	393.895.000,00	354.980.000,00		APBD
																APBD
2	22	06				PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		Persentase museum dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	310.090.000,00	138.220.000,00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
2	22	06	1			Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota		Jumlah Museum yang dikelola	100%	100%	100%	100%	310.090.000,00	138.220.000,00		
2	22	06	2,01	01		Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu		Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	69.900.000,00	75.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran				
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
2	22	06	2.01	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman		Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	7 Orang	7 Orang	7 Orang	7 Orang	210.190.000,00	33.220.000,00		APBD
2	22	06	2.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum		Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00		APBD
2	22	06	2.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00		APBD
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							5.682.834.500,00	6.002.280.458,00		
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							5.682.834.500,00	6.002.280.458,00		
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	5.268.646.000,00	5.452.020.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
2	23	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.500.000,00	28.000.000,00		
2	23	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	300.000,00	10.000.000,00		APBD
2	23	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD
2	23	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan						Prioritas Pembangunan Nasional		
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD					Target PRKPD
2	23	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	300.000,00	8.000.000,00		APBD
2	23	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2.810.900.000,00	3.010.000.000,00		
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2.810.000.000,00	3.000.000.000,00		APBD
2	23	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	2.000.000,00		APBD
2	23	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	4.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
2	23	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD
2	3	01	2.05		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	300.000,00	6.000.000,00		
2	22	01	2.05	02	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD
2	3	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	900.000,00	24.000.000,00		
2	22	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0 Paket	0 Paket	Paket		12.500.000,00		APBD
2	22	01	2.05	02	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD
2	22	01	2.05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	300.000,00	5.000.000,00		APBD
2	22	01	2.05	02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	300.000,00	15.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	413.996.000,00	656.500.000,00		
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00		APBD
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1 paket	2 paket	2 paket				
2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4.696.000,00	8.000.000,00		APBD
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00		APBD
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	30.000.000,00	40.000.000,00		APBD
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	3.000.000,00	5.000.000,00		APBD
2	23	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	45.000.000,00		APBD
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	270.000.000,00	500.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
2	23	01	2.06	09	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	300.000,00	2.500.000,00		APBD
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	374.880.000,00	-		APBD
2	23	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	70 Unit	70 Unit	70 Unit	70 Unit	374.880.000,00			APBD
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.559.170.000,00	1.604.170.000,00		
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00		APBD
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00		APBD
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	50.000.000,00		APBD
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.302.170.000,00	1.302.170.000,00		APBD
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	107.000.000,00	123.350.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran				
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00		APBD
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00		APBD
2	23	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4 Unit	4 Unit	4 Unit				APBD
2	23	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	31 Unit	31 Unit	31 Unit	31 Unit	5.000.000,00	21.350.000,00		APBD
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Persentase perpustakaan satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	46,84%	46,84%	46,84%	46,84%	401.868.500,00	500.260.458,00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	
						Persentase perpustakaan desa yang terakreditasi minimal B	15,38%	15,38%	15,38%	15,38%					
						Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	10,43%	10,43%	10,43%	10,43%					
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	275.427.500,00	217.400.000,00		
						Jumlah perpustakaan sekolah yang terakreditasi minimal B	16 SD 15 SMP	16 SD 15 SMP	16 SD 15 SMP	16 SD 15 SMP					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran		
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional			
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD						
			Jumlah perpustakaan Desa yang terakreditasi minimal B	11 Desa	11 Desa	11 Desa	11 Desa						
2	23 02 2.01 02		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	6 Perpustakaan	6 Perpustakaan	6 Perpustakaan	6 Perpustakaan	300.000,00	5.000.000,00		APBD
2	23 02 2.01 04		Pembinaan Perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan		Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	21 Perpustakaan	21 Perpustakaan	21 Perpustakaan	21 Perpustakaan	300.000,00	5.000.000,00		APBD
2	23 02 2.01 06	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	0 Orang	0 Orang	Orang		30.000.000,00		
2	23 02 2.01 08		Pengembangan Bahan Pustaka		Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	500 Eksemplar	700 Eksemplar	700 Eksemplar	700 Eksemplar	242.740.000,00	100.000.000,00		APBD
2	23 02 2.01 09	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka		Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2000 Eksemplar	2000 Eksemplar	2000 Eksemplar	2000 Eksemplar	28.450.000,00	60.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan						Prioritas Pembangunan Nasional		
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD					Target PRKPD
2	23	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3.637.500,00	17.400.000,00		APBD
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		persentase kunjungan masyarakat ke perpustakaan umum dan sekolah	4,23	4,23	4,23	4,23	126.441.000,00	282.860.458,00		
							masyarakat yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan promosi budaya baca	1.400	1.400	1.400	1.400				
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	6 Lokus	6 Lokus	6 Lokus	6 Lokus	82.891.000,00	156.860.458,00	Usulan Msurenbang Kecamatan peningkatan kapasitas SDM perpustakaan di Desa Sekar Biru dialihkan ke sub kegiatan ini	APBD
2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	300.000,00	16.000.000,00		APBD
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Gemar Budaya Membaca		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Orang	5 Orang	5 Orang	Orang		40.000.000,00		APBD
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	23.250.000,00	50.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan									Prioritas Pembangunan Nasional			
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
2	23	02	2.02	05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Keegiatannya	1 Orang	1 Orang	1 Orang		20.000.000,00	20.000.000,00		APBD
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		jumlah naskah kuno yang terdaftar di Perpustakaan	0	0	0	0	12.320.000,00	50.000.000,00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya naskah kuno yang dapat dijadikan referensi dan daya tarik wisata pendidikan di perpustakaan daerah	0	0	0	0	5.020.000,00	20.000.000,00		
2	23	03	2.01	01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	18 Orang	120 Orang	120 Orang	120 Orang	5.020.000,00	20.000.000,00		APBD
2	23	03	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya naskah kuno khas daerah di perpustakaan daerah yang sudah divalidasi oleh perpustakaan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	7.300.000,00	30.000.000,00		
2	23	03	2.02	01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara		Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	15 Eksemplar	15 Eksemplar	15 Eksemplar	15 Eksemplar	7.300.000,00	30.000.000,00		APBD
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							58.510.000,00	333.400.000,00		
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							58.510.000,00	333.400.000,00		
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		Persentase arsip aktif seluruh OPD yang telah dibuatkan daftar arsip	50%	50%	50%	50%	25.410.000,00	198.400.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
			Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%			pelayanan publik					
			Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100%	100%	100%	100%								
			Implementasi e-arsip terintegrasi (SRIKANDI)	100%	100%	100%	100%								
2	24	02	2,01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya kualitas tertib arsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	65%	65%	65%	65%	13.500.000,00	128.400.000,00		
2	24	02	2,01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	600 berkas	600 berkas	600 berkas	600 berkas	300.000,00	74.900.000,00		APBD
2	24	02	2,01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis		Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	8000 berkas	8000 berkas	8000 berkas	8000 berkas	6.300.000,00	53.500.000,00		APBD
2	24	02	2,01	03	Pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota		Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	6.900.000,00			APBD
2	24	02	2,03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten / Kota		Meningkatnya sistem pelayanan kearsipan berbasis informasi teknologi dan komunikasi	20 OPD	20 OPD	20 OPD	20 OPD	11.910.000,00	70.000.000,00		
2	24	02	2,03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui JIKN		Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	7 pengguna	7 pengguna	7 pengguna	7 pengguna	300.000,00	30.000.000,00		APBD
2	24	02	2,03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	11.610.000,00	40.000.000,00		APBD
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	5	5	5	5	32.800.000,00	130.000.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RPKD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RPKD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
													dan transformasi pelayanan publik		
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun		Meningkatnya kualitas manajemen kearsipan melalui penyusunan JRA	15%	15%	15%	15%	2.200.000,00	60.000.000,00		
2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	100 arsip	100 arsip	100 arsip	100 arsip	1.900.000,00	30.000.000,00		APBD
2	24	03	2.01	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	100 berkas	100 berkas	100 berkas	100 berkas	300.000,00	30.000.000,00		APBD
2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota		Tersedianya Daftar Pencarian Arsip (DPA) arsip statis/sejarah pembentukan Kabupaten Bangka Barat	100%	100%	100%	100%	30.300.000,00	40.000.000,00		
2	24	03	2.04	01	Penilaian dan Penetapan Autentitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Daftar Autentitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	5 arsip	0 arsip	0 arsip		30.000.000,00	40.000.000,00		APBD
2	24	03	2.04	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip		Jumlah Daftar arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip	5 Arsip	5 Arsip	5 Arsip	5 Arsip	300.000,00			APBD
2	24	03	2.05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang		Meningkatnya kualitas penilaian dan penetapan arsip statis daerah yang dinyatakan hilang yang sesuai dengan	1 Tema	1 Tema	1 Tema	1 Tema	300.000,00	30.000.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran	
			Program/Kegiatan/Subkegiatan									
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD			Prioritas Pembangunan Nasional		
			NSPK									
2	24 03 2.05 03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	5 arsip	0 arsip	5 arsip	5 arsip	300.000,00	30.000.000,00		APBD
2	24 04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten /kota yang sesuai NSPK	7 kali	7 kali	7 kali	7 kali	300.000,00	5.000.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
2	24 04 2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota		Diterbitkannya izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK	7	7	7	7	300.000,00	5.000.000,00		
2	24 04 2.01 2	Penyediaan daftar dan penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup		Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	7 arsip	7 arsip	7 arsip	7 arsip	300.000,00	5.000.000,00		APBD
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							32.754.121.402,00	9.429.998.450,00		
3	25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							3.630.695.800,00	4.085.485.000,00		
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN							3.630.695.800,00	4.085.485.000,00		
3	25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2.939.252.000,00	3.243.485.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
3	25	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.500.000,00	28.000.000,00		
3	25	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	300.000,00	10.000.000,00		APBD
3	25	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD
3	25	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD
3	25	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	300.000,00	8.000.000,00		APBD
3	25	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD
3	25	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.896.900.000,00	2.010.000.000,00		
3	25	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 orang/Bulan	13 orang/Bulan	13 orang/Bulan	13 orang/Bulan	1.896.000.000,00	2.000.000.000,00		APBD
3	25	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	300.000,00	2.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran		
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional			
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD						
			Tahun SKPD										
3	25 01 2,02 07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	300.000,00	4.000.000,00		APBD
3	25 01 2,02 08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD
3	25 1 2,04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	300.000,00	7.500.000,00		
3	25 1 2,04 4		Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah		Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	7.500.000,00		APBD
3	25 01 2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	900.000,00	4.000.000,00		
3	25 01 2,05 02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	paket	paket	paket		12.500.000,00		APBD
3	25 01 2,05 03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan									Prioritas Pembangunan Nasional			
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
3	25	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	13 orang	13 orang	13 orang	13 orang	300.000,00	-		APBD
3	25	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13 orang	13 orang	13 orang	13 orang	300.000,00	-		APBD
3	25	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	349.000.000,00	418.000.000,00		
3	25	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	4.000.000,00	2.000.000,00		APBD
3	25	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket		1 Paket	1 Paket				
3	25	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	7.000.000,00	6.000.000,00		APBD
3	25	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	45.000.000,00	40.000.000,00		APBD
3	25	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	25.000.000,00	30.000.000,00		APBD
3	25	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	3.000.000,00	5.000.000,00		APBD
3	25	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	45.000.000,00	35.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
3	25	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	220.000.000,00	300.000.000,00		APBD
3	25	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	668.952.000,00	726.515.000,00		
3	25	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00		APBD
3	25	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	83.652.000,00	111.400.000,00		APBD
4	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	20.000.000,00		APBD
3	25	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	578.300.000,00	593.115.000,00		APBD
3	25	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	21.700.000,00	36.970.000,00		
3	25	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	3.400.000,00	4.150.000,00		APBD
3	25	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	3.000.000,00	3.000.000,00		APBD
4	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	300.000,00	8.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKP	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKP	Target Usulan OPD	Target PRKP	Target PRKP				
3	25	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	5.000.000,00	7.000.000,00		APBD
3	25	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	5.000.000,00	7.320.000,00		APBD
3	25	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	5.000.000,00	7.500.000,00		APBD
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Produksi Perikanan Tangkap	40.107 Ton/Tahun	40.107 Ton/Tahun	40.107 Ton/Tahun	40.107 Ton/Tahun	311.830.000,00	147.000.000,00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
3	25	03	2,01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (%)	9 Persen	9 Persen	9 Persen	9 Persen	258.280.000,00	-		
3	25	03	2,01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	258.280.000,00	-		APBD
3	25	03	2,02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kelompok Nelayan Nelayan yang dibina	12 KUB	12 KUB	12 KUB	12 KUB	38.550.000,00	132.000.000,00		
3	25	03	2,02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	32 orang	0 orang	0 orang		-	32.000.000,00		APBD
3	25	03	2,02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil		Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan	12 Kelompok	12 Kelompok	12 Kelompok	12 Kelompok	38.550.000,00	50.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
						Kelembagaannya					
3	25 03 2,02 03		Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi	10 unit usaha	0 unit usaha	0 unit usaha	-	50.000.000,00	APBD
3	25 03 2,03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Persentase Peningkatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	100%	100%	100%	15.000.000,00	15.000.000,00	
3	25 03 2,03 02		Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 layanan	1 layanan	1 layanan	15.000.000,00	15.000.000,00	APBD
3	25 04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Produksi Perikanan Budidaya	219,41 Ton/Tahun	219,41 Ton/Tahun	219,41 Ton/Tahun	270.401.000,00	360.000.000,00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
3	25 04 2,02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Persentase peningkatan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku	100%	100%	100%	157.336.000,00	100.000.000,00	
3	25 04 2,02 04		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	157.336.000,00	100.000.000,00	APBD
3	25 04 2,04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%)	10 Persen	10 Persen	10 Persen	113.065.000,00	260.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran		
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional			
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD						
3	25 04 2,04 01		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4.725.000,00	20.000.000,00		APBD
3	25 04 2,04 02		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	93.320.000,00	50.000.000,00		APBD
3	25 04 2,04 03		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	2.100.000,00	-		Reses
3	25 04 2,04 04		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	dokumen	0 dokumen	0 dokumen	dokumen		10.000.000,00		APBD
3	25 04 2,04		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	12.920.000,00	30.000.000,00		APBD
3	25 04 2,04		Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat		Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindung	ha	0 ha	0 ha	ha		150.000.000,00		APBD
3	25 05		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Persentase ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundangan yang berlaku	70%	70%	70%	70%	64.300.000,00	250.000.000,00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran		
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional			
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD						
3	25 05 2,01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		Persentase Kepatuhan Masyarakat Nelayan dan Pembudidaya terhadap hukum	70 Persen	70 Persen	70 Persen	70 Persen	64.300.000,00	250.000.000,00		
3	25 05 2,01 01		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	15.750.000,00	50.000.000,00		APBD
3	25 05 2,01 02		Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	48.550.000,00	200.000.000,00		APBD
3	25 06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Persentase Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha perikanan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	18%	18%	18%	18%	44.912.800,00	85.000.000,00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
3	25 06 2,01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan (%)	18 Persen	18 Persen	18 Persen	18 Persen	29.483.800,00	65.000.000,00		
3	25 06 2,01 01		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	29.483.800,00	65.000.000,00		APBD
3	25 06 2,02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Persentase Peningkatan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala	18 Persen	18 Persen	0 Persen	18 Persen	15.429.000,00	20.000.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran			
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional				
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD							
			Mikro dan Kecil											
3	25 06 2,02 01		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	40 unit usaha	0 unit usaha	40 unit usaha	40 unit usaha	15.429.000,00	20.000.000,00		APBD	
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					8.585.014.489,00	2.487.220.000,00			
					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN					8.585.014.489,00	2.487.220.000,00			
3	26 02				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					4.416.690.090,00	1.309.720.000,00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan		
3	26 02 2,01				Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Potensi Daya Tarik wisata yang dikembangkan	10 DTW	10 DTW	10 DTW	10 DTW	3.181.665.590,00	66.290.000,00	
3	26 02 2,01 03				Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	10 Lokasi	10 Lokasi	10 Lokasi	10 Lokasi	3.181.365.590,00	56.290.000,00	APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
3	26	02	2,01	04	Monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota		Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	300.000,00	10.000.000,00		APBD
3	26	02	2,03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Destinasi yang dikelola	1 Destinasi	1 Destinasi	1 Destinasi	1 Destinasi	1.217.649.500,00	1.193.430.000,00		
3	26	02	2,03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	194 Unit	194 Unit	194 Unit	194 Unit	322.689.500,00	298.470.000,00		APBD
3	26	02	2,03	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Lokasi	3 Lokasi	3 Lokasi	3 Lokasi	894.960.000,00	894.960.000,00		APBD
3	26	02	2,04		Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota		Pengelolaan data pelaku usaha pariwisata daerah	21,43%	21,43%	21,43%	21,43%	17.375.000,00	50.000.000,00		
3	26	02	2,04	04	Pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	17.375.000,00	50.000.000,00		APBD
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Peningkatan kunjungan wisatawan (DTW Unggulan)	50.000 org	50.000 org	50.000 org	50.000 org	2.821.966.400,00	1.002.500.000,00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
3	26	03	2,01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah paket wisata yang dipasarkan	12	12	12	12	2.821.966.400,00	1.002.500.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
3	26	03	2,01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	91.275.400,00	105.000.000,00		APBD
3	26	03	2,01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2.727.141.000,00	870.000.000,00		Renja + Reses
3	26	03	2,01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.775.000,00	17.500.000,00		APBD
3	26	03	2,01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.775.000,00	10.000.000,00		APBD
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		Persentase produk ekonomi kreatif yang mendapatkan HaKI	100%	100%	100%	100%	42.675.000,00	100.000.000,00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Jumlah pengembangan ekonomi kreatif	50 produk ekonomi kreatif	50 produk ekonomi kreatif	50 produk ekonomi kreatif	50 produk ekonomi kreatif	42.675.000,00	100.000.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
3	26	04	2.03	07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	42.675.000,00	100.000.000,00		APBD	
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase sertifikasi kompetensi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	100%	100%	100%	100%	1.303.682.999,00	75.000.000,00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan		
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	120 orang	120 orang	120 orang	120 orang	1.303.682.999,00	75.000.000,00			
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	434.561.000,00	25.000.000,00		APBD	
3	26	05	2.01	04	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	434.561.000,00	25.000.000,00		APBD	
3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	434.560.999,00	25.000.000,00		APBD	
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						2.726.395.600,00	1.268.385.000,00			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
3	27	02	2,02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman		Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	64.927.000,00	66.000.000,00		APBD
3	27	02	2,06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain		pelaksanaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	1 ha	1 ha	1 ha	1 ha	101.246.900,00	120.000.000,00		
3	27	02	2,06	02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	0,5 ton	0,5 ton	0,5 ton	0,5 ton	101.246.900,00	120.000.000,00		APBD
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	2%	2%	2%	2%	1.130.690.000,00	316.000.000,00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
3	27	03	2,01		Pengembangan Prasarana Pertanian		Optimalisasi prasarana Pertanian	100%	100%	100%	100%	112.760.000,00	140.000.000,00		
3	27	03	2,01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B		Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	57.300.000,00	80.000.000,00		APBD
3	27	03	2,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	55.460.000,00	60.000.000,00		APBD
3	27	03	2,02		Pembangunan Prasarana Pertanian		Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	1.017.630.000,00	170.000.000,00		
3	27	03	2,02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani		Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Dirhabilitasi , dan Dipelihara	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	84.300.000,00	90.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
3	27	03	2,02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	933.330.000,00	80.000.000,00		APBD
3	27	03	2,03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	6.000.000,00		
3	27	03	2,03	02	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak		Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase penyakit hewan dan zoonosis yang tertangani	100%	100%	100%	100%	309.209.400,00	155.500.000,00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
3	27	04	2,01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		dokumen pemetaan penyakit hewan menular dan zoonosis di wilayah Kabupaten Bangka Barat	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	116.843.800,00	122.500.000,00		
3	27	04	2,01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis		Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	98.334.400,00	102.000.000,00		APBD
3	27	04	2,01	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular		Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	18.509.400,00	20.500.000,00		APBD
3	27	04	2,03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah data pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Kab. Babar				1 laporan	165.560.000,00	-		
3	27	04	2,03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner		Laporan	Laporan	1 laporan	165.560.000,00			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
3	27	04	2,05		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan		Jumlah Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	26.805.600,00	33.000.000,00		
3	27	04	2,05	01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan		Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	26.805.600,00	33.000.000,00		APBD
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase bencana pertanian yang tertanggulangi	25%	25%	25%	25%	264.065.100,00	275.000.000,00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
3	27	05	2,01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten	100%	100%	100%	100%	264.065.100,00	275.000.000,00		
3	27	05	2,01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	350 Ha	350 Ha	350 Ha	350 Ha	264.065.100,00	275.000.000,00		APBD
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		Persentase pengendalian izin usaha pertanian	100%	100%	100%	100%	4.500.000,00	20.000.000,00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
3	27	06	2,01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten	100%	100%	100%	100%	4.500.000,00	20.000.000,00		
3	27	06	2,01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian		Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	4.500.000,00	20.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase Poktan/Gapoktan yang dibina oleh Penyuluh Pertanian	100%	100%	100%	100%	352.754.800,00	176.785.000,00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
3	27	07	2,01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		persentase penyelenggaraan penyuluhan pertanian	100%	100%	100%	100%	352.754.800,00	176.785.000,00		
3	27	07	2,01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	101.575.000,00	36.000.000,00		APBD
3	27	07	2,01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	181.760.800,00	63.675.000,00		APBD
3	27	07	2,01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	64.880.000,00	67.110.000,00		APBD
3	27	07	2,01	04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani		Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	4.539.000,00	10.000.000,00		APBD
3	27	07	2,01	05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	unit	0 unit	0 unit	unit		30.000.000,00		Musren Kecamatan
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							438.630.000,00	849.574.650,00		
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP							438.630.000,00	849.574.650,00		
3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		Peningkatan jumlah kerjasama stakeholders dalam pemanfaatan Tahura	4	4	4	4	438.630.000,00	849.574.650,00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran		
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional			
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD						
3	28 04 2,01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota		Persentase Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	438.630.000,00	849.574.650,00		
3	28 04 2,01 02		Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	12 operasi	12 operasi	12 operasi	12 operasi	87.680.000,00	254.575.000,00		APBD
3	28 04 2,01 05		Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Areal TAHURA yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	Ha	2 Ha	2 Ha	Ha		209.999.850,00		APBD
3	28 04 2,01 07		Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota		Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	950.000,00	10.000.000,00		APBD
3	28 04 2,01 08		Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif	desa	5 desa	5 desa	desa		24.999.800,00		APBD
3	28 04 2,01 11		Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00		APBD
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							3.676.856.800,00	571.283.800,00		
3	30		DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN							3.676.856.800,00	571.283.800,00		
3	30 02		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase rekomendasi yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%	3.250.000,00	50.000.000,00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan												
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD			Prioritas Pembangunan Nasional					
3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Persentase Penerbitan Tanda Daftar Gudang	25%	25%	25%	25%	3.250.000,00	-		
3	30	02	2.02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Gudang yang terfasilitasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.250.000,00	-		APBD
3	30	02	2.03		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat		Persentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen		50.000.000,00		
3	30	02	2.03		Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C		Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen		50.000.000,00		APBD
3	30	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase pemenuhan sarana distribusi perdagangan sesuai kriteria pasar tertib ukur	50%	50%	50%	50%	2.813.335.000,00	11.705.000,00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
3	30	3	2,02		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2.807.300.000,00	-		
3	30	03	2,02	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan		1 unit	2 unit	2 unit	2.708.000.000,00			
3	30	03	2,02	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2 unit	0 unit	3 unit	3 unit	99.300.000,00			APBD
3	30	3	2,02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Jumlah pengelolaan sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya yang dibina	1 Kegiatan	5 unit	5 unit	5 unit	6.035.000,00	11.705.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
3	30	03	2,02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	6.035.000,00	11.705.000,00		APBD
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	3,90%	3,90%	3,90%	3,90%	492.694.000,00	100.675.000,00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
3	30	04	2,02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Terkendalinya harga dan stok barang kebutuhan Pokok dan barang penting di pasar wilayah Kabupaten Bangka Barat.	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	489.525.000,00	82.675.000,00		
3	30	04	2,02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	3.220.000,00	18.000.000,00		APBD
3	30	04	2,02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	10.525.000,00	15.675.000,00		APBD
3	30	04	2,02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	475.780.000,00	49.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan												
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD			Prioritas Pembangunan Nasional					
3	30	04	2,03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/kota	6 kecamatan	1 Kali	1 Kali	1 Kali	3.169.000,00	18.000.000,00		
3	30	04	2,03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	3.169.000,00	18.000.000,00		APBD
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	20 persen	20 persen	20 persen	20 persen	87.100.000,00	185.300.000,00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
3	30	05	2,01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	87.100.000,00	185.300.000,00		
3	30	05	2,01	02	Pameran Dagang Nasional	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3 pelaku usaha	3 pelaku usaha	3 pelaku usaha	3 pelaku usaha	52.100.000,00	120.050.000,00		APBD
3	30	05	2,01	03	Pameran Dagang Lokal	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	3 pelaku usaha	3 pelaku usaha	3 pelaku usaha	3 pelaku usaha	35.000.000,00	65.250.000,00		APBD
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase wajib tera yang melakukan tera/tera ulang	100%	100%	100%	100%	255.582.800,00	163.603.800,00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan												
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD			Prioritas Pembangunan Nasional					
3	30	06	2,01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	255.582.800,00	163.603.800,00		
3	30	06	2,01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	520 unit	520 unit	520 unit	520 unit	247.277.800,00	101.843.800,00		APBD
3	30	06	2,01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	8.305.000,00	61.760.000,00		APBD
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase penggunaan produk dalam negeri (9 bahan pokok)	100%	100%	100%	100%	24.895.000,00	60.000.000,00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
3	30	07	2,01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Persentase Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang dilaksanakan	2 Kegiatan	3%	3%	3%	24.895.000,00	60.000.000,00		
3	30	07	2,01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	80 UMKM	0 UMKM	80 UMKM	80 UMKM	24.895.000,00	60.000.000,00		APBD
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							13.696.528.713,00	168.050.000,00		
					DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN							13.696.528.713,00	168.050.000,00		
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Jumlah Sentra IKM	1 Sentra	1 Sentra	1 Sentra	1 Sentra	13.656.078.713,00	50.000.000,00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran		
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional			
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD						
									berkeadilan				
3	31 02 2,01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen yang disusun	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	13.656.078.713,00	50.000.000,00		
3	31 02 2,01 03		Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen		36.900.000,00	50.000.000,00		APBD
3	31 02 2,01 04	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	9.820.463.713,00			APBD
3	31 02 2,01 05	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3.798.715.000,00			APBD
3	31 03		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase pengendalian Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah	100%	100%	100%	100%	25.400.000,00	77.450.000,00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
3	31 03 2,01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Pendampingan dan Pengawasan Legalitas Usaha Industri	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	25.400.000,00	77.450.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
3	31	03	2,01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/ atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha MenengahTinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	100 dokumen	100 dokumen	100 dokumen	100 dokumen	15.550.000,00	46.450.000,00		APBD
3	31	03	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	50 dokumen	0 dokumen	0 dokumen		9.850.000,00	31.000.000,00		APBD
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase ketersediaan Informasi Industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	50%	50%	50%	50%	15.050.000,00	40.600.000,00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
3	31	04	2,01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Ketersediaan Sistem Informasi Industri	1 Kegiatan	1 Kali	1 Kali	1 Kali	15.050.000,00	40.600.000,00		
3	31	04	2,01	02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	15.050.000,00	40.600.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
					Melalui SIINas						
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							83.805.640.280,00	80.407.157.383,00		
4	01	SEKRETARIAT DAERAH						33.624.600.940,00	29.091.047.853,00		
4	01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	25.342.367.400,00	24.645.605.901,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
4	01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	1.500.000,00	28.000.000,00	
4	01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	300.000,00	10.000.000,00	APBD
4	01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	2.000.000,00	APBD
4	01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	2.000.000,00	APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	300.000,00	8.000.000,00		APBD
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	9.740.900.000,00	10.010.000.000,00		
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 orang/Bulan	65 orang/Bulan	65 orang/Bulan	65 orang/Bulan	9.740.000.000,00	10.000.000.000,00		APBD
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	300.000,00	2.000.000,00		APBD
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	300.000,00	4.000.000,00		APBD
4	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran		
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional			
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD						
4	01 01 2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	300.000,00	6.000.001,00		
4	01 01 2.03 06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	300.000	6.000.001,00		APBD
4	01 01 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	900.000,00	74.000.000,00		
4	01 01 2.05 02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	0 paket	0 paket	paket		30.300.000,00		APBD
4	01 01 2.05 03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD
4	01 01 2.05 10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 orang	70 orang	70 orang	70 orang	300.000,00	17.500.000,00		APBD
4	01 01 2.05 11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70 orang	70 orang	70 orang	70 orang	300.000,00	52.500.000,00		APBD
4	01 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	2.498.796.000,00	3.400.236.000,00		
4	01 01 2.06 01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	70.000.000,00	70.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan												
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD			Prioritas Pembangunan Nasional					
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket				APBD
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	118.000.000,00	120.000.000,00		APBD
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	830.000.000,00	1.200.000.000,00		APBD
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	150.000.000,00	175.000.000,00		APBD
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	65.496.000,00	107.736.000,00		APBD
4	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	245.000.000,00	225.000.000,00		APBD
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.020.000.000,00	1.500.000.000,00		APBD
4	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	300.000,00	2.500.000,00		APBD
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%		-		
4	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		2 unit	2 unit	2 unit				APBD
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		5 unit	2 unit	2 unit				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran				
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6.181.345.000,00	6.508.700.000,00		
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	2.000.000,00	2.000.000,00		APBD
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	900.000.000,00	900.000.000,00		APBD
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	150.000.000,00	320.000.000,00		APBD
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	5.129.345.000,00	5.286.700.000,00		APBD
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.102.117.000,00	962.117.000,00		
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	196.650.000,00	196.650.000,00		APBD
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	40 unit	40 unit	40 unit	280.870.000,00	280.870.000,00		APBD
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	5 unit	5 unit		10.000.000,00			APBD
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	500.000.000,00	300.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RPKD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RPKD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	198 unit	352 unit	352 unit	352 unit	124.597.000,00	124.597.000,00		APBD
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit			50.000.000,00		APBD
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Terpenuhinya administrasi keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	809.660.000,00	809.660.000,00		
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/bulan	2 orang/bulan	2 orang/bulan	2 orang/bulan	200.000.000,00	200.000.000,00		APBD
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	20 paket	20 paket	20 paket	20 paket	77.660.000,00	77.660.000,00		APBD
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 orang	8 orang	8 orang	8 orang	132.000.000,00	132.000.000,00		APBD
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/bulan	2 orang/bulan	2 orang/bulan	2 orang/bulan	400.000.000,00	400.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran		
			Program/Kegiatan/Subkegiatan										
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD			Prioritas Pembangunan Nasional			
4	01 01 2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Terfasilitasinya Kerumahtanggaan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100%	100%	100%	100%	207.840.000,00	244.510.000,00		
4	01 01 2.12 01	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	7 paket	7 paket	7 paket	7 paket	7 paket	76.500.000,00	89.670.000,00		APBD
4	01 01 2.12 02	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	74.420.000,00	92.170.000,00		APBD
4	01 01 2.12 03	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	56.920.000,00	62.670.000,00		APBD
4	01 01 2.13		Penataan Organisasi	Jumlah kebijakan daerah terkait Penataan Organisasi yang dikeluarkan	3 kebijakan	3 kebijakan	3 kebijakan	3 kebijakan	3 kebijakan	288.809.400,00	711.532.900,00		
4	01 01 2.13 01	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	127.426.250,00	267.145.000,00		APBD
4	01 01 2.13 02	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	59.694.250,00	137.197.000,00		APBD
4	01 01 2.13 03	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	57.023.400,00	159.950.900,00		APBD
4	01 01 2.13 04	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	18.204.000,00	88.168.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	26.461.500,00	59.072.000,00		APBD
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Terselenggaranya protokol dan komunikasi Pimpinan	100%	100%	100%	100%	4.510.200.000,00	1.860.550.000,00		
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan		95.550.000,00		APBD
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	4.502.900.000,00	1.730.000.000,00		APBD
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	7.300.000,00	35.000.000,00		APBD
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	7.945.875.540,00	3.824.129.952,00	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
							Persentase Kebijakan Penataan Pemerintahan yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%				
							Persentase kebijakan daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum oleh Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran				
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan		Jumlah kebijakan tata pemerintahan Daerah yang dikeluarkan	5 kebijakan	5 kebijakan	5 kebijakan	5 kebijakan	224.714.420,00	331.093.952,00		
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	102.660.660,00	172.585.920,00		APBD
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	20.009.800,00	75.083.032,00		APBD
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	102.043.960,00	83.425.000,00		APBD
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Jumlah kebijakan Daerah terkait Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan	3 kebijakan	3 kebijakan	3 kebijakan	3 kebijakan	7.345.922.620,00	2.492.200.000,00		
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	3.167.642.970,00	2.392.500.000,00		APBD
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	4.176.504.650,00	82.700.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran				
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.775.000,00	17.000.000,00		APBD
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Jumlah kebijakan Daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi hukum	3 Kebijakan	3 Kebijakan	3 Kebijakan	3 Kebijakan	358.173.000,00	807.179.000,00		
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	85 dokumen	85 dokumen	85 dokumen	85 dokumen	99.423.000,00	203.704.000,00		APBD
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2 Kasus	2 Kasus	2 Kasus	2 Kasus	41.350.000,00	40.000.000,00		APBD
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	217.400.000,00	563.475.000,00		APBD
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah		Jumlah Kebijakan Daerah bidang kerjasama daerah yang dikeluarkan	2 kebijakan	2 kebijakan	2 kebijakan	2 kebijakan	17.065.500,00	107.670.000,00		
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	17.065.500,00	58.900.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran		
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional			
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD						
4	01 02 2.04 03		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	laporan	laporan	laporan	laporan		48.770.000,00		APBD
4	01 03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Tingkat kematangan UKPBJ	level 3	level 3	level 3	level 3	336.358.000,00	621.312.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
			Persentase Kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%						
4	01 03 2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Jumlah Kebijakan Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dikeluarkan	2 kebijakan	2 kebijakan	2 kebijakan	2 kebijakan	207.348.000,00	211.937.000,00		
4	01 03 2.01 01	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	178.000.000,00	79.307.000,00		APBD
4	01 03 2.01 02	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	23.148.000,00	80.615.000,00		APBD
4	01 03 2.01 03	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	6.200.000,00	52.015.000,00		APBD
4	01 03 2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Jumlah Kebijakan Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dikeluarkan	2 kebijakan	2 kebijakan	2 kebijakan	2 kebijakan	22.450.000,00	177.445.000,00		
4	01 03 2.02 02		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	6.200.000,00	47.600.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran				
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	16.250.000,00	129.845.000,00		APBD
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Kebijakan Daerah bidang Pengadaan Barang dan Jasa yang dikeluarkan	3 kebijakan	3 kebijakan	3 kebijakan	3 kebijakan	106.560.000,00	231.930.000,00		
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	50 dokumen	50 dokumen	50 dokumen	50 dokumen	34.000.000,00	86.000.000,00		APBD
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	50 dokumen	50 dokumen	50 dokumen	50 dokumen	34.000.000,00	83.430.000,00		APBD
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	120 orang	120 orang	120 orang	120 orang	38.560.000,00	62.500.000,00		APBD
4	02				SEKRETARIAT DPRD							50.181.039.340,00	51.316.109.530,00		
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	22.546.362.500,00	23.658.280.500,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
4	02	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.500.000,00	28.000.000,00		
4	02	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	300.000,00	10.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran			
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD							
4 0 2	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD
4 0 2	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD
4 0 2	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	300.000,00	8.000.000,00		APBD
4 0 2	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD
4 0 2	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2.560.900.000,00	3.210.000.000,00		
4 0 2	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang/Bulan	20 orang/Bulan	20 orang/Bulan	20 orang/Bulan	2.560.000.000,00	3.200.000.000,00		APBD
4 0 2	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	300.000,00	2.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKP	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran			
			Tolok Ukur	Target RKP	Target Usulan OPD	Target PRKP	Target PRKP							
4 0 2	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	300.000,00	4.000.000,00		APBD
4 0 2	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD
4 0 2	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	300.000,00	6.000.000,00		
4 0 2	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD
4 0 2	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	900.000,00	24.000.000,00		
4 0 2	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	paket	paket	paket		12.500.000,00		APBD
4 0 2	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD
4 0 2	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	300.000,00	5.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran			
			Program/Kegiatan/Subkegiatan											
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD			Prioritas Pembangunan Nasional				
4 0 2	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	300.000,00	15.000.000,00		APBD
4 0 2	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.038.675.000,00	1.481.700.000,00		
4 0 2	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00		APBD
4 0 2	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	2 Paket	2 Paket				APBD
4 0 2	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	30.000.000,00	60.000.000,00		APBD
4 0 2	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	320.000.000,00	430.000.000,00		APBD
4 0 2	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	174.975.000,00	450.000.000,00		APBD
4 0 2	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	53.400.000,00	67.200.000,00		APBD
4 0 2	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	240.000.000,00	222.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan								
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD			Prioritas Pembangunan Nasional	
4 0 2 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	170.000.000,00	200.000.000,00		APBD
4 0 2 01 2,06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	300.000,00	2.500.000,00		APBD
4 0 2 01 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 Persen	100 Persen	100 Persen	-	-		APBD
4 0 2 01 2,07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		3 unit	3 unit	3 unit				APBD
4 0 2 01 2,07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		31 unit	32 unit	32 unit				APBD
4 0 2 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	2.370.538.000,00	2.324.538.000,00		
4 0 2 01 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	2.000.000,00	2.000.000,00		APBD
4 0 2 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	415.000.000,00	415.000.000,00		APBD
4 0 2 01 2,08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	35.000.000,00	100.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RPKD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan				Target RPKD			Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD	Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Tolok Ukur	Target RPKD	Target Usulan OPD	Target PRKPD								
4 0 2 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	1.918.538.000,00	1.807.538.000,00		APBD			
4 0 2 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	277.612.000,00	282.590.000,00					
4 0 2 01 2,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	64.272.000,00	2.250.000,00		APBD			
4 0 2 01 2,09 05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 unit	15 unit	15 unit	15 unit	25.000.000,00	25.000.000,00		APBD			
4 0 2 01 2,09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	8.000.000,00	8.000.000,00		APBD			
4 0 2 01 2,09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	123.000.000,00	190.000.000,00		APBD			
4 0 2 01 2,09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	74 unit	195 unit	195 unit	195 unit	57.340.000,00	57.340.000,00		APBD			
4 0 2 01 2,15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	14.806.607.500,00	14.812.122.500,00					
4 0 2 01 2,15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 orang/bulan	25 orang/bulan	25 orang/bulan	25 orang/bulan	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00		APBD			
4 0 2 01 2,15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	150 paket	150 paket	150 paket	150 paket	333.973.500,00	337.563.500,00		APBD			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
4 0 2 01 2,15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	472.634.000,00	474.559.000,00		APBD
4 0 2 01 2,16	Layanan Administrasi DPRD		Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD	100%	100%	100%	100%	1.489.330.000,00	1.489.330.000,00		
4 0 2 01 2,16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	700.000.000,00	700.000.000,00		APBD
4 0 2 01 2,16 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	789.330.000,00	789.330.000,00		APBD
4 0 2 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Terintegrasinya Program – Program DPRD Dalam Melaksanakan Fungsinya ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	27.634.676.840,00	27.657.829.030,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
4 0 2 02 2,01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah	100%	100%	100%	100%	571.479.330,00	586.838.920,00		
4 0 2 02 2,01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	502.194.840,00	510.000.000,00		APBD
4 0 2 02 2,01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	69.284.490,00	76.838.920,00		APBD
4 0 2 02 2,02	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	100%	100%	100%	180.834.720,00	188.627.320,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
4 0 2 02 03	Pembahasan APBD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	180.834.720,00	188.627.320,00		APBD
4 0 2 02 2,04	Peningkatan Kapasitas DPRD		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	100%	100%	100%	5.766.904.000,00	5.766.904.000,00		
4 0 2 02 2,04 02	Pendalaman Tugas DPRD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	4.590.634.000,00	4.590.634.000,00		APBD
4 0 2 02 2,04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	441.000.000,00	441.000.000,00		APBD
4 0 2 02 2,04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	9 orang	9 orang	9 orang	9 orang	321.270.000,00	321.270.000,00		APBD
4 0 2 02 2,04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	270.000.000,00	270.000.000,00		APBD
4 0 2 02 2,04 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	144.000.000,00	144.000.000,00		APBD
4 0 2 02 2,05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Terfasilitasinya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	100%	100%	100%	648.155.000,00	648.155.000,00		
4 0 2 02 2,05 03	Pelaksanaan Reses	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	648.155.000,00	648.155.000,00		APBD
4 0 2 02 2,08	Fasilitasi Tugas DPRD		Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas DPRD	100%	100%	100%	100%	20.467.303.790,00	20.467.303.790,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran			
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD							
4 0 2	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	84 dokumen	84 dokumen	84 dokumen	84 dokumen	20.467.303.790,00	20.467.303.790,00		APBD
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							145.512.935.266,00	159.030.361.000,00		
5 0 1				PERENCANAAN							6.062.748.100,00	9.196.422.000,00		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH							6.062.748.100,00	9.196.422.000,00		
5 0 1	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	5.033.192.000,00	6.143.392.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
5 0 1	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	1.500.000,00	28.000.000,00		
5 0 1	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	300.000,00	10.000.000,00		APBD
5 0 1	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD
5 0 1	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
5010120106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	300.000,00	8.000.000,00		APBD
5010120107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD
50101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	3.695.900.000,00	4.010.000.000,00		
5010120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang/ Bulan	25 orang/ Bulan	25 orang/ Bulan	25 orang/ Bulan	3.695.000.000,00	4.000.000.000,00		APBD
5010120205	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	300.000,00	2.000.000,00		APBD
5010120207	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	300.000,00	4.000.000,00		APBD
5010120208	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
5 0 1 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	300.000,00	6.000.000,00		
5 0 1 01 2.03	06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD
5 0 1 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	900.000,00	36.000.000,00		
5 0 1 01 2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	0 paket	0 paket	paket		12.500.000,00		APBD
5 0 1 01 2.05	03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD
5 0 1 01 2.05	10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	32 orang	25 orang	22 orang	22 orang	300.000,00	8.000.000,00		APBD
5 0 1 01 2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	32 orang	25 orang	22 orang	22 orang	300.000,00	24.000.000,00		APBD
5 0 1 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	430.300.000,00	969.500.000,00		
5 0 1 01 2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	8.000.000,00	8.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
5 0 1	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 paket	3 paket	3 paket		10.000.000,00		APBD	
5 0 1	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket		9.000.000,00	9.000.000,00		APBD
5 0 1	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket		60.000.000,00	50.000.000,00		APBD
5 0 1	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket		30.000.000,00	40.000.000,00		APBD
5 0 1	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen		3.000.000,00	5.000.000,00		APBD
5 0 1	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket		50.000.000,00	45.000.000,00		APBD
5 0 1	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan		270.000.000,00	800.000.000,00		APBD
5 0 1	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen		300.000,00	2.500.000,00		APBD
5 0 1	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%		10.000.000,00			
5 0 1	01	2.07	5	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			30 unit	30 unit					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran			
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD							
5 0 1	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2 unit	2 unit	2 unit		10.000.000,00		
5 0 1	01			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		884.292.000,00	1.031.752.000,00	
5 0 1	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan		2.000.000,00	2.000.000,00	APBD
5 0 1	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan		105.000.000,00	105.000.000,00	APBD
5 0 1	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan		5.000.000,00	60.000.000,00	APBD
5 0 1	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan		772.292.000,00	864.752.000,00	APBD
5 0 1	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		20.000.000,00	52.140.000,00	
5 0 1	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		15 unit	15 unit	15 unit			-	APBD
5 0 1	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 unit	0 unit	0 unit			5.000.000,00		APBD
5 0 1	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit	0 unit	0 unit			10.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran			
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional				
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD							
5 0 1	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	10.000.000,00	15.000.000,00		APBD
5 0 1	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 unit	24 unit	24 unit	24 unit	5.000.000,00	14.640.000,00		APBD
5 0 1	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	5.000.000,00	7.500.000,00		APBD
5 0 1	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	785.413.600,00	793.030.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
5 0 1	02	2,01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Cakupan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah yang disusun berdasarkan peraturan perundangan	100%	100%	100%	100%	684.904.400,00	401.500.000,00		
5 0 1	02	2,01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	Berita Acara	Berita Acara	Berita Acara		21.000.000,00		APBD
5 0 1	02	2,01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	77.088.600,00	84.500.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
5 0 1 02 2,01 06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	usulan	usulan	usulan	usulan		29.000.000,00		APBD
5 0 1 02 2,01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	607.815.800,00	267.000.000,00		APBD
5 0 1 02 2,02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Analisis Data dan Informasi yang diterapkan dalam penyusunan dokumen perencanaan	100	100	100	100	48.064.200,00	212.500.000,00		
5 0 1 02 2,02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	masukan	0 masukan	0 masukan	masukan		73.500.000,00		APBD
5 0 1 02 2,02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	31 orang	31 orang	31 orang	31 orang	48.064.200,00	139.000.000,00		APBD
5 0 1 02 2,03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase pengendalian dan evaluasi yang dilakukan terhadap dokumen perencanaan daerah	100	100	100	100	39.415.000,00	166.000.000,00		
5 0 1 02 2,03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	16.035.000,00	83.500.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran			
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional				
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD							
5 0 1	02	2,03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	23.380.000,00	82.500.000,00		APBD
0 5 1	02	2,04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		Persentase dokumen perencanaan daerah yang disusun menggunakan aplikasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	13.030.000,00	13.030.000,00		
0 5 1	02	02,04	02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	13.030.000,00	13.030.000,00		APBD
5 0 1	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintahan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	100%	100%	244.142.500,00	2.260.000.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
					Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintahan daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	100%	100%	100%					
					Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintahan daerah Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	100%	100%	100%	100%					
5 0 1	03	2,01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase keselarasan sub kegiatan pada renja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan renstra perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	83.275.000,00	810.000.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
5 0 1 03 2,01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	15.050.000,00	115.000.000,00		APBD
5 0 1 03 2,01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	12 perangkat daerah	12 perangkat daerah	12 perangkat daerah	12 perangkat daerah	6.200.000,00	65.000.000,00		APBD
5 0 1 03 2,01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	6.200.000,00	70.000.000,00		APBD
5 0 1 03 2,01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	17.850.000,00	70.000.000,00		APBD
5 0 1 03 2,01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	15.050.000,00	120.000.000,00		APBD
5 0 1 03 2,01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	5 perangkat daerah	5 perangkat daerah	5 perangkat daerah	5 perangkat daerah	6.200.000,00	80.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan								
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD			Prioritas Pembangunan Nasional	
5 0 1 03 2,01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	5 perangkat daerah	5 perangkat daerah	5 perangkat daerah	5 perangkat daerah	6.200.000,00	90.000.000,00		APBD
5 0 1 03 2,01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	10.525.000,00	200.000.000,00		APBD
5 0 1 03 2,02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase keselarasan subkegiatan pada renja bidang perekonomian dan SDA dengan Renstra Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	74.322.500,00	720.000.000,00		
5 0 1 03 2,02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	6.200.000,00	80.000.000,00		APBD
5 0 1 03 2,02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	2 perangkat daerah	2 perangkat daerah	2 perangkat daerah	2 perangkat daerah	6.200.000,00	80.000.000,00		APBD
5 0 1 03 2,02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	2 perangkat daerah	2 perangkat daerah	2 perangkat daerah	2 perangkat daerah	6.200.000,00	80.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
5 0 1 03 2,02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	17.872.500,00	120.000.000,00		APBD
5 0 1 03 2,02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	6.200.000,00	80.000.000,00		APBD
5 0 1 03 2,02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	2 perangkat daerah	2 perangkat daerah	2 perangkat daerah	2 perangkat daerah	6.200.000,00	80.000.000,00		APBD
5 0 1 03 2,02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	2 perangkat daerah	2 perangkat daerah	2 perangkat daerah	2 perangkat daerah	6.200.000,00	80.000.000,00		APBD
5 0 1 03 2,02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	19.250.000,00	120.000.000,00		APBD
5 0 1 03 2,03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase keselarasan sub kegiatan pada renja bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan renstra perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	86.545.000,00	730.000.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
5 0 1 03 2,03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	21.200.000,00	90.000.000,00		APBD
5 0 1 03 2,03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	2 perangkat daerah	2 perangkat daerah	2 perangkat daerah	2 perangkat daerah	6.200.000,00	80.000.000,00		APBD
5 0 1 03 2,03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	2 perangkat daerah	2 perangkat daerah	2 perangkat daerah	2 perangkat daerah	6.200.000,00	80.000.000,00		APBD
5 0 1 03 2,03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	15.050.000,00	120.000.000,00		APBD
5 0 1 03 2,03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	6.200.000,00	80.000.000,00		APBD
5 0 1 03 2,03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	8 perangkat daerah	8 perangkat daerah	8 perangkat daerah	8 perangkat daerah	6.200.000,00	80.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
5 0 1 03 2,03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	8 perangkat daerah	8 perangkat daerah	8 perangkat daerah	8 perangkat daerah	6.200.000,00	80.000.000,00		APBD
5 0 1 03 2,03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	19.295.000,00	120.000.000,00		APBD
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							429.441.705,00	650.000.000,00		
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH							429.441.705,00	650.000.000,00		
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase kajian yang mendukung prioritas pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	429.441.705,00	650.000.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
			Jumlah Inovasi Daerah	2 Inovasi	2 Inovasi	2 Inovasi	2 Inovasi				
5 05 02 2,01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Jumlah dokumen data penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	67.550.000,00	130.000.000,00		
5 05 02 2,01 11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	59.450.000,00	80.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
5 05 02 2,01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	8.100.000,00	50.000.000,00		APBD
5 05 02 2,02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	128.776.805,00	265.000.000,00		
5 05 02 2,02 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - aspek Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	48.813.400,00	80.000.000,00		APBD
5 05 02 2,02 03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	43.413.405,00	85.000.000,00		APBD
5 05 02 2,02 10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	2 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen		36.550.000,00	100.000.000,00		APBD
5 05 02 2,03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	4 Penelitian	2 Penelitian	2 Penelitian	2 Penelitian	164.675.000,00	205.000.000,00		
	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah				1 Dokumen				
5 05 02 2,03 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen		64.325.000,00	80.000.000,00		APBD
5 05 02 2,03 07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.350.000,00	125.000.000,00		APBD
5 05 02 2,04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Jumlah inovasi daerah	2 inovasi	0 inovasi	0 inovasi		68.439.900,00	50.000.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan								
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD			Prioritas Pembangunan Nasional	
5 05 02 2,04 02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan		68.439.900,00			APBD
5 05 02 2,04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	0 Laporan	0 Laporan	Laporan		50.000.000,00		APBD
5 02	KEUANGAN							131.582.099.261,00	140.016.850.000,00		
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							122.942.884.261,00	128.849.820.000,00		
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	5.221.035.000,00	5.682.100.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	1.500.000,00	28.000.000,00		
5 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	300.000,00	10.000.000,00		APBD
5 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan												
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD			Prioritas Pembangunan Nasional					
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	300.000,00	8.000.000,00		APBD
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	3.795.900.000,00	3.810.000.000,00		
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 orang/Bulan	28 orang/Bulan	28 orang/Bulan	28 orang/Bulan	3.795.000.000,00	3.800.000.000,00		APBD
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	300.000,00	2.000.000,00		APBD
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	300.000,00	4.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
5	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	300.000,00	6.000.000,00		
5	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	900.000,00	34.000.000,00		
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	0 paket	0 paket	paket		12.500.000,00		APBD
5	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD
5	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	28 orang	28 orang	28 orang	28 orang	300.000,00	7.500.000,00		APBD
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28 orang	28 orang	28 orang	28 orang	300.000,00	22.500.000,00		APBD
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	430.675.000,00	671.500.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran				
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00		APBD
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00		APBD
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	73.375.000,00	75.000.000,00		APBD
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	25.000.000,00	35.000.000,00		APBD
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	3.000.000,00	5.000.000,00		APBD
5	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	45.000.000,00	40.000.000,00		APBD
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	270.000.000,00	500.000.000,00		APBD
5	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	300.000,00	2.500.000,00		APBD
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	974.760.000,00	1.081.400.000,00		
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	2.000.000,00	2.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	110.000.000,00	110.000.000,00		APBD
5	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	5.000.000,00	50.000.000,00		APBD
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	857.760.000,00	919.400.000,00		APBD
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	17.000.000,00	38.700.000,00		
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	2.000.000,00	2.000.000,00		APBD
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit	1 unit	1 unit			2.000.000,00		APBD
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	10.000.000,00	22.500.000,00		APBD
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit	5.000.000,00	12.200.000,00		APBD
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase ketepatan dan keakuratan dalam	100%	100%	100%	100%	117.369.322.461,00	121.790.938.775,00	Memperkuat stabilitas	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
5	02	02	2,01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		penyajian laporan keuangan daerah							Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
						Persentase dokumen penganggaran yang disusun dengan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	825.694.500,00	1.442.437.100,00			
5	02	02	2,01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	124.450.000,00	158.240.000,00		APBD
5	02	02	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	127.475.000,00	160.332.100,00		APBD
5	02	02	2,01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	31 Dokumen	31 Dokumen	31 Dokumen	300.000,00	49.680.000,00		APBD
5	02	02	2,01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	31 Dokumen	31 Dokumen	31 Dokumen	300.000,00	49.680.000,00		APBD
5	02	02	2,01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	31 Dokumen	31 Dokumen	31 Dokumen	32.550.000,00	50.460.000,00		APBD
5	02	02	2,01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	31 Dokumen	31 Dokumen	31 Dokumen	33.415.000,00	66.124.700,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
5 02 02 2,01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	245.719.500,00	298.571.000,00		APBD
5 02 02 2,01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	245.355.000,00	329.999.300,00		APBD
5 02 02 2,01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.830.000,00	165.000.000,00		APBD
5 02 02 2,01 13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	31 orang	31 orang	31 orang	31 orang	300.000,00	114.350.000,00		APBD
5 02 02 2,02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase layanan Perbendaharaan Daerah sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	609.772.511,00	185.370.350,00		
5 02 02 2,02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.775.000,00	45.000.000,00		APBD
5 02 02 2,02 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	300.000,00	16.556.500,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
5 02 02 2,02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	176.675.000,00	46,023,730		APBD
5 02 02 2,02 06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.200.000,00	69,695,000		APBD
5 02 02 2,02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	123.723.700,00	123.813.850,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
5 02 02 2,02 08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1.775.000,00	43,330,000		APBD
5 02 02 2,02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	86.823.811,00	195,892,320		APBD
5 02 02 2,02 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	85 orang	85 orang	85 orang	85 orang	215.500.000,00	17,245,000		APBD
5 02 02 2,03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase laporan keuangan OPD tepat waktu dan sesuai SAP	100%	100%	100%	100%	32.076.500,00	442.788.575,00		
5 02 02 2,03 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	1.775.000,00	46.556.000,00		APBD
5 02 02 2,03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	2.932.500,00	66.116.925,00		APBD
5 02 02 2,03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	9.964.000,00	96.927.500,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
5 02 02 2,03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	15.630.000,00	84.898.150,00		APBD
5 02 02 2,03 07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.775.000,00	148.290.000,00		APBD
5 02 02 2,04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Anggaran Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tersedia	100%	100%	100%	100%	115.901.778.950,00	119.720.342.750,00		
5 02 02 2,04 02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	4 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	93.386.000,00	300.000.000,00		APBD
5 02 02 2,04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	108.643.850.200,00	114.100.000.000,00		APBD
5 02 02 2,04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	3.470.000.000,00	1.000.000.000,00		APBD
5 02 02 2,04 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	3.694.542.750,00	4.320.342.750,00		APBD
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		persentase kesesuaian pengelolaan barang milik daerah sesuai	100%	100%	100%	100%	352.526.800,00	1.376.781.225,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
							peraturan perundang-undangan						dan transformasi pelayanan publik		
5	02	03	2,01		Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase Laporan BMD yang disusun dengan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	352.526.800,00	1.376.781.225,00		
5	02	03	2,01	01	Penyusunan Standar Harga	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.305.000,00	54.405.000,00		APBD
5	02	03	2,01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2.015.300,00	46.515.825,00		APBD
5	02	03	2,01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	20.900.000,00	215.055.300,00		APBD
5	02	03	2,01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	44.457.650,00	100.000.000,00		APBD
5	02	03	2,01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	67.657.650,00	536.950.000,00		APBD
5	02	03	2,01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	43.517.000,00	183.177.000,00		APBD
5	02	03	2,01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	142.080.000,00	212.369.500,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RPKD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
			Tolok Ukur	Target RPKD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
5 02 03 2,01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	494.200,00	5.258.600,00		APBD
5 02 03 2,01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	25.100.000,00	23.050.000,00		APBD
5 0 2	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH							8.639.215.000,00	11.167.030.000,00		
5 0 2 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	7.532.080.000,00	9.097.030.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
5 0 2 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	1.500.000,00	28.000.000,00		
5 0 2 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	300.000,00	10.000.000,00		APBD
5 0 2 01 2,01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD
5 0 2 01 2,01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran			
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional				
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD							
5 0 2	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	300.000,00	8.000.000,00		APBD
5 0 2	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD
5 0 2	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	5.485.900.000,00	6.710.000.000,00		
5 0 2	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 orang/ Bulan	31 orang/ Bulan	31 orang/ Bulan	31 orang/ Bulan	5.485.000.000,00	6.700.000.000,00		APBD
5 0 2	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	300.000,00	2.000.000,00		APBD
5 0 2	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	300.000,00	4.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran			
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional				
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD							
5 0 2	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD
5 0 2	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	300.000,00	6.000.000,00		
5 0 2	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD
5 0 2	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	900.000,00	42.000.000,00		
5 0 2	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	0 paket	0 paket	paket		12.500.000,00		APBD
5 0 2	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD
5 0 2	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	38 orang	38 orang	38 orang	38 orang	300.000,00	9.500.000,00		APBD
5 0 2	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	38 orang	38 orang	38 orang	38 orang	300.000,00	28.500.000,00		APBD
5 0 2	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	496.300.000,00	761.500.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran			
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional				
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD							
5 0 2	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	6.000.000,00	7.000.000,00		APBD
5 0 2	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Paket	2 Paket	2 Paket				APBD
5 0 2	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00		APBD
5 0 2	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	64.000.000,00	64.000.000,00		APBD
5 0 2	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	25.000.000,00	35.000.000,00		APBD
5 0 2	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	3.000.000,00	5.000.000,00		APBD
5 0 2	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	120.000.000,00	140.000.000,00		APBD
5 0 2	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	270.000.000,00	500.000.000,00		APBD
5 0 2	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	300.000,00	2.500.000,00		APBD
5 0 2	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.527.180.000,00	1.504.160.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran			
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional				
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD							
5 0 2	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	2.000.000,00	2.000.000,00		APBD
5 0 2	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	374.000.000,00	326.000.000,00		APBD
5 0 2	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	5.000.000,00	50.000.000,00		APBD
5 0 2	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	1.146.180.000,00	1.126.160.000,00		APBD
5 0 2	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	20.000.000,00	32.870.000,00		
5 0 2	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		24 unit	24 unit	24 unit		-		APBD
5 0 2	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	15.000.000,00	22.500.000,00		APBD
5 0 2	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	17 unit	17 unit	17 unit	17 unit	5.000.000,00	10.370.000,00		APBD
5 0 2	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase peningkatan pajak daerah	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	1.107.135.000,00	2.070.000.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran					
			Program/Kegiatan/Subkegiatan						Prioritas Pembangunan Nasional						
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD					Target PRKPD				
					Persentase peningkatan retribusi daerah	3,11%	3,11%	3,11%	3,11%		dan transformasi pelayanan publik				
5	02	04	2,01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	1.107.135.000,00	2.070.000.000,00			
						JumlahDokumen/Laporan Pengolahan dan Evaluasi Data Pajak Daerah	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan					
						Jumlah Dokumen/Laporan Pajak daerah penyelesaian pajak daerah dan pemeriksaan serta pengawasan pajak daerah	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan					
5	02	04	2,01	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	197.200.200,00	260.000.000,00		APBD
5	02	04	2,01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	59.020.000,00	85.000.000,00		APBD
5	02	04	2,01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	7.520.000,00	140.000.000,00		APBD
5	02	04	2,01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	80.653.500,00	220.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
5 0 2 04 2,01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	72.771.100,00	208.000.000,00		APBD
5 0 2 04 2,01 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	4.460 objek pajak	4.460 objek pajak	4.460 objek pajak	4.460 objek pajak	6.200.000,00	50.000.000,00		APBD
5 0 2 04 02 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	10.200.000,00	40.000.000,00		APBD
5 0 2 04 2,01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	135.945.800,00	270.000.000,00		APBD
5 0 2 04 2,01 11	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	184.511.000,00	300.000.000,00		APBD
5 0 2 04 2,01 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	11.500.000,00	57.000.000,00		APBD
5 0 2 04 2,01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	22.234.000,00	80.000.000,00		APBD
5 0 2 04 2,01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	319.379.400,00	360.000.000,00		APBD
5 0 3	KEPEGAWAIAN							6.526.526.200,00	7.246.089.000,00		
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH							6.526.526.200,00	7.246.089.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
5 0 3	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	5.186.090.000,00	5.664.830.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
5 0 3	01	2,01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.500.000,00	28.000.000,00		
5 0 3	01	2,01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	300.000,00	10.000.000,00		APBD
5 0 3	01	2,01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD
5 0 3	01	2,01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD
5 0 3	01	2,01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	300.000,00	8.000.000,00		APBD
5 0 3	01	2,01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
			Program/Kegiatan/Subkegiatan						Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran				
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD					Target PRKPD			
5 0 3	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	3.605.900.000,00	3.710.000.000,00		
5 0 3	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 orang/ Bulan	27 orang/ Bulan	27 orang/ Bulan	27 orang/ Bulan	3.605.000.000,00	3.700.000.000,00		APBD
5 0 3	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	300.000,00	2.000.000,00		APBD
5 0 3	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semes teran SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	300.000,00	4.000.000,00		APBD
5 0 3	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD
5 0 3	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	300.000,00	6.000.000,00		
5 0 3	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
5 0 3 01 2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	900.000,00	34.000.000,00		
5 0 3 01 2,05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1 Unit	1 Unit	Unit		5.000.000,00		APBD
5 0 3 01 2,05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0 Paket	0 Paket	Paket		12.500.000,00		APBD
5 0 3 01 2,05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD
5 0 3 01 2,05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	300.000,00	7.500.000,00		APBD
5 0 3 01 2,05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	300.000,00	22.500.000,00		APBD
5 0 3 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	431.300.000,00	655.500.000,00		
5 0 3 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00		APBD
5 0 3 01 2,06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
5 0 3 01 2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	45.000.000,00	45.000.000,00		APBD
5 0 3 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	25.000.000,00	35.000.000,00		APBD
5 0 3 01 2,06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	5.000.000,00		APBD
5 0 3 01 2,06 07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	60.000.000,00	40.000.000,00		APBD
5 0 3 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	270.000.000,00	500.000.000,00		APBD
5 0 3 01 2,06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	2.500.000,00		APBD
5 0 3 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.026.190.000,00	1.065.190.000,00		
5 0 3 01 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00		APBD
5 0 3 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	300.400.000,00	300.400.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPDP	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan								
			Tolok Ukur	Target RKPDP	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD			Prioritas Pembangunan Nasional	
5 03 01 2,08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	50.000.000,00		APBD
5 03 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	718.790.000,00	712.790.000,00		APBD
5 03 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	120.000.000,00	166.140.000,00		
5 03 01 2,09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 unit	3 unit	3 unit			6.000.000,00		APBD
5 03 01 2,09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	115.000.000,00	115.000.000,00		APBD
5 03 01 2,09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	74 unit	4 unit	8 unit	8 unit	5.000.000,00	45.140.000,00		APBD
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase PNS yang memiliki nilai kinerja ≥76	95,42%	95,42%	95,42%	95,42%	1.340.436.200,00	1.581.259.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
		Jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, dan berat	37 orang	37 orang	37 orang	37 orang					
		Jumlah PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan Minimal Strata II	77 orang	77 orang	77 orang	77 orang					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
5 0 3 02 2,01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase pemenuhan pegawai ASN yang sesuai dengan kebutuhan dan formasi	20%	20%	20%	20%	514.918.000,00	512.500.000,00		
5 0 3 02 2,01 01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.250.000,00	10.000.000,00		APBD
5 0 3 02 2,01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.775.000,00	18.000.000,00		APBD
5 0 3 02 2,01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	212.133.000,00	220.000.000,00		APBD
5 0 3 02 2,01 04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	10.000.000,00		APBD
5 0 3 02 2,01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.875.000,00	25.000.000,00		APBD
5 0 3 02 2,01 07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	Dokumen		19.500.000,00		APBD
5 0 3 02 2,01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	150.000.000,00	50.000.000,00		APBD
5 0 3 02 2,01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	13.375.000,00	30.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan								
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD			Prioritas Pembangunan Nasional	
5 0 3 02 2,01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	126.210.000,00	130.000.000,00		APBD
5 0 3 02 2,02	Mutasi dan Promosi ASN		Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN	100%	100%	100%	100%	207.579.000,00	200.000.000,00		
5 0 3 02 2,02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.775.000,00	20.000.000,00		APBD
5 0 3 02 2,02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	11.150.000,00	30.000.000,00		APBD
5 0 3 02 2,02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	194.654.000,00	150.000.000,00		APBD
5 0 3 02 2,03	Pengembangan Kompetensi ASN		Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	100%	100%	100%	100%	576.129.200,00	663.000.000,00		
5 0 3 02 2,03 01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN		Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Orang	29 Orang	29 Orang	29 Orang	58.300.000,00	60.000.000,00		APBD
5 0 3 02 2,03 02	Pengelolaan Assessment Center	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	357.300.000,00	375.000.000,00		APBD
5 0 3 02 2,03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	36 Orang	0 Orang			120.000.000,00	120.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
5 0 3 02 2,03 12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	39.629.200,00	48.000.000,00		APBD
5 0 3 02 2,03 13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	300.000,00	20.000.000,00		APBD
5 0 3 02 2,03 14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	14 Orang	14 Orang	14 Orang	14 Orang	300.000,00	20.000.000,00		APBD
5 0 3 02 2,03 15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	20.000.000,00		APBD
5 0 3 02 2,04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	84%	84%	84%	84%	41.810.000,00	205.759.000,00		
			Persentase Pelayanan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	82%	82%	82%	82%				
5 0 3 02 2,04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	35.560.000,00	63.759.000,00		APBD
5 0 3 02 2,04 05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	5.050.000,00	17.500.000,00		APBD
5 0 3 02 2,04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	300.000,00	20.000.000,00		APBD
5 0 3 02 2,04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	44.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
5 0 3 02 2,04 09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	40.500.000,00		APBD
5 0 3 02 2,04 10	Evaluasi Disiplin ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	20.000.000,00		APBD
5 0 4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							912.120.000,00	1.921.000.000,00		
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH							912.120.000,00	1.921.000.000,00		
5 0 4 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentase PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dan kepemimpinan/ fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki	74,43%	74,43%	74,43%	74,43%	912.120.000,00	1.921.000.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
			Jumlah PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya	435 Orang	435 Orang	435 Orang	435 Orang				
			Jumlah PNS yang telah mengikuti seminar/ workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir	1.742 Orang	1.742 Orang	1.742 Orang	1.742 Orang				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RPKD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RPKD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
5	0	02	2,01		Pengembangan Kompetensi Teknis		Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis	100%	100%	100%	100%	100.600.000,00	140.000.000,00		
5	0	02	2,01	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	30.000.000,00		APBD
5	0	02	2,01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00		APBD
5	0	02	2,01	04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	10.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan						Prioritas Pembangunan Nasional		
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD					Target PRKPD
5	0	02	2,02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Terlaksananya Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100%	100%	100%	100%	811.520.000,00	1.781.000.000,00		
5	0	02	2,02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	10.000.000,00		APBD
5	0	02	2,02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	810.920.000,00	1.761.000.000,00		APBD
5	0	02	2,02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1 Dokumen	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	10.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran				
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							6.976.169.000,00	8.480.784.000,00						
6	INSPEKTORAT DAERAH							6.976.169.000,00	8.480.784.000,00						
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	5.160.320.000,00	5.354.570.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik					
6	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	1.500.000,00	28.000.000,00						
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	300.000,00	10.000.000,00		APBD
6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD
6	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	300.000,00	8.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran			
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional				
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD							
6 0 1	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD
6 0 1	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	4.185.900.000,00	4.010.000.000,00		
6 0 1	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	4.185.000.000,00	4.000.000.000,00		APBD
6 0 1	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	2.000.000,00		APBD
6 0 1	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	4.000.000,00		APBD
6 0 1	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD
6 0 1	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	300.000,00	6.000.000,00		
6 0 1	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran			
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional				
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD							
6 0 1	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	900.000,00	45.500.000,00		
6 0 1	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0 Paket	0 Paket	Paket		12.500.000,00		APBD
6 0 1	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD
6 0 1	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	29 Orang	29 Orang	29 Orang	29 Orang	300.000,00	7.250.000,00		APBD
6 0 1	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	29 Orang	29 Orang	29 Orang	29 Orang	300.000,00	21.750.000,00		APBD
6 0 1	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	402.300.000,00	641.500.000,00		
6 0 1	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00		APBD
6 0 1	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	3 Paket	3 Paket				APBD
6 0 1	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00		APBD
6 0 1	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	45.000.000,00	45.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran			
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional				
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD							
6 0 1	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	25.000.000,00	35.000.000,00		APBD
6 0 1	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	5.000.000,00		APBD
6 0 1	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	45.000.000,00	40.000.000,00		APBD
6 0 1	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	270.000.000,00	500.000.000,00		APBD
6 0 1	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	2.500.000,00		APBD
6 0 1	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 persen	100 persen	100 persen	-	-		APBD
6 0 1	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		5 unit	5 unit	5 unit				APBD
6 0 1	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	554.420.000,00	599.420.000,00		
6 0 1	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00		APBD
6 0 1	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	67.200.000,00	67.200.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran			
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional				
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD							
6 0 1	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	50.000.000,00		APBD
6 0 1	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	480.220.000,00	480.220.000,00		APBD
6 0 1	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	15.000.000,00	24.150.000,00		
6 0 1	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		5 unit	6 unit	6 unit				APBD
6 0 1	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	10.000.000,00	15.000.000,00		APBD
6 0 1	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	15 unit	15 unit	8 unit	8 unit	5.000.000,00	9.150.000,00		APBD
6 0 1	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		indeks manajemen resiko	1,7	1,7	1,7	1,7	1.534.247.000,00	2.673.000.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
					Indeks efektivitas pengendalian korupsi	1,1	1,1	1,1	1,1					
6 0 1	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Persentase tindak lanjut hasil pengawasan internal yang sesuai rekomendasi	100%	100%	100%	100%	1.450.765.000,00	2.470.400.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
6	0	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	62 Laporan	31 Laporan	31 Laporan	31 Laporan	328.980.000,00	221.500.000,00		APBD
6	0	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	62 Laporan	31 Laporan	31 Laporan	31 Laporan	179.300.000,00	358.610.000,00		APBD
6	0	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	86 Laporan	43 Laporan	43 Laporan	43 Laporan	278.180.000,00	556.900.000,00		APBD
6	0	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	55.670.000,00	111.850.000,00		APBD
6	0	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	60 Laporan	25 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	250.805.000,00	502.240.000,00		APBD
6	0	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	200 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	357.830.000,00	719.300.000,00		APBD
6	0	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	100%	100%	100%	100%	83.482.000,00	202.600.000,00		
6	0	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	18.622.000,00	72.600.000,00		APBD
6	0	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	64.860.000,00	130.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan									Prioritas Pembangunan Nasional
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD					
6	0	03				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Level Kapabilitas APIP	3	3	3	3	281.602.000,00	453.214.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
6	0	03	2.02			Pendampingan dan Asistensi		Level IACM	3	3	3	3	281.602.000,00	453.214.000,00		
6	0	03	2.01	01		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	31 perangkat daerah	5 perangkat daerah	31 perangkat daerah	31 perangkat daerah	10.635.000,00	21.550.000,00		APBD
6	0	03	2.01	02		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	31 perangkat daerah	31 perangkat daerah	31 perangkat daerah	31 perangkat daerah	13.895.000,00	28.000.000,00		APBD
6	0	03	2.01	03		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	1 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	238.642.000,00	375.664.000,00		APBD
6	0	03	2.01	04		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	2 perangkat daerah	2 perangkat daerah	2 perangkat daerah	2 perangkat daerah	18.430.000,00	28.000.000,00		APBD
						UNSUR KEWILAYAHAN							32.538.541.300,00	36.743.311.600,00		
						KECAMATAN MUNTOK							13.168.420.500,00	13.981.470.000,00		
7	0	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	6.895.240.000,00	6.880.710.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
7	0	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.500.000,00	28.000.000,00		
7	0	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	300.000,00	10.000.000,00		APBD
7	0	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD
7	0	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD
7	0	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	300.000,00	8.000.000,00		APBD
7	0	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran						
			Program/Kegiatan/Subkegiatan						Prioritas Pembangunan Nasional							
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD					Target PRKPD					
7 0 1	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	4.665.900.000,00	4.510.000.000,00		
7 0 1	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	4.665.000.000,00	4.500.000.000,00		APBD	
7 0 1	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	2.000.000,00		APBD	
7 0 1	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	4.000.000,00		APBD	
7 0 1	01	2.02	08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD	
7 0 1	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	300.000,00	6.000.000,00			
7 0 1	01	2.03	06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
7	0	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	900.000,00	46.000.000,00		
7	0	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0 Paket	0 Paket	Paket		12.500.000,00		APBD
7	0	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD
7	1	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	42 Orang	42 Orang	35 Orang	35 Orang	300.000,00	10.500.000,00		APBD
7	1	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	42 Orang	42 Orang	35 Orang	35 Orang	300.000,00	31.500.000,00		APBD
7	0	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	196.300.000,00	202.500.000,00		
7	0	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	4.000.000,00		APBD
7	0	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00		APBD
7	0	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	30.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran			
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional				
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD							
7 0 1	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	20.000.000,00		APBD
7 0 1	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3.000.000,00	5.000.000,00		APBD
7 0 1	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	35.000.000,00		APBD
7 0 1	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	100.000.000,00		APBD
7 0 1	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	2.500.000,00		APBD
7 0 1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.972.340.000,00	2.051.780.000,00		
7 0 1	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00		APBD
7 0 1	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	88.000.000,00	88.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran			
			Program/Kegiatan/Subkegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional							
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD				Target PRKPD				
7 0 1	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	30.000.000,00		APBD
7 0 1	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.877.340.000,00	1.931.780.000,00		APBD
7 0 1	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	58.000.000,00	36.430.000,00		
7 0 1	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	6 Unit	6 Unit	33.000.000,00			APBD
7 0 1	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	15.000.000,00	21.000.000,00		APBD
7 0 1	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	13 Unit	13 Unit	13 Unit	5.000.000,00	7.930.000,00		APBD
7 1 1	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	7.500.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
							Program/Kegiatan/Subkegiatan						Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD					Target PRKPD
7	0	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	7.825.000,00	19.650.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
7	0	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah peserta yang mengikuti Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	85 orang	85 orang	85 orang	85 orang	7.225.000,00	10.650.000,00		
7	0	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	7.225.000,00	10.650.000,00		APBD
7	0	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	8 urusan	8 urusan	8 urusan	8 urusan	600.000,00	9.000.000,00		
7	0	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	4.000.000,00		APBD
7	0	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	5.000.000,00		APBD
7	0	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	21.850.000,00	55.000.000,00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	
7	0	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	52 orang	52 orang	52 orang	52 orang	15.300.000,00	35.000.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran	
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional		
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD					
7 0 1	03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	15.300.000,00	35.000.000,00		APBD
7 0 1	03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase usulan Kelurahan yang terakomodir pada saat Musrenbang Kecamatan	100%	100%	100%	100%	6.550.000,00	20.000.000,00		
7 0 1	03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	6.550.000,00	20.000.000,00		APBD
7 0 1	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Terlaksananya kordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan pihak forkopimka, tomas dan toga	100%	100%	100%	100%	1.625.000,00	23.520.000,00	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
7 0 1	04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	140 orang	140 orang	140 orang	140 orang	1.625.000,00	23.520.000,00		
7 0 1	04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	10.000.000,00		APBD
7 0 1	04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.325.000,00	13.520.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
7	0	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	100%	100%	100%	47.300.000,00	92.980.000,00	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
7	0	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	7 urusan	7 urusan	7 urusan	7 urusan	47.300.000,00	92.980.000,00		
7	0	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	40.000.000,00	75.000.000,00		APBD
7	0	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.300.000,00	17.980.000,00		APBD
7	0	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		cakupan pembinaan yang diberikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	100%	100%	100%	100%	4.920.000,00	31.330.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		Sumber Anggaran			
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah peserta fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	66 orang	66 orang	66 orang	66 orang	4.920.000,00	31.330.000,00		
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.380.000,00	13.640.000,00		APBD
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.220.000,00	13.640.000,00		APBD
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	320.000,00	4.050.000,00		APBD
					Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0001 KELURAHAN TANJUNG							1.414.798.000,00	1.555.470.000,00		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	106.700.000,00	160.900.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	70.500.000,00	111.200.000,00		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran				
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00		APBD
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	20.000.000,00		APBD
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Paket	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00		APBD
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Paket	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	2.200.000,00		APBD
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Laporan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	30.000.000,00		APBD
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	40.000.000,00		APBD
7	01	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	28.200.000,00	35.200.000,00		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25.200.000,00	25.200.000,00		APBD
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	10.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional								
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD				Target PRKPD					
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	8.000.000,00	14.500.000,00		
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	7.000.000,00		APBD
7	11	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	3.000.000,00	7.500.000,00		APBD
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	1.308.098.000,00	1.394.570.000,00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase usulan Kelurahan yang terakomodir pada saat Musrenbang Kecamatan	100%	100%	100%	100%	1.308.098.000,00	1.394.570.000,00		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.755.000,00	8.130.000,00		APBD
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	400.000.000,00	400.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan												
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD			Prioritas Pembangunan Nasional					
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	905.343.000,00	986.440.000,00		APBD
					Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0002 KELURAHAN SUNGAI DAENG					1.369.842.500,00	1.494.310.000,00				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100.110.000,00	154.310.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	70.500.000,00	111.200.000,00		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00		APBD
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00		APBD
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	20.000.000,00		APBD
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Paket	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00		APBD
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Paket	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	2.200.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran				
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Laporan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	30.000.000,00		APBD
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	40.000.000,00		APBD
7	01	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	21.000.000,00	28.000.000,00		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00		APBD
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	10.000.000,00		APBD
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	8.610.000,00	15.110.000,00		
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	7.000.000,00		APBD
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1Unit	1Unit	1Unit	1Unit	610.000,00	610.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
7	11	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit		3.000.000,00	7.500.000,00		APBD
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	1.269.732.500,00	1.340.000.000,00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase usulan Kelurahan yang terakomodir pada saat Musrenbang Kecamatan	100%	100%	100%	100%	1.269.732.500,00	1.340.000.000,00		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.755.000,00	9.000.000,00		APBD
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	400.000.000,00	400.000.000,00		APBD
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	866.977.500,00	931.000.000,00		APBD
					Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0003 KELURAHAN SUNGAI BARU							1.305.050.000,00	1.445.550.000,00		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	107.330.000,00	161.530.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
													dan transformasi pelayanan publik		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	70.500.000,00	111.200.000,00		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00		APBD
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00		APBD
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	20.000.000,00		APBD
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Paket	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00		APBD
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Paket	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	2.200.000,00		APBD
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Laporan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	30.000.000,00		APBD
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	40.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan												
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD			Prioritas Pembangunan Nasional					
7	01	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	27.000.000,00	34.000.000,00		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00		APBD
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	10.000.000,00		APBD
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	9.830.000,00	16.330.000,00		
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	7.000.000,00		APBD
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	1.830.000,00	1.830.000,00		APBD
7	11	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	3.000.000,00	7.500.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran							
			Program/Kegiatan/Subkegiatan															
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD			Prioritas Pembangunan Nasional								
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	1.197.720.000,00	1.284.020.000,00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan		
7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			Persentase usulan Kelurahan yang terakomodir pada saat Musrenbang Kecamatan	100%	100%	100%	100%	1.197.720.000,00	1.284.020.000,00			
7	01	03	2.02	01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.685.000,00	8.580.000,00		APBD	
7	01	03	2.02	02		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	46 Unit	46 Unit	46 Unit	46 Unit	400.000.000,00	400.000.000,00		APBD	
7	01	03	2.02	03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	795.035.000,00	875.440.000,00		APBD	
						Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0004 KELURAHAN MENJELANG									960.610.000,00	1.184.010.000,00		
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	89.710.000,00	137.410.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik		
7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah			Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	70.500.000,00	111.200.000,00			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran				
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1Paket	1Paket	1Paket	1Paket	1.000.000,00	1.000.000,00		APBD
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00		APBD
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	20.000.000,00		APBD
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Paket	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00		APBD
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Paket	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	2.200.000,00		APBD
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Laporan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	30.000.000,00		APBD
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	40.000.000,00		APBD
7	01	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	18.600.000,00	25.600.000,00		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	15.600.000,00	15.600.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	10.000.000,00		APBD
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	610.000,00	610.000,00		
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	610.000,00	610.000,00		APBD
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	870.900.000,00	1.046.600.000,00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase usulan Kelurahan yang terakomodir pada saat Musrenbang Kecamatan	100%	100%	100%	100%	870.900.000,00	1.046.600.000,00		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.470.000,00	7.320.000,00		APBD
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	33 Unit	33 Unit	33 Unit	400.000.000,00	400.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan						
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD									
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	469.430.000,00	639.280.000,00		APBD	
					Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0005											
					KELURAHAN KERANGGAN					1.139.360.000,00	1.198.940.000,00					
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100.710.000,00	150.410.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	70.500.000,00	111.200.000,00			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00		APBD	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00		APBD	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	20.000.000,00		APBD	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Paket	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00		APBD	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Paket	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	2.200.000,00		APBD	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran				
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Laporan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	30.000.000,00		APBD
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	40.000.000,00		APBD
7	01	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	24.600.000,00	31.600.000,00		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	21.600.000,00	21.600.000,00		APBD
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	10.000.000,00		APBD
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	5.610.000,00	7.610.000,00		
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	7.000.000,00		APBD
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	610.000,00	610.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran						
			Program/Kegiatan/Subkegiatan														
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD			Prioritas Pembangunan Nasional							
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	1.038.650.000,00	1.048.530.000,00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	
7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			Persentase usulan Kelurahan yang terakomodir pada saat Musrenbang Kecamatan	100%	100%	100%	100%	1.038.650.000,00	1.048.530.000,00		
7	01	03	2.02	01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.470.000,00	7.810.000,00		APBD	
7	01	03	2.02	02		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	94 Unit	94 Unit	94 Unit	400.000.000,00	400.000.000,00		APBD	
7	01	03	2.02	03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	637.180.000,00	640.720.000,00		APBD	
						KECAMATAN SIMPANGTERITIP					2.841.775.000,00	3.890.715.000,00					
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2.747.500.000,00	3.673.100.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik		
7	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.500.000,00	28.000.000,00			
7	01	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	300.000,00	10.000.000,00		APBD	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
						Kelurahan									
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	300.000,00	8.000.000,00		APBD
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2.000.900.000,00	2.910.000.000,00		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	2.000.000.000,00	2.900.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rancangan RKPDP	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan						Prioritas Pembangunan Nasional		
							Tolok Ukur	Target RKPDP	Target Usulan OPD	Target PRKPD					Target PRKPD
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	2.000.000,00		APBD
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	4.000.000,00		APBD
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	300.000,00	6.000.000,00		
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	900.000,00	4.000.000,00		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Paket	Paket	Paket		12.500.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan												
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD			Prioritas Pembangunan Nasional					
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD
7	01	01	2.05	03	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	16 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang	300.000,00	-		APBD
7	01	01	2.05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang	300.000,00	-		APBD
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	196.300.000,00	190.500.000,00		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00		APBD
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	1 Paket		-		APBD
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00		APBD
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	30.000.000,00		APBD
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	20.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKP	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan												
			Tolok Ukur	Target RKP	Target Usulan OPD	Target PRKP	Target PRKP			Prioritas Pembangunan Nasional					
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	5.000.000,00		APBD
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	35.000.000,00		APBD
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	90.000.000,00		APBD
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	2.500.000,00		APBD
7	01	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	484.600.000,00	509.600.000,00		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupaten/Kota , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00		APBD
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25.200.000,00	25.200.000,00		APBD
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	30.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	452.400.000,00	452.400.000,00		APBD
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	63.000.000,00	25.000.000,00		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	33.000.000,00	-		APBD
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	20.000.000,00	15.000.000,00		APBD
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00		APBD
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00		APBD
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	8.675.000,00	21.450.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan												
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD			Prioritas Pembangunan Nasional					
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah peserta yang mengikuti Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	105 orang	105 orang	105 orang	105 orang	8.075.000,00	12.450.000,00		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	8.075.000,00	12.450.000,00		APBD
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	8 Urusan	8 Urusan	8 Urusan	8 Urusan	600.000,00	9.000.000,00		
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	4.000.000,00		APBD
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	5.000.000,00		APBD
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Desa Yang Berpartisipasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	16.825.000,00	35.000.000,00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	52 Orang	52 Orang	52 Orang	52 Orang	16.825.000,00	35.000.000,00		
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	16.825.000,00	35.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Terlaksananya kordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan pihak forkopimka, tomas dan toga	100%	100%	100%	100%	3.825.000,00	23.520.000,00	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	3.825.000,00	23.520.000,00		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	10.000.000,00		APBD
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.525.000,00	13.520.000,00		APBD
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	100%	100%	100%	49.000.000,00	94.660.000,00	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan	7 Urusan	7 Urusan	7 Urusan	7 Urusan	49.000.000,00	94.660.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	40.000.000,00	75.000.000,00		APBD
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	19.660.000,00		APBD
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Cakupan Pembinaan Yang Diberikan Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan	100%	100%	100%	100%	15.950.000,00	42.985.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah peserta Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	169 Orang	169 Orang	169 Orang	169 Orang	15.950.000,00	42.985.000,00		
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.950.000,00	18.680.000,00		APBD
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.950.000,00	18.680.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran				
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.050.000,00	5.625.000,00		APBD
					KECAMATAN JEBUS							4.104.110.800,00	4.144.246.600,00		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	3.772.210.000,00	3.688.415.800,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.500.000,00	28.000.000,00		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	300.000,00	10.000.000,00		APBD
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan						Prioritas Pembangunan Nasional		
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD					Target PRKPD
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	300.000,00	8.000.000,00		APBD
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2.998.900.000,00	2.610.000.000,00		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.998.000.000,00	2.600.000.000,00		APBD
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	2.000.000,00		APBD
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	4.000.000,00		APBD
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	300.000,00	6.000.000,00		
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD
7	01	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	300.000,00	2.500.000,00		
7	01	01	2.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	2.500.000,00		APBD
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	900.000,00	24.000.000,00		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Paket	Paket	Paket		12.500.000,00		APBD
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD
7	01	01	2.05	03	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	300.000,00	5.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan												
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD			Prioritas Pembangunan Nasional					
7	01	01	2.05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	300.000,00	15.000.000,00		APBD
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	206.300.000,00	210.500.000,00		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00		APBD
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	3 Paket	3 Paket		-		APBD
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00		APBD
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	30.000.000,00		APBD
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	20.000.000,00		APBD
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	5.000.000,00		APBD
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	35.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	110.000.000,00		APBD
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	2.500.000,00		APBD
7	01	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	496.010.000,00	754.745.800,00		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00		APBD
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	29.100.000,00	29.100.000,00		APBD
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	30.000.000,00		APBD
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	459.910.000,00	693.645.800,00		APBD
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	68.000.000,00	52.670.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran				
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	33.000.000,00	2.300.000,00		APBD
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	25.000.000,00	35.000.000,00		APBD
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 Unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit	5.000.000,00	10.370.000,00		APBD
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	0 Unit		5.000.000,00	5.000.000,00		APBD
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	248.720.800,00	250.595.800,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	95 orang	95 orang	95 orang	95 orang	8.075.000,00	11.550.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran	
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional		
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD					
7	01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	8.075.000,00	11.550.000,00		APBD
7	01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 urusan	1 urusan	1 urusan	1 urusan	240.045.800,00	230.045.800,00		
7	01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	240.045.800,00	230.045.800,00		APBD
7	01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	8 urusan	8 urusan	8 urusan	8 urusan	600.000,00	9.000.000,00		
7	01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	4.000.000,00		APBD
7	01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	5.000.000,00		APBD
7	01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Desa yang berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	16.825.000,00	35.000.000,00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan						Prioritas Pembangunan Nasional		
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD					Target PRKPD
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	16.825.000,00	35.000.000,00		
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	16.825.000,00	35.000.000,00		APBD
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Terlaksananya Koordinasi dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Pihak Forkopimka, Tomas dan Toga	100%	100%	100%	100%	3.825.000,00	23.520.000,00	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang	3.825.000,00	23.520.000,00		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	10.000.000,00		APBD
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.525.000,00	13.520.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	100%	100%	100%	49.000.000,00	93.820.000,00	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan	7 Urusan	7 Urusan	7 Urusan	7 Urusan	49.000.000,00	93.820.000,00		
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	40.000.000,00	75.000.000,00		APBD
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	18.820.000,00		APBD
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Cakupan Pembinaan yang diberikan dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kelurahan	100%	100%	100%	100%	13.530.000,00	40.395.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran				
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah peserta Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	173 orang	173 orang	173 orang	173 orang	13.530.000,00	40.395.000,00		
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.295.000,00	17.560.000,00		APBD
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.355.000,00	17.560.000,00		APBD
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	880.000,00	5.275.000,00		APBD
					KECAMATAN PARITIGA							3.369.975.000,00	3.900.490.000,00		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2.882.200.000,00	3.292.220.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.500.000,00	28.000.000,00		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	300.000,00	10.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan						Prioritas Pembangunan Nasional		
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD					Target PRKPD
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	300.000,00	8.000.000,00		APBD
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2.000.900.000,00	2.010.000.000,00		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rancangan RKP	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan						Prioritas Pembangunan Nasional		
							Tolok Ukur	Target RKP	Target Usulan OPD	Target PRKP					Target PRKP
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	2.000.000,00		APBD
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	4.000.000,00		APBD
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	300.000,00	6.000.000,00		
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD
7	01	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	300.000,00	2.500.000,00		
7	01	01	2.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	2.500.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
			Program/Kegiatan/Subkegiatan				Target RKPDP			Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD	Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran	
			Tolok Ukur	Target RKPDP	Target Usulan OPD	Target PRKPD									Target PRKPD
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	900.000,00	34.500.000,00		
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Paket	Paket	Paket		12.500.000,00		APBD
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	17 Orang	17 Orang	17 Orang	17 Orang	300.000,00	4.500.000,00		APBD
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17 Orang	17 Orang	17 Orang	17 Orang	300.000,00	13.500.000,00		APBD
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	216.300.000,00	220.500.000,00		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00		APBD
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		6 Paket	6 Paket	6 Paket		-		APBD
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran				
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	30.000.000,00		APBD
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	20.000.000,00		APBD
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	5.000.000,00		APBD
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	35.000.000,00		APBD
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	120.000.000,00		APBD
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	2.500.000,00		APBD
7	01	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	591.000.000,00	948.400.000,00		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00		APBD
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	35.500.000,00	35.500.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	30.000.000,00		APBD
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	548.500.000,00	880.900.000,00		APBD
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	71.000.000,00	42.320.000,00		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	33.000.000,00	2.000.000,00		APBD
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	28.000.000,00	28.000.000,00		APBD
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	5.000.000,00	7.320.000,00		APBD
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan				Target RKPDP			Target Usulan OPD		Target PRKPD	Target PRKPD	Prioritas Pembangunan Nasional	
			Tolok Ukur	Target RKPDP	Target Usulan OPD	Target PRKPD									
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	405.825.000,00	417.250.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	90 orang	90 orang	90 orang	90 orang	8.075.000,00	11.100.000,00		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	8.075.000,00	11.100.000,00		APBD
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 urusan	1 urusan	1 urusan	1 urusan	397.150.000,00	397.150.000,00		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	397.150.000,00	397.150.000,00		APBD
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (Kependudukan, Perizinan, Pertanahan)	8 urusan	8 urusan	8 urusan	8 urusan	600.000,00	9.000.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	4.000.000,00		APBD
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	5.000.000,00		APBD
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	16.825.000,00	35.000.000,00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	52 orang	52 orang	52 orang	52 orang	16.825.000,00	35.000.000,00		
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	16.825.000,00	35.000.000,00		APBD
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Terlaksananya Koordinasi dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Pihak Forkopimka, Tomas dan Toga	100%	100%	100%	100%	3.825.000,00	23.520.000,00	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	3.825.000,00	23.520.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan						Prioritas Pembangunan Nasional		
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD					Target PRKPD
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	10.000.000,00		APBD
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.525.000,00	13.520.000,00		APBD
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	100%	100%	100%	49.000.000,00	93.400.000,00	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	7 Urusan	7 Urusan	7 Urusan	7 Urusan	49.000.000,00	93.400.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran	
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD					
7	01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	40.000.000,00	75.000.000,00		APBD
7	01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	18.400.000,00		APBD
7	01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Cakupan Pembinaan yang diberikan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%	100%	12.300.000,00	39.100.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
7	01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah peserta Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	160 Orang	160 Orang	160 Orang	160 Orang	12.300.000,00	39.100.000,00		
7	01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8.450.000,00	17.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.050.000,00	17.000.000,00		APBD
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	800.000,00	5.100.000,00		APBD
					KECAMATAN KELAPA										
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	5.693.455.000,00	6.875.955.000,00		
											3.949.080.000,00	4.819.460.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.500.000,00	28.000.000,00		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	300.000,00	10.000.000,00		APBD
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKP	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKP	Target Usulan OPD	Target PRKP	Target PRKP								
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	300.000,00	8.000.000,00		APBD
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	3.145.900.000,00	3.810.000.000,00		APBD
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	3.145.000.000,00	3.800.000.000,00		APBD
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	2.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan						Prioritas Pembangunan Nasional		
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD					Target PRKPD
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	4.000.000,00		APBD
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	300.000,00	6.000.000,00		
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD
7	01	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	300.000,00	2.500.000,00		
7	01	01	2.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	2.500.000,00		APBD
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	900.000,00	34.000.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran	
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD					
7	01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Paket	Paket	Paket		12.500.000,00		APBD
7	01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD
7	11 01 2,05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Orang	26 Orang	26 Orang	26 Orang	300.000,00	7.500.000,00		APBD
7	11 01 2,05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Orang	26 Orang	26 Orang	26 Orang	300.000,00	22.500.000,00		APBD
7	01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	206.300.000,00	212.500.000,00		
7	01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	4.000.000,00		APBD
8	02 02 2.07 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 Paket	4 Paket				
7	01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00		APBD
7	01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	30.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran				
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	20.000.000,00		APBD
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	5.000.000,00		APBD
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	35.000.000,00		APBD
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	110.000.000,00		APBD
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	2.500.000,00		APBD
7	01	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	523.000.000,00	666.480.000,00		APBD
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00		APBD
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	62.400.000,00	62.400.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	30.000.000,00		APBD
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	453.600.000,00	572.080.000,00		APBD
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	70.880.000,00	59.980.000,00		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	15 Unit	15 Unit	33.000.000,00	4.600.000,00		APBD
7	11	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	28.000.000,00	28.000.000,00		APBD
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	4.880.000,00	4.880.000,00		APBD
7	11	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	22.500.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan						Prioritas Pembangunan Nasional		
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD					Target PRKPD
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	100%	100%	100%	479.315.000,00	479.840.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	8.075.000,00	12.900.000,00		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	8.075.000,00	12.900.000,00		APBD
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 Urusan	1 Urusan	1 Urusan	1 Urusan	467.940.000,00	457.940.000,00		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	467.940.000,00	457.940.000,00		APBD
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	8 urusan	8 urusan	8 urusan	8 urusan	3.300.000,00	9.000.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	4.000.000,00		APBD
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	5.000.000,00		APBD
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	18.935.000,00	40.000.000,00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	16.825.000,00	35.000.000,00		
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	16.825.000,00	35.000.000,00		APBD
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Usulan Kelurahan Yang Terakomodir pada saat Musrenbang Kecamatan	100%	100%	100%	100%	2.110.000,00	5.000.000,00		
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.110.000,00	5.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Terlaksananya kordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan pihak forkopimka, tomas dan toga	100%	100%	100%	100%	3.825.000,00	23.520.000,00	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	3.825.000,00	23.520.000,00		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	10.000.000,00		APBD
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.525.000,00	13.520.000,00		APBD
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	100%	100%	100%	49.000.000,00	95.080.000,00	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan	7 Urusan	7 Urusan	7 Urusan	7 Urusan	49.000.000,00	95.080.000,00		
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	40.000.000,00	75.000.000,00		APBD
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	20.080.000,00		APBD
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		cakupan pembinaan yang diberikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	100%	100%	100%	100%	15.950.000,00	42.985.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah peserta Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	199 orang	199 orang	199 orang	199 orang	15.950.000,00	42.985.000,00		
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.950.000,00	18.680.000,00		APBD
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.950.000,00	18.680.000,00		APBD
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.050.000,00	5.625.000,00		APBD
					Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0001 KELURAHAN KELAPA							1.177.350.000,00	1.362.570.000,00		[[
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	94.110.000,00	148.310.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	70.500.000,00	111.200.000,00		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
8	02	02	2.07	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket				
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00		APBD
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	20.000.000,00		APBD
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00		APBD
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	2.200.000,00		APBD
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	30.000.000,00		APBD
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	40.000.000,00		APBD
7	01	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	15.000.000,00	22.000.000,00		APBD
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	10.000.000,00		APBD
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	8.610.000,00	15.110.000,00		
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	7.000.000,00		APBD
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	610.000,00	610.000,00		APBD
7	11	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	3.000.000,00	7.500.000,00		APBD
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	1.083.240.000,00	1.214.260.000,00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Usulan Kelurahan Yang Terakomodir pada saat Musrenbang Kecamatan	100%	100%	100%	100%	1.083.240.000,00	1.214.260.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.755.000,00	8.300.000,00		APBD
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	400.000.000,00	400.000.000,00		APBD
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	680.485.000,00	805.960.000,00		APBD
					KECAMATAN TEMPILANG										
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	3.195.830.000,00	3.950.435.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.500.000,00	28.000.000,00		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	300.000,00	10.000.000,00		APBD
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
							SKPD								
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	300.000,00	8.000.000,00		APBD
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2.455.900.000,00	2.610.000.000,00		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.455.000.000,00	2.600.000.000,00		APBD
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	2.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran					
			Program/Kegiatan/Subkegiatan						Prioritas Pembangunan Nasional						
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD					Target PRKPD				
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	4.000.000,00		APBD
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	300.000,00	6.000.000,00		
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	900.000,00	4.000.000,00		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Paket	Paket	Paket		12.500.000,00		APBD
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran			
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD							
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	300.000,00		APBD		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	300.000,00		APBD		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	217.300.000,00	400.500.000,00	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	APBD
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5 Paket	5 Paket	6.000.000,00	-	APBD
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	APBD
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	45.000.000,00	30.000.000,00	APBD
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	20.000.000,00	APBD
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	5.000.000,00	APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan												
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD			Prioritas Pembangunan Nasional					
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	35.000.000,00		APBD
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	300.000.000,00		APBD
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	2.500.000,00		APBD
8	01	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		107.000.000,00		APBD
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	2 unit	2 unit	unit		50.000.000,00		APBD
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Tersedianya Mebel	unit	107 unit	107 unit	unit		37.000.000,00		APBD
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	unit	4 unit	4 unit	unit		20.000.000,00		APBD
7	01	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	460.100.000,00	485.100.000,00		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	33.600.000,00	33.600.000,00		APBD
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	30.000.000,00		APBD
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	419.500.000,00	419.500.000,00		APBD
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	59.830.000,00	25.300.000,00		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	33.000.000,00	300.000,00		APBD
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	20.000.000,00	15.000.000,00		APBD
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	1.830.000,00	5.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan						Prioritas Pembangunan Nasional		
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD					Target PRKPD
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00		APBD
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	84.255.000,00	95.230.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	85 orang	85 orang	85 orang	85 orang	8.075.000,00	10.650.000,00		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	8.075.000,00	10.650.000,00		APBD
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 urusan	1 urusan	1 urusan	1 urusan	75.580.000,00	75.580.000,00		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	75.580.000,00	75.580.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan												
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD			Prioritas Pembangunan Nasional					
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	8 Urusan	8 Urusan	8 Urusan	8 Urusan	600.000,00	9.000.000,00		
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	4.000.000,00		APBD
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	5.000.000,00		APBD
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Desa Yang Berpartisipasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	16.825.000,00	35.000.000,00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	52 orang	52 orang	52 orang	52 orang	16.825.000,00	35.000.000,00		
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	16.825.000,00	35.000.000,00		APBD
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Terlaksananya Koordinasi Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Pihak Forkopimka, Tomas dan Toga	100%	100%	100%	100%	3.825.000,00	23.520.000,00	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	3.825.000,00	23.520.000,00		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	10.000.000,00		APBD
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.525.000,00	13.520.000,00		APBD
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	100%	100%	100%	49.000.000,00	92.980.000,00	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	7 Urusan	7 Urusan	7 Urusan	7 Urusan	49.000.000,00	92.980.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan						Prioritas Pembangunan Nasional		
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD					Target PRKPD
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	40.000.000,00	75.000.000,00		APBD
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	17.980.000,00		APBD
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Cakupan Pembinaan yang diberikan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%	100%	11.070.000,00	37.805.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah peserta Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	117 Orang	117 Orang	117 Orang	117 Orang	11.070.000,00	37.805.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan												
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD			Prioritas Pembangunan Nasional					
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.605.000,00	16.440.000,00		APBD
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.745.000,00	16.440.000,00		APBD
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	720.000,00	4.925.000,00		APBD
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							8.229.775.470,00	7.077.797.004,00		
8	01				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							8.229.775.470,00	7.077.797.004,00		
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	2.784.255.750,00	2.699.770.003,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	1.500.000,00	28.000.000,00		
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	300.000,00	10.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
8	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD
8	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	300.000,00	8.000.000,00		APBD
8	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	2.000.900.000,00	1.610.000.000,00		
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	2.000.000.000,00	1.600.000.000,00		APBD
8	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	2.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
8	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	4.000.000,00		APBD
8	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD
8	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	300.000,00	6.000.001,00		
8	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	6.000.001,00		APBD
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	900.000,00	66.500.000,00		
8	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	25 Paket	25 Paket	Paket		12.500.000,00		APBD
8	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	4.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
8	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	300.000,00	12.500.000,00		APBD
8	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	300.000,00	37.500.000,00		APBD
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	402.245.750,00	523.500.000,00		
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	6.000.000,00	4.000.000,00		APBD
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	3 Paket	3 Paket				APBD
8	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	8.000.000,00	7.000.000,00		APBD
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	45.000.000,00	40.000.000,00		APBD
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	24.945.750,00	30.000.000,00		APBD
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	5.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
8	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	45.000.000,00	35.000.000,00		APBD
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	270.000.000,00	400.000.000,00		APBD
8	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	2.500.000,00		APBD
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 persen	100 persen	100 persen	-	-		APBD
8	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		5 Unit	22 Unit	22 Unit				APBD
8	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2 Unit	4 Unit	4 Unit				APBD
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	365.140.000,00	450.000.001,00		
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.001,00		APBD
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	31.200.000,00	48.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran		
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional			
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD						
8	01 01 2.08 03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	40.000.000,00		APBD
8	01 01 2.08 04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	326.940.000,00	360.000.000,00		APBD
8	01 01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	13.270.000,00	15.770.001,00		
8	01 01 2.09 09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	7.500.000,00		APBD
8	01 01 2.09 10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	4.270.000,00	4.270.000,00		APBD
8	01 01 2.09 11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	4.000.000,00	4.000.001,00		APBD
8	01 02		PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Angka Kejadian Konflik sosial berlatar belakang Ideologi	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	2.204.729.420,00	1.334.670.000,00	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Terlaksananya Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	2.204.729.420,00	1.334.670.000,00		
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	600 Orang	600 Orang	600 Orang	600 Orang	2.099.999.420,00	1.161.470.000,00		APBD
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	440 Orang	440 Orang	440 Orang	440 Orang	81.530.000,00	150.000.000,00		APBD
8	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	23.200.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan						Prioritas Pembangunan Nasional		
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD					Target PRKPD
					Pembentukan dan Pertumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Pertumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	30 keluarga	30 keluarga	30 keluarga	30 keluarga	22.900.000,00		APBD	
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Cakupan Partai Politik yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	2.673.440.000,00	1.511.785.001,00	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Tersedianya Dokumen Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.673.440.000,00	1.511.785.001,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2367 Orang	2367 Orang	2367 Orang	2367 Orang	2.652.865.000,00	1.444.785.001,00		APBD
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	23 Orang	23 Orang	23 Orang	23 Orang	8.475.000,00	34.000.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran		
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional			
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD						
8	01 03 2.01 05		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	12.100.000,00	33.000.000,00		APBD
8	01 04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase ormas yang aktif	100%	100%	100%	100%	29.650.000,00	117.600.000,00	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
8	01 04 2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Tersedianya Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	29.650.000,00	117.600.000,00		
8	01 04 2.01 03		Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	15.100.000,00	47.600.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
8	01	04	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	23 Orang	23 Orang	23 Orang	23 Orang	12.100.000,00	37.000.000,00		APBD
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.450.000,00	33.000.000,00		APBD
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		angka kejadian konflik sosial berlatar belakang ekonomi, sosial, dan budaya	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	181.533.300,00	274.677.000,00	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
8	01	05	2.01		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		Tersedianya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	181.533.300,00	274.677.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	57 Orang	57 Orang	57 Orang	57 Orang	78.052.500,00	164.102.000,00		APBD
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	57 Orang	57 Orang	57 Orang	57 Orang	103.180.800,00	53.000.000,00		APBD
8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	57.575.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional	
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD				
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase potensi konflik sosial yang ditangani	100%	100%	100%	100%	356.167.000,00	1.139.295.000,00	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Tersedianya Dokumen Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	356.167.000,00	1.139.295.000,00		
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	183 Orang	183 Orang	183 Orang	183 Orang	11.775.000,00	39.315.000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Rancangan RKPD	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							Prioritas Pembangunan Nasional					
			Tolok Ukur	Target RKPD	Target Usulan OPD	Target PRKPD	Target PRKPD								
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	16.500.000,00	250.000.000,00		APBD
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	49.980.000,00		APBD
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	327.592.000,00	800.000.000,00		APBD
TOTAL												1.067.374.497.391,00	874.778.632.820,00		

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mana aturan ini merupakan aturan pengganti dari Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar pelayanan Minimal. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan pemenuhan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rencana pemenuhan dalam 1 (satu) tahun harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat. Laporan penerapan SPM termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal menjadi bahan bagi Pemerintah Pusat untuk merumuskan kebijakan nasional terkait pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat. Karena pentingnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pemenuhan pelayanan dasar maka hasil pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk memberikan *insentif* dan *disinsentif* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, hasil pelaporan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah dapat digunakan sebagai instrumen dalam penilaian kinerja perangkat daerah; pengembangan kapasitas daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar; serta penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Sejak adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah disampaikan bahwa anggaran Pemerintah Daerah diprioritaskan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan akan menjadi indek penghitungan besaran tranfer DAU ke daerah. Dengan adanya kebijakan pusat tersebut dapat memberikan intervensi kepada daerah bahwa penerapan SPM tidak dapat dipandang sebelah mata. Sehingga diperlukan komitmen dari masing-masing stakeholder terkait untuk dapat focus dalam hal penerapan SPM di Kabupaten Bangka Barat.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal dilakukan kepada 6 (enam) bidang urusan wajib pemerintah daerah yang terdiri dari : 1). Pendidikan; 2). Kesehatan; 3). Pekerjaan Umum; 4). Perumahan Rakyat; 5). Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat 6). Sosial. Keenam urusan wajib Pemerintah Daerah ini telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 18 yang telah mengamanatkan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bangka Barat sudah dimulai sejak tahun 2017 yang lalu dengan berpedoman kepada regulasi yang lama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang di koordinir oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. Namun sejak di ubahnya peraturan tersebut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal dikoordinir oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah. Di Kabupaten Bangka Barat sendiri, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melibatkan lintas instansi yang terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, Badan Pengelolaan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, 6 (enam) Organisasi Perangkat Daerah teknis yang membidangi Standar Pelayanan Minimal (SPM), Bagian Hukum, serta bagian Organisasi.

Sampai dengan tahun 2022, upaya penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bangka Barat sudah terus dilakukan dalam berbagai macam kegiatan yang tentunya diperuntukkan bagi optimalisasi penerapan Standar pelayanan Minimal di daerah. Adapun berbagai hal yang telah dilakukan dalam upaya Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Bangka Barat sebagai berikut :

- a. Pembentukan Tim Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal setiap tahun;
- b. Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Daerah;
- c. Penyusunan Roadmap/ Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
- d. Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar pelayanan Minimal dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah secara berkala;
- e. Koordinasi lintas sektor dengan tim Sekretarat Standar Pelayanan Minimal pusat dan Provinsi
- f. Serta hal-hal lain yang bersifat menunjang dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bangka Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dalam penerapan SPM dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu :

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Di Kabupaten Bangka Barat sendiri, tahapan Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah dilakukan oleh masing bidang urusan SPM, namun masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya penganggaran dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sehingga membuat belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan minimal di Kabupaten Bangka Barat sendiri. Namun Kabupaten Bangka Barat sendiri terus melakukan pembenahan dalam hal penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan berbagai hal yang dinilai dapat mengoptimalkan penerapan Standar Pelayanan Minimal di daerah yang tentunya dapat

mengcover seluruh masyarakat yang menjadi sasaran dalam pemenuhan pelayanan dasar tersebut.

Adapun untuk dasar hukum penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas

- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D); Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penerapan Pelayanan Minimal di Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor 58 Tahun 2019 Seri E);
13. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar pelayanan Minimal di Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor 58 Tahun 2019 Seri E).

Sedang untuk kebijakan umum yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Strategis (Renstra) yang akan diterjemahkan dalam perencanaan dan penganggaran Daerah.

Kebijakan umum memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai pendanaan jangka menengah Daerah, dan menjadi pedoman setiap Perangkat Daerah menyusun program dan kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan Daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara arah kebijakan pembangunan Daerah berdasarkan strategi yang dipilih untuk mencapai indikator kinerja sasaran, yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah Daerah.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bangka Barat, dirumuskan berbagai kebijakan umum dan program pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026. Kebijakan umum pembangunan Daerah ini memberikan arah pembangunan Daerah selama jangka 2021-2026, sebagai berikut:

- a) Meningkatkan perekonomian dengan mengoptimalkan sektor unggulan daerah melalui peningkatan produktivitas dan daya saing hasil pertanian dan perikanan, industri pengolahan, usaha mikro dan koperasi, pengembangan pariwisata & kebudayaan daerah.
- b) Meningkatkan peran penanaman modal melalui perbaikan iklim dan layanan investasi .
- c) Meningkatkan pemerataan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi'
- d) Menjaga keseimbangan kelestarian lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah.
- e) Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran dengan meningkatkan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat miskin, stabilitasi harga pangan, dan peningkatan kualitas tenaga kerja, perluasan lapangan pekerjaan.
- f) Meningkatkan jaminan pendidikan dan kesehatan yang bermutu melalui pemerataan infrastruktur, penguatan SDM, dan penataan manajemen bidang pendidikan dan kesehatan.
- g) Penguatan ketahanan keluarga dan meningkatkan kesalehan sosial masyarakat.
- h) Melaksanakan reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan mengembangkan kebijakan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien.
- i) Meningkatkan kemandirian keuangan daerah berbasis peningkatan pendapatan asli daerah.

Tabel I.5
MISI 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)	KONDISI AKHIR RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 2026	PROGRAM	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik	1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Melakukan pendataan capaian SPM pada pelayanan dasar sebagai baseline	Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar	n/a	80%	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Kesehatan	Dinkes		
						Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Kesehatan	Dinkes		
						Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Kesehatan	Dinkes		
		Optimalisasi pelayanan dasar Pemerintah Daerah menggunakan berbagai sumber pendanaan						Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan	Dikpora
								Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	Dikpora
								Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	PU dan Tata Ruang	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
								Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/ Sosial	Perumahan dan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
								Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
								Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
								Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
Program Bantuan, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								

Di dalam Kebijakan daerah tersebut di atas telah secara jelas disampaikan bahwa untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah tertuang dalam Misi 2 Memajukan sumber daya manusia yang berdaya saing dan berakhlak mulia. Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Periode 2016-2021. Di dalam Misi 2 tersebut juga penerapan Standar Pelayanan Minimal kemudian diterjemahkan kedalam sasaran pembangunan yang salah satunya adalah terkait dengan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di daerah yang selanjutnya menjadi arah kebijakan daerah. Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Tabel I.6

Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026 yang berkaitan dengan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 2: Memajukan sumber daya manusia yang berdaya saing dan berakhlak mulia		
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1.1 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan pemerataan mutu infrastruktur dan memberikan jaminan bebas biaya pendidikan; b. Memperluas dan memperkuat implementasi sistem penjaminan mutu; c. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan perpustakaan sekolah/perpustakaan daerah.
	1.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat serta penguatan ketersediaan jaminan kesehatan bagi seluruh Masyarakat; b. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan tenaga Kesehatan; c. Meningkatkan pola hidup bersih dan sehat masyarakat; d. Meningkatkan kapasitas daya saing keolahragaan e. Meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan pemberdayaan kualitas keluarga sejahtera.

Adapun Arah kebijakan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 yang berkaitan dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal dijabarkan sebagai berikut:

Tabel. I.7

Perumusan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022—2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Meningkatkan pemerataan mutu infrastruktur dan memberikan jaminan bebas biaya pendidikan	Meningkatkan jaminan pendidikan dan kesehatan yang bermutu melalui pemerataan infrastruktur, penguatan SDM, dan penataan manajemen bidang pendidikan dan kesehatan
		Memperluas dan memperkuat implementasi sistem penjaminan mutu	
		Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan perpustakaan sekolah/perpustakaan daerah	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat serta penguatan ketersediaan jaminan kesehatan bagi seluruh Masyarakat	
		Meningkatkan kualitas dan ketersediaan tenaga kesehatan	
		Meningkatkan pola hidup bersih dan sehat masyarakat	
		Meningkatkan kapasitas daya saing keolahragaan	
		Meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan pemberdayaan kualitas keluarga sejahtera	

Kabupaten Bangka Barat setiap tahunnya berkomitmen untuk melakukan perbaikan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal salah satunya melalui optimalisasi ketersediaan data penerima manfaat dalam Standar Pelayanan Minimal Daerah yang nantinya akan diaplikasikan ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Di tahun 2022, untuk alokasi anggaran SPM mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun 2021 yang lalu. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kebijakan daerah untuk tetap mempertahankan alokasi penganggaran pemenuhan Standar Pelayanan Minimal walaupun ditengah keterbatasan anggaran daerah. Ini dilakukan agar pemenuhan kebutuhan minimal kepada masyarakat sebagai penerima manfaat layanan tetap terpenuhi dan menjadi prioritas daerah yang merupakan sebuah kewajiban Pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan minimal tersebut.

Kemudian di dalam RPJMD tersebut juga telah mengakomodir Indikator Standar pelayanan Minimal menjadi Indikator Kinerja Kunci daerah sebagai ukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. IKK atau *key performance indicator* (KPI) atau dikenal pula sebagai *key success indicators* (KSI) bertujuan membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan guna mencapai tujuan- tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Seberapa besar pencapaian IKK tersebut tergantung ukuran yang ditetapkan. Berikut ini diuraikan target capaian IKK yang merupakan Indikator Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang memuat kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022—2026.

Tabel I.8
Penetapan Indikator Kinerja Kunci Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang berkaitan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022–2026

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kodisi Awal		Target				Kondisi Akhir RPJMD	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
ASPEK PELAYANAN UMUM										
1	Pendidikan									
	APK PAUD	Angka	87,55	88,26	88,78	89,82	92,93	96,04	99,15	99,15
	APK SD/MI/Paket A	Angka	103,94	104,42	105,02	105,67	105,89	118,28	135,26	135,26
	APK SMP/MTs/Paket B	Angka	91,43	92,56	93,20	94,34	96,78	96,92	97,82	97,82
	APM SD/MI/Paket A	Angka	94,37	94,96	95,02	96,27	96,78	96,93	98,20	98,20
	APM SMP/MTs/Paket B	Angka	82,67	84,34	87,90	89,35	90,80	92,25	93,70	93,70
	Jumlah Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs	%	94,37	94,62	94,87	95,12	95,32	95,57	95,57	95,57
2	Kesehatan									
	Pelayanan kesehatan ibu hamil	%	96,61	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan kesehatan ibu melahirkan	%	97,3	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	99,38	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan kesehatan balita	%	93,34	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	78,32	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan kesehatan pada usia lansia	%	70,23	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	84,99	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	%	105,3	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	%	70,95	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	%	105,38	100	100	100	100	100	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
	Persentase Penduduk Bersanitasi Layak	%	94,61	97,28	100,55	103,82	107,09	107,09	113,63	113,63
	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	88,48	88,53	88,58	88,63	88,68	88,73	88,78	88,78
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum jaringan perpipaan (SPAM)	%	12,21	12,77	15	17,78	23,7	25,68	27,66	27,66
	persentase sarana prasarana sistem air limbah domestik berkondisi layak	%	N/A	N/A	2,74	3,59	4,72	5,83	6,91	6,91
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman									
	Persentase rumah akibat bencana alam/ sosial yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase warga negara masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Sosial									
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	%	325,49	100	100	100	100	100	100	100
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	%	174,35	100	100	100	100	100	100	100
	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Penerapan SPM di masing-masing daerah juga harus dilakukan dengan baik serta terkendali. Ini dilakukan agar pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Kabupaten Bangka Barat dapat memenuhi seluruh standar kebutuhan warna negara yang akan menjadi tolok ukur untuk mengukur kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib Daerah berkaitan dengan SPM. Tentunya dalam pelaksanaan penerapan SPM ini harus didasari dengan komitmen yang baik antar para pemangku kepentingan untuk focus dalam pemenuhan pelayan dasar di daerah. Keberhasilan dari penerapan SPM di daerah tidak akan dapat tercapai jika tidak ada kerjasama yang baik antar para pemangku kepentingan yang di mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran serta monitoring evaluasi pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat harus dapat merealisasikan hal tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan nasional dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar warga Negara Indonesia secara merata.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dasar. pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

Tabel II.1
Capaian Indikator Kinerja Makro Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 dan 2023

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	PERUBAHAN (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	70,12	71,13	1,44
2	Angka Kemiskinan	2,46	2,71	10,16
3	Angka Pengangguran	4,86	3,83	-21,19
4	Pertumbuhan Ekonomi	2,01	2,50	24,38
5	Pendapatan Per Kapita	80.031.700.000.000	83.117.360.000,00	3,86
6	Ketimpangan Pendapatan	0,255	0,245	-3,92

Adapun untuk penjelasan secara rinci terkait dengan capaian indikator makro di atas adalah sebagai berikut :

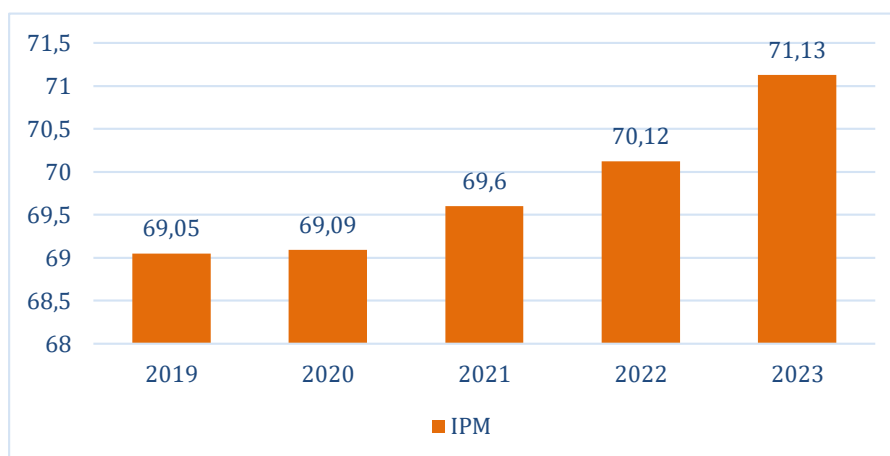
A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia. Konsep pembangunan manusia diukur dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar manusia, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta standar hidup yang layak. Dimensi umur panjang dan sehat diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita. Ketiga dimensi ini terangkum dalam suatu indeks komposit yang membentuk IPM.

Nilai IPM Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2023 sebesar 71,13 dan jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2022 yaitu sebesar 70,12 mengalami peningkatan sebesar 1,44 %. Jika dilihat dari segi perkembangan antar waktu selama 5 tahun terakhir bahwa capaian IPM Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2023 merupakan capaian tertinggi dan untuk capaian terendah selama kurun waktu 5 tahun terakhir adalah pada tahun 2019 sebesar 69,05.

Jika dilihat dari grafik di bawah ini bahwa capaian IPM Kabupaten Bangka Barat setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang positif yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi di Kabupaten Bangka Barat.

Grafik II.1
Perkembangan IPM Kabupaten Bangka Barat Kurun Waktu 2019-2023



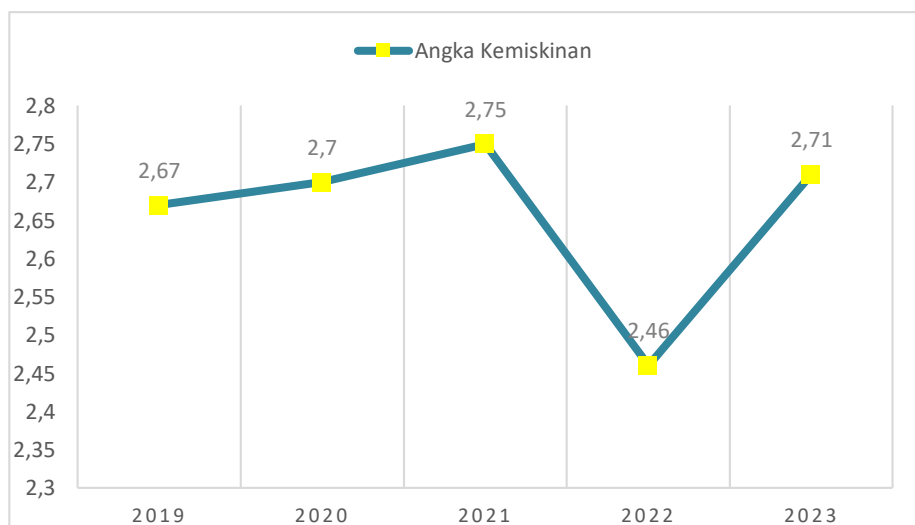
Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka Tahun 2024

B. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian serius dari pemerintah. Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat, merupakan pihak-pihak memiliki tanggungjawab yang sama terhadap penanggulangan kemiskinan.

Angka Kemiskinan Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2023 sebesar 2,71 dan jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2022 yaitu sebesar 2,46 mengalami peningkatan sebesar 10,16%. Jika dilihat dari segi perkembangan antar waktu selama 5 tahun terakhir bahwa capaian Angka Kemiskinan Kabupaten Bangka Barat cenderung fluktuatif di mana untuk capaian angka kemiskinan terendah berada pada tahun 2022 yaitu sebesar 2,46 sedangkan untuk capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 2,75.

Grafik II.2
Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Bangka Barat Kurun Waktu 2019-2023



Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka Tahun 2024

Jika di lihat dari grafik di atas bahwa capaian angka kemiskinan Kabupaten Bangka Barat fluktuatif di mana jika di lihat dari segi trend cenderung mengalami kenaikan. Capaian angka Kemiskinan di tahun 2019 hingga tahun 2021 cenderung meningkat dan kemudian di tahun 2022 mengalami penurunan yang sangat tajam dan kemudian mengalami peningkatan kembali di tahun 2023.

C. Angka Pengangguran

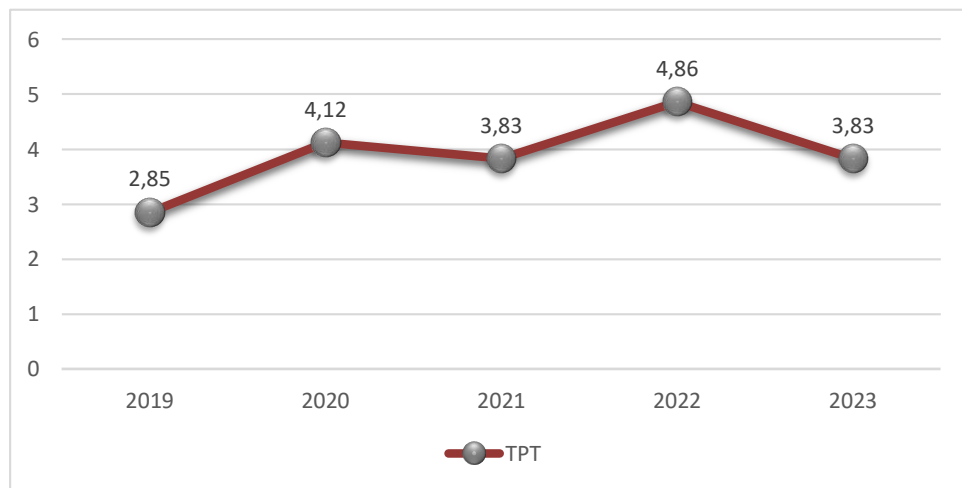
Angka pengangguran dilihat dari indicator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Sementara pengangguran adalah mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Semakin rendah tingkat pengangguran, maka dapat dikatakan tingkat ekonomi disuatu daerah semakin baik/maju, sekaligus merupakan tanda keberhasilan pemerintah dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan.

TPT Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2023 sebesar 3,83 dan jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2022 yaitu sebesar 4,86 mengalami penurunan sebesar -21,19%. Jika dilihat dari segi perkembangan antar waktu selama 5 tahun terakhir bahwa capaian TPT Kabupaten Bangka Barat cenderung fluktuatif di mana untuk capaian TPT terendah berada pada tahun 2019 yaitu sebesar 2,85 sedangkan untuk capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 4,86.

Grafik II.3

Perkembangan TPT Kabupaten Bangka Barat Kurun Waktu 2019-2023



Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka Tahun 2024

D. Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mengukur capaian pembangunan khususnya dibidang ekonomi, salah satu indikator yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi. Angka pertumbuhan ekonomi diperoleh dari data pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB ADHK (rill) menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun. Pertumbuhan yang positif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya, sebaliknya

pertumbuhan yang negatif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel II.2
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Bangka Barat
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (persentase)

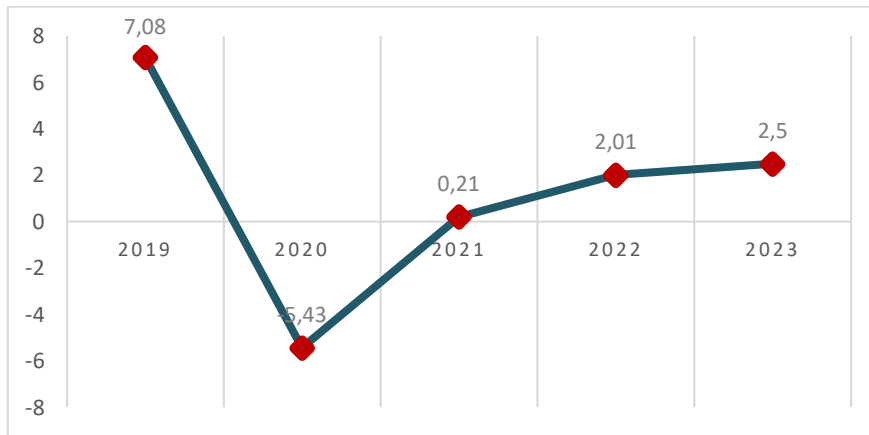
KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,10	3,53	0,01	4,13	4,63
B	Pertambangan dan Penggalian	1,39	-13,87	10,11	1,82	-2,99
C	Industri Pengolahan	12,46	-7,00	-4,46	-1,03	0,26
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15,06	19,30	8,54	-3,58	4,42
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,01	7,50	3,97	3,31	0,79
F	Konstruksi	3,85	-1,46	1,71	1,87	7,26
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,55	-6,17	5,81	9,21	5,64
H	Transportasi dan Pergudangan	3,34	-12,99	8,29	11,35	9,09
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,70	-0,65	6,29	9,94	12,69
J	Informasi dan Komunikasi	12,55	18,32	5,92	8,48	12,86
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,14	-0,44	5,36	8,60	11,83
L	Real Estate	1,57	5,02	4,29	8,19	6,94
M,N	Jasa Perusahaan	0,37	-9,11	4,09	8,31	5,64
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,08	-0,63	4,64	-0,93	7,14
P	Jasa Pendidikan	6,01	-0,77	1,86	3,04	4,87
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,37	1,07	9,24	2,66	4,98
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,48	-4,69	2,20	7,40	9,44
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		7,06	-5,37	0,21	2,01	2,50

Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka Tahun 2024

Pada tahun 2023, dari 17 kategori lapangan usaha pembentuk PDRB, hanya 1 kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif, sementara 16 kategori lapangan usaha mengalami peningkatan atau pertumbuhan yang positif dan 6 kategori lapangan usaha mengalami penurunan. Tiga kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi dan Jasa Keuangan dan Asuransi. Sementara lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif tertinggi adalah pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian. Meningkatnya pertumbuhan tiga kategori lapangan usaha di atas disebabkan oleh adanya pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi VI Bangka Belitung yang diselenggarakan di Bangka Barat beberapa waktu yang lalu sehingga berdampak kepada pertumbuhan positif ketiga sektor di atas.

Grafik II.4

**Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Barat
Kurun Waktu 2019-2023**



Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan publikasi BPS, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2023 mengalami kenaikan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2023 sebesar 2,50% mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu yaitu sebesar 2,01% atau sebesar 24,38 point.

Jika dilihat dari segi perkembangan antar waktu selama 5 tahun terakhir bahwa capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Barat cenderung menurun di mana untuk capaian Pertumbuhan Ekonomi terendah berada pada tahun 2020 yaitu sebesar -5,43 sedangkan untuk capaian tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 7,08.

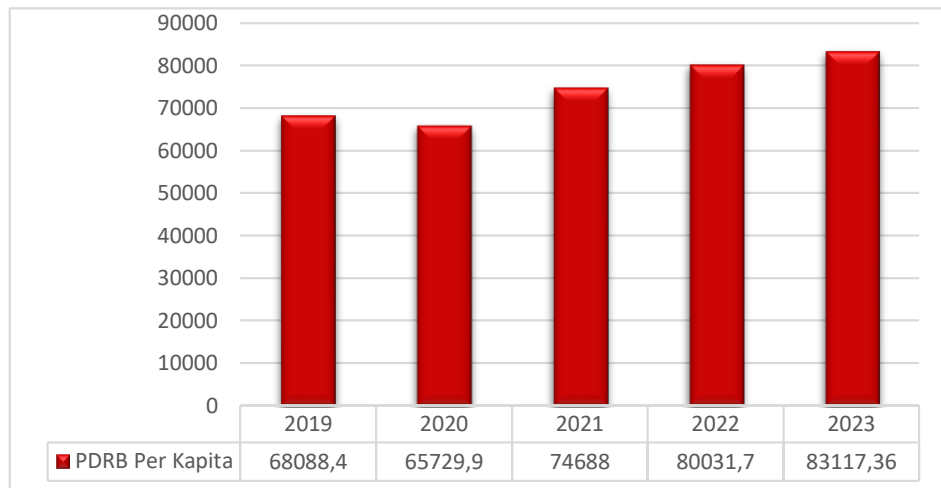
E. Pendapatan Per Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator makro sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan dan kemakmuran penduduk di suatu wilayah yang dibandingkan dengan wilayah lain. PDRB per kapita diperoleh dengan membagi PDRB suatu daerah dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Berdasarkan publikasi BPS Kabupaten Bangka Barat, untuk nilai PDRB per kapita Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp 83.117.360.000,00 Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 dengan nilai PDRB per kapita sebesar Rp 80.031.700.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar 3,68% di Tahun 2023. Selama 5 (enam) tahun terakhir, nilai PDRB per kapita Kabupaten Bangka Barat menunjukkan perkembangan yang positif atau terus meningkat kecuali di Tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Grafik II.5

Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Bangka Barat Kurun Waktu 2019-2023



Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka Tahun 2024

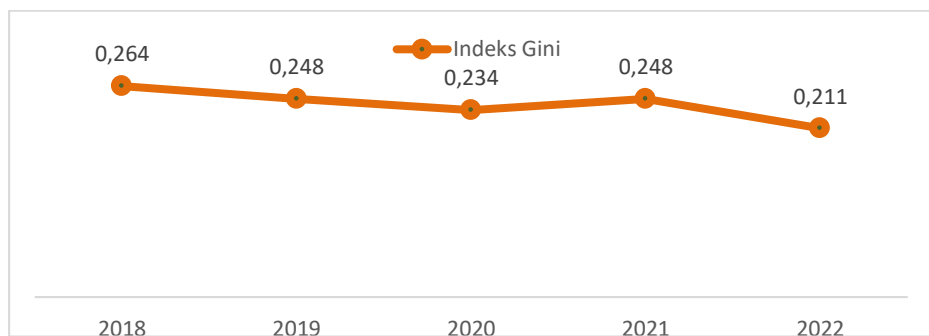
F. Ketimpangan Pendapatan

Dalam pengukuran statistik, dikenal pula Indeks Gini atau *Gini Ratio* yang merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Dalam mengukur tingkat ketimpangan di Indonesia, BPS menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan. Berdasarkan konsep BPS, *Gini ratio* adalah salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran yang menggunakan nilai yang berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai *gini ratio* yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

Indeks Gini Kabupaten Bangka Barat selama 5 (lima) tahun terakhir secara trend menunjukkan penurunan. Pada Tahun 2022 Indeks Gini Kabupaten Bangka Barat sebesar 0,211 menurun jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar 0,248. Namun untuk indeks Gini Kabupaten Bangka Barat belum tersedia sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun yang lalu.

Grafik II.6

Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Bangka Barat Kurun Waktu 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

2.2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran.dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/ informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Tabel II.3
Capaian Indikator Kinerja Keluaran (*Output*) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 dan Tahun 2023

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data
Pendidikan					
	1 Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	1 Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	105 lembaga	151 lembaga	
		2 Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	5888 siswa	821 siswa	
		3 Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	5888 siswa	6351 siswa	
		4 Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	442 orang	491 orang	
		5 Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	532 orang	533 orang	
		6 Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	309 orang	347 orang	
		7 Jumlah Kepala Sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	76 orang	105 orang	
	2 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	1 Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	SD : 137 dan SMP 48	SD:141 SMP 47	
		2 Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	5305 orang	4023 orang	
		3 Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	2418 orang	2945 orang	
		4 Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	5305 orang	1985 orang	
		5 Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	2418 orang	1858 orang	
		6 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1439 orang	1485 orang	
		7 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	657 orang	705 orang	
		8 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	1406 orang	1431 orang	
		9 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	672 orang	756 orang	

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data			
		10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	568 orang	710 orang			
		11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	240 orang	300 orang			
		12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	439 orang	458 orang			
		13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	280 orang	272 orang			
		14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1277 orang	1301 orang			
		15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	626 S1, 244 bersertifikasi	736 S1, 285 bersertifikasi			
		16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	134 berijazah S1 dan 132 bersertifikat pendidik	137 berijazah S1 dan 132 yang bersertifikat pendidik			
		17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	48 orang	50 S1, 35 bersertifikat			
		18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	242 orang	363 orang			
		19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	152 orang	150 orang			
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	SD : 137 dan SMP 48	SD:141 SMP 47	
		2		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	5305 orang	4023 orang		
		3		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	2418 orang	2945 orang		
		4		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	5305 orang	1985 orang		
		5		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	2418 orang	1858 orang		
		6		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	1439 orang	1485 orang		
		7		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	672 orang	707 orang		
		8		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	1406 orang	1431 orang		
		9		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	672 orang	756 orang		
10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	568 orang		710 orang				

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome		Indikator Kinerja Kunci Output		Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	
			11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	240 orang	300 orang		
			12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	439 orang	458 orang		
			13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	280 orang	272 orang		
			14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1277 orang	1301 orang		
			15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	626 S1, 244 bersertifikasi	736 S1, 285 bersertifikat		
			16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	134 berijazah S1 dan 132 bersertifikat pendidik	137 berijazah S1 dan 132 yag bersertifikat pendidik		
			17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	48 orang	50 S1, 35 bersertifikat		
			18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	242 orang	363 orang		
			19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	152 orang	150 orang		
	4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	4 PKBM	4 PKBM		
	2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	365 orang	506 orang		
	3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	3	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	365 orang	506 orang		
	4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	4	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	89 orang	89 orang		
	5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	70 orang	72 orang		
	6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	6	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	59 orang	64 orang		
	7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	7	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	TIDAK PERLU DI ISI	5 orang		
	8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	8		TIDAK PERLU DI ISI	5 orang		
	Kesehatan							
		1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	1 RS	3 RS	
2		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	2 RS	3 RS		

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	
	3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3641	313481
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	164 orang	153 orang
	4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3463	9873
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	164 orang	153 orang
	5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3425	26032
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	167 orang	153 orang
	6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	11541	92067
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	72 orang	1533 orang
	7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	37541	73788
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	172 orang	638 orang
	8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	133	465767
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	146 orang	475 orang
	9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	17125	44653
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	64 orang	472 orang
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	48523	50810	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	40 orang	40 orang	
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3968	153664	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	48 orang	48 orang	
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	487	535	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	18 orang	8 orang	
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2266	3811	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	32 orang	166 orang	
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5432	10833	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	45 orang	56 orang	
Pekerjaan Umum						
	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	129,48 ha	227,14 Ha
			2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	15142 m	15142 m
			3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	38,29 ha	28,69 Ha

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data
		4 Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	3829 m	4282 m	
		5 Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	5 dok	5 dok	
		6 Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	4 dok	5 dok	
		7 Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	ada	Ada	
	2 Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	1 Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	38,29 ha	227,14 Ha	
		2 Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	15142 m	15142 m	
		3 Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	38,29 ha	28,69 Ha	
		4 Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	3829 m	2869 m	
		5 Rencana Tata Pengaturan airdantata pengairan/rencanapengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	5 dok	5 dok	
		6 Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	4 dok	4 dok	
		7 Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	idem	5	
	3 Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	1 Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	93,72%	93,00%	
		2 Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	93,00%	91,90%	
		3 Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	85,50%	86,18%	
	4 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	1 Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada	Ada	
		2 Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Ada	Ada	
		3 Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	1 BUMD	1 BUMD	
		4 Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	1 BUMD	1 BUMD	
		5 Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	Ada	Ada	
	5 Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1 Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	1096 unit	1270 unit	
		2 Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	1063 unit	1244 unit	

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data
		3 Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	2159 RT	2514 RT	
		4 Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	164 unit	254 unit	
		5 Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	164 unit unit	254 unit	
		6 Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	2159 unit	2514 unit	
		7 Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	91,6%	94,0%	
		8 Kinerja penyediaan pelayanan SPALDS akses aman	3,38%	0,04%	
		9 Kinerja penyediaan pelayanan SPALDT akses aman	11,95%	16,70%	
		10 Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	4,19%	2,15%	
		11 Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	75%	75%	
		12 Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	100%	100%	
		13 Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	99,44%	99,16%	
		14 Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	7,6%	11,24%	
	6 Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	1 Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	SP	80%	
		2 Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	33	60	
		3 Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Tidak	Ada	
		4 Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Ada	Ada	
		5 Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	24 unit	28 unit	
		6 Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	SP	sp	
		7 Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	3428 unit	3432 unit	
		8 Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	2939	3001	
	7 Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	1 Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	809.305 km	809.305 km	
		2 Panjang jalan yang dibangun	32051 km	41297 km	
		3 Panjang jembatan yg dibangun	1181,1 km	1181 km	
		4 Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	156,98 km	163,067 km	
		5 Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	214 km	214 km	
		6 Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	104,247 km	113,209 km	

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data
		7 Panjang jembatan yang direhabilitasi	70,4 km	80,4 km	
		8 Panjang jalan yang dipelihara	131053 km	106,161 km	
		9 Panjang jembatan yang dipelihara	138 km	132 km	
	8 Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	1 Jumlah Pelatihan Tenaga operator teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	3 kali	1 kali	
		2 Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	279 orang	309 orang	
		3 Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	237 orang	267 orang	
		4 Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Tidak ada	sp	
		5 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	SP	SP	
		6 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	SP	SP	
		7 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	SP	SP	
		8 Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	34	100	
		9 Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Ada	Ada	
		10 Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	Ada	Ada	
		11 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Ada	Ada	
		12 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	Ada	Ada	
		13 Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	SP	SP	
		14 Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	SP	SP	
		15 Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	SP	SP	
		16 Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	Ada	

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data		
		17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	SP	SP		
		18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	37 Badan Usaha	SP		
		19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	SP	SP		
		20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	34	50		
		21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	SP	SP		
		22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	SP	SP		
		23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	SP	SP		
		24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	SP	SP		
		25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	SP	SP		
		9	Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi				
Perumahan Rakyat							
	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	67 RT	15 RT	
			2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	67 RT	15 RT	
			3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	67 RT	15 RT	
			4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	66 RT	13 RT	
			5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	1 RT	2 RT	
			6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	SP	SP	
			7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	SP	SP	
			8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	67 RT	15 RT	
			9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	SP	SP	
	2		1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	SP	SP	

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data			
	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	SP	SP			
		3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	SP	SP			
		4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	SP	SP			
		5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	SP	SP			
		6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	SP	SP			
		3.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	1	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	9,52 Ha	9,52 Ha	
			2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	30 unit	128 unit		
			3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	70,42 Ha	70,42 Ha		
	4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	1	Jumlah rumah di kab/kota	50058 unit	50058 unit		
			2	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	321 unit	748 unit		
			3	Jumlah rumah tidak layak huni	3468 unit	3039 unit		
			4	Jumlah rumah yang tidak dihuni	SP	SP		
			5	Rasio rumah dan KK	133,61%	133,61%		
			6	Jumlah rumah pembangunan baru	30 unit	50 unit		
	5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	270 unit	8 unit		
			2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	270 unit	279 unit		
			3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	270 unit	279 unit		
			4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	270 unit	279 unit		
			5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	SP	279 unit		
			6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	SP	1		
			7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0	9		
			8	Jumlah pengembang yang teregistrasi	12	16		
			9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	12	16		
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
		1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	6	24	
				2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	510 orang	457 orang	
				3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	5 perda	7 perda	
4				Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	1 orang	1 orang		

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output		Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	
		5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	6 SOP	6 SOP		
		6	Tersedianya sarana prasarana minimal	19 jenis	19 Jenis		
	2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan			100%		
	3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	7,45%	100%	
			2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	5,53%	81,28%	
	4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100%	SP	
			2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100%	SP	
			3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	100%	66,59%	
			4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	8,61%	66,59%	
			5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	SP	100%	
			6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	SP	SP	
	5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100%	SP	
			2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	1	
			3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	234	
			4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	1675	
	6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	117 Kejadian	159 Kejadian	
			2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Tidak Ada	Tidak Ada	
			3	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	18 orang	18 orang	
			4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	SP	SP	
			5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	38 jenis	38 jenis	
			6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	2 orang	6 orang	

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data
		7 Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	120	240	
		8 Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	10 Kegiatan	10 Kegiatan	
	7 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran		120	9,10	
SOSIAL					
	1 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	1 Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	67577 orang	19 orang	
		2 Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	28457orang	19 orang	
		3 Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	1	1	
		4 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	1708 orang	19 orang	
		5 Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	3 buah	3 buah	
		6 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	1510 orang	19 orang	
		7 Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1 unit	1 unit	
		8 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	180 orang	6 orang	
		9 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	18 orang	2 orang	
		10 Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	7 buah	7 buah	
		11 Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	SP	17 orang	
		12 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	SP	17 orang	
		13 Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	7 orang	4 orang	
		14 Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	130 orang	130 orang	
		15 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	68 orang	7 orang	
		16 Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	1	13 orang	
		17 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	33 orang	6 orang	

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome		Indikator Kinerja Kunci Output		Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data
			18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	1708 orang	11 orang	
			19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	23 orang	11 orang	
			20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	21 orang	5 orang	
			21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	36 orang	7 orang	
	2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	502 orang	568 orang	
			2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	493 orang	568 orang	
			3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	SP	1 lokasi	
			4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	160 orang	44 orang	
			5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Ada	Ada	
			6	Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	130 orang	130 orang	
	Ketenagakerjaan						
	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	1 RTKD	1 RTKD	
			2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	44,95	44,95	
			3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	3 Perusahaan	17 perusahaan	
	2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	100%	100%	
			2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	100%	100%	
			3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	10%	6,7%	
			4	Persentase LPK yang terakreditasi	11,76%	11,11%	
			5	Persentase LPK yang memiliki perizinan	29,41%	33,33%	
			6	Jumlah penganggur yang dilatih	20,94%	37,97%	
			7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100%	100%	
			8	Persentase penyerapan lulusan	45%	0,05%	
			9	Lulusan bersertifikat kompetensi	100%	100%	
			10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	100%	0%	
	11	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia(CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	100%	0%			
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	SP	2,31%		

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data
		2	Data tingkat produktivitas total	Nihil	SP
	4 Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	31,82%	28,30%
		2	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	80%	60%
		3	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	5 Perusahaan	5 Perusahaan
		4	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	100%	100,00%
		5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	82,14%	40,46%
		6	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	0,51%	2,31%
		7	Jumlah mogok kerja	SP	SP
		8	Jumlah penutupan perusahaan	SP	SP
		9	Jumlah perselisihan kepentingan	SP	SP
		10	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	SP	SP
		11	Jumlah perselisihan PHK	SP	4
		12	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	SP	4
		13	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	SP	3
		14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	1 unsur	Ada
		15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	100%	75,00%
	5 Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam WilayahKabupaten/Kota	1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	12 jenis	18 jenis
		2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	191 orang	158 orang
		3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	5	5
		4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	SP	SP
		5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	1 orang	1 orang
		6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	SP	SP
		7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	SP	SP
		8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	94 orang	40 orang
		9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	100%	0
		10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	100%	0

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome		Indikator Kinerja Kunci Output		Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data
			11	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	SP	SP	
			12	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	SP	SP	
			13	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	SP	SP	
			14	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	SP	SP	
Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak							
	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	31 OPD	31 OPD	
			2	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	30 program	47 program	
	2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	1	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	1 jenis	1 jenis	
			2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1 lembaga	1 lembaga	
			3	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%	100,00%	
			4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	1 lembaga	1 lembaga	
			5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	1 lembaga	1 lembaga	
	3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	5 LSM	1 LSM	
			2	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	13 orang	16 orang	
			3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	3 LSM	3 LSM	
			4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	3 lembaga	3 lembaga	
			5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1 kebijakan	1 kebijakan	
			6	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	8 lembaga	7 lembaga	
			7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	100%	
Pangan							
	1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	1	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada	Ada	
			2	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada	Ada	
			3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tidak	Tidak	
			4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada	SP	
			5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	Ada	

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data		
		6	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada	Ada		
		7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada	Ada		
		8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada	Ada		
Pertanahan							
	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	3 izin	5 izin	
			2	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	SP	SP	
			3	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	SP	SP	
			4	Dokumen Izin membuka tanah	SP	SP	
			5	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	100%	100%	
	2	Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum					
	3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal					
	4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee					
	5	Tersedianya tanah untuk masyarakat					
	6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi					
Lingkungan Hidup							
	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	1	Hasil perhitungan provinsi terhadap : 1. Indeks kualitas air (IKA)Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks tutupan hutan 2. (ITH) 3. Indeks Tutupan Hutan 4. (ITH)	IKA =66,67; IKU = 89,20; IKL= 37,41	IKA =53,33; IKU = 89,39; IKL= 38,82	
	2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	1	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1) motor roda tiga 20 unit, dump truk 6 unit, 2 unit amrol 2) Kapasitas TPA 38.238,75 ton/ ta, timbulan sampah 30.765,82 ton/tahun 3) TPST sebanyak 2 unit (Kelapa dan Parittiga), TPS3R 5 unit (air limau, pelangas, bakit, parittiga, tempilang), bank sampah induk 1 unit (air limau)	1). motor roda tiga 23 unit, dump truk 7 unit, 2 unit amrol 2). Kapasitas TPA 38.238,75 ton/ ta, timbulan sampah 30.889 ton/tahun 3). TPST sebanyak 0 unit)	

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data
	3 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	1 Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	100%	
		2 Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	3,17%	5,56%	
		3 Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	SP	SP	
		4 Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	SP	SP	
		5 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	SP	SP	
		6 Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	100%	100%	
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
	1 Perekaman KTP Elektronik	1 Penerbitan akta perkawinan	56,06%	58,38%	
		2 Penerbitan akta perceraian	66,63%	68,55%	
		3 Penerbitan akta kematian	100%	100,00%	
		4 Penyajian data kependudukan	50,00%	50,00%	
	2 Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA				
	3 Kepemilikan akta kelahiran				
	4 Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama				
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
	1 Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	1 Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	56 desa	60 desa	
		2 Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	50 desa	11 desa	
		3 Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	121 lembaga	7 lembaga di 64 desa/ kelurahan	
		4 Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	127 lembaga	7 lembaga di 64 desa/ kelurahan	
	2 Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	1 Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	56 desa	60 7 lembaga di 64 desa/ kelurahan	
		2 Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	50 desa	11 7 lembaga di 64 desa/ kelurahan	
		3 Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	121	7 lembaga di 64 desa/ kelurahan	

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome		Indikator Kinerja Kunci Output		Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	
			4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	127	7 lembaga di 64 desa/ kelurahan		
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada	Ada		
			2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	25 tahun	20 tahun		
			3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate /ASFR 15-19)	0,384987893	37,86		
			4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	100%	100%		
			5	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	25 OPD	25 OPD		
	2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	1	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100%	100%		
			2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	8,34%	8,74%		
			3	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	213 pokja (15 yang di kabupaten +198 di desa)	213 pokja (15 yang di kabupaten +198 di desa)		
			4	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	11,47%	22,20%		
	3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	1	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	44,63%	57,84%		
			2	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	33,17%	51,31%		
	Perhubungan							
		1	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	74,07%	30,67%	
2				Terlaksananya pelayanan uji berkala	28,52%	26,5%		
3				Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	SP	SP		
4				Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	56,69%	66,53		
	2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	1	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa Lalu lintas untu jaringan jalan Kabupaten/Kota	56,69%	66,53		
Komunikasi dan Informatika								
	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100,00%	100,00%		
			2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100,00%	100,00%		

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data
		3 Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Ada	Ada	
	2 Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	1 Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	40,54%	100,00%	
		2 Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	51,61%	64,52%	
		3 Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan	100,00%	100,00%	
		4 Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasipemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100,00%	100,00%	
		5 Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	25,00%	50,00%	
		6 Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	87,50%	87,50%	
		7 Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	37,50%	50,00%	
		8 Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	54,84%	54,84%	
		9 Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	48,39%	48,39%	
		10 Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	48,39%	48,39%	
		11 Persentase data yang dapat berbagi pakai	36%	42%	
		12 Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	19,35%	32,26%	
		13 Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	75,00%	71,43%	
		14 Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada	Ada	
	3 Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	78,57%	80,00%	
		2 Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi(STRAKOM)	100,00%	100,00%	
		3 Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100%	100%	

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome		Indikator Kinerja Kunci Output		Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
	1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	SP	37,04%	
			2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan ldalam daerah kabupaten/kota	SP	SP	
			3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	21,82%	100,00%	
			4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	34,00%	27,03%	
			5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	2764,55%	74,34%	
			6	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	1,47%	2,84%	
			7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	SP	10,62%	
			8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	TIDAK PERLU DI ISI	2	
			9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	63,64%	64,60%	
			10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	42,10%	0,02%	
			11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	3 KOPERASI	3%	
			12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100%	100%	
			13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	9,09%	10,62%	
	2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	1,14%	1,92%	
			2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	15,26%	15,01%	
			3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	5,16%	0,23%	
			4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0,96%	2,29%	

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	
		5	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0,55%	1,60%	
		6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0,94%	1,68%	
		7	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	0,82%	3,00%	
Penanaman Modal						
	1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	SP	1 Perda
			2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	SP	SP
			3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	SP	SP
			4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	8 kali	7 kali
			5	Kegiatan pameran penanaman modal	SP	1 kali
			6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	2	2 kali
			7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	37 konsultasi	32 konsultasi
			8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	12518 (perizinan dan non perizinan)	18541 perizinan
			9	Laporan realisasi penanaman modal	1.403.739.200.387	2.213.705.825.372
			10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	8 kali	SP
			11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	33 kali	69 kali
			12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota	155%	41%
Kepemudaan dan Olahraga						
	1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	11 orang	2828 orang
			2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	11 orang	2828 orang
	2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	28 orang	362 orang
			2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	16 organisasi	362 orang
	3	Peningkatan Prestasi Olahraga	1	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	40	40
			2	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	6	6
Statistik						
	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	1	Tersedianya buku profil daerah	Ada	Ada
			2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	12 Survei	49
			3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	3 jenis	3
			4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	1 survei	1
			5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0 jenis	1

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome		Indikator Kinerja Kunci Output		Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data
			6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	100,00%	100 %	
			7	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	100,00%	100 %	
	2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah					
Persandian							
	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	SP	100%	
			2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	100%	100%	
			3	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0,00	100%	
			4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	100,00%	100%	
Kebudayaan							
	1	Terlestarikannya Cagar Budaya	1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	11 objek	11 objek	
			2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	1 objek	1 Objek	
			3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	1 objek	1 Objek	
			4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	SP	SP	
			5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	24 CB	28 CB	
			6	Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	24 CB	28 CB	
			7	Layanan perijinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	SP	SP	
			8	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	SP	SP	
			9	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	SP	SP	
			10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	SP	SP	
			11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	7786 orang	10261 orang	

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome		Indikator Kinerja Kunci Output		Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data
			12	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	SP	SP	
			13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	17 orang	15 orang	
			14	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	5 orang	5 orang	
			15	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	5 orang	4 orang	
			16	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	7 orang	9 orang	
			17	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	SP	SP	
			18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	10 buah	10 Buah	
			19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	SP	SP	
Perpustakaan							
	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	302,36%	124,03%	
			2	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	70,33%	2,40%	
			3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,19%	0,27%	
			4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	15,81%	22,40%	
			5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca dimasyarakat	20 kegiatan	25 kegiatan	
	2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	16 lembar	16 lembar	
			2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	16 lembar	16 lembar	
			3	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	456 buah	689 buah	
Kearsipan							
	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	100%	
			2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	100%	
			3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	85,35%	100,00%	
			4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	100%	100,00%	
	2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	1	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	2496	SP	
			2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	SP	SP	
			3	Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	SP	SP	
			4	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	SP	50	
			5	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	SP	9	
			6	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	SP	SP	
Perikanan							

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	
	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	4480 RTP nelayan dan 412 RTP Budidaya	428 RTP
			2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	0%	0
			3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	87 izin	353 izin
			4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan)	398 orang	267 orang
			5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	4620470 ekor	7218755 ekor
Pariwisata						
	1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	37 unit	219 unit
			2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	37 unit	219 unit
			3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	329	261
			4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	234 orang	256 orang
			5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	8 event	13 event
			6	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	SP	SP
			7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	SP	SP
			8	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	65,22%	64,00%
			9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	100%	100%
			10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	13 lokasi	19 lokasi
	2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota				
			3	Tingkat Hunian Akomodasi		
			4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku		
			5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD		
Pertanian						
	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	1	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	4 jenis	Benih Padi 2500 Kg, 6250 kg, Pupuk NPK 25.000 kg, Pupuk Hayati 250 Paket
			2	Prasarana pertanian yang digunakan	3144	3144
			3	Penerbitan izin usaha pertanian	3 kali	SP
			4	Persentase prasarana yang digunakan	99,12%	99,12
			5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	SP	SP

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome		Indikator Kinerja Kunci Output		Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data		
	2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	1	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	84,85%	33,33%			
Kehutanan									
			1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Ada	Ada			
			2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	SP	SP			
			3	Pemulihan ekosistem pada Tahura	SP	264,38			
			4	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	1 kasus	2 kasus			
Energi dan Sumber Daya Mineral									
	1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	SP	SP			
Perdagangan									
	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a) Pusat perbelanjaan b) Toko swalayan	100%	100%			
			2	Persentase penerbitan TDG	100%	100%			
			3	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	SP	100%			
			4	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	SP	SP			
					5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	SP	SP	
					6	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	0	SP	
			7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	3,45%	100%			
			8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	3,45%	8,67%			
	2	Persentase kinerja realisasi pupuk	1	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	0,00001%	0,1%			
	3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	72%	79,80%			
			2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	SP	SP			
Perindustrian									
	1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	0%	SP			
	2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	1	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	50%	90%			

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome		Indikator Kinerja Kunci Output		Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data
	3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	1	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	88,55%	94,53%	
	4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	1	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	SP	SP	
	5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota					
	6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	1,76%	3,41%	
Transmigrasi							
			1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	3 SKP	3 SKP	
			2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	1 SKP	1 SKP	
			3	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	1 SKP	1 SKP	

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel II.4
Capaian Indikator Kinerja Hasil (*Outcome*) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 dan Tahun 2023

URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2022	CAPAIAN KINERJA 2023	SUMBER DATA
Pendidikan					
	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD / Jumlah anak usia 5-6 Tahun pada provinsi yang bersangkutan x 100%	95,83 %	97,48%
	2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 - 12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar / Jumlah anak usia 7 -12 tahun pada provinsi yang bersangkutan x 100%	98,90%	106,65%
	3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama / jumlah anak usia 13–15 tahun pada provinsi yang bersangkutan x 100%	90,15 %	91,28%
	4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan / Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan x 100%	37,24 %	29,13%
Kesehatan					
	1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan / Jumlah penduduk di Kabupaten/kota	0,101 %	0,11%
	2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi / Jumlah RS di kabupaten/kota x100%	66,67 %	100,00%
	3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan / Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota x100%	100,00%	100,00 %
	4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan / Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota x100%	100,00 %	100,00 %
	5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar / Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota x100%	100,00 %	100,00 %
	6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar / jumlah balita di kabupaten/kota x100%	100,00 %	100,00 %
	7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar / Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota x100%	100,00 %	100,00 %
	8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar / Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota x100%	75,11 %	100,00%

URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2022	CAPAIAN KINERJA 2023	SUMBER DATA	
	9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar / Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten/kota $\times 100\%$	83,22 %	100,00 %	
	10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota $\times 100\%$	100.00 %	100.00 %	
	11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah penderita DM di kabupaten/kota $\times 100\%$	100.00%	100.00%	
	12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota $\times 100\%$	100.00%	100.00%	
	13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota $\times 100\%$	100.00%	100.00%	
	14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota $\times 100\%$	100.00%	100.00%	
Pekerjaan Umum						
	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/kota (ha) / Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/kota(ha) $\times 100\%$	57,01%	57,01%	
	2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota (m) / Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten /kota (m) $\times 100\%$	30,63%	67,00%	
	3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kab kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun(ha), ditingkatkan(ha), direhabilitasi(ha), dioperasi dan pelihara(ha) / Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kota $\times 100\%$	38,43%	52,54%	
	4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota / Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut $\times 100\%$	92,19%	92,96%	
	5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD / Jumlah rumah di kabupaten kota $\times 100\%$	96,15%	97,68%	
	6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya / Jumlah IMB yang berlaku $\times 100\%$	100%	100%	

URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2022	CAPAIAN KINERJA 2023	SUMBER DATA
	7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap / Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten kota $\times 100\%$	72,12%	68,55%	
	8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis / Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah kabupaten/kota	100 %	56,18%	
	9	Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi / Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya $\times 100\%$	100%	100%	
Perumahan Rakyat						
	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n / total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n $\times 100\%$	100%	100%	
	2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah tangga penerima fasilitas penggantian Hak atas penguasaan Tanah dan atau Bangunan + Rumah tangga penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima penyediaan Rumah Layak Huni / Jumlah total rumah terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi Kriteria penerima pelayanan $\times 100\%$	100 %	100 %	
	3.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) / Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha $\times 100\%$	39,81%	39,81%	
	4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni / Jumlah total unit rumah kabupaten/kota $\times 100\%$	6,93%	6,07%	
	5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU / Jumlah unit rumah kab/kota $\times 100\%$	31,99 %	26,37%	
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
	1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani / Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk $\times 100\%$	100%	100%	
	2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan / Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi $\times 100\%$	13,51%	100%	
	3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	25,00%	80,74%	
	4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	8,61%	66,60%	
	5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	

URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2022	CAPAIAN KINERJA 2023	SUMBER DATA	
	6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah + jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pmeadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat daerah / Jumlah Kejadian kebakaran di kabupaten/kota $\times 100\%$	77,78%	100%	
	7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	8,02	9,06	
SOSIAL						
	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti / populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis $\times 100\%$	100,00%	100,00%	
	2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran / populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota $\times 100\%$	100%	100%	
Ketenagakerjaan						
	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD / Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota $\times 100\%$	60%	100%	
	2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi / Jumlah tenaga kerja keseluruhan $\times 100\%$	6,36%	6,88%	
	3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) / Jumlah tenaga Kerja $\times 100\%$	144,59%	160099733,25%	
	4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak / Jumlah Perusahaan $\times 100\%$	28,57%	41,04%	
	5	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan / Jumlah pencaker yang terdaftar $\times 100\%$	49,21%	56,96%	
Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak						
	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD / Jumlah seluruh belanja langsung di APBD $\times 100\%$	0,55%	55,69%	
	2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten kota yang didampingi / Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 Tahun) $\times 100\%$	100%	100%	

URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2022	CAPAIAN KINERJA 2023	SUMBER DATA	
	3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan / Jumlah penduduk perempuan $\times 100\%$	0,003%	0,007%	
Pangan						
	1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah Cadangan pangan / Jumlah kebutuhan pangan $\times 100\%$	161,74%	160%	
	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukkan ijin lokasi / seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi $\times 100\%$	100%	100%	
	2	Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum / Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum $\times 100\%$	100%	100%	
	3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi / Luas izin lokasi yang diterbitkan $\times 100\%$	100%	100%	
	4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha / Jumlah penerima tanah obyek landreform $\times 100\%$	100%	100%	
	5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah / Luas izin membuka tanah yang diterbitkan $\times 100\%$	100%	100%	
	6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani / Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan $\times 100\%$	100%	100%	
Lingkungan Hidup						
	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	IKLH Kab/Kota = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%). IKA = Indeks Kualitas Air IKD = Indeks Kualitas Udara ITH = Indeks Tutupan Hutan	69,39	64,76%	
	2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	Total volume sampah yang dapat ditangani / total volume timbunan sampah kabupaten/kota $\times 100\%$	20,10%	41,80%	
	3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Kota / Usaha atau kegiatan dilakukan pemeriksaan $\times 100\%$	30,16%	16,67%	
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
	1	Perekaman KTP Elektronik		97,91%	97,48%	
	2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) jari yang sudah memiliki KIA / Jumlah anak usia 0-17 Tahun $\times 100\%$	47,34%	53,50%	
	3	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir / jumlah anak usia 0-18 Tahun $\times 100\%$	97,17%	97,36%	

URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2022	CAPAIAN KINERJA 2023	SUMBER DATA	
	4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama / Jumlah OPD $\times 100\%$	20.00%	100%	
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
	1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan indeks desa membangun / Jumlah desa tertinggal (per awal tahun n) $\times 100\%$	100%	100%	
	2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan indeks membangun per tahun / Jumlah desa berkembang (per awal tahun n) $\times 100\%$	15,38%	39,53%	
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	TFR = Angka Kelahiran Total ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 utk kelompok umur)	2,45	2,33	
	2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB aktif modern / Jumlah pasangan usia subur $\times 100\%$	73,75%	77,98%	
	3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)		17,63%	9,23%	
Perhubungan						
	1	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) • IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut • IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut) Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) § Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP § Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) • Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil • Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu	0,68	0,25	

URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2022	CAPAIAN KINERJA 2023	SUMBER DATA	
		Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan: 1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) 2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) 3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) 4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) Bobot Trayek atau Lintas: a) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 b) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 c) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5				
	2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota	0,55	0,18	
Komunikasi dan Informatika						
	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo / Jumlah OPD $\times 100\%$	100,00%	100%	
	2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi / Jumlah Layanan Publik $\times 100\%$	25,00%	41,67%	
	3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten atau kota / Jumlah Penduduk $\times 100\%$	70,46%	100%	
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
	1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	jumlah koperasi yang meningkat berdasarkan kualitasnya RAT, Volume usaha dan aset / Jumlah seluruh koperasi $\times 100\%$	58,18%	59,29%	
	2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha / Jumlah usaha mikro keseluruhan $\times 100\%$	14,61%	20,24%	
Penanaman Modal						
	1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	(Jumlah investasi tahun n - Jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota / Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota $\times 100\%$	18,65%	57,70%	

URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2022	CAPAIAN KINERJA 2023	SUMBER DATA
Keperemajaan dan Olahraga					
	1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	(Jumlah pemuda(16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota / Jumlah pemuda (umur 16 - 30 tahun) di kabupaten/kota $\times 100\%$	5,82%	50,423%
	2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	(Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota / Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota $\times 100\%$	0,75%	10,78%
	3	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	36	198
Statistik					
	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah / Jumlah OPD $\times 100\%$	100%	100%
	2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah / Jumlah OPD $\times 100\%$	100%	100%
Persandian					
	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi / Jumlah area penilaian $\times 100\%$	0	73
Kebudayaan					
	1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan / Jumlah cagar budaya yang terdata $\times 100\%$	83,33%	86,00%
Perpustakaan					
	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	49,57	59,96%
	2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat =	3,407	78,87%
Kearsipan					
	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	$T = (a + i + s + j)/4$ T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	100%	100%

URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2022	CAPAIAN KINERJA 2023	SUMBER DATA	
	2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepingin negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m+b+g+a+c+i)/6$ T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	0,17	0,17	
Perikanan						
	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)	101,91%	99,10%	
Pariwisata						
	1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan tahun n - Jumlah wisatawan tahun n-1 / Jumlah wisatawan tahun n-1 $\times 100\%$	3800%	-25,36	
	2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Jumlah wisatawan tahun n - jumlah wisatawan tahun n-1 / Jumlah wisatawan tahun n-1 $\times 100\%$	38,73%	-8,66	
	3	Tingkat Hunian Akomodasi	Jumlah kamar terjual / Jumlah kamar tersedia $\times 100\%$	27,05%	32,52%	
	4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	2,52%	2,55	
	5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	3,20%	5,95	
Pertanian						
	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produk pertanian pangan per hektar per tahun / Luas Panen $\times 100\%$	4,65	4,97	
	2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t) - jumlah kejadian atau kasus hewan menular tahun sebelumnya / Jumlah kejadian atau kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) $\times 100\%$	-100%	-82,64	
Kehutanan						
Energi dan Sumber Daya Mineral						
	1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Jumlah Perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin / Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi $\times 100\%$	100	100	

URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2022	CAPAIAN KINERJA 2023	SUMBER DATA
Perdagangan						
	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan / Jumlah pelaku usaha di wilayah kabupaten atau kota $\times 100\%$	100%	100%	
	2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi / RDKK $\times 100\%$	1,60%	77,81%	
	3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan / Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kab atau Kota $\times 100\%$	72,40%	79,80%	
Perindustrian						
	1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-Jumlah industri kecil dan menengah n-1 / Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 $\times 100\%$	5,58%	5,13%	
	2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah $(100/N)\%$ Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali $(100/N)\%$ Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut	100	100	
	3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan / Jumlah izin yang dikeluarkan $\times 100\%$	59,65%	56,03%	
	4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan / Jumlah izin yang dikeluarkan $\times 100\%$	100%	100%	
	5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan / Jumlah izin yang dikeluarkan $\times 100\%$	100%	100%	
	6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1) Keterkinian informasi industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%)- Tidak menyampaikan informasi industri (0%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi : - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)	90%	90%	
Transmigrasi						
				100	100	

2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel II.5
Capaian Indikator Kinerja Hasil (Outcome) Fungsi Penunjang Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 dan Tahun 2023

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Rumus	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data
Urusan Pemerintahan (Perencanaan Dan Keuangan) Kabupaten/Kota					
	1	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah Belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan / Jumlah APBD	12,00%	10,38%
	2	Rasio PAD	Jumlah PAD / Jumlah PDRB Non Migas $\times 100\%$	9,04%	7,41%
	3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 2	Level 2
	4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 2	Level 2
	5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan-transfer expenditures / Jumlah belanja APBD $\times 100\%$	75,26%	67,72%
	6	Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan) Kabupaten/Kota					
	1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n / Jumlah kontrak keseluruhan tahun n $\times 100\%$	100%	0%
	2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif / Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif $\times 100\%$	52,56%	75,48%
	3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan / Total belanja langsung $\times 100\%$	93,93%	56,08%
	4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah nilai PBJ yang menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) – Jumlah Nilai PBJ yang menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) / Jumlah Nilai PBJ yang menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) $\times 100\%$	-6,75%	-4,30
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian) Kabupaten/Kota					
	1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas / Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah $\times 100\%$	62,99%	63,75%
	2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) / Seluruh jumlah pegawai pemerintahan (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) $\times 100\%$	28,87%	29,94%
	3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi / Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) $\times 100\%$	57,88%	54,72%

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Rumus	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data
Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan) Kabupaten/Kota					
	1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	(Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi / total belanja APBD) -1 x100%	0,92	7,87%
	2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	(Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi / total PAD dalam APBD) -1 x100%	0,85	2,19%
	3	Assets Management	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	YA	YA
	4	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA / Total belanja anggaran tahun sebelumnya x100%	1,64%	6,5%
Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik) Kabupaten/Kota					
	1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda / realisasi belanja unit pelayanan dapat diakses di website pemda x100%	99,11%	80%
	2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda / Total jumlah dokumen yang telah dirinci x100%	100%	100%

2.3. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dilakukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sesuai dengan kondisi serta sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Selanjutnya untuk menilai kinerja yang telah dicapai, dilakukan pengukuran kinerja dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya serta dilakukan analisa atas pencapaian kinerja dengan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran.

2.3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan sasaran kinerja berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan yang selanjutnya dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Metode perbandingan capaian kinerja tersebut dilakukan antara rencana dengan realisasi kinerja (*performance plan*) yang selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*). Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat serta mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun kerangka pengukuran kinerja berdasarkan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 adalah dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja apakah melebihi target, sesuai target atau tidak mencapai target, dalam penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 digunakan 2 (dua) skala penilaian yaitu :

1. Pengukuran Capaian Tahunan

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian tahunan menggunakan 4 (empat) kategori yaitu "**Baik Sekali**", "**Baik**", "**Cukup**" dan "**Kurang**". Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator kinerja dilakukan dengan membuat rata-rata atas capaian indikator kinerja. Kategori ini digunakan untuk memperlihatkan secara jelas ketercapaian dan keberhasilan masing-masing indikator kinerja sehingga dapat menjadi peringatan dan perhatian selanjutnya untuk dapat menjadi perbaikan kedepan dalam rangka mencapai target indikator dan sasaran yang ditetapkan.

Tabel II. 6
Penilaian Capaian Tahunan

Nilai Capaian (%)	Kategori
≥ 100	Baik Sekali
80 s.d. < 100	Baik
60 s.d. < 80	Cukup
< 60	Kurang

2. Pengukuran Capaian Perbandingan dengan Tahun sebelumnya

Untuk pengukuran capaian Perbandingan dengan Tahun sebelumnya, dibagi menjadi 3 (tiga) skala dengan 3 (tiga) kategori yaitu "Meningkat", "Tetap" dan "Menurun".

3. Pengukuran Capaian Akhir RPJMD

Untuk pengukuran capaian akhir RPJMD, dilakukan pengukuran terhadap capaian indikator kinerja sasaran yang dibagi menjadi 3 (tiga) skala dengan 3 (tiga) kategori yaitu "**Tercapai**", "**Optimis Tercapai**" dan "**Perlu Upaya Lebih**".

Tabel II.7
Penilaian Capaian Kinerja Sasaran terhadap Target Akhir RPJMD

Nilai Capaian (%)	Kategori
≥ 100	Tercapai
≥75 s.d <100	Optimis tercapai
<75	Perlu Upaya

2.3.2. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023, telah ditetapkan 5 Sasaran Tujuan dan 13 Sasaran Strategis yang harus dicapai di Tahun 2023 dengan target dan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel II.8
Capaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,68	2,50	53,41
1.1	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHB)	%	6,00	10,71	178,50
		Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industry pengolahan (ADHB)	%	5,39	2,58	47,86
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	%	2,40	2,55	106,25
		Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	%	18,77	25,63	136,54
Rata-rata Capaian						117,28
1.2	Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah	Pertumbuhan realisasi penanaman modal	Milyar Rupiah	917	2.143	233,69
Rata-rata Capaian						233,69
1.3	Meningkatnya kersediaan infrastruktur wilayah	Indeks Konektivitas	Nilai	0.7	0,72	103
		Indeks Bangunan Gedung	Kategori	Sedang	Sedang	100
Rata-rata Capaian						101,5
1.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	71.43	64,79	90,70
		Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan	%	52,94	52,94	100
		Indeks Resiko Bencana	Kategori	Tinggi	Tinggi	100
Rata-rata Capaian						96,90
2.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pengeluaran Perkapita	Ribu Rp	12,791	13,105	102,45
2.1	Menurunnya angka kemiskinan	Angka kemiskinan	%	2.45	2,71	-8,16
Rata-rata Capaian						-8,16
2.2	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	%	3.85	3,83	99,48
Rata-rata Capaian						99,48
3.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69.86	70,45	100,84

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
3.1	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7.38	7,46	98,28
		Harapan lama sekolah	Tahun	11.72	11,72	100
		Persentase sekolah Terakreditasi A	%	20.53	20,10	97,90
Rata-rata Capaian						98,72
3.2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Tahun	70.56	70,43	99,81
		Prevelensi stunting	%	7,46	8,1	92,09
Rata-rata Capaian						95,95
3.3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks pembangunan gender	Indeks	90.82	90,29	99,41
		Status kabupaten layak anak	Kategori	Madya	Pratama	75
Rata-rata Capaian						87,20
3.4	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Indeks kesalehan sosial	Kategori	Baik	Tinggi	>100
Rata-rata Capaian						>100
4.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks reformasi birokrasi	Kategori	Cukup	Baik	110
4.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	70	68,49	97,84
		Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100
		Maturasi SPIP	Tingkat Maturitas	Berkembang	Berkembang	100
		Indeks SPBE	Kategori	Cukup	Baik	112,98
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	64.85	64,41	99,34
Rata-rata Capaian						102,03
4.2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	81.82	84,36	103,10
Rata-rata Capaian						103,10
5.	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Indeks kapasitas fiskal daerah	Indeks	0.26	1,420	>100
5.1	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Derajat otonomi fiskal daerah	%	8.68	8,37	96,42
Rata-rata Capaian						96,42

Berdasarkan Sasaran Tujuan dan Target indikator yang telah ditetapkan beserta capaian kinerja masing-masing sasaran, dilakukan analisis dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel II.9
INDIKATOR TUJUAN TAHUN 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		REALISASI 2023	CAPAIAN %	
				2023	2026		2023	2026
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,68	4,10	2,50	53,41	60,97
2.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pengeluaran Perkapita	Ribu (Rp)	12.791	13.349	13.105	102,45	98,17
3.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,86	70,60	70,45	100,84	99,78
4.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks reformasi birokrasi	Kategori	Cukup	Baik	Baik	110	100
5.	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Indeks kapasitas fiskal daerah	Indeks	0,26	0,26	1,420	>100	>100

Tujuan Strategis 1 “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas”

Tujuan Strategis pembangunan ke 1 Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 yaitu “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas” dengan indikator dengan Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mengukur capaian pembangunan khususnya dibidang ekonomi, salah satu indikator yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi. Angka pertumbuhan ekonomi diperoleh dari data pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB ADHK (rill) menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun. Pertumbuhan yang positif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya, sebaliknya pertumbuhan yang negatif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan publikasi BPS, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2023 sebesar 2,50 persen mengalami kenaikan sebesar 0,50 persen. Jika dibandingkan dengan target daerah yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 sebesar 4,68 persen, maka indikator ini hanya mencapai sebesar 53,41 persen atau kurang sebesar 2,18 persen. Hal ini dikarenakan oleh dampak kondisi Geopolitik Global yang tidak stabil yang juga mempengaruhi kondisi perekonomian global, regional serta nasional.

Tabel II.10
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Bangka Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2023 (persentase)

Kategori	LAPANGAN USAHA	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,01	4,13	4,63
B	Pertambangan dan Penggalian	10,11	1,82	-2,99
C	Industri Pengolahan	-4,46	-1,03	0,26
D	Pengadaan Listrik dan Gas		-3,58	4,42

Kategori	LAPANGAN USAHA	2021	2022	2023
		8,54		
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,97	3,31	0,79
F	Konstruksi	1,71	1,87	7,26,
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,81	9,21	5,64
H	Transportasi dan Pergudangan	8,29	11,35	9,09
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,29	9,94	12,69
J	Informasi dan Komunikasi	5,93	8,48	12,86
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,36	8,60	11,83
L	Real Estate	4,29	8,19	6,94
M,N	Jasa Perusahaan	4,09	8,31	5,64
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,64	-0,93	7,14
P	Jasa Pendidikan	1,86	3,04	4,87
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,24	2,66	4,98
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,20	2,00	2,50
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		0,20	2,00	2,50

Keterangan : *) angka revisi

*) angka sementara

**) angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2024

Pada tahun 2023, dari 17 kategori lapangan usaha pembentuk PDRB, hanya 11 kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif, sementara 1 kategori lapangan usaha mengalami kontraksi atau pertumbuhan yang negatif dan 5 kategori lapangan usaha mengalami penurunan.

Tiga kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah **Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib** serta **Konstruksi**. Sementara lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif tertinggi adalah pada lapangan usaha **Pertambangan dan Pengalihan**.

Jika dilihat selama tiga tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2023 memperoleh capaian peningkatan pertumbuhan ekonomi, dibandingkan pertumbuhan ekonomi Tahun 2021 dan Tahun 2022 dalam perekonomian Kabupaten Bangka Barat.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 berada pada posisi terendah diikuti oleh Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Bangka. Sementara jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun nasional, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat lebih rendah dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebesar 4,38 persen dan nasional dengan pertumbuhan sebesar 5,05 persen.

Untuk data rinciannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.11
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di wilayah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

No	PROVINSI, KABUPATEN /KOTA	PERTUMBUHAN EKONOMI (Persen)
1.	Kabupaten Belitung	5,75
2.	Kota Pangkalpinang	5,32
3.	Kabupaten Bangka Tengah	5,16
4.	Kabupaten Belitung Timur	4,72
5.	Kabupaten Bangka	4,44
6.	Provinsi Kep. Bangka Belitung	4,38
7.	Kabupaten Bangka Selatan	3,69
8.	Kabupaten Bangka Barat	2,50

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Tujuan Strategis 2 “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”

Tujuan Strategis pembangunan ke 2 Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 yaitu “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat” dengan indikator Pengeluaran Per Kapita. Pengeluaran per kapita juga mampu mencerminkan indikator pendapatan masyarakat dan menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai output dari kegiatan ekonomi. Indikator pengeluaran per kapita ini merupakan salah satu dari indikator dari Indeks Pembangunan Manusia untuk mengukur dimensi standar hidup layak. Capaian indikator kinerja tujuan beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut :

Tabel II.12
Capaian Indikator Kinerja Tujuan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	%	STATUS CAPAIAN
Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rp	12.791	13.105	102,45	<i>Baik Sekali</i>

Pengeluaran per Kapita Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2023 sebesar 13.105 ribu rupiah dengan ketercapaian 102,45% jika dibandingkan dengan target di Tahun 2023 sebesar 12.791 ribu rupiah. Pada Tahun 2023 pertumbuhan Pengeluaran per Kapita Kabupaten Bangka Barat sebesar 4,25%.

Tabel II.13
Capaian Indikator Kinerja Tujuan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan Tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	%	STATUS CAPAIAN
Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rp	12.790	13.105	102,46	<i>Meningkat</i>

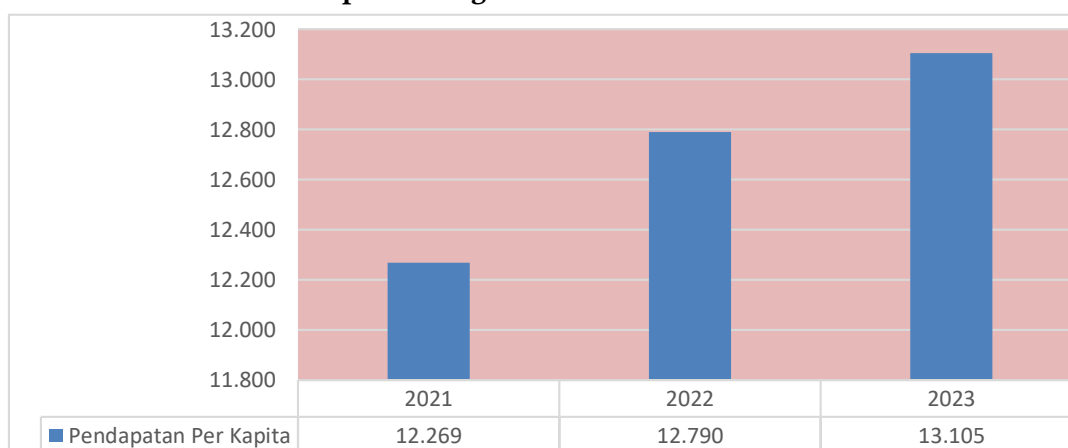
Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 dengan Pengeluaran per Kapita. 13.105 ribu rupiah. Meningkat sebesar 315 ribu rupiah dari Tahun 2022 yang sebesar 12.790.

Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD sebesar 15.245 ribu rupiah, maka telah tercapai 85,96% maka pencapaian hasil ini “optimis tercapai”.

Tabel II.14
Capaian Indikator Kinerja Tujuan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan Target akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2023	TARGET AKHIR RPJMD	(%)	STATUS CAPAIAN
Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rp	13.105	15.245	85,96	Optimis Tercapai

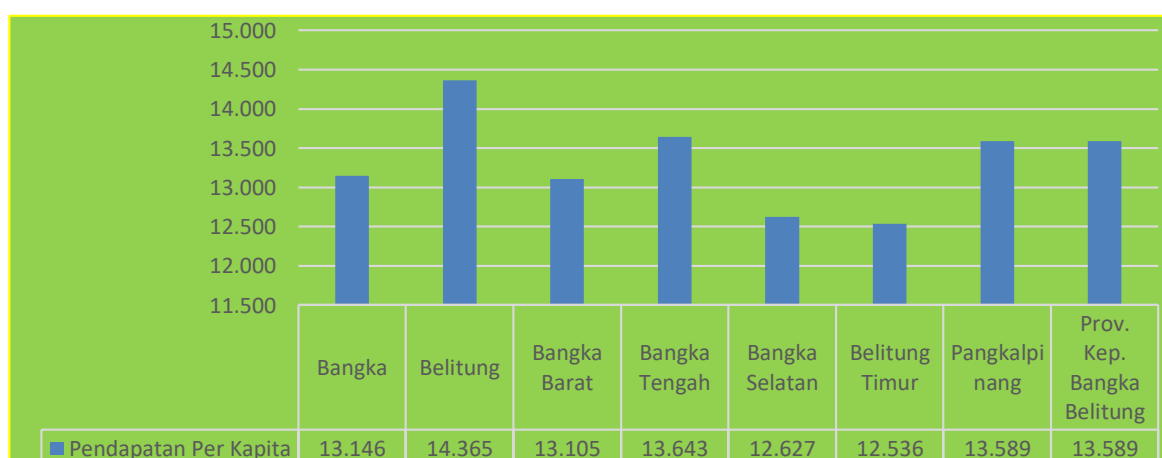
Grafik II.7
Pengeluaran per Kapita dan Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 – 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Selama 3 tahun terakhir, Pengeluaran per Kapita Kabupaten Bangka Barat secara tren terus mengalami peningkatan, terus mengalami perbaikan pasca Covid-19 dengan pertumbuhan yang cukup signifikan di Tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangka Barat setiap tahunnya semakin meningkat. Meningkatnya Pengeluaran per Kapita ini salah satunya dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan harga barang dan jasa yang akan dibayarkan oleh masyarakat.

Grafik II.8
Pengeluaran per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota dilingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka Pengeluaran per Kapita Kabupaten Bangka Barat berada di posisi 3 terendah setelah Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur. Sedangkan jika dibandingkan dengan Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung (13.589 ribu rupiah), maka Pengeluaran per Kapita Kabupaten Bangka Barat lebih rendah sebesar (484 ribu rupiah.) tapi dibandingkan dengan Pengeluaran per Kapita Nasional sebesar 11.899 maka Kabupaten Bangka Barat lebih besar sebesar (1.206 ribu rupiah.).

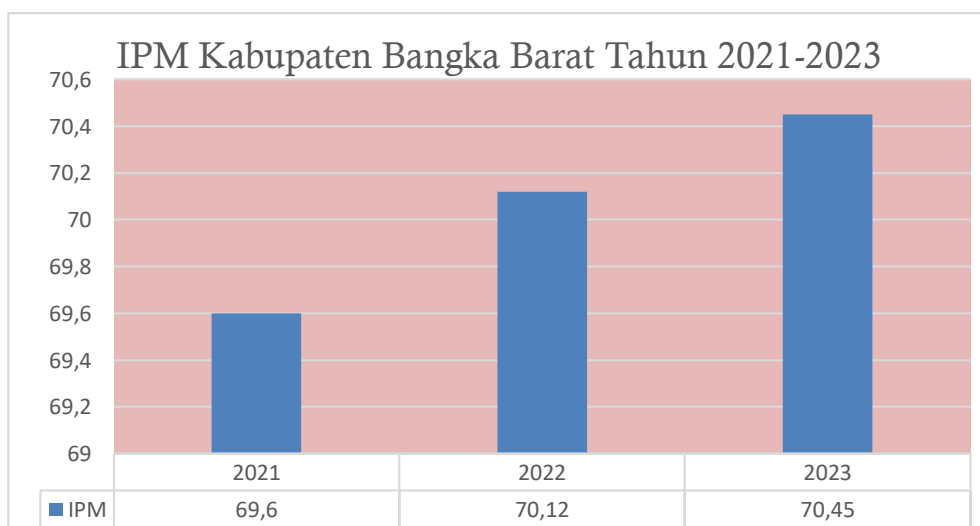
Tujuan Strategis 3 “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia”

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur Sasaran Tujuan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia. Konsep pembangunan manusia diukur dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar manusia, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta standar hidup yang layak. Dimensi umur panjang dan sehat diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita. Ketiga dimensi ini terangkum dalam suatu indeks komposit yang membentuk IPM.

Nilai IPM Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2023 sebesar 71,13 dan jika dibandingkan dengan target IPM dalam RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 sebesar 69,86 maka melebihi mencapai target dengan capaian sebesar 101,81 persen atau kategori ”**Baik Sekali**”.

Jika dilihat dari perkembangan antar waktu selama 3 (tiga) tahun terakhir, nilai IPM Kabupaten Bangka Barat menunjukkan perkembangan yang positif dan terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,75 persen. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 dengan nilai 70,12 IPM Kabupaten Bangka Barat hanya meningkat sebesar 0,33 poin. Perkembangan ini secara umum menunjukkan perbaikan pembangunan manusia di Kabupaten Bangka Barat meskipun pertumbuhannya cenderung lambat. Sementara jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 dengan nilai sebesar 70,60, maka telah mencapai sebesar 99,78 persen. maka target akhir RPJMD untuk IPM optimis tercapai

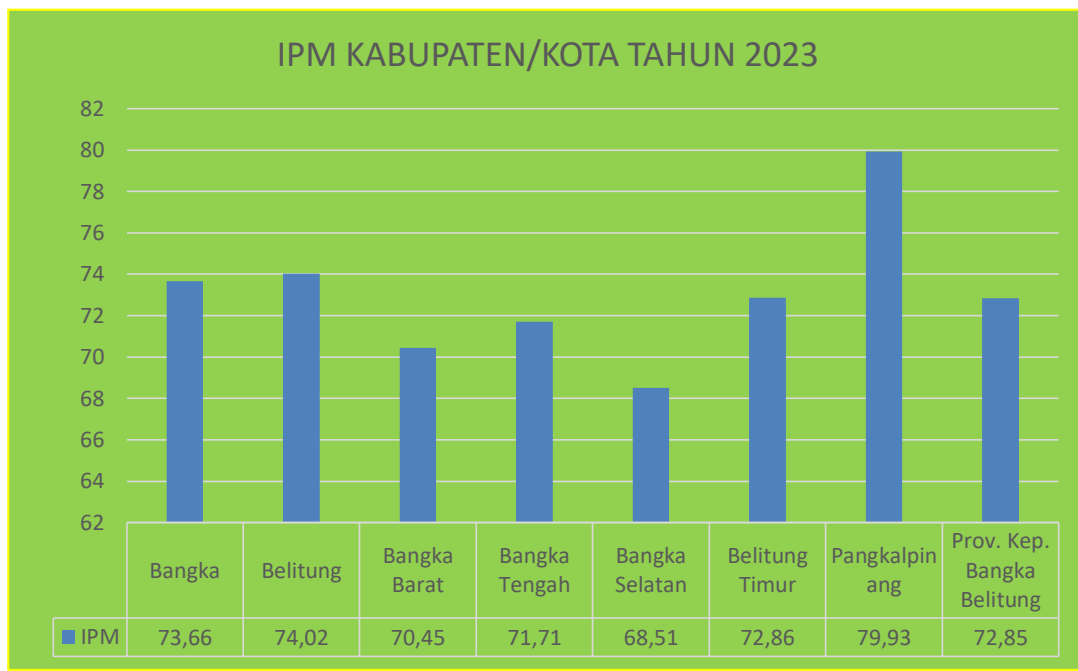
Grafik II.9
IPM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2023



Sumber Data BPS Tahun 2024

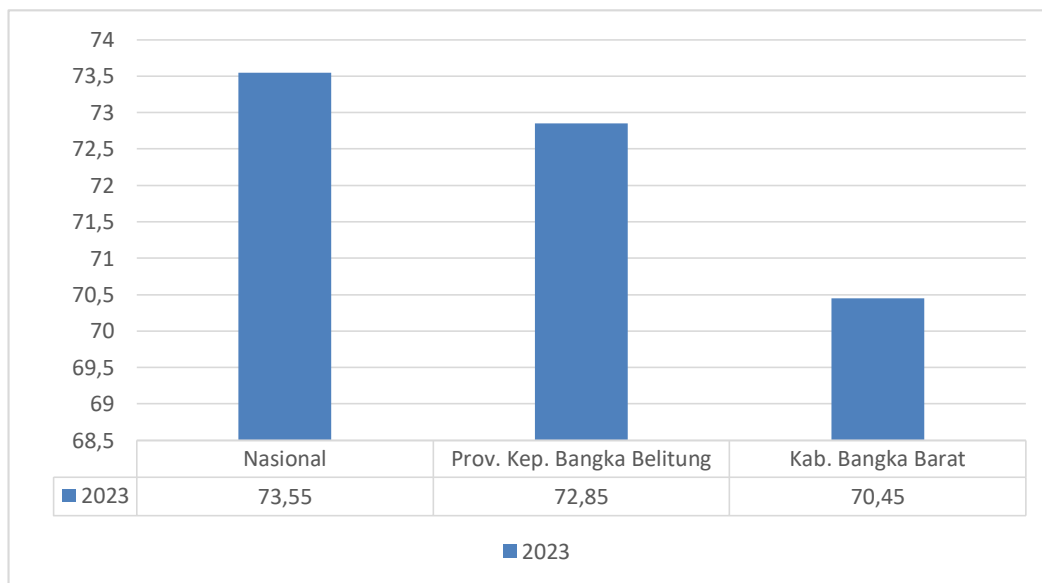
Dibandingkan dengan IPM kabupaten/kota lain di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Barat masih berada di peringkat ke-6 (enam) atau terendah kedua setelah Kabupaten Bangka Selatan. Sementara dibandingkan dengan IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan IPM Nasional, IPM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 cukup jauh tertinggal dengan perbedaan 2,40 poin dari IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan 3,10 poin dari IPM Nasional sebesar 73,55.

Grafik II.10
IPM Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia Tahun 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kep. Bangka Belitung 2024

Grafik II.11
IPM Nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Berubahnya status pembangunan manusia merupakan indikator untuk melihat perkembangan pembangunan manusia. Status pembangunan manusia berdasarkan capaian IPM diklasifikasikan menjadi empat kelompok yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang dan rendah. Sampai dengan Tahun 2023, status Pembangunan Manusia Kabupaten Bangka Barat masih masuk kedalam kelompok sedang ($60 \leq \text{IPM}$

≤70), sedangkan status Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional telah masuk di kelompok tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$).

Untuk melihat perkembangan IPM, tidak terlepas dari 3 komponen pembentuknya. Dilihat dari 3 komponen pembentuk IPM di Kabupaten Bangka Barat, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat (Umur Harapan Hidup), dimensi pengetahuan (Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah) dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang positif dan terus mengalami peningkatan.

Tabel II.15
Komponen IPM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 – 2023

Komponen IPM	2021	2022	2023
UHH (tahun)	70,08	70,25	70,43
HLS (tahun)	11,70	11,72	11,73
RLS (tahun)	7,44	7,46	7,47
Pengeluaran per kapita (ribu rupiah)	11.269	12.790	13.105
IPM	69,60	70,12	70,45

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2024
Ket : UHH (Umur Harapan Hidup)
HLS (Harapan Lama Sekolah)
RLS (Rata-rata Lama Sekolah)

Sementara jika dibandingkan antara Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional, ada 3 nilai komponen IPM Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2023 lebih rendah dari Nasional dan 4 komponen lebih rendah dari Provinsi.

Tabel II.16
Komponen IPM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023
serta perbandingan dengan Provinsi dan Nasional

Komponen IPM	UHH (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	Pengeluaran per kapita (ribu rupiah)	IPM
Indonesia	72,13	13,15	8,77	11.899	73,55
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	73,90	12,31	8,25	13.589	72,85
Kabupaten Bangka Barat	70,43	11,73	7,47	13.105	70,45

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2024
Ket : UHH (Umur Harapan Hidup)
HLS (Harapan Lama Sekolah)
RLS (Rata-rata Lama Sekolah)

Tujuan Strategis 4. “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”

Sasaran Strategis 4 **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik** dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. sebagaimana kita ketahui Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana tidak hanya efektif dan efisien, tetapi

juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan berkelas dunia.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, Tim Penilai Nasional (TPN) telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada reformasi birokrasi berdampak dan kolaboratif.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dalam rangka mencapai sasaran Terciptanya tata Kelola pemerintah digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif serta terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang professional. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas RB di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, kesimpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut: Indeks RB Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tahun 2023 adalah 67,72 dengan kategori “B”. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Penilaian	Bobot	Nilai
A	RB General	100	60,47
B	RB Tematik	20	7,25
C	Indeks RB	120	67,72

Sumber Kemenpan RB Tahun 2024

Hasil evaluasi tahun 2023 “tidak diperbandingkan” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan. Secara lengkap rincian hasil evaluasi RB, baik nilai, catatan, dan rekomendasi pada setiap indikator dapat diakses melalui <https://portalrb.menpan.go.id>.

Tabel II.17
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Cukup	<i>Baik</i>	100	<i>Baik</i>

Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tahun 2023 adalah 67,72 dengan kategori "B". Target Indeks Reformasi Birokrasi untuk tahun 2023 adalah Kategori Cukup (CC), apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 Kategori "B", maka realisasinya melampaui target dengan kategori "**Baik**", kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, perlu upaya berkelanjutan dari seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi birokrasi, agar upaya-upaya pelaksanaan reformasi birokrasi ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi. antar lain :

1. Reformasi Birokrasi General :

- a. Memastikan Kegiatan Utama Mandatory yang ada dalam Permenpanrb nomor 3 Tahun 2023 sebagai mandat nasional telah ditetapkan sebagai Kegiatan Utama di dalam Road Map Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah 2. Menetapkan target atas Kegiatan Utama berdasarkan pada baseline tahun sebelumnya dan target Reformasi Birokrasi nasional (Kepmenpanrb nomor 739 Tahun 2023) 3. Melakukan reuiu agar Rencana Aksi didukung dengan anggaran yang memadai dan memperhatikan efektifitas serta efisiensi;
- b. Agar segera ditetapkan Perkada tentang SOTK pasca penyederhanaan struktur organisasi agar dapat ditindaklanjuti ke tahap penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja segera ditetapkan menjadi peraturan.
- c.
 1. Menginstruksikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk memberikan pendampingan dan evaluasi terhadap perumusan sasaran indikator kinerja dan target kinerja baik di level strategis OPD. program sampai dengan kegiatan agar relevan dengan sasaran di atasnya. berorientasi pada outcome. spesifik. dapat diukur secara objektif serta memperhatikan capaian tahun lalu.
 2. Menyesuaikan sasaran program dan sasaran kegiatan agar berorientasi pada outcome. Menginstruksikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk memberikan pendampingan dan evaluasi terhadap perumusan sasaran. indikator kinerja dan target kinerja baik di level strategis OPD. Program sampai dengan kegiatan agar relevan dengan sasaran di atasnya. Berorientasi pada outcome spesifik dapat diukur secara objektif serta memperhatikan capaian tahun lalu.
 3. Menyesuaikan sasaran program dan sasaran kegiatan agar berorientasi pada outcome.
 4. Menerbitkan kebijakan yang mewajibkan seluruh OPD menetapkan sasaran program dan/atau sasaran kegiatan pada dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan.
 5. Merumuskan sasaran program dan mencantumkan pada dokumen perencanaan

6. Menerbitkan kebijakan yang mewajibkan seluruh OPD menetapkan sasaran program dan/atau sasaran kegiatan pada dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan.
7. Merumuskan sasaran kegiatan dan mencantumkan pada dokumen perencanaan.
8. Menginstruksikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk memberikan pendampingan dan evaluasi terhadap perumusan sasaran. Indikator kinerja dan target kinerja baik di level strategis OPD. Program sampai dengan kegiatan agar relevan dengan sasaran di atasnya. Berorientasi pada outcome spesifik dapat diukur secara objektif serta memperhatikan capaian tahun lalu.
9. Menyesuaikan sasaran program dan sasaran kegiatan agar berorientasi pada outcome.
10. Mencantumkan metode pengukuran/formulasi atas indikator kinerja pada dokumen perencanaan OPD.
11. Menyesuaikan target atas indikator kinerja pada dokumen perencanaan Tahun 2024 dengan memperhatikan capaian Tahun 2023.
12. Menyesuaikan target atas indikator kinerja pada dokumen perencanaan Tahun 2024 dengan rumusan persentase target di atas 0% dan satuan target spesifik menggambarkan target yang akan diukur
13. Menetapkan tim Zona Integritas dan dilampirkan terkait survei penilaian integritas oleh KPK untuk melihat bagaimana kondisi integritas organisasi.
14. Melaksanakan dan mendokumentasikan langkah konkrit yang menunjukkan bahwa pimpinan organisasi mengarahkan pegawai agar dapat bekerja selaras dengan kebijakan yang mendukung penciptaan suasana kerja yang kondusif
15. Mendokumentasikan langkah konkrit bahwa struktur organisasi dan tata laksana serta kebijakan pengelolaan dan pembinaan SDM telah dikomunikasikan dan dipahami oleh seluruh pihak
16. Mendokumentasikan atas implementasi kebijakan pengelolaan aset OPD. Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja organisasi, pemisahan fungsi dalam proses transaksi dan kejadian serta pencatatan atas transaksi dan kejadian
17. Menetapkan standar kompetensi yang jelas untuk seluruh jabatan dan posisi dalam organisasi yang diacu oleh setiap OPD
18. Menetapkan kebijakan terkait mekanisme hubungan kerja/tata cara kerjasama dengan instansi lain.
19. Menetapkan kebijakan yang mengatur terkait pendokumentasian secara manual dan elektronik (mencakup sistem informasi otomatis, pengumpulan dan penanganan data serta pengendalian umum dan pengendalian aplikasi) dan pendokumentasian pengendalian serta transaksi dan kejadian penting.
20. Memfasilitasi kegiatan pelatihan terkait SPIP dan MR untuk seluruh Tim Penilaian Mandiri (assessor Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah) maupun Tim Penjaminan Kualitas.
21. Menginstruksikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk bersama-sama dengan Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk menyesuaikan kebijakan manajemen risiko agar memenuhi komponen yang ada pada Peraturan Deputi Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko.
22. Melaksanakan sosialisasi terkait

- budaya risiko untuk meningkatkan kesadaran pemahaman terkait manajemen risiko/budaya sadar risiko
22. Menetapkan Surat Keputusan Bupati Bangka Barat tentang penetapan struktur pengelolaan risiko sesuai dengan Peraturan Deputi Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko
 23. Mengalokasikan anggaran terkait manajemen risiko. identifikasi dan analisis risiko penyusunan profil risiko implementasi RTP. Kegiatan monitoring dan reviu dalam rencana kerja/DPA/DIPA.
 24. Menginstruksikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk bersama-sama dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Barat agar menyusun Register Risiko Strategis Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sesuai dengan Peraturan Deputi Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko.
 25. Menginstruksikan Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk memberikan pendampingan kepada OPD yang masih belum menyelesaikan penyusunan Register Risiko untuk menyusun Register Risiko Strategis OPD dan Operasional termasuk Risiko Kecurangan yang ada pada masing-masing OPD sesuai dengan komponen yang diatur pada Peraturan Deputi Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko.
 26. Melaksanakan langkah konkrit bahwa keputusan pimpinan instansi maupun pimpinan unit kerja secara umum menggunakan informasi terkait risiko ditingkat operasional
 27. Melaksanakan analisis risiko sesuai dengan Perdep 4/2019 untuk beberapa OPD yang belum.
 28. Menyusun dan menetapkan peta risiko prioritas berdasarkan skala nilai risiko 30. Melakukan identifikasi atas pengendalian yang telah ada atas risiko prioritas.
 29. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) atas beberapa Risiko Prioritas OPD
 30. Mendorong realisasi pelaksanaan dan evaluasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) oleh OPD.
 31. Melaksanakan pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah oleh Inspektorat Daerah selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi audit. Reviu pemantauan evaluasi dan pengawasan lainnya.
 32. Memberikan pendampingan kepada OPD yang banyak menjalin kerja sama dan kemitraan untuk melakukan penyusunan Register Risiko Kemitraan termasuk Risiko Kecurangan terhadap semua kemitraan yang memiliki peran yang penting dalam organisasi.
 33. Mendorong realisasi pelaksanaan dan evaluasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) oleh OPD.
 34. Menetapkan pernyataan kebijakan antikorupsi .
 35. Memberikan pendampingan kepada OPD yang masih belum menyelesaikan penyusunan Register Risiko untuk menyusun Register Risiko Strategis OPD dan Operasional termasuk Risiko Kecurangan yang ada pada masing-masing OPD sesuai dengan komponen yang diatur pada Peraturan Deputi Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko. Memberikan pendampingan kepada OPD yang masih belum menyelesaikan penyusunan Register Risiko untuk Menyusun Register Risiko Strategis OPD dan Operasional termasuk Risiko Kecurangan yang ada pada masing-masing OPD sesuai

- dengan komponen yang diatur pada Peraturan Deputi Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko. 38. Mendokumentasikan langkah konkrit kegiatan pembelajaran anti korupsi kepada pihak internal yang dilakukan secara terjadwal dan terencana 39. Mengalokasikan anggaran, SDM, dan sarana prasana untuk aktivitas pengelolaan risiko korupsi.
36. Mendokumentasikan Langkah konkrit atas kegiatan pimpinan dalam mempertontonkan sikap antikorupsi dalam proses pengambilan keputusan sehari-hari dan melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan edukatif
 37. Mendokumentasikan bukti konkrit bahwa penyelenggaraan system whistleblowing internal berfungsi. Dan pemanfaatannya. Melakukan survei ke pihak internal dan eksternal terhadap kepercayaan dan pemanfaatan sistem pengaduan yang ada" REKOMEN AOI APIP: "
 - a. Menguatkan dukungan terhadap pelaksanaan tugas APIP melalui pemberian akses informasi dalam pengawasan intern, pemenuhan kebutuhan SDM, penyediaan anggaran yang memadai. untuk meningkatkan kompetensi SDM (diklat dan sertifikasi), penyediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi, serta pembiayaan operasional pengawasan intern.
 - b. Menguatkan dukungan terhadap pelaksanaan tugas APIP melalui pemberian akses informasi dalam pengawasan intern, pemenuhan kebutuhan SDM, penyediaan anggaran yang memadai untuk meningkatkan kompetensi SDM (diklat dan sertifikasi), penyediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi, serta pembiayaan operasional pengawasan intern.
 - c. APIP agar Menyusun dan menetapkan area pengawasan yang menysasar pada sasaran strategis/program prioritas daerah yang bersifat lintas sektoral, serta berbasis prioritas dan risiko.
 - d. Menginstruksikan kepada Inspektur Daerah untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM APIP melalui workshop/bimtek/diklat di bidang pengelolaan risiko, audit kinerja, dan keinvestigasian untuk mendukung kegiatan pengawasan, dan merealisasikan sertifikasi profesi antara lain CRMP, CRMO, CFrA, dsb.
 - e. Mendorong seluruh pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengelola kematangan risiko (risiko strategis, risiko operasional, risiko fraud, dan risiko yang bersifat lintas sektoral/kemitraan) untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh APIP Daerah dalam penyusunan PPBR; dan
 - f. Menginstruksikan kepada Inspektur Daerah untuk melakukan penilaian kematangan risiko atas register risiko/ profil risiko yang disusun oleh seluruh manajemen perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah (risiko strategis, risiko operasional, risiko fraud, dan risiko yang bersifat lintas sektoral/kemitraan).
 - g. APIP agar dapat menyusun rencana aksi atas substansi kegiatan konsultansi yang telah dilaksanakan disertai dengan monitoring terhadap implementasi rencana aksi tersebut dan pemanfaatannya oleh stakeholder terkait.
 - h. APIP agar melakukan optimalisasi pemantauan secara berkala terhadap implementasi QAIP sebagaimana telah diatur dalam pedoman AAPII maupun pedoman QAIP.
 - d. Agar mengusulkan hasil pembangunan unit kerja Zona Integritas kepada TPN.

1. Menyempurnakan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja pada perangkat daerah yang belum berorientasi hasil dan indikator kinerja yang belum SMART.
 2. Menyusun pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja untuk memastikan validitas dan kualitas capaian data yang dihasilkan pada tingkat Pemda dan Perangkat Daerah.
 3. Meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Kinerja dengan mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, dan memanfaatkan Laporan Kinerja tersebut untuk perbaikan perencanaan kinerja.
 4. Memanfaatkan hasil evaluasi AKIP internal sebagai bagian dari penilaian reward and punishment kepada PD, sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP.
 5. Perlu menyusun Arsitektur SPBE as-is dalam SIA
- e. Perlu melaksanakan Sosialisasi terkait hasil. Perlu Melaksanakan Sosialisasi Penjelasan terkait hasil, tingkat digitalisasi arsip dan Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan.
 - f. Penginputan bukti dukung yang lebih relevan dengan memperhatikan panduan IKK (Indeks Kualitas Kebijakan) mengenai bukti dukung setiap pertanyaan dan membuat indikator keberhasilan untuk bisa dilakukan evaluasi mengenai kebijakan tersebut.
 - g. Pelaksanaan Reformasi Hukum perlu menjadi baik dan ditingkatkan.
 - h. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat perlu membangun koordinasi antara walidata dan produsen data untuk menyampaikan rancangan kegiatan statistik sektoral ke BPS untuk mendapatkan rekomendasi dari BPS.
 - i. Tingkatkan pencapaian khususnya untuk pemanfaatan sistem pengadaan dan keterisian Formasi Jabfung Pengelola PBJ.
 - j.
 1. Menyusun SKJ secara lengkap (manajerial, sosiokultural, teknis) untuk jabatan selain JPT;
 2. Melaksanakan pemetaan kompetensi untuk seluruh pegawai;
 3. Melakukan pemetaan talenta hingga menghasilkan rencana suksesi;
 4. Menyusun strategi pengembangan kompetensi dan kinerja jangka panjang (5 tahun);
 5. Melakukan pengisian Administrator dan Pengawas dengan mempertimbangkan hasil assessment pegawai;
 6. Melakukan penajaman analisis permasalahan kinerja dan menyusun strategi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

k. Survei Penilaian Integritas rekomendasi :

1. Rekomendasi 1: Perbaikan mendasar terhadap upaya pencegahan korupsi yang sudah dilakukan dengan memastikan hal-hal berikut :
 - Menegakkan sanksi/hukuman terkait pelanggaran perdagangan pengaruh berdasarkan kode etik dan/atau regulasi internal lainnya secara adil dan konsisten.
 - Internalisasi larangan perdagangan pengaruh terhadap seluruh pegawai/pimpinan di instansi disertai contoh dari pimpinan.
 - Implementasi kebijakan regulasi, dan mekanisme penanganan benturan kepentingan di instansi.
 - Mengintensifkan upaya peningkatan integritas bagi calon pimpinan/pejabat di instansi dan deklarasi konflik kepentingan yang dimiliki sebelum menjabat dan secara tahunan.
 - Penguatan mekanisme pengawasan internal untuk mendeteksi perdagangan pengaruh sebelum, saat, dan setelah pimpinan menduduki jabatan.;
2. Rekomendasi 2 : Mempertahankan, menginovasikan, dan memonitor secara berkala upaya yang telah dilakukan, hingga tidak ada lagi pegawai yang menerima suap/gratifikasi dari pengguna layanan di instansi.;
3. Rekomendasi 3 : Perbaikan mendasar terhadap pencegahan penyalahgunaan anggaran dan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi yang sudah dilakukan dengan memastikan hal-hal berikut: (1) Menegakkan sanksi/hukuman terkait pelanggaran penggunaan anggaran dan fasilitas kantor berdasarkan kode etik dan/atau regulasi internal lainnya secara adil dan konsisten. (2) Internalisasi larangan penggunaan anggaran dan fasilitas kantor terhadap seluruh pegawai/pimpinan di instansi disertai contoh dari pimpinan. (3) Mengintensifkan pengawasan internal untuk mendeteksi penyalahgunaan anggaran dan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi.;
4. Rekomendasi 4 : Perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap upaya pencegahan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang sudah dilakukan dan memastikan hal-hal berikut: (1) Menyusun proses dan alur dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Memperkuat peran dan independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Membangun mekanisme probity audit berkala untuk mendeteksi adanya masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa. (4) Memastikan dan memperkuat vendor management system. (5) Penegakan pengelolaan benturan kepentingan dalam proses pengadaan. (6) Implementasi proses pengadaan dan pembayaran secara elektronik yang sudah disiapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.;
5. Rekomendasi 5 : Perbaikan mendasar dan menyeluruh dalam proses promosi dan mutasi pegawai, dengan memastikan adanya penyusunan dan penegakan aturan mengenai sistem merit dan pengelolaan benturan kepentingan dalam pengelolaan SDM diseluruh tingkat jabatan di instansi.;
6. Rekomendasi 6 : Perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap upaya pencegahan korupsi yang sudah dilakukan dengan memastikan hal-hal berikut: (1) Memasukkan larangan dan sanksi terkait pelaksanaan tugas dalam kode etik di instansi dan/atau regulasi internal lainnya. (2) Internalisasi melalui pelatihan dan komunikasi rutin dengan pegawai pimpinan di instansi untuk menciptakan perilaku baru dalam melaksanakan tugas. (3) Menyusun

kebijakan, regulasi, dan mekanisme penanganan benturan kepentingan di instansi. (4) Menyusun program/kegiatan bagi calon pimpinan/pejabat di instansi untuk meningkatkan integritas dan deklarasi konflik kepentingan yang dimiliki sebelum menjabat.

Membangun mekanisme pengawasan internal untuk mendeteksi intervensi dan benturan kepentingan sebelum, saat, dan setelah pimpinan menduduki jabatan.;

7. Rekomendasi 7 : Mempertahankan upaya internalisasi kesadaran dan perilaku untuk melaporkan LHKPN, meskipun sebagian besar responden menganggap tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN tinggi.;
8. Rekomendasi 8 : Optimalisasi/peningkatan upaya penyediaan informasi yang memadai dalam pelaksanaan tugas yang mencakup setidaknya lima informasi, yaitu jenis tugas/layanan, alur tugas/layanan, besaran tarif (jika ada), waktu pelaksanaan, hingga waktu penyelesaian tugas/layanan.;
9. Rekomendasi 9 : Perbaiki mendasar terhadap upaya peningkatan prosedur layanan yang sudah dilakukan dengan memastikan berbagai hal berikut: (1) Proses bisnis yang sederhana dan tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan. (2) Optimalisasi penggunaan teknologi dalam pengambilan keputusan terkait dengan layanan yang diberikan. (3) Evaluasi dan memotret sudut pandang pengguna layanan terkait dengan prosedur dan kejelasan layanan.

1. Mendorong pelaksanaan SKM pada UPP yang belum melaksanakan.

2. Reformasi Birokrasi Tematik :

- a. Realisasi Investasi Rekomendasinya : Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi 2. Menyempurnakan Rencana aksi yang menunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur pentahelix lain 3. Memastikan penetapan sasaran menjawab permasalahan utama pada tema terkait.
- b. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting Rekomendasi : Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi 2. Menyempurnakan Rencana aksi yang menunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur pentahelix lain 3. Memastikan penetapan sasaran menjawab permasalahan utama pada tema terkait.

Tabel II.18
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Terwujudnya Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif
Tahun 2023 terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2023	TARGET AKHIR RPJMD	(%)	STATUS CAPAIAN
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Baik	Baik	100	Optimis Tercapai

Jika dilihat dari target pada indikator indeks reformasi birokrasi di akhir Tahun RPJMD Kabupaten Bangka Barat "Baik", maka dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi di Tahun 2023 "Optimis Tercapai" target akhir RPJMD.

Tujuan Strategis 5. “Meningkatnya kemampuan Keuangan Daerah”

Tujuan ke-5 adalah Meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang diukur dari indikator Indeks Kapasitas Fiskal Daerah.

Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Sedangkan Peta Kapasitas Fiskal Daerah yaitu merupakan gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio Kapasitas Fiskal Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, indeks/rasio kapasitas fiskal daerah Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2023 sebesar 1,420 atau pada kategori “Sedang”.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 dengan indeks kapasitas fiskal daerah Kabupaten Bangka Barat 1,733 terjadi penurunan sebesar 0,313 poin atau jika dikonversi ke dalam persentase yaitu 18,06%. Sementara jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 dengan nilai sebesar 0,26, maka telah mencapai 546,15 persen, maka target akhir RPJMD untuk indeks kapasitas fiskal daerah Kabupaten Bangka Barat optimis tercapai.

Grafik II.12
Indeks kapasitas fiskal daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2023



Dibandingkan dengan indeks kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota lain di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Barat berada di peringkat ke-3 (tiga) atau setelah Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Bangka. Sementara dibandingkan dengan indeks kapasitas fiskal daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, indeks kapasitas fiskal daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 tertinggal 0,335 poin dari indeks kapasitas fiskal daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan rentang rasio kapasitas fiskal daerah Provinsi dengan Kabupaten/Kota, dimana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan indeks sebesar 1,755 masuk pada kategori kapasitas fiskal daerah “rendah” sedangkan Kabupaten Bangka Barat dengan indeks 1,420 masuk pada kategori kapasitas fiskal daerah “sedang”.

Grafik II.13
Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota
di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia Tahun 2022



Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Sasaran Stratis 1.1 "Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah"

Sasaran "Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah" terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu Pertumbuhan PDRB Kategori Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pertumbuhan PDRB Kategori Lapangan Usaha Industri Pengolahan, Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB, dan Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa Terhadap PDRB yang seluruhnya dihitung dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB).

Capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut:

Tabel II.19
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	%	STATUS CAPAIAN
Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHB)	%	6,00	10,71	178,50	Sangat Baik
Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industry pengolahan (ADHB)	%	5,39	2,58	47,86	Kurang
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	%	2,40	2,55	106,25	Sangat Baik
Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADH)	%	18,77	25,63	136,54	Sangat Baik

Pencapaian sasaran "Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah" diukur dari (empat) indikator yaitu Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHB), Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industry pengolahan (ADHB), Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB), Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADH). Berdasarkan tabel di atas, pada Tahun 2023 3 (tiga) indikator Sasaran dapat dicapai melebihi target yang ditetapkan dengan kategori "Baik Sekali" , dan (satu) indikator dengan kategori "kurang" dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Sasaran 1.1.1 " Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHB)".

Realisasi Indikator Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2023 sebesar 10,71% dan jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 sebesar 6,00%, maka tercapai 178,50 % dengan status capaian "Sangat Baik".

Indikator Kontribusi Sektor Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dihitung dari penjumlahan dari distribusi PDRB (ADHB) pada 3 (tiga) lapangan usaha yaitu:

Tabel II.20
"Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHB)"

1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian
a. Tanaman Pangan
b. Tanaman Hortikultura
c. Tanaman Perkebunan
d. Peternakan
e. Jasa Pertanian dan Perburuan
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu
3 Perikanan

Kabupaten Bangka Barat sebagai Daerah kepulauan tentu memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Produksi Perikanan di Kabupaten Bangka Barat dibedakan atas perikanan tangkap dan perikanan Budidaya, perikanan Tangkap dibedakan dengan perikanan tangkap laut dan perikanan tangkap perairan umum, sedangkan perikanan Budidaya diklasifikasikan atas Budidaya laut Tambak kolam aramba dan sawah. Berikut produksi Perikanan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023:

Tabel II.21
Daftar Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

Jenis Produksi	Mentok	Simpang Teritip	Jebus	Parittiga	Kelapa	Tempilang	Total
Budidaya							
Pembesaran Budidaya (Kg)	362.867,90	64.678,00	12.524,00	229.700,00	16.720,00	93.224,00	779.713,90
Pembenihan Ikan (Ekor)	153.505	0	165.000	6.760.000	0	140.250	7.218.755
Ikan Hias (Ekor)	662	0	0	0	0	0	662
Tangkap							

	10490,61	6771,33	4508,37	6540,52	3903,21	6971,02	39185,06
--	----------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

Sumber: DPK Bangka Barat Tahun 2024

Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 dengan realisasi sebesar 12,50 %, maka Indikator Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Tahun 2023 mengalami penurunan 1,79 %. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum sektor usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami perlambatan di Kabupaten Bangka Barat, hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain kondisi iklim ekstrim yang mengganggu produksi tanam serta resesi ekonomi global yang mempengaruhi perekonomian Nasional dan daerah. Meskipun hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah membuat semisal Kebijakan Pemerintah yang memihak kepada petani dan nelayan seperti pemberian bantuan yang mendorong usaha pertanian dan perikanan untuk meningkatkan hasil produksinya, dan kebijakan pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (Tahura) yang menjadi kewenangan Kabupaten yang memberikan kontribusi bukan hanya secara ekologis namun juga secara ekonomis dengan pemberdayaan masyarakat disekitar Tahura.

Grafik II.14
Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
terhadap PDB/PDRB (ADHB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2023 (persentase)



Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2023 Kabupaten Bangka Barat lebih rendah sebesar 1,24 persen dibanding Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Indikator Sasaran 1.1.2 ”Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industry pengolahan”

Realisasi Indikator Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industry pengolahan Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2023 sebesar 2,58 % dan jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 sebesar 5,39%, maka tercapai 47,86 % dengan status capaian “Kurang”.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 dengan realisasi sebesar 7,56 %, maka Indikator Pertumbuhan lapangan industry pengolahan terhadap PDRB di Tahun 2023 menurun sebesar 4,98 %. Hal ini menunjukkan bahwa sektor usaha Industri Pengolahan mengalami penurunan di Kabupaten Bangka Barat, disebabkan Industri pengolahan yang terbesar di Kabupaten Bangka Barat yaitu Industri

pengolahan Timah mengalami penurunan pasokan bahan baku olahan biji timah / *tin raw material*, hal ini disebabkan bahan baku yang tersedia di alam mulai berkurang serta regulasi yang semakin ketat terkait penambangan biji timah, serta kondisi perekonomian yang melambat diakibatkan kondisi ekonomi Global, regional dan Nasional yang mempengaruhi perekonomian di daerah.

Berikut data Industri pengolahan yang ada di Kabupaten Bangka Barat :

Tabel II.22

DATA INDUSTRI PENGOLAHAN DI KABUPATEN BANGKA BARAT

NO.	NAMA PERUSAHAAN	NAMA PEMILIK	KLASIFIKASI INDUSTRI	ALAMAT USAHA	TAHUN BERDIRI	JENIS USAHA	KAPASITAS PRODUKSI DESAIN	KAPASITAS AKTUAL
1	PT. SAWINDO KENCANA	JAP HARTONO	INDUSTRI BESAR	DESA TEMPILANG, KEC. TEMPILANG, KAB. BANGKA BARAT	2000	CPO DAN KERNEL/ AGRO INDUSTRI	45 TON/JAM	43 TON/JAM
2	PT. BUMI PERMAI LESTARI PKS BUKIT PERAK	PT. BUMI PERMAI LESTARI PKS BUKIT PERAK	INDUSTRI BESAR	DESA KACUNG, KEC. KELAPA, KAB. BANGKA BARAT	1996	CPO DAN KERNEL	60 TON/JAM	57.3 TON/JAM
3	PT. MP. LEIDONG WEST INDONESIA	SINAR MAS GRUP	INDUSTRI BESAR	DESA TERENTANG, KEC. KELAPA, KAB. BANGKA BARAT	2001	CPO DAN KERNEL	60 TON/JAM	60 TON/JAM
4	PT. GUNUNG SAWIT BINA LESTARI	KARLI BOENJAMIN	INDUSTRI BESAR	DUSUN TERABIK, DESA BELO LAUT, KEC. MUNTOK, KAB. BANGKA BARAT	2003	CPO DAN KERNEL	80 TON/JAM	73.61 TON/JAM
5	PT. TIMAH TBK	PT. TIMAH, TBK.	INDUSTRI BESAR	JL. RAYA PELTIM, KEC. MUNTOK, KAB. BANGKA BARAT		TIMAH BATANGAN	BELUM ADA DATA	30000 TON/TH
6	PT. TIMAH NUSANTARA	PT. TIMAH NUSANTARA	INDUSTRI BESAR	JL. TEMPIULANG RAYA KM 1, KELURAHAN KELAPA KEC. KELAPA, BANGKA BARAT	-	TIMAH BATANGAN	7200 MT/TAHUN	1539 MT PADA TAHUN 2021
7	PT. ENERGI KARYA PERSADA	KENCANA AGRI GROUP	INDUSTRI BESAR	DESA TEMPILANG, KEC. TEMPILANG, KAB. BANGKA BARAT	2018	PENGADAAN LISTRIK	6 MW	4.5-5 MW

Sumber: DKUP Kabupaten Bangka Barat

Berikut data jenis Industri Kecil (UMKM) Pengolahan yang ada di Kabupaten Bangka Barat :

Tabel II.23

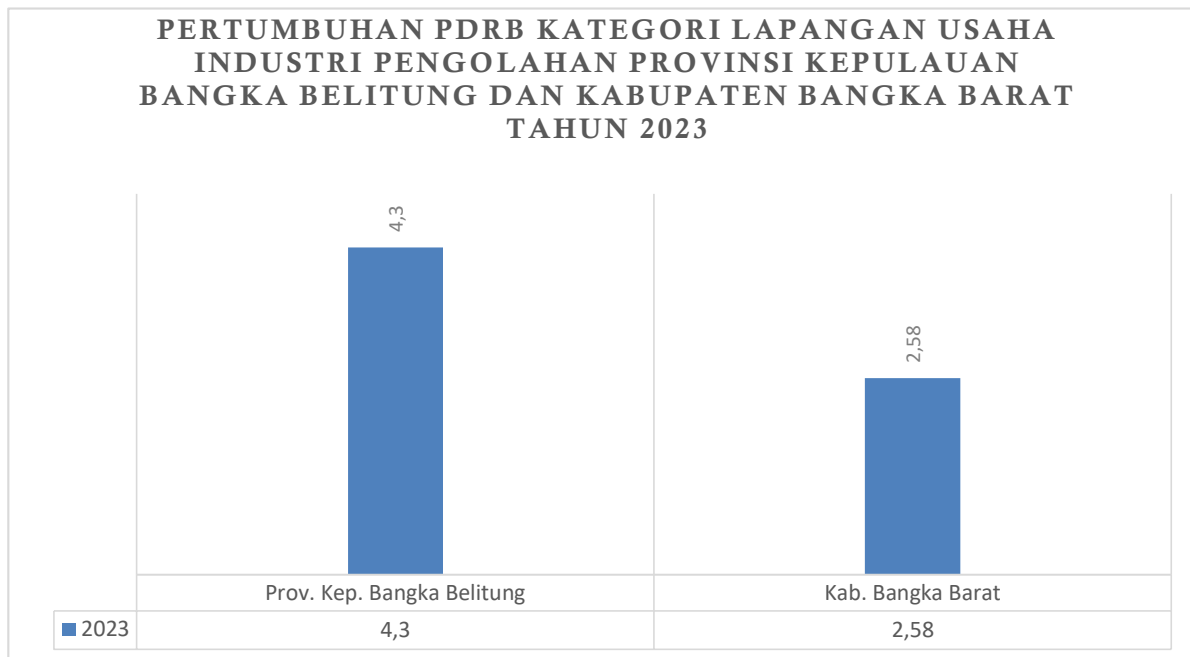
**DATA JENIS INDUSTRI KECIL
KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2023**

NO	DAFTAR DIREKTORI	JUMLAH						
		MENTOK	SIMP. TERITIP	JEBUS	PARIT TIGA	KELAPA	TEMPILANG	TOTAL
1	Kerajinan Sandang	66	62	26	27	59	48	288
2	Pengolahan Makanan	530	230	295	327	384	269	2035
3	Pengolahan Makanan dari kedelai (Tempe/Tahu)	18	3	19	34	7	13	94
4	Pengrajin Genteng & Batako	14	4	9	6	13	10	56
5	Pertukangan Kayu	21	45	20	11	44	38	179
6	Air Minum Isi Ulang	36	13	8	16	18	16	107
7	Kerajinan	50	63	55	22	235	51	476
TOTAL		735	420	432	443	760	445	3235

Sumber DKUP Kabupaten Bangka Barat

Pertumbuhan lapangan industri pengolahan di Tahun 2023 Kabupaten Bangka Barat lebih rendah sebesar 1,72 persen dibandingkan dengan Pertumbuhan lapangan industri pengolahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4,30 persen.

Grafik II.15
Kontribusi Lapangan Usaha Sektor Industri Pengolahan terhadap PDB/PDRB (ADHB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 (persentase)



Indikator Sasaran 1.1.3 “Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (ADHB)”

Sasaran “Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah” terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu Pertumbuhan PDRB Kategori Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pertumbuhan PDRB Kategori Lapangan Usaha Industri Pengolahan, Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB, dan Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa Terhadap PDRB yang seluruhnya dihitung dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB).

PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya

Capaian nilai kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dari tabel di atas pada tahun 2023 adalah sebesar 2.55 % dengan kata lain capaian sekitar 126.25 % atau dengan kategori “Sangat Baik” dari target yang telah ditetapkan sebesar 2,40 %. Dari capaian ini dapat diartikan bahwa untuk kunjungan wisatawan di Kabupaten Bangka Barat berangsur-angsur membaik setelah pandemic Covid-19 menerjang. Nilai kontribusi sektor pariwisata dapat dilihat dari Nilai dari Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan usaha pada 2 (dua) jenis lapangan usaha yaitu transportasi dan pergudangan serta sector penyediaan akomodasi dan makan minum yang dihitung dari jumlah tingkat hunian akomodasi, data kunjungan wisatawan serta data pengeluaran wisatawan.

Kontribusi sektor pariwisata naik 0.23 % dari capaian sebesar 2,32 % di tahun 2022 menjadi 2,55 % di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa geliat pariwisata di Kabupaten Bangka Belitung sudah mulai meningkat pasca pandemic Covid-19 di tahun 2020 -2021 yang membuat nilai kunjungan menjadi menurun dengan sangat signifikan. Tentunya hal ini merupakan sebuah upaya yang perlu diapresiasi oleh pemerintah Daerah dimana Pemerintah Daerah tidak tinggal diam untuk terus melakukan upaya dan strategi meningkatkan kunjungan wisata ke Kabupaten Bangka Barat melalui berbagai penyelenggaraan event, pelaksanaan pemasaran yang optimal, hingga pembinaan tata kelola pariwisata.

Namun jika dilihat dari persentase kontribusi sektor pariwisata selama kurun waktu 3 (tiga) tahun kebelakang cenderung mengalami kenaikan walaupun di tahun 2021 yang lalu menurun dikarenakan Pandemi Covid-19. Walaupun demikian, Pemerintah Daerah tidaklah tinggal diam setelah wabah Pandemi Covid-19 menyerang, dengan melakukan berbagai inovasi serta strategi untuk kembali meningkatkan kunjungan wisata ke Kabupaten Bangka Barat yang mana di tahun 2023 capaiannya mengalami peningkatan.

Tabel II.24
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB ADHB
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2023 (Persentase)

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023
1.	Transportas dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	0,93	0,90	0,96	1,07
2.	Penyediaan akomodasi dan makan minum/ <i>Accomodation and food service activities</i>	1,40	1,32	1,36	1,48
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)		2,33	2,22	2,32	2,55

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2023

Bila dilihat berdasarkan lapangan usaha di bawah ini, maka dapat disimpulkan bahwa perekonomian Kabupaten Bangka Barat tahun 2023 ditopang oleh Pertanian, Kehutanan, perikanan serta industri pengolahan. Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Kep. Bangka Belitung , Bangka Barat menjadi pusat perdagangan di Pulau Bangka. Sebagian besar kantor pusat penjualan mobil dan motor berlokasi di Kabupaten Bangka Barat. Begitu juga dengan toko grosir berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari yang banyak tersebar di Kabupaten Bangka Barat. Sehingga wajar apabila lapangan usaha Perdagangan besar dan eceran memberi kontribusi terbesar pada PDRB Kabupaten Bangka Barat. PDRB ADHB Kabupaten Bangka Barat tahun 2023 adalah **17,691,86** miliar rupiah, meningkat dibandingkan tahun 2022 yang nilainya **15 444,44** miliar rupiah

Capaian Kontribusi sektor pariwisata jika di bandingkan dengan target akhir RPJMD di Tahun 2026 sebesar 2,43%. dengan capaian tahun 2023 sebesar 2,55% atau dengan persentase sebesar 104,93 %. Melihat hal ini dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sangat optimis tercapai dalam meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB sesuai dengan target yang telah ditetapkan di akhir RPJMD. Melalui kolaborasi serta pemasaran yang optimal niscaya di tahun 2026 mendatang target RPJMD untuk Kontribusi Sektor Pariwisata dapat tercapai dan melebihi target yang telah ditetapkan.

Upaya ini optimis tercapai jika melihat komitmen dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat dalam menggali potensi sector pariwisata yang ada di Kabupaten Bangka Barat yang dilakukan dengan melibatkan stakeholder yang bergelut dalam dunia pariwisata dalam upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Bangka Barat. Kemudian dengan adanya kolaborasi antara lintas sector baik peran pemerintah, dunia usaha, media, serta masyarakat diharapkan dapat menjadi sebuah arah yang sangat baik dalam memajukan sektor pariwisata daerah.

Indikator Sasaran 1.1.4 “Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB”

Indikator Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB dihitung dari penjumlahan dari distribusi PDRB (ADHB) pada 9 (sembilan) lapangan usaha yaitu Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, *Real Estat*, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, serta Jasa Lainnya.

Realisasi Indikator Kontribusi Sektor Perdagangan Dan Jasa Terhadap PDRB Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2023 sebesar 25,63% dan jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 sebesar 18,77%, maka tercapai 136,54 % dengan status capaian “Sangat Baik”. Dari 9 (sembilan) lapangan usaha pembentuk Sektor Perdagangan dan Jasa, penyumbang kontribusi tertinggi adalah pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 15,06 % dan yang terendah adalah lapangan usaha jasa perusahaan dengan kontribusinya sebesar 0,15%. Secara keseluruhan, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor merupakan kontributor tertinggi kedua pada PDRB ADHB Kabupaten Bangka Barat setelah lapangan usaha industri pengolahan.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 dengan realisasi sebesar 25,01%, maka Indikator Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB di Tahun 2023 meningkat 0,62%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum sektor usaha perdagangan dan jasa memiliki peluang yang cukup baik di Kabupaten Bangka Barat dengan perkembangan yang positif. Dari 9 (sembilan) lapangan usaha PDRB pembentuk sektor ini, 8 (delapan) lapangan usaha distribusinya mengalami peningkatan yaitu lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi, lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi, lapangan usaha Real Estat, serta lapangan usaha Jasa Perusahaan. lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, lapangan usaha Jasa Pendidikan serta lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan lapangan usaha Jasa Lainnya sedangkan lapangan usaha Jasa Perusahaan tidak mengalami perubahan.

Untuk rincian Kontribusi Lapangan Usaha Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB ADHB dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

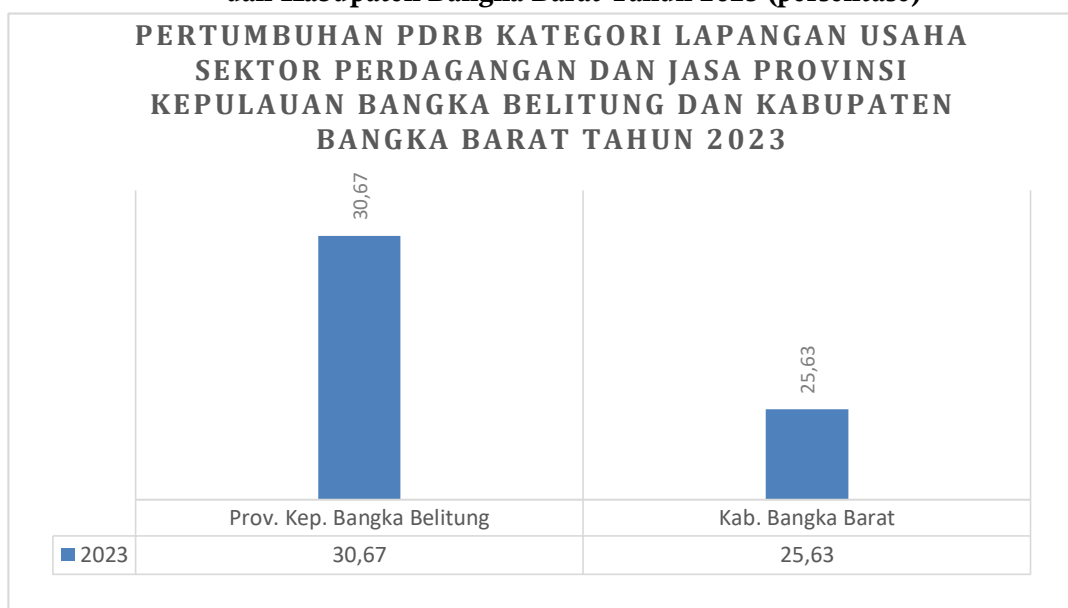
Tabel II.25
Kontribusi Lapangan Usaha Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB ADHB
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2023 (Persentase)

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023
1.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,11	13,28	14,38	15,06
2.	Informasi dan Komunikasi	0,45	0,42	0,43	0,46
3.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,47	0,45	0,49	0,53
4.	Real Estat	2,33	2,14	2,20	2,28
5.	Jasa Perusahaan	0,15	0,14	0,15	0,15
6.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,16	4,71	4,35	4,41
7.	Jasa Pendidikan	2,11	1,92	1,85	1,88
8.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,91	0,88	0,85	0,86
9.	Jasa lainnya	0,34	0,31	0,31	0,33
Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa Terhadap PDRB		26,03	24,25	25,01	25,63

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2024

Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 dengan realisasi sebesar 25,01 %, maka Indikator Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB di Tahun 2023 meningkat 0,62 %. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum sektor usaha perdagangan dan jasa memiliki peluang yang cukup baik di Kabupaten Bangka Barat dengan perkembangan yang positif. Dari 9 (sembilan) lapangan usaha PDRB pembentuk sektor ini, 8 (delapan) lapangan usaha distribusinya mengalami peningkatan yaitu lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi, lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi, lapangan usaha Real Estat, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, lapangan usaha Jasa Pendidikan serta lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, lapangan usaha Jasa Lainnya. sedangkan pada lapangan usaha Jasa Perusahaan tidak mengalami perubahan.

Grafik II.16
Kontribusi Lapangan Usaha Sektor Perdagangan dan Jasa
terhadap PDB/PDRB (ADHB) Nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 (persentase)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa Terhadap PDRB Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2023 (25,63%) lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (30,67%) . Ini menunjukkan bahwa sektor Perdagangan dan Jasa di Kabupaten Bangka Barat masih belum secara maksimal berkontribusi dalam menopang perekonomian di Kabupaten Bangka Barat. Sampai dengan saat ini, Kabupaten Bangka Barat masih sangat bergantung pada Lapangan Usaha Industri Pengolahan dengan distribusi terhadap PDRB (ADHB) di Tahun 2023 sebesar 43,38%.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD di Tahun 2026 sebesar 28,56%, Indikator Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa Terhadap PDRB baru mencapai 89,74% dengan status capaian “Optimis Tercapai”. Dengan semakin membaiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19 baik di lingkup daerah, regional, nasional maupun dunia, diharapkan target akhir RPJMD optimis dapat dicapai.

Berdasarkan letak strategis Kabupaten Bangka Barat sebagai jalur lalu lintas laut antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Provinsi Sumatera Selatan, maka sangat berpotensi menunjang sektor perdagangan dan jasa. Selain itu dengan dikembangkannya Pelabuhan Tanjung Ular serta pengusulan sebagai Kawasan Industri Tanjung Ular akan menjadi potensi yang sangat besar di berbagai bidang terutama industri, industri hilir, perdagangan, perekonomian, serta perhubungan transportasi darat dan laut. Sampai dengan saat ini upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat adalah dengan secepatnya melakukan operasionalisasi Pelabuhan Tanjung Ular dengan melibatkan pihak swasta dan BUMN serta pengajuan Kawasan Industri Terpadu Pelabuhan Tanjung Ular ke Kementerian terkait.

Tabel II.26
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan usaha
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2023 (Miliar Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	1 777,85	1 923,30	2 163,70	2 399 ,96
2.	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	1 007,12	1 345,49	1 332,66	1 242 ,99
3.	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	5 761,64	6 956,87	7 483,26	7 675, 16
4.	Pengadaan Listrik dan gas/ <i>Electricity and Gas</i>	11,60	12,52	12,27	12, 84
5.	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang / <i>Water Supply, Sewarage, Waste Management and Remediation Activities</i>	1,17	1,23	1,28	1, 31
6.	Konstruksi/ <i>Construction</i>	1050,24	1106,14	1186,65	1 315, 44
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Reatail Trade, repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	1892,64	2049,36	2410,50	2 663, 86
8.	Transportas dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	124,39	139,01	160,36	189, 49
9.	Penyediaan akomodasi dan makan minum/ <i>Accomodation and food service activities</i>	187,60	203,20	228,70	262, 08
10.	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and communication</i>	61,02	65,15	71,48	80, 92

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023
11.	Jasa keuangan dan asuransi/ <i>financial and insurance activities</i>	313,19	330,37	368,92	93,79
12.	Real estat/ <i>Real estate activities</i>	20,37	21,81	24,30	404,12
13.	Jasa perusahaan/ <i>business activities</i>	692,13	727,36	728,46	26,83
14.	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib/ <i>Pubic administration and defence, compulsory social security</i>	282,51	296,81	310,77	780,58
15.	Jasa pendidikan/ <i>Education</i>	122,49	135,84	142,03	332,44
16.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	45,90	47,56	51,90	151,35
17.	Jasa lainnya/ <i>pther services activities</i>	13 414,98	15 431,57	16 759,68	58,62
Produk Domestik Regional Bruto / <i>Gross Regional Domestic bruto</i>		14 157,20	13 416,40	15 444,44	17 691,86

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2024

Bila dilihat berdasarkan lapangan usaha, maka dapat disimpulkan bahwa perekonomian Kabupaten Bangka Barat tahun 2023 ditopang oleh Pertanian, Kehutanan, perikanan serta industri pengolahan, begitu juga dengan toko grosir berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari yang banyak tersebar di Kabupaten Bangka Barat. Sehingga wajar apabila lapangan usaha Perdagangan besar dan eceran memberi kontribusi terbesar pada PDRB Kabupaten Bangka Barat. PDRB ADHB Kabupaten Bangka Barat tahun 2023 adalah **17 691,86** miliar rupiah, meningkat dibandingkan tahun 2022 yang nilainya **15 444,44** miliar rupiah.

Tabel II.27
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Tahun 2023
Terhadap Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	%	STATUS CAPAIAN
Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	Persentase	12,50	10,71	85,68	Menurun
Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	Persentase	5,70	2,58	45,26	Menurun
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	Persentase	2,32	2,55	109,91	Meningkat
Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	Persentase	25,01	25,63	102,47	Meningkat

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan dengan Tahun 2022 ada 2 (dua) indikator Sasaran dengan status capaian "Meningkat" dan 2 (dua) indikator dengan status capaian "Menurun",

Tabel II.28
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Tahun 2023
terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TA. 2023	TARGET AKHIR RPJMD	(%)	STATUS CAPAIAN
Pertumbuhan PDRB Kategori Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	Persentase	10,71	7,50	142,80	Optimis Tercapai
Pertumbuhan PDRB Kategori Lapangan Usaha Industri Pengolahan (ADHB)	Persentase	2,58	4,64	55,60	Perlu Upaya
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (ADHB)	Persentase	2,55	2,43	104,93	Optimis Tercapai
Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa Terhadap PDRB (ADHB)	Persentase	25,63	28,56	89,74	Optimis Tercapai

Program dalam APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 yang berkaitan dengan sasaran antara lain :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
3. Program Penyuluhan Pertanian.
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
5. Program Perizinan Usaha Pertanian.
6. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
7. Program Pengelolaan Sumber daya Air (SDA);
8. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
9. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
10. Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan;
11. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;
12. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
13. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
14. Program Pengembangan UMKM;
15. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
16. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
17. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
18. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
19. Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
20. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri nasional;
21. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
22. Program Pengelolaan Pelayaran;
23. Program Peningkatan Daya Daya Tarik Destinasi pariwisata;
24. Program Pemasaran Pariwisata;
25. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi Kreatif;
26. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemamfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;

27. Program pengembangan kebudayaan;
28. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
29. Program Pembinaan Sejarah;
30. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
31. Program Pengelolaan Permuseuman;
32. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;
33. Program Konservasi Sumber daya alam Hayati dan Ekosistimnya;
34. Program Peningkatan sarana Distribusi Perdagangan;
35. Program Stabilitas Harga barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
36. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
37. Program Pengembangan Ekspor;
38. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
39. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.

Tabel II.29
Analisis Program sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah
Tahun 2023

No	Program Prioritas	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
	1	2	3	4=3/2*100
	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	36.320.195.980,00	30.627.362.959,00	84,15
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	665.175.300,00	223.354.750,00	33,57
2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.130.690.000,00	1.102.423.446,00	97,5
3.	Program Penyuluhan Pertanian	352.754.800,00	312.987.645,00	88,72
4.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	264.065.100,00	220.695.000,00	83,57
5.	Program Perizinan Usaha Pertanian	4.500.000,00	4.500.000,00	100
6.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	324.209.400,00	303.872.550,00	93,72
7.	Program Pengelolaan Sumber daya Air (SDA)	2.658.558.428,00	2.540.117.450,00	95,54
8.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	382.130.000,00	381.517.833,00	99,92
9.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	320.401.000,00	313.756.900,00	97,92
10.	Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan	56.800.000,00	56.800.000,00	100
11.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	660.000,00	0,00	-
12.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	300.000,00	200.000,00	66,66
13.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);	34.300.000,00	0,00	-
14.	Program Pengembangan UMKM	429.439.000,00	410.690.062,00	95,63
15.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	224.120.000,00	211.554.676,00	94,39
16.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	35.610.000,00	33.165.998,00	93,13
17.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	4.757.000,00	4.039.250,00	84,91
18.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	13.619.178.713,00	10.134.934.168,00	74,41
19.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	15.550.000,00	15.550.000,00	100

No	Program Prioritas	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
20.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri nasional	15.050.000,00	10.900.000,00	72,42
21.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	44.912.800,00	43.131.800,00	96,03
22.	Program Pengelolaan Pelayaran	400.700.000,00	399.231.000,00	99,63
23.	Program Peningkatan Daya Daya Tarik Destinasi pariwisata	4.416.690.090,00	4.326.178.028,00	97,95
24.	Program Pemasaran Pariwisata	2.821.966.400,00	2.674.248.320,00	94,76
25.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi Kreatif	1.303.682.999,00	1.036.600.000,00	79,51
26.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemamfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	42.675.000,00	11.475.000,00	26,88
27.	Program pengembangan kebudayaan	953.433.600,00	810.903.980,00	85,05
28.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	155.691.000,00	124.309.650,00	79,84
29.	Program Pembinaan Sejarah	137.075.550,00	134.539.000,00	98,14
30.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	484.833.000,00	484.331.800,00	99,89
31.	Program Pengelolaan Permuseuman	317.290.000,00	305.005.000,00	96,12
32.	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	19.300.000,00	19.174.500,00	99,34
33.	Program Konservasi Sumber daya alam Hayati dan Ekosistimnya	485.630.000,00	353.021.412,00	72,69
34.	Program Peningkatan sarana Distribusi Perdagangan	3.397.605.000,00	2.918.311.270,00	85,89
35.	Program Stabilitas Harga barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	492.694.000,00	478.624.000,00	97,14
36.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	3.250.000,00	3.250.000,00	100
37.	Program Pengembangan Ekspor	123.100.000,00	73.162.510,00	59,43
38.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	24.895.000,00	21.634.000,00	86,9
39.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	156.522.800,00	129.171.961,00	82,52

Tabel II.30
Efisiensi Penggunaan Sumber daya

No.	Sasaran Strategis	% Rata-Rata Capaian Kinerja Per Sasaran	% Penyerapan Anggaran Per Sasaran	Efisiensi
	1	2	3	4 = 2-3
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	117,28	84,32	Efektif

Sasaran Strategis 1.2 "Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah"

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, bahwa pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), Investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dan orang yang melakukan investasi adalah disebut investor atau penanam modal. Begitu juga proses penanaman modal di wilayah Kabupaten Bangka Barat, dimana berdasarkan misi pertama pada RPJMD Periode 2021-2026

yakni “**Memajukan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat**” dan tujuan “Kabupaten Bangka Barat sebagai daerah yang didominasi oleh industri pengolahan sebagai *leading sector* dan mampu menggerakkan sektor lain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan” serta sasaran Meningkatnya jumlah investasi/penanaman modal di daerah yang setiap tahun diukur pencapaian kinerjanya.

Kabupaten Bangka Barat memiliki banyak potensi yang dimanfaatkan untuk menarik investasi baik sektor pertambangan, komoditas, industri manufaktur berbasis sumber daya alam, industry perikanan, industry perkebunan dan pariwisata. Tetapi beberapa sektor baru sebatas potensi yang belum tergarap secara maksimal karena masih kurangnya dukungan, promosi dan sebagainya.

Beberapa potensi yang telah menunjang peningkatan potensi investasi di Kabupaten Bangka Barat meliputi industri pertambangan dengan dukungan manufakturnya, industri perkebunan yang didukung oleh industri manufakturnya, dan industry perikanan dengan basis tambak udang ditambah dengan pelaku usaha lainnya dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 23.131 orang .

Ketiga industri plus pelaku usaha UMK ini merupakan tulang punggung dalam menopang investasi di Kabupaten Bangka Barat dalam memenuhi target realisasi investasi yang telah ditetapkan. Dengan dukungan kepada beberapa industri ini diharapkan target yang telah ditetapkan bisa terpenuhi sekaligus terus meningkatkan dukungan terhadap potensi-potensi lain yang belum dapat dimaksimalkan.

Masih banyaknya kendala teknis yang dihadapi oleh perusahaan baik pelaku usaha lama maupun baru dalam melakukan investasi adalah faktor utama dalam upaya untuk terus meningkatkan investasi di Kabupaten Bangka Barat. Salah satu kendala teknis adalah masih rendahnya pemahaman terkait aturan dalam menjalankan kewajiban berusaha seperti kewajiban menjaga lingkungan, kewajiban dalam pemenuhan perizinan dalam berusaha, kewajiban retribusi daerah dan kewajiban laporan kegiatan penanaman modal. Kendala – kendala tersebut dapat teratasi dengan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha agar dapat terus dapat berkembang dengan baik dan dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dalam investasinya.

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan untuk membantu setiap pelaku usaha untuk memahami setiap seluk beluk tentang perizinan berusaha, kewajiban dalam melakukan usaha, penyelesaian dalam setiap permasalahan berusaha, kewajiban retribusi daerah dan aturan-aturan teknis yang harus dipenuhi. Dengan setiap pelaku usaha mengetahui tentang hal tersebut maka dapat membantu mereka untuk terus berkembang dan berinvestasi di Kabupaten Bangka Barat yang bermuara pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Dalam beberapa tahun kebelakang Kabupaten Bangka Barat selalu dapat melebihi target yang telah ditetapkan baik target nasional maupun target yang telah ditetapkan oleh RPJMD/RENSTRA.

Tabel II.31
Target dan capaian investasi di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2023

Tahun	Target RENSTRA (Triliun Rp)	Capaian (Triliun Rp)
2020	0,417	0,417
2021	0,532	1,183
2022	0,805	1,403
2023	0,917	2,143

Capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut:

Tabel II.32
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah
Tahun 2023 terhadap Perjanjian Kerja

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI (Rp)	TARGET (Rp)	%	STATUS CAPAIAN
Pertumbuhan Realisasi Penanaman Modal (PMA dan PMDN)	Milyar Rupiah	2.143 M	917 M	233	Baik Sekali

Pada Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya jumlah investasi/penanaman modal di daerah Tahun 2023 Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) per 31 Desember 2023 nilai realisasi investasi sementara sebesar Rp. 2.143.579.406.028,00,- laporan realisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal untuk Triwulan IV batas waktu untuk menyampaikan laporan tahun 2023 sampai dengan bulan maret tahun berikutnya. Nilai realisasi ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dikarenakan para pelaku usaha rata-rata sudah melaporkan usahanya sehingga pencapaian indikator kinerja nya “tercapai” dan dapat dikatakan sangat berhasil.

Tabel II.33
Laporan Kegiatan Penanaman Modal Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

JENIS USAHA	STATUS PERUSAHAAN	NAMA PERUSAHAAN	JENIS INVESTASI	JUMLAH TOTAL (Rp)
Investasi Sektor Primer	PMDN	Tanaman Pangan dan Perkebunan		
		PT. SWARNA NUSA SENTOSA	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	6.798.257.398,00
		PT. BUMIPERMAI LESTARI	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	62.379.588.480,00
		PT. MASKAPAI PERKEBUNAN LEIDONG WEST INDONESIA	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	728.003.893,00
		Perikanan		
		PT BANGKA BUDIDAYA LESTARI	Pembesaran Crustacea Air Payau	150.000.000,00
		PT SAMUDRA BERKAT SEJAHTERA	Pembesaran Crustacea Air Payau	9.000.000.000,00
		CV PUTRA PUTRI SANUSI SEJAHTERAH	Pembesaran Crustacea Air Payau	200.000.000,00
		PT SURI TANI PEMUKA	Pembenihan Ikan Laut	13.520.637.695,00

JENIS USAHA	STATUS PERUSAHAAN	NAMA PERUSAHAAN	JENIS INVESTASI	JUMLAH TOTAL (Rp)	
		PT AGRO BAHARI NUSANTARA	Pembesaran Crustacea Air Payau	9.640.980.551,00	
		PT BUDI AGRI SEJAHTERA	Pembesaran Crustacea Air Payau	5.500.000.000,00	
		Pertambangan			
		PT ARSED INDONESIA	Pertambangan Bijih Timah	31.500.000.000,00	
		PT MITRA SUKSES GLOBALINDO	Pertambangan Bijih Timah	123.885.210.000,00	
		PT NUSANTARA ARTA MINING	Pertambangan Bijih Timah	13.753.910.000,00	
		PT TIMAH NUSANTARA	Pertambangan Bijih Timah	1.225.000.000,00	
		PT TIMAH NUSANTARA SATU	Pertambangan Bijih Timah	18.000.000,00	
		PT TIMAH NUSANTARA DUA	Pertambangan Bijih Timah	18.000.000,00	
		PT TIMAH NUSANTARA TIGA	Pertambangan Bijih Timah	18.000.000,00	
		PT JEBUS UTAMA	Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya	16.241.798.100,00	
		PT KIM HIN UTAMA	Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya	39.502.700,00	
		PT NUSANTARA ARTA MEGA SEJAHTERA	Pertambangan Bijih Timah	80.105.378.000,00	
		PT TIMAH	Pertambangan Bijih Timah	353.918.343.904,00	
		PT PRIMA TIMAH UTAMA SENTOSA	Pertambangan Bijih Timah	4.389.442.000,00	
		JUMLAH INVESTASI SEKTOR PRIMER PMDN			
		PMA	Tanaman pangan & perkebunan		
			PT. GSBL	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	14.250.232.657,00
			PT TATA HAMPARAN EKA PERSADA	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	297.179.100,00
			pertambangan		
			PT MITRA SUKSES GLOBALINDO	Pertambangan Bijih Timah	387.147.900,00
	JUMLAH INVESTASI SEKTOR PRIMER PMA				
	Investasi Sektor Sekunder	PMDN	Industri Makanan		
			PT DELI SAWIT LESTARI	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	5.000.000,00
			PT BUMIPERMAI LESTARI	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	3.107.463.525,00
PT MASKAPAI PERKEBUNAN LEIDONG WEST INDONESIA			Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	2.468.778.221,00	
Industri logam, mesin dan elektronik					
PT TIMAH NUSANTARA			Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	4.000.000,00	
PT TIMAH			Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	1.192.541.115.042,00	
Industri lainnya					

JENIS USAHA	STATUS PERUSAHAAN	NAMA PERUSAHAAN	JENIS INVESTASI	JUMLAH TOTAL (Rp)
		PT BAKTI TIMAH MEDIKA	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	8.206.704.173,00
		JUMLAH INVESTASI SEKTOR SEKUNDER PMDN		
	PMA	1. Industri Makanan		
		PT GUNUNGSAWIT BINALESTARI	INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL)	6.618.037.914,00
		PT BANGKA INDAH CEMERLANG	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit	63.179.610.000,00
		JUMLAH INVESTASI SEKTOR SEKUNDER PMA		
Investasi Sektor Tersier	PMDN	Listrik, Gas, dan Air		
		PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA	TRANSMISI TENAGA LISTRIK	78.802.192.794,00
		Konstruksi		
		PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. WIJAYA KARYA	KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI	16.000.000.000,00
		Perdagangan dan reparasi		
		PT ASIA SURYA PERKASA	Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru	350.000.000,00
		PT TUNAS DWIPA MATRA	Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru	300.000.000,00
		PT DELI SAWIT LESTARI	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati	1.000.000,00
		PT RAJATRA OETARU SENTOSA	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara	898.760.000,00
		PT BILLITON ENERGI SEJAHTERA	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara	20.000.000,00
		CV ANUGRAH REYZATAMA GROUP	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG	1.000.000.000,00
PT INDOMARCO PRISMATAMA	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket	959.683.691,00		
	Transportasi, gudang, komunikasi			

JENIS USAHA	STATUS PERUSAHAAN	NAMA PERUSAHAAN	JENIS INVESTASI	JUMLAH TOTAL (Rp)
		PT INTI BANGUN SEJAHTERA	KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI	960.000.000,00
		PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA	KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI	1.608.422.000,00
		Jasa lainnya		
		PT BHARAKA SARANA JAYA	AKTIVITAS PENYEDIAAN TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU	86.700.000,00
		JUMLAH INVESTASI SEKTOR TERSIER PMDN		
		Listrik, Gas, dan Air		
		PT MEGAPOWER MAKMUR	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	400.000.000,00
		Perdagangan dan reparasi		
	PMA	PT DAYA INDAH INTISAR	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket	1.132.019.759,00
		Transportasi, gudang, komunikasi		
		PT SUPRA PRIMATAMA NUSANTARA	Internet Service Provider	16.965.306.531,00
		JUMLAH INVESTASI SEKTOR TERSIER PMA		
JUMLAH KESELURUHAN REALISASI INVESTASI TAHUN 2023				2.143.579.406.028,00

Berdasarkan LKPM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2022, dari Rp. 1.403.739.200.387 menjadi Rp. 2.143.579.406.028 dengan kenaikan sebesar Rp. 739.840.205.641 atau mengalami kenaikan sebesar 153 %.

Tabel II.34
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah
Tahun 2023 Terhadap Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	%	STATUS CAPAIAN
Pertumbuhan Realisasi Penanaman Modal	Milyar Rupiah	1.403 M	2.143 M	153	Meningkat

Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja Peningkatan jumlah investasi dalam satu tahun (PMA dan PMDN) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 sudah tercapai. Berdasarkan hasil pengukuran **sasaran pertama misi 1** pada indikator kinerja tersebut, realisasi capaian Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp. 739.840.205.641 Berdasarkan skala capaian kinerja dikategorikan **“Meningkat”**.

Faktor pendorong terhadap peningkatan capaian indikator Peningkatan jumlah investasi dalam satu tahun (PMA dan PMDN) disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

- a. Meningkatnya kesadaran manajemen perusahaan untuk tertib administrasi terkait realisasi capaian target investasi dan terdapat 1 proyek strategis nasional yang ada di BUMN PT. Timah Tbk yang menyumbang lebih dari 50% realisasi investasi Kabupaten Bangka Barat;
- b. Membuat peraturan tentang kebijakan penanaman modal, terutama mengenai fasilitas, layanan dan jaminan bagi investor jika melakukan investasi di Kabupaten Bangka Barat;
- c. Giat pelaku usaha dalam melaporkan perkembangan usaha secara berkala;
- d. Melakukan sub system pengawasan dengan “jemput bola” kepada pelaku usaha yang kurang tertib;
- e. Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam;
- f. Bekerjasama dengan OPD teknis terkait perbaikan infrastruktur yang menunjang investasi;
- g. Membuat peta investasi yang akan menjadi referensi bagi calon investor untuk dapat menanamkan investasinya di Kabupaten Bangka Barat;
- h. Menetapkan SOP untuk perizinan terkait Penanaman Modal seperti izin lokasi, izin pemanfaatan ruang, dan izin prinsip penanaman modal.

Tabel II.35
Capaian Indikator Kinerja Tujuan
Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah
Tahun 2023 terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI	TARGET AKHIR RPJMD	(%)	STATUS CAPAIAN
Pertumbuhan Realisasi Penanaman Modal (PMA dan PMDN)	Milyar Rupiah	2.143 M	1.253 M	171	Optimis Tercapai

Capaian kinerja indikator Peningkatan jumlah investasi dalam satu tahun (PMA dan PMDN) Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2023 jika dibandingkan dengan target capaian di akhir Tahun RPJMD, sudah dapat dikatakan sangat baik/berhasil.

Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bangka Barat guna meningkatkan pencapaian jumlah investasi dalam satu tahun untuk tahun-tahun mendatang, sesuai dengan yang disampaikan Organisasi Perangkat Daerah yang menangani teknis bahwa :

- a. Masih perlunya pendekatan yang masif untuk memberikan informasi menyeluruh terkait pelaporan realisasi LKPM kepada setiap perusahaan yang berkewajiban untuk melaporkan;
- b. Menggali lebih banyak potensi daerah di wilayah Kabupaten Bangka Barat yang belum dikelola dengan baik, sehingga ke depannya dapat menarik para investor;
- c. Melakukan pendekatan kepada pelaku usaha/perusahaan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku;
- d. Mengoptimalkan secara berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam yang ada;
- e. Disusunnya Perda Kemudahan berInvestasi / Insetif bagi pelaku usaha di Kabupaten Bangka Barat;
- f. Melengkapi infrastruktur dan sarana prasarana penunjang yang dibutuhkan dalam mengambil peluang banyak investasi dari investor di luar Kabupaten Bangka Barat .

Dalam pencapaian sasaran Meningkatkan jumlah investasi/penanaman modal di daerah secara umum dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi penanaman modal di daerah

Kabupaten Bangka Barat, serta oleh perangkat daerah lain dalam hal peningkatan sarana penunjang investasi di daerah seperti infrastruktur. Program yang dilaksanakan dalam pencapaian sasaran adalah :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
2. Program Pelayanan Penanaman Modal.
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
4. Program Promosi Penanaman Modal.
5. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Tabel II.36
Analisis Program sasaran Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah Tahun 2023

No	Program Prioritas	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
	1	2	3	4=3/2*100
	Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah	1.647.997.000,00	1.240.178.463,00	75,25
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	83.300.000,00	82.861.500,00	99,47
2.	Program Pelayanan Penanaman Modal	86.660.000,00	78.261.500,00	90,3
3.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	406.000.000,00	279.359.000,00	68,8
4.	Program Promosi Penanaman Modal	297.679.000,00	138.129.000,00	46,4
5.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	774.358.000,00	661.567.463,00	85,43

Tabel II.37
Efisiensi Penggunaan Sumber daya
Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Sasaran Kinerja (%)	Efektifitas
1	Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah	75,25	234	Efektif

Berdasarkan tabel di atas maka dibandingkan dengan kinerja yang dicapai di tahun 2023 maka realisasi anggaran sebesar 75,25 % dibanding dengan realisasi kinerja sebesar 234 % menunjukkan adanya efektifitas dan efisiensi penggunaan dana sebesar 24,75 %.

Sasaran Strategis 1.3 “Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah”

Capaian indikator kinerja Sasaran “Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah” beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut:

Tabel II.38
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah Tahun 2023 Terhadap Perjanjian Kinerja

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Konektivitas	Nilai	0,72	0,70	0,72	102,85	Baik Sekali
Indeks Bangunan Gedung	Kategori	Sedang	Sedang	Baik	100	Baik Sekali

Pencapaian sasaran ” Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah” diukur dari 2 (dua) indikator yaitu, Indeks Indeks Konektivitas dan Indeks Bangunan Gedung. Berdasarkan tabel di atas, pada Tahun 2023 indikator Sasaran dapat dicapai melebihi target yang ditetapkan dengan kategori ”Baik Sekali” Secara rinci, capaian masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Sasaran 1.3.1 “Indeks Konektifitas”

Pada tahun 2023 capaian Indeks konektivitas sebesar 103% dengan status tercapai. Untuk indikator indeks konektivitas dari target 0,70 dapat di realisasikan sebesar 0,72 atau melebihi target. Terjadi Penambahan indeks Konektivitas jalan dari tahun 2022 ke tahun 2023 yaitu sebesar 0,0026. Nilai konektivitas jalan pada tahun 2022 yaitu 0,7181 dibulatkan menjadi 0,72 dan tahun 2023 yaitu 0,7207 dibulatkan menjadi 0,72. Penambahan jaringan jalan ada pada Desa Tebing dan Air Bulin, untuk Desa Tebing ada peningkatan nilai indeks konektivitas 0,75 dari sebelumnya 0,67 dan untuk Desa Air Bulin 0,80 dari sebelumnya 0,75. Kenaikkan ini karena ada dukungan Dana untuk Program Penyelenggaraan Jalan sebesar Rp. 61.710.733.800 yang bersumber dari APBD murni, DID dan DAK. Untuk menunjang kenaikan indeks konektivitas ini, Bidang Bina Marga melaksanakan pembuatan 1 Review DED Jalan yang merupakan persyaratan dalam pembuatan jaringan jalan baru, yakni Review DED Jalan Air Limau – Tanjung Ular. Berikut Tabel Nilai Indeks Konektivitas perdesa pada tahun 2023 :

Tabel II.39
Nilai Indeks Konektivitas perdesa di Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2023

No	Kecamatan	Status	Desa/Kelurahan	Jaringan Jalan	Simpul	Konektifitas
1	KELAPA	DESA	KAYUARANG	1	2	0,50
2			MANCUNG	2	3	0,67
3			SINAR SARI	2	3	0,67
4		KELURAHAN	KELAPA	4	5	0,80
5		DESA	BERUAS	3	4	0,75
6			PUSUK	2	3	0,67
7			TEBING	3	4	0,75
8			AIR BULIN	4	5	0,80
9			DENDANG	3	4	0,75
10			KACUNG	3	4	0,75
11			TERENTANG	2	3	0,67
12			TUGANG	2	3	0,67
13			TUIK	2	3	0,67

No	Kecamatan	Status	Desa/Kelurahan	Jaringan Jalan	Simpul	Konektivitas
14			PANGKAL BERAS	2	3	0,67
15	TEMPILANG		TANJUNGNUIR	3	4	0,75
16			BENTENG KUTA	2	3	0,67
17			AIR LINTANG	3	4	0,75
18			SINAR SURYA	2	3	0,67
19			TEMPILANG	4	5	0,80
20			BUYAN KELUMBI	2	3	0,67
21			SANGKU	3	4	0,75
22			PENYAMPAK	3	4	0,75
23			SIMPANG YUL	3	4	0,75
24	MENTOK		BELOLAUT	3	4	0,75
25			AIR BELO	2	3	0,67
26		KELURAHAN	SUNGAI BARU	4	5	0,80
27			SUNGAI DAENG	4	5	0,80
28			TANJUNG	4	5	0,80
29		DESA	AIR PUTIH	3	3	1,00
30			AIRLIMAU	4	4	1,00
31	SIMPANG TERITIP		KUNDI	3	4	0,75
32			SIMPANG TIGA	3	4	0,75
33			MAYANG	3	4	0,75
34			RAMBAT	1	2	0,50
35			SIMPANG GONG	2	3	0,67
36			PELANGAS	4	5	0,80
37			BERANG	3	4	0,75
38			IBUL	4	5	0,80
39			PERADONG	2	3	0,67
40			AIR NYATOH	1	2	0,50
41			PANGEK	1	2	0,50
42			AIR MENDUYUNG	1	2	0,50
43			BUKIT TERAK	2	3	0,67
44	JEBUS		JEBUS	3	4	0,75
45			TUMBAK PETAR	4	5	0,80
46			LIMBUNG	2	3	0,67
47			RUKAM	2	3	0,67
48			RANGGI/ASAM	2	3	0,67
49			SUNGAI BULUH	2	3	0,67
50			KETAP	2	3	0,67
51			MISLAK	2	3	0,67

No	Kecamatan	Status	Desa/Kelurahan	Jaringan Jalan	Simpul	Konektifitas
52			AIR KUANG	2	3	0,67
53			PEBUAR	1	2	0,50
54			SINAR MANIK	2	3	0,67
55	PARITTIGA		BAKIT	1	2	0,50
56			SEMULUT	2	3	0,67
57			KAPIT	2	3	0,67
58			TELAK	2	3	0,67
59			SEKAR BIRU	3	4	0,75
60			PUPUT	4	5	0,80
61			AIR GANTANG	2	3	0,67
62			KELABAT	3	4	0,75
63			CUPAT	2	3	0,67
64			TELUK LIMAU	1	2	0,50
				160	222	0,72

KETERANGAN	
	Nasional
	provinsi
	kabupaten
	Nas + Kab

Sumber DPUPR Kab. Bangka Barat

Dari Tabel tersebut dapat dijelaskan pada tahun 2022, dari 6 Kecamatan terdapat kategori Konektifitas terendah $\leq 0,50$ ada 8 Desa dengan rincian Kecamatan Kelapa satu Desa yaitu desa Kayu Arang, Kecamatan Sp. Teritip empat Desa, yaitu Desa Rambat, desa Air Nyatoh, desa Pangek dan desa Air Menduyung Kecamatan Jebus satu Desa yaitu desa Pebuar, dan Kecamatan Parittiga dua Desa, yaitu desa Bakit dan desa Teluk Limau sedangkan konektifitas yang tertinggi $\geq 1,00$ ada di Kecamatan Muntok dengan dua Desa, yaitu desa Air Putih dan desa Air Limau. Adapun kendala dan permasalahan dalam meningkatkan Indeks Konektifitas, antara lain :

1. Terkendala pembebasan lahan masyarakat terkait biaya dan dokumen pendukung lahan yang akan dibebaskan;
2. Biaya yang dibutuhkan untuk pembukaan lahan dan pembangunan jalan membutuhkan biaya yang besar;
3. Sumber daya yang ada lebih diprioritaskan terhadap pemeliharaan jalan yang telah ada daripada pembangunan jalan baru yang berdampak pula terhadap konektifitas jalan.

Upaya-upaya yang akan diterapkan untuk meningkatkan pencapaian sasaran ini antara lain:

1. Mengoptimalkan wadah aspirasi seperti Reses dari legislatif maupun Musrembang dari masyarakat sebagai masukan guna merencanakan program peningkatan konektifitas wilayah;

2. Menyusun DED pembangunan Jalan baru antar Desa yang siap direalisasikan jika anggaran tersedia;
3. Mengurus Perizinan pada ruas jalan yang status lahannya terkendala Hutan Lindung/ Hutan Produksi.
4. Mengajukan anggaran Penyelenggaraan Jalan kepada Pemerintah Pusat.

Indikator sasaran 1.3.2 “Indeks Bangunan Gedung”

Pada tahun 2023 capaian Indeks Bangunan gedung sebesar 100% dengan status tercapai. Untuk indikator Indeks Bangunan gedung dari target sedang dapat di realisasikan ketinggian baik. Adapun persentase kondisi baik bangunan gedung pada tahun 2023 adalah sebesar 87,44% atau dengan kategori nilai indeks bangunan gedung “baik”. Kategori sedang ini merupakan range dibawah 30%. Tahun 2023 ini ada peningkatan nilai persentase kondisi baik bangunan gedung dibandingkan tahun 2022.

Berikut tabel Data Gedung Negara Kabupaten Bangka Barat tahun 2023 :

Tabel II.40
Berikut tabel Data Gedung Negara Kabupaten Bangka Barat tahun 2023

No	Nama Gedung	Tingkat Kerusakan Gedung				Jumlah Keseluruhan Gedung	Persentase Kondisi Baik
		Baik	Ringan (≤30%)	Sedang (30% - 45%)	Berat (>45%)		
1	Sekretariat DPRD	18				18	100.00%
2	Rumah Dinas Bupati	9				9	100.00%
3	Rumah Dinas Wakil Bupati	8				8	100.00%
4	Bagian Sosial dan Kemasyarakatan	1				1	100.00%
5	Bagian Umum Perlengkapan dan Protokoler	39			2	41	95.12%
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	38				38	100.00%
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	14				14	100.00%
8	Dinas Kesehatan	13				13	100.00%
9	RSUD Sejiran Setason dan BLUD	70	8			78	89.74%
10	Puskesmas Muntok	31				31	100.00%
11	Puskesmas Simpang Teritip	25	1		1	27	92.59%
12	Puskesmas Kundi	13				13	100.00%
13	Puskesmas Jebus	20	2		4	26	76.92%
14	Puskesmas Puput	13			1	14	92.86%
15	Puskesmas Sekar Biru	17			1	18	94.44%
16	Puskesmas Kelapa	39			1	40	97.50%
17	Puskesmas Tempilang	20	9			29	68.97%
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9	1			10	90.00%
19	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	27				27	100.00%
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10	1			11	90.91%
21	Dinas Pertanian dan Pangan	66	5			71	92.96%
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	11	2		2	15	73.33%
23	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	43				43	100.00%
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12				12	100.00%
25	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan PPTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	22			1	23	95.65%
26	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	11				11	100.00%
27	Inspektorat	10			2	12	83.33%

No	Nama Gedung	Tingkat Kerusakan Gedung				Jumlah Keseluruhan Gedung	Persentase Kondisi Baik
		Baik	Ringan (≤30%)	Sedang (30% - 45%)	Berat (>45%)		
28	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	66	3		2	71	92.96%
29	Dinas Lingkungan Hidup	79			25	104	75.96%
30	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	91	8			99	91.92%
31	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	21				21	100.00%
32	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana	7	2			9	77.78%
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	25				25	100.00%
34	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9				9	100.00%
35	Dinas Komunikasi dan Informatika	89			1	90	98.89%
36	Kecamatan Muntok	18	3			21	85.71%
37	Kecamatan Kelapa	28				28	100.00%
38	Kecamatan Jebus	17	1			18	94.44%
39	Kecamatan Tempilang	19				19	100.00%
40	Kecamatan Simpang Teritip	14	2		1	17	82.35%
41	Kecamatan Parittiga	9				9	100.00%
42	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	48				48	100.00%
	a. UPT Dinas Kecamatan Muntok	382	70		15	467	81.80%
	b. UPT Dinas Kecamatan Simpang Teritip	297	34		15	346	85.84%
	c. UPT Dinas Kecamatan Jebus	244	30		28	302	80.79%
	d. UPT Dinas Kecamatan Parittiga	264	27		16	307	85.99%
	e. UPT Dinas Kecamatan Kelapa	346	46		10	402	86.07%
	f. UPT Dinas Kecamatan Tempilang	319	19		29	367	86.92%
	Total	3,001	274	0	157	3,432	87.44%
	Kategori Indeks Bangunan Gedung	Baik					

Sumber DPUPR Kabupaten Bangka Barat

Dari Tabel tersebut dapat dijelaskan pada tahun 2023, dari seluruh jumlah Bangunan Gedung sebanyak 3.432 Bangunan, Gedung dengan kondisi baik atau tidak ada kerusakan sejumlah Bangunan Gedung yang tersebar di 23 OPD/Unit Kerja, dengan persentase sebesar 87,44 %. Sedangkan tingkat kerusakan bangunan yang rusak ringan sebesar 7,98%, tingkat kerusakan bangunan sedang 0,0%, dan tingkat kerusakan bangunan rusak berat sebesar 4,57 %.

Tabel II.41
Skala Indeks Kondisi Bangunan

Zona	Indeks Kondisi	Kriteria Kondisi	Uraian kondisi	Tindakan Penanganan
1	86-100	Baik	Tidak terlihat kerusakan, beberapa kekurangan mungkin ada namun sangat sedikit atau belum terlihat. Hanya terjadi deteriorasi atau kerusakan kecil	Tindakan segera masih belum diperlukan
	70-85	Sedang		
2	55-69	Cukup	Mulai terjadi deteriorasi atau kerusakan namun tidak mempengaruhi fungsi struktur bangunan secara keseluruhan. Terjadi deteriorasi atau kerusakan tetapi bangunan masih dapat berfungsi namun tingkat kenyamanan tidak terpenuhi dengan baik	Perlu dibuat analisis ekonomi alternatif perbaikan untuk menetapkan tindakan yang sesuai/tepat dalam menangani masalah tersebut
	40-54	Buruk		
3	16-39	Sangat Buruk	Terjadi kerusakan yang cukup kritis sehingga fungsi bangunan terganggu. Kerusakan parah dan	Evaluasi secara detail diperlukan untuk

Zona	Indeks Kondisi	Kriteria Kondisi	Uraian kondisi	Tindakan Penanganan
	0-15	Runtuh	bangunan hampir tidak berfungsi Komponen utama bangunan terjadi keruntuhan, bangunan tidak dapat berfungsi lagi	menentukan tindakan repair, rehabilitasi dan rekonstruksi, selain diperlukan evaluasi untuk keamanan

Sehingga indeks bangunan diperoleh sebesar **87,44%** atau dengan kategori nilai indeks bangunan gedung “**Baik**”.

Ada beberapa faktor penghambat kondisi bangunan gedung yang dapat mempengaruhi performa dan keberlanjutan bangunan. Beberapa faktor tersebut meliputi:

1. Usia Bangunan:

Bangunan yang sudah tua cenderung mengalami penurunan kualitas dan performa. Proses penuaan ini dapat menyebabkan kerusakan struktural, kebocoran, dan masalah lainnya.

2. Ketidaksempurnaan Desain:

Desain bangunan yang kurang baik atau tidak memadai dapat menjadi faktor penghambat. Kesalahan desain struktural, tata letak, atau pemilihan material dapat menyebabkan masalah teknis.

3. Kurangnya Perawatan dan Pemeliharaan:

Bangunan yang tidak mendapatkan perawatan dan pemeliharaan secara teratur cenderung lebih rentan terhadap kerusakan. Ini mencakup pembersihan, pengecatan, dan perawatan rutin sistem mekanikal dan listrik.

4. Bencana Alam:

Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, angin topan, atau badai salju dapat merusak bangunan dan menjadi faktor penghambat kondisi bangunan.

5. Pemakaian yang Berlebihan:

Penggunaan bangunan yang melebihi kapasitas desainnya dapat menyebabkan keausan dan kerusakan struktural. Misalnya, pembebanan berat atau perubahan fungsi bangunan tanpa penyesuaian struktural.

6. Kualitas Bahan Bangunan:

Penggunaan bahan bangunan yang buruk atau berkualitas rendah dapat menyebabkan masalah struktural dan keawetan bangunan.

7. Lingkungan Eksternal:

Faktor lingkungan seperti polusi udara, kelembaban tinggi, atau kadar asam yang tinggi dapat mempercepat proses korosi dan degradasi material bangunan.

8. Perubahan Iklim:

Perubahan iklim seperti peningkatan suhu, curah hujan yang ekstrem, atau perubahan suhu yang tiba-tiba dapat memengaruhi kestabilan bangunan.

9. Masalah Konstruksi:

Kesalahan dalam proses konstruksi, termasuk pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rencana dan spesifikasi, dapat menyebabkan masalah struktural dan keberlanjutan.

10. Peraturan dan Kebijakan:

Adanya perubahan regulasi atau kebijakan yang mempengaruhi tata ruang, bangunan, atau keselamatan dapat menjadi faktor penghambat kondisi bangunan.

Untuk meningkatkan kondisi bangunan gedung, beberapa upaya yang dapat dilakukan melibatkan perencanaan, perawatan, dan peningkatan infrastruktur. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat diambil:

1. **Pemeliharaan Rutin:**
Melakukan pemeliharaan rutin secara terjadwal untuk memeriksa dan memastikan semua sistem bangunan berfungsi dengan baik. Ini termasuk perawatan sistem listrik, pendingin, pemanas, dan pemeliharaan struktural.
2. **Perencanaan Pemeliharaan Preventif:**
Membuat jadwal pemeliharaan preventif untuk mencegah kerusakan dan menjamin keberlanjutan bangunan. Hal ini termasuk pembersihan, pengecatan, dan penggantian komponen yang aus.
3. **Perbaikan dan Restorasi:**
Mengidentifikasi dan segera memperbaiki masalah struktural atau kebocoran yang dapat merusak bangunan. Jika diperlukan, melakukan restorasi untuk mengembalikan bangunan ke kondisi aslinya.
4. **Peningkatan Energi dan Efisiensi:**
Mengadopsi teknologi dan sistem yang lebih efisien energi untuk mengurangi konsumsi energi dan biaya operasional. Ini dapat mencakup pemasangan sistem pencahayaan LED, perangkat pengatur suhu otomatis, dan pengoptimalan sumber energi terbarukan.
5. **Penyempurnaan Desain dan Fungsi:**
Jika memungkinkan, melakukan perubahan desain atau pembaruan fungsional untuk memastikan bangunan dapat memenuhi kebutuhan masa kini. Ini dapat mencakup perubahan tata letak interior, peningkatan aksesibilitas, atau integrasi teknologi canggih.
6. **Penerapan Teknologi Cerdas:**
Menggunakan solusi teknologi cerdas seperti sistem manajemen bangunan otomatis, sensor pintar, dan pemantauan keberlanjutan untuk memantau dan mengelola kondisi bangunan secara efisien.
7. **Pengelolaan Air dan Kelembaban:**
Menjaga sistem pembuangan air dan penanganan kelembaban untuk mencegah kerusakan yang disebabkan oleh kelembaban berlebihan, terutama di daerah yang cenderung lembap.
8. **Pendidikan dan Keterlibatan Penghuni:**
Memberikan edukasi kepada penghuni bangunan tentang cara merawat dan menggunakan fasilitas bangunan dengan benar. Keterlibatan mereka dalam pemeliharaan dapat membantu mencegah kerusakan dan memperpanjang umur bangunan.
9. **Pemantauan dan Evaluasi Rutin:**
Melakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap kinerja bangunan untuk mengidentifikasi potensi masalah sejak dini dan mengambil tindakan pencegahan.
10. **Kepatuhan dengan Peraturan dan Standar:**
Memastikan bahwa bangunan mematuhi semua peraturan dan standar keselamatan serta peraturan bangunan yang berlaku.

Tabel II.42
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah Tahun 2023 Terhadap Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	%	STATUS CAPAIAN
---------------------------	--------	----------------------	----------------------	---	----------------

Indeks Konektivitas	Nilai	0,72	0,72	100	Meningkat
Indeks Bangunan Gedung	Kategori	Sedang	Baik	100	Meningkat

Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah dengan Tahun sebelumnya, dapat dijelaskan pada Tahun 2023 untuk Indikator Indeks Konektivitas “Meningkat” sebesar 0,0026. sedangkan untuk indikator Indeks bangunan Gedung jika dibandingkan pada Tahun sebelumnya juga mengalami peningkatan dari kategori “sedang” menjadi kategori ‘Baik” pada penilaian Indeks bangunan Gedung.

Secara keseluruhan untuk pencapaian indikator Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel II.43
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah Tahun 2023 Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2023	TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN %	STATUS CAPAIAN
Indeks Konektivitas	Nilai	0,72	0,72	100	Optimis Tercapai
Indeks Bangunan Gedung	Kategori	Baik	Baik	100	Optimis Tercapai

Dari capaian dua indikator sasaran tersebut jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka sampai dengan Tahun 2023 indikator Sasaran dapat mencapai target dengan kategori Optimis Tercapai.

Program dalam APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 yang berkaitan dengan sasaran antara lain :

1. Program Penyelenggaraan Jalan.
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(LLAJ).
3. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan.
4. Program Pengelolaan Tanah Kosong.
5. Program Penatagunaan Tanah.
6. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.
7. Program Penataan Bangunan Gedung.
8. Program Bangunan dan Lingkungannya.
9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi.

Tabel II.44
Analisis Program Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah Tahun 2023

No	Program Prioritas	Anggaran
----	-------------------	----------

		Pagu	Realisasi	%
	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	176.436.572.100,00	159.677.094.563,00	90,50
1.	Program Penyelenggaraan Jalan	61.071.733.800,00	54.762.358.131,00	89,66
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(LLAJ)	8.572.035.000,00	8.174.108.896,00	95,35
3.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	3.118.132.500,00	1.925.000,00	70,35
4.	Program Pengelolaan Tanah Kosong	-	-	-
5.	Program Penatagunaan Tanah	119.805.000,00	96.660.000,00	80,68
6.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	48.180.000,00	0,00	-
7.	Program Penataan Bangunan Gedung	42.360.198.000,00	41.814.120.405,00	98,71
8.	Program Bangunan dan Lingkungannya	61.071.733.800,00	54.762.358.131,00	89,66
9.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	74.754.000,00	65.564.000,00	87,70

Efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari perbandingan realisasi capaian kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel II.45
Efisiensi Penggunaan Sumber daya
Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Sasaran Kinerja (%)	Efektifitas
1	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	90,50	100,72	Efektif

Berdasarkan tabel di atas maka dibandingkan dengan kinerja yang dicapai di tahun 2023 maka realisasi anggaran sebesar 90,50 % dibanding dengan realisasi kinerja sebesar 100,72% menunjukkan adanya efektifitas dan efisiensi penggunaan dana sebesar 10,22 %.

Sasaran Strategis 1.4 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dibentuk dengan menggunakan 3 (tiga) indikator yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Persentase Wilayah Perkotaan yang Terlayani Pengelolaan Persampahan serta Indeks Resiko Bencana. Adapun untuk capaian Indikator pada sasaran ini di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel II.46
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023 terhadap Perjanjian Kerja

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	71,43	64,79	90,70	Baik
Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan	%	52,94	52,94	100	Baik Sekali
Indeks Resiko Bencana	Kategori	Tinggi	Tinggi	100	Baik

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa dari 3 indikator pada sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, terdapat 1 (satu) indikator yang yang belum memenuhi target yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di mana realisasi tahun 2023 sebesar 64,79 atau sekitar 90,70% dari target sebesar 71,43. Angka ini jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2022 yang lalu mengalami penurunan walaupun tidak signifikan. Dan untuk kedua indicator lainnya yaitu Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan dan untuk indikator Indeks Resiko Bencana mencapai target yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini pula jika capaian indicator tersebut dibandingkan antara capaian tahun 2023 dengan capaian di tahun 2022 yang lalu, bahwa ketiga indikator ini rata-rata fluktuatif. Penurunan capaian terjadi pada indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan untuk Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan mengami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk Indikator Resiko bencana tidak mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu alias tetap. Untuk capaian disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel II.47
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023 Terhadap Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	69,39	64,79	93,37	MENURUN
Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan	%	52,94	70,58	66,67	MENINGKAT
Indeks Resiko Bencana	Kategori	Tinggi	Tinggi	100	TETAP

Adapun untuk penjelasan dari masing-masing capaian indicator pada sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

Tabel II.48
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Indek Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	71,43	64,79	90,70	Baik

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bangka Barat di tahun 2023 adalah sebesar 64,79 atau mencapai 90,70% dari target yang telah ditetapkan sebesar 71,43. Angka ini menunjukkan bahwa capaian indek kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bangka Barat masih dalam status yang baik walaupun belum mencapai target yang di harapkan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH Nasional merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara Nasional. IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Provinsi di Indonesia, di mana

IKLH Provinsi merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan terukur dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut.

Tujuan penyusunan nilai IKLH dimaksudkan sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat Pusat maupun Daerah yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, nilai IKLH digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Nilai IKLH dapat digunakan sebagai instrumen indikator keberhasilan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Mulai tahun 2020 yang lalu, pengukuran indikator kualitas lingkungan hidup mengalami perubahan yang mana sebelumnya menggunakan 3 (tiga) indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Hutan (IKL) berubah menjadi 4 (empat) indikator yaitu terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut. Namun penerapan 4 (empat) indikator ini baru mulai diterapkan hingga level Kabupaten / Kota sejak tahun 2021 yang lalu, dan juga untuk pengukuran indikator antara Kabupaten/ Kota dengan provinsi dan nasional sedikit berbeda.

Adapun untuk indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) dengan masing-masing konstanta sebesar 0,37 untuk IKA; 0,405 untuk IKU serta 0,219 untuk IKL. Untuk Indeks Kualitas Air diukur berdasarkan 7 parameter, yaitu DO, COD, BOD, Total Fosfat, TSS, Fecal Coliform, dan Total Coliform. Perhitungan IKA menggunakan metode indeks pencemar dengan konsep semakin tinggi nilai indeks pencemar semakin buruk kualitas airnya. Metode ini dapat menentukan status mutu air yang dipantau terhadap baku mutu air dengan satu seri data sehingga tidak banyak membutuhkan biaya dan waktu. Baku mutu yang digunakan dalam analisis indeks pencemaran adalah klasifikasi baku mutu air kelas II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. Sedangkan Indeks Kualitas Udara diukur berdasarkan parameter SO₂ dan NO₂ dan untuk Indeks Kualitas Lahan diukur berdasarkan Sementara pada komponen IKL, parameter yang dinilai kembali hanya memperhitungkan tutupan lahan berupa tutupan hutan dengan menambahkan tutupan belukar dan belukar rawa pada kawasan hutan atau pada kawasan yang memiliki fungsi lindung seperti sempadan sungai, sempadan danau, sempadan pantai, lereng dengan kemiringan >25%. Selain itu juga menambahkan ruang terbuka hijau seperti kebun raya, dan taman keanekaragaman hayati, hutan kota dan taman kota serta mempertimbangkan dampak kejadian kebakaran hutan dan lahan serta keberadaan kanal pada ekosistem gambut.

Adapun untuk perbandingan capaian besaran indikator pembentuk Indeks Kualitas Lingkungan hidup jika dibandingkan dengan tahun kemarin adalah sebagai berikut :

Tabel II.49
Perbandingan Indikator pembentuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Tahun 2022 dan Tahun 2023 Kabupaten Bangka Barat

INDIKATOR IKH	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Indeks Kualitas Air (0,37)	66,67	53,33
Indeks Kualitas Udara (0,405)	89,20	89,39
Indeks Kualitas Lahan (0,219)	37,41	38,82
IKLH	69,39	64,76

Dari perbandingan capaian di atas dapat terlihat bahwa dari ketiga indikator pembentuk IKLH tersebut, terdapat 1 (satu) komponen indikator yang mengalami penurunan dari tahun 2022 yang lalu yaitu pada indikator Indeks Kualitas Air yaitu dari 66,67 menjadi 53,33 di tahun 2023 atau menurun sebesar 13,34.

Terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab menurunnya kualitas air yaitu :

1. Pencemaran Air yang dapat bersumber dari Limbah industri, pertanian, atau domestik yang mengandung bahan kimia berbahaya yang berisikan kandungan bahan kimia pada sungai-sungai yang dijadikan sebagai lokasi pemantauan yang dapat mencemari air dan merusak kualitasnya. Bahan kimia yang mencemari sungai-sungai tersebut dapat berasal dari sisa pestisida, bahan bakar minyak ataupun BOD dan *E. Coli*. BOD adalah adalah jumlah oksigen terlarut dibutuhkan organisme untuk mengoksidasi bahan yang terlarut dalam air limbah, dengan semakin tinggi jumlah oksigen dibutuhkan berarti mengandung banyak polutan zat organik.
2. Deforestasi yaitu hilangnya tutupan vegetasi dapat menyebabkan tanah longsor dan peningkatan aliran permukaan yang membawa polutan ke dalam perairan.
3. Perubahan Iklim berupa pemanasan global dan perubahan iklim dapat memengaruhi pola hujan, menyebabkan banjir atau kekeringan, yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas air.
4. Erosi Tanah di mana Erosi tanah membawa nutrisi dan sedimen ke perairan, merusak kualitas air dengan meningkatkan tingkat nutrisi dan kekeruhan.
5. *Overexploitasi* Sumber Daya adalah Penggunaan berlebihan terhadap sumber daya alam seperti air tanah atau sungai dapat mengakibatkan penurunan kualitas air.
6. Pertumbuhan Penduduk .

Dari kondisi ini setidaknya dapat dijadikan sebagai gambaran bagi Pemerintah Daerah di dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini aktivitas pertambangan laut di daerah Kabupaten Bangka Barat sedang marak-maraknya terjadi hal ini dikarenakan tingginya daya jual mineral timah di pasaran dunia sehingga komoditas pertambangan menjadi idola dalam mata pencaharian masyarakat. Terlebih dengan banyaknya produksi hasil bumi tersebut yang dihasilkan dari laut membuat masyarakat berbondong-bondong beralih profesi menjadi penambang khususnya tambang laut atau lebih dikenal dengan Ponton Isap Produksi (PIP). Yang jadi masalahnya, aktivitas pertambangan di laut bukan hanya dilakukan oleh penduduk Bangka Barat saja namun dari luar Kabupaten Bangka Barat seperti daerah Toboali, Selapan, Koba dan Pangkalpinang. Aktivitas inilah salah satunya menjadi penyebab pencemaran yang terjadi untuk wilayah laut yang berdampak juga ke daerah sungai. Karena untuk beberapa sungai-sungai besar juga dijadikan sebagai lokasi penambangan laut oleh masyarakat.

Kondisi ekonomi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di daerah memang menjadi dua sisi mata uang yang saling berpengaruh. Hal ini dikarenakan ketersediaan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat akan berdampak positif terhadap kondisi ekonomi di masyarakat, Hal serupa terjadi sebaliknya, ketika ketersediaan lapangan pekerjaan terbatas maka akan terjadi penurunan tingkat perekonomian di masyarakat. Keterbatasan lapangan pekerjaan dengan tuntutan ekonomi keluarga membuat masyarakat harus jeli melihat peluang pekerjaan yang dianggap dapat menyelamatkan ekonomi keluarga. Ketika sektor pertambangan khususnya pertambangan laut menjadi salah satu peluang di sektor lapangan usaha yang mana hasil yang diperoleh dianggap sangat menggiurkan dari segi pendapatan masyarakat maka masyarakat akan berbondong-bondong untuk beralih profesi menjadi penambang dan mengesampingkan kelestarian lingkungan alam sekitar.

Untuk itu ke depan perlu adanya upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjaga kelestarian lingkungan yang salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan daerah tentang pembangunan yang ramah lingkungan. Di samping itu juga perlu untuk dilakukan pengetatan terhadap izin tambang, peningkatan pengawasan lingkungan serta penegakan hukum terhadap aktivitas yang dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan.

Disamping itu, untuk menghindari adanya penurunan di tahun mendatang, di dalam mempertimbangkan penentuan lokasi pemantauan kualitas air diantaranya harus melihat beberapa kriteria yang telah ditentukan yaitu:

1. Mewakili sumber pencemar;
2. Pada outlet daerah aliran sungai utama;
3. Pada titik *intake* pengolahan air minum;
4. Pada danau, waduk atau situ dan/ atau;
5. Pada aliran Badan Air kawasan hulu yang belum terpengaruh aktivitas manusia.

Adapun untuk menentukan Indeks Kualitas Air di Kabupaten Bangka Barat dilakukan dengan melakukan pemantauan kualitas sungai yang berada pada 4 kecamatan dari 6 kecamatan. Adapun untuk sungai-sungai yang dilakukan pemantauaan adalah sungai-sungai yang dinilai merupakan sungai besar yang menjadi penghubung antar sungai. Berikut data sungai-sungai yang dilakukan pemantauan pada tahun 2023 yang lalu terdiri dari :

- a. Sungai Antam di Kecamatan Parittiga;
- b. Sungai Kampak di Kecamatan Jebus;
- c. Sungai Kayu Arang di Kecamatan Kelapa; dan
- d. Sungai Sukal di Kecamatan Muntok

Sedangkan untuk sungai yang ada di wilayah Kecamatan Tempilang dan Kecamatan Simpang Teritip tidak dilakukan pemantauan karena dinilai tidak memiliki sungai yang besar. Namun walaupun nilai Indeks Kualitas Air mengalami penurunan, hal tersebut tidak terjadi pada 2 (dua) indikator yang lain yaitu Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan yang mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Untuk Indeks Kualitas Udara jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,19 poin. Hal serupa pula terjadi pada capaian Indeks kualitas lahan yang mengalami peningkatan serupa sebesar 1,41 poin dari tahun sebelumnya. Adanya peningkatan capaian untuk kedua indikator ini menunjukkan bahwa adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah Daerah dalam memperbaiki kualitas udara dan lahan dengan pelaksanaan dari program/ kegiatan/ sub

kegiatan yang ada di beberapa dinas teknis. Di samping itu pula peningkatan ini juga dipengaruhi oleh adanya kesadaran dari masyarakat serta stakeholder untuk memperbaiki kualitas lingkungan yang ada disekitar.

Jika di bandingkan antara Indek Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat dengan Provinsi dan Nasional diperoleh perbandingan adalah sebagai berikut :

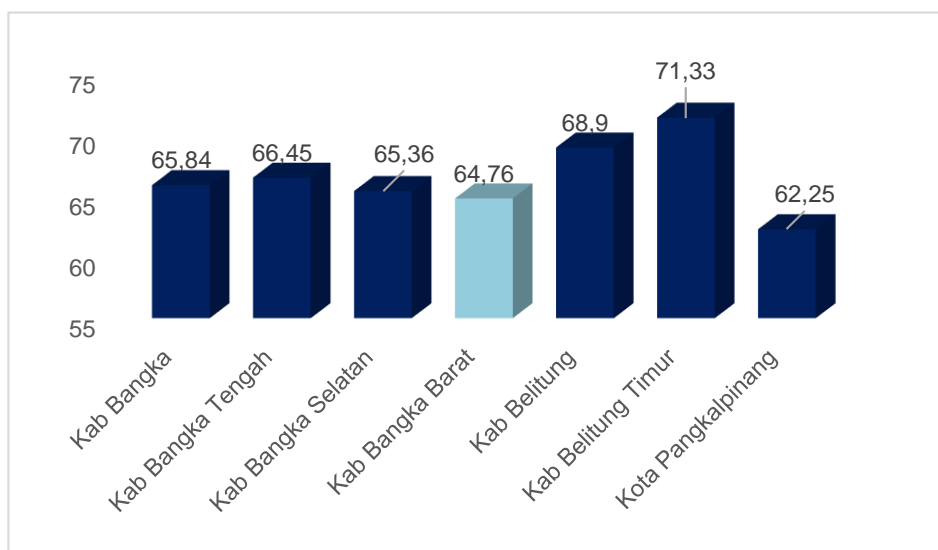
Tabel II.50
Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Tahun 2023 Nasional, Provinsi dan Kabupaten Bangka Barat

INDIKATOR IKH	NASIONAL	PROVINSI KEP.BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BANGKA BARAT
Indeks Kualitas Air	54,59	57,51	53,33
Indeks Kualitas Udara	88,67	90,15	89,39
Indeks Kualitas Lahan	61,79	40,09	38,82
Indeks Kualitas Air Laut	78,84	82,57	-
IKLH	72,54	71,64	64,76

Dari tabel di atas diperoleh kesimpulan bahwa capaian IKLH Kabupaten Bangka Barat secara keseluruhan masih berada di bawah capaian nasional dan Provinsi. Namun jika dilihat dari segi capaian komponen indicator pembentuk IKLH, bahwa untuk capaian seluruh komponen berada di bawah capaian Nasional dan Provinsi.

Sedangkan untuk capaian IKLH Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 jika dibandingkan dengan capaian IKLH Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka IKLH Kabupaten Bangka Barat menduduki peringkat kedua terendah setelah Kota Pangkalpinang. Adapun untuk perbandingan capaian IKLH Kabupaten/ Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 terdapat dalam grafik di bawah ini :

Grafik II.17
Perbandingan Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Tahun 2023 Kabupaten/ Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Dari capaian tersebut menunjukkan bahwa IKLH Kabupaten Bangka Barat tahun 2023 dapat dikategorikan tidak baik-baik saja dan jika dibandingkan dengan capaian tahun kemarin menurun sangat signifikan yaitu dari peringkat 2 tertinggi di tahun 2022 menjadi peringkat 2 terendah di tahun 2023. Hal ini tentunya menjadi sebuah potret bagi daerah untuk dapat mencari solusi melalui rumusan kebijakan untuk dapat kembali meningkatkan nilai IKLH di tahun mendatang.

Capaian indikator kedua dari sasaran meningkatnya Kualitas Lingkungan adalah Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan.

Capaian untuk indicator Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 adalah 70,58% dari target sebesar 41,18% atau dengan persentase tingkat capaian sebesar 128,55%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan sampah perkotaan di wilayah Kabupaten Bangka Barat sudah sangat baik.

Tabel II.51
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	STATUS CAPAIAN
Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan	%	52,94	70,58	133,32	Baik Sekali

Adapun untuk wilayah pelayanan sampah perkotaan yang menjadi target layanan hanya berada di 17 daerah saja yang mana dalam penentuan kriteria perkotaan dengan berpedoman kepada data dari Badan Pusat Statistik. 17 daerah tersebut terdiri dari :

1. Kecamatan Muntok berada pada Kelurahan Tanjung, Sungai Daeng, Sungai Baru, Keranggan, Menjelang, Desa Belo Laut;
2. Kecamatan Simpangteritip berada pada Desa Berang, dan Pelangas;
3. Kecamatan Kelapa berada pada Kelurahan Kelapa;
4. Kecamatan Jebus berada pada Desa Jebus, dan Air Kuang;
5. Kecamatan Parittiga berada pada Desa Puput, Sekar Biru dan Kelabat;
6. Kecamatan Tempilang berada pada Desa Benteng Kota , Air Lintang dan Tempilang.

Dari 17 daerah yang disebutkan diatas, capaian pelayanan sampah perkotaan di tahun 2023 terdapat pada 12 daerah yaitu Kelurahan Menjelang, Keranggan, Sungai Daeng, Tanjung, Sungai Baru, Kelapa, Desa Belo Laut , Puput, Jebus, Pelangas, Kelabat, dan Air Lintang. Capaian tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian 2022 dari 9 daerah meningkat menjadi 12 daerah. Penanganan persampahan di Kabupaten Bangka Barat sampai saat ini masih terfokus pada Kecamatan Muntok sebagai ibukota Kabupaten Bangka Barat, sedangkan pengelolaan persampahan di kawasan pedesaan belum dilakukan secara terpadu. Pengelolaan sampah pada fasilitas umum seperti pasar dan terminal di kecamatan selain Kota Muntok, sampai saat ini masih dikelola oleh pihak kecamatan, seperti di Kecamatan Kelapa, Kecamatan Jebus, dan Kecamatan Parittiga.

Namun untuk layanan pengelolaan persampahan yang telah ada di Kabupaten Bangka Barat sifatnya hanya pada ruang lingkup pengangkutan saja Jika dilihat dari segi definisi operasional

pengelolaan sampah yang sebenarnya terdiri dari beberapa tahap yaitu pengumpulan, pengangkutan, pendaur ulangan dan pengolahan. Sehingga dengan kata lain bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan di Kabupaten Bangka Barat belum dilakukan secara maksimal.

Disamping itu juga untuk keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, sampai saat ini Kabupaten Bangka Barat hanya memiliki 1 unit TPA yang berada di Kecamatan Mentok dan dengan kondisi yang sudah *over load*. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebenarnya telah mencoba untuk melakukan perluasan TPA tersebut, namun Perluasan dan pengembangan TPA terhambat alih fungsi lahan dikarenakan lahan Produksi yang telah beralih fungsi menjadi perkebunan masyarakat. Untuk itu pada tahun 2023 dilakukan penyusunan *Feasibility Study* terkait dengan Tempat Pembuangan Akhir dengan lokasi pada Kapung Rimba Kendong Desa Peradong Kecamatan Simpang Teritip dengan luasan sebesar 20 Ha.

Disamping TPA, Kabupaten Bangka Barat telah memiliki 2 (dua) Tempat Pembuangan Sampah Terpadu yang berada di Kecamatan Kelapa dan Jebus, namun kedua TPST tersebut tidak berfungsi dengan baik. TPST di dua lokasi tersebut hanya melakukan aktifitas pembuangan saja tidak ada aktivitas pemilihan. Saat ini telah terdapat rencana untuk pembangunan TPST Kabupaten di Desa Rangi Asam Kecamatan Jebus namun sampai saat ini belum terlaksana. Jika dilihat dari segi kelengkapan status kelayakan berupa *Feasibility Study* sudah selesai dilaksanakan dan dinilai layak untuk di bangun. Keberadaan TPST ini nantinya akan mengakomodir layanan persampahan di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Jebus dan Kecamatan Parittiga. Penyusunan *Feasibility Study* Tempat Pembangunan Sampah Terpadu (TPST) tersebut sebenarnya telah dilakukan pada 2 kecamatan yaitu Kecamatan Jebus dan Parittiga namun rekomendasi untuk Kecamatan Parittiga dianggap tidak memenuhi persyaratan dan dianggap tidak layak untuk di bangun TPST. Hal ini dikarenakan jarak dari permukiman penduduk kurang dari 500 meter yang akan menimbulkan bau tidak sedap dari penimbunan sampah tersebut.

Disamping itu pula, terdapat Tempat Pembuangan Sampah 3R (*Reduse, Recycle dan Reused*) merupakan hasil pembangunan yang bersumber dari Satker Balai Perencanaan Permukiman Wilayah Bangka Belitung dan DAK Perumahan Permukiman. Adapun untuk keberadaan TPS 3R tersebut saat ini berada pada Desa Tempilang, Pelangas, Kelabat, Bakit, Air Limau dan Air Lintang. Namun keberadaan TPS 3R tersebut sama halnya dengan keberadaan TPST yang ada, yang mana TPS 3R juga belum berfungsi dengan baik sehingga kedepan perlu peningkatan upaya pembinaan serta peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana persampahan yang ada. Dari 6 (enam) TPST tersebut, yang dianggap masih aktif hanya yang terdapat pada TPS 3R Air Limau dan Air Lintang. Namun untuk TPS 3R di Air Lintang hanya melakukan aktifitas berupa pengangkutan dan pembuangan sedangkan untuk pemilahan dilakukan TPS 3R Desa Air Limau.

Di TPS 3R Air Limau sendiri telah dibentuk Bank Sampah Induk Sepakat Desa Air Limau yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/414/2.5.1.1/2019 tentang Penunjukan Kelompok Swdaya Masyarakat Sepakat Desa Air Limau sebagai Bank Sampah Induk Desa Air Limau di Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat. Saat ini Bank Smapah tersebut telah kerjasama dengan beberapa perusahaan atau pihak diantaranya PT. GSBL, Polsek Mentok dan Jebus, PT. Timah terkait dengan pengolahan sampah. Masing-masing peihak atau perusahaan yang telah disebutkan tadi melakukan pengum[ulan sampah dan kemudian sampah

tersebut diangkut dan di oleh oleh Bank Sampah Sepakat. Terkait dengan hal yang telah dilakukan oleh Bank Sampah Induk Sepakat tersebut, di tahun 2023 yang lalu meraih peringkat 3 Tingkat Provinsi Babel dalam Lomba Pengelolaan Sampah.

Disamping memiliki Bank Sampah Induk, Pemerintah Daerah juga memiliki Bank sampah Unit yang terletak di Dinas Lingkungan Hidup dengan nama Bank Sampah Unit De EL Ha. Tugas Bank Sampah Unit melibatkan pengumpulan, pemilahan, dan penjualan sampah secara efisien. Hal ini juga melibatkan pendidikan masyarakat tentang pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang baik.

Terkait dengan hal ini, Pemerintah Daerah mendukung penuh upaya pengelolaan sampah, terlebih dengan adanya dorongan dari Pemerintah untuk membuat Tempat Pembuangan Akhir yang baru di karenakan kondisi yang sbelumnya sudah tidak layak lagi. Kemudian disamping itu juga akan dilakukan upaya pengaktifan kembali TPST dan PTS 3R milik desa yang dahulunya dianggap mati suri dan kini akan di aktifkan kembali yang nanti akan memperluas jangkauan penanganan sampah di perkotaan.

Capaian untuk indikator Indeks resiko Bencana di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 dalam kategori tinggi dengan target tinggi atau dengan persentase tingkat capaian sebesar 100%. Capaian ini diperoleh dari Indeks Resiko Bencana Nasional yang memuat seluruh nilai indeks resiko bencana di Kabupaten/ Kota di wilayah Indonesia.

Tabel II.52
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Resiko Bencana	Kategori	Tinggi	Tinggi	100	Baik

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) ini dihitung berdasarkan rumus resiko dikurangi dengan bahaya dikali dengan kerentanan dan dibagi dengan kapasitas bencana. Di mana *hazard* (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (*magnitude*) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. *Vulnerability* (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana. Adapun untuk nilai Indeks Resiko Bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama kurun waktu 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel II.53
Indeks Resiko Bencana Indonesia Tahun 2023
Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	KABUPATEN/ KOTA	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bangka Barat	180,40	180,40	180,40	180,40	180,40	163,61
2	Bangka Selatan	180,40	180,40	180,40	180,40	179,12	179,37
3	Bangka	168,40	168,40	168,40	168,40	168,40	160,48
4	Belitung Timur	168,40	168,40	168,40	168,40	168,40	168,40
5	Belitung	168,40	168,40	168,40	168,40	148,48	158,53
6	Bangka Tengah	144,40	144,40	144,40	144,40	144,40	144,40
7	Pangkalpinang	120,40	120,40	120,40	120,40	120,40	114,48

Sumber : Buku Indeks Resiko Bencana Indonesia 2023

Dari tabel di atas diperoleh sebuah gambaran bahwa Kabupaten Bangka Barat tidak berada di posisi tertinggi untuk Indeks Resiko Bencana diantara Kabupaten/ Kota di wialyah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023. Namun jika di lihat pada tabel, posisi Kabupaten yang memiliki Indeks Resiko Bencana tertinggi terdapat pada Kabupaten Bangka Selatan yang kemudian di susul oleh Kabupaten Belitung Timur. Kabupaten Bangka Barat menduduki peringkat ke-tiga tertinggi untuk Indeks Resiko Bencana Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023.

Kondisi ini dapat dilihat bahwa untuk wilayah Kabupaten Bangka Barat jika ditinjau dari segi letak geografis memang berada di daerah yang rentan terjadi bencana. Adapun jenis-jenis bencana yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Bangka Barat meliputi banjir, putting beliung, abrasi dan kebakaran hutan. Dari data capaian kejadian bencana selama 2 tahun terakhir. Banjir yang terjadi di Kabupaten Bangka Barat diakibatkan oleh faktor alam dan kerusakan lingkungan. Kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Bangka Barat terletak di Ibukota Kecamatan Muntok khususnya di daerah Teluk Rubiah, Tanjung, dan Ibukota Kecamatan Parittiga yaitu Desa Puput. Sementara daerah pesisir pantai yang berpotensi mengalami bencana abrasi adalah Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga dan Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang. Berdasarkan data dari Indeks Resiko Bencana Daerah juga disampaikan bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk kedalam Provinsi yang memiliki potensi kelas tinggi untuk terjadinya bencana diantara 15 Provinsi lainnya. Di dalam buku ini pula telah digambarkan potensi bencana yang ada di masing-masing wilayah dapat dengan melakukan proyeksi atas kejadian bencana yang telah terjadi.

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, jumlah bencana yang terjadi di Kabupaten Bangka Barat selama kurun waktu 2022-2023 adal sebagai berikut :

Tabel II.54
Perbandingan Capaian Kejadian Bencana Tahun 2022 dan Tahun 2023
di Kabupaten Bangka Barat

NO	JENIS BENCANA	JUMLAH KORBAN (2022)	JUMLAH KORBAN (2023)
1	Banjir	1.087	1472
2	Gempa Bumi	0	0
3	Kebakaran Permukiman	9	0
4	Tanah longsor	0	0

NO	JENIS BENCANA	JUMLAH KORBAN (2022)	JUMLAH KORBAN (2023)
5	Gelombang Extrem dan Abrasi	0	0
6	Kekeringan	0	0
7	Angin kencang	449	0
8	Cuaca Extrem	0	203
	TOTAL	1.545 JIWA	1.675 JIWA

Dari tabel jumlah korban jiwa pasca bencana terjadi dapat terlihat bahwa bencana banjir merupakan bencana yang memiliki dampak cukup besar bagi masyarakat disetiap tahunnya. Untuk lokasi rawan bencana banjir biasanya terjadi di Kecamatan Muntok dan Kecamatan Parittiga pada beberapa titik yaitu Kelurahan Tanjung, Desa Puput serta Desa Belo laut. Adapun upaya pemerintah dalam menangani masalah banjir ini diantaranya telah dilakukan normalisasi sungai, kemudian pembuatan tanggul sungai serta upaya-upaya lain yang berkaitan dengan penanganan banjir. Memang tidak dipungkiri bahwa sampai dengan saat ini pengendalian bencana banjir di kawasan rawan banjir belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah pembangunan sarana dan prasarana struktural pengendali banjir belum sejalan dengan penanganan non struktural terhadap kerusakan DAS. Namun walaupun demikian Pemerintah Daerah terus berkomitmen untuk mengatasi masalah banjir ini yang salah satunya melalui jalinan kerjasama dengan instansi vertikal serta stakeholder lainnya dalam pencegahan bencana banjir.

Tabel II.55
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023 Terhadap terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2023	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	64,79	71,94	90,06	Optimis Tercapai
Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan	%	70,58	64,71	109,07	Tercapai
Indeks Resiko Bencana	Kategori	Tinggi	Sedang	50%	Optimis Tercapai

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2023 jika dibandingkan dengan target capaian di akhir Tahun RPJMD, sudah dapat dikatakan sangat baik/berhasil dan Optimis Tercapai. Terkait dengan upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan maka ,perlu dilakukan berbagai strategi yang nantinya dapat meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut. Adapun untuk strategi yang dapat dilakukan meliputi :

1. Peningkatan pengendalian kualitas air, udara, dan tutupan lahan;
2. Peningkatan pengelolaan persampahan secara terpadu;
3. Penguatan kapasitas kelembagaan dan infrastruktur penanggulangan bencana daerah.

Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup secara umum dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang memiliki urusan lingkungan hidup serta sub urusan

kebencanaan serta oleh perangkat daerah lain yang memiliki keterkaitan dengan pencapaian sasaran tersebut. Adapun Program yang dilaksanakan dalam pencapaian sasaran ini terdiri dari :

1. Program perencanaan lingkungan hidup;
2. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);
3. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat;
4. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
5. Program pengelolaan persampahan;
6. Program penanggulangan bencana;
7. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
8. Program pengelolaan sumber daya air (SDA);
9. Program pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan;
10. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati);
11. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B 3);
12. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup;
13. Program pengembangan sistim dan pengelolaan persampahan nasional;
14. Program pengelolaan persampahan (UPT Tempat Pemrosesan akhir (TPA) Air Belo.

Tabel II.56
Analisis Program sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
Tahun 2023

No	Program Prioritas	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
	1	2	3	4=3/2*100
	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	24.848.539.248,00	22.782.832.849,00	91,68
1.	Program perencanaan lingkungan hidup	386.988.100,00	171.943.218,00	44,43
2.	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	29.324.000,00	29.324.000,00	100
3.	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	22.400.000,00	22.400.000,00	100
4.	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	89.662.000,00	87.781.000,00	97,90
5.	Program pengelolaan persampahan	8.692.514.310,00	8.054.687.657,00	92,66
6.	Program penanggulangan bencana	1.602.875.000,00	1.516.668.197,00	94,62
7.	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	956.477.000,00	925.562.200,00	96,76
8.	Program pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan	110.020.000,00	94.398.050,00	85,8
9.	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	21.200.000,00	14.957.250,00	70,55
10.	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B 3)	3.200.000,00	3.199.800,00	99,99
11.	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	8.692.514.310,00	8.054.687.657,00	92,66
12.	Program pengembangan sistim dan pengelolaan persampahan nasional	405.000.000,00	376.824.670,00	93,04

No	Program Prioritas	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
	1	2	3	4=3/2*100
13.	Program pengelolaan persampahan (UPT Tempat Pemrosesan akhir (TPA) Air Belo	1.177.806.100,00	890.281.700,00	75,58
14.	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	2.658.558.428,00	2.540.117.450,00	95,54

Tabel II.57
Efisiensi Penggunaan Sumber daya
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Sasaran Kinerja (%)	Efektifitas
1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	91,68	96,90	Efektif

Berdasarkan tabel di atas maka dibandingkan dengan kinerja yang dicapai di tahun 2023 maka realisasi anggaran sebesar 91,68% dibanding dengan realisasi kinerja sebesar 96,90 menunjukkan adanya efektifitas dan efisiensi penggunaan dana sebesar 5,22%.

Sasaran Strategis 2.1 “Menurunnya Angka Kemiskinan”

Dalam mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Sementara Garis Kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian serius dari pemerintah. Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat.

Capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut:

Tabel II.58
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Menurunnya Angka Kemiskinan Tahun 2023 terhadap Perjanjian Kerja

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	STATUS CAPAIAN
Angka kemiskinan	Persentase	2,45	2,71	-8,16	Kurang

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS, angka kemiskinan di Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2023 sebesar 2,71%. Jika dibandingkan dengan target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebesar 2,45%, maka tercapai - 8,16% yaitu tidak mencapai target yang ditetapkan dengan status capaian “Kurang”. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 dengan angka kemiskinan sebesar 2,46%,

maka kemiskinan di Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 0,25 poin atau 10,16%.

Tabel II.59
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Menurunnya Angka Kemiskinan Tahun 2023 Terhadap Tahun Sebelumnya

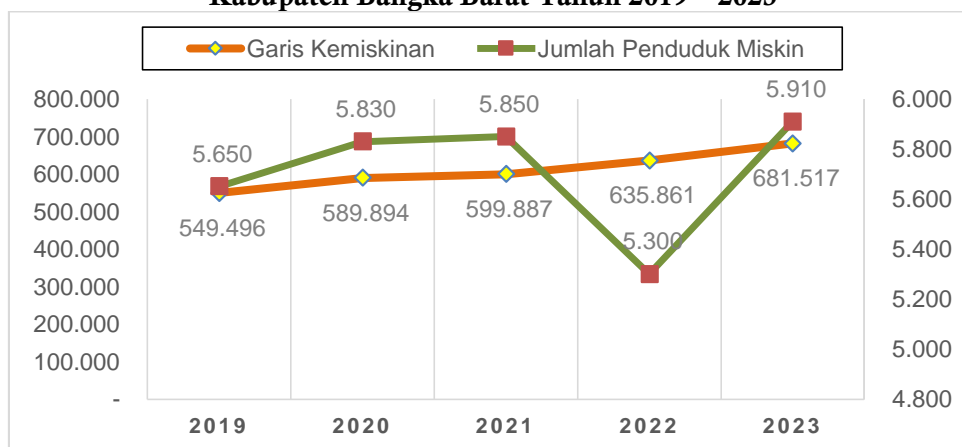
INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	%	STATUS CAPAIAN
Angka kemiskinan	Persentase	2,46	2,71	89,83	<i>Meningkat</i>

Sejalan dengan angka kemiskinan yang mengalami penurunan, jumlah penduduk miskin pada Tahun 2023 juga terjadi peningkatan yaitu menjadi sebanyak 5.910 jiwa yang sebelumnya sebanyak 5.300 jiwa di Tahun 2022 atau bertambah 610 jiwa.

Berbanding terbalik dengan angka kemiskinan, garis kemiskinan di Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun 2022 yaitu dengan angka Rp 635.861,00 menjadi Rp 681.517 di Tahun 2023. Meningkatnya garis kemiskinan ini dipengaruhi oleh meningkatnya gaya hidup penduduk serta meningkatnya harga kebutuhan pokok dari tahun ke tahun.

Jika dilihat dari angka kemiskinan yang meningkat di Tahun 202 jika disandingkan dengan garis kemiskinan dapat diartikan bahwa meskipun terjadi peningkatan garis kemiskinan, namun penduduk Kabupaten Bangka Barat secara rata-rata mengalami penurunan secara ekonomi atau penurunan pendapatan sehingga rata-rata pengeluaran perkapita per bulan berada di atas garis kemiskinan.

Grafik II.18
Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 – 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Dilihat dari perkembangan antar waktu, angka kemiskinan Kabupaten Bangka Barat berfluktuasi. Selama 5 (lima) tahun terakhir, angka kemiskinan Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2023 berada di posisi terendah, sedangkan posisi tertinggi sebesar 2,75% pada Tahun 2021.

Jika dilihat dari perkembangan antar wilayah, kemiskinan di Kabupaten Bangka Barat selama beberapa tahun terakhir berada pada posisi terbaik atau dengan angka kemiskinan terendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan jika dibandingkan dengan angka kemiskinan di tingkat nasional dan provinsi, pada Tahun 2023 angka

kemiskinan Kabupaten Bangka Barat berada jauh di bawah angka nasional sebesar 9,36% dan provinsi sebesar 4,52%.

Tabel II.60
Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2019 - 2023

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Bangka	4,92	4,51	4,81	4,26	4,32
Belitung	6,29	6,27	7,15	6,45	6,46
Bangka Barat	2,67	2,70	2,75	2,46	2,71
Bangka Tengah	5,02	4,85	5,13	4,86	5,29
Bangka Selatan	3,36	3,52	3,69	3,22	3,11
Belitung Timur	6,60	6,52	7,20	6,49	6,73
Kota Pangkalpinang	4,25	4,36	4,76	4,55	4,27
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4,50	4,89	4,90	4,61	4,52
Nasional	9,22	10,19	10,14	9,57	9,36

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Tabel II.61
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Menurunnya Angka Kemiskinan Tahun 2023 terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2023	TARGET AKHIR RPJMD	(%)	STATUS CAPAIAN
Angka kemiskinan	Persentase	2,71	2,43	89,67	Optimis Tercapai

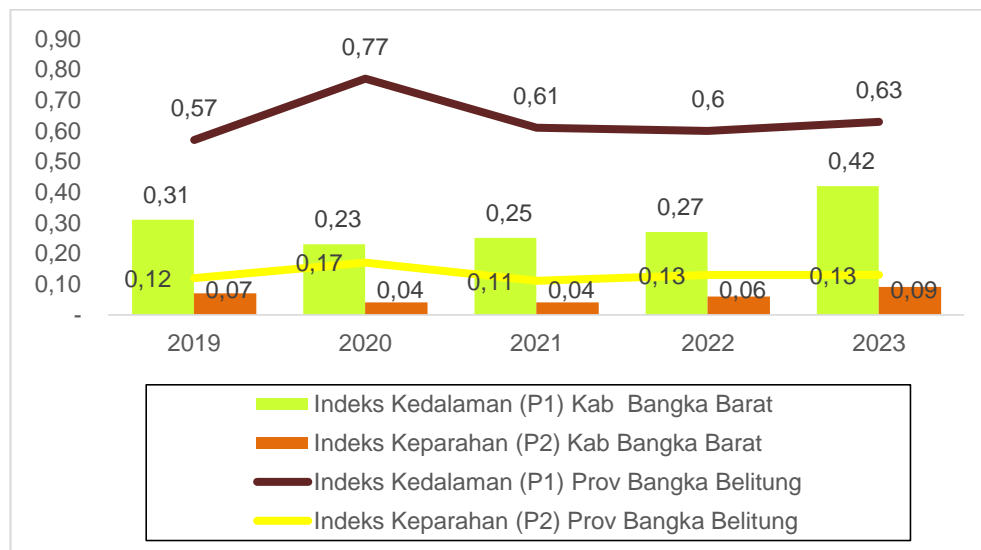
Capaian indikator Angka Kemiskinan di Tahun 2023 jika dibandingkan dengan target di akhir tahun RPJMD Kabupaten Bangka Barat sebesar 2,71%, maka telah mencapai 89,67%. Meskipun belum mencapai target akhir RPJMD di Tahun 2026, namun jika dilakukan intervensi yang tepat dan dilakukan secara kolaboratif bersama seluruh pemangku pembangunan, maka target tersebut optimis akan dapat dicapai.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Selain kedua ukuran tersebut, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Dalam penanggulangan kemiskinan, selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan yang diukur melalui Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2).

Semakin besar Indeks Kedalaman Kemiskinan, mengindikasikan semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari Garis Kemiskinan. Semakin tinggi, berarti jaraknya semakin jauh yang berarti upaya untuk mengangkat masyarakat miskin untuk menjadi tidak miskin akan semakin berat. Pada Tahun 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bangka Barat meningkat dari Tahun 2022 yaitu dari 0,27 menjadi 0,42 di Tahun 2023. Meskipun terjadi peningkatan, namun nilai ini masih jauh dari Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebesar 0,63.

Indeks Keparahannya Kemiskinan Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2023 juga mengalami peningkatan menjadi 0,09 dari Tahun 2022 sebesar 0,06. Keadaan ini mencerminkan bahwa ketimpangan pengeluaran per kapita antar penduduk miskin semakin meningkat. Namun nilai ini juga masih dibawah Indeks Keparahannya Kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebesar 0,13.

Grafik II.19
Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan
Kabupaten Bangka Barat dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 – 2023

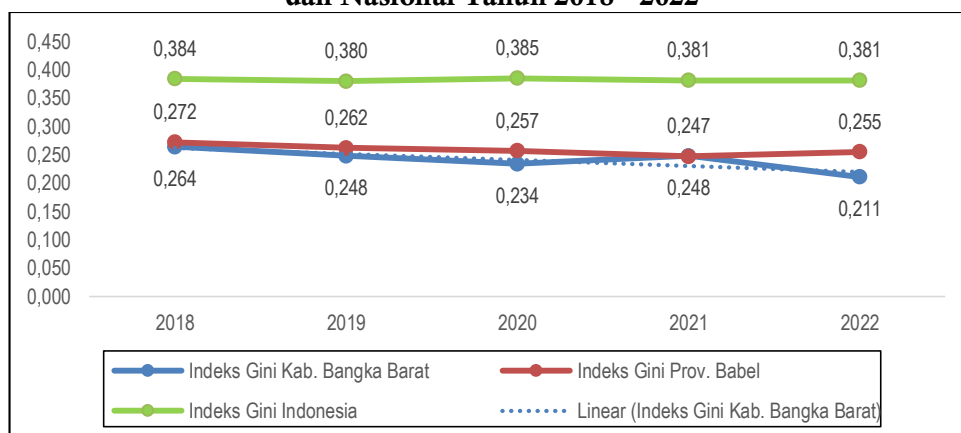


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Dalam pengukuran statistik, dikenal pula Indeks Gini atau *Gini Ratio* yang merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Dalam mengukur tingkat ketimpangan di Indonesia, BPS menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan. Berdasarkan konsep BPS, *Gini ratio* adalah salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran yang menggunakan nilai yang berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai *gini ratio* yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

Indeks Gini Kabupaten Bangka Barat selama 5 (lima) tahun terakhir secara trend menunjukkan penurunan. Pada Tahun 2022 Indeks Gini Kabupaten Bangka Barat sebesar 0,211 menurun jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar 0,248. Indeks Gini Kabupaten Bangka Barat juga lebih rendah jika dibandingkan dengan angka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Tahun 2022 sebesar 0,255 dan di tingkat nasional sebesar 0,381. Untuk nilai indeks Gini Kabupaten Bangka Barat tahun 2023 tidak tersedia sehingga tidak dapat dibandingkan capaian Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional.

Grafik II.20
Indeks Gini Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dan Nasional Tahun 2018 - 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Peningkatan kemiskinan di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2023 disebabkan oleh salah satu faktor yaitu tingginya Inflasi Daerah. Tingginya inflasi daerah menyebabkan adanya kenaikan biaya hidup dikarenakan kenaikan harga barang kebutuhan pokok tanpa diimbangi dengan kenaikan

pendapatan. Kenaikan beberapa komoditas pokok yaitu cabai merah, bawang merah, bawang putih dan telur ayam membuat daya beli masyarakat mengalami penurunan. Hal ini yang menjadi penyebab tingkat kemiskinan di masyarakat menjadi meningkat. Walaupun dalam hal ini program penanggulangan kemiskinan terus di gulirkan oleh Pemerintah, namun dalam hal ini tidak dapat membuat tingkat kemiskinan menjadi menurun. Pemerintah Daerah telah mengambil kebijakan di dalam penanganan inflasi diantaranya pengawasan harga, penyelenggaraan pasar murah, serta memperkuat koordinasi lintas sektor didalam pengendalian inflasi di daerah.

Keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh program-program yang tepat dan inovatif, tapi juga harus didukung dengan kriteria kemiskinan yang jelas, serta data yang akurat dan *up-to-date*. Untuk mendapatkan data yang akurat dan *up-to-date* tersebut diperlukan verifikasi dan validasi data secara berkala sesuai dengan jenis programnya. Selain penggunaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next-Generation* (SIKS-NG) yang diarahkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial kepada seluruh pemerintah daerah, pada Tahun 2022 yang lalu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah meluncurkan sistem pendukung pendataan kemiskinan yang terintegrasi dengan SIKS-NG untuk pelaksanaan verifikasi dan validasi data PPKS secara lengkap, dinamis dan berkala yaitu Sistem Informasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang disingkat SIPERKASA. Melalui aplikasi tersebut diharapkan seluruh penerima bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat dapat disalurkan dengan tepat sasaran dan tepat program.

Berdasarkan pemetaan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026, Program APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 yang mendukung pencapaian sasaran “Menurunnya Angka Kemiskinan” antara lain :

- a. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- b. Program Rehabilitasi Sosial
- c. Program Penanganan Bencana
- d. Program Pemberdayaan Sosial
- e. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- f. Program Penanganan Kerawanan Pangan
- g. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- h. Program Pengawasan Keamanan Pangan
- i. Program Pengembangan Perumahan
- j. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
- k. Program Kawasan Permukiman
- l. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU).

Penanggulangan kemiskinan di daerah harus dilakukan secara holistik dan integratif. Berbicara penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab salah satu pihak saja, namun saling berkaitan dengan pihak lain baik internal maupun eksternal. Walaupun jika dilihat dari segi capaian angka kemiskinan Kabupaten Bangka Barat selalu menempati posisi terendah diantara Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, namun kenaikan angka kemiskinan daerah tetap harus menjadi perhatian bersama. Ini menunjukkan bahwa adanya gejolak kecil yang terjadi di masyarakat di mana tingkat daya beli masyarakat menjadi menurun dikarenakan beberapa faktor Untuk itu, Pemerintah Daerah harus mencari solusi melalui arah kebijakan di dalam menekan angka kemiskinan di daerah. Jika

kemiskinan ini tidak menjadi perhatian bersama, lama kelamaan akan menjadi bom waktu bagi daerah. Sehingga dalam hal ini diperlukan sebuah komitmen untuk penanggulanga kemiskinan di daerah dengan melibatkan lintas sektor baik lintas OPD maupun instansi vertikal untuk saling bergandengan tangan di dalam mengawal pengendalian kemiskinan daerah.

Keterbatasan alokasi anggaran pemerintah daerah di dalam penanggulangan kemiskinan juga harus menjadi salah satu perhatian di mana dalam hal ini Pemerintah Daerah harus dapat melibatkan pihak-pihak lain melalui dana *Coorporate Social Responsibilty* (CSR) untuk memiliki kewajiban sosial di dalam membantu pemerintah daerah didalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pelibatan pihak perusahaan di dalam pelaksanaan pembangunan daerah dinilai sangat efektif sehingga pembebanan alokasi anggaran pemerintah daerah untuk membiayai program pembangunan daerah dapat berkurang serta yang terpenting adalah dapat membangun rasa tanggung jawab perusahaan untuk berpartisipasi dan berkontribusi di dalam pembangunan daerah.

Di samping itu juga, pengendalian kemiskinan daerah juga dilakuka dengan cara memperbaiki database penduduk miskin yang ada serta penguatan fungsi verval di lapangan. Peran dari Pemerintah Desa bersama dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan serta Pekerja Sosial Masyarakat memegang peranan yang sangat vital didalam menyajikan data sasaran program penanggulangan kemiskinan yang tepat. Banyaknya program penanggulangan kemiskinan di daerah yang diberikan kepada masyarakat menuntut kita semua harus dapat diberikan kepada sasaran yang tepat sehingga tujuan penanggulangan kemiskinan dapat tercapai.

Adapun rincian program 2023 yang mendukung pencapaian sasaran “Menurunnya Angka Kemiskinan” antara lain :

1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
2. Program Rehabilitasi Sosial
3. Program Penanganan Bencana
4. Program Pemberdayaan Sosial
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
6. Program Penanganan Kerawanan Pangan
7. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
8. Program Pengawasan Keamanan Pangan
9. Program Pengembangan Perumahan
10. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
11. Program Kawasan Permukiman
12. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

Tabel II.62
Analisis Program Pendukung Sasaran “Menurunnya Angka Kemiskinan” Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	229.325.000,00	135.325.000,00	59,01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Rehabilitasi Sosial	1.843.985.000,00	1.712.473.557,00	92,86	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Penanganan Bencana	341.670.000,00	259.550.250,00	75,96	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pemberdayaan Sosial	487.800.000,00	479.800.000,00	98,35	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	6.829.024.150,00	5.676.000.215,00	83,11	Kecamatan
Program Penanganan Kerawanan Pangan	163.900.000,00	112.805.200,00	68,82	Dinas Pertanian dan Pangan
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	20.432.800,00	19.031.850,00	93,14	Dinas Pertanian dan Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	48.358.330,00	42.430.000,00	87,74	Dinas Pertanian dan Pangan
Program Pengembangan Perumahan	510.065.000,00	246.446.626,00	48,31	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.325.575.000,00	1.263.052.500,00	95,28	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
Program Kawasan Permukiman	1.155.310.000,00	849.027.110,00	73,48	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	3.668.800.570,00	3.466.269.150,00	94,47	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
Total	16.624.245.850,00	14.262.211.458,00	85,79	

Tabel. II.63
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran
Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Sasaran Kinerja (%)	Efektifitas
Menurunnya Angka Kemiskinan	85,79	-8,16	Tidak Efektif

Berdasarkan realisasi anggaran program pendukung pencapaian sasaran terkait penurunan kemiskinan di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2023 adalah sebesar 85,79%, dengan capaian indikator sasaran sebesar – 8,16 %. Dengan capaian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dalam pencapaian sasaran tersebut tidak efektif.

Anggaran yang telah dilaksanakan melalui program dan kegiatan belum dapat secara maksimal dimanfaatkan sehingga belum mampu menurunkan kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan dilakukan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian sasaran, terintegrasi dan terpadu dengan seluruh kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran serta direncanakan berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga tepat sasaran sesuai dengan pendekatan THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial).

Dalam penanggulangan kemiskinan yang dilakukan dengan pendekatan THIS, selain program-program pembangunan yang telah dipetakan untuk pencapaian sasaran “Menurunnya Angka Kemiskinan”, juga didukung oleh program-program dari perangkat daerah yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat seperti Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Serta program yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, serta Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki melalui APBD, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat juga mengoptimalkan penggunaan sumber daya lainnya antara lain melalui pelibatan pihak dunia usaha (swasta) dalam penanggulangan kemiskinan khususnya melalui *Corporate Social Responsibility* atau CSR oleh perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Bangka Barat.

Selain itu, dalam rangka mendukung program dan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat turut melibatkan sumber daya yang ada di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan melalui Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta Karang Taruna. Melalui PSKS yang ada di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan tersebut, maka pelaksanaan pendataan maupun verifikasi dan validasi lapangan terhadap masyarakat penerima manfaat dapat lebih efektif dan efisien.

Sasaran Strategis 2.2 “Menurunnya Angka Pengangguran”

Sasaran “Menurunnya Angka Pengangguran” diukur dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan perhitungan dari persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran adalah mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Sedangkan Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Semakin rendah tingkat pengangguran, maka dapat dikatakan tingkat ekonomi di suatu daerah semakin baik/maju, sekaligus merupakan tanda keberhasilan pemerintah dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan. TPT yang tinggi juga dapat menyebabkan tingkat perekonomian di masyarakat

melemah. Secara tidak langsung, dampak yang bisa ditimbulkan adalah meningkatnya potensi permasalahan sosial seperti kriminalitas dan kemiskinan.

Capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut :

Tabel II.64
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Menurunnya Angka Pengangguran Tahun 2023 terhadap Perjanjian Kerja

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	STATUS CAPAIAN
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	3,85	3,83	99,48	Sangat Baik

Pada Tahun 2023, realisasi TPT Kabupaten Bangka Barat sebesar 3,83% sehingga jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 sebesar 3,85%, maka tercapai 99,48% dengan status capaian “Sangat Baik”.

Dari angka TPT Kabupaten Bangka Barat sebesar 3,83% tersebut, maka penduduk yang tidak terserap oleh pasar kerja (pengangguran), dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 3-4 orang pengangguran.

Tabel II.65
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Menurunnya Angka Pengangguran Tahun 2023 Terhadap Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	%	STATUS CAPAIAN
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	4,86	3,83	121,19	Menurun

Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 dengan tingkat pengangguran sebesar 4,86%, TPT di Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 121,19%. Dilihat dari jumlah pengangguran di Kabupaten Bangka Barat, pada Tahun 2023 sebanyak 5351 orang menurun 128 orang atau 99,97% jika dibandingkan dengan Tahun 2022 dengan jumlah pengangguran sebanyak 5.479 orang. Sementara jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD di Tahun 2026 sebesar 3,61%, maka TPT hanya mencapai 93,91% dengan status capaian “Optimis Tercapai”.

Tabel II.66
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Menurunnya Angka Pengangguran Tahun 2023 terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2023	TARGET AKHIR RPJMD	(%)	STATUS CAPAIAN
Angka kemiskinan	Persentase	3,83	3,61	93,91	Optimis Tercapai

Berdasarkan perkembangan antar waktu TPT di Kabupaten Bangka Barat dari Tahun 2019 - 2023, maka TPT di Tahun 2023 sama capaiannya dengan TPT di Tahun 2021 yang lalu.

Tabel II.67
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 - 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Angkatan Kerja	103.518	102.281	104.271	112.728	112.271
Bekerja	100.563	98.067	100.277	107.249	106.920
Pengangguran	2.955	4.214	3.994	5.479	5.351

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
TPAK(Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) (%)	66,99	65,76	65,98	70,23	70,22
TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) (%)	2,85	4,12	3,83	4,86	3,83

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Angkatan Kerja merupakan salah satu potensi modal pembangunan daerah dalam pembangunan ekonomi. Angkatan kerja yang berkualitas tentu sangat mendukung percepatan pembangunan daerah, namun apabila angkatan kerja tidak difasilitasi dengan lapangan kerja yang tepat, tentu dapat menimbulkan masalah ketenagakerjaan yang selanjutnya akan menjadi beban dalam pembangunan.

Pada Tahun 2023, jumlah Angkatan kerja di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 112.271 orang dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 70,22%. TPAK merupakan indikator ketenagakerjaan yang digunakan sebagai tolak ukur potensi tenaga kerja suatu daerah. Dengan TPAK sebesar 70,22% artinya dari 100 penduduk usia kerja di Kabupaten Bangka Barat, 70 orang bersedia atau siap untuk melakukan aktivitas ekonomi.

Tabel II.68
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2019-2023

No.	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kab. Bangka	3,80	5,42	5,97	5,39	5,03
2.	Kab. Belitung	2,90	4,82	3,51	4,30	4,14
3.	Kab. Bangka Barat	2,85	4,12	3,83	4,86	3,83
4.	Kab. Bangka Tengah	4,39	5,59	4,95	3,99	3,88
5.	Kab. Bangka Selatan	3,87	5,42	5,29	5,09	4,84
6.	Kab. Belitung Timur	1,71	3,93	3,78	2,50	2,41
7.	Kota Pangkalpinang	5,01	6,93	6,81	5,90	5,76
	Prov. Kep. Bangka Belitung	3,39	5,25	5,03	4,77	4,56
	Indonesia	5,23	7,07	6,49	5,86	5,47

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Dilihat dari TPT kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Barat menduduki peringkat kedua terendah setelah Kabupaten Belitung Timur. Jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan angka 4,56%, maka TPT Kabupaten Bangka Barat lebih rendah dan jika dibandingkan dengan nasional dengan angka 5,47%, maka TPT Kabupaten Bangka Barat lebih baik atau lebih rendah.

Menurunnya TPT Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2023 diperkirakan adanya upaya peningkatan lapangan pekerjaan dari bebepa pihak mitra serta pengembangan sektor ekonomi di bidang UMKM melalui pemberian kredit usaha mikro kepada para pelaku usaha. Dengan adanya beberapa kebijakan ini dinilai cukup efektif untuk meningkatkan pembukaan lapangan pekerjaan.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah terkait ketenagakerjaan antara lain:

1. Memberikan Pelatihan Berbasis Kompetensi kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi yang dimiliki agar bisa bekerja secara mandiri;
2. Menyediakan Informasi Pasar Kerja *Online* atau informasi ketenagakerjaan melalui media sosial;
3. Mendorong pelaksanaan kegiatan pembangunan melalui padat karya;
4. Memberikan bantuan serta pemberdayaan usaha melalui dinas/perangkat daerah terkait;
5. Pengembangan wawasan, pengetahuan dan kemampuan kewirausahaan khususnya melalui digitalisasi UMKM dan pemasaran melalui jaringan media sosial;

6. Pengembangan usaha melalui penguasaan teknologi dan informasi pasar dan peningkatan pola kemitraan UKM dengan BUMN, perusahaan swasta dan pihak lainnya;
7. Meningkatkan sinergitas program dan kegiatan perangkat daerah dalam pengembangan usaha antara lain antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Peningkatan iklim investasi melalui kemudahan perizinan serta pengembangan investasi yang dapat berdampak penyerapan tenaga kerja lokal.
9. Mendorong perusahaan atau badan usaha di wilayah Kabupaten Bangka Barat untuk dapat melibatkan tenaga kerja lokal dan pemberian bantuan serta pemberdayaan di sekitar wilayah usaha khususnya melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Berdasarkan pemetaan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026, Program APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 yang mendukung pencapaian sasaran “Menurunnya Angka Pengangguran” antara lain :

- a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- b. Program Penempatan Tenaga Kerja;
- c. Program Hubungan Industrial.

Tabel II.69
Analisis Program Pendukung Sasaran “Menurunnya Angka Pengangguran”
Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	302.032.000,00	291.718,000,00	96,58	Dinas PM, PPTSP, Nakertrans
Program Penempatan Tenaga Kerja	19.790.000,00	19.790.000,00	100	Dinas PM, PPTSP, Nakertrans
Program Hubungan Industrial	8.110.000,00	7.510.000,00	92,6	Dinas PM, PPTSP, Nakertrans
Total	329.932.000,00	319.010.000,00	96,68	

Tabel. II.70
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran
Sasaran Menurunnya Angka Pengangguran Tahun 2023

Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Sasaran Kinerja (%)	Efektifitas
Menurunnya Angka Pengangguran	96,68	99,48	Efektif

Dengan realisasi anggaran program pendukung pencapaian sasaran terkait penurunan angka pengangguran di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2023 sebesar 96,68%, dibandingkan dengan capaian indikator sasaran sebesar 99,48%, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan sumber daya anggaran efektif. Dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dapat secara maksimal mendukung pencapaian sasaran terkait penurunan pengangguran.

Penerapan efektivitas dan efisiensi sumber daya dalam peningkatan kinerja ketenagakerjaan antara lain melalui koordinasi dengan dinas di tingkat provinsi terkait pemagangan serta pelatihan tenaga

kerja sehingga dapat bekerja secara mandiri melalui Balai Pelatihan Kerja Provinsi ataupun pemagangan tenaga kerja di perusahaan.

Sasaran Strategis 3.1 “Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan”

Sasaran strategis ini diukur dari beberapa capaian indikator kinerja sasaran, target dan realisasinya, diuraikan sebagai berikut.

Tabel II.71
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan terhadap Perjanjian Kerja

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	%	STATUS CAPAIAN
1.	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,47	7,47	100	Sangat Baik
2.	Harapan lama sekolah	Tahun	11,73	11,73	100	Sangat Baik
3.	Persentase sekolah Terakreditasi A	%	20,53	20,10	97,90	Baik

Pencapaian sasaran “Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan” diukur dari 3 (tiga) indikator yaitu Rata-rata lama sekolah, Harapan lama sekolah dan Persentase sekolah yang terakreditasi A. Berdasarkan tabel di atas, pada Tahun 2023 terdapat 2 (dua) indikator sasaran yang memenuhi target yang ditetapkan dengan kategori “Sangat Baik” dan 1 (satu) indikator sasaran dengan status “Baik”, jika dikonversi ke dalam bentuk persentase maka capaian indikator sasaran Tahun 2023 sebesar 99,90% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh persen). Secara rinci, capaian masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

Indikator Sasaran 3.1.1 “Rata-Rata Lama Sekolah”

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS merupakan salah satu komponen yang digunakan dalam penghitungan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) khususnya sektor pendidikan. Indikator RLS dalam metode baru menggunakan referensi penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pertimbangan telah menyelesaikan masa belajar. Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Asumsi yang berlaku umum, bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kualitas seseorang, baik pola pikir maupun polanya. mengindikasikan tingkat pendidikan maksimum yang ditargetkan adalah setara Sekolah Menengah Atas (SMA). Tingginya angka RLS/ *Mean Years of Schooling* (MYS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Dalam meningkatkan IPM di Kabupaten Bangka Barat pemerintah memberikan beberapa program untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah untuk mencapai wajib belajar 12 tahun.

Indikator RLS penduduk Kabupaten Bangka Barat tercatat memiliki pola yang semakin meningkat selama periode 2021-2023, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

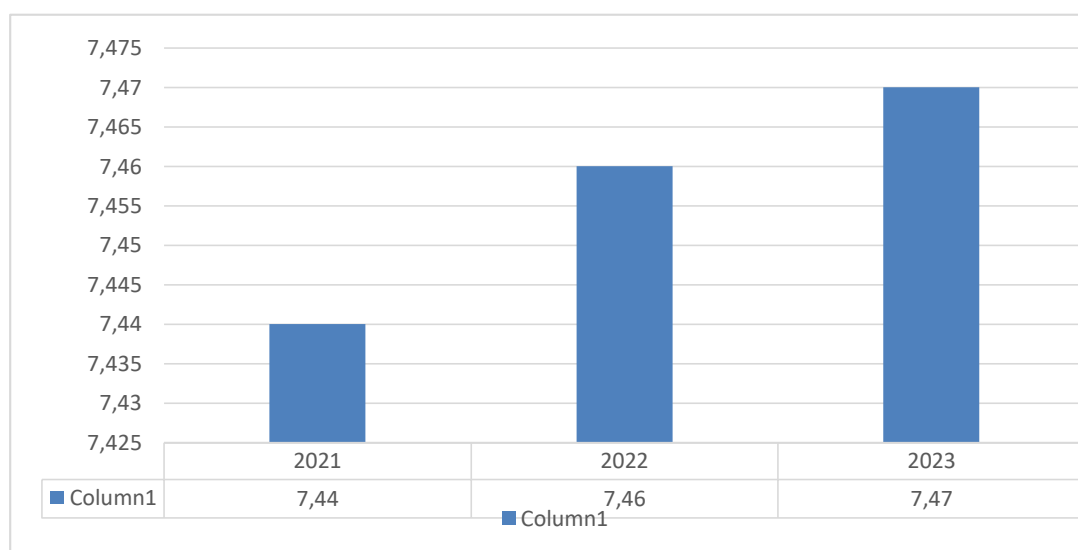
Tabel II.72
Indikator Rata-rata Lama Sekolah

Kabupaten	[Metode Baru] Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)		
	2021	2022	2023
Bangka Barat	7,44	7,46	7,47

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2023 mencapai 7,47 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Bangka Barat menempuh pendidikan sampai kelas 1 atau 2 setara SMP/ sederajat. Angka ini tergolong rendah karena belum memenuhi target wajib belajar sembilan tahun. Di era globalisasi seperti sekarang ini, dimana persaingan pada pasar tenaga kerja semakin tinggi, penduduk Kabupaten Bangka Barat harus terus meningkatkan kompetensi pendidikan agar tidak tertinggal dari penduduk di Kabupaten lain.

Grafik II.21
Rata-Rata Lama Sekolah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021–2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Bangka Barat, 2024

Tabel II.73
Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	8,23	8,24	8,25	8,27	8,32
Belitung	8,41	8,46	8,47	8,74	8,98
Bangka Barat	7,21	7,22	7,44	7,46	7,47
Bangka Tengah	7,13	7,19	7,20	7,22	7,23
Bangka Selatan	6,42	6,67	6,71	6,89	6,91
Belitung Timur	8,15	8,22	8,47	8,67	8,90
Pangkal Pinang	9,80	9,92	10,13	10,27	10,50
Kepulauan Bangka Belitung	7,98	8,06	8,08	8,11	8,25

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/ BPS-Statistics of Bangka Belitung Province

Jika dibandingkan dengan capaian kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2023, Kabupaten Bangka Barat berada pada posisi ke-5 setelah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur dan Kabupaten Bangka.

Capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebesar 8,25.

Indikator Sasaran 3.1.2 “Harapan Lama Sekolah”

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

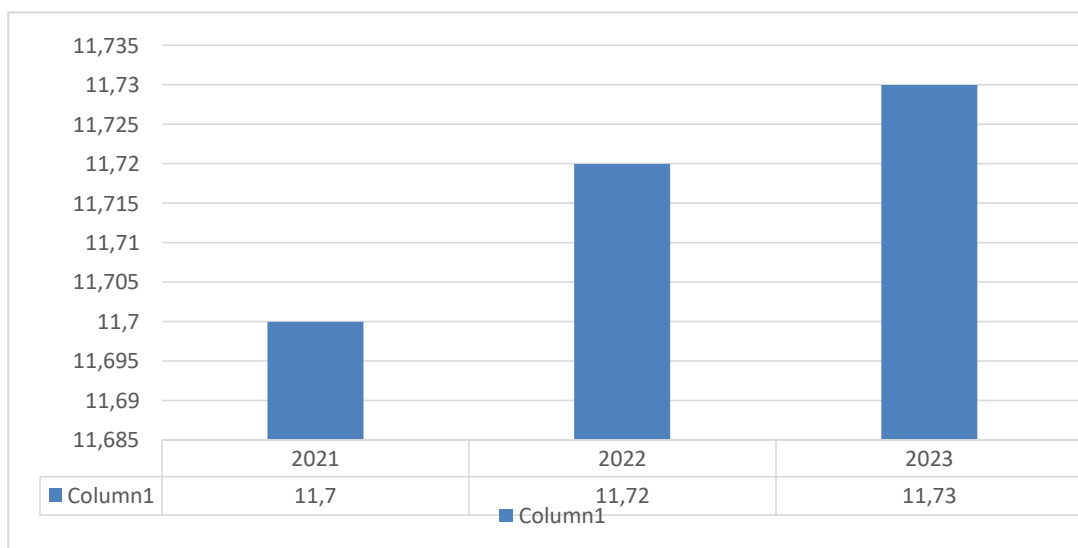
Angka HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka HLS dihitung untuk usia 7 (tujuh) tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar yang dimulai dari usia 7 (tujuh) tahun.

Indikator Angka HLS di Kabupaten Bangka Barat merupakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Capaian Angka HLS di tahun 2023 sebesar 11.73 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel II.74
Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2023

Kabupaten	[Metode Baru} Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
	2021	2022	2023
Bangka Barat	11,7	11,72	11,73

Grafik II.22
Angka Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 – 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Bangka Barat, 2024

Dari Grafik diatas dapat diketahui bahwa bahwa angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Bangka Barat dari tahun ke Tahun mengalami peningkatan, hal ini disebabkan dukungan dari

Pemerintah daerah dalam melaksanakan wajib belajar bagi anak usia sekolah dan peningkatan infrastruktur penunjang sarana dan prasarana Pendidikan.

Indikator Sasaran 3.1.3 “Persentase Sekolah Terakreditasi A”

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat juga melakukan upaya penjaminan kualitas pendidikan di tingkat satuan pendidikan melalui pelaksanaan pemetaan mutu, fasilitasi dan pendampingan, serta bantuan peningkatan kualitas dan dilanjutkan dengan pengukuran kualitas satuan pendidikan melalui akreditasi. Jumlah SD dan SMP di Kabupaten Bangka Barat yang terakreditasi dan belum terakreditasi di tahun 2023 tampak pada tabel berikut.

Tabel II.75
Jumlah Sekolah Terakreditasi dan Belum Terakreditasi
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2023

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI								
	AKREDITASI A	25	30	31	29	25	24	22	23
	AKREDITASI B	87	90	92	93	95	98	101	101
	AKREDITASI C	18	13	9	14	16	16	14	17
	BELUM TERAKREDITASI	8	5	6	3	3	3	5	3
		138	138	138	139	139	141	142	144
	SMP/MTs								
2	AKREDITASI A	19	20	20	19	19	18	17	16
	AKREDITASI B	16	17	18	20	20	20	21	22
	AKREDITASI C	2	3	4	4	4	8	8	9
	BELUM TERAKREDITASI	8	6	4	3	3	0	2	3
		45	46	46	46	46	46	48	50
	PAUD								
3	AKREDITASI A							4	4
	AKREDITASI B							41	56
	AKREDITASI C							60	91
	BELUM TERAKREDITASI							60	13
		0	0	0	0	0	0	165	164

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab. Bangka Barat, 2024

Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Bangka Barat telah memiliki banyak SD dan SMP yang terakreditasi. Jumlah SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Bangka Barat yang telah terakreditasi A hingga tahun 2023 sebanyak 39 sekolah dari 194 sekolah, yang terdiri dari Jumlah, SD/MI yang telah terakreditasi A sebanyak 23 dan SMP/MTs yang telah terakreditasi A sebanyak 16 sekolah sehingga capaian sekolah terakreditasi A tahun 2023 yaitu 20.10 %. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa setiap tahun selalu terjadi perubahan status akreditasi baik di tingkat SD maupun SMP. Capaian tersebut dipengaruhi antara lain oleh:

- **Satuan Pendidikan Dasar terakreditasi A**

Jumlah Sekolah Dasar (SD) dan MI sebanyak 144 Satuan Pendidikan dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan MTS sebanyak 50 Satuan Pendidikan dengan jumlah Satuan Pendidikan Dasar

terakreditasi A tahun 2023 sebanyak 39 sekolah yang terdiri dari SD/MI sebanyak 23 sekolah dan SMP sebanyak 16 sekolah. Indikator ini belum mencapai target 2023 yaitu 60 sekolah. Hal ini masih perlu dilakukan dorongan, pembinaan dan pendampingan kepada calon sekolah yang akan diusulkan dalam akreditasi maupun peningkatan akreditasi oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dan berkoordinasi dengan Badan Akreditasi Nasional. Faktor penghambat satuan pendidikan belum memenuhi Akreditasi A antara lain administrasi sekolah masih kurang tertata, pemenuhan standar sarana dan prasarana sekolah dan kualifikasi guru ada yang belum S1.

Untuk meningkatkan Persentase sekolah Terakreditasi A, perlu dilakukan faktor – faktor antara lain :

- (1) Penguatan pendampingan satuan pendidikan dalam melakukan penjaminan mutu pendidikan;
- (2) Penguatan kapasitas pelaksanaan akreditasi termasuk peningkatan jumlah sasaran satuan pendidikan yang diakreditasi;
- (3) Peningkatan penyediaan fasilitas pembelajaran yang memadai dan peningkatan kualitas pengajar dan peserta didik.

Tabel II.76
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan terhadap Capaian Tahun Sebelumnya

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	%	STATUS CAPAIAN
1.	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,46	7,47	100,13	Meningkat
2.	Harapan lama sekolah	Tahun	11,72	11,73	100,08	Meningkat
3.	Persentase sekolah Terakreditasi A	%	21,84	20,10	92,03	Menurun

Secara keseluruhan untuk pencapaian indikator Sasaran ” **Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan**” jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel diatas bahwa indikator sasaran kinerja Persentase sekolah Terakreditasi A mengalami penurunan sebesar 0,74 poin, sedangkan 2 (dua) Indikator yaitu Rata-rata lama sekolah (RLS) dan Harapan lama sekolah (HLS) mengalami kenaikan yaitu masing-masing RLS dan HLS sebesar 0,1 (nol koma satu).

Tabel II.77
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan Tahun 2023 Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2023	TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN
Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,47	7,38	101,21	Optimis tercapai
Harapan lama sekolah	Tahun	11,73	11,58	101,29	Optimis tercapai
Persentase sekolah Terakreditasi A	%	20,10	26,49	75,87	Optimis tercapai

Secara keseluruhan untuk pencapaian indikator Sasaran ” **Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan**” jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di atas.

Pencapaian kinerja indikator sasaran ”**Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan**” di Tahun 2023, semuanya optimis tercapai.

Dalam pencapaian sasaran **Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan**, didukung oleh program pembangunan yang dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Program Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3. Program Pengembangan Kurikulum
4. Program Pembinaan Perpustakaan

Tabel II.78
Analisis Program Sasaran
Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5=4/3*100%
3.1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				
3.1.1 Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan				
1	Program Pengelolaan Pendidikan	95.356.420.000,00	53.318.638.312,00	55,91
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	37.150.000,00	37.130.000,00	99,94
3	Program Pengembangan Kurikulum	15.000.000,00	14.547.000,00	96,98
4	Program Pembinaan Perpustakaan	393.368.500,00	390.090.805,00	99,16
	Total	95.801.938.500,00	53.760.406.117,00	56,11

NO	SASARAN STRATEGIS	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Sasaran Kinerja	Efektifitas
1	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	56,11	99,30	efektif

Dengan realisasi anggaran program pendukung pencapaian sasaran terkait di Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2023 sebesar 56,11%, dibandingkan dengan capaian indikator sasaran sebesar 99,30%, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan sumber daya anggaran efektif. Dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan secara maksimal mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan.

Sasaran Strategis 3.2 “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat”

Pengukuran Sasaran ”Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat” dilakukan melalui indikator Angka Harapan Hidup dan Prevalensi Stunting. Capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut:

Tabel II.79
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat terhadap Perjanjian Kerja

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	%	STATUS CAPAIAN
Angka Harapan Hidup	Tahun	70,56	70,43	99,81	Baik
Prevalensi Stunting	%	7,46	8,1	92,09	Baik

Pencapaian sasaran "**Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat**" diukur dari 2 (dua) indikator yaitu Angka harapan hidup dan Prevalensi stunting. Berdasarkan tabel di atas, pada Tahun 2023 semua indikator sasaran memenuhi target yang ditetapkan dengan kategori capaian "Baik", jika dikonfersi ke dalam bentuk persentase maka capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 145,85 % . Secara rinci, capaian masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

Indikator sasaran 3.2.1 "Angka Harapan Hidup"

Strategis RPJMD Kabupaten Bangka Barat adalah meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan dengan indikator angka harapan hidup (Misi 2 RPJMD Kabupaten Bangka Barat). Berdasarkan data statistik, angka harapan hidup Kabupaten Bangka Barat saat ini 70,43 meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi yang secara tak langsung dapat meningkatkan angka harapan hidup. Angka harapan hidup adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Menurut Statistics Indonesia, angka harapan hidup pada saat lahir (life expectancy at birth) ialah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka Harapan Hidup di suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya tergantung dari kualitas hidup yang mampu dicapai oleh penduduk. Meningkatnya atau menurunnya Angka Harapan Hidup tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi. Faktor penyebab dari Angka Harapan Hidup dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sosial- ekonomi, lingkungan, dan demografi. Sehingga derajat kesehatan masyarakat bisa meningkat jika kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan dari suatu wilayah itu sudah baik. Perlunya peran seluruh sektor dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Angka harapan hidup Kabupaten Bangka Barat dari tahun ketahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.80
Angka Harapan Hidup
Tahun 2011 s.d 2023

TAHUN	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Angka Harapan Hidup	69,32	69,39	69,44	69,46	69,47	69,52

TAHUN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Harapan Hidup	69,56	69,73	69,99	70,06	70,08	70,25	70,43

Sumber BPS Kabupaten Bangka Barat, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa Angka Harapan Hidup mengalami peningkatan dari tahun ketahun dengan capaian saat ini 70,43, hal ini berarti derajat kesehatan masyarakat juga mengalami peningkatan. Namun peningkatannya tidak signifikan pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022.

Indikator kesehatan dalam IPM yaitu Umur Harapan Hidup (UHH)/Angka Harapan Hidup (AHH) yang digunakan untuk mengukur pembangunan kesehatan sampai dengan tingkat kabupaten/kota. Diharapkan pembangunan manusia dari sektor kesehatan, selain mengupayakan agar penduduk dapat mencapai “usia hidup” yang panjang tetapi juga sehat berkualitas dan tidak bergantung pada orang lain. Selain itu, belum ada arah intervensi yang jelas khususnya di bidang kesehatan untuk meningkatkan UHH, sehingga diperlukan penjabaran yang lebih rinci dari indikator kesehatan yang terkait dengan UHH. Oleh karena itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan RI menyusun Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM). IPKM adalah kumpulan indikator kesehatan yang dapat dengan mudah dan langsung diukur untuk menggambarkan masalah kesehatan. Serangkaian indikator kesehatan ini secara langsung maupun tidak langsung dapat berperan meningkatkan umur harapan hidup yang panjang dan sehat. Prinsip umum indikator yang digunakan dalam penyusunan IPKM adalah sederhana, mudah, dapat diukur, bermanfaat, dipercaya, dan tepat waktu. Indikator-indikator terpilih dalam IPKM lebih menunjukkan dampak dari pembangunan kesehatan tahun sebelumnya dan menjadi acuan perencanaan program pembangunan kesehatan untuk tahun berikutnya. Sebagian besar indikator dalam IPKM 2018 menggunakan data Riskesdas 2018, karena kebutuhan penyediaan data untuk menyusun IPKM menjadi salah satu pertimbangan saat penyusunan indikator dalam Riskesdas. Selain pertimbangan utama lainnya yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di bidang kesehatan, Rencana strategis (Renstra), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Program Indonesia Sehat-Pendekatan Keluarga (PIS-PK), dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), serta pertimbangan secara referensi dan rekomendasi pelaksana program kesehatan.

Tujuh (7) sub indeks dalam IPKM 2018 yang informasinya diperoleh dari data hasil Riskesdas 2018, Susenas 2018 terintegrasi Riskesdas 2018, dan Podes 2018, yakni:

- a. Sub indeks kesehatan balita, terdiri dari 6 indikator, yaitu: balita gizi buruk dan kurang, balita sangat pendek dan pendek (stunting), balita gemuk, penimbangan balita, kunjungan neonatal (KN) 1, imunisasi lengkap
- b. Sub indeks kesehatan reproduksi, terdiri dari 3 indikator, yakni: penggunaan alat kontrasepsi, pemeriksaan kehamilan (K4), Kurang Energi Kronis (KEK) pada Wanita Usia Subur (WUS).
- c. Sub indeks pelayanan kesehatan, terdiri dari 5 indikator, yaitu: persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, proporsi kecamatan dengan kecukupan jumlah dokter per penduduk, proporsi desa dengan kecukupan jumlah posyandu per desa, proporsi desa dengan kecukupan jumlah bidan per penduduk, kepemilikan jaminan pelayanan kesehatan

- d. Sub indeks perilaku kesehatan, terdiri dari 5 indikator pembentuknya, yaitu: kebiasaan merokok, kebiasaan cuci tangan, buang air besar (BAB) di jamban, aktivitas fisik dan kebiasaan menggosok gigi.
- e. Sub indeks Penyakit Tidak Menular (PTM) dan faktor risikonya, mencakup enam indikator pembentuknya, antara lain: hipertensi, cedera, diabetes mellitus, gangguan mental emosional (kesehatan jiwa), obesitas sentral, kesehatan gigi dan mulut.
- f. Sub indeks Penyakit Menular (PM), terdiri dari tiga indikator, yakni: pneumonia, diare balita, Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) balita.
- g. Sub indeks kesehatan lingkungan, terdiri dari dua indikator yakni akses sanitasi dan akses air bersih

Nilai IPKM Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2018 sebesar **0,6059**, hal ini berarti kondisi kesehatan masyarakat membaik karena mendekati indeks 1. Adapun capaian IPKM Kabupaten Bangka Barat tahun 2018 perindikator dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.81
Indikator Sub Indeks dalam IPKM Kabupaten Bangka Barat

No	Indikator	Indeks rata-rata
1	Sub Indeks Kesehatan Balita	0,7084
2	Sub Indeks Kesehatan Reproduksi	0,5900
3	Sub Indeks Pelayanan Kesehatan	0,3596
4	Sub Indeks Perilaku Kesehatan	0,4498
5	Sub Indeks Penyakit Tidak Menular	0,4612
6	Sub Indeks Penyakit Menular	0,9513
7	Sub Indeks Kesehatan Lingkungan	0,7213

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa dari 7 sub indeks rata-rata sub indeks yang masih jauh dari nilai indeks 1 yaitu sub indeks pelayanan kesehatan, perilaku kesehatan dan penyakit tidak menular. Hal ini sejalan dengan banyaknya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal sehingga masyarakat puas terhadap pelayanan dan arah kejadian penyakit yang saat ini lebih difokuskan kepada penyakit tidak menular sebagai akibat pola hidup yang semakin kurang sehat serta perilaku yang merupakan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu perhatian pada indikator yang menjadi alat ukur sub indeks tersebut diantaranya persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, proporsi kecamatan dengan kecukupan jumlah dokter per penduduk, proporsi desa dengan kecukupan jumlah bidan per penduduk, kepemilikan jaminan pelayanan kesehatan, kebiasaan merokok, kebiasaan cuci tangan, buang air besar (BAB) di jamban, aktivitas fisik, hipertensi, cedera, diabetes mellitus, gangguan mental emosional (kesehatan jiwa), obesitas sentral, kesehatan gigi dan mulut.

Berdasarkan uraian diatas dapat kita lihat bahwa perlunya perhatian khusus terhadap indikator IPKM yang capaiannya masih rendah atau jauh dari target untuk meningkatkan angka harapan hidup dari sektor kesehatan. Selain itu angka harapan hidup juga berkaitan dengan angka kematian bayi dan angka kematian neonates, karena semakin kecil umur kematian maka akan semakin kecil pula angka harapan hidup. Angka kematian bayi dan neonates selama 5 tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.82

Angka Kematian Bayi dan Neonates

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target Nasional
1	Angka kematian neonatus (per 1000 KH)	5	4	5	4	6	7	12,59	15
2	Angka kematian bayi (per 1000 KH)	6	5	6	7	9	8	16,89	24
3	Angka kematian balita (per 1000 KH)	8	7	7	8	9	10	18,73	32

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa capaian Kabupaten Bangka Barat masih dibawah target nasional, namun mengalami peningkatan kematian dari tahun sebelumnya. Selain angka kematian, angka kesakitan juga mengalami peningkatan, jika dilihat dari data tahunan yang ada dibidang kesehatan, contohnya untuk DM dengan ketetapan sasaran Riskesdas 2018, capaian Kabupaten Bangka Barat lebih dari 100%, hal ini menandakan bahwa saat ini ada peningkatan angka kesakitan. Selain sektor kesehatan ada beberapa sektor yang juga sangat berpengaruh terhadap Angka Harapan Hidup (AHH). Sektor ekonomi, sosial dan lingkungan sangat berpengaruh terhadap AHH, jika melihat beberapa tahun ini dimana adanya penyakit covid 19 juga mempengaruhi sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Oleh karena itu angka harapan hidup tidak hanya bisa ditingkatkan melalui sektor kesehatan. Kemampuan dan kesadaran masyarakat sangatlah penting untuk meningkatkan angka harapan hidup. Melalui kebiasaan untuk deteksi dini penyakit akan diketahui lebih awal kejadian penyakit sehingga dapat diobati dengan cepat. Namun hal ini harus diikuti dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Karna jika kemampuan ekonomi masyarakat hanya mampu untuk memenuhi kehidupan sehari-hari maka kecil kemungkinan masyarakat untuk sadar dengan arti pentingnya kesehatan sehingga akan sulit untuk meningkatkan usia harapan hidup seseorang.

Capaian usia harapan hidup tahun 2023 yaitu 70,43 tahun, hal ini berarti capaian tahun 2023 sudah mencapai target RPJMD tahun 2022 (70,41 tahun). Banyak faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target, seperti yang telah dijelaskan diatas, diantaranya:

1. Pelayanan kesehatan yang terfokus pada jumlah tenaga kesehatan yang belum memadai terutama jumlah dokter, kepemilikan jaminan kesehatan yang belum maksimal. Saat ini kondisi jaminan kesehatan sudah UHC atau lebih dari 80% masyarakat sudah memiliki jaminan kesehatan, tetapi kepemilikan tersebut yang didanai secara mandiri masih terbatas dan ada yang tidak aktif. Selain itu jaminan kesehatan yang didanai Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menggunakan sebagian besar dana APBD Bangka Barat sehingga tidak bisa memberikan kontribusi yang banyak untuk program kesehatan yang lain.
2. Semakin meningkatnya penyakit tidak menular seperti DM, hipertensi, jiwa, dan lainnya yang menyebabkan kualitas hidup seseorang menurun, sehingga menurunnya angka usia harapan hidup.
3. Perilaku kesehatan seperti kebiasaan merokok, kebiasaan cuci tangan, buang air besar (BAB) di jamban, dan aktivitas fisik masih belum menjadi kesadaran yang penting untuk masyarakat Bangka Barat. Saat ini hanya 32% desa di Kabupaten Bangka Barat yang sudah ODF, yang berarti bahwa masih ada masyarakat yang tidak memiliki jamban. Capaian perilaku hidup bersih dan sehat hanya 30,74% yang masih jauh dari target nasional (45%), hal ini sebagian besar didominasi oleh kebiasaan

merokok, ASI eksklusif, makan buah dan sayur serta aktivitas fisik yang masih sangat rendah. Selain hal-hal tersebut diatas kesadaran masyarakat untuk deteksi dini penyakit, ikut dalam seluruh aktivitas kesehatan seperti melakukan kunjungan 4 kali selama hamil, kunjungan neonatus 3 kali untuk bayi, persalinan di fasilitas kesehatan, melakukan penimbangan balita 8 kali setahun, kunjungan ke Posyandu Usila, serta kunjungan ke Posbindu juga masih rendah.

4. Kondisi sosial- ekonomi, lingkungan, dan demografi juga sangat berpengaruh terhadap capaian usia harapan hidup. Penting untuk seseorang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi, karna dengan hal itu akan sedikit memungkinkan untuk seseorang peduli dengan kesehatannya, karena rendahnya tingkat ekonomi seseorang akan menyebabkan seseorang peduli hanya dengan kebutuhan sehari-harinya.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan usia harapan hidup, diantaranya:

1. Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor, karna usia harapan hidup dipengaruhi oleh banyak faktor, sehingga tidak akan bisa ditingkatkan jika hanya difokuskan pada sektor kesehatan saja.
2. Edukasi masyarakat yang bisa dilakukan dengan berbagai cara penyuluhan, bimbingan, kunjungan rumah maupun komitmen pemerintah melalui surat edaran, peraturan dan lainnya yang bisa berpengaruh dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan.
3. Pemenuhan tenaga kesehatan terutama dokter karena saat ini Kabupaten Bangka Barat masih kekurangan dokter, perlu inovasi agar dokter tertarik untuk menjadi tenaga kesehatan di Kabupaten Bangka Barat. Karena saat ini minat dokter untuk bekerja di Kabupaten Bangka Barat masih rendah.

Indikator sasaran 3.2.2 “Prevalensi Stunting”

Pertumbuhan anak tidak hanya dilihat dari berat badan, tetapi juga tinggi. Pasalnya, tinggi badan anak termasuk faktor yang menandai stunting dan menjadi penanda apakah nutrisi anak sudah tercukupi atau belum. stunting adalah kondisi yang ditandai ketika panjang atau tinggi badan anak kurang jika dibandingkan dengan umurnya. Mudahnya, stunting adalah kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan tubuhnya lebih pendek ketimbang teman-teman seusianya dan memiliki penyebab utama kekurangan nutrisi. Banyak yang tidak tahu kalau anak pendek adalah tanda dari adanya masalah gizi kronis pada pertumbuhan tubuh si kecil. Hanya saja, perlu diingat bahwa anak [pendek belum tentu stunting](#), sedangkan anak stunting pasti terlihat pendek.

Anak masuk ke dalam kategori stunting ketika panjang atau tinggi badannya menunjukkan angka di bawah -2 standar deviasi (SD). Terlebih lagi, jika kondisi ini dialami anak yang masih di bawah usia 2 tahun dan harus ditangani dengan segera dan tepat. [Penilaian status gizi](#) dengan standar deviasi tersebut biasanya menggunakan grafik pertumbuhan anak (GPA) dari WHO. Tubuh pendek pada anak yang berada di bawah standar normal merupakan akibat dari kondisi [kurang gizi](#) yang telah berlangsung dalam waktu lama. Hal tersebut yang kemudian membuat pertumbuhan tinggi badan anak terhambat sehingga mengakibatkan dirinya tergolong stunting. Namun, anak dengan tubuh pendek belum tentu serta merta mengalami stunting. Kondisi ini hanya terjadi ketika asupan nutrisi harian anak kurang sehingga memengaruhi perkembangan tinggi badannya. Masalah kesehatan ini merupakan akibat dari berbagai faktor yang terjadi pada masa lalu. Berbagai faktor tersebut antara lain asupan gizi yang buruk, berkali-kali terserang penyakit infeksi, [bayi lahir prematur](#), serta [berat badan lahir rendah \(BBLR\)](#). Kondisi tidak

tercukupinya asupan gizi anak ini biasanya tidak hanya terjadi setelah ia lahir saja, melainkan bisa dimulai sejak ia masih di dalam kandungan.

Dua poin utama yang menjadi faktor penyebab stunting pada anak:

1. Kurang asupan gizi selama hamil
[WHO](#) atau badan kesehatan dunia menyatakan bahwa sekitar 20% kejadian stunting sudah terjadi saat bayi masih berada di dalam kandungan. Hal ini disebabkan oleh asupan ibu selama hamil yang kurang bergizi dan berkualitas sehingga nutrisi yang diterima janin cenderung sedikit. Akhirnya, pertumbuhan di dalam kandungan mulai terhambat dan terus berlanjut setelah kelahiran. Oleh karena itu, penting untuk mencukupi [berbagai nutrisi penting selama hamil](#).
2. Kebutuhan gizi anak tidak tercukupi
 Selain itu, kondisi ini juga bisa terjadi akibat [makanan balita](#) saat masih di bawah usia 2 tahun yang tidak tercukupi, seperti [posisi menyusui](#) yang kurang tepat, tidak diberikan [ASI eksklusif](#), hingga [MPASI](#) (makanan pendamping ASI) yang kurang berkualitas. Banyak teori yang menyatakan bahwa kurangnya asupan makanan juga bisa menjadi salah satu faktor utama penyebab stunting. Khususnya asupan makanan yang mengandung protein serta mineral zinc (seng) dan zat besi ketika anak masih berusia balita. Kejadian ini umumnya sudah mulai berkembang saat anak berusia 3 bulan. Proses perkembangan tersebut lambat laun mulai melambat ketika anak berusia 3 tahun. Setelah itu, grafik penilaian tinggi badan berdasarkan umur (TB/U), terus bergerak mengikuti kurva standar tapi dengan posisi berada di bawah. Ada sedikit perbedaan kondisi stunting yang dialami oleh kelompok usia 2 – 3 tahun dan anak dengan usia lebih dari 3 tahun. Pada anak yang berusia di bawah 2 – 3 tahun, rendahnya pengukuran grafik tinggi badan menurut usia (TB/U) bisa menggambarkan proses stunting yang sedang berlangsung. Sementara pada anak yang berusia lebih dari itu, kondisi tersebut menunjukkan kalau kegagalan pertumbuhan anak memang telah terjadi (*stunted*).

Selain itu, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan stunting pada anak, yaitu:

- Kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan.
- Terbatasnya akses pelayanan kesehatan, termasuk layanan kehamilan dan *postnatal* (setelah melahirkan).
- Kurangnya akses air bersih dan sanitasi.
- Masih kurangnya akses makanan bergizi karena tergolong mahal.

Updating data di periode Tahun 2023 angka persentase dalam kurun enam tahun terakhir, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel II.83
Kondisi stunting di Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2018-2023

Tahun	Jumlah Balita Diukur	Jumlah Balita Stunting	Prevalensi Balita Stunting
2018	10705	2204	20,59
2019	12873	2183	16,96
2020	14134	1750	12,38
2021	13980	1552	11,10
2022	13197	1262	9,56
2023	13109	1173	8,1

Sumber ePPGBM (data diolah oleh DP2KBP3A)

Tabel II.84
Kondisi stunting di Kabupaten Bangka Barat

NO	KECAMATAN	JUMLAH BALITA DIUKUR	JUMLAH BALITA STUNTING	PREVALENSI BALITA STUNTING
1.	MENTOK	2755	110	4
2.	SIMPANG TERITIP	2058	407	19,8
3.	JEBUS	1579	137	8,7
4.	PARITTIGA	2251	168	7,5
5.	KELAPA	2510	224	8,9
6.	TEMPILANG	1956	127	6,5
	JUMLAH	13109	1173	8,1

Dari tabel di atas jelas bahwa terdapat salah satu Kecamatan di wilayah Kabupaten Barat yang angka prevalensi nya di atas rata-rata nasional yakni Kecamatan Simpang Teritip dengan persentase sebesar 19,8 persen. Hal tersebut tentu menjadi menarik ketika angka prevalensi Kabupaten Bangka Barat hampir memenuhi target RPJMD dan sudah di level aman jika dibandingkan target Nasional, berbanding terbalik dengan data di salah satu kecamatan-nya hampir mendekati angka 20 persen.

Dari tabel di atas jelas bahwa terdapat salah satu Kecamatan di wilayah Kabupaten Barat yang angka prevalensi nya di atas rata-rata nasional yakni Kecamatan Simpang Teritip dengan persentase sebesar 19,8 persen. Hal tersebut tentu menjadi menarik ketika angka prevalensi Kabupaten Bangka Barat hampir memenuhi target RPJMD dan sudah di level aman jika dibandingkan target Nasional, berbanding terbalik dengan data di salah satu kecamatan-nya hampir mendekati angka 20 persen.

Tabel II.85
Kondisi Stunting di Kecamatan Simpang Teritip

NO	DESA	JUMLAH BALITA DIUKUR	JUMLAH BALITA STUNTING	PREVALENSI BALITA STUNTING
1.	RAMBAT	69	19	27,5
2.	SIMPANG GONG	81	14	17,3
3.	PELANGAS	123	21	17,1
4.	BERANG	287	75	26,1
5.	IBUL	172	45	26,2
6.	PERADONG	153	37	24,2
7.	AIR NYATOH	227	47	20,7
8.	KUNDI	180	33	18,3
9.	SIMPANG TIGA	187	50	26,7
10.	AIR MENDUYUNG	125	22	17,6
11.	MAYANG	161	8	5,0
12.	PANGEK	162	22	13,6
13	BUKIT TERAK	131	14	10,7

Berdasarkan data prevalensi per-Desa di Kecamatan Simpang Teritip bahwa dari 13 desa di Kecamatan Simpang Teritip terdapat hanya tiga Desa saja yang dibawah angka rata-rata Nasional yakni Desa Mayang dengan angka prevalensi sebesar 5 persen, Desa Pangek dengan angka prevalensi sebesar 13,6 persen, dan Desa Bukit Trak dengan angka prevalensi sebesar 10,7 persen. Sedangkan 10 desa lainnya jelas di atas rata-rata Nasional.

Dari 10 desa tersebut, disepakati untuk diperkecil lingkup pembahasan dalam penyusunan RB Tematik Stunting Tahun 2023 menjadi focus kepada desa yang di atas rata-rata Nasional dengan angka prevalensi di atas 20 persen. Sehingga dapat dikerucutkan lagi menjadi 6 desa yang angka prevalensi nya di atas 20 persen, yakni : Desa Rambat dengan angka prevalensi stunting sebesar 27,5 persen, Desa Berang dengan angka prevalensi stunting sebesar 26,1 persen, Desa Ibul dengan angka prevalensi stunting sebesar 26,2 persen, Desa Peradong dengan angka prevalensi stunting sebesar 24,2 persen, Desa Air Nyatoh dengan angka prevalensi stunting sebesar 20,7 persen dan Desa Simpang Tiga dengan angka prevalensi stunting sebesar 26,7 persen.

Faktor ekonomi sangat berpengaruh tercapai capaian stunting dikarenakan sebagian desa balita stunting disebabkan pola asuh yang diantaranya disebabkan kesibukan orang tua untuk mencari nafkah sehingga tidak mampu menyediakan asupan gizi yang seimbang serta kurang peduli dengan asupan gizi anaknya. Selain faktor ekonomi juga disebabkan pengetahuan orang tua tentang gizi yang masih rendah sehingga gizi anak tidak menjadi prioritas dalam rumah tangga.

Terkait dengan hal tersebut diatas maka diharapkan kerjasama seluruh sektor yang sudah mulai digerakan sejak tahun 2016 dengan nama GT2S24 yaitu Gerakan Terarahnya Tangani Stunting dengan 24 langkah yang dilaksanakan bersama OPD-OPD terkait stunting. Melalui SG2S24 sudah mulai ada penurunan kejadian stunting diwilayah Kabupaten Bangka Barat, karena melalui dana yang terfokus dengan stunting tetapi dikerjakan seluruh OPD sangat besar pengaruhnya terhadap capaian penurunan stunting.

Secara umum, masalah stunting tidak bisa diselesaikan melalui program gizi saja, tetapi harus terintegrasi dengan program lainnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketersediaan air bersih dan sanitasi layak juga berkontribusi besar dalam hal penanganan stunting. Memiliki sanitasi yang layak pun tidak serta merta membebaskan suatu lingkungan dari stunting, jika tidak disertai dengan perubahan prilaku. Begitu pula dengan tidak optimalnya program gizi dan asupan makanan serta vitamin jika tidak disertai dengan pola asuh yang benar.

Mengingat hal tersebut, maka masalah percepatan penurunan stunting tidak bisa selesai dari capaian kinerja satu OPD saja namun kontribusi besar dari masing-masing stake holder yang beririsan dengan “masalah percepatan penurunan stunting. Sebagaimana dapat di lihat dari tabel di bawah ini, adalah hasil evaluasi pemetaan program dari Tim Percepatan Penurunan Stunting:

Tabel II.86
Hasil Evaluasi Masalah Percepatan Penurunan Stunting

NO	INDIKATOR	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1	Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil KEK	Jumlah ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan
2	Anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	Pelatihan Kader konselor PMBA	Jumlah kader yang dilatih kader PMBA
3	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi dengan masalah gizi	Jumlah balita gizi kurang mendapat makanan tambahan
4	Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	Pelaksanaan Pelayanan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase desa yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap
5	Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri	Lomba masak ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan
6	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan	Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan KB	Meningkatnya Kesertaan Ber KB, serta menurunkan TFR dan Unmeetneed
7	Keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan	Pendampingan Catin, Bumil, Bufas dan surveillance Keluarga	Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting
8	Keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan	Rapat koordinasi Pencegahan dan penanganan Stunting	Terlaksananya Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten dan Kecamatan
9	Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	Terlaksananya Sinergitas Kelembagaan Pengawasan antar OPD	Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan di Kabupaten Bangka Barat
10	Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	Pemetaan dan Analisis	Peta dan Analisa SKPG
11	Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	Penyusunan dan penetapan Target Komsumsi Pangan Per Kapita per Tahun	Tersusunnya dan penetapan Target Komsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun
12	Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	Pendampingan dan Pembinaan	Kelompok yang Melaksanakan Pemanfaatan Pekarangan
13	Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	Pengadaan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian
14	Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	Pembangunan Sarpras Air Bersih Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayanimelalui Kegiatan Padat Karya/SPAM BerbasisMasyarakat
15	Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Peningkatan Kapasitas SPAM

16	Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	Kapasitas IPLT Terbangun
17	Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	Pembangunan Jamban Individual	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki TangkiSeptik
18	Cakupan Bantuan Jaminan Nasional Penerima Iuran (PBI) Kesehatan	Pelaksanaan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase penduduk memiliki jaminan kesehatan
19	Jumlah pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi	Belanja jasa tenaga penanganan sosial	Terlatihnya pendamping PKH untuk modul kesehatan dan gizi
20	Terselenggaranya rembuk stunting tingkat Kabupaten/kota	Pelaksanaan Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten Bangka Barat	Terlaksananya Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten Bnagka Barat
21	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintah daerah kabupaten/kota	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Percepatan penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Bangka Barat	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Percepatan penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Bangka Barat
22	Persentase kabupaten/kota yang mengimplementasikan sistem data Surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan stunting	Pertemuan Pengumpulan dan Pelaporan Data Surveilans Gizi	Jumlah petugas gizi mengikuti Pertemuan Pengumpulan dan Pelaporan Data Surveilans Gizi
23	Publikasi data stunting tingkat Kabupaten/Kota	Diseminasi hasil pengukuran stunting	Jumlah peserta diseminasi hasil pengukuran stunting
24	Terlaksananya Kampanye nasional pencegahan Stunting	mengumpulkan, menyusun dan mempublikasikan informasi melalui media komunikasi yang dikelola Diskominfo Bangka Barat	Jumlah berita yang di upload pada website Kabupaten Bangka Barat
25	Terlaksananya Kampanye nasional pencegahan Stunting	Membuat informasi dalam bentuk konten audiovisual	Jumlah dokumentasi audiovisual Kabupaten Bangka Barat
26	Terlaksananya Kampanye nasional pencegahan Stunting	Melaksanakan fungsi humas dengan pihak internal dan eksternal Pemerintah kabupaten Bangka Barat	Pertukaran dan penyebaran informasi pembangunan
27	Terlaksananya Kampanye nasional pencegahan Stunting	Pertukaran dan penyebaran informasi pembangunan dengan mitra pemerintah dan komunitas	Pertukaran dan penyebaran informasi pembangunan dengan mitra pemerintah dan komunitas
28	Lembaga PAUD yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)	sosialisasi Bunda PAUD ke Lembaga	Tersosialisasinya Program PAUD oleh Bunda PAUD
29	Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko stunting	Pelaksanaan Identifikasi Keluarga Berisiko Stunting, Desiminasi dan Evaluasi Audit Kasus Stunting	Tersedianya Laporan Audit Kasus Stunting
30	Tersedianya data keluarga risiko Stunting melalui Sistem Informasi Keluarga	Terlaksananya Rakorcarn, Rakordes, dan Minilok	Tersedianya data Keluarga Berisiko Stunting
31	Tersedianya data keluarga risiko Stunting melalui Sistem Informasi Keluarga	Cetak form Update Keluarga Berisiko Stunting	Tersedianya data Keluarga Berisiko Stunting
32	Desa/Kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1000 HPK	Pembinaan BKB, BKR, BKL, PIK R dan UPPKA Serta Pemilihan Duta Generasi Berencana dalam rangka pencegahan dan penanganan Stunting	Terlaksananya dukungan Pembinaan Kelompok Kegiatan dan Kesejahteraan Keluarga
33	Desa/Kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1000 HPK	Pengadaan BKB Kit Stunting dan Kit Siap Nikah Anti Stunting	Media KIE Pencegahan dan Penanganan Stunting

Faktor pendukung yang mempengaruhi Prevelensi stunting adalah adanya komitmen pemerintah daerah melalui program/kegiatan yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat memlalui OPD terkait secara berkala dan berkesinambungan.

Beberapa faktor yang menjadi Hambatan dan kendala yang dihadapi pada indikator ini adalah:

- Sasaran Prevalensi Stunting itu disasar ke Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sehingga dalam capaian kinerjanya tidak hanya bisa diukur dari status capaian satu OPD saja.
- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya berfokus pada percepatan penurunan stunting intervensi sensitive, yakni pola asuh.
- Belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya manusia terutama dalam upaya percepatan penurunan stunting.

Sedangkan, yang menjadi upaya pemecahan masalah, di antaranya:

- Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya manusia dalam upaya percepatan penurunan stunting.
- Berkoordinasi terkait percepatan penurunan stunting dengan lintas OPD dan lintas sektor dengan adanya evaluasi setelah dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)
- Berkolaborasi dan elaborasi antara stigma “ percepatan penurunan stunting” dan “konvergensi penurunan stunting”.

Capaian indikator kinerja sasaran **Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat** beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut :

Tabel II.87
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
Tahun 2023 terhadap Perjanjian Kerja

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI	TARGET	%	STATUS CAPAIAN
Angka Harapan Hidup	Tahun	70,43	70,56	99,81%	Baik
Prevalensi Stunting	%	8,1	7,46	92,09	Baik

Dari tabel diatas indikator kinerja sasaran **Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat terhadap perjanjian kinerja Tahun 2023** dengan realisasi indikator Angka harapan hidup secara persentase dengan capaian status “Baik” meskipun belum memenuhi

target pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 yaitu 70,56 atau lebih kecil sebesar 0,13 poin, sedangkan pada realisasi indikator Prevalensi Stunting secara persentase dengan capaian status “Baik” meskipun belum memenuhi target pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 yaitu 7,46 atau selisih 0,64 poin dari realisasi tahun 2023.

Tabel II.88

**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
Tahun 2023 Terhadap Realisasi Tahun sebelumnya**

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN
Angka Harapan Hidup	Tahun	70,25	70,43	100,25 %	Meningkat
Prevalensi Stunting	%	9,56	8,1	84,72 %	Meningkat

Secara keseluruhan untuk pencapaian kinerja indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dibandingkan dengan Tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Dimana Indikator Angka Harapan Hidup dibandingkan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,17 poin pada realisasi tahun 2023, dan indikator Prevalensi Stunting juga mengalami peningkatan sebesar 1,45 poin pada realisasi tahun 2023.

Secara keseluruhan untuk pencapaian indikator Sasaran ” **Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat**” jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel II.89

**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
Tahun 2023 Terhadap Target Akhir RPJMD**

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2023	TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN
Angka Harapan Hidup	Tahun	70,43	71,03	99,15 %	Optimis Tercapai
Prevalensi Stunting	%	8,1	4,79	59,13 %	Perlu Upaya Lebih

Pencapaian kinerja indikator sasaran **Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat**”” realisasi di Tahun 2023 jika dibandingkan dengan target capaian akhir tahun RPJMD, pada indikator Angka Harapan Hidup dengan status “Optimis Tercapai”.sedangkan pada indikator Prevalensi Stunting dibandingkan dengan target capaian akhir tahun RPJMD dengan status “Perlu Upaya Lebih”.

Dalam pencapaian sasaran **Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat**, didukung oleh program pembangunan yang dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Peorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
2. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
3. Program Pengendalian Penduduk;
4. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
7. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
8. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
9. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
10. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
11. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);

12. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
 13. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Tabel II.90
Analisis Program Sasaran
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5=4/3*100%
3.2 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat				
	Total	116.796.881.783,00	92.749.928.124,00	79,41
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	46.978.226.840,00	43.874.566.999,00	93,39
2	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	235.410.000,00	78.489.000,00	33,34
3	Program Pengendalian Penduduk	172.855.000,00	161.143.150,00	93,22
4	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.994.299.500,00	1.782.151.043,00	89,36
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	680.779.000,00	551.307.090,00	80,98
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	7.825.544.000,00	6.904.047.611,00	88,22
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.922.190.000,00	1.738.841.672,00	90,46
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	673.992.202,00	604.580.462,00	89,7
9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	70.920.000,00	0,00	-
10	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	35.715.835.500,00	33.709.336.583,00	94,38
11	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.500.580.000,00	1.467.010.410,00	97,76
12.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	19.026.249.741,00	1.878.454.104,00	9,87
13.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	277.510,000,00	0,00	0

Tabel II.91
Efisiensi Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Sasaran Kinerja	Efektifitas
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	79,41	95,95	Efektif

Dari Tabel diatas pencapaian Efisiensi anggaran pada indikator Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat pada tahun 2023 dengan realisasi anggaran pada program penunjang sebesar 79,41 persen sedangkan capaian sasaran kinerja sebesar 95,95 persen maka pencapaian efisiensi anggarannya adalah “Efektif”. dan efisiensi penggunaan dana sebesar 20,59 persen

Sasaran Strategis 3.3 "Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak"

Sasaran "Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari 2 indikator yang keseluruhannya merupakan indikator makro pembangunan daerah. Capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut:

Pencapaian sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur dari (dua) indikator yaitu Indeks Pembangunan Gender dan Status Kabupaten Layak Anak (KLA). Berdasarkan tabel dibawah, pada Tahun 2023 ada 1 (satu) indikator Sasaran dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan dengan kategori "Baik" sedangkan 1 (satu) indikator dengan kategori "Cukup".

Capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut :

**Tabel II.92
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2023 terhadap Perjanjian Kerja**

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI	TARGET	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90,29	90,82	99,41%	Baik
Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	katagori	Pratama	Madya	75%	Cukup

Dari tabel diatas diketahui bahwa **Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat disimpulkan bahwa indikator Indeks Pembangunan Gender dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja di Tahun 2023 realisasi status capaiannya sebesar 99,41 persen dengan status "Baik", sedangkan indeks Status Kabupaten Layak Anak (KLA) status capaiannya sebesar 75 persen dengan status capaian "Cukup"**

**Tabel II.93
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2023 Terhadap Tahun Sebelumnya**

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN SEBELUMNYA	REALISASI 2023	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90,04	90,29	100,27	Meningkat
Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	katagori	Pratama	Pratama	100	Tetap

Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 berdasarkan hasil pengukuran sasaran pertama misi 2 pada indikator kinerja tersebut, realisasi capaian Tahun 2023 masih menggunakan indeks IPG Tahun 2022 dikarenakan data BPS untuk Tahun 2023 belum dirilis,- Maka sementara, Berdasarkan skala capaian kinerja yang ada dikategorikan "**Tetap**". Berdasarkan skala capaian kinerja yang ada dikategorikan "**berhasil**" pada indikator kinerja Indeks

Pembangunan Gender. Sedangkan **sasaran kedua misi 2** yakni Status Kabupaten Layak Anak (KLA), pada Tahun 2023 target sarasannya adalah **Madya**, sedangkan realisasi yang dicapai masih menduduki peringkat status **Pratama** dengan kategori *“kurang berhasil”*.

Realisasi capaian sasaran pada tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir RPJMD sampai Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.94
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2023 terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI	TARGET AKHIR RPJMD	(%)	STATUS CAPAIAN
Indeks Pembangunan Gender	indeks	90,29	91,50	98,67	Optimis Tercapai
Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	katagori	Pratama	Madya	75	Perlu Upaya Lebih

Berdasarkan tabel diatas **Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** yang memiliki dua Indikator Kinerja Sasaran dibandingkan dengan target akhir RPJMD, dapat dijelaskan capaian kinerja Indeks Pembangunan Gender capaian statusnya “Optimis Tercapai”, sedangkan indikator capaian kinerja Status Kabupaten Layak Anak (KLA) capaian statusnya ‘Perlu Upaya Lebih’.

Faktor pendukung yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Gender dan Status Kabupaten Layak Anak pada tahun 2023 adalah adanya komitmen pemerintah daerah melalui program/kegiatan yang telah laksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat melalui OPD terkait secara berkala dan berkesinambungan.

Beberapa faktor yang menjadi Hambatan dan kendala yang dihadapi pada indikator ini adalah :

- Infrastruktur pendukungnya masih kurang terkait kebutuhan Kabupaten Layak Anak.
- Belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya manusia terutama peningkatan pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi.
- Faktor penghambat sosial yang bersifat patrilineal mengakibatkan perempuan belum bisa memiliki peluang yang sama untuk bersaing.

Adapun upaya pemecahan masalah atau pendukung agar tercapai target Indikator Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain :

- Membuat peraturan terkait Pengarusutaman Gender di Kabupaten Bangka Barat
- Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya manusia dalam pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi terutama perempuan-perempuan korban kasus kekerasan.
- Mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Daerah terkait Kabupaten Layak Anak;
- Bekerjasama dan berkomitmen dengan OPD teknis terkait perbaikan dan penambahan infrastruktur yang menunjang Kabupaten Layak Anak seperti meningkatkan potensi Sekolah Ramah Anak,

Rumah Sakit Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Taman Bermain Ramah Anak, Pojok Laktasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah.

- Membuat peta pengisian kluster Kabupaten Layak Anak, dimana mengoptimalkan potensi yang kurang baik nilai di tahun sebelumnya untuk mempersiapkan penilaian tahun berikutnya
- Menetapkan SOP terkait Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Program dalam APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 yang berkaitan dengan sasaran antara lain :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Program Pemenuhan Hak Anak;
3. Program Perlindungan Perempuan;
4. Program Perlindungan Khusus Anak;
5. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
6. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.

Tabel II.95
Program Pendukung Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023

No	Program Prioritas	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
	1	2	3	4=3/2*100
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1.009.070.000,00	802.996.950,00	79,57
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	210.000.000,00	179.607.517,00	85,52
2.	Program Pemenuhan Hak Anak	128.000.000,00	116.453.800,00	90,97
3.	Program Perlindungan Perempuan	126.818.700,00	88.777.785,00	70
4.	Program Perlindungan Khusus Anak	348.921.300,00	256.989.752,00	73,65
5.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	193.330.000,00	159.168.196,00	82,32
6.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	2.000.000,00	1.999.900,00	99,99

Tabel II.96
Efisiensi Penggunaan Sumber daya
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Sasaran Kinerja (%)	Efektifitas
1	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	79,57	87,20	Efektif

Berdasarkan tabel di atas maka dibandingkan dengan kinerja yang dicapai di tahun 2023 maka realisasi anggaran sebesar 79,57 persen dibanding dengan realisasi kinerja sebesar 87,20 persen menunjukkan adanya efektifitas dan efisiensi penggunaan dana sebesar 21,43 persen.

Atau dapat di lihat dari tabel di bawah ini :

Tabel II.97
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Sasaran (Rp)	Efektifitas
1	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1.009.070.000,00	802.996.950,00	79,57	109,58	Efektif dan dapat dikategorikan efisiensi belanja

Dalam tabel di atas menunjukkan bahwa ralisasi anggaran dibawah dari 100 persen, namun capaian kinerjanya dibandingkan dengan raelisasi anggarannya berada pada 109,58 persen. Itu artinya dalam mencapai target sasaran sangat efektif dengan efesiensi belanja yang signifikan.

Untuk mewujudkan misi pada RPJMD, maka OPD DP2KBP3A menetapkan sasaran Mewujudkan Bangsa Kencana yang Berprestasi, Berkarakter dan Berdaya Saing dengan Memberdayakan Perempuan dan Melindungi Anak.

Sasaran Strategis 3.4 “Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat”

Kesalehan sosial adalah sikap positif dan empati terhadap orang lain, termasuk tindakan sosial, seperti memberikan kasih sayang dan bantuan. Ini tercermin dalam keselarasan dengan pencipta, sesama manusia, dan lingkungan. Kesalehan juga dikaitkan dengan konsep kebajikan dan hubungan harmonis antara manusia, dan lingkungan. Untuk mengetahui tingkat kesalehan sosial masyarakat dapat diukur dengan alat IKS. Pengukuran tingkat kesalehan sosial masyarakat di Kabupaten Bangka Barat merupakan amanat RPJMD tahun 2021-2026, yakni terdapat dalam visi misi Kabupeten Bangka Barat, terutama pada **misi kedua yaitu memajukan sumber daya manusia yang berdaya saing dan berakhlak mulia**. Beberapa strategi yang dapat dirumuskan dalam mencapai tujuan tersebut dituangkan dalam bentuk:

- 1) meningkatkan kepedulian terhadap sesama (kepedulian sosial);
- 2) meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup;
- 3) meningkatkan masyarakat sadar hukum; dan
- 4) meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kemajemukan (kebhinekaan).

Diharapkan dapat terwujud dalam tindakan dan akhlak mulia masyarakat dalam bentuk kesalehan sosial masyarakat. Hal ini tidak lain sebagai upaya untuk dapat mewujudkan visi Kabupaten Bangka Barat, yakni “Terwujudnya Masyarakat Bangka Barat yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat”. Berdasarkan pengertian dari beberapa referensi terkait kesalehan sosial, maka dapat ditegaskan bahwa **kesalehan sosial adalah sikap/perilaku kebaikan sosial seseorang sebagai implementasi dari kegiatan ibadah yang didorong oleh pengetahuan dan keyakinannya**. Kesalehan sosial dapat diukur dengan Indeks Kesalehan Sosial (IKS) dengan menggunakan ketigavariabel di atas. Selanjutnya, definisi ini akan dijadikan sebagai landasan teori untuk mengukur IKS Kabupaten Bangka Barat.

Penelitian Indeks Kesalehan Sosial dengan menggunakan populasi masyarakat yang aktif dalam mengikuti kegiatan rumah ibadat pada setiap agama. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan Teknik “*Multistage Random Sampling*” yaitu Teknik pengambilan sampel peluang secara acak, yang dilakukan pada kondisi populasi yang heterogeny. Metode yang digunakan pada penelitian yaitu kualitatif menggunakan metode survei, penelitian ini terdapat satu variable bebas (x) dan satu variable terikat (y). Variabel bebas (x) dalam penelitian ini adalah pengetahuan, sedangkan variable terikat (y) adalah kesalehan sosial. Dengan demikian, **IKS dalam kajian ini adalah hasil perhitungan rata-rata nilai kegiatan ibadah individual (X1), pengetahuan tentang kesalehan sosial (X2), dan sikap atau perilaku yang mencerminkan kesalehan sosial masyarakat/kelompok (X3).** IKS dinyatakan dalam angka dengan interval dari 0 sampai 100 dengan kategori :

- 80,00-100 (Sangat Tinggi),
- 60,00-79,99 (Tinggi),
- 40,00-59,99 (Sedang),
- 20,00-39,99 (Rendah), dan
- 0-19,99 (Sangat Rendah).

Berdasarkan pengertian IKS pada kajian teori maka formula yang dipakai untuk mengukur IKS dengan pendekatan teori yang dikemukakan oleh Muzammil (2020), yaitu $(Y) = \frac{(x1 + x2 + x3)}{3}$. Penelitian IKS Masyarakat Kabupaten Bangka Barat tahun 2023 menggunakan metode survei yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, yakni mengumpulkan dan menyelidiki informasi untuk menjelaskan hubungan variasi antara variabel kegiatan ibadah individual, pengetahuan tentang kesalehan sosial, serta sikap dan perilaku yang mencerminkan kesalehan sosial dengan tanpa ada intervensi.

Tabel II.98
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat terhadap Perjanjian Kerja

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	%	STATUS CAPAIAN
1.	Indeks Kesalehan Sosial	Kategori	Baik	Tinggi	>100	Sangat Baik

Pencapaian sasaran “**Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat**” diukur dari survei yang dilakukan, pada Tahun 2023 indikator Indeks Kesalehan Sosial memenuhi target yang ditetapkan dengan kategori “Baik”. Secara rinci, capaian indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel II.99
Hasil Indeks Variabel

IKS							
Indeks Variabel	KECAMATAN						Kabupaten
	Kelapa	Tempilang	Simpang Teritip	Jebus	Paritiga	Mentok	
Kegiatan Ibadah Individual (X1)	77	76	75	78	79	79	77
Pengetahuan tentang Kesalehan Sosial (X2)	74	74	74	71	76	75	74
Sikap dan Perilaku yang Mencerminkan Kesalehan Sosial (X3)	66	69	70	66	73	70	69
Rata-rata	72	73	73	72	76	75	73

Berdasarkan data pada tabel diatas pada baris rata-rata di ketahui Kecamatan Paritiga memiliki IKS tertinggi dengan nilai 76, dan yang terendah nilai 72 yaitu Kecamatan Kelapa dan Kecamatan Jebus. Selanjutnya pada kolom ke delapan diketahui nilai rata-rata Indeks pervariabel disetiap kecamatan diperoleh IKS secara keseluruhan Kabupaten Bangka Barat, yaitu 77 untuk Ibadah Individual (X1), 74 untuk indeks pengetahuan kesalehan sosial (X2), dan 69 untuk indeks sikap dan perilaku yang mencerminkan kesalehan sosial (X3). Dari ketiga indeks tersebut, dilakukan penjumlahan dan dirata-ratakan maka diperoleh nilai IKS untuk Kabupaten Bangka Barat sebesar 73 dengan kategori “Tinggi”.

Tabel II.100
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat Tahun 2023 Terhadap Realisasi Tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN
Indeks Kesalehan Sosial	Kategori	69,57 (Tinggi)	73 (Tinggi)	104,93 %	Meningkat

Berdasarkan nilai hasil survei yang Nilai Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 sebesar 73 dengan Kategori “Tinggi” mengalami kenaikan sebesar 3,43 terhadap Nilai Indeks Kesalehan Sosial Bangka Barat Tahun 2022 sebesar 69,57 dengan kategori “Tinggi”.

Tabel II.101
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat Tahun 2023 terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI	TARGET AKHIR RPJMD	(%)	STATUS CAPAIAN
Indeks Kesalehan Sosial	Kategori	Tinggi	Baik	>100	Optimis Tercapai

Berdasarkan hasil realisasi Indeks Kesalehan Sosial pada Tahun 2023 dengan Kategori “Tinggi” dibandingkan dengan target akhir RPJMD dengan kategori “Baik” optimis tercapai.

Dalam pencapaian sasaran **Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat**, didukung oleh program pembangunan yang dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ;
2. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan;
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
4. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
5. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
6. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
7. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
8. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
9. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
10. Program Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
11. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;
12. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;

Tabel II.102
Analisis Program Sasaran
Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5=4/3*100%
3.4 Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat				
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	8.725.409.180,00	8.137.198.103,00	93,25
2	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	150.000.000,00	150.000.000,00	100
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	-	-	-
4	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	6.050.000,00	0,00	-
5	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.187.434.000,00	5.015.876.800,00	96,69
6	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20.750.000,00	18.511.000,00	89,2
7	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.147.174.870,00	1.923.209.526,00	89,56
8	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	13.386.591.200,00	13.385.783.050,00	99,99
9	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	29.650.000,00	28.852.000,00	97,3
10	Program Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	181.533.300,00	152.953.000,00	84,25

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5=4/3*100%
11	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	347.167.000,00	145.375.338,00	41,87
12	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	292.300.000,00	287.357.800,00	98,31
13.	Program peningkatan kualitas keluarga	193.330.000,00	159.168.196,00	82,32
14.	Program pengelolaan sistim data gender dan anak	2.000.000,00	1.999.900,00	99,99
15.	Program perlindungan khusus anak	348.921.300,00	256.989.752,00	73,65
Total		30.474.059.550,00	29.245.116.617,00	95,96

NO	SASARAN STRATEGIS	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Sasaran Kinerja	Efektifitas
1	Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat	95,96%	100%	Efektif

Sasaran Strategis 4.1 “Meningkatnya tata kelola pemerintah yang Profesional, dan akuntable”

Sasaran strategis ini diukur dari beberapa capaian indikator kinerja sasaran, target dan realisasinya, diuraikan sebagai berikut.

Tabel II.103
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya tata kelola pemerintah yang Profesional, dan Akuntable terhadap Perjanjian Kerja

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	%	STATUS CAPAIAN
1.	Nilai SAKIP Daerah	Nilai	70,00	68,49	97,84	Baik
2.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100	Sangat Baik
3.	Maturitas sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas	Berkembang	Berkembang	100	Sangat Baik
4.	Indeks system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Kategori	cukup	Baik	100	Sangat Baik
5.	Indeks profesionalitas ASN	Indeks	64,4	63,52	98,63	Baik

Pencapaian sasaran ”Meningkatnya tata kelola pemerintah yang Profesional, dan akuntable” diukur dari 5 (lima) indikator yaitu Nilai SAKIP Daerah, Opini BPK, Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan

Indeks Profesionalitas ASN. Berdasarkan tabel di atas, pada Tahun 2023 ada 3 (tiga) indikator sasaran yang ditetapkan dengan kategori ”**Sangat Baik**” dan 2 (dua) indikator sasaran dengan status ” **Baik**”, jika dikonversi ke dalam bentuk persentase maka capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 99,34% (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh empat persen). Secara rinci, capaian masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

Indikator Sasaran 4.1.1 “Nilai SAKIP”

Indikator pertama dari Sasaran Strategis **Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel** ialah Nilai Sakip. SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Tujuan SAKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut :

Tabel II.104
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel Tahun 2023 terhadap Perjanjian Kerja

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI	TARGET	%	STATUS CAPAIAN
Nilai SAKIP Daerah	Nilai	68,49	70,00	97,84	Baik

Pada Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel pada Nilai SAKIP Tahun 2023, Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan Nilai **68,49**. Nilai ini lebih rendah dari target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar 70,00 atau lebih rendah sebesar 1,51 poin dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.105
Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap NILAI SAKIP Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,21
2.	Pengukuran Kinerja	30	16,16
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,31
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,81
	Nilai Hasil Evaluasi	100	68,49
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Sumber Kemenpan RB Republik Indonesia

Tabel II.106
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel
Tahun 2023 Terhadap Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	%	STATUS CAPAIAN
Nilai SAKIP Daerah	Nilai	68,66	68,49	98,08	Baik

Berdasarkan Evaluasi yang diberikan oleh Kemenpan RB Nilai SAKIP Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,17 terhadap Nilai SAKIP Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 sebesar 68,49.

Tabel II.107
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang
professional dan akuntabel Tahun 2023 terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI	TARGET AKHIR RPJMD	(%)	STATUS CAPAIAN
Nilai SAKIP Daerah	Nilai	68,49	73,30	96,97	Optimis Tercapai

Berdasarkan realisasi nilai SAKIP Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 sebesar 68,49 terhadap target RPJMD sebesar 73,30 terdapat selisih 4,81 atau secara persentase perbandingan realisasi Tahun 2023 dan taerget RPJMD sebesar 96,97 %, dengan capaian ini maka status capaian nya “Optimis Tercapai”.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang menjadi perhatian Pemerintah Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kabupaten Bangka Barat menunjukkan bahwa nilai sebesar **68,49** dengan predikat “**B**”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “**Baik**”, yaitu pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang sudah baik khususnya unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja.

1) Perencanaan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah menyusun dokumen perencanaan kinerja dan mereviu RPJMD yang selanjutnya dijabarkan dalam renstra dan perjanjian kinerja dan dokumen lainnya. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Masih terdapat dokumen perencanaan yang belum disampaikan pada e-sakip rewiu (ESR), sehingga belum diketahui sejauh mana perbaikan yang dilakukan, diantaranya dokumen perjanjian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan;

- b. Indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria spesifik, terukur, relevan dan cukup. Sebagai contoh pada Dinas Sosial, Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa, sasaran yang ditetapkan di bidang sosial meningkatnya kualitas pelayanan bagi PPKS dengan indikator Presentase Capaian SPM Bidang Sosial;
- c. Masih terdapat rumusan sasaran strategis OPD yang belum berorientasi hasil seperti “Terfasilitasinya pelaksanaan kepramukaan” pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- d. Penjenjangan kinerja belum mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 89 Tahun 2021, yaitu belum sepenuhnya mempertimbangkan logical framework dan critical success factor (CSF) atas pencapaian kinerja. Hal ini menyebabkan perjenjangan kinerja tersebut belum memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat, serta belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

2) Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah menyusun Manuali Indikator Kinerja Utama. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Belum menyusun pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang digunakan di level Pemda maupun PD;
- b. Masih terdapat indikator yang belum memiliki formulasi perhitungan pada dokumen manual IKU, seperti indikator pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Kesehatan;
- c. Masih terdapat indikator yang belum memiliki definisi operasional seperti indikator pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Kesehatan;
- d. Hasil pengukuran kinerja belum digunakan sebagai bagian dari pengambilan keputusan baik dalam perubahan strategi dan target kinerja maupun pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai.

3) Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2023 Pemerintah Daerah maupun Laporan Kinerja Perangkat Daerah. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. LPPD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022 maupun Laporan Kinerja Perangkat Daerah belum dipublikasikan secara umum;
- b. Terdapat beberapa PD yang belum menyampaikan Laporan Kinerja pada esr.menpan.go.id, diantaranya Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan, sehingga belum diketahui kualitasnya;
- c. Laporan kinerja pada level PD belum cukup menyampaikan informasi yang memadai diantaranya tentang analisis capaian kinerja. Sebagai contoh laporan kinerja pada Dinas Sosial,

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa belum menjelaskan factor keberhasilan dana tau faktor keberhasilan dana tau faktor kegagalan dalam mencapai kinerja;

- d. Informasi dalam laporan kinerja belum dimanfaatkan dengan baik untuk perbaikan perencanaan kinerja berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan pada target kinerja berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan pada target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan cukup, contoh pada Dinas Kesehatan khususnya indikator “Persentase Penanganan Penyakit Menular”, “Persentase Penanganan Penyakit Tidak Menular”, dan “Indeks Penganan Stunting Bidang Kesehatan”.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut:

- a. Inspektorat Kabupaten Bangka Barat belum menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada seluruh PD;
- b. Belum memiliki pedoman evaluasi untuk mendukung pelaksanaan implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;
- c. Belum ada kebijakan *reward* dan *punishment* untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di level PD;.

5) Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dilaam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Menyampaikan dokumen penyelenggaraan sakis pada esr.menpan.go.id agar evaluator dapat mengetahui perbaikan yang telah dilakukan.
- b. Menyusun pedoman teknis perencanaan kinerja sebagai acuan dalam pelaksanaan manajemen kinerja;
- c. Menyusun pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja untuk memastikan validitas dan kualitas capaian data yang dihasilkan pada tingkat Pemda dan Perangkat Daerah;
- d. Menyempurnakan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja pada perangkat daerah yang belum berorientasi hasil dan indikator kinerja yang belum SMART;
- e. Menyempurnakan penjenjangan kinerja dan pohon kinerja berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 89 Tahun 2021 dengan memperhatikan prinsip penyusunan pohon kinerja dan tahapan penjenjangan kinerja;
- f. Meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Kinerja dengan mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, dan memanfaatkan Laporan Kinerja tersebut untuk perbaikan perencanaan kinerja;
- g. Melakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja khususnya untuk target-target yang telah tercapai melebihi target di tahun berikutnya yang tertuang dalam realisasi kinerja Laporan Kinerja tahun sebelumnya;
- h. Melakukan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP unit kerja dilakukan secara berkala, sehingga mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja Pemda dan PD;]
- i. Menyusun pedoman evaluasi yang mengacu pada Permenpan 88 Tahun 2021 dan meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, sehingga mampu memberikan rekomendasi yang dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja PD;

- j. Memanfaatkan hasil evaluasi AKIP internal sebagai bagian dari penilaian *reward and punishment* kepada PD, sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP.

Indikator Sasaran 4.1.2 “Opini BPK”

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang- Undang terkait Lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022, yang teridri dari Neraca Tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. PK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 85.A/LHP/XVIII.PPG/05/2023 tanggal 26 Mei 2023. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap Laporan keuangan. BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan peundangan dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022 dengan pokok-pokok temuan terdapat 3 temuan yang terdiri dari 3 temuan LKD Pemda dan 0 temuan BMD Pemda.

Berikut capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel Tahun 2023 pada Indikator sasaran Opini BPK terhadap Perjanjian Kerja sebagai berikut :

Tabel II.108
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang professional dan akuntabel Tahun 2023 terhadap Perjanjian Kerja

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI	TARGET	%	STATUS CAPAIAN
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100	Baik Sekali

Sumber Data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa target pada perjanjian kinerja terhadap realisasi pada tahun 2023 tercapai dimana realisasi targetnya WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Pada tahun 2023 untuk pemeriksaan laporan keuangan tahun 2022, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Hal ini dapat diartikan Target dari Indikator Sasaran Opini BPK Terhadap Keuangan Daerah Tercapai yaitu Opini WTP dengan status capaian baik sekali. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material, meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada Tahun sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja pada opini BPK terhadap laporan keuangan daerah tercapai. Dalam penyusunan capaian kinerja Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah, disepakati jika Opini BPK berupa WTP mendapat capaian 100 persen, jika Opini BPK berupa WDP mendapat Capaian 50 persen, dan jika Opini BPK berupa *disclaimer* mendapat Capaian 0 persen.

Tabel II.109
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel Tahun 2023
Terhadap Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN SEBELUMNYA	REALISASI 2023	%	STATUS CAPAIAN
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100	Sangat Baik

Sumber Data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Evaluasi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2023 memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022, hal ini sama dengan opini yang diberikan pada Tahun sebelumnya.

Tabel II.110
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola pemerintahan
yang professional dan Akuntabel Tahun 2023 terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI	TARGET AKHIR RPJMD	(%)	STATUS CAPAIAN
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100	Optimis Tercapai

Pencapaian kinerja indikator sasaran di Tahun 2023 **Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel** indikator Opini BPK jika dibandingkan dengan target capaian akhir tahun RPJMD, optimis tercapai.

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran ini adalah :

1. Melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah.
3. Meningkatkan sistem penatausahaan dan pengelolaan aset daerah.
4. Melaksanakan Reformasi Birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material, meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Faktor Penghambat/kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah :

1. Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang berlaku;
2. Belanja daerah masih bergantung dengan pemerintah pusat;
3. Sistem perencanaan OPD yang belum disusun secara komperhensif;
4. Penyusunan KUA PPAS APBD belum tertib;
5. Pengelolaan aset daerah yang belum optimal.

Indikator Sasaran 4.1.3 “Maturitas Sistim Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)”.

Dalam capaian Tingkat Maturitas tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah mencapai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu Tingkat Maturitas level 2 (Berkembang), adapun rincian tingkat capaian serta presentase capaiannya sebagai berikut:

Tabel II.111
Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel Tahun 2023 terhadap Perjanjian Kerja

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI	TARGET	%	STATUS CAPAIAN
Maturitas SPIP	Tingkat Maturitas	Berkembang	Berkembang	100	Baik Sekali

Berdasarkan Evaluasi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kepada Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2023 memberikan Tingkat Maturitas pada level 2 dengan predikat “Berkembang”, hal ini sama dengan predikat Tingkat Maturitas yang diberikan pada Tahun sebelumnya

Tabel II.112

Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel Tahun 2023
Terhadap Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN SEBELUMNYA	REALISASI 2023	%	STATUS CAPAIAN
Maturitas SPIP	Tingkat Maturitas	Berkembang	Berkembang	100	Sangat Baik

Sumber Data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian **Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya** tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel pada indikator Kinerja Sasaran Maturitas SPIP Tahun 2023 tidak mengalami penurunan atau sama dengan tahun sebelumnya yaitu dengan realisasi “Berkembang”.

Pada tahun 2023 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **level 2 Berkembang**, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.113
Penyimpulan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP

KERTAS KERJA EVALUASI

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	4.000	0.500		2.000		
Kualitas Strategi Pencapaian SasaranStrategis	2.000	0.500		1.000		
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN		1.000		3.000		
BOBOT PENETAPAN TUJUAN			0.400		1.200	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas danNilai Etika (1.1)	2.344	0.038		0.088		
Komitmen terhadapKompetensi (1.2)	1.750	0.038		0.066		
Kepemimpinan yangKondusif (1.3)	1.000	0.038		0.038		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	2.250	0.038		0.084		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yangTepat (1.5)	2.500	0.038		0.094		

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	1.333	0.038		0.050		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	2.000	0.038		0.075		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	1.500	0.038		0.056		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	1.417	0.100		0.142		
Analisis Risiko (2.2)	1.200	0.100		0.120		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3.000	0.023		0.068		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2.000	0.023		0.045		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	2.500	0.023		0.057		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2.500	0.023		0.057		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	2.500	0.023		0.057		
Pemisahan Fungsi (3.6)	1.750	0.023		0.040		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2.500	0.023		0.057		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2.500	0.023		0.057		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	2.000	0.023		0.045		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2.000	0.023		0.045		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2.000	0.023		0.045		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	1.350	0.050		0.068		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	1.750	0.050		0.088		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	1.000	0.075		0.075		
Evaluasi Terpisah (5.2)	2.000	0.075		0.150		
PENCAPAIAN TUJUAN						
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi						
Capaian <i>Outcome</i>	5.000	0.200		1.000		

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
Capaian <i>Output</i>	3.000	0.100		0.300		
Keandalan Pelaporan Keuangan						
Opini Laporan Keuangan	3.000	0.250		0.750		
Pengamanan atas Aset Negara						
Catatan Pengamanan Aset	3.000	0.250		0.750		
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan						
Temuan Ketaatan – BPK	3.000	0.200		0.600		
IEPK	3.000					
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN		1.000		3.400		
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN			0.300		1.020	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI						2.750

Hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, dapat diuraikan sebagai berikut : Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi adalah 2,750. nilai ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, adalah sebagai berikut:

1) Penilaian Penetapan Tujuan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan pada Penilaian Penetapan Tujuan masih terdapat beberapa permasalahan yang masih harus diperbaiki yaitu: Sasaran program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum berorientasi pada outcome sehingga sasaran belum menggambarkan tujuan utama dan keberhasilan yang ingin dicapai oleh program dan kegiatan.

- a) Terdapat OPD yang belum mencantumkan sasaran dari program, kegiatan dan sub kegiatan pada dokumen perencanaan, sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran di atasnya. Jika tidak ada rumusan sasaran maka tidak tergambar hasil yang ingin dicapai sehingga alat ukur keberhasilan (indikator kinerja) atas hasil yang dicapai pun tidak akan tepat.
- b) Indikator kinerja atas Sasaran Pemerintah Daerah, OPD, Program, Kegiatan masih berorientasi pada output bukan outcome.
- c) Metode pengukuran/formulasi atas indikator kinerja tidak dicantumkan pada dokumen perencanaan OPD.
- d) Target indikator kinerja atas Sasaran Pemerintah Daerah, OPD, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan masih ada yang belum memperhatikan capaian tahun sebelumnya dan satuan belum spesifik menggambarkan target yang akan diukur, contoh satuan berupa paket.
- e) Terdapat target atas indikator kinerja sebesar 0%, tetapi indikator tersebut seharusnya semakin besar persentase semakin bagus.

2) Penilaian Struktur dan Proses

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan pada Penilaian Struktur dan Proses diketahui 40,00% sub unsur masih berada pada level 1, 56% sub unsur masih berada pada level 2 dan 4% sub unsur sudah berada pada level 3 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.114
Penilaian Struktur dan Proses

No.	Unsur/Sub Unsur	SkorPK	Skor Evaluasi	Naik/Turun
1.	Lingkungan Pengendalian			
1.1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	1.969	2.344	Naik
1.2	Komitmen terhadap Kompetensi	2.250	1.750	Turun
1.3	Kepemimpinan yang Kondusif	1.929	1.000	Turun
1.4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	2.000	2.250	Naik
1.5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	2.000	2.500	Naik
1.6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	1.917	1.333	Turun
1.7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	2.250	2.000	Turun
1.8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	2.000	1.500	Turun
2.	Penilaian Risiko			
2.1	Identifikasi Risiko	2.000	1.417	Turun
2.2	Analisis Risiko	1.792	1.200	Naik
3.	Kegiatan Pengendalian			
3.1	Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah	2.000	3.000	Naik
3.2	Pembinaan Sumber Daya Manusia	2.000	2.000	Tetap
3.3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	2.000	2.500	Naik
3.4	Pengendalian Fisik atas Aset	2.000	2.500	Naik
3.5	Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja	2.000	2.500	Naik
3.6	Pemisahan Fungsi	2.000	1.750	Turun
3.7	Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting	2.000	2.500	Naik
3.8	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian	2.000	2.500	Naik
3.9	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya	2.000	2.000	Tetap
3.10	Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya	2.000	2.000	Tetap
3.11	Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting	2.000	2.000	Tetap
4.	Informasi dan Komunikasi			
4.1	Informasi yang Relevan	2.000	1.350	Turun
4.2	Komunikasi yang Efektif	2.000	1.750	Turun
5.	Pemantauan			
5.1	Pemantauan Berkelanjutan	1.583	1.000	Turun
5.2	Evaluasi Terpisah	1.625	2.000	Naik

Dari tabel di atas dapat diketahui masih terdapat beberapa Sub Unsur yang masih berada pada level 1 dan level 2, hal ini disebabkan:

- a) Belum dilakukan kegiatan pengkomunikasian atas kebijakan yang telah ditetapkan dengan tujuan agar seluruh pihak yang terkait dapat memahami kebijakan tersebut. Sedangkan jika proses komunikasi telah dilakukan, namun proses pendokumentasian belum ada.
- b) Pimpinan organisasi belum mengarahkan pegawai agar dapat bekerja selaras dengan kebijakan yang mendukung penciptaan suasana kerja yang kondusif.
- c) Belum dilakukan program *in house training* pada masing-masing OPD dalam rangka peningkatan kompetensi.
- d) Kebijakan terkait manajemen risiko belum memadai.
- e) Penyusunan register risiko masih berada pada tingkat operasional unit kerja (OPD), dan belum pada tingkat strategis Pemda serta Strategis OPD.
- f) Belum adanya register risiko terkait Kemitraan dan korupsi.
- g) Informasi layanan internal (keuangan, kepegawaian, umum, dsb) dan Informasi manajemen kinerja (rencana kinerja, capaian kinerja, dsb) belum dapat diakses secara mudah untuk publik.

3) Penilaian Pencapaian Tujuan

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan pada Penilaian Pencapaian Tujuan masih terdapat beberapa permasalahan yang masih harus diperbaiki yaitu sebagai berikut:

- a) Indikator kinerja sasaran strategis Pemerintah Daerah belum cukup dalam mengukur keberhasilan dari sasaran strategis.
- b) Penetapan target atas indikator yang terlalu rendah, sehingga persentase capaian atas target melebihi angka 120%.
- c) Tidak terdapat realisasi atau capaian atas target sasaran strategis, program dan kegiatan OPD dalam dokumen laporan kinerja.
- d) Tidak terdapat sasaran program dan kegiatan OPD sehingga tidak dapat diuji apakah sasaran tepat dan relevan dengan sasaran di atasnya.
- e) Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam 4 tahun terakhir mendapatkan Opini WTP berturut-turut namun masih terdapat temuan berulang dalam laporan audit BPK.
- f) Masih ada catatan terkait pengelolaan BMN/D.

Dalam capaian Tingkat Maturitas dibandingkan dengan realisasi capaian tahun sebelumnya. Jika kita klasifikasikan tingkat capaian target, prosentase capaian, serta status capaian dalam penyusunan capaian Tingkat Maturitas, maka jika capaian Tingkat Maturitas melebihi realisasi tahun sebelumnya yaitu level 3 (terdefinisi) maka prosentase capaiannya 200% dengan status capaiannya Baik sekali, jika capaian Tingkat Maturitas mencapai/sama dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu level 2 (berkembang) maka prosentase capaiannya 100% dengan status capaiannya Baik dan jika Tingkat Maturitas mengalami penurunan ke Level 1 (Rintisan) maka mendapat capaian 0% dengan status capaian Buruk.

Tabel II.115

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel Tahun 2023 terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI	TARGET AKHIR RPJMD	(%)	STATUS CAPAIAN
Maturitas SPIP	Tingkat Maturitas	Berkembang	Terdefinisi	75	Perlu upaya lebih

Pencapaian kinerja indikator sasaran di Tahun 2023 **Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel** indikator Maturitas SPIP jika dibandingkan dengan target capaian akhir tahun RPJMD, Perlu Upaya Lebih.

Hal-hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan dan memperbaiki Maturitas SPIP antara lain sebagai berikut :

1. Melaksanakan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dengan menggunakan Aplikasi sebelum bulan April Tahun 2024.
2. Menginstruksikan pelaksanaan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Barat dengan menggunakan Aplikasi minimal satu bulan setelah selesainya pelaksanaan Penilaian Mandiri.
3. Memfasilitasi kegiatan pelatihan terkait SPIP untuk seluruh Tim Penilaian Mandiri (asesor Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah) maupun Tim Penjaminan Kualitas.
4. Menerbitkan kebijakan yang mewajibkan seluruh OPD menetapkan sasaran program dan/atau sasaran kegiatan pada dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan.
5. Menginstruksikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk memberikan pendampingan dan evaluasi terhadap perumusan sasaran, indikator kinerja dan target kinerja baik di level strategis
6. OPD, program sampai dengan kegiatan agar relevan dengan sasaran di atasnya, berorientasi pada outcome, spesifik, dapat diukur secara objektif serta memperhatikan capaian tahun lalu.
7. Menginstruksikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk bersama- sama dengan Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk menyesuaikan kebijakan manajemen risiko agar memenuhi komponen yang ada pada Peraturan Deputi Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko.
8. Menetapkan Surat Keputusan Bupati Bangka Barat tentang penetapan struktur pengelolaan risiko sesuai dengan Peraturan Deputi Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko.
9. Menginstruksikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk bersama- sama dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Barat agar menyusun Register Risiko Strategis Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sesuai dengan Peraturan Deputi Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko .
10. Mendorong tindak lanjut Rencana Aksi dari Area Perbaikan hasil dari Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Penjaminan Kualitas.

11. Menginstruksikan Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk:
 - a. Memberikan pendampingan kepada OPD yang masih belum menyelesaikan penyusunan Register Risiko untuk menyusun Register Risiko Strategis OPD dan Operasional termasuk Risiko Kecurangan yang ada pada masing-masing OPD sesuai dengan komponen yang diatur pada Peraturan Deputi Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko.
 - b. Memberikan pendampingan kepada OPD yang banyak menjalin kerja sama dan kemitraan untuk melakukan penyusunan Register Risiko Kemitraan termasuk Risiko Kecurangan terhadap semua kemitraan yang memiliki pernyang penting dalam organisasi.
 - c. Mendorong realisasi pelaksanaan dan evaluasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) oleh OPD.
12. Menetapkan tim Zona Integritas dan dilampirkan terkait survei penilaian integritas oleh KPK untuk melihat bagaimana kondisi integritas organisasional.
13. Menetapkan pernyataan kebijakan antikorupsi.

Indikator Sasaran 4.1.4 “Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)”.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

Tabel II.116
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Profesional, dan Akuntabel
Dengan Perjanjian Kerja

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Kategori	cukup	Baik	100	Sangat Baik

Surat Keputusan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2024

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Tahun 2023 Kabupaten Bangka Barat sebesar 2,61 dengan kategori “Baik”, nilai ini melampaui target Perjanjian Kerja Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2023 yaitu dengan kategori “Cukup”, realisasi ini merupakan peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bangka Barat sebesar 100 % dari capaian kategori “Cukup” status capaian “Baik”.

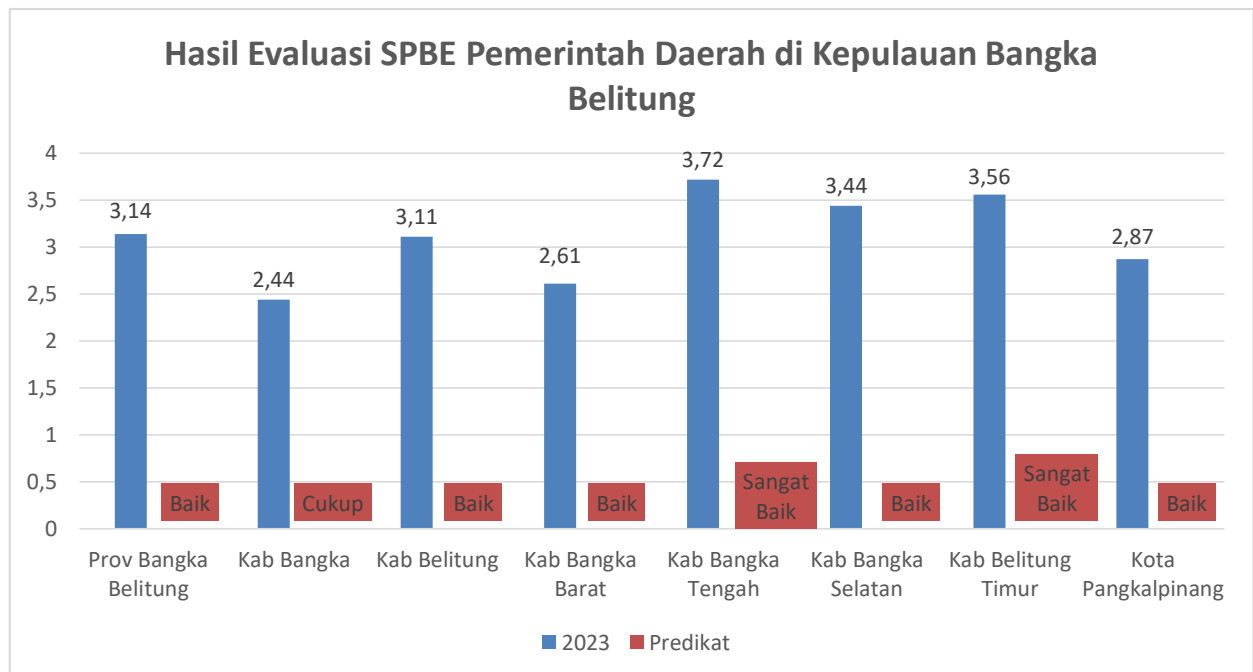
Tabel II.117
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Profesional, dan Akuntabel

Tahun 2023 Terhadap Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Kategori	2,31 (Cukup)	2,61 (Baik)	112,98	Meningkat

Capaian Indikator Sasaran Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Bangka Barat tahun 2023 jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya Mengalami peningkatan sebesar 0,30 menjadi 2,61 (BAIK) dari nilai Indeks SPBE Tahun 2022 yaitu sebesar 2,31 atau mengalami peningkatan sebesar 112,98 % (Berdasarkan Surat Keputusan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023), maka dapat disimpulkan prosentase capaian Indeks SPBE dibandingkan tahun sebelumnya 100% dengan predikat capaian “**Baik**”.

Grafik II.23
Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten / Kota
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



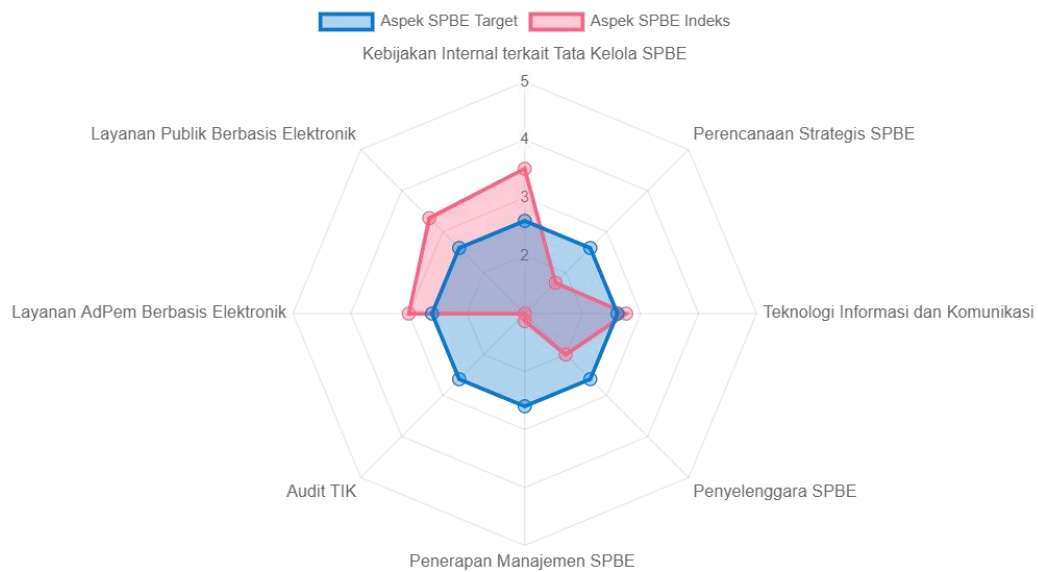
Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menempati peringkat ke enam dari tujuh Kabupaten / Kota seProvinsi Kep. Bangka Belitung dengan nilai 2,61 predikat capaian “Baik”, tertinggi Kabupaten Bangka Tengah dengan nilai 3,72 capaian predikat “Sangat Baik”. **Tabel II.23.**

Hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE Kabupaten Bangka Barat yang dilakukan pada tahun 2023 oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia untuk nilai Indeks SPBE sebesar 2,61 dengan kategori “Baik” sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun rincian penilaian tersebut sebagai berikut:

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kepulauan Bangka Belitung

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	3,14	Baik
2	Pemerintah Kab. Bangka	2,44	Cukup
3	Pemerintah Kab. Belitung	3,11	Baik
4	Pemerintah Kab. Bangka Barat	2,61	Baik
5	Pemerintah Kab. Bangka Tengah	3,72	Sangat Baik
6	Pemerintah Kab. Bangka Selatan	3,44	Baik
7	Pemerintah Kab. Belitung Timur	3,56	Sangat Baik
8	Pemerintah Kota Pangkal Pinang	2,87	Baik

Grafik II.24
Niai Indeks SPBE, Domain dan Aspek



Tabel II.118
Niai Indeks SPBE, Domain dan Aspek

Nama Indeks	Nilai 2023
SPBE	2,61
Domain Kebijakan SPBE	3,50
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	<i>3,50</i>
Domain Tata Kelola SPBE	2,20
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	<i>1,75</i>
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	<i>2,75</i>
<i>Penyelenggara SPBE</i>	<i>2,00</i>
Domain Manajemen SPBE	1,09

Nama Indeks	Nilai 2023
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	1,13
<i>Audit TIK</i>	1,00
Domain Layanan SPBE	3,13
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	3,00
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	3,33

Tabel II.119
Aspek Penilaian SPBE

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																				
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 – < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 – < 3,5</td> <td>Baik *)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 – < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>< 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table> <p>*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)</p>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang		
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0		Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2		Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5		Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6		Cukup																			
5	< 1,8		Kurang																			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																					
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%																					
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																					
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																					
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																					
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%																					
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																					
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																					
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																					
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																					
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																					

Tabel II.120
Perbandingan Indeks SPBE Secara Nasional tahun 2023

Indeks	Rata-rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lainnya	Prov.	Kab.	Kota
SPBE	2,35	3,14	2,92	2,33	2,74	2,17	2,50
Domain Kebijakan	2,39	3,08	2,88	2,39	2,69	2,23	2,61
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,39	3,08	2,88	2,39	2,69	2,23	2,61
Domain Tata Kelola	1,85	2,86	2,59	1,94	2,27	1,64	1,98
Perencanaan Strategis	1,70	2,63	2,33	1,90	2,00	1,53	1,70
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,92	2,93	2,77	2,04	2,40	1,68	2,11
Penyelenggaraan SPBE	2,02	3,16	2,75	1,83	2,57	1,78	2,28
Domain Manajemen	1,32	2,01	1,64	1,36	1,51	1,21	1,36
Penerapan Manajemen SPBE	1,35	2,14	1,62	1,37	1,55	1,23	1,41
Audit TIK	1,24	1,66	1,69	1,34	1,38	1,15	1,23
Domain Layanan SPBE	2,97	3,72	3,58	2,86	3,45	2,79	3,18
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,03	3,71	3,58	3,07	3,46	2,85	3,23

Indeks	Rata-rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lainnya	Prov.	Kab.	Kota
Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,89	3,74	3,58	2,55	3,44	2,71	3,09

Tabel II.121
Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2023
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	4
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	4
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	1
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	4
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	4
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	4
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	4
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	4
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	2
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	2
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	3
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	3
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	2
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	3
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	3
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	2
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	2
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2023
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	2
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	3
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	2

Tabel II.122

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan tata kelola pemerintah yang profesional, dan akuntabel Tahun 2023 Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2023	TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Kategori	Baik	Baik	100	Optimis Tercapai

Pencapaian kinerja indikator sasaran **Meningkatnya tata kelola pemerintah yang profesional, dan akuntabel** di Tahun 2023 dengan indikator, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) jika dibandingkan dengan target capaian akhir tahun RPJMD, dengan status capaian "Optimis Tercapai".

Faktor penunjang Kenaikan indeks SPBE Kabupaten Bangka Barat Pada Tahun 2023 ini adalah adanya kenaikan nilai pada Domain Kebijakan dan Domain Layanan SPBE, antara lain :

- Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah menyusun Peraturan Bupati No 74 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pada Tahun 2023 juga Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah menerapkan beberapa layana SPBE seperti SIPD, Aplikasi Srikandi dan Layanan Kepegawaian, diantaranya layanan digital cuti pegawai.
- Telah terbangunnya jaringan intra Pemerintah Daerah yang terpusat di Diskominfo.

Faktor Penghambat/kelemahan Kenaikan indeks SPBE Kabupaten Bangka Barat Pada Tahun 2023 ini adalah :

- Kelemahan pada Aspek Perencanaan Strategis, Aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Audit TIK. Hal ini disebabkan karena kegiatan pada aspek tersebut dilaksanakan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana.
- Dalam Aspek Penerapan Manajemen SPBE belum disusun pedoman Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Aset TIK, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan SPBE sehingga dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan program kerja manajemen SPBE di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
- Dalam penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE belum dikonsultasikan dengan unit pengelola TIK sehingga penyusunan rencana dan anggaran SPBE belum dapat memenuhi indikator dan kriteria penilaian pada pelaksanaan evaluasi SPBE selanjutnya.

Indikator Sasaran 4.1.5 “Indeks profesionalitas ASN”.

Perhitungan Indeks profesionalitas ASN berpedoman pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, sehingga pengukuran Indeks Profesional ASN dapat dilakukan secara sistematis, terukur dan berkesinambungan.

Tabel II.123
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Profesional, dan Akuntabel
Dengan Perjanjian Kerja

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	%	STATUS CAPAIAN
Indeks profesionalitas ASN	Indeks	64,85	64,41	99,34	Baik

Indeks profesionalitas ASN Pada Tahun 2023 Kabupaten Bangka Barat sebesar 64,41 nilai ini lebih rendah 0,44 dari target Perjanjian Kerja Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2023 yaitu 64,85 atau realisasi sebesar 99,34 %.

Hasil Pengukuran Mandiri Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 berdasarkan Peraturan BKN No. 8 Tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 adalah sebesar 64,41 yaitu mencapai 99,34% dari target yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2023 yaitu sebesar 64,84 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel II.124

NO.	Dimensi Standar Profesionalitas ASN	Standar Bobot Pengukuran	Target 2023	Hasil Pengukuran 2023	Realisasi (%)
1.	Kualifikasi	25	13,00	21,28	163,69%
2.	Kompetensi	40	21,40	14,76	68,97%
3.	Kinerja	30	25,45	23,37	91,83%
4.	Disiplin	5	4,99	5,00	100,20%
	Total	100	64,84	64,41	99,34%

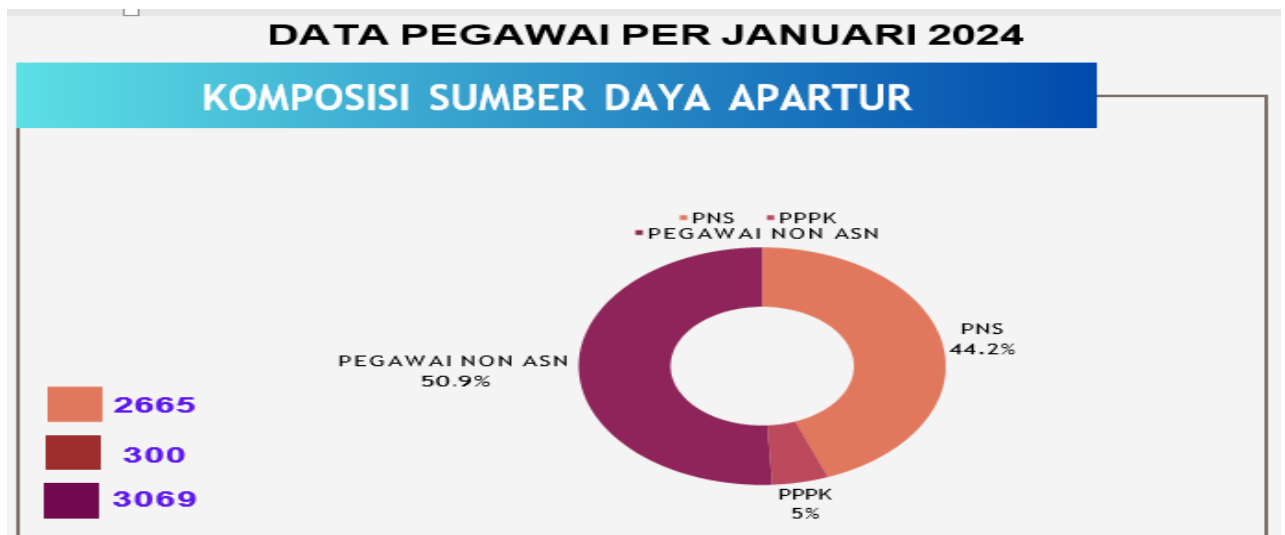
Sumber Data BKPSDM Kabupaten Bangka Barat

Tabel II.125
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Profesional, dan Akuntabel
Tahun 2023 Terhadap Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	%	STATUS CAPAIAN
Indeks profesionalitas ASN	Kategori	63,52	64,41	98,61	Meningkat

Capaian Indikator Sasaran Indeks **professionalitas ASN** Kabupaten Bangka Barat tahun 2023 jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya Mengalami peningkatan sebesar 0,89 poin dari nilai Indeks Tahun 2022 yaitu sebesar 63,52 menjadi 64,41 ditahun 2023 hal ini dipicu oleh keseriusan stake holders dalam meningkatkan kompetensi SDM baik secara kualitas maupun kuantitas.

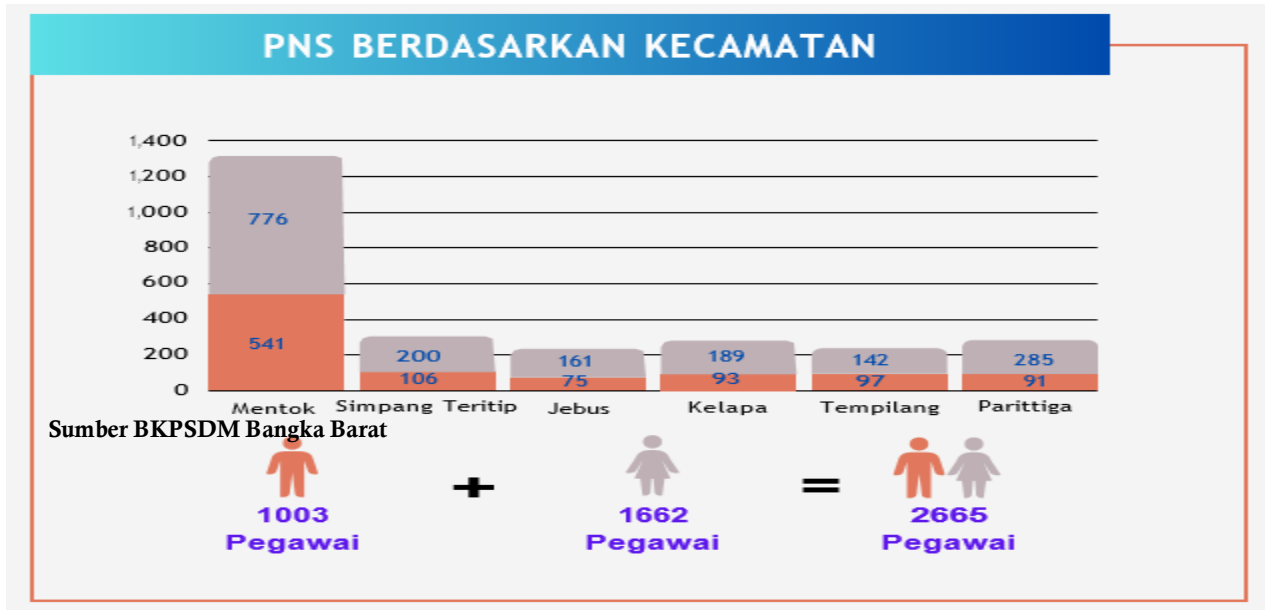
Grafik II.25



Sumber BKPSDM Bangka Barat

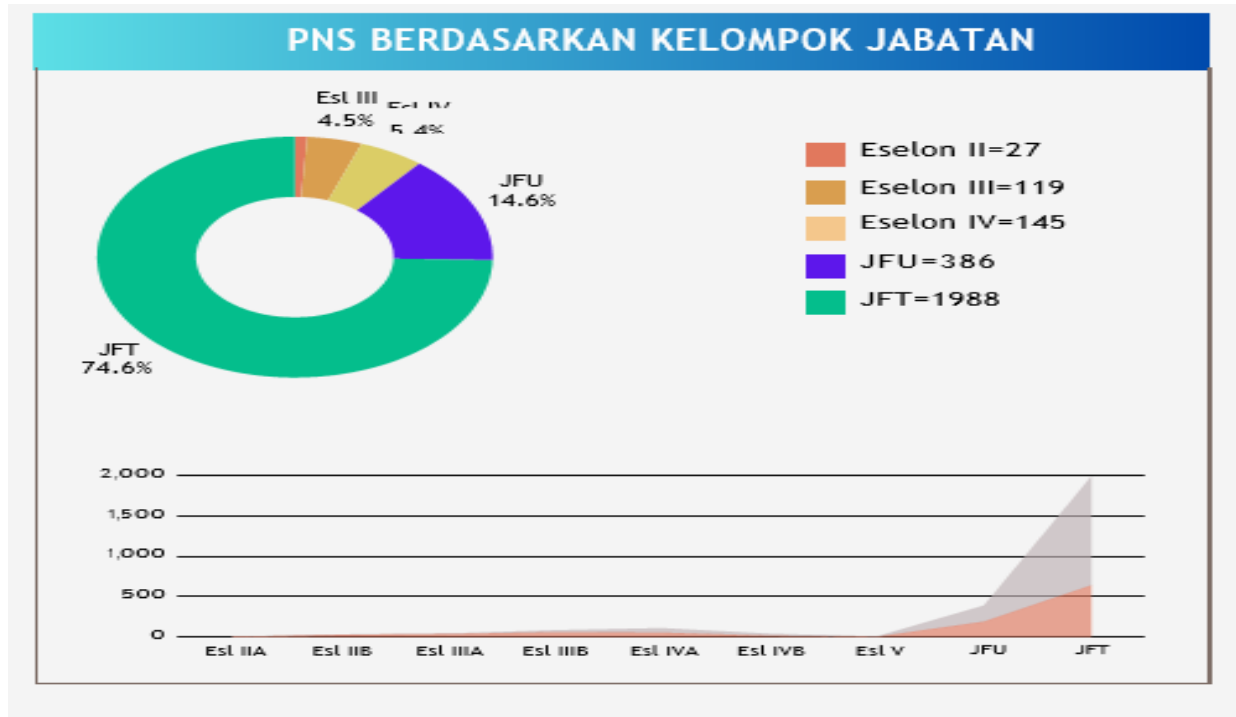
Dari Grafik diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah keseluruhan pegawai di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 6034 pegawai yang terdiri atas PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 2.665 orang atau sebesar 44,2 %, PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) sebanyak 300 orang atau sebesar 5 % dan Pegawai Non ASN / PHL(Pegawai Harian Lepas) sebanyak 3.069 orang atau sebesar 50,9 %. Dimana keseluruhan PNS (Pegawai Negeri Sipil) tersebut tersebar dalam 6 Kecamatan dengan rincian sebagai berikut :

Grafik II.26



Sumber BKPSDM Bangka Barat

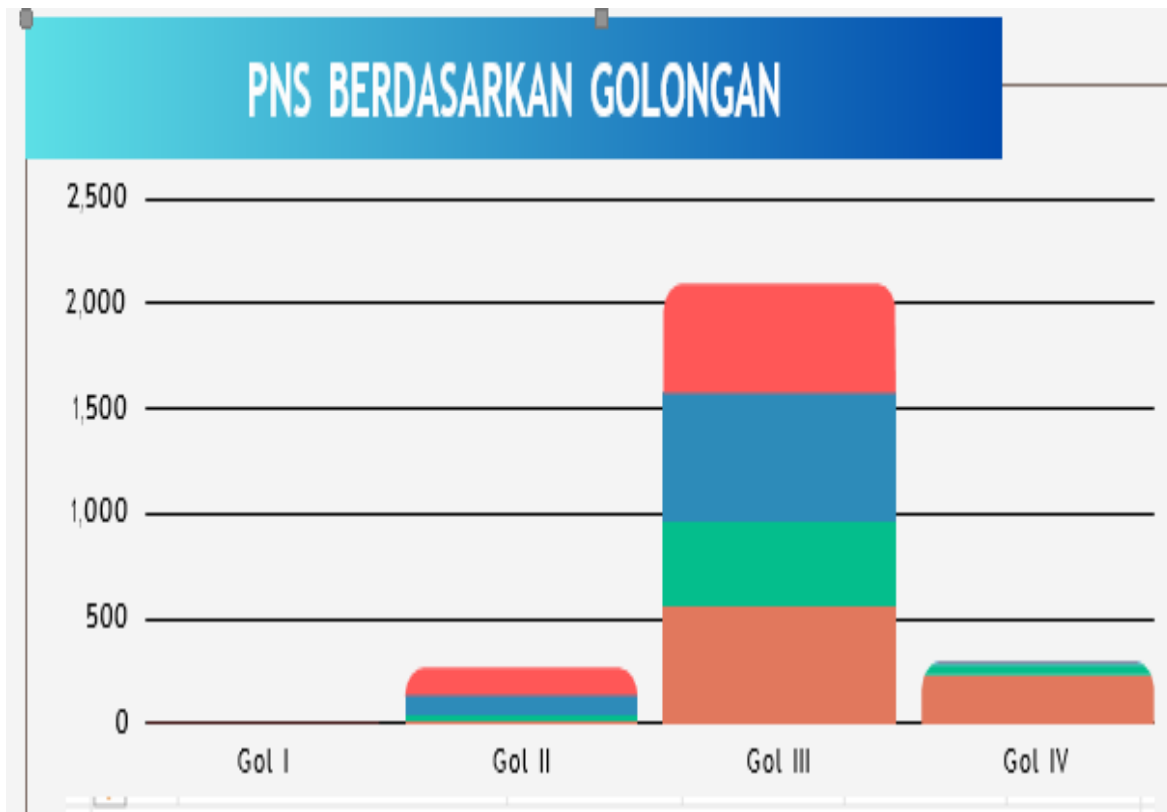
Grafik II.27



Sumber BKPSDM Bangka Barat

PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 2.665 yang ada di Kabupaten Bangka Barat menempati beberapa pos posisi antara lain eselon II sebanyak 27 orang eselon III sebanyak 119 orang, JFU (Jabatan Fungsional Umum) sebanyak 145 orang dan JFT (Jabatan Fungsional Tertentu) sebanyak 1988 orang, dengan jumlah rincian Golongan Pegawai sebagai berikut :

Grafik II.28



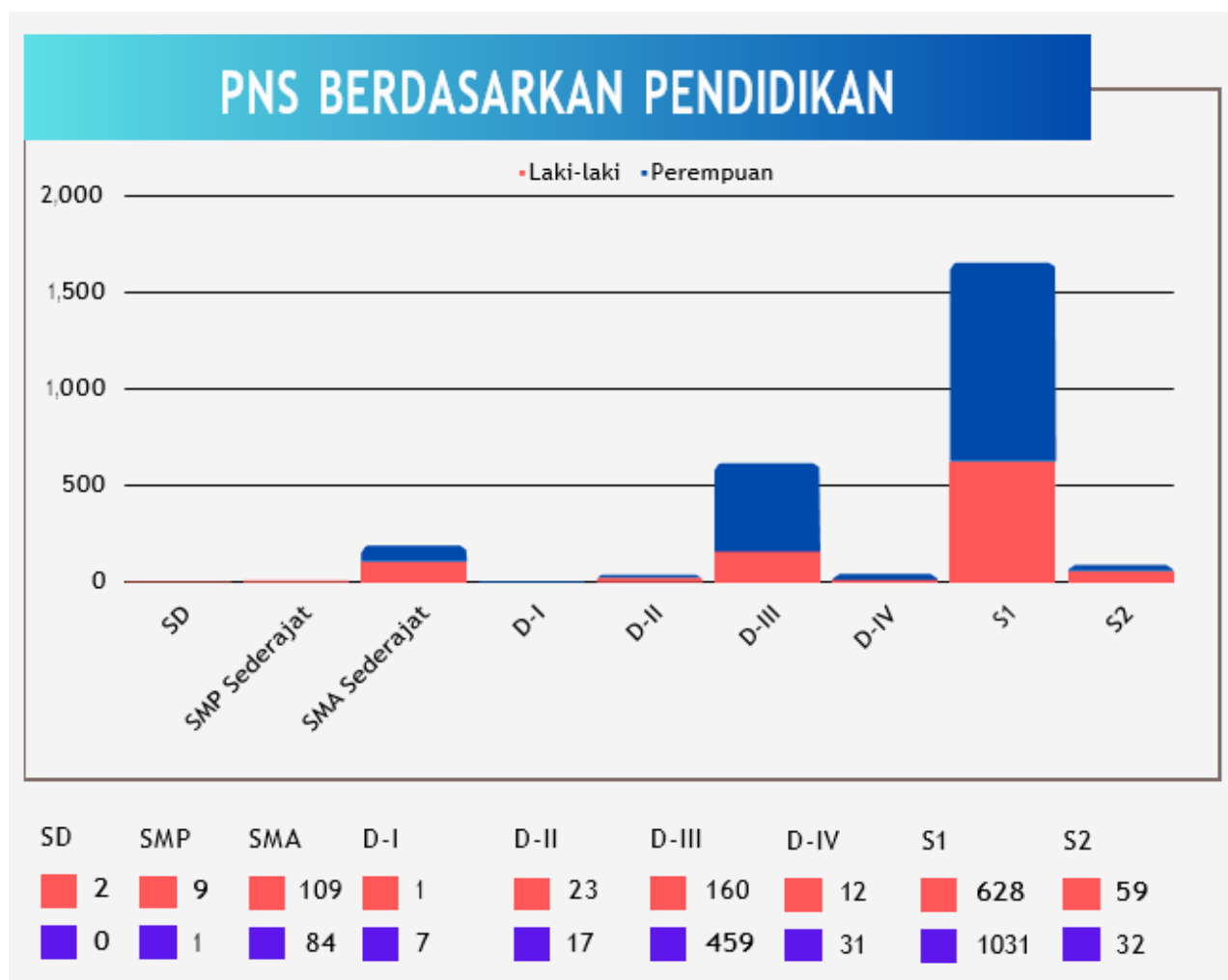
Sumber BKPSDM Bangka Barat

Grafik II.29
Data Pegawai Negeri Sipil menurut jenis Kelamin

No	Pangkat Golongan	Jenis Kelamin		Total	Pesentase
		Laki-laki	Perempuan		
1	Juru/I c	1	0	1	0,04%
2	Juru TK. I/I d	1	1	2	0,08%
3	Pengatur Muda/II a	7	3	10	0,38%
4	Pengatur Muda TK.I/II b	22	14	36	1,35%
5	Pengatur/II c	33	60	93	3,49%
6	Pengatur TK.I/II d	49	81	130	4,88%
7	Penata Muda/III a	171	395	566	21,24%
8	Penata Muda TK.I/III b	151	248	399	14,97%
9	Penata/III c	191	418	609	22,85%
10	Penata TK.I/III d	200	321	521	19,55%
11	Pembina/IV a	125	107	232	8,71%
12	Pembina TK.I/IV b	38	14	52	1,95%

Sumber BKPSDM Bangka Barat

Grafik II.30
Data Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan



Sumber BKPSDM Bangka Barat

Tabel II.126
Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Standar Nasional/Provinsi:

NO.	INDIKATOR	Target Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023	Capaian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023	Target Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023	Capaian Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023	Persentase Capaian IP ASN Kab. Bangka Barat Tahun 2023	Persentase Capaian IP ASN Kab. Bangka Barat disbanding dengan Target Provinsi
1.	Indeks Profesionalitas ASN	67,00	64,40	64,84	64,41	99,34%	96,13%

Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN, dimana Standar Profesionalitas ASN adalah kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN yang mencakup dimensi **kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin**. Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN di Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2023 berdasar Surat Direktur Jabatan ASN BKN Nomor : 221.F/BM.02/SD/C.II/2023 tanggal 10 Oktober 2023 sebesar 64,84. Pencapaian ini dibawah target yang ditetapkan pada saat diperjanjikan yaitu sebesar 64,85 lebih rendah sebesar 0,01.

Tabel II.127

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintah yang profesional, dan akuntabel Tahun 2023 Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2023	TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN
Indeks profesionalitas ASN	Indeks	64,41	65,53	98,29	Optimis Tercapai

Pencapaian kinerja indikator sasaran **Meningkatnya tata kelola pemerintah yang profesional, dan akuntabel** di Tahun 2023 dengan indikator **Indeks profesionalitas ASN**, jika dibandingkan target capaian akhir tahun RPJMD dengan selisih sebesar 1,12 dengan capaian 98,29%, maka status capaian untuk target di akhir RPJMD "Optimis Tercapai".

Beberapa hal yang menjadi faktor pendukung pencapaian indikator IP ASN yaitu sebagai berikut:

- Diterbitkannya Peraturan Bupati Bangka Barat No. 16 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat serta Surat Edaran Bupati Nomor 800/544/BKPSDMD/2021 Tentang Peningkatan Kompetensi ASN.
- Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara oleh BKPSDMD bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat.
- Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2011 tentang Disiplin Pegawai dan wewenang pejabat menjatuhkan hukuman disiplin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun tentang Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat, serta Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan

Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil oleh BKPSDMD bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat.

- d. Tersedianya anggaran untuk pengembangan kompetensi melalui Diklat Teknis/Fungsional, Seminar/ Workshop/ Magang/Kursus atau sejenisnya bagi pegawai baik diluar daerah maupun di dalam daerah.
- e. Telah dilakukan assesment pada seleksi JPT dan talent pool bagi pejabat eselon III, JFT dan pelaksana
- f. Ditandatanganinya MOU dengan beberapa Perguruan Tinggi di Bbel tentang pengembangan peningkatan kualifikasi pegawai.

Sedangkan beberapa hal yang menjadi faktor penghambat pencapaian indikator IP ASN sebagai berikut:

- a. Kesadaran Pegawai untuk melakukan updating data pengembangan kompetensi pada aplikasi SiASN BKN belum maksimal.
- b. Belum ada regulasi daerah tentang pemberian reward bagi pegawai yang berprestasi sehingga tidak ada pemacu pegawai untuk meningkatkan profesionalitasnya.
- c. Rendahnya minat Pegawai untuk meningkatkan kompetensinya melalui Diklat Teknis/Fungsional, Seminar/ Workshop/ Magang/Kursus atau sejenisnya yang memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatannya disebabkan keterbatasan biaya perjalanan dinas bagi peserta diklat.

Secara keseluruhan untuk pencapaian indikator Sasaran **"Meningkatnya tata kelola pemerintah yang Profesional, dan akuntable"** jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel II.128
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintah yang profesional, dan akuntabel Tahun 2023 Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2023	TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN
Nilai SAKIP Daerah	Nilai	68,49	70,53	96,97	Optimis Tercapai
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100	Optimis Tercapai
Maturitas sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas	Berkembang	Terdefinisi	75	Perlu Upaya Lebih
Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Kategori	Baik	Baik	100,38	Optimis Tercapai
Indeks profesionalitas ASN	Indeks	64,41	65,53	98,29	Optimis Tercapai

Pencapaian kinerja indikator sasaran **Meningkatnya tata kelola pemerintah yang profesional, dan akuntable** di Tahun 2023 dengan indikator yaitu Nilai SAKIP Daerah, Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Indeks Profesionalitas ASN jika dibandingkan dengan target capaian akhir tahun RPJMD, dengan status

capaian "Optimis Tercapai" pada empat indikator, dan satu indikator dengan status " Perlu Upaya Lebih" pada satu indikator. Walaupun capaian target indikator sasaran ini masih belum semua tercapai di tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD, akan tetapi secara umum masih sangat optimis dapat tercapai pada akhir tahun RPJMD karena tahun 2023 merupakan tahun kedua RPJMD dan masih menyisahkan beberapa tahun lagi untuk mengoptimalkan upaya pencapaian target yang telah ditetapkan.

Pada maturitas sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), persentase capaian dihitung dari hasil bagi capaian tahun 2023 dengan nilai range terendah target RPJMD dikali seratus persen. Target RPJMD yaitu pada tingkat maturitas TERDEFINISI pada range nilai 3,0 - < 4,0 sedangkan capaian tahun 2023 adalah BERKEMBANG pada nilai 2,75, sehingga persentase capaian indikator maturitas sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

Untuk indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), persentase capaian dilihat dari range target pada akhir tahun RPJMD yaitu kategori BAIK dengan range nilai 2,6 - < 3,5, sedangkan capaian tahun 2023 yaitu kategori BAIK dengan nilai 2,61, sehingga persentase dihitung dari nilai capaian tahun 2023 dibagi nilai range terendah target RPJMD dikali seratus persen yaitu sebesar 100,38 % (seratus koma tiga puluh delapan persen).

Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat akan melakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan target capaian indikator sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Professional dan Akuntabel pada tahun mendatang.

Langkah strategis atau upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk meningkatkan nilai SAKIP antara lain :

- a. Melakukan reviu perbaikan terhadap perencanaan kinerja dengan memperhatikan berbagai kaidah seperti : manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat (*result oriented*), kualitas indikator kinerja, keterpaduan perencanaan pembangunan (*integrated development plan*) serta mekanisme *casecade* kinerja;
- b. *Casecade down* kinerja sampai level organisasi terendah perlu dibangun guna memastikan tercapainya tujuan dan sasaran strategis yang telah dituangkan dalam RPJMD;
- c. Melakukan reviu atas keselarasan antara kegiatan, program, dengan sasaran strategis sehingga dapat meyakinkan bahwa terdapat efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kinerja;
- d. Meningkatkan kualitas evaluasi pengelolaan program secara berkala dengan berfokus pada ketercapaian hasil program serta keterpaduan lintas perangkat daerah;
- e. Menyempurnakan aplikasi E-SAKIP agar dapat optimal digunakan untuk monitoring dan evaluasi kinerja serta terintegrasi dengan aplikasi lainnya, seperti aplikasi perencanaan dan penganggaran;
- f. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh Inspektorat dengan meningkatkan kapabilitas para evaluator agar mampu memacu perbaikan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
- g. Mendorong penerapan budaya kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan menyusun indikator kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi serta dijadikan acuan dalam penyusunan SKP yang ditunjang dengan pelaksanaan reviu kinerja berjenjang secara berkala di seluruh unit kerja; dan

- h. Melaksanakan catatan dan rekomendasi atas hasil evaluasi SAKIP dari Kemenpan RB untuk menjadi perbaikan SAKIP pada tahun berikutnya.

Adapun strategi untuk meningkatkan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan risiko dan menerapkannya secara menyeluruh diwilayahnya.
- b. Menuangkan pernyataan komitmen bersama mengenai penerapan manajemen risiko oleh sekretaris daerah dan seluruh OPD.
- c. Meningkatkan sosialisasi terkait manajemen risiko yang telah ditetapkan kepada seuruh OPD.
- d. Memberikan pendampingan kepada seluruh OPD dalam mengimplementasikan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
- e. Mengalokasikan sumber daya secara memadai terkait efektivitas pengendalian korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Berikut langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan nilai indeks SPBE adalah sebagai berikiut :

- a. Penguatan Peran Tim Koordinasi SPBE dalam rangka memaksimalkan penerapan SPBE di Kabupaten Bangka Barat
- b. Menyusun Regulasi/Kebijakan yang belum terpenuhi terkait penerapan SPBE seperti Penyusunan Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE dan aturan terkait Audit TIK.
- c. Menerapkan dan Mengembangkan Layanan-Layanan SPBE yang terintegrasi baik layanan yang dibangun oleh Pemerintah Pusat (dalam hal ini Apliaksi Umum seperti LPSE, SRIKANDI, SP4N Lapor, SIPD, OSS dan lain lain) maupun layanan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah (dalam hal ini aplikasi Khusus seperti JDIH, EKIN PHL, E-PRESENSI, PPDB Online dan lain-lain).

Beberapa langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian sasaran IP ASN adalah sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi Pegawai Pejabat Eselon II, III dan IV untuk mengikuti Diklat Struktural sesuai dengan Jabatannya. Dan memfasilitasi Pegawai Pejabat Fungsional dan Teknis Lainnya untuk mengikuti Diklat Fungsional dan Teknis Lainnya sesuai dengan Jabatannya.
- b. Melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.
- c. Menyusun regulasi daerah tentang pemberian penghargaan/reward bagi Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi.
- d. Melakukan kerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara dalam pengembangan aplikasi penilaian kinerja pegawai di lingkungan Pemkab. Bangka Barat.

Dalam pencapaian sasaran **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Profesional, dan Akuntabel**, didukung oleh program pembangunan yang dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

5. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
6. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
8. Program Penyelenggaraan Pengawasan
9. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
10. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
11. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengaman Informasi
12. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
13. Program Pengelolaan Arsip
14. Program Perizinan Penggunaan Arsip
15. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
16. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
17. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
18. Program Kepegawaian Daerah
19. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
20. Program Kepegawaian.

Tabel II.129
Analisis Program Sasaran
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Profesional, dan Akuntabel

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	$5=4/3*100\%$
3.1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
3.1.1 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	451.243.428.577,00	422.119.081.863,00	93,55
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	638.213.600,00	563.832.697,00	88,34
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	274.142.500,00	183.481.900,00	66,92
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	330.126.805,00	157.627.000,00	47,74
5	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	43.570.000,00	0,00	-
6	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	122.718.835.961,00	64.566.146.083,00	52,61
7	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	418.226.800,00	294.895.100,00	70,51
8	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.434.247.000,00	1.316.510.982,00	91,79
9	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	281.602.000,00	226.806.000,00	80,54
10	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	28.044.605.099,00	15.619.749.653,00	55,69

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
11	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengaman Informasi	12.800.000,00	0,00	-
12	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	8.500.000,00	3.580.000,00	42,11
13	Program Pengelolaan Arsip	25.410.000,00	24.929.250,00	98,1
14	Program Perizinan Penggunaan Arsip	300.000,00	0,00	-
15	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	92.000.000,00	91.880.000,00	99,86
16	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.440.554.000,00	1.297.906.771,00	90,09
17	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	962.101.400,00	897.596.432,00	93,29
18	Program Kepegawaian Daerah	451.243.428.577,00	422.119.081.863,00	93,55
19	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	638.213.600,00	563.832.697,00	88,34
20.	Program Kepegawaian	1.271.766.200,00	818.889.209,00	64,38
Total		609.240.429.942,00	508.182.912.940,00	83,41

NO	SASARAN STRATEGIS	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Sasaran Kinerja	Efektifitas
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Profesional, dan Akuntabel	83,41	99,29	efektif

Sasaran Strategis 4.2 “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah”

Pengukuran Sasaran ”Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah” dilakukan melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan secara periodik.

Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Negara memiliki kewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Untuk itu berbagai terobosan dan perbaikan telah dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik baik instansi pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, perlu untuk mengetahui sejauh mana dampak yang dihasilkan dari perbaikan pelayanan tersebut melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkup Instansi Pemerintah, tanggal 3 Juli 2023, pelaporan tahunan SKM disampaikan pada akhir periode tahun berjalan paling lambat pada tanggal 15 Desember setiap tahunnya. Menyusul Surat Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor B/971/PP.99/2023 tentang Permohonan Data SKM Dalam Rangka Pembentukan Indeks Reformasi Birokrasi, tanggal 23 Agustus 2023, bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyampaikan laporan hasil pelaksanaan SKM pada periode Januari - Juni Tahun 2023 selambat-lambatnya tanggal 15 September 2023. Oleh karena itu, mulai tahun 2023, pelaporan SKM Pemerintah Daerah menjadi 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu laporan semester I dan laporan semester II tahun berjalan. Pengacu pada perubahan tentang pelaporan SKM tersebut, maka untuk IKM Tahun 2023 diperoleh dari hasil rata-rata IKM Semester I dan IKM Semester II. Capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasi sasaran "Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah", adalah sebagai berikut:

Tabel II.130
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah terhadap Perjanjian Kerja

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	81,82	84,36	103,10	Sangat Baik

Pada tahun 2023, pencapaian target indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 84,36 dimana target tahun 2023 sebesar 81,82 sehingga pencapaian realisasi pada tahun 2023 telah melebihi target yang telah ditetapkan.

Tabel II.131
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah terhadap Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2022	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	84,36	83,06	101,56	Meningkat

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022, maka capaian IKM tahun 2023 juga mengalami peningkatan indeks sebesar 1,29 atau jika dikonversi ke dalam persentase sebesar 0,02%.

Tabel II.132
Indeks Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Pelayanan Publik (UPP) Tahun 2023

No	OPD/ Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM	Kategori
1	Dinas Kesehatan	82,64	B (Baik)

No	OPD/ Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM	Kategori
2	Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan	82,22	B (Baik)
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	80,89	B (Baik)
4	Dinas Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	87,98	B (Baik)
5	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	90,56	A (Sangat Baik)
6	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	82,91	B (Baik)
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	83,45	B (Baik)
8	RSUD Sejiran Setason	83,92	B (Baik)
9	Kecamatan Muntok	81,77	B (Baik)
10	Kecamatan Simpang Teritip	85,96	B (Baik)
11	Kecamatan Kelapa	84,35	B (Baik)
12	Kecamatan Jebus	87,32	B (Baik)
13	Kecamatan Parittiga	83,22	B (Baik)
14	Kecamatan Tempilang	88,75	A (Sangat Baik)
15	Puskesmas Muntok	88,31	A (Sangat Baik)
16	Puskesmas Simpang Teritip	79,61	B (Baik)
17	Puskesmas Kelapa	82,59	B (Baik)
18	Puskesmas Sekar Biru	83,23	B (Baik)
19	Puskesmas Puput	82,78	B (Baik)
20	Puskesmas Tempilang	83,94	B (Baik)
21	Puskesmas Jebus	84,11	B (Baik)
22	Puskesmas Kundi	84,79	B (Baik)
	Rata-rata	84,36	B (Baik)

Sumber: Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Semester I Tahun 2023 dan Laporan

Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Semester II Tahun 2023

Jika dilihat tren nilai indeks kepuasan masyarakat Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mulai dari Tahun 2020 hingga semester II Tahun 2023 cenderung meningkat. Perkembangan nilai indeks kepuasan masyarakat Pemerintah Kabupaten Bangka Barat digambarkan pada grafik di bawah ini:

Grafik II.31
Data Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 – Semester II Tahun 2023



Sumber: Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 – Semester II Tahun 2023

Tabel II.133
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah Tahun 2023 terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2023	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	84,36	82,72	101,98	Optimis Tercapai

Jika melihat capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Tahun 2023 sebesar 84,36, jika dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD yaitu sebesar 82,72 maka target telah tercapai yaitu sebesar 101,98 persen. Beberapa faktor pendorong pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pada tahun 2023 yaitu antara lain:

- a. Telah disusun standar pelayanan serta dilakukan evaluasi terhadap standar pelayanan pada OPD/UPP pelayanan langsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;
- b. Dilakukan pembinaan secara berkala kepada OPD/UPP guna pemenuhan standar pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pada setiap tahun periodik dilakukan evaluasi oleh pihak eksternal terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada beberapa perangkat daerah atau unit pelayanan yang ditunjuk sebagai *sample* lokus, yaitu evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB RI dan Ombudsman RI. Evaluasi ini menghasilkan rekomendasi yang ditindak lanjuti oleh OPD/UPP untuk perbaikan pelayanan;
- d. OPD/UPP berupaya seoptimal mungkin memperbaiki pelayanan pada OPD/UPP masing-masing, baik dari aspek administrasi, pelaksana, sarana prasarana, dan lain-lain.
- e. Beberapa OPD/UPP melakukan inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan lain-lain.

Berdasarkan APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023, ditetapkan program pembangunan sebagai pendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah sebanyak 10 program, sebagai berikut:

1. Program Pendaftaran Penduduk
2. Program Pencatatan Sipil
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
7. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
8. Program Penataan Desa
9. Program Administrasi Pemerintahan Desa
10. Program Perekonomian dan Pembangunan

Tabel II.134
Analisis Program Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah Tahun 2023

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
1	2	3	4	$5=4/3*100$ %
4.2 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintah				
1	Program Pendaftaran Penduduk	296.253.000,00	253.785.850,00	85,66
2	Program Pencatatan Sipil	31.359.800,00	29.346.750,00	93,58
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	18.800.000,00	7.607.975,00	40,46
4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	15.260.000,00	12.060.000,00	70,03
5	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.214.745.800,00	1.179.710.250,00	97,11
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	73.720.000,00	73.629.000,00	9,87
7	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	830.120.000,00	814.129.526,00	98,07
8	Program Penataan Desa	30.467.500,00	12.794.900,00	41,99
9	Program Administrasi Pemerintahan Desa	719.650.000,00	593.390.200,00	82,45
10	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.150.545.000,00	1.986.829.632,00	92,38
Total		5.380.921.100,00	4.963.284.083,00	92,23

Tabel. II.135
Efisiensi Penggunaan Sumber daya Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Sasaran Kinerja (%)	Efektifitas
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah	92,23	103,10	Efektif

Berdasarkan tabel di atas maka realisasi anggaran sebesar 92,23% dibanding dengan realisasi kinerja sebesar 103,10 % menunjukkan adanya efektifitas dan efisiensi penggunaan dana.

Sasaran Strategis 5.1 “Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah”

Sasaran Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah didukung oleh satu indikator yaitu capaian derajat otonomi fiskal daerah. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) merupakan suatu rasio guna mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah khususnya Pemerintah Daerah. Meningkatnya PAD merupakan salah satu cara dalam meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja rutin dan pembangunan. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD maka semakin besar kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya bisa diukur melalui kinerja/kemampuan keuangan daerah. Adapun salah satu rasio yang digunakan sebagai tolok ukur dalam hal ini yaitu dengan membandingkan Total Realisasi PAD dengan Total Pendapatan Daerah. Capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya, sebagai berikut:

Tabel II.136
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah Tahun 2023
Terhadap Perjanjian Kinerja

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	%	STATUS CAPAIAN
Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	8,68	8,37	96,42	Baik

Pada Tahun 2023, capaian Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebesar 8,37 persen. Pencapaian ini di atas dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pemerintah daerah dimana target yang ditetapkan pada Tahun 2023 terkait DOFD sebesar 8,68 persen. Pencapaian DOFD Kabupaten Bangka Barat sebesar 8,37 persen didapat dari perbandingan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. **44.275.815.509,09** dengan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. **857.249.744.112,35** Detail perhitungan dapat dilihat pada tabel dibawah.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Barat sampai dengan Bulan Desember tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. **857.249.744.112,35** atau sebesar 85,79 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp. **999.267.921.918,00** dengan perincian sebagai berikut :

Tabel II.137
Realisasi Pendapatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
Jumlah Pajak Daerah	29.156.787.500,00	26.508.301.381,00	90,92%
Retribusi Daerah	8.127.500.000,00	7.822.366.408,00	96,25%
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.850.000.000,00	6.844.661.601,09	69,49%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	26.271.955.964,00	30.565.629.593,26	116,34%
Pendapatan Transfer	860.301.956.454,00	785.056.785.129,00	91,25%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	500.000.000,00	452.000.000,00	90,40%
Total Pendapatan Daerah	999.267.921.918,00	857.249.744.112,35	85,79%

Sumber Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

Sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2023 mencapai Rp. **73.406.243.464,00,-** atau 97,73 persen dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. **71.740.958.983,35,-** dengan perincian sebagai berikut :

Tabel II.138
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
Jumlah Pajak Daerah	29.156.787.500,00	26.508.301.381,00	90,92%
Retribusi Daerah	8.127.500.000,00	7.822.366.408,00	96,25%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.850.000.000,00	6.844.661.601,09	69,49%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	26.271.955.964,00	30.565.629.593,26	116,34%
Total Pendapatan Daerah	73.406.243.464,00	71.740.958.983,35	97,73%

Sumber Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

Berikut rincian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

Tabel II.139
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2023

No.	Uraian Pajak	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Hotel	105.787.500,00	164.261.141,00	155,27%
2	Pajak Restoran	2.961.000.000,00	2.644.299.871,00	89,30%
3	Pajak Hiburan	70.000.000,00	30.239.325,00	43,20%
4	Pajak Reklame	500.000.000,00	294.189.774,00	58,84%
5	Pajak Penerangan Jalan	15.000.000.000,00	14.463.924.454,00	96,43%
6	Pajak Parkir	20.000.000,00	5.388.400,00	26,94%
7	Pajak Air Tanah	250.000.000,00	109.316.975,00	43,73%
8	Pajak Sarang Burung Walet	800.000.000,00	318.079.700,00	39,76%

9	Pajak Mineral Bukan Logam lainnya	1.500.000.000,00	807.064.162,00	53,80%
10	Pajak Bumi dan Bangunan	6.300.000.000,00	5.062.922.679,00	80,36%
11	Pajak BPHTB	1.650.000.000,00	2.608.614.900,00	158,10%
	- BPHTB Pemindahan Hak	650.000.000,00	1.906.267.150,00	293,27%
	- BPHTB Pemberian Hak Baru	1.000.000.000,00	702.347.750,00	70,23%
	TOTAL	29.156.787.500,00	26.508.301.381,00	90,92%

Sumber Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

Tabel II.140

Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah dibandingkan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	%	STATUS CAPAIAN
Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	9,14	8,37	91,57	Menurun

Perbandingan Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah dengan indikator indikator Derajat Otonomi Fiskal daerah dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 0,77 persen.

Tabel II.141

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah Tahun 2023 Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2023	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS CAPAIAN
Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	8,37	9,43	88,75	Optimis Tercapai

Dari pencapaian DOFD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 sebesar 8,37 persen, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 9,00 persen maka target akhir masa RPJMD optimis tercapai. Dalam hal pencapaian target indikator DOFD, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terus berupaya untuk meningkatkan kemandirian pemerintah daerah khususnya pada komponen pajak dan retribusi daerah. Strategi dan arah kebijakan terkait peningkatan DOFD antara lain melalui intensifikasi serta ekstensifikasi PAD.

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian dalam pencapaian kinerja ini adalah Upaya-upaya peningkatan PAD melalui intensifikasi serta ekstensifikasi antara lain:

- Memberikan surat peringatan kepada pengelola rumah makan/restoran/ cafe yang selama ini belum melakukan pembayaran pajak restoran;
- Melakukan relaksasi denda untuk PBB P2;
- Kerjasama dengan operator telekomunikasi terkait SMS *Gateway* kepada wajib pajak;
- Berkoordinasi dengan BUMN dan swasta terkait potensi pajak yang ada di BUMN dan swasta;
- Melakukan penyempurnaan tarif pajak dan retribusi daerah;
- Melakukan penagihan-penagihan pajak terutang yang timbul;
- Melakukan sosialisasi berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran, kepatuhan, ketaatan, kejujuran, dan kedisiplinan masyarakat dalam membayar pajak;

- h. Melakukan penyusunan *data base* potensi pajak;
- i. Menyempurnakan sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis aplikasi secara optimal;
- j. Melakukan kerja sama dengan pihak terkait yaitu kejaksaan sebagai pengacara negara dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dalam melakukan penagihan pajak dan piutang pajak;
- k. Adanya komitmen yang tinggi dari Pemimpin dan dukungan seluruh perangkat daerah untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Bangka Barat tahun 2022-2026;
- l. Adanya Unit Pelaksana Teknis Badan (UPT) pada 3 (tiga) UPT dan 3 (tiga) Unit Layanan di Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat yaitu Kecamatan Muntok, Simpang Teritip, Jebus, Parittiga, Kelapa dan Tempilang yang merupakan ujung tombak dalam peningkatan PAD;
- m. Standar Operasional Prosedur yang mulai memadai telah dimiliki oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- n. Mulai tumbuhnya kesadaran wajib pajak dalam pengurusan pajak.

Faktor- Faktor Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran program Peningkatan PAD pada tahun 2023 yaitu :

1. Belum selesainya revisi PERDA lama terkait pajak daerah yang berdasarkan aturan terbaru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Dari segi sarana dan prasarana, pengelolaan 11 pajak daerah sudah teraplikasi database, tetapi masih minim fasilitas
3. Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka Barat belum terkelola dengan optimal;
4. Kepatuhan, ketaatan dan Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah;
5. SDM yang masih terbatas baik jumlah personil maupun keahlian dan pemahaman;
6. Masih lemah dalam hal pengawasan karena tidak ada PPNS Pajak Daerah dan Juru Sita Pajak di Kabupaten Bangka Barat, sehingga perlu penguatan pengawasan untuk optimalisasi pajak daerah.

Adapun Penyebab tercapainya dan tidak tercapainya realisasi PAD khususnya 11 (Sebelas) Pajak Daerah adalah :

1. Untuk Pajak Hotel realisasi melebihi target karena adanya event Pekan Olahraga Provinsi (Porprov)
2. Untuk Pajak Restoran realisasi hampir mencapai target yaitu sebesar 89,30 % adanya pemasangan Tapping Box pada beberapa tempat strategis restoran dan rumah makan yang ada di Kabupaten Bangka Barat.
3. Pajak Hiburan realisasi tidak sesuai target karena target karena Objek pajak hiburan seperti pasar malam, pameran, balapan dan lainnya masih belum begitu banyak/aktif
4. Pajak Reklame target pajak tidak tercapai dikarenakan pemasangan reklame-reklame seperti reklame rokok. Untuk penerimaan dari pajak reklame tergantung dari banyak tidaknya pemasangan reklame oleh WP.
5. Pajak Penerangan Jalan (PPJ), realisasi tidak sesuai target karena target yang ditetapkan oleh Tim TAPD memang lebih tinggi dari penggunaan tenaga listrik dan BP2RD belum bisa mendapatkan data pengguna listrik yang lengkap karena PT. PLN tidak transparan dalam memberikan data.
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan, realisasi penerimaan tidak sesuai target karena masih sedikitnya kegiatan proyek atau pengerjaan konstruksi fisik
7. Pajak Parkir, realisasi penerimaan tidak sesuai target karena pajak parkir sifatnya self assessment dan sumber pajak parkir di Bangka Barat hanya dari Love Mart City, parkir Serba 35.
8. Pajak Air Tanah, realisasi penerimaan tidak sesuai target karena banyaknya usaha isi ulang air minum yang tutup, kontribusi terbesar dari Pajak Air Tanah adalah dari usaha isi ulang air minum serta potensi objek pajak baru seperti pemasok air baku untuk kapal tangker dan kapal lainnya pemungutan pajaknya masih belum bisa dilakukan karena masih menunggu perubahan Perda Pajak sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
9. Pajak sarang burung walet, realisasi tidak sesuai target karena domisili WP diluar lokasi Bangka Barat sehingga susah untuk ditemui dan kerjasama dengan pihak Balai Karantina tidak berjalan untuk mengetahui pengiriman sarang burung walet dari Bangka Barat.
10. PBB realisasi tidak sesuai target karena adanya keberatan dari WP terhadap nilai SPT yang ditetapkan, masih ada wajib pajak atau objek pajak yang tidak ditemukan atau diketahui dan masih ada piutang wajib pajak di tahun berjalan.

11. BPHTB, realisasi melebihi target karena adanya BPHTB Pemindahan Hak pembangunan pabrik baru dari PT. Bangka Indah Cemerlang (BIC).

Berdasarkan APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023, ditetapkan program pembangunan sebagai pendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah sebanyak 3 program, sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
2. Program Perekonomian dan Pembangunan
3. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Tabel II.142
Analisis Program Sasaran Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah Tahun 2023

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5=4/3*100%
5.1 Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah				
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.327.083.300,00	813.610.349,00	61,31%
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	683.045.637,00	486.751.857,00	71,26%
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	16.270.000,00	15.146.750,00	93,10%
TOTAL		1.515.183.000,00	786.560.349,00	51,88

Tabel II.143
Efisiensi Penggunaan Sumber daya

NO	SASARAN STRATEGIS	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Sasaran Kinerja	Efektifitas
1	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	51,88	96,42	Efektif

Berdasarkan table diatas bahwa Efisiensi Penggunaan Sumber daya pada Program Sasaran Meningkatkan Kemandirian Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan realisasi anggaran 51,88 persen sedangkan capaian sasaran kinerjanya sebesar 96,42. Hal ini menunjukkan Efisiensi penggunaan sumber daya dengan pencapaian “Efektif”, dengan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 58,22 persen.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

3.1. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat didasarkan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 018.08.309168/2023 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 terkait Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023

3.2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DI KABUPATEN

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Untuk Tahun 2023 Kabupaten Bangka Barat melalui Bidang Prasarana Sarana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan menerima tugas pembantuan yang berasal dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia berupa program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan total pagu anggaran sebesar Rp 728.184.000,00 yang digunakan untuk membiayai 4 kegiatan, antara lain:

1. Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian;
2. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian;
3. Fasilitasi Pupuk dan Pestisida;
4. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian;

3.3. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten

3.1.1. Target Kinerja

Bidang Prasarana Sarana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan

Tugas pembantuan ini diterima dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk kemudian dilaksanakan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat melalui bidang Prasarana Sarana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian. Tugas pembantuan yang harus dilaksanakan

yakni program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan jumlah kegiatan sebanyak 4 (empat) buah, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA KEGIATAN	PAGU KEGIATAN
1.	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	646.650.000
2.	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	10.000.000
3.	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	9.534.000
4.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	62.000.000
TOTAL PAGU KEGIATAN		728.184.000

Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

NO.	NAMA KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a) Mendukung pengembangan kawasan perkebunan dengan menambah luas baku lahan pertanian produktif; b) Mendukung pengembangan kawasan perkebunan dengan memanfaatkan lahan yang sudah berusia minimal 3 tahun dan belum terdata sebagai luas baku lahan pertanian; c) Mendukung pengembangan kawasan perkebunan dengan memanfaatkan tanah terlantar.
2.	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	<ul style="list-style-type: none"> a) Menghindari terjadinya penyimpangan dalam penyaluran maupun pembayaran pupuk bersubsidi; b) Tersedianya pupuk bersubsidi kepada petani secara tepat waktu dengan mutu terjamin dan dengan harga eceran sesuai dengan ketetapan pemerintah
3.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> a) Terselenggaranya tertib administrasi secara efektif dan efisien; b) Tersusunnya pelaporan yang sistematis, transparan dan akuntabel.

Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah kabupaten/kota atas pelaksanaan penugasan

NO	NAMA KEGIATAN	REALISASI
1.	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	Terealisasinya kegiatan pelaksanaan konstruksi lahan pertanian produktif Gapoktan Limau Jaya Desa Air Limau Kec.Mentok Kab.Bangka Barat, Gapoktan Keranggan Maju Kel. Keranggan Kec.Mentok Kab.Bangka Barat, Gapoktan Temiang Sari Jaya Dusun Belit Desa Dendang Kec.Kelapa Kab. Bangka Barat
2.	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	Penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida secara tepat guna dan tepat sasaran untuk kelompok tani; Tersedianya pupuk bersubsidi untuk kelompok tani yang ada di Kabupaten Bangka Barat;
3.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	Tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan tugas pembantuan sebanyak 1 paket untuk masing-masing kegiatan

3.1.2. Target Kinerja

MATRIKS CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN/KOTA

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Kementerian Pertanian RI	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 018.08.309168/2022	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Kab.Bangka Barat	Dinas Pertanian dan Pangan Kab.Bangka Barat	Rp 728.184.000,00	Rp 702.457.832,00	97,40	Terpenuhinya sarana dan prasarana pertanian secara optimal		
			Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian			Rp 646.650.000,00	Rp 633.679.432,00	97,99	Tertambahnya luas baku lahan pertanian produktif pada areal perkebunan		
			Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian			Rp 10.000.000,00	Rp 7.240.000,00	73,4	Terselenggaranya Pembinaan dan Pelatihan Aspek teknis, Bisnis dan Manajemen Kelembagaan UPJA		
			Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida			Rp 9.534.000,00	Rp 7.966.000,00	83,55	Terselenggaranya penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi secara tepat sasaran		
			Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian			Rp. 62.000.000,00	Rp. 53.572.400,00	86,41	Tersedianya laporan yang sistematis dan akuntabel untuk keperluan pelaporan		

3.2. Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten

Untuk tahun 2023 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat tidak menerima Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga di tahun 2023 tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat hanya berasal dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

3.3. Permasalahan dan Kendala

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2023 antara lain :

1. Masih belum optimalnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, yakni sehubungan dengan tidak adanya dana pendampingan dari APBD, hal ini tentu saja berpengaruh pada optimalisasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan tugas pembantuan yang diberikan tersebut.
2. Perubahan iklim dimana kemarau cukup panjang yang mengakibatkan bibit banyak mati.
3. Sulitnya mencari tukang dan tenaga kerja di lahan pertanian dikarenakan masyarakat yang beralih ke mata pencaharian penambang timah dikarenakan naiknya harga timah

3.4. Saran Dan Tindak Lanjut

Keberhasilan pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan tentu saja tetap membutuhkan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait baik di tingkat daerah maupun pusat. Selain itu kegiatan ini juga memerlukan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam hal pengawalan anggaran dan pendampingan pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan.

Melalui kegiatan ini diharapkan nantinya dapat memberikan arahan operasional terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan dan mampu menciptakan koordinasi terhadap pengawasan pupuk dan pestisida.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH TAHUN 2023

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 1 butir 17 disampaikan bahwa setiap Warga Negara berhak untuk memperoleh pelayanan minimal sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan dasar. Pada Pasal 18 ayat (1) juga disampaikan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Maka dari itu pada tahun 2018 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang disertai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar pelayanan Minimal. Kedua regulasi inilah yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan Pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Untuk jenis pelayanan dasar yang dimaksud adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/ atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Dan untuk mutu pelayanan dasar sendiri adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/ atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelaksanaan dasar sesuai standar teknis agar hidup layak. Di dalam Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disampaikan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal. Sehingga dengan adanya aturan tersebut sudah menjadi hal yang mutlak bagi pemerintah untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal ini.

Untuk cakupan penerapan Standar Pelayanan Minimal ini ditujukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang diterjemahkan kedalam bentuk indikator pelayanan. Masing-masing tingkatan pemerintah tentunya memiliki indikator yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan yang dimiliki. Untuk Pemerintah Provinsi terdapat 14 jenis indikator SPM serta untuk pemerintah Kabupaten/ Kota terdapat 29 jenis indikator yang terbagi ke dalam masing-masing bidang urusan wajib pelayanan dasar sesuai dengan kewenangan masing-masing. Adapun ke 29 indikator layanan SPM Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah sebagai berikut :

Tabel IV.1

Indikator Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten/ Kota

No	JENIS LAYANAN
	PENDIDIKAN
1.	Pendidikan Anak Usia Dini
2.	Pendidikan Dasar
3.	Pendidikan Kesetaraan

No	JENIS LAYANAN
	KESEHATAN
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4.	Pelayanan Kesehatan Balita
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8.	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi
9.	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)
	PEKERJAAN UMUM
1.	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik
	PERUMAHAN RAKYAT
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kab/Kota
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kab/Kota
	TRANTIBUMLINMAS
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
	SOSIAL
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Pant
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Pant
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Pant
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Pant
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Kab/Kota

Penerapan Standar Pelayanan Minimal tersebut dilakukan oleh OPD pengampuh yang memiliki urusan yang berkaitan Dengan pemerintahan wajib dan pelayanan dasar. Di Kabupaten/ Kota yang berada di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, OPD pelaksana penerapan SPM memiliki perbedaan nomenklatur jika dibandingkan antar Kabupaten/ Kota lainnya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kebijakan dalam penataan organisasi di masing-masing pemerintah Kabupaten/ kota yang disesuaikan kebutuhan daerah masing-masing. Namun walaupun demikian, tidak menjadi permasalahan sejauh ini terkait dengan perbedaan nomenklatur tersebut yang paling utama asalkan penerapan SPM dapat terlaksana dengan optimal.

Di Kabupaten Bangka Barat sendiri untuk OPD pengampuh SPM yang ada saat ini berjumlah 7 OPD dari 6 urusan SPM tersebut, yaitu :

- a. Pendidikan dengan OPD tekhnisnya yaitu Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- b. Kesehatan dengan OPD tekhnisnya yaitu Dinas Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dengan OPD tekhnisnya yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang;
- d. Perumahan Rakyat dengan OPD tekhnisnya yaitu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan;

- e. Trantibumlinmas dengan 2 (dua) OPD teknisnya yang terbagi menjadi sub urusan trantibumlinas dan sub urusan pemadam kebakaran oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Sub urusan bencana oleh BPBD;
- f. Sosial dengan OPD teknisnya yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa.

Penerapan SPM sendiri jika merujuk kepada regulasi yang berlaku terdiri dari 4 tahapan yaitu :

1. Pengumpulan data;
2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
3. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Keempat tahapan ini merupakan suatu bentuk instrument dari tahapan dalam penerapan SPM yang mana akan menjadi kertas kerja OPD dalam merencanakan, mengalokasikan dan melaksanakan program/ kegiatan dan sub kegiatan yang berkaitan erat dengan penerapan SPM. Namun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2020 tersebut pada pertengahan tahun 2022 yang lalu telah dilakukan pencabutan dikarenakan belum dapat memuat secara terperinci terkait penjabaran 4 (empat) tahapan kebijakan penerapan SPM tersebut serta hal hal yang bersifat teknis lainnya. Sehingga dengan adanya pencabutan tersebut maka Pemerintah pusat lalu menyusun aturan perubahan yang akan memuat penjabaran pelaksanaan SPM melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2022 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Untuk pengaturan secara teknis Standar Pelayanan Minimal masing-masing urusan, maka masing-masing Kementerian/Lembaga juga telah menyusun peraturan standar teknis pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan urusannya masing-masing yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Di dalam peraturan kementerian yang membidangi SPM tersebut mengatur terkait dengan definisi opsional masing-masing layanan, jenis mutu layanan, kriteria pemberian pelayanan, kriteria sasaran penerima layanan serta pelaporan SPM masing-masing urusan.

Kemudian di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2022 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ini juga tidak hanya mengatur terkait dengan pemenuhan jenis pelayanan kepada penerima manfaat saja, namun juga harus memperhatikan mutu pelayanan dasar. Sehingga sejak adanya aturan terbaru tersebut maka Pemerintah Pusat telah menetapkan Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk menghitung pencapaian Standar Minimal Daerah masing-masing daerah yang dilihat dari capaian pelayanan penerima manfaat serta capaian mutu pelayanan dasar.

Dengan adanya kebijakan ini diharapkan masing-masing pemerintah daerah dapat lebih focus dalam memenuhi pelayanan dasar di masing-masing daerah yang tentunya tidak hanya dalam pemenuhan kepada penerima layanan saja namun juga harus sesuai dengan mutu layanan dasar yang telah ditentukan.

4.1. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimalnya oleh Pemerintah.

Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Pendidikan Dasar; dan
- c. Pendidikan Kesetaraan.

4.2.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya telah dituangkan dalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang merupakan lanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.2

Tabel Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100 %	Setiap Tahun
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	Setiap Tahun
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	Setiap Tahun

4.2.3. Realisasi

Untuk perbandingan realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan pada Tahun 2023, 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.3

Perbandingan Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN 2021	SASARAN 2021	ANGKA 2021	CAPAIAN 2022	SASARAN 2022	ANGKA 2022	CAPAIAN 2023	SASARAN 2023	ANGKA 2023	TARGET CAPAIAN
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	35.475	37.527	94,53	7723	7723	100%	4065	4065	100%	100 %
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	363	6.604	5,50	365	365	100%	1142	1142	100%	100 %
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	7.560	7.728	97,83	5888	5888	100%	4838	4838	100%	100 %
RATA-RATA CAPAIAN					65,95			100%			97,98%	

Jika dilihat berdasarkan table di atas dapat disimpulkan bahwa untuk capaian SPM Urusan Pendidikan selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan terutama pada tahun 2023 dimana capaian SPM Urusan Pendidikan mencapai target yaitu sebesar 100%. Sejak dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) point a yaitu warga negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu dikarenakan :

- a) miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
- c) kondisi bencana; dan/atau
- d) kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

Sehingga berdasarkan aturan tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa untuk penggunaan data sasaran penerima pelayanan dasar hanya diperuntukkan kepada warga negara yang tidak mampu saja bukan kepada sasaran seluruh penduduk yang berada pada range usia yang dimaksud.

Dan untuk SPM Urusan Pendidikan pun dalam penentuan targetnya diprioritaskan kepada warga negeri yang kurang mampu atau miskin sebagai penerima manfaat yang telah tercantum di dalam Data Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia.

- a. Untuk capaian pendidikan usia dini diperoleh dari jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang telah berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini) di bagi dengan total jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun berdasarkan capaian di Tahun 2022 adalah sebesar 100 %, Jika di lihat dari trens capaian, di tahun 2022 yang lalu juga capaian pendidikan usia dini mencapai target atau 100% . Peningkatan ketercapaian ini sama halnya dengan 2 (dua) indikator urusan pendidikan yang lainnya yaitu dikarenakan untuk sasaran penerima layanan dasar adalah warga negara yang kurang mampu sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Untuk capaian pendidikan usia dini tahun 2023 adalah sebesar 100% dengan jumlah sasaran sebanyak 4838 dan capaian sebanyak 4838. Adapun populasi penduduk usia 5-6 tahun yang bersekolah pada jenjang PAUD sebanyak 7.107 orang. Dari gambaran ini dapat terlihat bahwa masih terdapat 2.269 orang yang berusia 5-6 tahun yang belum menduduki jenjang PAUD. Hal ini disebabkan, karena belum adanya peraturan dari pemerintah pusat yang mengatur masyarakat di usia 5-6 tahun wajib sekolah pada jenjang PAUD. Kemudian disamping itu, masih belum optimalnya tingkat kesadaran masyarakat di dalam mengikuti jenjang PAUD.

Saat ini, di masing-masing desa/ kelurahan di wilayah Kabupaten Bangka Barat telah tersedia satuan Pendidikan Anak Usia Dini serta tenaga kependidikan yang dianggap sudah kompeten.

Tabel IV.4
Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2023

NO	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Angka partisipasi sekolah	100	70,05	70,07
2.	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	39,77	39,74	99,92
3.	Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	74,99	73,89	98,53
4.	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	15,75	1	6,35
5.	Kecukupan formasi guru ASN	100	100	100
6.	Indeks distribusi guru	0,3	0,34	100
7.	Proporsi PTK bersertifikat	2,85	2,6	91,23
8.	Proporsi PTK penggerak	3	2	66,67
9.	Pengalaman pelatihan guru	82,75	79,31	95,84
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			90,28	

Dari table di atas, dapat di simpulkan bahwa dari 9 (lima) jenis mutu layanan terdapat 1 (satu) mutu layanan yang memerlukan perhatian adalah yaitu Rasio pengawas sekolah untuk PAUD yang capaiannya masih rendah. Dari capaian tersebut, tentunya untuk pemenuhan kualitas tenaga kependidikan serta tenaga pendidik perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Daerah dikarena pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini pemenuhan kualitas SDM masih sangat jauh tingkatan pemenuhannya jika dibandingkan dengan jenjang pendidikan usia dasar dan kesetaraan. Untuk itu dukungan kebijakan serta program Pemerintah Daerah sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pendidikan Usia Dini.

- b. Untuk capaian pendidikan dasar dihitung dari persentase Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang telah berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs) dengan data yang berasal dari masing-masing sekolah (yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar) dibagi dengan jumlah penduduk pada Usia 7-15 Tahun berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dari total Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang telah berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs) sebesar 32.484 orang terdapat 4.065 orang siswa yang masuk dalam kategori Warga Negara yang kurang mampu dari total jumlah penduduk di usia 7-15 tahun sebanyak 37.619 orang. Sehingga untuk capaian di tahun 2023 dari 4.065 orang warga negara usia pendidikan dasar dapat diberikan pemenuhan pelayanan dasar melalui bantuan biaya Pendidikan serta pemenuhan perlengkapan sekolah dengan capaian 100%. Disamping itu juga dari data capaian tersebut terdapat 5.135 anak yang saat ini belum bersekolah di jenjang usia 7-15 tahun. Hal ini dikarenakan, belum adanya sinkronisasi data antara yang ada di kementerian pendidikan dengan

kementerian agama terkait dengan data jumlah siswa bersekolah di jenjang tersebut. Hal ini, perlu dilakukan upaya harmonisasi antara kedua lembaga tersebut untuk dapat menyediakan data jumlah anak yang bersekolah di masing-masing daerah agar tidak terjadi kesenjangan data yang cukup signifikan. Disamping itu data capaian ini belum termasuk dengan jumlah anak yang bersekolah di pendidikan pesantren yang ada di masing-masing wilayah.

Capaian pada indikator ini jika dilihat dari capaian Tahun 2022 dengan capaian 100% pada tahun 2023 tetap 100%. Namun jika dilihat dari segi jumlahnya mengalami penurunan di tahun 2023 yaitu dari 7.723 orang di tahun 2022 menjadi 4.965 orang di tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya upaya dari pihak dinas untuk melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan yang lebih tepat sasaran yang diperuntukkan pada keluarga tidak mampu saja.

Kemudian dari segi pemenuhan mutu pelayanan pada jenis layanan Pendidikan dasar dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel IV.5
Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar Tahun 2023

NO	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
	SD			
D1	Angka partisipasi kasar	100	101,51	100
2.	Angka partisipasi sekolah	100	98,67	98,67
a 3.	Angka partisipasi murni	100	91,37	91,37
r 4.	Kemampuan literasi	57,97	55,21	95,24
i 5.	Kemampuan numerasi	41,20	39,62	96,17
6.	Perbedaan Skor Literasi	0	0	0
7.	Perbedaan Skor numerasi	0	0	0
t 8.	Indeks iklim keamanan	69,43	65,89	94,90
a 9.	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	91,08	86,10	94,53
b10.	Kecukupan formasi guru ASN	95	95	100
e11.	Indeks distribusi guru	0,78	0,78	100
12.	Proporsi PTK bersertifikat	50	51,84	100
l 13.	Proporsi PTK penggerak	16	17	100
14.	Pengalaman pelatihan guru	80	80	100
	SMP			
d 1	Angka partisipasi kasar	100	102,33	100
l 2.	Angka partisipasi sekolah	100	92,05	92,05
3.	Angka partisipasi murni	100	80,06	80,06
4.	Kemampuan literasi	68,83	65,55	95,23
a 5.	Kemampuan numerasi	68,17	65,55	96,16
t 6.	Perbedaan Skor Literasi	0	0	0
a 7.	Perbedaan Skor numerasi	0	0	0
8.	Indeks iklim keamanan	71,09	67,75	95,30
s 9.	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	84,15	0	0
10.	Kecukupan formasi guru ASN	80	80	100
d 11.	Indeks distribusi guru	0,66	0,66	100
a12.	Proporsi PTK bersertifikat	35,45	35,45	100
13.	Proporsi PTK penggerak	12	15	100
P14.	Pengalaman pelatihan guru	80	80	100
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			97,05	

Dapat di simpulkan bahwa untuk pemenuhan mutu pelayanan dasar pada indicator Pendidikan Dasar sebesar 97,05% dapat disimpulkan sudah sangat baik, namun masih terdapat 2 jenis mutu layanan yang belum terpenuhi yaitu Perbedaan Skor Literasi dan Perbedaan Skor Numerasi. Mulai tahun 2023,, untuk muatan dari mutu SPM urusan pendidikan mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, hal ini di karenakan telah adanya perubahan kebijakan dalam penerapan SPM Urusan Pendidikan yang diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tekhnologi Nomor 32 Tahun 2022 yang menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tekhnologi Nomor 32 Tahun 2018 yang lalu. Sehingga setelah adanya aturan tersebut maka muatan mutu SPM urusan Pendidikan mengalami perubahan yang signifikan. Di samping itu juga, untuk capaian mutu SPM urusan pendidikan ini capaiannya diperoleh dari nilai Raport Pendidikan yang setiap tahun dirilis oleh pihak kementerian tekhnis. Namun untuk capaian realisasi mutu tahun 2023, banyak capaian yang tidak tersaji di dalam raport pendidikan dan untuk itu dinas terkait mengayajikan capaian mutu dengan menggunakan data realisasi pada dokumen RPJMD.

Di samping itu pula, capaian pada indikator ini belum mengakomodir jumlah siswa yang bersekolah pada pondok pesantrean serta di luar Kabupaten Bangka Barat, dikarenakan di dalam definesinya operasional tidak memuat hal tersebut di atas. Sehingga sangat memungkinka sekali jika sebenarnya capaian terhadap Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang telah berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs) ini dapat melebihi angka yang telah tersajikan.

- c. Sedangkan untuk capaian pendidikan kesetaraan dihitung dari sisa Jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Pendidikan Kesetaraan di bagi dengan total Jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dari total jumlah warga negara usia Jumlah anak usia 7-18 tahun di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 48.871 orang yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten sebanyak 3.109 orang, terdapat 1142 orang warga negara yang telah mendapat pemenuhan layanan di bidang kesetaraan atau sekitar 51,17 %. Dan dari 1142 orang ini merupakan siswa pendidikan kesetaraan yang dinilai kurang mampu dan telah menerima bantuan pembebasan biaya pendidikan serta penerima perlengkapan dasar dari pemerintah. Sehingga untuk capaian indicator Pendidikan kesetaraan di tahun 2023 mencapai 100%.

Namun jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2022 yang lalu jika dibandingkan dari sisi tingkat ketercapaian, capaian 2023 masih mencapai target yang telah ditetapkan Hal serupa juga terjadi pada penerima layanan yang mengalami peningkatan dari 365 orang penerima layanan di tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 1142 orang di tahun 2023. Namun jika dilihat dari segi cakupan penduduk 7–18 Tahun yang belum yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah mengalami penurunan yaitu dari 7.423 orang di tahun 2022 menurun menjadi 3.109 orang ditahun 2023. Dari angka ini dapat terlihat bahwa peningkatan sasaran

penduduk 7–18 Tahun yang belum yang belum menyelesaikan pendidikan dasar ini disebabkan oleh meningkatnya angka putus sekolah yang terjadi di Kabupaten Bangka Barat. Untuk itu diperlukan sebuah kebijakan pemerintah daerah untuk menekan angka putus sekolah di Kabupaten Bangka Barat dengan meningkatkan inovasi di bidang pendidikan kesetaraan yang nantinya dapat memperbaiki angka putus sekolah di Kabupaten Bangka Barat.

Tabel IV.6
Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan Tahun 2023

NO	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
D	SD			
a 1	Angka partisipasi kasar	70	2,44	3,49
2.	Angka partisipasi sekolah	10	4,69	46,90
^r 3.	Angka partisipasi murni	70	0,6	0,86
i 4.	Kemampuan literasi	33,33	32	96,01
5.	Kemampuan numerasi	23,08	22	95,32
6.	Perbedaan Skor Literasi	100	0	0
^t 7.	Perbedaan Skor numerasi	100	0	0
8.	Indeks iklim keamanan	60	59,7	99,50
9.	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	60	50	83,33
10.	Kecukupan formasi guru ASN	50	33,33	66,66
11.	Indeks distribusi guru	88,50	87,50	98,87
12.	Proporsi PTK bersertifikat	52	51,84	99,69
13.	Proporsi PTK penggerak	72	0	0
14.	Pengalaman pelatihan guru	80	80	100
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			82,42	

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mutu layanan yang memerlukan perhatian adalah tingkat kemampuan numerasi dan literasi daerah yang jika dilihat masih cukup kecil. Maka butuh upaya lebih untuk memperjuangkan hal tersebut agar capaiannya dapat lebih baik lagi.

Permasalahan dari pemenuhan indicator SPM Pendidikan kesetaraan diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana serta terobosan untuk siswa yang putus sekolah yang dapat secara langsung “ditangkap” untuk melanjutkan di pendidikan kesetaraan. Namun pada kenyataannya saat ini untuk kondisi anak yang putus sekolah sangat sulit sekali untuk kembali melanjutkan sekolah, yang mana dalam hal ini didominasi oleh pengaruh lingkungan sekitar yang tidak mendukung anak tersebut untuk bersekolah. Kemudian lokasi PKBM yang terbatas jauh dari tempat tinggal juga menjadi salah satu faktor pendorong masih rendahnya angka kesetaraan.

Dari ketiga capaian indicator di atas, rata-rata capaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan adalah sebesar 97,98%. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian di tahun yang lalu dikarenakan pada tahun yang lalu penghitungan capaian hanya pada pemenuhan pelayanan penerima manfaat tidak memperhitungkan capaian mutu pelayanan dasar.

4.2.4. Alokasi Anggaran

Pada Tahun 2023 jumlah belanja langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam rangkapenerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Pemerintah Daerah untuk bidang pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.7
Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
I	PENDIDIKAN				95.181.490.000
1	PROGRAM SPM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	7.421.750.000
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	6.213.150.000
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	140.000.000
			Pengelolaan Dana BOP PAUD		4.077.735.000
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan PAUD		102.750.000
			Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD		42.842.000
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		477.091.000
			Penambahan Ruang Kelas Baru		594.940.000
			Pembangunan Ruang Guru/Ka. Sekolah/TU		835.838.000
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		188.686.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah		487.786.000
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		4.692.676.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD		1.334.300.000
			Pengadaan Mebel Sekolah		33.900.000
			Pengadaan Perlengkapan Siswa (SD)		399.770.000
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		1.031.890.000
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		16.318.450.000
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		23.842.683.599
			Pembangunan Laboratorium		4.100.980.000
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		51.287.000
			Perlengkapan Belajar Peserta Didik		60.020.000
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		22.600.000
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SD		161.600.000
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		10.104.256.401
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		1.027.700.000
			Penambahan Ruang Kelas Baru		594.940.000
			Penambahan Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		105.000.000
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		161.600.000
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		1.258.038.000
			Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Utilitas Sekolah		2.265.681.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
			Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		760.000.000
			Pengadaan Perlengkapan Siswa		135.410.000
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		204.650.000
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		132.090.000
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		5.679.650.000
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		14.750.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		105.000.000

4.2.5. Dukungan Personil

Secara umum seluruh pegawai terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan yang terlibat secara langsung dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.8
Dukungan Personil dalam mendukung Pelayanan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan

NO	INSTANSI/BIDANG	URAIAN
1	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	41 orang PNS dan 49 orang PHL
2	Tenaga kependidikan	Sekolah Dasar 458 orang Sekolah Menengah Pertama 272 orang
3.	Tenaga Pendidik	PAUD 533 orang yang terdiri dari yang telah memiliki ijazah diploma IV atau S1 sebanyak 347 orang Sekolah Dasar 1.431 orang yang terdiri dari yang telah memiliki ijazah diploma IV atau S1 sebanyak 1.301 orang Sekolah Menengah Pertama 672 orang yang terdiri dari yang telah memiliki ijazah diploma IV atau S1 sebanyak 626 orang dan bersertifikasi sebanyak 285 orang
4.	Kepala Sekolah	PAUD 105 orang Sekolah Dasar 134 orang Sekolah Menengah Pertama 50 orang
5.	Tenaga penunjang	Sekolah Dasar 363 orang

NO	INSTANSI/BIDANG	URAIAN
		Sekolah Menengah Pertama 150 orang
6.	Pengawas Sekolah	Pengawas PAUD 1 orang
		Pengawas SD 10 orang
		Pengawas SMP 8 orang

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Pendidikan tentunya memiliki beberapa permasalahan yang di hadapi oleh Dinas teknis. Adapun untuk permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Lokasi PKBM yang terbatas jauh dari tempat tinggal serta minimnya dukungan keluarga menjadi salah satu faktor pendorong masih rendahnya angka kesetaraan;
- b. Terbatasnya penganggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten;
- c. Belum maksimalnya penyediaan tenaga kependidikan yang dianggap belum memenuhi standar kualifikasi walaupun jika dilihat dari segi kompetensi sudah memenuhi kriteria.
- d. Belum sinkronnya serta belum dilakukan update data kependudukan dengan data di dalam DAPODIK, sehingga berdampak pada tidak validnya data jumlah siswa sekolah pada jenjang pendidikan tertentu;
- e. Belum adanya harmonisasi data antara kementerian pendidikan dengan kementerian agama untuk siswa yang bersekolah di satuan pendidikan di kewenangan masing-masing lembaga;
- f. Belum tersedianya *by name by address anak putus* sekolah yang akan di intervensi di dalam pendidikan kesetaraan.

Adapun solusi yang hendaknya dilakukan untuk menanggapi permasalahan di atas dengan cara sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendataan anak putus sekolah sebagai *baseline* data dalam merumuskan kebijakan program dan kegiatan Daerah untuk mengoptimalkan pencapaian dengan melibatkan lintas sektor ;
- b. Melakukan upaya inovasi serta intervensi program keegiatan yang ada di pemerintah Daerah dalam upaya untuk meningkatkan cakupan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Bangka Barat;
- c. Meningkatkan akses pelayanan pendidikan dimasyarakat terutama untuk Pendidikan Kesetaraan di usia 7-18 Tahun dengan meningkatkan ketersediaan sumber daya yang dapat mempermudah keterjangkauan masyarakat dalam menempuh pendidikan kesetaraan;
- d. Adanya kebijakan pemerintah daerah untuk melibatkan stakeholder lain dalam mendukung pembiayaan pemenuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di daerah sehingga penganggaran tidak bergantung pada sumber penganggaran APBD saja.
- e. Dalam penyusunan pengadaan/ rekrutmen pegawai di daerah agar dapat mempertimbangkan ketersediaan pegawai yang ada yang dibandingkan dengan pelayanan yang akan diberikan. Sehingga pengadaan pegawai daerah dapat dilakukan sesuai dengan yang dibutuhkan.

4.2. BIDANG URUSAN KESEHATAN

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) nya oleh Pemerintah.

Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. pelayanan kesehatan balita;
- e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

4.2.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya telah dituangkan dalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kesehatan yang merupakan lanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.9
Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan	100 %	Setiap Tahun

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN
		kesehatan		
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100 %	Setiap Tahun
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun

4.2.3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan pada Tahun 2023, Tahun 2022 serta Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.10

Perbandingan Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan Tahun 2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN 2021	SASARAN 2021	ANGKA 2021	CAPAIAN 2022	SASARAN 2022	ANGKA 2022	CAPAIAN 2023	SASARAN 2023	ANGKA 2023	TARGET CAPAIAN
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	3.459	3.725	92,86	3439	3641	94.45%	3250	3250	100%	100 %
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	3.348	3.524	95,01	3304	3463	95.41%	3291	3291	1 00%	100 %
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	3.344	3.493	95,73	3255	3425	95.04%	3254	3254	100%	100 %
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	10.931	11.708	93,36	11031	11541	95.58%	10873	10873	100%	100 %
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	36.890	37.506	98,36	36546	37541	97.35%	36522	37536	95,20%	100 %
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	111.404	133.183	83,65	101787	133754	76.10%	2409	2409	100%	100 %
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	13.756	16.395	83,90	14894	17125	86.97%	16511	19208	87,27%	100 %
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	42.316	48.104	87,97	43555	48523	89.76%	5508	5508	100%	100 %
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	4.080	3.934	103,71	4098	4098	100%	1278	1278	100%	100 %

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN 2021	SASARAN 2021	ANGKA 2021	CAPAIAN 2022	SASARAN 2022	ANGKA 2022	CAPAIAN 2023	SASARAN 2023	ANGKA 2023	TARGET CAPAIAN
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	492	492	100,00	487	487	100%	230	230	100%	100 %
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	1.377	1.921	71,68	1.077	1.749	61,58	790	790	100%	100 %
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	4.622	4.386	105,38	5.249	4.862	107,96	539	539	100%	100 %
RATA-RATA CAPAIAN					92,63			91,68			98,45	

Dari table di atas dapat dilihat bahwa secara rata-rata capaian SPM dibidang Kesehatan mengalami peningkatan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Hal ini dapat terlihat dari meningkatnya capaian kinerja pelayanan SPM bidang Kesehatan sampai Dengan tahun 2022 menjadi 94,22% dari awalnya di tahun 2022 sebesar 91,52%. Walaupun dalam hal ini untuk capaian kinerja SPM di tahun 2022 sedikit mengalami perbedaan dikarenakan adanya perubahan cara penghitungan capaian SPM yang tidak hanya dilihat dari segi capaian pemenuhan jenis layanan kepada penerima manfaat Dengan bobot penghitungan 80% namun juga dilihat berdasarkan capaian mutu pelayanan Dengan bobot 20% yang menjadi komponen penghitungan dari Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal Daerah sehingga untuk capaian SPM bidang kesehatan sebesar 93,10%.

Jika dilihat dari table di atas, dari 12 indikator SPM di bidang Kesehatan, terdapat 6 indikator yang mengalami peningkatan jika di bandingkan Dengan capaian di tahun 2021 yang lalu dan terdapat 3 indikator yang tidak mengalami peningkatan serta 3 indikator yang mengalami penurunan dari tahun lalu. Adapun untuk indicator yang mengalami peningkatan dibandingkan Dengan tahun lalu yaitu:

1. Pelayanan Ibu Hamil;
2. Pelayanan Ibu bersalin;
3. Pelayanan Kesehatan Balita;
4. Pelayanan kesehatan usia Lanjut;
5. Pelayanan Hipertensi; serta
6. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis.

Dan untuk indicator yang tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan jika dibandingkan Dengan tahun lalu adalah :

1. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes;
2. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat; serta
3. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*);

Dan untuk capaian indicator yang mengalami penurunan jika dibandingkan Dengan tahun lalu adalah :

1. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
2. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar; serta
3. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif.

Sehingga dari 12 indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 (empat) indikator yang mencapai target sedangkan 8 indikator lainnya belum mencapai target. Dan untuk analisa dari capaian masing-masing adalah sebagai Berikut:

Sehingga dari 12 indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 (empat) indikator yang mencapai target sedangkan 8 indikator lainnya belum mencapai target. Dan untuk analisa dari capaian masing-masing adalah sebagai Berikut:

- a) Capaian ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil, Untuk capaian pada indikator ini jika di lihat dari segi capaiannya mengalami peningkatan dibandingkan Dengan tahun lalu yaitu dari 92,86% tahun 2022 menjadi 100 di tahun 2023. Peningkatan capaian ini dikarenakan adanya peningkatan layanan serta kesadaran masyarakat dalam

pemeriksaan kesehatan kepada ibu hamil. Jika dilihat dari data sasaran Ibu Hamil yang ditetapkan yaitu sebesar 3548 jiwa, yang mana sasaran tersebut merupakan estimasi jumlah ibu hamil dalam kurun waktu satu tahun di tahun 2023 di Kabupaten Bangka Barat, jika penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dilakukan dengan melihat cakupan sasaran dengan K4. Dari sasaran ibu hamil sebanyak 3548 Jiwa yang mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar adalah sebanyak 3250 jiwa sedangkan sisanya sebesar 298 jiwa atau sebesar 8,39 % yang tidak atau belum mendapatkan layanan sesuai standar. Adapun untuk ibu hamil yang tidak atau belum mendapatkan layanan tersebut disebabkan oleh kunjungan pertama (K1) ibu hamil tidak diusia kehamilan Trimester I, *abortus*, persalinan *prematuur*, meninggal dunia, serta memang belum waktunya K4. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh pihak Pemerintah untuk meningkatkan cakupan pelayanan ini dilakukan melalui peningkatan edukasi dan advokasi kepada masyarakat terutama kepada ibu hamil melalui perlibatan lintas sektor baik dari tingkat desa/ kelurahan, kecamatan hingga pemerintah Kabupaten.

Dibawah ini adalah data pelayanan Kesehatan ibu hamil yang tidak atau belum mendapatkan layanan Kesehatan adalah sebagai berikut :

Tabel IV.11
Jumlah Ibu Hamil yang tidak/belum mendapatkan layanan sesuai dengan standar berdasarkan factor penyebab Tahun 2023

PUSKESMAS	AORTUS	PERRSALINAN PREMATUR	K1 AKSES (Pemeriksaan K1 Tidak di TM 1)	Meninggal Dunia	Belum Waktunya K4	Jumlah
MENTOK	20	2	25		9	56
SIMPANG TERITIP	12		3	1		16
KUNDI	12					12
KELAPA	17	1	44			62
JEBUS	5		2		9	16
PUPUT	8		15			23
SEKAR BIRU	12		32		17	61
TEMPILANG	14	4	22		12	52
KABUPATEN	100	7	143	1	47	298

Capaian atas indikator tersebut tidak sejalan dengan rumus perhitungan kinerja yang ada dalam Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Tabel IV.12
Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Ibu Hamil Tahun 2023

NO	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin	13578	13578	100
2	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	3539	3539	100
3	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	325	325	100
4	Tablet tambah darah	292500	292500	100
5	Kartu ibu/rekam medis ibu	3539	3539	100
6	Dokter/dokter spesialis kebidanan	10	10	100
7	Bidan	103	103	100
8	Perawat	40	40	100
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				100

Capaian pemenuhan mutu pelayanan dasar Ibu Hamil pada table di atas mencapai sebesar 97,93%. Hal ini menunjukkan bahwa dapat terlihat bahwa ketersediaan mutu pelayanan pada ibu hamil sudah sangat baik sekali dimana telah terpenuhi hampir mencapai 100%.

Namun untuk menekan angka kehamilan yang tidak mendapatkan layanan, dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut diantaranya :

1. Peningkatan cakupan dengan meningkatkan kualitas pelayanan antenatal sesuai indikator program pemeriksaan kehamilan K6. Lakukan deteksi dini faktor risiko pada ibu hamil melalui pelayanan antenatal 10 T yang didukung dengan ketersediaan alat, obat dan tenaga yang kompeten baik di fasilitas kesehatan primer maupun rujukan. Peningkatan peran dokter dalam pemeriksaan kehamilan terutama pada trimester 1 dan 3 agar faktor risiko kehamilan dapat segera diatasi sehingga dapat menurunkan kasus komplikasi.
 2. Skrining Layak Hamil bagi PUS (Pasangan Usia Subur) yang bertujuan untuk memastikan calon ibu yang sedang hamil berada dalam kondisi optimal sebelum kehamilan dimulai sehingga bisa mengurangi kasus *abortus* dan kelahiran *prematuur*.
 3. Perlu ditingkatkan peran stakeholders yang terlibat dalam kelembagaan untuk mengatasi perkawinan usia anak.
 4. Untuk pencapaian 100 % indikator pelayanan kesehatan ibu hamil perlu ditetapkan sasaran yang lebih spesifik untuk warga negara yang berhak menerima pelayanan dasar.
 5. Diharapkan kepada bidan desa berkoordinasi dengan kader di desa untuk melakukan penjangkaran ibu hamil sedini mungkin.
- b) Untuk capaian pelayanan ibu bersalin di tahun 2023 adalah sebesar 100% yang mana angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2021 yang lalu yaitu sebesar 95,41% atau mengalami peningkatan sebesar 4,59%. Adapun yang melatarbelakangi peningkatan ini dikarenakan adanya peningkatan kesadaran

masyarakat untuk melakukan persalinan di fasilitas kesehatan yang telah. sasaran Ibu Bersalin yang ditetapkan yaitu sebesar 3346 jiwa, yang mana sasaran tersebut merupakan estimasi jumlah ibu bersalin dalam kurun waktu satu tahun di tahun 2023 di Kabupaten Bangka Barat. Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu bersalin dapat dilakukan dengan melihat sasaran ibu bersalin dengan Persalinan faskes. Dari sasaran ibu bersalin sebanyak 3346 orang yang mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar adalah sebanyak 3291 orang sedangkan jika melihat data per puskesmas ada 2 puskesmas yaitu puskesmas kelapa dan jebus cakupan persalinan fakesnya melebihi dari sasaran dikarenakan ada persalinan yang diluar prediksi yaitu sebanyak 50 orang di tahun 2023 sehingga menambah cakupan pelayanan kesehatan persalinan faskes di tahun 2023 yang semula 3241 menjadi sebanyak 3291, Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan persalinan faskes ini dapat dilakukan dengan melihat cakupan persalinan faskes dengan sasaran ibu bersalin tahun ini. Dari sasaran ibu bersalin tahun ini sebanyak 3346 orang yang mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar adalah sebanyak 3291 orang sedangkan yang belum atau tidak mendapatkan pelayanan standar ada sebanyak 105 orang atau sebesar 3,33 %. Adapun untuk ibu bersalin yang tidak mendapatkan layanan tersebut disebabkan oleh adanya 8 persalinan dukun, dan 6 persalinan nakes di poskesdes, 2 persalinan nakes dirumah ibu, meninggal, pindah jiwa, dan belum waktunya bersalin, Adapun untuk data tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel IV.13
Data Jumlah ibu Melahirkan yang Tidak Mendapat Pelayanan Persalinan Standar
(Faskes)

No	Puskesmas	Jumlah ibu hamil yang tidak dilayani		Meninggal	pindah	Belum waktunya bersalin	Jumlah	Persalinan luar prediksi (kasus kl akses lahir di th 2023)	Bumil 2022 lahir di th 2023	Selisih capaian dengan sasaran
		Melahirkan di dukun	Persalinan nakes (rumah /poskesdes)							
1	Muntok	2	0	1	4	44	51			51
2	Simpangteritip	5	1	0	0	9	15			15
3	Jebus	1	0	0	0	0	1		16	-15
4	Puput	0	0	0	0	10	10			10
5	Sekarbiru	0	0	0	0	11	11			11
6	Kelapa	0	5	0	0	0	5	30	4	-29
7	Tempilang	0	0	0	0	7	7			7
8	Kundi	0	2	0	0	3	5			5
TOTAL		8 kasus	8 kasus	1 kasus	4 orang	84	105	30	20	55

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

Sama halnya dengan capaian ibu hamil, adanya peningkatan kesadaran ini dipengaruhi oleh pelaksanaan sosialisasi serta edukasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang melibatkan stakeholder lainnya untuk dapat memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat akan pentingnya melakukan persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Fasilitas kesehatan yang ada. Disamping itu juga adanya upaya pemerintah daerah untuk menjalin kemitraan dengan dukun beranak yang tersebar di wilayah Kabupaten Bangka Barat terutama pada daerah-daerah terpencil.

Dari data di atas dapat terlihat bahwa angka kelahiran yang dilakukan di dukun beranak terbanyak berada di Kecamatan Simpangteritip. Sehingga dengan adanya datanya diharapkan dapat menjadi sebuah catatan bagi OPD teknis untuk melakukan intervensi khusus kepada Kecamatan tersebut untuk menekan angka kelahiran di fasilitas non kesehatan.

Sampai dengan saat ini, telah tercatat sebanyak 41 orang dukun beranak yang ada di wilayah Kabupaten Bangka Barat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel IV. 14
Data Tenaga Kesehatan (Bidan) dan Jumlah dukun beranak di Kabupaten Bangka Barat

No	Puskesmas	Jumlah Bidan	Jumlah Dukun Beranak
1	Muntok	71	1
2	Simpangteritip	29	20
3	Kundi	12	6
4	Puput	18	0
5	Sekarbiru	24	0
6	Jebus	31	0
7	Kelapa	46	5
8	Tempilang	26	9
TOTAL		257 orang	41 orang

Kemudian jika dilihat dari pemenuhan mutu layanan Kesehatan ibu melahirkan di peroleh bahwa dari segi pemenuhan kualitas mutu layanan juga sudah sangat baik dimana dengan capaian sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa untuk pelayanan ibu melahirkan di Kabupaten Bangka Barat sudah sangat baik.

Tabel IV.15
Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Ibu Melahirkan Tahun 2023

NO	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	3291	3291	100
2	Formulir Partograf	3291	3291	100
3	Kartu ibu (rekam medis)	3291	3291	100
4	Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	10	10	100

5	Bidan	103	103	100
6	Perawat	40	40	100
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				100

Adapun hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi hal tersebut diantaranya :

1. Memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu bersalin sesuai standar yaitu dilakukan di fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan penolong minimal 2 orang terdiri dari Dokter dan bidan, atau 2 orang bidan, atau bidan dan perawat.
 2. Peningkatan cakupan 100 % ibu hamil mengikuti kelas ibu untuk penguatan informasi pelayanan persalinan termasuk tanda - tanda persalinan.
 3. Peningkatan peran lintas program dan lintas sektor dalam mengatasi pertolongan persalinan oleh dukun termasuk menindaklanjuti perjanjian antara puskesmas dan dukun bersalin yang telah dilakukan tahun-tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi dan perencanaan berikutnya.
 4. Pembinaan dan pengawasan kepada para dukun agar tidak melakukan persalinan.
 5. Optimalisasi pemantauan ibu hamil yang masuk tafsiran persalinan agar segera ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan dengan menggunakan ambulance desa.
- c) Berbeda hal dengan capaian pelayanan 2 (dua) indicator sebelumnya, capaian pelayanan kesehatan bayi baru lahir mengalami kenaikan di tahun 2023 dengan capaian sebesar 100% dari capaian tahun 2021 sebesar 95,04%. Kenaikan capaian ini dikarenakan oleh beberapa sebab diantaranya yaitu kunjungan pelayanan kepada bayi baru lahir dilakukan secara lengkap yang mana kunjungan untuk bayi baru lahir yang seharusnya dilakukan 3 kali selama periode 0-28 hari setelah lahir baik di fasilitas kesehatan maupun kunjungan rumah yaitu kunjungan neonatal ke-1 (KN 1) dilakukan pada kurun waktu 6-48 jam setelah lahir; kunjungan neonatal ke-2 (KN 2) dilakukan pada kurun waktu 3 hari-7 hari setelah lahir; kunjungan neonatal ke-3 (KN 3) dilakukan pada kurun waktu 8-28 hari setelah lahir.

sasaran Bayi Baru Lahir yang ditetapkan yaitu sebesar 3324 orang, yang mana sasaran tersebut merupakan estimasi jumlah bayi baru lahir dalam kurun waktu satu tahun di tahun 2023 di Kabupaten Bangka Barat namun faktanya jumlah bayi baru lahir hidup rIVI yang ada di tahun 2023 sebanyak 3286 bayi dan ada sebanyak 10 bayi yang lahir hidup di tahun 2022 namun mendapatkan pelayanan KN lengkap nya di tahun 2023 sehingga menambah cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (KN3) di tahun 2023 yang semula 3244 menjadi sebanyak 3254.

Adapun data puskesmas bayi yang lahir di tahun 2022 namun mendapatkan KN 3 di tahun 2023 di sajikan dalam tabel berikut:

Tabel IV. 16
Data kehiran bayi di tahun 2022 namun mendapat KN3 di tahun 2023 Tahun 2022

PUSKESMAS	LAHIR TH 2022, KN 3 DI TAHUN 2023
MENTOK	1
SIMPANG TERITIP	0
KUNDI	2
KELAPA	3
JEBUS	0
PUPUT	1
SEKAR BIRU	0
TEMPILANG	3
JUMLAH	10

Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dapat dilakukan dengan melihat cakupan bayi lahir hidup rIV1 tahun ini dan cakupan bayi baru lahir (KN 3). Dari bayi lahir hidup rIV1 tahun ini sebanyak 3286 bayi yang mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar adalah sebanyak 3244 bayi sedangkan sisanya sebesar 42 bayi atau sebesar 1,27 % yang tidak mendapatkan layanan sesuai standar. Adapun untuk bayi baru lahir yang tidak mendapatkan layanan tersebut disebabkan oleh adanya kematian neonatus sebanyak 42 kasus sehingga pelayanan standar bayi baru lahir tidak bisa diberikan pada bayi meninggal tersebut. Adapun untuk data 42 kasus tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini. Saat ini di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2023 terdapat 42 kasus kematian neonatus yang mana kejadiannya disebabkan hal-hal sebagai berikut :

Tabel IV. 17
Data kematian Neonatus menurut penyebab per Puskesmas Tahun 2023

PUSKESMAS	BBLR	Asfiksia	Infeksi	Kelainan Kongenital	Lain-lain	JUMLAH
MENTOK	5	2	0	2	1 (hipotermi)	10
SIMPANG TERITIP	9	2	0	1		12
KUNDI	2		0			2
KELAPA	4	0	1		1 (pneumonia)	6
JEBUS	3	1	0		1 (hiscprung)	5
PUPUT	1	0	0			1
SEKAR BIRU	1	0	0			1
TEMPILANG	2	2	0		1 (respiratory distress of newborn)	5
KABUPATEN	27	7	1	3	4	42

Dari data di atas terlihat bahwa angka kematian neonatus bayi usia 0-28 hari di Kabupaten Bangka Barat masih cukup tinggi yaitu sebanyak 42 kasus. Sebagian besar penyebab langsung dari kematian bayi adalah didominasi oleh kasus BBLR dan asfiksia sedangkan yang menjadi penyebab tidak langsung antara lain beberapa faktor resiko yang dimiliki ibu seperti usia terlalu dini (15-19th) ada 9 kasus, usia terlalu tua (>35 tahun) 5 kasus, anak lebih atau sama dengan dari 4 ada 9 kasus dan anemia pada ibu hamil 19 kasus. Berkaca dengan hal ini Kepala Dinas Kesehatan Bangka Barat membuat inovasi yang bernama SAHAM BUMIL yaitu (periksa Hb enAM kali iBU haMIL) selama kehamilan untuk pemantauan yang optimal terhadap kasus anemia pada ibu hamil dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi serta koordinasi dan advokasi dengan pihak sekolah dan lintas sektor terkait (kemenag, dikpora, kesra) dalam pembekalan kesehatan reproduksi di SMP dan SMA untuk mencegah pernikahan dini.

Peningkatan kasus ini juga bertambah dari tahun sebelumnya dikarenakan kepatuhan pencatatan dan pelaporan difasilitas kesehatan dalam melaporkan kasus kematian yang terjadi ditempat seluruh faskes di Indonesia menggunakan aplikasi MPDN (*Maternal Perinatal Death Notification*) sudah aktif dan lebih baik di tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya sehingga setiap terjadinya kematian bisa lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat.

Tabel IV.18
Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Bayi Baru Lahir Tahun 2023

NO	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	3254	3254	100%
2	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	9762	9,762	100%
3	Vaksin Hepatitis B0	3254	3254	100%
4	Salep/tetes mata antibiotik	3254	3254	100%
5	Vitamin K1 injeksi	3254	3254	100%
6	Formulir bayi baru lahir	3254	3254	100%
7	Dokter/dokter spesialis Anak	10	10	100%
8	Bidan	103	103	100%
9	Perawat	40	40	100%
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				100%

Dan untuk pemenuhan mutu pelayanan pada bayi baru lahir hampir sama kondisi dengan 2 (dua) capaian lainnya yaitu sebesar 100% sudah sangat baik. Ini dapat dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan yang telah memenuhi standar pelayanan. Adapun hal-hal yang dilakukan diantaranya:

1. Peningkatan kualitas pencatatan pelaporan
2. Pemantauan kunjungan neonatal melalui e-kohort bayi.
3. Penguatan kegiatan AMP di tingkat kecamatan dan kabupaten

4. Peningkatan kapasitas nakes yang mampu tata laksana neonates dan kegawatdaruratan neonatus
5. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung bayi baru lahir di puskesmas.

Capaian pelayanan kesehatan balita di Tahun 2023 jika dibandingkan dengan capaian di 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu 2022 dan 2021 mengalami peningkatan yang lalu dengan capaian sebesar 100% atau meningkat sebesar 4,96%. Adapun untuk layanan kesehatan balita meliputi pemberian vitamin A, kemudian penimbangan yang dilakukan secara rutin di fasilitas layanan kesehatan seperti posyandu desa. Sasaran urusan pelayanan Balita di tahun 2023 adalah sebesar 11.609 dengan capaian SPM sebesar 10.873 orang di tahun 2023. Capaian pelayanan balita yang tidak tercapai sebanyak 510 di tahun 2022 mengalami kenaikan di tahun 2023 sebanyak 262 orang. Kenaikan ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran para ibu untuk membawa balita melakukan pemeriksaan kesehatan ke posyandu yang harus dilakukan minimal 8 kali dalam satu tahun. Berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa untuk mengadvokasi warga di dalam melakukan pemeriksaan kesehatan ke UKBM setempat atau fasilitas kesehatan yang ada dalam wilayah masing-masing.

Sedangkan capaian tahun 2023 sebanyak 10873 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu sebanyak 11031 orang. Jika dilihat dari capaian tersebut ada sebanyak 736 balita yang tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar atau sebesar 6,33 %. Namun faktanya di wilayah kerja Puskesmas Tempilang terdapat balita pendatang dari luar Bangka Barat sebanyak 48 orang dan 2 orang pendatang di wilayah kerja puskesmas Simpang Teritip sehingga jika dilihat per puskesmas ada cakupan yang melebihi sasaran. Dari 50 orang balita pendatang tersebut dapat mendongkrak capaian pelayanan kesehatan balita di Bangka Barat yang semula 10.823 orang balita menjadi 10.873 orang, Sehingga kalkulasi balita yang belum atau tidak mendapatkan pelayanan kesehatan standar di Kabupaten Bangka Barat ada sebanyak 786 yang mana penyebabnya disebabkan oleh 609 balita tidak menimbang secara rutin setiap bulan ke posyandu, 4 meninggal dunia, 63 balita anti vaksin, 86 balita pindah / tidak menetap, sebanyak 24 balita belum waktunya K8. Adapun untuk data 786 orang tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel IV.19
Jumlah Balita yang tidak/belum mendapatkan layanan sesuai dengan standar berdasarkan factor penyebab

PUSKESMAS	TIDAK POSYANDU	MENINGGAL DUNIA	ANTI VAKSIN	PINDAH	BELUM WAKTUNYA K8	JUMLAH	PENDATANG	SELISIH CAPAIAN DENGAN SASARAN
MENTOK	311		59	13		383		383
SIMPANG TERITIP	0	2				2	2	0
KUNDI	2		1			3		3
KELAPA	8			37		45		45

JEBUS	119					119		119
PUPUT	112					112		112
SEKAR BIRU	57	2	3	36	24	122		122
TEMPILANG	0					0	48	-48
KABUPATEN	609	4	63	86	24	786	50	736

Banyaknya balita yang tidak mendapatkan pelayanan standar sebagian besar disebabkan tidak datang ke posyandu untuk menimbang secara rutin yaitu minimal 8 kali timbang dalam setahun, apalagi setelah mendapatkan imunisasi dasar lengkap ibu tidak lagi membawa balita nya ke posyandu hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran para ibu penting nya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan di posyandu. Berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa untuk mengadvokasi warga di dalam melakukan pemeriksaan kesehatan ke UKBM setempat atau fasilitas kesehatan yang ada dalam wilayah masing-masing.

Tabel IV.20
Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Balita Tahun 2023

NO	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Peralatan Anafilaktik U	16	16	100
2	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	21746	21746	100
3	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	3539	3539	100
4	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	21746	21746	100
5	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB - Hib, Campak, Rubella	4967	4967	100
6	Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	18963	18963	100
7	Vitamin A Biru	2748	2748	100
8	Vitamin A Merah	20640	20640	100
9	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	20724	20724	100
10	Bidan	97	97	100
11	Dokter	9	9	100
12	Perawat	40	40	100
13	Ahli Gizi	8	8	100
14	Guru PAUD	448	448	100
15	Kader Kesehatan	930	930	100
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				100

Dan mutu pelayanan pada balita dikatakan sangat baik karena tercapai 100%. Ini dapat dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan yang telah memenuhi standar pelayanan. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi hal tersebut diantaranya :

1. Dinas Kesehatan Kabupaten menganggarkan pelatihan DDTK untuk guru PAUD/TK dan Kader.
 2. Peningkatan kolaborasi lintas program dan lintas sektor dalam pemberian pelayanan kesehatan pada balita.
 3. Perlu pemantauan e kohort balita oleh petugas kesehatan.
 4. Perlu adanya peningkatan kapasitas bagi kader posyandu
 5. Serta perlu adanya peningkatan besaran insentif kader posyandu di kelurahan.
 6. Pemerintah Desa menciptakan Inovasi dalam hal ini menarik semangat orang tua agar rajin datang posyandu contoh pemberian sertifikat kelulusan Posyandu dan reward bagi balita yang rutin ke posyandu.
 7. Penguatan sistem pencatatan dan pelaporan agar terkoordinir dengan baik.
- d) Capaian pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar di Tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian di Tahun 2022 sebesar 2,65%. Walaupun capaian di tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yang lalu yaitu sebanyak 24 orang.

Jika dilihat dari target layanan urusan pada layanan pendidikan dasar sebanyak 37.536 orang, terdapat 1043 anak usia pendidikan dasar yang tidak bisa dilakukan skrining kesehatan karena tidak semua anak usia pendidikan dasar berada di wilayah kerja Kabupaten Bangka Barat. Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak memiliki data anak usia pendidikan dasar yang tidak sekolah/putus sekolah, anak yang pindah sekolah atau bersekolah di luar wilayah Kabupaten Bangka Barat sehingga skrining kesehatan pada anak usia pendidikan dasar tidak bisa dilakukan 100% sesuai target urusan, hal ini sehubungan dengan data sasaran yang dipakai adalah data sasaran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada anak usia 7-15 tahun sesuai DO.

Sasaran layanan urusan tahun ini 37536 orang dengan capaian SPM sebanyak 36493 orang dengan artian bahwa terdapat 1043 orang yang tidak mendapatkan layanan urusan di tahun 2023. Untuk layanan urusan di tahun 2022 dengan sasaran 37541 orang capaian layanannya sebanyak 36546 orang sehingga terdapat 995 orang. Ketidaktercapaian ini disebabkan banyaknya jumlah anak usia pendidikan dasar yang bersekolah di luar Bangka Barat di mana data sasaran yang digunakan untuk penetapan sasaran layanan urusan bersumber dari data Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil serta adanya anak yang mengalami putus sekolah.

Sehingga untuk mengatasi hal tersebut ke depan perlu adanya kolaborasi antara Dinas Kesehatan dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga di dalam melakukan pendataan anak usia sekolah jenjang pendidikan dasar yang bersekolah di luar Bangka Barat serta yang mengalami putus sekolah. Di samping itu pula belum aktifnya posyandu remaja yang menysasar pelayanan kepada anak putus sekolah. Sehingga perlu adanya inovasi dan intervensi lintas sektor untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Tabel IV.21
Cakupan pelayanan kesehatan pendidikan dasar Tahun 2023

NO	NAMA PUSKESMAS	JUMLAH ANAK USIA SEKOLAH YANG TERLAYANI
1.	Muntok	9907
2.	Simpangteritip	3724
3.	Jebus	4387
4.	Puput	4736
5.	Kelapa	5343
6.	Sekar Biru	1803
7.	Tempilang	5020
8.	Kundi	4937
	TOTAL Pendas	36522 orang

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

Kemudian jika dilihat dari segi pemenuhan mutu pelayanan pendidikan dasar, dapat terlihat bahwa pemenuhan mutu telah mencapai angka 97,22%. Angka ini menunjukkan bahwa pemenuhan mutu layanan pada pendidikan dasar sudah baik dimana jika dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya sudah memadai untuk memberikan pelayanan.

Tabel IV.22
Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar Tahun 2023

NO	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Kuesioner skrining kesehatan	37536	18815	50,13
2	Buku pemantauan kesehatan	1877	1877	100
3	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	194	194	100
4	Buku raport kesehatanku	35659	15494	43,45
5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	66	66	100
6	Dokter/Dokter gigi	8	8	100
7	Bidan	16	16	100
8	Perawat	16	16	100
9	Ahli Gizi	8	8	100
10	Tenaga Kesehatan Masyarakat	9	8	100
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				94,48

Capaian pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang diterima oleh siswa sekolah di Kabupaten Bangka Barat dihadapkan dengan kendala masih terbatasnya diantaranya tenaga kesehatan (dokter) untuk melakukan penjangkaran terhadap anak

sekolah, yang terdiri dari dokter, perawat gigi, gizi, perawat dan pengelola program di puskesmas tersebut. Sehingga jadwal yang telah disusun tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal dikarenakan keterbatasan tersebut. Sedangkan untuk anak usia sekolah namun yang tidak bersekolah atau putus sekolah penjangkaran tetap dilakukan penjangkaran oleh pihak kader kesehatan remaja yang di masing-masing desa di bawah binaan Puskesmas. Kedepan perlu adanya kebijakan untuk menggunakan data real di dalam penetapan sasaran jumlah anak usis sekolah pendidikan dasar sehingga capaian dari layanan urusan ini bisa mencapai 100%.

- e) Sama hal dengan pelayanan pendidikan dasar, untuk pelayanan kesehatan pada usia produktif, di Tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian di Tahun 2022 dengan capaian sebesar 76,10% meningkat menjadi 100% di tahun 2023. Jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu mengalami peningkatan dari sasaran 133.754 orang dan capaiannya 113.633 orang, dengan ketidapcaaiannya sebesar 20.121 orang. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan cakupan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak hanya dilakukan pada fasyankes namun meliputi perkantoran, instansi, sekolah, umah ibadah dan eventevent yang melibatkan masyarakat banyak. Disamping itu juga adanya penambahan posbindu di wilayah puskesmas yang memiliki sasaran yang cukup besar jika dibandingkan dengan puskesmas lainnya.

Di 2024 dinas terkait berencana akan menyampaikan surat edaran kepada seluruh camat beserta seluruh kepala desa/lurah terkait dengan optimalisasi gerakan masyarakat di dalam melakukan skrining kesehatan di usia produktif. Di samping itu kendala yang dihadapi di dalam pelaksanaan skrining kesehatan diantaranya terdapat masyarakat usia produktif yang bkeja pada saat pelaksanaan skrining di posbindu serta dirasakan pemeriksaan yang dilakukan di posbindu kurang menarik karena pemeriksaan dilakukan hanya pemeriksaan gula darah saja sehingga perlu dilakukan penambahan cakupan pemeriksaan.

Jumlah SDM di setiap Puskesmas sama namun yang membedakan adalah sasaran di masing-masing Puskesmas. Adapun untuk sebaran layanan kesehatan untuk usia produktif di masing-masing wilayah Puskesmas adalah sebagai berikut :

Tabel IV.23
Cakupan pelayanan kesehatan Usia Produktif Tahun 2023

NO	NAMA PUSKESMAS	JUMLAH YANG TERLAYANI
1.	Muntok	23231
2.	Simpangteritip	13711
3.	Jebus	15407
4.	Puput	17901
5.	Kelapa	17748
6.	Sekar Biru	7300
7.	Tempilang	15637

NO	NAMA PUSKESMAS	JUMLAH YANG TERLAYANI
8.	Kundi	5328
	TOTAL	116263 orang

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

Dari total sasaran pelayanan usia produktif yang belum menerima layanan sebesar 20.121 orang masih terdapat sebagian penduduk yang belum mendapatkan skrining Uspro dikarenakan ada yang menolak dilakukan skrining kesehatan dengan alasan takut ketahuan penyakitnya, luas wilayah juga menjadi kendala ketidakseimbangan dengan SDM nakes yang tersedia seperti di Puskesmas Mentok dan Puskesmas Kelapa. Di samping itu pula, petugas Kesehatan sudah melakukan pelayanan pemeriksaan *door to door* kerumah penduduk namun ternyata masih ada penduduk yang tidak membukakan pintu rumah untuk petugas melakukan skrining kesehatan. Disamping itu juga perlu adanya dukungan dari lintas sektor yang harus dioptimalkan di dalam menjangkau layanan kepada masyarakat usia produktif.

Tabel IV.24
Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Usia Produktif Tahun 2023

NO	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	16	16	100
2	Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes	7926	7926	100
3	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	2409	2409	100
4	Perawat	32	32	100
5	Dokter	16	16	100
6	Bidan	81	81	100
7	Ahli Gizi	8	8	100
8	Tenaga Kesehatan Masyarakat	8	8	100
9	Tenaga Non Kesehatan Terlatih	330	330	100
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				100%

Jika dilihat dari segi pemenuhan mutu pelayanan usia produktif, dapat terlihat bahwa pemenuhan mutu telah mencapai angka 100%. Angka ini menunjukkan bahwa pemenuhan mutu layanan pada usia produktif sudah cukup baik baik dimana jika dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya sudah memadai untuk memberikan pelayanan. Hanya saja memang perlu dilakukan upaya peningkatan promosi serta pendekatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan cakupan pelayanan ini.

f) Sedangkan capaian indikator pelayanan kesehatan pada usia lanjut capaian di tahun 2023 lebih tinggi ketimbang Tahun 2022 yang kemarin yaitu 12,51% atau dengan capaian sebesar 100%. Sama halnya dengan peningkatan pada pelayanan kesehatan pada usia produktif, peningkatan ini disebabkan oleh adanya kebijakan vaksinasi yang dilakukan kepada para lansia, sehingga secara otomatis banyak lansia harus melakukan vaksinasi yang mana tahapannya terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan kesehatan sebelum pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dilakukan, Namun walaupun dari segi capaiannya meningkat jika di bandingkan dengan tahun 2022 masih terdapat lansia dengan kondisi yang sudah tidak memungkinkan untuk melakukan aktifitas pemeriksaan kesehatan, kemudian kurangnya dukungan dari pihak keluarga, dan di samping itu masih adanya persepsi di masyarakat yang masih beranggapan anti tenaga medis.

Sasaran 19208 dengan capaian 16511 selisih 2697 orang. Jika dibandingkan dengan tahun kemarin sasaran 17125 dengan capaian 14894 selisih 2231 orang. Adapun kendala yang dihadapi didalam melakukan pemeriksanaan terhadap usia lanjut disebabkan salah satunya oleh sulitnya untuk mengajak para lansis tersebut untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ke posyandu lansia setempat. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan peningkatan inovasi layanan yang salah satunya berbentuk *home care* kepada ansia yang memang tidak dapat untuk melakukan aktifitas pemeriksaan kesehatan di posyandu setempat. Kemudian perlu juga optimalisasi pelayanan di Puskesmas berupa layanan santun lansia yang memprioritas lansia didalam pelayanan kesehatan.

Tabel IV.25
Cakupan pelayanan kesehatan Lanjut Usia Tahun 2023

NO	NAMA PUSKESMAS	JUMLAH YANG TERLAYANI
1.	Muntok	3653
2.	Simpangteritip	1720
3.	Jebus	1965
4.	Puput	2313
5.	Kelapa	2750
6.	Sekar Biru	931
7.	Tempilang	2456
8.	Kundi	723
	TOTAL	16511 orang

Dari data di atas dapat terlihat bahwa untuk sebaran layanan lanjut usia yang tertinggi capaiannya ada di Kabupaten Bangka Barat adalah di wilayah Jebus, Simpang Teritip, Kundi, Puput, Kelapa dan tempilang. Sama halnya dengan capaian usia produktif, tidak tercapainya target disebabkan karena terdapat 614 jiwa (3,59%) usia lanjut yang belum terskrining kesehatan sesuai standar dimana pelayanan yang harus diberikan antara lain ; pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, deteksi hipertensi

dengan mengukur tekanan darah, deteksi diabetes melitus dengan pemeriksaan kadar gula darah, deteksi kadar kolestrol dalam darah, deteksi gangguan mental emosional dan perilaku termasuk kepikunan dengan menggunakan mini cog atau *Mini Mental Status Examination* dan *Geriatric Depression Scale*, Deteksi Pemeriksaan Tingkat kemandirian (Instrument P3G) dan Anamnese Perilaku Beresiko pada Usia lanjut minimal 1 x dalam satu tahun. Disamping itu pula terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana juga belum disebabkan oleh belum mencukupinya ketersediaan buku raport lansia, alat pemeriksaan kesehatan di puskesmas selama 6 bulan serta masih ada usia lanjut yang tidak mau diperiksa kesehatan sesuai standar 81 usia lanjut (3,63%) dikarenakan khawatir dengan pemeriksaan yang akan dilakukan akan berdampak kepada kondisi psikis pihak keluarga.

Tabel IV.26
Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Lanjut Usia Tahun 2023

NO	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	19208	16511	85,96
2	Buku kesehatan lansia	19208	10.881	56,65
3	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen ActiVity Daily LIVING (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	19208	17898	93,18
4	Dokter	16	16	100
5	Bidan	81	81	100
6	Perawat	16	16	100
7	Ahli Gizi	8	8	100
8	Tenaga Kesehatan Masyarakat	8	8	100
9	Tenaga Non Kesehatan Terlatih	324	324	100
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				92,87%

Kemudian jika dilihat dari segi pemenuhan mutu pelayanan lansia, dapat terlihat bahwa pemenuhan mutu telah mencapai angka 92,87%. Angka ini menunjukkan bahwa pemenuhan mutu layanan pada usia produktif sudah cukup baik baik dimana jika dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya sudah memadai untuk memberikan pelayanan. Hanya saja memang perlu dilakukan upaya peningkatan promosi serta pendekatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan cakupan pelayanan ini.

- g) Capaian Pelayanan penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian di Tahun 2022 yaitu sebesar 13,3%. Peningkatan ini terjadi dikarenakan adanya kebijakan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi penduduk yang mana didahulukan dengan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Namun untuk SPM indikator pelayanan

kesehatan pada penderita hipertensi masih ditemukan banyak warga negara yang belum melakukan pemeriksaan ke Puskesmas namun telah mengunjungi klinik2 kesehatan lain yang dalam hal ini klinik-klinik kesehatan swasta tersebut tidak melakukan pelaporan kepada pihak Puskemas terkait layanan pemeriksaan yang dilakukan sehingga capaian pelayanan SPM pada indicator ini tidak tercapai. Saat ini Dinas terkait memiliki kebijakan terkait dengan rencana untuk mensyaratkan pengeluaran izin usaha/ praktek dokter harus melibatkan tenaga kesehatan di Puskesmas setempat. Hal ini dilakukan agar klinik-klinik swasta nantinya akan bekerjasama dengan tenaga kesehatan yang ada Puskesmas untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang nantinya akan diVikuti dengan tertibnya administrasi pencatatan pelayanan Standar Pelayanan Minimal yang telah dilakukan.

Sasaran layanan urusan di tahun 2023 sebesar 50770 orang dengan capaiannya sebanyak 47910 orang mengalami peningkatan sekitar 2860 orang, jika dibandingkan dengan tahun kemarin dengan sasaran sebesar 48523 orang dan dengan capaian 43555 orang. Peningkatan capaian jika dibandingkan dengan tahun kemarin dikarenakan adanya peningkatan cakupan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak hanya dilakukan pada fasyankes namun meliputi perkantoran, instansi, sekolah, umah ibadah dan event-event yang melibatkan masyarakat banyak. Disamping itu juga adanya penambahan posbindu di wilayah puskesmas yang memiliki sasaran yang cukup besar jika dibandingkan dengan puskesmas lainnya

Sedangkan kendala yang dihadapi di dalam pemeriksaan hipertensi diantaranya dikarenakan belum maksimalnya koordinasi jumlah penderita yang melakukan pemeriksaan dalam gedung, klinik dan dokter praktek di luar puskesmas dan posbindu.

Disamping itu pula, dari 2860 orang yang belum terskrining dari jumlah yang harus dilayani 50770 orang dikarenakan jumlah sasaran yang digunakan adalah sasaran prevalensi dari rikesdas 2018. Bisa jadi memang tidak ada penderita lain atau pasien dengan Hipertensi nya *silent. The forgotten killer* dengan kata lain penderita tidak merasakan gejala yang berarti mereka beranggapan tidak termasuk salah satu dari 32.16% prevalensi dari rikesdas. Sehingga penderita hipertensi tidak datang ke FKTP atau faskes kesehatan untuk kontrol ataupun berobat.

Tabel IV.27
Cakupan pelayanan kesehatan Hipertensi Tahun 2023

NO	NAMA PUSKESMAS	JUMLAH YANG TERLAYANI
1.	Muntok	9924
2.	Simpangteritip	5199
3.	Jebus	5586
4.	Puput	6169
5.	Kelapa	8995
6.	Sekar Biru	2788

NO	NAMA PUSKESMAS	JUMLAH YANG TERLAYANI
7.	Tempilang	7126
8.	Kundi	2123
	TOTAL	47910 orang

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

Dari capaian di atas dapat terlihat bahwa cakupan layanan hipertensi yang diberikan yang paling banyak memberikan layanan dalam di Puskesmas wilayah Kelapa dan Muntok. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin maju sebuah daerah maka semakin tinggi penyebab terjadinya hipertensi. Sehingga kedepan perlu penggalakan kader di setiap desa untuk diberdayakan dalam melakukan screening secara masif sehingga tidak ada lagi kasus hipertensi yg tidak dilakukan tata laksana sesuai standar. Misalnya Mentok yang notabenehnya tidak tercapai semua desanya maka dapat dilakukan dengan cara setiap kunjungan Posbindu kader di haruskan mengajak minimal 100 warga utk melakukan skrining PTM.

Tabel IV.28
Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Hipertensi Tahun 2023

NO	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	16	16	100
2	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	5508	5508	100
3	Tensimeter	24	24	100
4	Dokter	8	8	100
5	Bidan	8	8	100
6	Perawat	16	16	100
7	Tenaga Kesehatan Masyarakat	8	8	100
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				100

Kemudian jika dilihat dari segi pemenuhan mutu pelayanan hipertensi, dapat terlihat bahwa pemenuhan mutu telah mencapai angka 100%. Angka ini menunjukkan bahwa pemenuhan mutu layanan pada hipertensi sudah sangat baik dimana jika dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya sudah memadai untuk memberikan pelayanan

- h) Sedangkan untuk capaian pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus di Tahun 2023 sifatnya tetap jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu yaitu sama-sama 100%. Namun jika dilihat dari sasaran mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian di Tahun 2022 mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi 4.152 jiwa dari sebelumnya sebesar 4.098 jiwa. Pada indicator pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus dilakukan pemeriksaan secara bersamaan dengan usia produktif.

Sehingga ketidaktercapaian indicator pelayanan pada usia produktif tersebut dikarenakan belum mencukupinya ketersediaan SDM yang belum dapat mengcover seluruh kebutuhan pelayanan kesehatan di masyarakat. Yang mana dalam hal ini Puskesmas Muntok yang memiliki cakupan sasaran lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas lainnya dikarenakan jumlah penduduk yang lebih banyak ketimbang Puskesmas lainnya.

Dari sasaran layanan urusan sebanyak 4152 orang dengan capaian 4289 orang dengan persentase 103,30%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 dengan sasaran sebanyak 3968 orang dengan capaian 4098 orang dengan persentase 103,28%. Peningkatan capaian ini disebabkan meningkatnya cakupan pelayanan yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan kepada masyarakat serta adanya upaya untuk pengaktifan Pandu PTM di masing-masing Puskesmas, pemanfaatan prolanis dengan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Di tahun 2024, akan dilaksanakan pemberian bahan bantuan berupa *wound care* bagi penderita diabetel mellitus yang telah mengalami komplikasi seperti mengalami ulkus diabetikum.

Tabel IV.29
Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Diabetes Melitus Tahun 2023

NO	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	1278	1278	100
2	Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	46032	46032	100
3	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	16	16	50
4	Dokter	8	8	100
5	Bidan	8	8	100
6	Perawat	16	16	100
7	Ahli Gizi	8	8	100
8	Tenaga Kesehatan Masyarakat	8	8	
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				100%

Kemudian jika dilihat dari segi pemenuhan mutu pelayanan Diabetes Millitus, dapat terlihat bahwa pemenuhan mutu telah mencapai angka 100%. Angka ini menunjukkan bahwa pemenuhan mutu layanan sudah sangat baik dimana jika dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya sudah memadai untuk memberikan pelayanan.

Capaian indikator DM sebenarnya dari tahun ketahun angkanya tidak jauh berbeda. Saat ini hanya penatalaksanaan kasus yang ada dan tambahan kasus baru sedikit. Capaian yang lebih dari 100% disebabkan karena untuk penentuan sasaran, kita masih

menggunakan hasil Riskesdas tahun 2018 yaitu sebesar 2,63%. hal ini menggambarkan bahwa saat ini di Kabupaten Bangka Barat angka kesakitan DM sudah diatas 2,63%.

- i) Capaian Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat pencapaian sesuai dengan target dikarenakan cakupan pelayanan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat sudah menjadi sebuah kewajiban Daerah untuk memenuhi pelayanan kesehatannya.

Tabel IV.30
Cakupan pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Tahun 2023

NO	PUSKESMAS	KLASIFIKASI ODGJ		JUMLAH YANG TERLAYANI (orang)
		SKIZOFRENIA	PSIKOTIK AKUT	
1.	Muntok	110	0	110
2.	Simpangteritip	60	0	60
3.	Jebus	75	0	75
4.	Puput	55	0	55
5.	Kelapa	65	0	65
6.	Sekar Biru	25	0	25
7.	Tempilang	84	0	84
8.	Kundi	29	0	29
TOTAL				503 orang

Dari segi pemenuhan mutu pelayanan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, dapat terlihat bahwa pemenuhan mutu sudah 100%. Angka ini menunjukkan bahwa pemenuhan mutu layanan sudah sangat baik dimana jika dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya sudah memadai untuk memberikan pelayanan.

Sasaran urusan untuk layanan ODGJ di tahun 2023 adalah 503 orang dengan capaian sebesar 503 orang (100%). Jika dibandingkan dengan sasaran tahun 2022 sebanyak 487 orang terdapat peningkatan jumlah ODGJ di Kabupaten Bangka Barat. Jika di lihat bahwa terdapat kenaikan ODGJ di Kabupaten Bangka Barat dikarenakan berbagai hal diantaranya factor sosial ekonomi dengan kondisi masih ODGJ yang mempunyai KTP dengan domisili yang berbeda. Kedepan untuk meningkatkan kolaborasi lintas sektor untuk kelengkapan kesesuaian antara KTP dengan domisili yang bersangkutan serta hal-hal yang lain berkaitan dengan kondusifitas lingkungan serta ketentraman umum.

Tabel IV.31
Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan ODGJ Tahun 2023

NO	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ IVI) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	8	8	100

2	Kit berisi 2 Alat Fiksasi	16	16	100
3	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	230	230	100
4	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	8	100	0
5	Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya	24	24	100
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				100%

- j) Untuk capaian pelayanan penderita Tuberculosis yang mendapat pelayanan kesehatan orang terduga Tuberculosis, di Tahun 2023 mengalami penurunan dengan capaian di Tahun 2023 yaitu sebesar 67,77%. Penurunan ini disebabkan oleh adanya peningkatan target sasaran dari tahun kmrn sebesar 120 %. Cakupan pelayanan penderita Tuberculosis yang dilakukan di masing-masing puskesmas oleh pengelola program serta adanya upaya penjangkaran secara massif kepada penduduk yang terduga TB di setiap layanan pasca pandemic Covid-19. Sasaran tahun 2023 sebesar 4530 orang dengan capaian 3.070 orang dengan ketidackapaian sebesar 1.460 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 capaian di tahun 2023 lebih tinggi dikarenakan penetapan sasarnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan sasaran tahun lalu yaitu 1930 orang di 2022 meningkat menjadi 4530 orang atau sebesar 120%, kenaikan sasaran ini dikarenakan dalam upaya percepatan eliminasi tb di tahun 2030 sehingga upaya penganan lebh massif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Di tahun 2023 terdapat 1503 orang yang menjadi sasaran dari indicator ini tidak tercapai dikarenakan ketidakberkesinambungannya ketersediaan logistic di tingkat Kabupaten maupun di layanan. Khususnya ketersediaan non OAT (Obat Anti Tuberculosis). Di samping itu adanya pergantian pengelola layanan program di tingkat layanan (puskesmas, rumash sakit dan klinik). Serta keterlibatan klinik dan praktek dokter swasta yang belum maksimal dalam upaya penanggulangan kasus TB.

Tabel IV.32
Jumlah terduga Tuberculosis, Kasus Tuberculosis Anak dan *Treatment Coverage*
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

NO	PUSKESMAS	JUMLAH KASUS TB		KASUS TB ANAK 0-14 TAHUN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Muntok	82	49	29
2.	Simpangteritip	2	2	1
3.	Jebus	17	4	4
4.	Puput	11	5	1
5.	Kelapa	11	9	1

NO	PUSKESMAS	JUMLAH KASUS TB		KASUS TB ANAK 0-14 TAHUN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
6.	Sekar Biru	11	5	1
7.	Tempilang	12	9	2
8.	Kundi	2	2	0
TOTAL				272 orang

Untuk penanggulangan kasus Tb tersebut saat ini pemerintah daerah telah menerbitkan surat Bupati Bangka Barat No KS.02.01/2778/DINKES/2022 terkait Pemberitahuan Desa atau Kelurahan Intervensi khusus Tuberculosis sebagai tindak lanjut dari aturan peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberculosis. Adapun di dalam surat tersebut disampaikan bahwa agar kepala desa atau lurah dapat mendorong dan memfasilitasi untuk melakukan skrining masal TBC pada desa atau kelurahan yang memenuhi kriteria.

Tabel IV.33
Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Tuberculosis Tahun 2023

NO	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	1580	790	100
2	Catridge tes cepat molekuler	790	1,830	100
3	Formulir pencatatan dan pelaporan	790	790	100
4	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	10	10	100
5	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	330	330	100
6	Reagen Zn TB	100	100	100
7	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	207	207	100
8	Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	10	10	100
9	Penata Rontgen	3	3	100
10	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai	132	132	100
11	Tenaga kesehatan masyarakat	8	8	100
12	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	2	2	100
13	Perawat	10	10	100
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				99,72%

Dari segi pemenuhan mutu pelayanan Orang Terduga Tuberculosis, dapat terlihat bahwa pemenuhan mutu berada di angka 100% yang merupakan capaian mutu tertinggi jika dibandingkan dengan indicator SPM bidang Kesehatan lainnya. Angka ini menunjukkan bahwa capaian pemenuhan mutu layanan Orang Terduga

Tuberculosis di Kabupaten bangka Barat sudah sangat baik sekali yang merupakan komitmen daerah pasca pandemic Covid. 19

- k) Untuk capaian Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*), di Tahun 2023 mengalami peningkatan capaian sasaran jika dibandingkan dengan capaian di Tahun 2022 yaitu dari 5432 orang menjadi 5621 orang di tahun 2022 Hal ini dikarenakan adanya peningkatan capaian sasaran dari pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV memiliki target sasaran terdiri dari 3 unsur yaitu ibu hamil, warga binaan serta PSK. Yang mana untuk sasarnya lebih tinggi dari tahun kemarin dan melebihi target yang telah ditetapkan.

Dan untuk kasus HIV di Kabupaten bangka Barat pada tahun 2023 sebanyak 35 kasus dengan kasus terbanyak di kelompok umur 25-49 tahun sebanyak 31 orang. Sehingga berkaca dengan angka ini maka perlu penekanan angka kasis HIV di Kabupaten Bangka Barat melalui program kegiatan yang diperuntukkan dalam menekan angka kejadian kasus HIV.

Sasaran 5395 orang capaian 5621 orang (104,19%) yang mana terdapat kenaikan sebanyak 223 orang dari target yang telah ditetapkan. Kenaikan ini dikarenakan adanya peningkatan pemeriksaan di Rutan Kelas 2 Mentok. Adapun cakupan pemeriksaan meliputi (data menyusul). Sasaran tahun lalu 5060 orang dengan capaian 5432 atau sebesar 107,35%.

Untuk angka kejadian kasus HIV di tahun 2023 sebanyak 35 orang yang mengalami peningkatan sebanyak 32 orang yang berada di kelompok umur 20-24 3 orang, 25-49 31 orang, diatas umur 50+ 1 orang (data per puskes menyusul) sehingga dari data tersebut diperoleh sebuah gambaran bahwa dinas terkait perlu melakukan intervensi program dan kegiatan pencegahan HIV pada usia anak sekolah dengan cara menggalakkan sosialisasi kepada siswa sekolah jenjang pendidikan SLTA.

Adapun kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan indicator ini dilakukan dengan cara peningkatan cakupan pemeriksaan di beberapa komunitas kelompok kunci yang terdiri dari warga binaan, abk kapal, pekerja seks komersial, ibu hamil, lelaki suka lelaki.

Tabel IV.34
Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) Tahun 2023

NO	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Tes cepat HIV (RDT) pertama	5395	5395	100
2	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	8	8	100
3	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	35	35	100
4	Bahan Medis Habis Pakai,	5395	5395	100

	Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai			
5	Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	10	10	100
6	Perawat	10	10	100
7	Bidan	10	10	100
8	Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	10	10	100
9	Tenaga kesehatan masyarakat	8	8	100
10	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	8	8	100
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				100,00%

4.2.4. Alokasi Anggaran

Pada Tahun 2023 jumlah belanja langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam rangkapenerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Pemerintah Daerah untuk bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel di bawahini:

Tabel IV.35
Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
IV.	KESEHATAN				2.850.705.100
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	569.390.000
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	47.655.000
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	782.870.000
			Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pelayanan Kesehatan Balita	271.780.000
			Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	95.490.000
			Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	52.535.000
			Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	550.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
			Hipertensi		
			Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	197.836.000
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	63.199.900
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	669.279.200
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	100.120.000
				Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	

4.2.5. Dukungan Personil

Secara umum seluruh pegawai terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, sebagai berikut:

Tabel IV.36
Dukungan Personil dalam mendukung Pelayanan Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

NO	TENAGA	SARANA KESEHATAN										TOTAL	KET	
		PKM MENTOK	PKM SIMTER	PKM KUNDI	PKM JEBUS	PKM PUPUT	PKM SEKAR BIRU	PKM KELAPA	PKM TEMPILANG	RS/KLINIK DI KAB BANGKA BARAT	SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN			
1	dr. SPESIALIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	28	
2	DOKTER	8	2	3	5	2	5	3	3	3	32	7	70	
3	DOKTER GIGI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	0	10	
4	BIDAN	26	29	14	32	14	24	47	25	25	57	32	300	
5	PERAWAT	32	20	20	26	14	27	39	29	29	178	32	417	
6	GIZI	4	4	3	4	3	3	5	3	3	8	3	40	
7	TENAGA KESMAS	6	3	4	2	2	3	6	5	5	7	10	48	
8	ANALISIS TEKNIK LAB MEDIK	4	1	2	4	2	3	3	2	2	23	2	46	
9	PENATA RONGENT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	
TOTAL		81	60	47	74	38	66	104	68	68	344	86	968	

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

Tabel IV.37
Dukungan Tenaga Medis Per Indikator Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

INDIKATOR SPM	dr. SPESIALIS	DOKTER	DOKTER GIGI	BIDAN	PERAWAT	GIZI	TENAGA KESMAS	ANALISIS TEKNIK LAB MEDIK	PENATA RONGENT
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		26		98	40				
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		26		98	40				
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		29		98	40				
Pelayanan Kesehatan Balita		26		98	40	8			
Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		8	8	16	16	16	8		
Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		16		16	16	8	8		
Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		16		82	32	8	8		
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		8		8	16		8		
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus		8		8	16	8	8		
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		9							
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2	8			10		8	9	3
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus HIV	2	8		9	9		8	9	

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, baik permasalahan eksternal maupun internal antara lain yaitu:

- a. Masih terbatas tenaga medis khususnya dokter dalam melakukan pelayanan penjangkauan di masyarakat serta belum sesuai ketersediaan tenaga medis pada Puskesmas dengan intensitas pelayanan kepada masyarakat yang akan dilakukan;
- b. Masih terbatasnya program dan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan di masyarakat berkaitan dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang melibatkan lintas sector dalam mendorong masyarakat untuk mengunjungi fasilitas Kesehatan/ posbindu/ posyandu yang ada di desa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- c. Masih ditemukan belum keseragaman dalam pengalokasian kebutuhan besaran biaya transport kader yang ada di desa ;
- d. Masih adanya kesenjangan antara luas wilayah dengan kapasitas pegawai dalam melakukan pelayanan kesehatan

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, antara lain:

- a. Melakukan inisiasi dan advokasi pendekatan kepada seluruh kepala desa dalam optimalisasi pemberdayaan masyarakat di bidang pelayanan kesehatan ;
- b. Sudah ada rencana dalam hal pembentukan puskesmas baru terutama di wilayah Kecamatan Mentok ;
- c. Sudah adanya pemetaan kebutuhan pegawai di beberapa sisi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Puskesmas;
- d. Sudah dilakukan koordinasi dengan Fasilitas Kesehatan Non Pemerintah dalam mendukung optimalisasi pencapaian SPM di bidang Kesehatan.

4.3. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) nya oleh Pemerintah.

Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

4.3.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungannya telah dituangkan dalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan lanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.38
Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN
1.	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	SetiapTahun
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100 %	SetiapTahun

4.3.3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum pada Tahun 2023, 2022 serta Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.38

Perbandingan Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN 2021	SASARAN 2021	ANGKA 2021	CAPAIAN 2022	SASARAN 2022	ANGKA 2022	CAPAIAN 2023	SASARAN 2023	ANGKA 2023	TARGET CAPAIAN
1.	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	184.768	199.784	92,48	22942	24505	93.62%	2540	2540	100%	100 %
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	109.856	199.784	54,99	8115	24505	33.12%	116	116	100%	100 %
	RATA-RATA				73,73			63,37			100%	

Penerapan Standar pelayanan Minimal urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat. Pelaksanaan SPM urusan Pekerjaan Umum merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dari kedua indikator tersebut, ditahun 2023 ini seluruh indikator mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% Hal ini dikarenakan adanya perubahan dalam definisi operasional dimana untuk penentuan warga negara yang menerima layanan kebutuhan air minum hanya di peruntukkan pada desa yang menjadi wilayah intervensi dari kegiatan tersebut sebanyak 23 desa di wilayah Kabupaten Bangka Barat.

Adapun untuk 23 desa yang menjadi lokasi intervensi program/ kegiatan pemenuhan SPM bidang pekerjaan umum adalah :

- a) Kecamatan Muntok terdiri dari Kelurahan Tanjung, Sungai Baru, Sungai Daeng, Keranggan dan Menjelang serta Desa Air Belo dan belo Laut
- b) Kecamatan Simpangteritip terdiri dari Desa Kundi, Peradong, Air Nyatoh dan Rambat
- c) Kecamatan Jebus terdiri dari Desa Rukam, Rangi Asam, Ketap, Pebuar, Sinar Manik dan Air Kuang
- d) Kecamatan Parittiga terdiri dari Desa Kelabat dan Puput
- e) Kecamatan Kelapa terdiri dari Kelurahan Kelapa dan Desa Tugang
- f) Kecamatan Tempilang terdiri dari Desa Benteng Kota dan Air Lintang.

Untuk sarana dan prasarana air minum kategori layak untuk kebutuhan air bersih adalah berupa saluran perpipaan atau sumur yang memiliki tutup dengan jarak dengan tanki septic lebih dari 10 meter, dengan kondisi air tidak berwarna dan tidak berbau, dan tidak berasa. Sampai dengan saat ini di Kabupaten Bangka Barat pada kategori pemenuhan air untuk kebutuhan air minum baru pada kategori layak belum mengarah ke akses aman yaitu sebesar 55.790 unit rumah dari total sebanyak 60.016 rumah (92,96%).

Di Kabupaten Bangka Barat sendiri masih ada masyarakat yang menggunakan akses air minum yang tidak layak yang berasal dari sungai dan pemandian Untuk itu berbagai program pemerintah serta stakeholder lainnya masih sangat di butuhkan untuk memenuhi ketersediaan sumber air bersih di daerah.. Kebutuhan air minum manusia harus ditunjang dengan ketersediaan air yang layak untuk dikonsumsi. Untuk kawasan perdesaan kebutuhan minimal air minum adalah 60 liter/hari per orang dan 80 liter/hari per orang di kawasan perkotaan dengan akses ke sumber air minum yang jarak tempuh tidak lebih dari 30 menit serta jarak sumber air baku (sumur) dengan septitank terdekat lebih dari 10 meter.

Untuk akses SPAM di Kabupaten Bnangka Barat, saat ini pengelolaany telah dilakukan oleh berbagai piak diantaranya 1). perumda. 2). masyarakat, 3). SPAM desa. Untuk Dinas Pekerjaan Umum sendiri sampai dengan saat ini belum ada yang mengelola SPAM. Di tahun 2017 terdapat SPAM yang diserahkan kepada daerah tapi belum diserahkan ke desa. Dari awal masyarakat telah mendapat bantuan hibah berupa uang untuk pembangunan SPAM sehingga mulai dari sejak awal SPAM tersebut menjadi hak masyarakat. Di tahun 2022, melihat asset di masyarakat, masyarakat masih merasa bahwa

sarana prasarana tersebut merupakan asset pemda dikarenakan sumber bantuan di awal diberikan oleh pemda. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 terdapat kolaborasi anggaran dari pemda dan pamsimas, untuk pembangunan dan juga terdapat dana OP /Operasional untuk pemeliharaan , agar pembangunan yang telah dilakukan tetap beroperasi dengan baik.

Tabel IV.39
Data Capaian Rumah Tangga dengan Akses Layanan Air Minum Tahun 2023
Kabupaten Bangka Barat

No	Kecamatan	TARGET	REALISASI		
		Total	Terlayani JP	Terlayani BJP	BelumTerlayani
		(unit RT)	(unit RT)	(unit RT)	(unit RT)
1	2	4	5	6	7
1	MUNTOK	14.247	5.179	8.825	243
2	SP TERITIP	9.221	1.818	6.814	6.814
3	JEBUS	6.720	672	5.390	5.390
4	PARITTIGA	9.765	668	8.594	8.594
5	KELAPA	10.512	1.001	8.094	8.094
6	TEMPILANG	9.561	1.530	7,205	7,205
Total		60.016	10,868	44.922	11.434
PersentaseLayanan		92,62%	18,10%	62,84%	11,43%

Sumberdata :DinasPekerjaanUmum danPenataanRuang Kabupaten Bangka Barat

Dari table di atas dapat terlihat bahwa untuk cakupan pemenuhan air yang belum terlayani masih sebesar 11,43% dari total target layanan urusan 100%. Hal ini menunjukkan bahwa baik dari sasaran penerima manfaat serta pemenuhan mutu pelayanan pada pelayanan air bersih sudah hampir mencapai target 100%. Kemudian jika dilihat dari segi pemenuhan kualitas mutu pelayanan pada table di bawah ini capaiannya sebesar 100% dimana jika dilihat dari segi pemenuhan kualitas layanan sudah maksimal. Namun memang intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah belum mencakup jaring non perpipaan namun hanya meliputi jaringan perpipaan saja di tahun 2023 ini.

Tabel IV.40
Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Air Minum Tahun 2022

NO.	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap kuatitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/hari)	635	635	100
2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)	635	635	100
3	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terhadap kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/hari)	0	0	0

4	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terhadap Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)	0	0	0
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				100%

Kemudian terkait dengan capaian indikator penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik yang mana capaian di tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yang lalu. Sama halnya dengan indikator penyediaan layanan air bersih.

Tabel IV.41
Data Capaian Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah Menurut Kategori Tahun 2023 Kabupaten Bangka Barat

No	Kecamatan	Kategori	TARGET	REALISASI				
			Total	TanpaAkses	AksesDasar	AksesLayak	AksesAman SPALD-S	AksesAman SPALD-T
			(unit Rumah)	(unit Rumah)	(unit Rumah)	(unit Rumah)	(unit Rumah)	(unit Rumah)
1	MUNTOK	Perkotaan	12,777	169	11.146	1.226	58	178
		Perdesaan	871	76	1.389	0	5	0
2	SP TERITIP	Perkotaan	1.512	29	646	0	3	0
		Perdesaan	7.699	397	6.954	347	1	0
3	JEBUS	Perkotaan	1.432	10	1.398	24	0	0
		Perdesaan	4.581	56	4.484	39	2	0
4	PARITTIGA	Perkotaan	1.539	24	1.515	0	0	0
		Perdesaan	8.933	205	8.021	0	0	0
5	KELAPA	Perkotaan	2.618	0	2.597	20	0	0
		Perdesaan	7.894	68	7.416	404	6	0
6	TEMPILANG	Perkotaan	4.265	11	4.252	2	0	0
		Perdesaan	5.296	347	4.752	197	0	0
Total			60.016	1.392	56.110	2.260	76	178

Sumberdata :DinasPekerjaanU,mumdanPenataanRuang Kabupaten Bangka Barat

Jika di lihatdari table di atas, dari total rumahtangadesaintervensi program SPM yang ada di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 60.061 RT, bahwaterdapat 58.624 RT yang telah terpenuhi pelayanan air limbah domestik yang mana dalam hal ini diperoleh dari 56.110 RT yang telah memiliki akses dasar ditambah dengan 2.260 RT yang telah memiliki akses layak, 76 akses aman SPALD-S dan 178 akses aman SPALD-T. Sehingga dari data tersebut terlihat bahwa masih terdapat 1.392 RT di Kabupaten Bangka Barat yang sarana pengolahan Air Limbah domestiknya tanpa akses.

Tabel IV.42
Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Air Limbah Tahun 2023

NO.	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat /SPALDS terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik	29	29	100
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat /SPALDS terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik	29	29	100

3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat /SPALDS terhadap kualitas pelayanan air limbah domestik	0	0	0
4	Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik terpusat / SPALDT terhadap kuantitas akses air limbah domestik	0	0	0
5.	Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik terpusat / SPALDT terhadap kualitas akses air limbah domestik	0	0	0
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				100

Kemudian jika dilihat dari segi pemenuhan kualitas mutu pelayanan pada table di atas capaiannya sebesar 100% dimana jika dilihat dari segi pemenuhan kualitas layanan masih ada yang belum di penuhi yaitu dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat terhadap kualitas pelayanan air limbah domestik dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat terhadap kualitas pelayanan air limbah domestik yang capaiannya masih 0. Untuk itu di tahun-tahun berikutnya akan direncanakan terkait dengan pemenuhan dari mutu ketiga layanan tersebut agar dapat lebih optimal.

Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa untuk capaian SPM bidang Pekerjaan Umum dari 2 (dua) indikator tersebut keseluruhannya mencapai target SPM. Namun tentunya di tahun-tahun berikutnya perlu ditingkatkan kembali terkait pemenuhan beberapa mutu layanan yang dianggap masih belum optimal.

4.3.4. Alokasi Anggaran

Pada Tahun 2023 jumlah belanja langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Pemerintah Daerah untuk bidang Pekerjaan Umum dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel IV.43
Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

1	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
IVI	PEKERJAAN UMUM				2.596.182.202
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	1.922.190.000
			Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan		572.000.000
			Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM		5.540.000
			Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan		114.450.000

1	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
			Perdesaan		
			Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		1.230.200.000
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	673.992.202
			Rehabilitasi/peningkatan/pekerjaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman		69.775.000
			Pembangunan/penyediaan sub system pengolahan setempat		390.000.000
			Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		67.509.800
			Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja		146.707.402

4.3.5. Dukungan Personil

Secara umum seluruh pegawai terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat berjumlah 5 orang PNS, 6 orang PHL dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat, dan TFL Sanitasi 6 orang.

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan lahan untuk sanitasi sesuai standar;
2. Alokasi Biaya operasional serta sumber daya masyarakat sebagai kelompok pengelola yang belum optimal;
3. Belum adanya perubahan mindset masyarakat dalam mengelola air limbah dengan menggunakan SPALD;
4. Masih terbatasnya ketersediaan air baku yang dapat dimanfaatkan untuk penyediaan air di SPAM di masing-masing wilayah;
5. Air baku disebagain di wilayah tidak tercukupi sehingga terancam ketersediaannya;

6. Banyaknya kegiatan penambangan timah yang berdampak pada kualitas air baku;
7. Belum optimalnya ketersediaan database;
8. Tidak selarasnya antara penetapan target dengan ketersediaan anggaran yang dimiliki;

Adapun solusi yang harus diambil dari permasalahan yang telah disebutkan diatas adalah

1. Perlu di optimalkan ketersediaan sumber air baku yang menjadi salah satu sumber air bersih;
2. Dukungan penganggaran yang harus disesuaikan dengan target yang telah ditetapkan;
3. Perlu adanya kebijakan daerah di dalam pengoptimalan air minum dan sanitasi layak di masyarakat;
4. Perlu dilakukan updating database secara berkala oleh dinas terkait yang akan digunakan dalam perencanaan dan penganggaran sanitasi dan air minum layak.

4.4. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)nya oleh Pemerintah.

Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

4.4.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya telah dituangkan dalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan yang merupakan lanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.44
Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak huni bagi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang Menjadi Korban Bencana yang Memiliki Rumah Terkena Dampai Bencana	100 %	Setiap Tahun

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Warga Negara Masyarakat yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten.	100 %	Setiap Tahun

4.4.3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat pada Tahun 2023, 2022 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.45

Perbandingan Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN 2021	SASARAN 2021	ANGKA 2021	CAPAIAN 2022	SASARAN 2022	ANGKA 2022	CAPAIAN 2023	SASARAN 2023	ANGKA 2023	TARGET CAPAIAN
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak huni bagi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang Menjadi Korban Bencana yang Memiliki Rumah Terkena Dampak Bencana	2	2	100	67	67	100%	15	15	100%	100 %
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Warga Negara Masyarakat yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten.	0	0	0	0	0	0%	839	839	100%	100 %
	RATA-RATA				50%			50%			100%	

Untuk capaian SPM bidang Perumahan terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana sebesar 100% (mencapai target) serta Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten sebesar 100%. Sehingga untuk rata-rata capaian SPM bidang Perumahan di tahun 2021 adalah sebesar 100%. Untuk capaian SPM bidang perumahan jika di bandingkan dengan capaian tahun lalu mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan adanya penyusunan dokumen Identifikasi Lahan –lahan potensial untuk relokasi bencana serta Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/ Kota sehingga capaian untuk indikator Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten di tahun 2023 sebesar 100%. Penyusunan kedua dokumen ini guna dilakukan sebagai salah satu upaya untuk pemenuhan indikator Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang mana untuk capaian tahun-tahun sebelumnya sebesar 0%. Sehingga dengan adanya dokumen tersebut merupakan salah satu upaya perencanaan kebijakan Pemerintah Daerah untuk melakukan relokasi rumah masyarakat ke tempat yang aman, jauh dari tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya misalkan sempadan rel kereta api, bawah jembatan, daerah sempadan sungai, daerah rawan bencana serta daerah-daerah lainnya yang masuk dalam kategori daerah yang rawan bahaya.

Adapun untuk penjelasan dari capaian masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

- a. Capaian indikator Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana di Kabupaten Bangka Barat untuk Tahun 2023 adalah 100%. Hal ini dikarenakan target capaian dari indikator yang berjumlah 15 (lima belas) unit rumah layak huni, terealisasi sebanyak 15 (lima belas) unit yang terdiri dari 13 (tiga belas) unit rehabilitasi rumah dan 2 (dua) unit pembangunan kembali. Adapun untuk kategori rehabilitasi rumah dilakukan jika tingkat kerusakan termasuk dalam kategori rusak ringan dan sedang. Sedangkan untuk kategori pembangunan kembali dilakukan jika tingkat kerusakan termasuk dalam kategori berat. Penerima bantuan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah yang terdiri dari, sebagai berikut :

Tabel IV.46
Data penerima Bantuan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

NO	SURAT KEPUTUSAN	NAMA	PENYEBAB BENCANA	LOKASI
1.	Nomor : 188.45/29.A/DISPERKIMHUB/2023	Pajri	Angin Puting Beliung	Dusun Dendang RT 001 RW 001 Desa Dendang Kecamatan Kelapa
2.	Nomor : 188.45/114.A/DISPERKIMHUB/2023	IVt Basri	Tersambar petir disertai Angin Kencang	Dusun Rumpis RT 002 RW 001 Desa Berang Kecamatan

NO	SURAT KEPUTUSAN	NAMA	PENYEBAB BENCANA	LOKASI
				Simpang Teritip
3.	Nomor : 188.45/154/DISPERKIMHUB/2023	Juanda	Tersambar Petir	Kampung Senang Hati RT 003 RW 002 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok
4.	Nomor : 188.45/238/DISPEKRIMHUB/2023	1. Feryzal Fitri 2. Agustiar R.	Angin Puting Beliung	Kampung Mentok Asin RT 004 RW 010 Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok
5.	Nomor : 188.45/329.A/DISPEKRIMHUB/2023	1. Sakyah 2. Alpian 3. Olianto 4. Kang mas	Angin kencang	1. Rukam RT 001 RW 001 Desa Rukam Kecamatan Jebus, 2. Dusun Kelekak Manau RT 009 Desa Penyampak Kecamatan Tempilang, 3. Dusun Pangkal Beras RT 002 RW 001 Desa Pangkal Beras Kecamatan Kelapa, 4. Dusun Pangkal Beras RT 004 RW 001 Desa Pangkal Beras Kecamatan Kelapa
6.	Nomor : 188.45/337.A/DISPERKIMHUB/2023	1. Musmulyadi 2. Pandi 3. Saha 4. Sukirman S 5. Usup	Angin Kencang	1. Desa Tempilang RT 004 Kecamatan Tempilang, 2. Dusun Baginda Desa Pangkal Beras Kecamatan Kelapa, 3. Dusun Baginda Desa Pangkal Beras Kecamatan Kelapa, 4. Dusun

NO	SURAT KEPUTUSAN	NAMA	PENYEBAB BENCANA	LOKASI
				Baginda RT 007 Desa Pangkal Beras Kecamatan Kelapa, 5. Dusun I RT 002 Desa Air Nyatoh Kecamatan Simpang Teritip.
7.	Nomor : 188.45/337.B/DISPERKIMHUB/2023	Hatta	Angin Kencang	Kampung Jawa Baru RT 002 RW 002 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok

Dari 15 rumah yang dilakukan rehabilitasi, terdapat 2 (dua) rumah yang dilakukan pembangunan kembali dikarenakan kondisi sudah rusak berat. Sedangkan 13 unit rumah lainnya sifatnya hanya renovasi dengan cara melakukan penggantian material pada bagian rumah yang rusak.

Tabel IV.47

Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Tahun 2023

NO.	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0	0	0
2	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	13	13	100
3	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	2	2	100
4	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	0	0	0
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				100%

Kemudian dari pencapaian mutu pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana diperoleh capaian sebesar 100% di mana untuk seluruh pemenuhan mutu terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.

- b. Untuk Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten telah terealisasi yaitu dengan capaian 100, hal ini dikarenakan Dinas terkait telah melakukan kegiatan identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi serta identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana. Dari hasil identifikasi tersebut diperoleh

bahwa terdapat 144 rumah yang berada di daerah rawan bencana serta 6 lokasi lahan potensial sebagai lokasi relokasi. Adapun 6 lokasi tersebut berada pada :

9. Desa Rambat, Kecamatan Simpang Teritip (0,15 Ha)
10. Desa Air Nyatoh, Kecamatan Simpang Teritip (2,13 Ha)
11. Desa Puput, Kecamatan Parittiga (1,23 Ha)
12. Desa Puput, Kecamatan Parittiga (0,36 Ha)
13. Desa Sungai Buluh, Kecamatan Jebus (0,39 Ha)
14. Kelurahan Kelapa, Kecamatan Kelapa (1,96 Ha)

Terkait dengan rencana relokasi cakupannya meliputi 144 rumah yang berada di daerah rawan bencana serta 90 rumah yang berada di kawasan kumuh. Yang terdiri dari:

Tabel IV.48
Titik rawan bencana serta kumuh di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

No	Lokasi	Jumlah (Unit)	Kategori
1.	Kelurahan Tanjung	6	Rawan bencana
2.	Desa Rambat	7	Rawan bencana
3.	Desa Rukam	6	Rawan bencana
4.	Desa Mislak	11	Rawan bencana
5.	Desa Air Kuang	8	Rawan bencana
6.	Desa Jebus	14	Rawan bencana
7.	Desa Sinar Manik	41	Rawan bencana
8.	Desa Sungai Buluh	35	Rawan bencana
9.	Desa Puput	8	Rawan bencana
10.	Desa Air Gantang	4	Rawan bencana
11.	Desa Benteng Kota	4	Rawan bencana
12.	Kelurahan Tanjung	90	Kawasan Kumuh

Tabel IV.49
Capaian Pemenuhan Mutu Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Tahun 2023

NO.	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	0	0	0
2	Subsidi uang sewa	0	0	0
3	Penyediaan rumah layak huni	0	0	0
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				0%

Penerapan SPM bidang Perumahan tidak dapat terlepas dari penerapan SPM bidang trantibumlinmas dimana untuk pemenuhan kedua SPM ini harus didukung dengan ketersediaan dokumen –dokumen penanganan daerah rawan bencana yang terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu kajian resiko bencana, dokumen penanggulangan bencana serta dokumen rencana kontigensi yang mana sampai dengan saat ini Pemerintah Daerah baru memiliki satu dari ketiga dokumen tersebut yaitu Kajian Resiko Bencana.

Ketiga dokumen tersebut merupakan dokumen yang sangat penting untuk dimiliki oleh masing-masing Pemerintah Daerah karena didalamnya termuat diantaranya titik-titik daerah rawan bencana beserta jumlah jiwa yang menjadi pijakan dalam

perencanaan SPM khususnya yang berkaitan dengan kejadian bencana. Dengan keberadaan dari dokumen ini juga nantinya akan dapat mempengaruhi kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana dalam upaya penanggulangan bencana daerah.

4.4.4. Alokasi Anggaran

Pada Tahun 2023 jumlah belanja langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam rangkapenerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Pemerintah Daerah untuk bidang Perumahan Rakyat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.49
Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
IV	PERUMAHAN RAKYAT				445.010.000
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			67.050.000
Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota			Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak huni bagi Korban Bencana	29.050.000	
Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan				34.450.000	
Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani				1.775.000	
Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota				1.775.000	
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			377.960.000
				Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	
			Rehabilitasi rumah bagi korban bencana		144.735.000
			Pembangunan rumah bagi		233.225.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
			korban bencana		

4.4.5. Dukungan Personil

Secara umum keterlibatan seluruh pegawai dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat berada pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat dengan jumlah personil PNS 4 Orang, PHL 1 Orang..

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

Tentunya dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pihak Pemerintah Daerah, yang diantaranya yaitu :

- a. Masih belum tersedianya dokumen kajian risiko bencana yang mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Bangka barat yang secara langsung berdampak pada penetapan daerah rawan bencana;
- b. Perlu adanya sinkronisasi data hasil identifikasi lokasi rawan bencana yang telah dilakukan oleh dinas perumahan kawasan permukiman dan perhubungan terkait dengan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana dengan dokumen kebencanaan yang telah tersedia;
- c. Perlu adanya penyempurnaan kembali terhadap dokumen hasil identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana serta identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi.
- d. Perlu adanya peningkatan pemahaman aparatur di dalam pelaksanaan indicator relokasi sesuai dengan tata cara yang terdapat pada peraturan perundang-undangan;

Adapun solusi yang harus dilakukan untuk menjawab semua permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Perlu adanya peningkatan komitmen, koordinasi lintas sektor serta penyamaan persepsi antar pihak-pihak yang terkait pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)bidang urusan Perumahan Rakyat.
- b. Agar daerah dapat segera dilakukan penyempurnaan terhadap ketiga dokumen tersebut dengan mempertimbangkan tingkat urgensi kebutuhan akan dokumen tersebut yang tentunya dengan melibatkan lintas sektor;
- c. Perlu dilakukannya penguatan kapasitas aparatur didalam pelaksanaan indicator relokasi sesuai dengan tata cara yang terdapat pada peraturan perundang-undangan

4.5. URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan

oleh Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Pemerintah.

Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. penyediaan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. pelayanan informasi rawan bencana;
- c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

4.5.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya telah dituangkan dalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang merupakan lanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.50
Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang Terkena Dampak Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten	100 %	Setiap Tahun
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang Berada di Kawasan Rawan Bencana dan yang Menjadi Korban Bencana	100 %	Setiap Tahun
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	Setiap Tahun
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang Menjadi Korban Bencana atau yang Terdampak Terkena Bencana	100 %	Setiap Tahun
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang Menjadi Korban Kebakaran atau Terdampak Kebakaran	100 %	Setiap Tahun

4.5.3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Tahun 2023, 2022 dan Tahun 2021

dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.51
Perbandingan Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN 2021	SASARAN 2021	ANGKA 2021	CAPAIAN 2022	SASARAN 2022	ANGKA 2022	CAPAIAN 2023	SASARAN 2023	ANGKA 2023	TARGET CAPAIAN
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang Terkena Dampak Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten	567	567	100	72	72	100%	215	215	100%	100 %
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang Berada di Kawasan Rawan Bencana dan yang Menjadi Korban Bencana	150	2765	5,42	115	2080	5.53%	12481	12481	100%	100 %
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	190	2765	6,87	179	2080	8.61%	1266	2266	100%	100 %
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang Menjadi Korban Bencana atau yang Terdampak Terkena Bencana	7042	7042	100	2972	2972	100%	128	128	100%	100 %
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang Menjadi Korban Kebakaran atau Terdampak Kebakaran	24	24	100	14	18	77.78%	38	38	100%	100 %
RATA-RATA						62,29		58.38		98,22		

Pelaksanaan SPM bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bangka Barat dilakukan oleh 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan 5 (lima) indikator yang terdiri dari :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan indikator :
 - Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan indikator :
 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana
 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Adapun untuk rata-rata capaian SPM bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan rata-rata capaian di tahun 2022 yang lalu dari 58,38% menjadi di tahun 2022 menjadi 98,22%. Hal ini dikarenakan untuk capaian beberapa indikator peningkatan yang cukup signifikan, dimana untuk seluruh indikator capaiannya 100%.

Adapun untuk penjelasan dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

- a) Capaian pelayanan ketentraman dan ketertiban umum di Tahun 2023 sama halnya dengan capaian di Tahun 2022 yaitu mencapai target. Hal ini dikarenakan seluruh warga yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran mendapatkan pelayanan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait. Namun jika dilihat dari sasaran serta capaian indikator ini mengalami penurunan yang sangat signifikan jika di bandingkan dengan capaian dan sasaran tahun lalu. Hal ini dikarenakan telah adanya perbaikan perilaku di masyarakat dalam mematuhi aturan hukum sehingga dapat menekan angka pengaduan.

Tabel IV.52
Jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat yang ditegakkan Tahun 2023

NO	NAMA PERDA	JENIS PENEGAKAN	Lokasi Penegakan
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum	a) Pengawasan Rumah Makan dan Tempat Hiburan b) Pengecekan Lahan Milik Pemda c) Penertiban Tambang Inkonvensional Ilegal d) Penertiban Tempat Hiburan Malam e) Pengecekan Pemilik Kontraan dan kos-kosan	a) Kecamatan Parittiga, Kelapa, Mentok b) Kecamatan Kelapa c) Kecamatan Parittiga, Tempilang, Simpang Teritip, Mentok, Jebus d) Kecamatan Parittiga, Mentok e) Kecamatan Mentok, Parittiga
2.	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor	Pengecekan Data Kependudukan Penghuni Kontrakan dan kos-kosan	a) Kecamatan Mentok, Parittiga

NO	NAMA PERDA	JENIS PENEGAKAN	Lokasi Penegakan
	12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan		
3.	Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Penertiban Pedagang Kaki Lima yang berjualan di trotoar	a) Kecamatan Mentok, Parittiga
4	Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol	Pengawasan terhadap penjual atau distributor minuman beralkohol	a) Kecamatan Mentok, Parittiga, Simpang Teritip
5.	Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah	Pendampingan terkait pembayaran PBB	a) Kecamatan Mentok
6.	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing	Penertiban izin menempatkan tenaga kerja asing	a) Kecamatan Simpang Teritip, Mentok, Tempilang
7.	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pelarangan Pelacuran	Penertiban lokasi pelacuran	a) Kecamatan Mentok, Parittiga

Dari table di atas sebenarnya ada banyak sekali Peraturan daerah/ kerangka kebijakan yang dapat menjadi bahan untuk di lakukan penertiban. Berdasarkan data dari Bagian hukum bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memiliki 37 peraturan baik itu Peraturan Daerah maupun Peraturan Keala Daerah yang telah memuat sanksi hukum yang jelas. Namun dari 37 aturan tersebut yang hanya dilakukan penegakan cakupannya hanya kepada 7 aturan saja dengan memperhatikan ketersediaan personil yang ada serta terkait dengan kewenangan daerah bahwa terdapat beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang akan dilakukan pencabutan.

Disamping itu juga didalam mendukung pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pihak OPD terkait juga telah memiliki Standar Operasional Prosedur yang mengatur didalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut terdiri dari :

15. SOP pengamanan dan pengawalan
16. SOP Pengamanan dan penanganan unjuk rasa
17. SOP Pengamanan tempat – tempat penting
18. SOP Pelaksanaan Patroli
19. SOP Penegakan Yustisi
20. SOP Penertiban surat pernyataan pelanggaran

Tabel IV.53
Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023

NO.	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	0	0	0
2	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	0	0	0
3	Standar sarana prasarana Satpol PP	256	256	100
4	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	778	778	100
5	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	0	0	0
6	Standar Operasional Prosedur Satpol PP	6	6	100
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				75,00%

Kemudian dari pencapaian mutu pelayanan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun diperoleh capaian sebesar 75,00% di mana untuk seluruh pemenuhan mutu terealisasi belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan sebuah kebijakan khusus dari daerah untuk dapat memaksimalkan ketersediaan mutu pelayanan pada masing-masing indikator SPM.

- b) Sedangkan untuk capaian indikator pelayanan informasi rawan bencana mengalami peningkatan dari angka 5,53% di Tahun 2022 menjadi di 100% Tahun 2023. Peningkatan ini dikarenakan adanya perluasan cakupan kegiatan dan peserta pelayanan informasi rawan bencana yang lebih difokuskan pada masyarakat yang berada di kawan bencana tersebut. Di samping itu pula telah disusunnya Dokumen Kajian Resiko Bencana sebagai pemenuhan mutu pelayanan di sub urusan bencana..

Adapun untuk sasaran layanan informasi rawan bencana tahun 2023 adalah sebanyak 12.481 orang terdiri dari 11.884 jiwa yang terdapat di dalam dokumen kajian resiko bencana untuk wilayah Kecamatan Mentok dan Kelapa yang berpotensi bencana banjir serta 597 jiwa warga Negara yang terdampak banjir (selain Kecamatan Mentok dan Kelapa). Dokumen KRB tersebut ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 188.45/36/BPBD/2023 Tentang Kajian Resiko Bencana Kabupaten Bangka Barat. Di samping itu terdapat juga dokumen rencana penanggulangan bencana untuk 2 kecamatan serta rencana kontijensi untuk bencana banjir.

Untuk bentuk kegiatan pelayanan informasi rawan bencana meliputi:

- a) Sosialisasi di 6 kecamatan dengan sasaran masyarakat di daerah rawan bencana
- b) Penyebaran informasi melalui sosial media seperti whatsapp, instagram, facebook, youtube milik instansi BPBD serta media elektronik yaitu berupa himbauan di radio.

- c) Selain itu terdapat juga pemasangan rambu-rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana berupa 4 buah papan informasi untuk kewaspadaan bencana serta 1 buah rambu-rambu evakuasi.
- d) Pemasangan spanduk himbauan kepada masyarakat yang berada di lokasi rawan bencana sebanyak 24 (6 spanduk untuk kebakaran hutan dan lahan, 18 spanduk untuk banjir)

Terkait dengan pemenuhan dokumen kebencanaan, di tahun 2024 akan dilakukan penyempurnaan terhadap dokumen kajian risiko bencana yang meliputi 4 kecamatan lainnya yang diikuti dengan penyempurnaan terhadap dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontigensi.

Untuk personil dalam hal penanggulangan bencana saat ini berjumlah 234 orang yang terdiri dari 15 ASN, 14 PHL, 30 TRC, 21 relawan destana serta 94 anggota TNI Polri dan 60 saka bencana.

Kemudian di samping itu pula untuk layanan informasi rawan bencana yang akan diberikan kepada masyarakat di tahun-tahun selanjutnya diharapkan dapat sesuai hasil pemetaan dalam dokumen Kajian Resiko bencana dan juga penetapan sarasannya juga agar dapat memperhatikan yang tertuang di dalam dokmen tersebut agar dapat lebih tepat sasaran.

Tabel IV.54
Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Informasi Rawan Bencana Tahun 2023

NO.	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1	1	100
2	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	12.481	12.481	100
3	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	12.481	12.481	100
4	Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	29	29	100
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				100%

Untuk pencapaian mutu pelayanan Informasi Rawan Bencana Tahun 2022 diperoleh capaian sebesar 100% di mana untuk seluruh pemenuhan mutu terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.

- c) Sedangkan untuk capaian pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana juga di Tahun 2023 jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2022 mengalami peningkatan. Namun jika dilihat dari segi populasi penduduk di daerah rawan bencana antara data tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan jumlah dikarenakan adanya perubahan penetapan sasaran masyarakat di kawasan rawan bencana yang menjadi

sasaran pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Perubahan penetapan sasaran masyarakat di kawasan rawan bencana dari 2.080 di tahun 2022 menjadi di 1.266 di tahun 2023 telah dilakukan dengan memperhatikan dokumen Kajian resiko Bencana yang telah di susun.

Adapun untuk bentuk kegiatan yang diberikan dalam Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana meliputi 1.266 orang yang terdiri dari 310 siswa SD sekecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Barat dianggap berada di daerah yang berpotensi rawan bencana hidrometeorologi, 380 masyarakat dan aparatur desa dan kecamatan mengikuti kegiatan sosialisasi pembentukan desa tangguh bencana di 6 kecamatan, 21 orang relawan mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana, 150 orang mengikuti simulasi kebencanaan di Desa Belolaut. Kemudian 180 orang mengikuti apel siaga dan gladi bencana di lapangan Atletik Pemerintah Kab. Bangka Barat, 50 saka bhayangkara mengikuti sosialisasi dan pelatihan penanganan bencana, 75 Aparatur dan warga mengikuti sosialisasi bimbingan dan pengawasan kebencanaan dan destana, 100 warga dan aparatur mengikuti sosialisasi komunikasi, informasi, dan edukasi penanggulangan bencana.

Tabel IV.55
Capaian Pemenuhan Mutu pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana Tahun 2023

NO.	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Sarana prasarana penanggulangan bencana	100	90	90
2	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	1.266	1.266	100
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				95%

Untuk pencapaian mutu pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Tahun 2022 diperoleh capaian sebesar 95% di mana untuk seluruh pemenuhan mutu terealisasi hampir sesuai dengan target yang ditetapkan.

- d) Untuk indikator pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana di Tahun 2023 mengalami peningkatan jika di bandingkan dengan capaian di Tahun 2022 yang lalu. Peningkatan ini juga disebabkan oleh meningkatnya angka kejadian bencana yang ada di Kabupaten Bangka Barat dan sekitarnya baik yang merupakan bencana alam maupun non alam.

Jika dilihat dari segi data Indeks Resiko Bencana, Kabupaten Bangka Barat masih dalam kategori resiko tinggi di tahun 2023 yang mengalami penurunan nilai indeks kebencanaan dari 2022 yang lalu. Adapun untuk kejadian bencana yang melatarbelakangi hal ini yaitu terjadi bencana banjir dan puting beliung merupakan jenis bencana yang dapat dikatakan setiap tahun terjadi di Kabupaten Bangka Barat.

Tabel IV. 56
Indeks Resiko Bencana Indonesia Tahun 2023
Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	KABUPATEN/ KOTA	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bangka Barat	180,40	180,40	180,40	180,40	180,40	163,61
2	Bangka Selatan	180,40	180,40	180,40	180,40	179,12	179,37
3	Bangka	168,40	168,40	168,40	168,40	168,40	160,48
4	Belitung Timur	168,40	168,40	168,40	168,40	168,40	168,40
5	Belitung	168,40	168,40	168,40	168,40	148,48	158,53
6	Bangka Tengah	144,40	144,40	144,40	144,40	144,40	144,40
7	Pangkalpinang	120,40	120,40	120,40	120,40	120,40	114,48

Sumber : Buku Indeks Resiko Bencana Indonesia 2023

Dari table di atas diperoleh sebuah gambaran bahwa Kabupaten Bangka Barat tidak berada di posisi tertinggi untuk Indeks Resiko Bencana diantara Kabupaten/ Kota di wialyah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023. Namun jika di lihat pada tabel, posisi Kabupaten yang memiliki Indeks Resiko Bencana tertinggi terdapat pada Kabupaten Bangka Selatan yang kemudian di susul oleh Kabupaten Belitung Timur. Kabupaten Bangka Barat menduduki peringkat ke-tiga tertinggi untuk Indeks Resiko Bencana Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023.

Kondisi ini dapat dilihat bahwa untuk wilayah Kabupaten Bangka Barat jika ditinjau dari segi letak geografis memang berada di daerah yang rentan terjadi bencana. Adapun jenis-jenis bencana yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Bangka Barat meliputi banjir, puting beliung, abrasi dan kebakaran hutan. Dari data capaian kejadian bencana selama 2 tahun terakhir. Banjir yang terjadi di Kabupaten Bangka Barat diakibatkan oleh faktor alam dan kerusakan lingkungan. Kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Bangka Barat terletak di Ibukota Kecamatan Muntok khususnya di daerah Teluk Rubiah, Tanjung, dan Ibukota Kecamatan Parittiga yaitu Desa Puput. Sementara daerah pesisir pantai yang berpotensi mengalami bencana abrasi adalah Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga dan Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang. Berdasarkan data dari Indeks Resiko Bencana Daerah juga disampaikan bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk kedalam Provinsi yang memiliki potensi kelas tinggi untuk terjadinya bencana diantara 15 Provinsi lainnya. Di dalam buku ini pula telah digambarkan potensi bencana yang ada di masing-masing wilayah dapat dengan melakukan proyeksi atas kejadian bencana yang telah terjadi.

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, jumlah bencana yang terjadi di Kabupaten Bangka Barat selama kurun waktu 2022-2023 adal sebagai berikut :

Tabel IV. 57
Perbandingan Capaian Kejadian Bencana Tahun 2023 dan Tahun 2022
di Kabupaten Bangka Barat

NO	JENIS BENCANA	JUMLAH KORBAN (2022)	JUMLAH KORBAN (2023)
1	Banjir	1.087	1472
2	Gempa Bumi	0	0
3	Kebakaran Permukiman	9	0
4	Tanah longsor	0	0

NO	JENIS BENCANA	JUMLAH KORBAN (2022)	JUMLAH KORBAN (2023)
5	Gelombang Extrem dan Abrasi	0	0
6	Kekeringan	0	0
7	Angin kencang	449	0
8	Cuaca Extrem	0	203
	TOTAL	1.545 JIWA	1.675 JIWA

Sumber data : BPBD Kabupaten Bangka Barat

Dari table jumlah korban jiwa pasca bencana terjadi dapat terlihat bahwa bencana banjir merupakan bencana yang memiliki dampak cukup besar bagi masyarakat disetiap tahunnya. Untuk lokasi rawan bencana banjir biasanya terjadi di Kecamatan Muntok dan Kecamatan Parittiga pada beberapa titik yaitu Kelurahan Tanjung, Desa Puput serta Desa Belo laut. Adapun upaya pemerintah dalam menangani masalah banjir ini diantaranya telah dilakukan normalisasi sungai, kemudian pembuatan tanggul sungai serta upaya-upaya lain yang berkaitan dengan penanganan banjir. Memang tidak dipungkiri bahwa sampai dengan saat ini pengendalian bencana banjir di kawasan rawan banjir belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah pembangunan sarana dan prasarana struktural pengendali banjir belum sejalan dengan penanganan non struktural terhadap kerusakan DAS. Namun walaupun demikian Pemerintah daerah terus berkomitmen untuk mengatasi masalah banjir ini yang salah satunya melalui jalinan kerjasama dengan instansi vertikal serta stakeholder lainnya dalam pencegahan bencana banjir.

Penetapan bencana di Kabupaten Bangka barat dilakukan dengan SK bupati Bangka barat No 188.45/26.A/BPBD/2023 tentang Penetapan status tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Bangka barat tahun 2023 dengan lokasi kecamatan mentok kampong tanjung laut, kecamatan parit tiga desa puput serta kecamatan jebus desa sungai buluh.

Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana) berada di Halaman Kantor Camat Jebus berupa tenda komando dalam kaitannya tanggap darurat bencana b

Untuk pencapaian mutu Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Tahun 2022 diperoleh capaian sebesar 80,00% di mana dalam hal ini jika dibandingkan dengan capaian mutu di indikator lainnya di sub urusan bencana merupakan capaian mutu tertinggi. Namun tetap dalam hal ini untuk layanan AktIVasi sistem komando penanganan darurat bencana agar dapat menjadi perhatian di tahun-tahun berikutnya.

Tabel IV.58
Capaian Pemenuhan Mutu Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Tahun 2023

NO.	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	1	1	100

2	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	128	128	100
3	Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	1	1	100
4	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	0	0	0
5	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	17	17	100
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				100,00%

e) Sedangkan untuk Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran capaiannya mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 77,78% di tahun 2022 menjadi 100% di tahun 2023. Ini mengartikan bahwa seluruh kejadian kebakaran telah mendapatkan penyelamatan dan evakuasi oleh petugas walaupun dengan keterbatasan SDM, sarana dan prasarana serta jarak tempuh yang tidak memungkinkan untuk mencapai respon times. Dari total kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka Barat selama tahun 2023 terdapat 10 kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka Barat

Tabel IV.59
Data Kejadian Kebakaran Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

NO	TANGGAL KEJADIAN	LOKASI	JUMLAH KORBAN	RESPON TIME
1.	11 Januari 2023	Dusun Menggarau Desa Peradong Simpang Teritip	2 jiwa	11,7'
2.	10 Februari 2023	Kp. Jawa Mentok	1 jiwa	9,7
3.	2 Maret	Kp. Sawah Kelurahan Tanjung	1 jiwa	12,3'
4.	28 Maret	Kelurahan Sungai Daeng	4 jiwa	10'
5.	30 Juli	Keranggan , Mentok Asin	3 jiwa	12,8'
6.	1 Agustus	Senang Hati, Mentok	3 jiwa	5,7'
7.	11 September	Air Belo, Sinar Menumbing	7 jiwa	4,8'
8.	11 September	Desa Belo Laut Dusun IV	5 jiwa	8,3'
9.	19 September	Kampung Tanjung	3 jiwa	10,2
10.	1 Oktober	Kelapa	2 jiwa	9,8'
Rata-Rata Respon Times				9,06

Sumber : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab Bangka Barat

Untuk pencapaian mutu Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana kebakaran Tahun 2023 diperoleh capaian sebesar 100% yang artinya seluruh mutu layanan pemadaman kebakaran telah dipenuhi.

Tabel IV.60
 Capaian Pemenuhan Mutu Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran
 Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

NO.	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	10	10	100
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	3	3	100
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	2	2	100
4	Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	4	4	1000
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				100%

Tentunya didalam menunjang kinerja pemadaman kebakaran, telah ada Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan oleh Dinas terkait. Adapun ketiga SOP tersebut terdiri atas :

- a. SOP Pemadaman
- b) SOP Non Kebakaran
- c) SOP Penanggulangan Pemadaman oleh Balakar (barisan relawan kebakaran)

Kedepan akan dilakukan penambahan SOP urusan kebakaran meliputi SOP Penanganan kejadian non kebakaran sesuai dengan jenis penanganan

Saat ini untuk jumlah personil pemadam kebakaran sebanyak 24 orang yang terdiri dari 4 PNS dan 20 Non PNS. Dari 24 orang ini yang sudah mengikuti diklat sebanyak 6 orang yaitu diklat pemadam 1 yang diselenggarakan oleh Kemendagri pada tahun 2020 (sebanyak 1 orang), 2021 (sebanyak 1 orang) dan 2023 (sebanyak 4 orang).

Kemudian selain personil pemadam kebakaran terdapat personil lainnya yang membantu di dalam pelaksanaan pemadaman kebakaran di desa yang dikenal dengan nama Balakar (Barisan Relawan Kebakaran). Saat ini jumlah Balakar berjumlah 138 orang di beberapa Desa. Dan dari 60 desa kelurahan masih terdapat beberapa Desa yang belum terbentuk balakar dan di tahun 2024 direncanakan akan dibentuk balakar di 20 desa melalui bimtek balakar kepada 60 orang calon relawan.

Pelaksanaan SPM bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat kedepannya diharapkan dapat lebih meningkat, yang mana hal ini dikarenakan pada Tahun 2021 yang lalu adanya pembentukan organisasi perangkat daerah di bidang penanganan bencana yang juga dalam hal ini ditunjang dengan adanya Satuan Tugas Tanggap Bencana sebanyak dari 26 orang serta petugas pemadam kebakaran akan membuat pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pencegahan serta penanganan bencana di daerah dapat lebih optimal lagi.

4.5.4. Alokasi Anggaran

Pada Tahun 2023 jumlah belanja langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam rangkapenerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Pemerintah Daerah untuk bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.61
Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
V	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				7.746.786.000
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			5.187.434.000
					5.113.219.000
			Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.043.774.000
			Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa		218.065.000
			Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota		1.600.000
			Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia		3.834.680.000
			Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum		15.100.000
	Penegakan			74.215.000	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
		Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		2.900.000
			Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		71.315.000
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)				1.602.875.000
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			56.850.000
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	56.850.000
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			1.334.675.000
			Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	75.000.000
			Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota		4.275.000
			Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		237.050.000
			Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota		14.000.000
			Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota		913.600.000
			Penyusunan rencana kontijensi		75.000.000
			Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana		15.750.000
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
		Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	17.650.000
			Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota		143.050.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN	
			Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota		42.400.000	
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			8.250.000	
			Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota		4.350.000	
			Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana		3.900.000	
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)				956.477.000	
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			909.062.000	
				Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	26.230.000
				Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota		248.700.000
				Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran		525.740.000
				Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri		99.992.000
				Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri		8.400.000
			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			300.000
					Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	
		Investigasi Kejadian Kebakaran			1.600.000	
				Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran		1.600.000
			Pemberdayaan			45.515.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
		Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran		45.515.000

4.5.5. Dukungan Personil

Secara umum seluruh pegawai terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, sebagai berikut:

- a. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berjumlah 46 orang terdiri dari 31 orang PNS serta 15 orang PHL;
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah berjumlah 21 orang terdiri dari 14 orang PNS serta 7 orang PHL;
- c. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dengan jumlah personil 115 Orang merupakan PHL SatPol PP;
- d. Anggota Tim Reaksi Cepat dengan jumlah personil 20 orang PHL TRC ;dan
- e. Anggota Pemadam Kebakaran berjumlah 8 orang PHL dengan 2 orang yang telah memiliki aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam.

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pihak Pemerintah Daerah, yang diantaranya yaitu;

- a. Masih ada kegiatan yang belum diakomodir untuk mencapai target Standar Pelayanan Minimal dikarenakan keterbatasan anggaran ;
- b. Belum tersedianya dokumen –dokumen penanganan daerah rawan bencana secara menyeluruh yang terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu kajian resiko bencana, dokumen penanggulangan bencana serta dokumen rencana kontigensi dipergunakan dalam identifikasi perumahan dilokasi rawan bencana dan lahan – lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan;
- c. Masih terbatasnya sarana prasarana dan personil untuk mendukung pencapaian SPM di mana jika merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di setiap kecamatan harus ada personil Polisi Pamong Praja serta harus ada UPT Kebakaran di setiap kecamatan.

Adapun solusi yang harus dilakukan untuk menjawab semua permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Rumusan perencanaan OPD tekhnis pengampuh SPM agar dapat diprioritaskan pada pemenuhan program/ kegiatan/ sub kegiatan Stnadar Pelayanan Minimal;
- b. Agar dearah dapat segera dilakukan penyusunan ketiga dokumen tersebut dengan mempertimbangkan tingkat urgensi kebutuhan akan dokumen tersebut yang tentunya dengan melibatkan lintas sektor;

- c. Adanya peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pencapaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.6. BIDANG URUSAN SOSIAL

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Pemerintah.

Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.

4.6.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya telah dituangkan dalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang merupakan lanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.62
Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam dan diluar panti	100 %	Setiap Tahun
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara sebagai Anak Terlantar di Luar dan di Dalam Panti	100 %	Setiap Tahun
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar di Luar dan di Dalam Panti	100 %	Setiap Tahun
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususna Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Tuna Sosial Khususna Gelandangan dan Pengemis di Luar dan di Dalam Panti	100 %	Setiap Tahun

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang menjadi Korban Bencana yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 %	Setiap Tahun

4.6.3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial pada Tahun 2023, 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.63

Perbandingan Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023, 2022 dengan 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN 2021	SASARAN 2021	ANGKA 2021	CAPAIAN 2022	SASARAN 2022	ANGKA 2022	CAPAIAN 2023	SASARAN 2023	ANGKA 2023	TARGET CAPAIAN
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Terlantar diluar panti	816	816	100	389	389	100%	7	7	100%	100 %
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara sebagai Anak Terlantar di Luar Panti	11164	11164	100	751	751	100%	1	1	100%	100 %
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	5968	5968	100	965	965	100%	9	9	100%	100 %
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	4	4	100	1	1	100%	2	2	100%	100 %
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang menjadi Korban Bencana yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	3317	3.317	100	502	502	100%	568	568	100%	100 %
TOTAL						100			100		100	

Pada tahun 2022 capaian untuk masing-masing indikator SPM bidang sosial seluruhnya mencapai target (100%) dengan jumlah sasaran di masing-masing indikator mengalami penurunan jika di bandingkan dengan sasaran di tahun 2022 yang lalu. Total seluruh sasaran pada indikator SPM bidang sosial sub urusan rehabilitasi sosial sebanyak 19 jiwa dengan data yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dimiliki oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Tabel IV.64
Data Jumlah Warga Negara Penerima Bantuan Rehabilitasi Sosial Tahun 2023
Kabupaten Bangka Barat

NO	JENIS LAYANAN	BANTUAN												
		PERMAKAMAN	SANDANG	ALAT BANTU	LAYANAN KEDARURATAN	BIMBINGAN SOSIAL	BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA	FASILITASI PEMBUATAN NOMOR ADMINDUK	REUNIFIKASI KELUARGA	LAYANAN RUJUKA	PENELUSURAN KELUARGA	PENYEDIAAN PERBEKALAN KESEHATAN	PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR	LAYANAN DATA DAN PENGADUAN
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	7	1	1	7	2	2	2	1	2	6	5	5	7
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	9	2	1	9	3	8	1	1	2	2	9	3	9
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Sumber: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial kementerian Sosial Tahun 2022

Untuk penjelasan capaian masing-masing indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial adalah sebagai berikut:

- a) Capaian rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti di Tahun 2023 sama halnya dengan capaian Tahun 2022 yang lalu yaitu mencapai target 100%. Di tahun 2023 indikator ini mengalami penurunan jumlah sasaran dari 389 jiwa di tahun 2022 menjadi 7 jiwa di tahun 2023. yang, terdiri dari :

Tabel IV.65

**Warga Negara Disabilitas Terlantar Luar Panti
Penerima Bantuan Rehabilitasi Sosial Tahun 2023 Kabupaten Bangka Barat**

No	Nama	Lokasi
1.	Rina karina	Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Mentok
2.	Martin	Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Mentok
3.	Andre rahayu	Desa Belo Laut, Kecamatan Mentok
4.	Salami	Desa Belo Laut, Kecamatan Mentok
5.	Suklian	Desa Air Limau, Kecamatan Mentok
6.	Liu abun	Desa Air Gantang, Kecamatan Parittiga
7.	Yunista	Desa Cupat, Kecamatan Parittiga

- b) Untuk capaian sasaran indikator rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti capaian di Tahun 2023 sama halnya dengan capaian Tahun 2022 yang lalu yaitu mencapai target 100%. Di tahun 2023 indikator ini mengalami penurunan sasaran dimana dari 751 jiwa di tahun 2022 menjadi 1 jiwa di tahun 2023.

Tabel IV.66

**Warga Negara Anak Terlantar Luar Panti
Penerima Bantuan Rehabilitasi Sosial Tahun 2023 Kabupaten Bangka Barat**

No	Nama	Lokasi
1.	Aldo Ariya Saputra	Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Mentok

- c) Sama halnya dengan indicator lainnya, untuk indikator rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti untuk cakupan capaian di Tahun 2023 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan cakupan capaian Tahun 2022 hanya saja terdapat penurunan jumlah sasaran yaitu dari 965 jiwa menjadi 9 jiwa.

Tabel IV.67

**Warga Negara Disabilitas Terlantar Luar Panti
Penerima Bantuan Rehabilitasi Sosial Tahun 2023 Kabupaten Bangka Barat**

No	Nama	Lokasi
1.	Bahari	Desa Air Limau, Kecamatan Mentok
2.	Jakra	Desa Belo Laut, Kecamatan Mentok
3.	Poniman	Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Mentok

4.	Suwandi	Desa Rukam, Kecamatan Jebus
5.	Rokiba	Desa Kapit, Kecamatan Parittiga
6.	Chairul anam	Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Mentok
7.	Ahmad nasir	Desa Air Lintang, Kecamatan Tempilang
8.	Maliki	Desa Mayang, Kecamatan Simpang Teritip
9.	Sa'i	Desa Buyan Kelumbi, Kecamatan Tempilang

- d) Sedangkan untuk capaian rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti di Tahun 2022 sama seperti capaian 2021 yaitu 100% walaupun dari segi sasaran penerima pelayanan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti mengalami peningkatan yaitu dari 1 orang di Tahun 2022 menjadi 2 orang di Tahun 2023.

Tabel IV.68
Warga Negara Gelandangan dan Pengemis Luar Panti
Penerima Bantuan Rehabilitasi Sosial Tahun 2023 Kabupaten Bangka Barat

No	Nama	Lokasi
1.	Hafis Ramadhan	Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Mentok
2.	Ajis	Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mentok

- e) Untuk Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota juga sama seperti capaian tahun 2022 yaitu sebesar 100%.

4.6.4. Alokasi Anggaran

Pada Tahun 2021 jumlah belanja langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam rangkapenerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Daerah untuk bidang sosial dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.69
Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
VI	SOSIAL				1.847.335.000
1.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			1.813.585.000
			Penyediaan permakanaan	rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	1.487.500.000
			Penyediaan sandang	rehabilitasi sosial dasar anak terlantar	19.680.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
				di luar panti	
			Penyediaan alat bantu	rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	71.050.000
			Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	5.085.000
			Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial		57.050.000
			Pemberian layanan kedaruratan		39.050.000
			Pemberian layanan rujukan		134.170.000
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			33.750.000
			Penyediaan makanan	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	33.750.000

4.6.5. Dukungan Personil

Secara umum seluruh pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial terdiri dari pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat yang membidangi urusan sosial dan Rehabilitasi Sosial sebanyak 133 orang yang terdiri dari 3 Pekerja sosial, 74 PSM, 6 TKSK, 3 Penyuluh sosial, 2 Pendamping rehabsos, 35 Pendamping LKS, 10 Pendamping dirumah singgah (1 Kabid, 3 PNS, 5 PHL, dan 1 Peksos non PNS).

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

Adapun untuk permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial adalah sebagai berikut :

- Belum optimalnya kinerja pekerja sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikarenakan banyaknya tugas tambahan yang dibebankan kepada mereka di luar tugas fungsi pokoknya;
- Masih minimnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelayanan sosial.
- Masih tumpang tindihnya tugas dan fungsi pekerja sosial masyarakat di lapangan yang dianggap tidak hanya melayani urusan sosial saja, sehingga berdampak pada belum optimalnya penyediaan data kesejahteraan sosial.

Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, diperlukan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, antara lain:

- a. Melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan kemiskinan di masyarakat melalui program penanggulangan kemiskinan lintas sektor;
- b. Meningkatkan kuantitas sumber daya manusia sosial/ kader sosial berbasis masyarakat sehingga mampu melaksanakan tugas untuk mendukung tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM)bidang sosial.
- c. Adanya kebijakan untuk memprioritaskan pemenuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pencapaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.7. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka pencapaian kinerja Standar Pelayanan Minimal pada Tahun 2023, didukung program dan kegiatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh 7 (tujuh) perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang memiliki urusan pemenuhan bidang Standar Pelayanan Minimal. Secara keseluruhan, penggunaan anggaran untuk mencapai penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 telah dianggarkan sebesar Rp 110.667.508.302 yang bersumber dari Belanja Langsung APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022. Berdasarkan APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023, ditetapkan program pembangunan sebagai pendukung pencapaian pemenuhan Standar Pelayanan Dasar Masyarakat sebanyak 9 program yang berada pada 7 (tujuh) OPD yaitu Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.70

Alokasi Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN	REALISASI
I	PENDIDIKAN				95.181.490.000	91.942.382.453
1	PROGRAM SPM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	7.421.750.000	7.418.375.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN	REALISASI
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	6.213.150.000	5.747.650.000
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	140.000.000	126.902.973
			Pengelolaan Dana BOP PAUD		4.077.735.000	4.075.256.200
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan PAUD		102.750.000	89.221.000
			Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD		42.842.000	42.750.000
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		477.091.000	468.864.000
			Penambahan Ruang Kelas Baru		594.940.000	573.234.000
			Pembangunan Ruang Guru/Ka. Sekolah/TU		835.838.000	835.831.148
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		188.686.000	174.966.786
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah		487.786.000	458.296.460
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		4.692.676.000	4.265.182.585
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD		1.334.300.000	1.297.038.200
			Pengadaan Mebel Sekolah		33.900.000	33.900.000
			Pengadaan Perlengkapan Siswa (SD)		399.770.000	391.385.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN	REALISASI
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		1.031.890.000	1.025.999.474
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		16.318.450.000	16.093.340.000
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		23.842.683.599	23.305.258.551
			Pembangunan Laboratorium		4.100.980.000	3.674.511.400
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		51.287.000	50.728.200
			Perlengkapan Belajar Peserta Didik		60.020.000	59.423.500
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		22.600.000	22.010.300
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SD		161.600.000	161.600.000
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		10.104.256.401	10.071.242.800
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan		1.027.700.000	1.003.020.000
			Penambahan Ruang Kelas Baru		594.940.000	573.234.000
			Penambahan Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		105.000.000	104.196.000
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		161.600.000	161.600.000
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		1.258.038.000	891.363.400
			Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Utilitas Sekolah		2.265.681.000	1.892.921.776
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		760.000.000	662.133.700

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN	REALISASI
			Pengadaan Perlengkapan Siswa		135.410.000	135.400.000
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		204.650.000	204.650.000
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		132.090.000	129.355.000
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		5.679.650.000	5.604.540.000
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		14.750.000	12.535.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		105.000.000	104.466.000
II.	KESEHATAN				2.850.705.100	2.061.538.084
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	569.390.000	517.390.000
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	47.655.000	17.140.000
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	782.870.000	721.980.000
			Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pelayanan Kesehatan Balita	271.780.000	244.322.320
			Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	95.490.000	88.340.000
			Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	52.535.000	50.600.000
			Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	550.000	550.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN	REALISASI
			Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	197.836.000	190.806.200
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	63.199.900	48.619.900
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	669.279.200	84.800.000
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	100.120.000	96.989.664
				Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)		
III	PEKERJAAN UMUM				2.596.182.202	2.343.422.134
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	1.922.190.000	1.738.841.672
			Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	572.000.000	490.736.000	
			Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	5.540.000	5.540.000	
			Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	114.450.000	102.870.000	
			Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	1.230.200.000	1.139.695.672	
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam		Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	673.992.202	604.580.462

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN	REALISASI
	LIMBAH	Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi/ peningkatan/ perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman		69.775.000	16.630.100
			Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat		390.000.000	378.360.000
			Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		67.509.800	63.885.350
			Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja		146.707.402	145.705.012
IV	PERUMAHAN RAKYAT				445.010.000	239.056.626
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			67.050.000	43.670.000
			Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/ Kota	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak huni bagi Korban Bencana	29.050.000	17.010.000
			Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan		34.450.000	23.260.000
			Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani		1.775.000	1.750.000
			Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/ Kota		1.775.000	1.650.000
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	377.960.000	195.386.626

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN	REALISASI
			Rehabilitasi rumah bagi korban bencana		144.735.000	128.501.847
			Pembangunan rumah bagi korban bencana		233.225.000	66.884.779
V	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				7.746.786.000	7.457.747.197
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)				5.187.434.000	5.015.516.800
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			5.113.219.000	4.942.775.800
			Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.043.774.000	984.598.400
			Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa		218.065.000	171.476.400
			Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota		1.600.000	1.440.000
	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia			3.834.680.000	3.770.665.000	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN	REALISASI
			Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum		15.100.000	14.596.000
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			74.215.000	72.741.000
			Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		2.900.000	2.756.000
			Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		71.315.000	69.985.000
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)				1.602.875.000	1.516.668.197
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			56.850.000	49.598.000
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	56.850.000	49.598.000
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			1.334.675.000	1.279.676.877
			Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	75.000.000	71.400.000
			Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota		4.275.000	4.252.200
			Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		237.050.000	219.641.500
			Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota		14.000.000	4.028.177

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN	REALISASI
			Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/ Kota		913.600.000	893.205.000
			Penyusunan rencana kontijensi		75.000.000	71.400.000
			Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana		15.750.000	15.750.000
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			203.100.000	179.306.040
			Respon cepat darurat bencana Kabupaten/ Kota	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	17.650.000	7.728.505
			Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/ Kota		143.050.000	132.036.640
			Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/ Kota		42.400.000	39.540.895
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			8.250.000	8.087.280
			Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/ Kota		4.350.000	4.196.280
			Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana		3.900.000	3.891.000
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)				956.477.000	925.562.200
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			909.062.000	888.357.200
			Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	26.230.000	24.930.000
			Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota		248.700.000	246.907.600
			Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non		525.740.000	508.270.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN	REALISASI
			kebakaran			
			Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri		99.992.000	99.849.600
			Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri		8.400.000	8.400.000
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			300.000	0
			Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran		300.000	0
		Investigasi Kejadian Kebakaran			1.600.000	0
			Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran		1.600.000	0
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			45.515.000	37.205.000
			Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran		45.515.000	37.205.000
VI	SOSIAL				1.847.335.000	1.708.258.557
1.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	1.813.585.000	1.702.588.557
			Penyediaan permakanan	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Pant	1.487.500.000	1.486.834.200
			Penyediaan sandang	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	19.680.000	15.694.500

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN	REALISASI
			Penyediaan alat bantu	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	71.050.000	53.510.000
			Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		5.085.000	2.616.273
			Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial		57.050.000	54.596.300
			Pemberian layanan kedaruratan		39.050.000	26.010.000
			Pemberian layanan rujukan		134.170.000	63.327.284
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			33.750.000	5.670.000
			Penyediaan makanan	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	33.750.000	5.670.000
Total Anggaran					110.667.508.302	105.752.405.051

Dari total anggaran Program/ kegiatan yang mendukung dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023 dapat terlihat bahwa total anggaran di Tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan total anggaran di Tahun 2022 yang lalu yaitu Rp. 75.125.322.170,00 atau meningkat sekitar 47,31% dari total anggaran tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya komitmen daerah untuk menempat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagai prioritas daerah.

Dari capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di atas, dapat diperoleh hasil bahwa dari total jumlah indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebanyak 29 indikator terdapat 22 indikator yang telah memenuhi target atau dengan persentase sebesar 75,86%. Sedangkan 7 indikator lainnya belum memenuhi target Standar Pelayanan Minimal (SPM). Ini akan menjadi sebuah gambaran kedepan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk menindaklanjutinya dan menyusun strategi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Bangka Barat dalam arah kebijakan Daerah.

Adapun untuk perbandingan capaian SPM tahun 2023 di bandingkan dengan tahun 2022 pada masing masing urusan Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar dapat dilihat pada table berikut:

Tabel IV.71
Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 jika dibandingkan dengan Capaian Tahun 2022

No.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	REALISASI 2022	REALISASI 2023	STATUS
1	Urusan Pendidikan	100%	97,98%	Menurun
2	Urusan Kesehatan	93,10%	98,45%	Meningkat
3	Urusan Pekerjaan Umum	63,37%	100%	Meningkat
4	Urusan Perumahan	50,00%	100%	Meningkat
5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	58,38%	98,22%	Meningkat
6	Urusan Sosial	100%	99%	Menurun
CAPAIAN SPM		81,44%	98,96%	Meningkat

Dari 6 (enam) bidang urusan wajib pelayanan dasar terdapat 2 (dua) urusan yang capaiannya mengalami penurunan jika di bandingkan dengan capaian tahun lalu yaitu urusan pendidikan dan sosial. Kemudian terdapat 4 (empat) urusan yang capaiannya mengalami peningkatan dari capaian tahun yang lalu yaitu pada urusan kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Pada Tahun 2023, untuk capaian indikator Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar terealisasi sebesar 98,96% capaian tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 17,52%. Adapun peningkatan ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu adanya komitmen daerah beserta stakeholder untuk meningkatkan capaian kinerja SPM, kemudian optimalisasi penerapan 4 (empat) tahapan penerapan SPM di masing-masing OPD serta adanya koordinasi tim penerapan SPM daerah bersama OPD pengampuh SPM dalam penerapan SPM d daerah

Di samping itu pula, pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Tahun 2023 sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di karenakan adanya perubahan kebijakan penerapan SPM untuk dijadikan sebagai salah satu parameter perhitungan besaran dana transfer ke daerah dengan memperhatikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah masing-masing. Disamping itu pula di tahun 2023 pula untuk penghitungan capaian SPM sudah menggunakan Indeks Pencapaian SPM yang mana dalam hal ini dalam melihat keberhasilan penerapan SPM tidak hanya dilihat dari pemenuhan layanan kepada penerima sasaran saja namun juga harus dilihat dari segi pemenuhan mutu layanan. Sehingga dikarenakan adanya perubahan metode penghitungan ini secara otomatis membuat capaian SPM nilainya akan lebih rendah ketimbang dengan capaian SPM tahun lalu. Untuk itu dalam hal ini perlu adanya perbaikan serta peningkatan komitmen bersama untuk dapat memandang penerapan SPM di daerah menjadi sebuah hal yang strategis untuk di laksanakan.

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tingkat Daerah memang masih jauh dari kesempurnaan, dikarenakan masih banyak terdapat keterbatasan dan kekurangan yang dihadapi diantaranya sumber daya manusia, pengetahuan, komitmen, komunikasi serta ketersediaan anggaran. Namun setidaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat berusaha untuk melakukan pembenahan serta peningkatan kualitas capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Tentunya hal ini tidak terlepas dari dukungan serta peran Pemerintah Pusat

dalam upaya optimalisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah. Harapan Kami melalui Laporan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Bangka Barat ini menjadi sebuah pedoman dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di Daerah dengan tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi warga di Kabupaten Bangka Barat sepenuhnya yang nantinya akan membawa kepada pemenuhan pelayanan dasar masyarakat yang seutuhnya.

Berdasarkan hasil capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 di atas, tentunya telah memberikan gambaran kepada Pemerintah Daerah tentang capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) saat ini. Tentunya dari hasil tersebut, akan menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi dalam arah kebijakan Daerah untuk mengoptimalkan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Bangka Barat.

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi tahapan penerapan Standar Pelayanan Minimal meliputi pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan, penyusunan rencana pemenuhan serta pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar;
2. Peningkatan koordinasi serta komitmen pemangku kepentingan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah mulai dari Kepala Daerah hingga Perangkat Daerah yang terkait dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
3. Peningkatan dukungan kebijakan dan sumber penganggaran di luar APBD sebagai bentuk penguatan program dan kegiatan pemenuhan penyelenggaraan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM); serta
4. Penguatan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Daerah sebagai bentuk pengawalan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah, capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan serta laporan penerapan Standar Pelayanan Minimal. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini digunakan oleh Pemerintah Pusat dalam melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta penilaian terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dalam bentuk peringkat kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk kewajiban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Daerah sesuai pembagian kewenangan yang diberikan pada 32 urusan Pemerintahan daerah sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Saat ini peranan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi sangat strategis dikarenakan akan menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Pusat di dalam pemberian insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian insentif yang akan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian penyelenggaraan Pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun.

Berkaitan hal tersebut di atas, sejak adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah pada Pasal 120 disampaikan bahwa di dalam pembagian pagu DBH per daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dihitung berdasarkan pembobotan sebesar 90% berdasarkan persentase bagi hasil dan penetapan daerah penghasil serta 10% (sepuluh persen) berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah. Di dalam Pasal 130 ayat (1) juga disampaikan bahwa DAU digunakan untuk memenuhi pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan Daerah. Dari kedua ayat tersebut sangat jelas disampaikan bahwa Pemerintah Daerah harus memprioritaskan penggunaan Dana Transfer tersebut untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah yang salah satunya untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Pemberian insentif daerah tersebut dilakukan atas dasar capaian atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bentuk Indikator Kinerja Kunci. Indikator kinerja kunci yang digunakan pada LPPD merupakan alat untuk mengukur keberhasilan masing-masing kinerja urusan Pemerintahan Daerah yang dirumuskan oleh kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan. Indikator Kinerja Kunci ini digunakan oleh seluruh pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan masing-masing yang nantinya akan dilakukan pemeringkatan untuk melihat capaian kinerja masing-masing daerah. Sehingga dalam hal ini penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi salah satu hal yang strategis untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh

Pemerintah Daerah yang mulai diterapkan sejak tahapan perencanaan hingga evaluasi atas capaian penyelenggaraan pemerintah daerah oleh masing-masing OPD.

Disamping itu pula, LPPD tidak hanya digunakan sebagai pelaporan pemerintah daerah semata namun juga diharapkan dapat menjadi salah satu bahan bagi masing-masing Pemerintah Daerah di dalam pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah melalui indikator kinerja kunci pada urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Evaluasi kinerja atas penyelenggaraan pemerintah daerah ini sangat diperlukan dalam upaya peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan kepada masyarakat yang akan berdampak pada kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka peningkatan kualitas kinerja pemerintah daerah, sudah pasti diperlukan sebuah komitmen daerah untuk focus dan bersungguh-sungguh di dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah itu sendiri. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah tidak dapat dilakukan sendiri oleh kepala daerah namun perlu didukung oleh kinerja organisasi perangkat daerah serta stakeholder lain yang berkaitan dengan capaian kinerja masing-masing IKK tersebut. Kinerja organisasi yang baik akan mempercepat penyampaian data capaian kinerja perangkat daerah serta pencatatan dapat tersusun dengan baik yang mendukung terhadap pelaporan LPPD yang akurat dan tepat waktu. Kinerja organisasi yang baik akan mendukung evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai pengumpul data dan analisis data secara sistematis pelaksanaan kegiatan di masing-masing OPD.

Saat ini penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bangka Barat memang belum dapat optimal di seluruh bidang, namun Pemerintah Kabupaten Bangka Barat selalu berusaha untuk melakukan upaya perbaikan di dalam penyelenggaraan Pemerintahan melalui berbagai strategi dan kebijakan daerah yang mendukung peningkatan kualitas kinerja daerah. Peningkatan komitmen ini dilakukan sebagai salah satu bentuk kesungguhan dari Pemerintah Daerah di dalam perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan daerah melalui program dan kegiatan yang ada di masing-masing OPD. Di samping itu juga penguatan kualitas penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan capaian kinerja juga sangat dibutuhkan dikarenakan sebagai eviden dari capaian kinerja masing-masing IKK tersebut. Untuk itu perlu adanya penguatan komitmen masing-masing sektor untuk meningkatkan kualitas capaian masing-masing IKK di dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tersebut. Kinerja organisasi sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus-menerus untuk mencapai kebutuhan secara efektif.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat akan senantiasa melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penerapan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya, dalam rangka mengoptimalkan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, kami sangat mengharapkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh komponen penyelenggara pemerintahan dan masyarakat guna mengoptimalkan dan mendayagunakan seluruh potensi sumber daya yang ada.

Melalui laporan ini kami selaku pemerintah daerah berharap, agar Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini dapat menjadi bahan evaluasi dan penilaian kinerja oleh Pemerintah Pusat atas capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2023. Harapkan kedepan, hasil evaluasi kinerja yang telah dievaluasi dapat menjadi sebagai bahan perbaikan pelaksanaan kegiatan maupun dalam penetapan target kinerja sesuai dengan arah perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam upaya peningkatan manajemen kinerja yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik untuk kemajuan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat di masa yang akan datang. Dan perkenankan kami atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif mengisi pembangunan daerah di berbagai sektor pembangunan, dengan produktivitas dan komitmen yang tinggi demi mewujudkan kesejahteraan bersama.

Mentok, Maret 2024

BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN, SH

